DINAMIKA SOSIAL TINGKAT DESA

Memahami Perubahan, Pemberdayaan, dan Pembangunan Masyarakat Desa

Oleh: Slamet Riyadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku "Dinamika Sosial Tingkat Desa". Latar belakang penulisan buku ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap pemahaman yang sering kali parsial tentang desa. Desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai entitas hidup dengan sistem sosial yang kompleks dan dinamis. Memahami dinamika sosial di desa menjadi sangat krusial karena di dalamnya terdapat interaksi nilai, norma, kekuasaan, dan kepentingan yang terus bergerak, yang pada akhirnya menentukan arah perubahan dan kemajuan masyarakat itu sendiri.

Buku ini disusun untuk mengisi kekosongan literatur yang membahas secara komprehensif tentang denyut nadi kehidupan desa. Penulis percaya bahwa peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan adalah kunci utama. Oleh karena itu, pemahaman atas dinamika sosial menjadi fondasi dalam merancang intervensi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Harapan penulis, buku ini dapat menjadi teman diskusi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pembangunan, aparat desa, dan terutama masyarakat desa itu sendiri untuk bersama-sama merefleksikan dan memajukan kehidupan desa.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada para akademisi yang karya-karyanya menjadi referensi utama, kepada para pegiat desa yang pengalaman lapangannya sangat berharga, serta kepada keluarga dan rekan sejawat yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan desa di Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Bab I – Konsep Dasar Dinamika Sosial
Bab II – Struktur Sosial Masyarakat Desa
Bab III – Karakteristik Sosial Budaya Desa
Bab IV – Unsur-Unsur Dinamika Sosial
Bab V – Faktor-Faktor Perubahan Sosial di Desa

Bab VI – Peran Nilai dan Norma dalam Kehidupan Desa
Bab VII – Interaksi Sosial dalam Komunitas Desa
Bab VIII – Lembaga Sosial di Desa
Bab IX – Kepemimpinan Sosial di Desa
Bab X – Peran Pemerintah Desa dalam Dinamika Sosial
Bab XI – Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat
Bab XII – Peran Pemuda dalam Perubahan Sosial Desa
Bab XIII – Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa
Bab XIV – Modal Sosial dalam Pembangunan Desa
Bab XV – Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bab XVI – Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Bab XVII – Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa
Bab XVIII – Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Bab XIX – Konflik Sosial di Desa dan Cara Penyelesaiannya
Bab XX – Transformasi Sosial di Era Modernisasi
Bab XXI – Pengaruh Teknologi dan Digitalisasi di Desa
Bab XXII – Ekonomi Sosial dan Kemandirian Desa
Bab XXIII – Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial
Bab XXIV – Manfaat Dinamika Sosial bagi Kemajuan Desa
Bab XXV – Dampak Perubahan Sosial terhadap Kehidupan Desa
Bab XXVI – Tantangan Pembangunan Sosial di Desa
Bab XXVII – Strategi Penguatan Ketahanan Sosial Desa
Bab XXVIII – Sinergi Stakeholder dalam Pembangunan Desa
Bab XXIX – Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berkelanjutan
Bab XXX – Masa Depan Dinamika Sosial Desa
Penutup
Daftar Pustaka

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa merupakan unit sosial terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun memiliki kompleksitas kehidupan masyarakat yang sangat dinamis. Sebagai sebuah komunitas, desa bukanlah entitas yang statis; ia terus bergerak, berubah, dan beradaptasi dengan berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Dinamika ini mencakup perubahan dalam struktur sosial, pola interaksi, sistem nilai, serta cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Memahami dinamika sosial di tingkat desa menjadi penting karena desa sering kali dianggap sebagai benteng terakhir nilai-nilai kearifan lokal di tengah gempuran modernisasi. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, yang tentu saja membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial yang terjadi .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, buku ini mencoba menjawab beberapa rumusan masalah utama. *Pertama*, bagaimana dinamika sosial terjadi di masyarakat desa? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial di desa, baik yang bersifat internal maupun eksternal? *Ketiga*, bagaimana peran berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan, dalam pembangunan desa yang responsif terhadap dinamika sosial?

3. Tujuan Penulisan

Secara spesifik, penulisan buku ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan konsep dasar dinamika sosial dalam konteks masyarakat desa; (2) Mengidentifikasi unsur-unsur dan faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial di desa; (3) Mengkaji secara mendalam peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola dinamika sosial untuk kemajuan bersama; serta (4) Memberikan gambaran tentang tantangan dan strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

4. Manfaat Penulisan

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan. Pertama, sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mendalami sosiologi pedesaan, pembangunan masyarakat, dan ilmu pemerintahan. Kedua, sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat desa dan pegiat pemberdayaan untuk lebih memahami potensi dan tantangan di lingkungannya. Ketiga, sebagai pedoman praktis bagi pemerintah desa dan perangkatnya dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

5. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini difokuskan pada dinamika sosial masyarakat desa dari berbagai aspek, meliputi aspek sosial (struktur, interaksi, konflik), ekonomi (mata pencaharian, BUMDes, UMKM), budaya (nilai, norma, kearifan lokal), dan pemerintahan (tata kelola, kebijakan desa). Pembahasan dilakukan dengan perspektif sosiologis untuk memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif.

6. Sistematika Penulisan

Buku ini disusun dalam tiga puluh bab yang saling terkait. Dimulai dari pengenalan konsep dasar, kemudian bergerak ke pembahasan elemen-elemen pembentuk dinamika sosial, dilanjutkan dengan peran aktor-aktor kunci, dan diakhiri dengan analisis tentang perubahan, tantangan, serta masa depan desa. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dengan contoh-contoh konkret dari kehidupan masyarakat desa.

BAB I
KONSEP DASAR DINAMIKA SOSIAL

A. PENGANTAR: MEMAHAMI DENYUT NADI MASYARAKAT DESA

Setiap masyarakat, termasuk masyarakat desa, memiliki kehidupan yang tidak pernah statis. Ia bergerak, berubah, dan berkembang mengikuti ritme waktu serta pengaruh dari dalam dan luar dirinya. Gerak kehidupan masyarakat inilah yang dalam kajian sosiologi disebut sebagai dinamika sosial. Memahami dinamika sosial ibarat memahami denyut nadi kehidupan masyarakat—seberapa cepat ia berdetak, apa yang mempengaruhi detaknya, dan ke arah mana aliran darah kehidupan itu mengalir.

Masyarakat desa, dengan segala keunikan dan kompleksitasnya, menawarkan laboratorium sosial yang kaya untuk mempelajari dinamika tersebut. Di desa, kita dapat menyaksikan bagaimana tradisi berhadapan dengan modernitas, bagaimana nilai-nilai lama bertarung dengan ide-ide baru, dan bagaimana warga masyarakat bernegosiasi dengan perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Dari gotong royong yang mulai tergerus zaman, hingga munculnya kelompok-kelompok usaha bersama yang adaptif; dari musyawarah desa yang kental dengan nilai kebersamaan, hingga tensi politik yang kadang memanas menjelang pemilihan kepala desa—semua itu adalah wajah dari dinamika sosial.

Bab pertama ini akan membangun fondasi pemahaman tentang apa sebenarnya dinamika sosial itu, bagaimana para ahli memandangnya, apa saja unsur-unsur yang membentuknya, serta bagaimana karakteristiknya dalam konteks spesifik masyarakat desa di Indonesia. Pemahaman yang kokoh tentang konsep dasar ini akan menjadi bekal berharga untuk menjelajahi bab-bab selanjutnya yang membahas berbagai aspek kehidupan desa secara lebih mendalam.

B. PENGERTIAN DINAMIKA SOSIAL: TELAAH TERMINOLOGIS DAN KONSEPTUAL

1. Definisi Etimologis

Secara etimologis, istilah "dinamika sosial" berasal dari dua kata: "dinamika" dan "sosial". Kata "dinamika" berasal dari bahasa Yunani "dynamikos" yang berarti kekuatan, daya, atau tenaga. Dalam perkembangannya, dinamika diartikan sebagai sesuatu yang bergerak, berubah, aktif, dan tidak statis. Sementara kata "sosial" berasal dari bahasa Latin "socius" yang berarti kawan, teman, atau masyarakat. Sosial merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, secara harfiah, dinamika sosial dapat diartikan sebagai gerakan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan bersama manusia. Ia menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah kumpulan individu yang diam dan beku, melainkan entitas yang hidup, bergerak, dan terus berubah seiring waktu.

2. Definisi Terminologis Menurut Para Ahli

Para sosiolog telah memberikan definisi yang beragam tentang dinamika sosial, masing-masing dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan perspektif teoretis yang mereka anut.

Kimball Young mendefinisikan dinamika sosial sebagai perubahan-perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ia menekankan bahwa dinamika sosial mencakup modifikasi-modifikasi dalam cara-cara berpikir, merasa, dan bertindak yang dihasilkan dari interaksi antar manusia. Definisi ini penting karena menyoroti aspek subjektif dari dinamika sosial—bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada struktur lahiriah masyarakat, tetapi juga pada cara pandang dan nilai-nilai yang dianut warganya.

Roucek dan Warren dalam bukunya "Sociology: An Introduction" mendefinisikan dinamika sosial sebagai studi tentang kekuatan-kekuatan yang bekerja dalam masyarakat yang menghasilkan perubahan sosial. Mereka melihat dinamika sosial sebagai analisis tentang proses-proses sosial yang terus menerus terjadi, yang meliputi interaksi, kompetisi, konflik, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Definisi ini mengarahkan perhatian kita pada proses-proses sosial yang menjadi mesin penggerak perubahan.

Soerjono Soekanto, sosiolog terkemuka Indonesia, mendefinisikan dinamika sosial sebagai perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat. Menurutnya, dinamika sosial mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan dalam struktur sosial, pola perilaku, sistem nilai, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ia menekankan bahwa dinamika sosial adalah fenomena yang universal dan selalu ada dalam setiap masyarakat, baik masyarakat sederhana maupun masyarakat kompleks.

Selo Soemardjan mendefinisikan dinamika sosial sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Definisi ini menyoroti pentingnya lembaga kemasyarakatan sebagai tempat bersemayamnya nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku warga masyarakat.

William F. Ogburn memberikan definisi yang unik dengan konsep "cultural lag" (ketimpangan budaya). Menurutnya, dinamika sosial terjadi ketika perubahan pada unsur-unsur kebudayaan material (teknologi, infrastruktur) berlangsung lebih cepat daripada perubahan pada unsur-unsur kebudayaan non-material (nilai, norma, adat istiadat). Ketimpangan ini menciptakan ketegangan dan mendorong terjadinya penyesuaian-penyesuaian dalam masyarakat. Konsep ini sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat desa yang kini berhadapan dengan teknologi modern yang masuk begitu cepat.

3. Sintesis Pengertian Dinamika Sosial

Dari berbagai definisi di atas, dapat disintesiskan bahwa dinamika sosial adalah serangkaian perubahan, gerakan, dan proses yang terjadi dalam struktur dan pola hubungan sosial masyarakat sebagai akibat dari interaksi antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan internal dan eksternal, serta berlangsung dalam rentang waktu tertentu.

Dalam konteks masyarakat desa, dinamika sosial mencakup berbagai aspek kehidupan: bagaimana petani mengadopsi teknologi pertanian baru, bagaimana remaja desa merespons masuknya media sosial, bagaimana lembaga adat beradaptasi dengan regulasi negara, bagaimana pola gotong royong bertransformasi di tengah ekonomi uang, dan bagaimana warga desa memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling mereka.

C. UNSUR-UNSUR DINAMIKA SOSIAL

Dinamika sosial tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia melibatkan berbagai unsur yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Memahami unsur-unsur ini penting untuk dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana dinamika sosial bekerja dalam masyarakat desa.

1. Individu sebagai Aktor

Individu adalah aktor utama dalam dinamika sosial. Setiap individu membawa aspirasi, kebutuhan, kreativitas, dan kepentingannya sendiri. Ketika individu-individu berinteraksi, mereka saling mempengaruhi dan bersama-sama menciptakan realitas sosial baru. Dalam masyarakat desa, peran individu-individu tertentu seperti kepala desa, tokoh adat, guru ngaji, atau pemuda kreatif seringkali menjadi katalisator perubahan.

Seorang petani yang berhasil menerapkan metode pertanian organik, misalnya, dapat menginspirasi petani lain untuk mengikutinya, sehingga terjadi perubahan dalam praktik pertanian di seluruh desa. Seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha kecil-kecilan dari rumah dapat mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan perempuan desa. Seorang pemuda yang belajar membuat konten digital dapat membuka peluang ekonomi baru bagi desanya melalui promosi wisata atau produk lokal.

2. Kelompok Sosial sebagai Wadah Interaksi

Individu-individu cenderung berhimpun dalam kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesamaan kepentingan, latar belakang, atau tujuan. Kelompok sosial menjadi wadah di mana interaksi berlangsung lebih intensif dan terstruktur. Di desa, kita dapat menemukan beragam kelompok sosial: kelompok tani, kelompok pengajian, kelompok arisan, karang taruna, PKK, kelompok sadar wisata, dan lain sebagainya.

Setiap kelompok memiliki dinamika internalnya sendiri: bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka menyelesaikan konflik, bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan. Interaksi antar kelompok juga menciptakan dinamika tersendiri: kerjasama, kompetisi, atau bahkan konflik. Misalnya, kelompok tani mungkin bekerjasama dengan kelompok PKK dalam program ketahanan pangan, atau bersaing dengan kelompok tani dari desa tetangga dalam memperoleh bantuan bibit dari pemerintah.

3. Lembaga Sosial sebagai Struktur Pengatur

Lembaga sosial adalah sistem norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Lembaga-lembaga ini memberikan struktur dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Di desa, terdapat berbagai lembaga sosial seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren), lembaga ekonomi (pasar desa, koperasi, BUMDes), lembaga agama (masjid, gereja, pura), lembaga adat, dan lembaga pemerintahan desa.

Lembaga-lembaga ini tidak statis; mereka dapat berubah dan beradaptasi seiring waktu. Lembaga adat, misalnya, mungkin harus menyesuaikan beberapa aturannya agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. BUMDes sebagai lembaga ekonomi baru harus membangun struktur dan mekanisme kerjanya

dari nol. Perubahan dalam lembaga-lembaga ini akan mempengaruhi pola perilaku warga masyarakat dan pada gilirannya menciptakan dinamika sosial baru.

4. Nilai dan Norma sebagai Pedoman Perilaku

Nilai adalah konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, benar, dan indah dalam masyarakat. Norma adalah aturan-aturan konkret yang menjadi pedoman perilaku. Nilai dan norma menjadi kompas yang mengarahkan tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Di desa, nilai-nilai seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan kerukunan antar warga masih sangat kuat, meskipun mulai terkikis oleh arus modernisasi.

Dinamika sosial terjadi ketika terjadi pergeseran nilai dan norma. Ketika nilai gotong royong mulai luntur dan digantikan oleh nilai individualisme, pola interaksi sosial berubah. Ketika norma tentang peran perempuan yang hanya di rumah mulai dipertanyakan, terbuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih luas dalam kehidupan publik. Perubahan nilai dan norma ini seringkali menjadi sumber ketegangan antara generasi tua yang memegang teguh tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka pada ide-ide baru.

5. Interaksi Sosial sebagai Proses

Interaksi sosial adalah proses di mana individu dan kelompok saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Melalui interaksi sosiallah dinamika sosial terjadi dan berlangsung. Bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi kerjasama, persaingan, konflik, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.

Di desa, interaksi sosial berlangsung sangat intensif karena warga saling mengenal satu sama lain. Setiap pertemuan, baik formal seperti musyawarah desa maupun informal seperti ngobrol di warung kopi, adalah arena di mana gagasan-gagasan dipertukarkan, kesepakatan dibangun, dan kadang konflik dipicu. Intensitas interaksi ini membuat dinamika sosial di desa berlangsung dengan ritme yang khas—perubahan mungkin tidak secepat di kota, tetapi ketika terjadi, dampaknya terasa lebih merata karena jaringan sosial yang erat.

6. Perubahan Sosial sebagai Akibat

Perubahan sosial adalah akibat atau hasil dari bekerjanya unsur-unsur dinamika sosial. Ia merupakan manifestasi nyata dari dinamika yang terjadi. Perubahan sosial dapat berupa perubahan dalam struktur masyarakat, pola perilaku, sistem nilai, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Di desa, perubahan sosial dapat diamati dalam berbagai bentuk: dari perubahan mata pencaharian (dari petani menjadi buruh pabrik), perubahan pola konsumsi (dari konsumsi produk lokal ke produk pabrikan), perubahan cara berpakaian, perubahan dalam upacara adat yang semakin sederhana, hingga perubahan dalam cara masyarakat memandang pendidikan dan kesehatan.

D. TEORI-TEORI DINAMIKA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KLASIK

Memahami dinamika sosial tidak lengkap tanpa menelaah pemikiran para founding fathers sosiologi yang telah meletakkan dasar-dasar analisis tentang perubahan masyarakat. Teori-teori klasik ini masih relevan hingga kini untuk memahami berbagai fenomena sosial, termasuk yang terjadi di masyarakat desa.

1. Teori Evolusi Sosial: Herbert Spencer

Herbert Spencer (1820-1903) adalah sosiolog Inggris yang terkenal dengan teorinya tentang evolusi sosial. Terinspirasi oleh teori evolusi biologis Charles Darwin, Spencer memandang masyarakat sebagai organisme hidup yang berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks melalui proses evolusi.

Menurut Spencer, masyarakat berkembang melalui tahap-tahap evolusioner dari masyarakat primitif (sederhana) menuju masyarakat militer (dengan struktur yang lebih kompleks) dan akhirnya mencapai masyarakat industri (dengan diferensiasi yang tinggi). Proses ini terjadi secara alamiah sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan tekanan populasi.

Dalam konteks masyarakat desa, teori Spencer dapat digunakan untuk memahami bagaimana desa berkembang dari komunitas agraris sederhana dengan struktur sosial yang homogen menuju komunitas yang lebih kompleks dengan diferensiasi pekerjaan dan stratifikasi sosial yang semakin beragam. Masuknya industri ke pedesaan, misalnya, menciptakan kelas buruh baru yang sebelumnya tidak ada. Berkembangnya sektor jasa di desa wisata menciptakan profesi-profesi baru seperti pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku ekonomi kreatif.

Namun, teori Spencer juga mendapat kritik karena cenderung deterministik dan mengabaikan peran agensi manusia dalam perubahan sosial. Tidak semua desa mengalami evolusi linier seperti yang digambarkan Spencer; ada desa yang stagnan, ada yang mengalami kemunduran, dan ada yang melompat maju karena faktor-faktor tertentu.

2. Teori Konflik Sosial: Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) adalah pemikir Jerman yang memberikan pengaruh sangat besar dalam kajian tentang perubahan sosial. Berbeda dengan Spencer yang melihat harmoni dan evolusi, Marx melihat konflik sebagai motor utama perubahan sosial.

Menurut Marx, sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam setiap zaman, masyarakat terbagi menjadi dua kelas yang saling bertentangan kepentingannya: kelas pemilik alat produksi (borjuis) dan kelas pekerja (proletar). Konflik antara kedua kelas ini, menurut Marx, akan memuncak dalam revolusi yang mengubah total struktur masyarakat.

Dalam konteks masyarakat desa Indonesia, teori konflik Marx dapat digunakan untuk menganalisis ketegangan antara pemilik lahan luas (tuan tanah) dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan. Konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah, di mana petani kecil berhadapan dengan perusahaan perkebunan besar, juga dapat dibaca melalui lensa teori konflik. Selain itu, pertentangan antara kelompok yang diuntungkan dan dirugikan oleh suatu kebijakan pembangunan desa juga merupakan manifestasi dari konflik kepentingan.

Namun, kritik terhadap teori Marx adalah bahwa ia terlalu menekankan pada konflik kelas dan mengabaikan bentuk-bentuk konflik lain (misalnya konflik etnis, agama, atau generasi). Dalam realitas masyarakat desa, konflik seringkali bersifat multidimensi dan tidak semata-mata konflik kelas.

3. Teori Tindakan Sosial: Max Weber

Max Weber (1864-1920) adalah sosiolog Jerman yang menawarkan perspektif berbeda dalam melihat perubahan sosial. Jika Marx menekankan struktur ekonomi, Weber menekankan pentingnya makna dan motivasi di balik tindakan sosial individu.

Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial secara interpretatif. Ia membedakan empat tipe tindakan sosial: (1) tindakan rasional instrumental (didasarkan pada pertimbangan efisiensi mencapai tujuan), (2) tindakan rasional nilai (didasarkan pada keyakinan akan nilai-nilai tertentu), (3) tindakan afektif (didasarkan pada emosi dan perasaan), dan (4) tindakan tradisional (didasarkan pada kebiasaan yang mengakar).

Dalam karyanya yang terkenal, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism", Weber menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan (etika Protestan) mendorong lahirnya kapitalisme modern. Ini adalah argumen bahwa perubahan sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor ide dan nilai.

Dalam konteks masyarakat desa, teori Weber sangat relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan agama mempengaruhi perilaku ekonomi warga. Mengapa di desa tertentu masyarakatnya lebih "kapitalistis" sementara di desa lain masih sangat "tradisional" dalam berdagang? Mengapa petani di suatu daerah cepat mengadopsi teknologi baru sementara di daerah lain resisten? Jawabannya mungkin terletak pada sistem nilai yang dianut masyarakat. Teori Weber juga membantu kita memahami bahwa di balik setiap tindakan sosial—termasuk keputusan untuk bermigrasi, menyekolahkan anak, atau bergabung dengan kelompok tani—ada makna dan motivasi yang perlu dipahami.

4. Teori Ketimpangan Budaya: William F. Ogburn

William F. Ogburn (1886-1959) adalah sosiolog Amerika yang memberikan kontribusi penting dalam studi perubahan sosial melalui konsep "cultural lag" (ketimpangan budaya). Menurut Ogburn, perubahan sosial terjadi karena adanya perbedaan kecepatan perubahan antara unsur-unsur kebudayaan material dan non-material.

Kebudayaan material, menurut Ogburn, adalah unsur-unsur budaya yang bersifat fisik dan konkret, seperti teknologi, infrastruktur, dan peralatan. Sementara kebudayaan non-material adalah unsur-unsur budaya yang abstrak, seperti nilai, norma, adat istiadat, dan kepercayaan. Ogburn berargumen bahwa kebudayaan material cenderung berubah lebih cepat daripada kebudayaan non-material. Ketimpangan kecepatan inilah yang menciptakan ketegangan dan masalah sosial.

Konsep cultural lag sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat desa kontemporer. Masuknya internet dan smartphone (kebudayaan material) ke desa-desa terjadi begitu cepat, namun nilai, norma, dan etika dalam bermedia sosial (kebudayaan non-material) belum berkembang secepat itu. Akibatnya, muncul masalah-masalah baru seperti penyebaran hoax, penipuan online, atau lunturnya sopan santun

dalam berkomunikasi. Demikian pula, masuknya teknologi pertanian modern seringkali tidak diimbangi dengan perubahan nilai tentang kelestarian lingkungan, sehingga terjadi eksploitasi lahan yang berlebihan.

5. Teori Fungsionalisme Struktural: Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979) adalah sosiolog Amerika yang mengembangkan teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan masing-masing memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan.

Parsons mengembangkan skema AGIL untuk menganalisis fungsi-fungsi yang harus dipenuhi setiap sistem sosial: Adaptation (adaptasi terhadap lingkungan), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi antar bagian), dan Latency (pemeliharaan pola). Menurut Parsons, perubahan sosial terjadi ketika sistem mengalami ketidakseimbangan (disekuilibrium) dan bagian-bagian sistem melakukan penyesuaian untuk mencapai keseimbangan baru.

Dalam konteks desa, teori Parsons membantu kita melihat bagaimana berbagai institusi—keluarga, sekolah, pemerintah desa, pasar, lembaga adat—bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Ketika salah satu institusi mengalami perubahan (misalnya, pemerintah desa mendapatkan kewenangan baru dari UU Desa), institusi-institusi lain harus menyesuaikan diri. Jika penyesuaian ini berhasil, keseimbangan baru tercapai. Jika gagal, konflik dan disorganisasi sosial dapat terjadi.

Kritik terhadap teori Parsons adalah bahwa ia terlalu menekankan pada keseimbangan dan harmoni, sehingga kurang mampu menjelaskan konflik dan perubahan radikal. Namun, sebagai alat analisis, kerangka AGIL tetap berguna untuk memahami dinamika antar institusi di desa.

E. KARAKTERISTIK PERUBAHAN SOSIAL DI DESA

Perubahan sosial di desa memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan perubahan sosial di perkotaan. Memahami karakteristik ini penting untuk dapat merancang intervensi pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal.

1. Perubahan Evolusioner sebagai Pola Dominan

Pada umumnya, perubahan sosial di desa berlangsung secara evolusioner—perlahan, bertahap, dan dalam waktu yang relatif panjang. Masyarakat desa cenderung berhati-hati dalam menerima hal-hal baru. Mereka perlu waktu untuk mengamati, mempertimbangkan, dan berdiskusi sebelum memutuskan untuk mengadopsi suatu inovasi. Proses ini mencerminkan kearifan lokal dalam menyaring pengaruh luar agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Misalnya, masuknya teknologi pertanian baru seperti penggunaan traktor atau pupuk kimia tidak serta-merta diterima semua petani. Awalnya, hanya beberapa petani "perintis" yang berani mencoba. Jika berhasil, barulah petani lain mengikuti secara bertahap. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Demikian pula dengan perubahan pola konsumsi, gaya berpakaian, atau cara mendidik anak—semuanya berlangsung secara perlahan.

Namun, sifat evolusioner ini bukan berarti desa anti-perubahan. Masyarakat desa justru sangat adaptif, hanya saja proses adaptasinya dilakukan dengan hati-hati dan melalui mekanisme penyaringan internal yang kuat.

2. Potensi Perubahan Revolusioner Akibat Guncangan Eksternal

Meskipun pola dominannya evolusioner, dalam situasi tertentu desa dapat mengalami perubahan yang sangat cepat dan radikal—bersifat revolusioner. Hal ini biasanya terjadi ketika ada guncangan eksternal yang dahsyat yang memaksa masyarakat untuk berubah cepat.

Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau banjir bandang dapat mengubah total wajah desa dalam waktu singkat. Masyarakat yang kehilangan rumah dan lahan pertaniannya terpaksa mencari mata pencaharian baru, membangun kembali pemukiman dengan tata ruang yang berbeda, dan mungkin mengadopsi teknologi baru dalam proses rekonstruksi.

Masuknya investasi skala besar, seperti pembangunan pabrik atau tambang di wilayah desa, juga dapat memicu perubahan revolusioner. Dalam waktu singkat, struktur mata pencaharian berubah drastis dari agraris menjadi industrial. Pola interaksi sosial berubah karena masuknya pendatang baru. Nilai-nilai dan norma juga terguncang karena berhadapan dengan budaya industri yang berbeda.

Kebijakan pemerintah yang membawa perubahan fundamental, seperti UU Desa tahun 2014 yang memberikan otonomi dan sumber keuangan besar kepada desa, juga dapat dikategorikan sebagai pemicu perubahan revolusioner. Desa yang tadinya sangat tergantung pada pemerintah kabupaten/kota kini harus mengelola urusannya sendiri, termasuk mengelola dana desa yang jumlahnya signifikan.

3. Perubahan yang Dipengaruhi dan Memengaruhi Lingkungan Sekitar

Desa tidak hidup dalam isolasi. Ia adalah bagian dari sistem yang lebih luas yang mencakup desa-desa tetangga, kota kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan global. Oleh karena itu, perubahan di desa selalu dipengaruhi oleh dan memengaruhi lingkungan sekitarnya.

Ketika sebuah desa berhasil mengembangkan wisata desa yang menarik, desa-desa tetangga akan terpengaruh—baik secara positif (mendapat limpahan wisatawan) maupun negatif (kehilangan wisatawan karena kalah bersaing). Ketika sebuah desa memelopori praktik pertanian organik, desa-desa lain mungkin akan mengadopsi praktik serupa. Ketika terjadi konflik di suatu desa, dampaknya bisa meluas ke desa-desa sekitar karena jaringan kekerabatan yang saling terkait.

Demikian pula, desa dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Kebijakan pemerintah kabupaten tentang alokasi dana desa, fluktuasi harga komoditas pertanian di pasar global, tren wisata di media sosial, atau bahkan perubahan iklim global—semua itu mempengaruhi dinamika di tingkat desa.

4. Perubahan yang Bersifat Spiral (Tidak Selalu Linier)

Perubahan sosial di desa tidak selalu berlangsung linier dari titik A ke titik B. Seringkali ia bersifat spiral—ada kemajuan, lalu kemunduran, lalu kemajuan lagi, atau ada gerakan maju namun dengan putaran-putaran yang membawa kembali ke nilai-nilai lama dalam bentuk yang baru.

Misalnya, semangat gotong royong yang mulai luntur akibat modernisasi, tiba-tiba bangkit kembali ketika masyarakat menghadapi musibah bersama seperti bencana alam atau wabah penyakit. Namun, gotong royong yang bangkit kembali ini mungkin berbeda bentuknya dari gotong royong tradisional—ia mungkin lebih terorganisir, melibatkan teknologi (misalnya penggalangan dana online), atau memiliki tujuan yang lebih spesifik.

Demikian pula dengan nilai-nilai tradisional. Di era globalisasi, banyak nilai tradisional yang terkikis. Namun, di saat yang sama, muncul gerakan-gerakan untuk merevitalisasi dan mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut. Upacara adat yang sempat ditinggalkan, kini dihidupkan kembali sebagai daya tarik wisata. Bahasa daerah yang mulai punah, diajarkan lagi di sekolah-sekolah melalui muatan lokal.

5. Perubahan yang Bersifat Multidimensi

Perubahan sosial di desa tidak pernah bersifat satu dimensi. Ketika terjadi perubahan di bidang ekonomi, ia akan merembet ke bidang-bidang lain. Ketika sebuah desa mengembangkan pariwisata (perubahan ekonomi), konsekuensinya adalah perubahan dalam pola interaksi sosial (masyarakat berinteraksi dengan wisatawan), perubahan dalam struktur sosial (munculnya profesi-profesi baru), perubahan dalam nilai dan norma (cara berpakaian, pergaulan), bahkan perubahan dalam tata ruang desa.

Memahami sifat multidimensi ini penting agar kita tidak melihat perubahan secara parsial. Program pembangunan yang hanya fokus pada satu aspek tanpa mempertimbangkan aspek lainnya berpotensi menimbulkan masalah baru. Misalnya, program pengembangan wisata desa yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tanpa memperhatikan kesiapan sosial budaya masyarakat, bisa memicu konflik dan resistensi.

6. Adanya Mekanisme Seleksi dan Adaptasi Lokal

Masyarakat desa memiliki mekanisme internal untuk menyaring dan mengadaptasi pengaruh-pengaruh luar. Tidak semua hal baru diterima begitu saja. Masyarakat akan menilai, memilih, dan memodifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal.

Mekanisme seleksi ini bisa bersifat formal maupun informal. Secara formal, bisa melalui musyawarah desa di mana warga bersama-sama memutuskan program atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Secara informal, bisa melalui pengaruh tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Jika tokoh masyarakat tidak merestui suatu inovasi, kemungkinan besar inovasi itu akan ditolak warga.

Proses adaptasi juga menghasilkan bentuk-bentuk hibrida (campuran) yang unik. Arsitektur rumah di desa, misalnya, mungkin menggabungkan desain modern dengan ornamen tradisional. Musik dangdut adalah contoh bagaimana musik modern berakulturasi dengan musik tradisional Melayu. Praktik keagamaan di desa seringkali merupakan perpaduan antara ajaran formal agama dengan kepercayaan lokal.

F. DINAMIKA SOSIAL DALAM KONTEKS MASYARAKAT DESA INDONESIA

Setelah memahami konsep dan teori dinamika sosial secara umum, kita perlu mengkontekstualisasikannya dalam realitas masyarakat desa di Indonesia. Desa di Nusantara memiliki kekhasan yang membedakannya dari desa di belahan dunia lain.

1. Desa sebagai Komunitas Berbasis Kekerabatan dan Teritorial

Masyarakat desa di Indonesia pada umumnya terbentuk dari ikatan kekerabatan (genealogis) dan ikatan wilayah (teritorial). Ikatan kekerabatan tercermin dalam struktur masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok keluarga besar (famili, marga, klan) yang masih menjaga hubungan dan solidaritas. Ikatan teritorial tercermin dalam rasa memiliki terhadap wilayah desa sebagai tanah leluhur.

Kedua ikatan ini membuat dinamika sosial di desa memiliki warna tersendiri. Konflik antar warga seringkali bukan hanya konflik antar individu, tetapi melibatkan kelompok keluarga besar. Solidaritas juga seringkali didasarkan pada ikatan kekerabatan atau kedekatan tempat tinggal. Setiap perubahan yang terjadi akan selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap jaringan kekerabatan ini.

2. Keberagaman Sosial Budaya Antar Desa

Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang luar biasa. Setiap desa memiliki keunikan tersendiri dalam hal adat istiadat, bahasa, sistem nilai, dan struktur sosial. Oleh karena itu, dinamika sosial di desa Jawa akan berbeda dengan desa di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua.

Di desa-desa Jawa yang terkenal dengan struktur sosial yang hirarkis dan nilai kehalusan (alus), perubahan sosial mungkin berlangsung lebih halus dan tidak konfrontatif. Di desa-desa Batak yang terkenal dengan keterusterangan dan semangat marsiadapari (gotong royong), dinamika mungkin lebih ekspresif. Di desa-desa Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, peran perempuan dalam dinamika sosial akan sangat menonjol.

Memahami keragaman ini penting untuk menghindari generalisasi yang keliru tentang "desa Indonesia". Setiap desa adalah kasus khusus yang perlu dipahami dalam konteks sosial budayanya masing-masing.

3. Pengaruh Sejarah dan Kolonialisme

Sejarah panjang kolonialisme telah membentuk struktur dan dinamika masyarakat desa di Indonesia. Kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) di masa kolonial Belanda, misalnya, telah mengubah pola produksi pertanian dan menciptakan stratifikasi sosial baru di pedesaan. Sistem desa yang kita kenal sekarang juga merupakan hasil dari rekayasa kolonial yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Pengaruh sejarah ini masih terasa hingga kini. Di beberapa daerah, bekas-bekas struktur feodal masih membayangi hubungan sosial. Di daerah lain, pengalaman pahit konflik agraria di masa lalu mempengaruhi sikap masyarakat terhadap program-program pembangunan yang berkaitan dengan lahan.

4. Dinamika Hubungan Desa-Kota

Hubungan antara desa dan kota merupakan salah satu faktor penting yang membentuk dinamika sosial di desa. Kota, dengan segala fasilitas dan peluangnya, selalu menjadi daya tarik bagi penduduk desa.

Urbanisasi yang terus terjadi mengubah komposisi penduduk desa, dengan berkurangnya penduduk usia produktif.

Namun, hubungan desa-kota juga membawa arus balik. Para perantau yang kembali ke desa (pulang kampung) membawa pengalaman, pengetahuan, dan modal yang dapat menjadi agen perubahan. Remitansi dari para perantau menjadi sumber ekonomi penting bagi banyak desa. Ide-ide baru, gaya hidup, dan teknologi juga masuk ke desa melalui interaksi dengan kota.

Di era digital, hubungan desa-kota menjadi semakin kompleks. Dengan internet, warga desa dapat mengakses informasi dan berinteraksi dengan dunia luar tanpa harus meninggalkan desa. Hal ini membuka peluang baru sekaligus tantangan baru bagi dinamika sosial desa.

5. Pengaruh Kebijakan Negara terhadap Desa

Negara, melalui berbagai kebijakannya, memiliki pengaruh besar terhadap dinamika sosial di desa. Kebijakan tentang desa, pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain membentuk arah perubahan di pedesaan.

UU Desa No. 6 Tahun 2014 adalah contoh kebijakan yang membawa perubahan fundamental. Desa yang tadinya hanya "anak" dari kabupaten/kota, kini diberi kewenangan dan sumber daya untuk mengurus dirinya sendiri. Hal ini memicu dinamika baru: munculnya aktor-aktor baru (kepala desa dan perangkatnya menjadi sangat penting), perubahan dalam struktur kekuasaan, serta potensi konflik dan kolaborasi baru.

Program-program pembangunan seperti PNPM Mandiri Perdesaan, Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga mempengaruhi dinamika sosial. Mereka menciptakan ekspektasi baru, memicu kompetisi (siapa yang berhak menerima bantuan), dan kadang menciptakan ketergantungan.

G. PENTINGNYA MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL DESA

Setelah mempelajari konsep, teori, dan karakteristik dinamika sosial desa, muncul pertanyaan: mengapa semua ini penting? Apa manfaat memahami dinamika sosial bagi berbagai pihak?

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Bagi akademisi dan peneliti, memahami dinamika sosial desa adalah pintu masuk untuk mengembangkan teori-teori sosial yang kontekstual dengan realitas Indonesia. Banyak teori sosiologi yang lahir dari konteks Eropa atau Amerika, yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi desa di Nusantara. Dengan mempelajari dinamika sosial desa secara mendalam, para akademisi dapat mengembangkan konsep-konsep baru atau memodifikasi teori yang ada agar lebih sesuai dengan konteks lokal.

Selain itu, desa adalah laboratorium sosial yang kaya untuk menguji berbagai hipotesis tentang perubahan sosial, konflik, solidaritas, adaptasi, dan lain-lain. Penelitian tentang dinamika sosial desa dapat

menghasilkan temuan-temuan yang berharga, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk perumusan kebijakan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, pemahaman tentang dinamika sosial desa adalah prasyarat untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Kebijakan yang dirancang tanpa memahami konteks sosial budaya setempat berisiko gagal atau bahkan menimbulkan masalah baru.

Dengan memahami dinamika sosial, pemerintah dapat mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang perlu dilibatkan, potensi konflik yang perlu diantisipasi, serta nilai-nilai lokal yang dapat dijadikan modal sosial. Kebijakan yang selaras dengan dinamika sosial yang ada akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pemahaman ini juga penting untuk memonitor dan mengevaluasi dampak kebijakan. Perubahan sosial apa yang terjadi sebagai akibat dari suatu kebijakan? Apakah perubahan itu sesuai dengan yang diharapkan? Apakah ada dampak negatif yang tidak terduga? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan pemahaman yang baik tentang dinamika sosial.

3. Bagi Praktisi Pembangunan dan LSM

Bagi praktisi pembangunan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemahaman tentang dinamika sosial desa adalah bekal untuk melakukan pendampingan yang efektif. Program pemberdayaan yang baik harus berangkat dari pemahaman tentang kondisi riil masyarakat, bukan dari asumsi-asumsi yang dibuat di balik meja.

Dengan memahami dinamika sosial, praktisi dapat merancang metode pendampingan yang sesuai, membangun relasi yang baik dengan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi dan hambatan yang mungkin muncul. Mereka juga dapat membantu masyarakat untuk secara kritis memahami dinamika yang terjadi di lingkungannya, sehingga mampu mengambil peran aktif dalam mengarahkan perubahan.

4. Bagi Masyarakat Desa Sendiri

Yang terpenting, pemahaman tentang dinamika sosial desa juga penting bagi masyarakat desa itu sendiri. Dengan memahami dinamika yang terjadi, masyarakat tidak hanya menjadi objek perubahan yang pasif, tetapi dapat menjadi subjek yang secara sadar mengarahkan perubahan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang mereka anut.

Masyarakat yang memahami dinamika sosialnya akan lebih siap menghadapi tantangan, lebih kritis terhadap pengaruh-pengaruh luar, dan lebih mampu memanfaatkan peluang yang ada. Mereka juga akan lebih mampu mengelola konflik secara konstruktif dan membangun konsensus tentang arah pembangunan desa yang mereka inginkan.

H. RANGKUMAN

Bab ini telah membahas konsep dasar dinamika sosial sebagai fondasi untuk memahami seluruh isi buku. Dinamika sosial didefinisikan sebagai serangkaian perubahan, gerakan, dan proses yang terjadi dalam struktur dan pola hubungan sosial masyarakat sebagai akibat dari interaksi antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan internal dan eksternal, serta berlangsung dalam rentang waktu tertentu.

Unsur-unsur dinamika sosial meliputi individu sebagai aktor, kelompok sosial sebagai wadah interaksi, lembaga sosial sebagai struktur pengatur, nilai dan norma sebagai pedoman perilaku, interaksi sosial sebagai proses, dan perubahan sosial sebagai akibat. Keenam unsur ini saling terkait dan bekerja bersama menciptakan dinamika yang kompleks.

Teori-teori sosiologi klasik dari para pemikir seperti Herbert Spencer (teori evolusi sosial), Karl Marx (teori konflik), Max Weber (teori tindakan sosial), William F. Ogburn (teori cultural lag), dan Talcott Parsons (teori fungsionalisme struktural) memberikan perspektif yang beragam untuk memahami dinamika sosial. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan keterbatasan, dan dapat digunakan secara eklektik sesuai dengan fenomena yang ingin dijelaskan.

Perubahan sosial di desa memiliki karakteristik khas: umumnya bersifat evolusioner, namun dapat menjadi revolusioner akibat guncangan eksternal; dipengaruhi oleh dan memengaruhi lingkungan sekitar; bersifat spiral, tidak selalu linier; bersifat multidimensi; serta melalui mekanisme seleksi dan adaptasi lokal.

Dalam konteks Indonesia, dinamika sosial desa dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan dan teritorial, keberagaman sosial budaya antar daerah, sejarah kolonialisme, hubungan desa-kota, serta kebijakan negara. Memahami semua ini penting bagi akademisi, pemerintah, praktisi pembangunan, dan terutama bagi masyarakat desa sendiri untuk dapat mengarahkan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan fondasi pemahaman ini, kita siap memasuki bab-bab selanjutnya yang akan membahas secara lebih rinci berbagai aspek dinamika sosial masyarakat desa, mulai dari struktur sosial, karakteristik sosial budaya, hingga peran berbagai aktor dalam pembangunan desa.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Amati desa Anda atau desa di sekitar Anda. Perubahan sosial apa yang paling mencolok terjadi dalam 10-20 tahun terakhir? Menurut Anda, apakah perubahan itu bersifat evolusioner atau revolusioner? Jelaskan!
2. Dari teori-teori dinamika sosial yang dibahas (Spencer, Marx, Weber, Ogburn, Parsons), teori mana yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena di desa Anda? Berikan contoh konkret!
3. Identifikasi unsur-unsur dinamika sosial (individu, kelompok, lembaga, nilai-norma, interaksi, perubahan) di desa Anda. Bagaimana masing-masing unsur itu bekerja dan saling mempengaruhi?
4. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam memahami dinamika sosial desa di era digital seperti sekarang? Bagaimana cara mengatasinya?
5. Sebagai generasi muda, peran apa yang dapat Anda ambil untuk mengarahkan dinamika sosial di desa Anda ke arah yang positif?

BAB II

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DESA

A. PENGANTAR: MEMAHAMI BANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT DESA

Setiap masyarakat memiliki bangunan sosial yang menjadi kerangka bagi interaksi antar warganya. Bangunan ini menentukan siapa duduk di mana, siapa memiliki akses terhadap apa, dan bagaimana hubungan antar kelompok terjalin. Dalam sosiologi, bangunan sosial ini disebut sebagai struktur sosial. Memahami struktur sosial masyarakat desa ibarat membaca cetak biru sebuah bangunan—kita dapat melihat bagaimana ruang-ruang sosial tersusun, bagaimana aliran kekuasaan dan sumber daya bergerak, serta di mana letak pintu-pintu akses dan tembok-tembok pembatas.

Masyarakat desa di Indonesia memiliki struktur sosial yang unik dan kompleks. Ia merupakan hasil endapan sejarah panjang, percampuran antara sistem stratifikasi tradisional (seperti feodalisme Jawa atau sistem kasta di Bali) dengan pengaruh kolonialisme, serta diwarnai oleh dinamika modernisasi dan kebijakan negara pasca-kemerdekaan. Di beberapa desa, struktur sosial masih tampak jelas dengan lapisan-lapisan yang tegas. Di desa lain, struktur sosial mungkin lebih cair, namun jejak-jejak masa lalu masih dapat dirasakan dalam pola interaksi dan pengambilan keputusan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang struktur sosial masyarakat desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep struktur sosial dan stratifikasi, kemudian menelusuri berbagai dasar yang menjadi fondasi pelapisan sosial di desa. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana struktur ini mempengaruhi hubungan antar kelompok, akses terhadap sumber daya, serta dinamika yang muncul dari interaksi antar kelompok yang berbeda posisinya. Akhirnya, kita akan melihat bagaimana modernisasi dan kebijakan negara mengubah—atau justru mempertahankan—struktur sosial warisan masa lalu.

B. KONSEP DASAR STRUKTUR SOSIAL DAN STRATIFIKASI

1. Pengertian Struktur Sosial

Struktur sosial adalah konsep sentral dalam sosiologi yang merujuk pada pola-pola hubungan yang relatif stabil dan berulang antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ia adalah kerangka dasar yang mengatur bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana peran-peran didistribusikan, dan bagaimana interaksi sosial berlangsung.

Raymond Firth, antropolog sosial, mendefinisikan struktur sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang pokok yang memberikan wadah atau bentuk dasar kepada masyarakat. Menurutnya, struktur sosial adalah realitas sosial yang relatif stabil dan dapat diamati dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Talcott Parsons melihat struktur sosial sebagai sistem pola normatif yang mengatur tindakan-tindakan individu dalam masyarakat. Struktur sosial, menurutnya, terdiri dari status-status (posisi-posisi sosial) dan peran-peran (perilaku yang diharapkan dari pemegang status) yang saling terkait.

Soerjono Soekanto mendefinisikan struktur sosial sebagai keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Struktur sosial, dengan demikian, mencakup aspek normatif (kaidah), kelembagaan (lembaga), komunal (kelompok), dan hierarkis (lapisan).

Dalam konteks masyarakat desa, struktur sosial dapat diamati dari bagaimana warga desa terbagi dalam berbagai kategori: berdasarkan keturunan (trah, golongan), berdasarkan kekuasaan (pamong desa, rakyat biasa), berdasarkan kekayaan (kaya, menengah, miskin), berdasarkan pendidikan (berpendidikan, kurang berpendidikan), berdasarkan pekerjaan (petani, pedagang, buruh), dan berdasarkan usia atau gender.

2. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah bagian dari struktur sosial yang secara khusus merujuk pada pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Istilah stratifikasi berasal dari kata Latin "stratum" yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial berarti pelapisan sosial—adanya lapisan-lapisan sosial yang tersusun dari atas ke bawah.

Pitirim Sorokin, sosiolog Rusia-Amerika yang terkenal dengan teorinya tentang stratifikasi, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Menurut Sorokin, stratifikasi sosial adalah ciri tetap dari setiap masyarakat yang terorganisir. Ia membedakan stratifikasi menjadi tiga bidang utama: stratifikasi ekonomi (berdasarkan kekayaan), stratifikasi politik (berdasarkan kekuasaan), dan stratifikasi pekerjaan (berdasarkan prestise profesi).

Kingsley Davis dan **Wilbert Moore** dalam teori fungsionalnya berargumen bahwa stratifikasi sosial bersifat universal dan diperlukan karena masyarakat harus menempatkan individu-individu yang paling mampu pada posisi-posisi yang paling penting dan memberikan motivasi agar mereka mau menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan kata lain, stratifikasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dalam masyarakat dijalankan oleh orang-orang yang kompeten.

Sebaliknya, **Karl Marx** melihat stratifikasi sebagai bentuk ketidakadilan yang lahir dari hubungan produksi. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas yang saling bertentangan: kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (pekerja). Stratifikasi, menurut Marx, adalah sumber konflik dan perubahan sosial.

Dalam masyarakat desa, stratifikasi sosial dapat bersifat terbuka (memungkinkan mobilitas sosial) maupun tertutup (membatasi mobilitas). Sistem kasta di Bali adalah contoh stratifikasi tertutup yang ekstrem, di mana status seseorang ditentukan oleh kelahiran dan sangat sulit diubah. Sementara itu, stratifikasi berdasarkan kekayaan cenderung lebih terbuka karena seseorang dapat berubah status ekonominya melalui usaha dan kerja keras.

3. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial memiliki tiga unsur utama yang saling terkait:

Pertama, status sosial (kedudukan). Status adalah posisi seseorang dalam masyarakat. Status dapat bersifat *ascribed status* (ditentukan oleh kelahiran, seperti keturunan bangsawan), *achieved status* (dicapai melalui usaha, seperti menjadi kepala desa), atau *assigned status* (diberikan karena jasa, seperti gelar adat).

Kedua, peran sosial (role). Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Misalnya, dari seorang kepala desa diharapkan perilaku yang bijaksana, adil, dan melayani masyarakat. Dari seorang tokoh adat diharapkan perilaku yang menjaga tradisi dan menjadi panutan.

Ketiga, prestise (gengsi, kehormatan). Prestise adalah penilaian masyarakat tentang tinggi rendahnya suatu status. Beberapa profesi seperti guru, ulama, atau pejabat desa mungkin memiliki prestise tinggi meskipun secara ekonomi tidak kaya. Sebaliknya, pedagang kaya mungkin memiliki prestise lebih rendah jika dianggap kurang peduli pada kepentingan umum.

C. DASAR-DASAR PEMBENTUKAN STRUKTUR SOSIAL DI DESA

Struktur sosial masyarakat desa terbentuk di atas berbagai fondasi. Memahami fondasi-fondasi ini penting untuk dapat menganalisis mengapa struktur sosial di suatu desa berbentuk seperti yang kita amati.

1. Faktor Keturunan (Genealogis)

Faktor keturunan atau genealogis adalah salah satu fondasi tertua dalam pembentukan struktur sosial di desa. Dalam banyak masyarakat tradisional, status seseorang ditentukan oleh garis keturunannya. Ia lahir dalam suatu keluarga atau golongan tertentu, dan status itu akan melekat sepanjang hidupnya.

Di **Jawa**, kita mengenal adanya golongan *ningrat* atau *priyayi* (keturunan bangsawan keraton) yang secara tradisional memiliki status lebih tinggi daripada rakyat biasa (*wong cilik*). Meskipun secara formal sistem feodal telah dihapus, dalam praktik sosial sehari-hari, keturunan priyayi seringkali masih diperlakukan dengan hormat tertentu. Mereka mungkin lebih dihormati dalam pertemuan, lebih didengar pendapatnya, atau lebih diprioritaskan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Di **Bali**, sistem kasta (wangsa) adalah contoh paling jelas tentang stratifikasi berbasis keturunan. Masyarakat Bali terbagi menjadi empat kasta utama: Brahmana (pendeta), Ksatria (bangsawan, prajurit), Wesia (pedagang, petani kaya), dan Sudra (rakyat biasa). Meskipun dalam kehidupan modern batas-batas kasta mulai kabur, terutama di perkotaan, di pedesaan Bali pengaruh kasta masih cukup terasa dalam bahasa, tata krama, dan upacara keagamaan.

Di **Minangkabau**, meskipun sistem kekerabatannya matrilineal (garis keturunan ibu), ada juga penggolongan berdasarkan keturunan bangsawan. Golongan *andiko* atau *penghulu* adalah mereka yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin adat. Status ini umumnya diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga tertentu.

Di **Sulawesi Selatan**, masyarakat Bugis-Makassar mengenal stratifikasi sosial yang cukup tegas: *ana' karung* (keturunan bangsawan tinggi), *ana' matola* (keturunan bangsawan menengah), *tau deceng* (orang baik-baik, orang merdeka), dan *ata* (hamba sahaya di masa lalu). Meskipun perbudakan telah dihapus, pengaruh stratifikasi ini masih terasa dalam gelar kebangsawanan dan prestise sosial.

Faktor keturunan menciptakan struktur sosial yang relatif stabil dan sulit berubah. Mobilitas sosial vertikal sangat terbatas karena status dianggap melekat secara alamiah. Namun, dalam perkembangannya, faktor-faktor lain mulai menggeser dominasi faktor keturunan.

2. Faktor Kekuasaan (Politik)

Faktor kekuasaan atau politik adalah fondasi penting lain dari struktur sosial desa. Mereka yang memiliki kekuasaan—kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan sumber daya—menduduki lapisan atas dalam struktur sosial.

Secara formal, kekuasaan di desa dipegang oleh **pemerintah desa**: Kepala Desa, perangkat desa (sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka memiliki otoritas untuk membuat kebijakan, mengelola anggaran desa, dan mengambil keputusan yang mengikat warga.

Namun, di samping kekuasaan formal, ada juga **kekuasaan informal** yang dipegang oleh tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Mereka mungkin tidak memiliki jabatan formal, tetapi pengaruhnya sangat besar. Misalnya, seorang pensiunan pejabat yang pulang kampung mungkin memiliki pengaruh karena pengalaman dan jaringan luasnya. Seorang pengusaha sukses mungkin disegani karena kemampuan ekonominya. Seorang guru atau dosen mungkin didengar pendapatnya karena pengetahuannya.

Struktur kekuasaan di desa seringkali merupakan **perpaduan antara kekuasaan formal dan informal**. Seorang kepala desa yang efektif biasanya adalah orang yang mampu merangkul para pemangku kekuasaan informal. Sebaliknya, kepala desa yang mengabaikan mereka mungkin akan menghadapi resistensi dalam menjalankan program-programnya.

Penting dicatat bahwa kekuasaan di desa seringkali bersifat **tumpang tindih** dengan faktor keturunan. Di banyak desa, posisi kepala desa atau tokoh adat secara tradisional dipegang oleh keluarga-keluarga tertentu. Hal ini menciptakan "dinasti politik" di tingkat desa yang sulit ditembus oleh warga biasa.

3. Faktor Kekayaan (Ekonomi)

Faktor ekonomi atau kekayaan juga menjadi dasar penting stratifikasi sosial di desa. Mereka yang memiliki tanah luas, ternak banyak, atau modal besar menempati lapisan atas. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki tanah (buruh tani) atau memiliki tanah sempit berada di lapisan bawah.

Di desa agraris, **penguasaan lahan** adalah indikator utama kekayaan. Ada tiga kategori petani berdasarkan penguasaan lahan: (1) petani pemilik (memiliki lahan sendiri), (2) petani penggarap (menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil), dan (3) buruh tani (tidak memiliki lahan, hanya menjual tenaga). Ketiga kategori ini membentuk hierarki ekonomi yang jelas.

Selain lahan, kepemilikan **aset produktif** lain juga menentukan stratifikasi ekonomi: ternak (sapi, kambing, ayam), alat produksi (traktor, mesin perontok), kendaraan (truk, mobil), atau bangunan komersial (warung, toko, rumah kontrakan).

Di era modern, sumber kekayaan juga semakin beragam. Mereka yang memiliki usaha (UMKM, BUMDes), bekerja di sektor formal (PNS, pegawai BUMN, karyawan swasta), atau memiliki saudara yang bekerja di luar negeri (TKI/TKW) dengan remitansi besar juga dapat naik kelas secara ekonomi.

Stratifikasi berbasis ekonomi cenderung lebih **terbuka** dibandingkan berbasis keturunan. Seseorang dapat naik kelas melalui kerja keras, keberuntungan, atau pendidikan. Namun, realitasnya, mobilitas vertikal tidak selalu mudah karena mereka yang sudah kaya memiliki akses lebih besar ke sumber daya (modal, informasi, jaringan) untuk memperkaya diri, sementara yang miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

4. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan menjadi faktor stratifikasi yang semakin penting di era modern. Mereka yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki akses lebih baik ke pekerjaan bergengsi, informasi, dan jaringan sosial. Mereka juga cenderung lebih dihormati karena dianggap memiliki pengetahuan luas.

Di desa, perbedaan tingkat pendidikan menciptakan lapisan-lapisan sosial. Lulusan perguruan tinggi (sarjana) berada di lapisan atas, diikuti lulusan SMA, lulusan SMP, dan lulusan SD atau tidak sekolah di lapisan bawah. Perbedaan ini mempengaruhi akses ke pekerjaan, posisi dalam pemerintahan desa, dan prestise sosial.

Penting dicatat bahwa di banyak desa, **pengetahuan non-formal** juga menjadi sumber stratifikasi. Seorang tetua adat mungkin tidak berpendidikan formal tinggi, tetapi ia memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, sejarah desa, dan hukum adat. Pengetahuan ini membuatnya dihormati dan memiliki posisi tinggi dalam struktur sosial. Demikian pula, seorang ulama atau kyai mungkin tidak berpendidikan formal, tetapi penguasaannya atas ilmu agama memberinya prestise tinggi.

5. Faktor Usia dan Senioritas

Di banyak masyarakat desa, usia dan senioritas menjadi dasar stratifikasi. Mereka yang lebih tua dianggap lebih berpengalaman, lebih bijaksana, dan lebih tahu adat. Mereka berhak mendapatkan penghormatan khusus dan pendapatnya lebih didengar.

Hal ini tercermin dalam berbagai gelar kehormatan: "Mbah" atau "Eyang" di Jawa, "Inyiak" di Minangkabau, "Opung" di Batak, "Mama" di Ambon. Gelar-gelar ini menandakan status tinggi yang diperoleh karena usia.

Dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, suara para sesepuh biasanya sangat berpengaruh. Mereka mungkin tidak memiliki jabatan formal, tetapi dalam musyawarah desa, pendapat mereka sering menjadi pertimbangan penting. Bahkan, ada ungkapan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mau "minta petuah" kepada para sesepuh.

Stratifikasi berbasis usia juga terkait dengan konsep **penghormatan kepada orang tua** yang kuat dalam budaya Indonesia. Anak muda diharapkan bersikap hormat kepada yang lebih tua, menggunakan bahasa

yang sopan, dan tidak membantah. Hal ini menciptakan hierarki sosial yang khas: generasi tua di atas, generasi muda di bawah.

6. Faktor Agama dan Kepercayaan

Di banyak desa, faktor agama dan kepercayaan juga membentuk stratifikasi sosial. Para pemuka agama—ulama, kyai, pendeta, pastur, pemangku—biasanya memiliki status tinggi. Mereka tidak hanya dihormati karena pengetahuan agamanya, tetapi juga karena perannya sebagai pembimbing spiritual dan moral.

Di desa-desa yang religius, pendapat pemuka agama sering menjadi rujukan dalam berbagai persoalan, tidak hanya persoalan agama tetapi juga sosial dan politik. Calon kepala desa, misalnya, biasanya akan "sowan" (bersilaturahmi) ke para kyai untuk meminta doa restu. Program-program pemerintah akan lebih mudah diterima jika mendapat dukungan dari pemuka agama.

Selain itu, di beberapa daerah, **perbedaan agama** juga dapat menciptakan lapisan-lapisan sosial, terutama jika satu agama dominan secara kuantitatif maupun kultural. Kelompok agama minoritas mungkin berada pada posisi sosial yang lebih rendah atau setidaknya harus lebih berhati-hati dalam interaksi sosial.

7. Faktor Pekerjaan dan Profesi

Pekerjaan atau profesi juga menjadi dasar stratifikasi yang penting. Beberapa pekerjaan dipandang memiliki prestise lebih tinggi daripada yang lain. Secara tradisional, petani pemilik lahan lebih terhormat daripada buruh tani. Pedagang besar lebih terhormat daripada pedagang kecil. Guru, pegawai negeri, atau tenaga kesehatan biasanya memiliki prestise tinggi.

Di era modern, muncul profesi-profesi baru yang mempengaruhi stratifikasi. Operator wisata, pengelola homestay, youtuber desa, atau pegawai BUMDes mulai menempati posisi baru dalam hierarki sosial. Sementara itu, beberapa profesi tradisional seperti dukun atau pawang hujan mungkin mengalami penurunan prestise seiring perubahan zaman.

Stratifikasi berbasis pekerjaan ini seringkali **berkorelasi** dengan faktor-faktor lain. Pekerjaan bergengsi biasanya membutuhkan pendidikan tinggi (faktor pendidikan) dan memberikan pendapatan tinggi (faktor ekonomi). Dengan demikian, faktor-faktor stratifikasi saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

D. TIPE-TIPE STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DESA

Masyarakat desa di Indonesia menunjukkan keragaman tipe struktur sosial. Secara umum, kita dapat mengidentifikasi beberapa tipe berdasarkan kriteria tertentu.

1. Berdasarkan Sistem Stratifikasi

Tipe Tertutup: Dalam tipe ini, stratifikasi bersifat kaku dan mobilitas sosial vertikal sangat terbatas. Status seseorang ditentukan oleh kelahiran dan sulit diubah sepanjang hidup. Contoh paling jelas adalah sistem kasta di Bali. Meskipun dalam praktiknya sistem kasta di Bali tidak sekaku di India, namun pengaruhnya masih terasa, terutama dalam hal perkawinan dan upacara keagamaan.

Tipe Terbuka: Dalam tipe ini, stratifikasi bersifat lebih cair dan mobilitas sosial dimungkinkan. Status seseorang dapat berubah melalui usaha, pendidikan, atau keberuntungan. Kebanyakan desa di Jawa, Sumatra, dan wilayah lain masuk dalam kategori ini. Seseorang dari keluarga miskin dapat menjadi kaya melalui usaha keras, atau menjadi pejabat desa melalui pendidikan dan karir politik.

Tipe Campuran: Banyak desa menunjukkan tipe campuran, di mana sebagian aspek stratifikasi bersifat tertutup (misalnya berdasarkan keturunan bangsawan) dan sebagian lain bersifat terbuka (berdasarkan ekonomi atau pendidikan). Misalnya, di beberapa desa di Sulawesi Selatan, keturunan bangsawan masih memiliki prestise tinggi (tertutup), tetapi pengaruh ekonomi dan pendidikan juga mulai menggeser pentingnya status kebangsawanan (terbuka).

2. Berdasarkan Basis Ekonomi

Tipe Agraris: Struktur sosial didominasi oleh penguasaan lahan. Di puncak hierarki adalah tuan tanah atau pemilik lahan luas, diikuti petani pemilik lahan sedang, petani penggarap, dan buruh tani di lapisan bawah.

Tipe Niaga: Struktur sosial didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Di puncak hierarki adalah pedagang besar, pemilik toko, atau pengusaha jasa. Tipe ini umum dijumpai di desa-desa yang terletak di jalur perdagangan atau dekat kota.

Tipe Industri: Struktur sosial dipengaruhi oleh kehadiran industri di desa atau sekitarnya. Muncul kelas baru: pekerja industri (buruh pabrik), manajer, atau pemilik industri kecil. Tipe ini berkembang di desa-desa sekitar kawasan industri.

Tipe Pariwisata: Struktur sosial dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata. Muncul profesi baru: pemilik homestay, pemandu wisata, pelaku ekonomi kreatif, pengelola atraksi wisata. Tipe ini berkembang di desa-desa wisata.

3. Berdasarkan Heterogenitas Penduduk

Desa Homogen: Penduduknya relatif seragam dalam hal etnis, agama, atau mata pencaharian. Struktur sosial cenderung lebih sederhana dan konsensus lebih mudah dicapai. Contoh: desa di Jawa yang mayoritas penduduknya petani dan beragama Islam.

Desa Heterogen: Penduduknya beragam dalam hal etnis, agama, atau mata pencaharian. Struktur sosial lebih kompleks dan potensi konflik lebih besar, namun juga potensi inovasi dan keragaman budaya lebih kaya. Contoh: desa di perkotaan atau desa transmigrasi yang dihuni berbagai etnis.

E. STRATIFIKASI SOSIAL DAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA

Salah satu aspek terpenting dari stratifikasi sosial adalah bagaimana ia mempengaruhi akses berbagai kelompok terhadap sumber daya. Sumber daya di sini dipahami secara luas, mencakup sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan kultural.

1. Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi

Dalam struktur sosial yang bertingkat, kelompok lapisan atas memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi: lahan, modal, kredit, pasar, teknologi, dan informasi ekonomi.

Di desa agraris, pemilik lahan luas (tuan tanah) tidak hanya memiliki aset produktif, tetapi juga akses lebih mudah ke kredit bank, informasi tentang harga komoditas, dan teknologi pertanian baru. Sebaliknya, petani penggarap dan buruh tani sangat terbatas aksesnya. Mereka seringkali harus berbagi hasil dengan pemilik lahan, sulit mengakses kredit formal (karena tidak memiliki agunan), dan bergantung pada informasi yang diberikan oleh pemilik lahan atau tengkulak.

Di desa dengan ekonomi non-pertanian, mereka yang memiliki modal besar dapat membuka usaha, mengakses pasar yang lebih luas, dan mengembangkan bisnis. Sementara mereka yang tidak memiliki modal terpaksa menjadi pekerja dengan upah rendah.

Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi ini cenderung **reproduktif**—mereka yang kaya dapat semakin kaya karena memiliki akses lebih baik, sementara yang miskin sulit keluar dari kemiskinan. Inilah yang disebut sebagai "lingkaran setan kemiskinan" (vicious circle of poverty).

2. Akses terhadap Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

Kelompok lapisan atas juga memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan proses pengambilan keputusan di desa. Mereka lebih mungkin menduduki jabatan-jabatan penting, baik formal (kepala desa, perangkat desa, BPD) maupun informal (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat).

Mereka juga lebih mungkin didengar suaranya dalam musyawarah desa, diundang dalam pertemuan-pertemuan penting, dan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, kebijakan dan program desa cenderung mencerminkan kepentingan kelompok atas, sementara aspirasi kelompok bawah sering terabaikan.

Fenomena ini disebut sebagai **elite capture**—penguasaan proses dan hasil pembangunan oleh segelintir elit desa. Dalam konteks dana desa, misalnya, sering dikeluhkan bahwa proyek-proyek pembangunan lebih banyak menguntungkan kelompok dekat kekuasaan (keluarga kepala desa, kerabat, atau kelompok pendukung), sementara warga biasa kurang merasakan manfaatnya.

3. Akses terhadap Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan adalah salah satu saluran mobilitas sosial paling penting. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas juga tidak merata. Kelompok mampu secara ekonomi dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik, bahkan ke luar kota atau ke perguruan tinggi. Sebaliknya, kelompok miskin seringkali harus puas dengan pendidikan seadanya, atau bahkan anak-anak mereka putus sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga.

Akibatnya, kesenjangan pendidikan antar kelompok semakin lebar. Anak-anak dari keluarga kaya mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Anak-anak dari keluarga miskin tertinggal dan terjebak dalam pekerjaan berupah rendah. Kesenjangan ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya.

4. Akses terhadap Jaringan Sosial dan Informasi

Kelompok lapisan atas juga memiliki akses lebih luas terhadap jaringan sosial dan informasi. Mereka bergaul dengan orang-orang berpengaruh, memiliki hubungan dengan pejabat di luar desa, dan terhubung dengan jaringan-jaringan yang memberikan keuntungan ekonomi dan politik.

Jaringan sosial ini memberikan akses terhadap informasi penting: informasi tentang peluang kerja, informasi tentang program bantuan pemerintah, informasi tentang pasar dan harga komoditas, informasi tentang perubahan kebijakan. Kelompok bawah, dengan jaringan terbatas, seringkali menjadi penerima informasi yang terlambat dan tidak akurat.

5. Akses terhadap Penghormatan dan Pengakuan Sosial

Stratifikasi sosial juga menentukan distribusi penghormatan dan pengakuan sosial. Kelompok atas mendapatkan penghormatan lebih: mereka disapa dengan gelar kehormatan, didahulukan dalam berbicara, dimintai pendapat dalam musyawarah, dan diundang dalam acara-acara penting.

Sebaliknya, kelompok bawah mungkin kurang dihormati, bahkan kadang dipandang rendah. Dalam interaksi sehari-hari, mereka mungkin harus menggunakan bahasa yang lebih halus kepada kelompok atas, menunjukkan sikap hormat yang berlebihan, dan menerima perlakuan yang tidak setara.

F. HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK SOSIAL DI DESA

Struktur sosial bukan sekadar susunan statis, tetapi juga menjadi arena interaksi antar kelompok yang menempati posisi berbeda. Hubungan antar kelompok ini dapat bersifat harmonis, kompetitif, atau konfliktual, tergantung pada berbagai faktor.

1. Hubungan Antara Kelompok Atas dan Bawah

Dalam struktur sosial yang hierarkis, hubungan antara kelompok atas dan bawah seringkali bersifat **patron-klien**. Patron (kelompok atas) memberikan perlindungan, bantuan, dan akses kepada klien (kelompok bawah). Sebagai balasannya, klien memberikan loyalitas, dukungan, dan tenaga kerja kepada patron.

Di desa, hubungan patron-klien dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Tuan tanah memberikan lahan kepada petani penggarap, memberikan pinjaman saat paceklik, dan membantu dalam acara-acara keluarga. Sebagai balasannya, petani penggarap memberikan sebagian hasil panen, membantu tuan tanah dalam pekerjaan tertentu, dan mendukungnya dalam kontestasi politik.

Hubungan patron-klien ini bersifat **asimetris**—patron memiliki kekuasaan lebih besar daripada klien. Namun, hubungan ini juga memberikan rasa aman bagi klien karena ada jaminan perlindungan dari patron. Di sisi lain, hubungan ini juga melanggengkan ketergantungan klien pada patron dan menghambat mobilitas sosial.

Dalam perkembangannya, hubungan patron-klien tradisional mulai tergerus oleh modernisasi. Masuknya ekonomi uang, meluasnya pendidikan, dan meningkatnya mobilitas penduduk mengurangi ketergantungan klien pada patron. Namun, dalam bentuk baru, hubungan patron-klien masih bertahan, misalnya dalam hubungan antara pengusaha dan buruh, atau antara politisi dan konstituennya.

2. Hubungan Antara Kelompok Mayoritas dan Minoritas

Di desa-desa yang heterogen secara etnis, agama, atau budaya, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas menjadi isu penting. Hubungan ini dapat bersifat harmonis jika ada toleransi dan saling pengertian, tetapi juga dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan mayoritas-minoritas antara lain: sejarah hubungan antar kelompok, kebijakan pemerintah, peran tokoh masyarakat, tingkat kesenjangan ekonomi, serta pengaruh dari luar (misalnya provokasi atau isu-isu nasional).

Di banyak desa di Indonesia, hubungan antar kelompok berbeda cukup harmonis. Tradisi toleransi dan kerukunan hidup berdampingan telah lama terpelihara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa tempat, gesekan antar kelompok terjadi, dipicu oleh berbagai faktor seperti persaingan ekonomi, perbedaan pandangan politik, atau provokasi dari luar.

3. Hubungan Antar Generasi

Hubungan antar generasi—antara generasi tua dan muda—juga merupakan dimensi penting dari dinamika sosial desa. Kedua generasi ini seringkali memiliki pandangan berbeda tentang berbagai hal: nilai-nilai, gaya hidup, peran gender, teknologi, dan masa depan desa.

Generasi tua cenderung memegang teguh nilai-nilai tradisional, lebih berhati-hati terhadap perubahan, dan menginginkan pelestarian adat. Generasi muda lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih adaptif terhadap teknologi, dan mungkin lebih kritis terhadap tradisi yang dianggap ketinggalan zaman.

Perbedaan pandangan ini dapat menjadi sumber kreativitas dan inovasi, tetapi juga dapat memicu ketegangan. Kaum muda mungkin merasa terkekang oleh tradisi, sementara kaum tua merasa tidak dihormati. Mediasi antar generasi menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai luhur dan keterbukaan terhadap perubahan.

4. Hubungan Antar Kelompok Berbasis Gender

Relasi gender juga membentuk struktur sosial di desa. Secara tradisional, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dan seringkali tidak setara. Laki-laki lebih dominan dalam ranah publik (politik, ekonomi, pemerintahan), sementara perempuan lebih banyak di ranah domestik (rumah tangga, pengasuhan anak).

Meskipun dalam beberapa aspek perempuan memiliki peran penting (misalnya dalam upacara adat atau ekonomi keluarga melalui pasar tradisional), secara umum posisi perempuan dalam struktur sosial lebih rendah daripada laki-laki. Mereka kurang terwakili dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan, memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, dan sering menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Namun, kesadaran gender mulai meningkat. Pendidikan perempuan semakin tinggi, partisipasi perempuan dalam ekonomi semakin luas, dan kebijakan afirmasi (seperti kuota 30% perempuan dalam politik) mulai membuka ruang bagi perempuan untuk berperan lebih besar. Perubahan ini mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar gender di desa.

G. MOBILITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT DESA

Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lain dalam struktur sosial. Mobilitas dapat bersifat vertikal (naik atau turun) atau horizontal (perpindahan dalam lapisan yang sama). Mobilitas sosial adalah indikator penting tentang seberapa terbuka suatu struktur sosial.

1. Saluran-Saluran Mobilitas Sosial

Dalam masyarakat desa, terdapat beberapa saluran utama mobilitas sosial:

Pendidikan adalah saluran mobilitas paling penting di era modern. Anak-anak desa yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi dapat menjadi guru, pegawai negeri, atau profesional lain yang meningkatkan status sosial mereka. Mereka juga dapat "merantau" ke kota dan meningkatkan taraf hidup.

Ekonomi dan kewirausahaan adalah saluran lain. Petani kecil yang berhasil mengembangkan usaha, pedagang yang sukses, atau pengusaha yang memanfaatkan peluang dapat naik kelas secara ekonomi. Di era digital, muncul peluang baru melalui ekonomi kreatif dan platform online.

Politik dan jabatan juga membuka jalan mobilitas. Seseorang dari keluarga biasa yang terpilih menjadi kepala desa atau anggota BPD mengalami peningkatan status. Demikian pula, mereka yang diangkat menjadi perangkat desa atau tokoh masyarakat.

Perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas, terutama bagi perempuan. Menikah dengan seseorang dari lapisan lebih tinggi dapat meningkatkan status seseorang, meskipun dalam masyarakat modern efek ini semakin berkurang.

Migrasi (merantau) adalah saluran klasik mobilitas bagi masyarakat desa. Merantau ke kota, ke luar pulau, atau ke luar negeri membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Para perantau yang sukses dapat kembali ke desa dengan status lebih tinggi dan modal untuk memulai usaha.

2. Hambatan-Hambatan Mobilitas Sosial

Meskipun mobilitas dimungkinkan, tidak semua orang dapat mengakses saluran-saluran tersebut secara setara. Ada berbagai hambatan yang membatasi mobilitas sosial:

Hambatan struktural berkaitan dengan posisi seseorang dalam struktur sosial. Mereka yang lahir dalam keluarga miskin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, modal usaha, dan jaringan sosial. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan.

Hambatan kultural berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang membatasi aspirasi dan tindakan seseorang. Misalnya, budaya "nrimo" (menerima apa adanya) pada sebagian masyarakat Jawa dapat mengurangi motivasi untuk berusaha maju. Pandangan bahwa "perempuan cukup di dapur" dapat membatasi aspirasi pendidikan dan karir perempuan.

Hambatan diskriminatif terjadi ketika kelompok tertentu diperlakukan tidak adil karena identitasnya (etnis, agama, gender, kasta). Misalnya, di daerah dengan sistem kasta yang kuat, orang dari kasta rendah mungkin sulit mendapatkan pekerjaan bergengsi atau menikah dengan kasta lebih tinggi.

Hambatan geografis berkaitan dengan lokasi desa. Desa terpencil dengan akses transportasi dan komunikasi terbatas memiliki peluang mobilitas lebih kecil dibandingkan desa di dekat kota.

3. Dampak Mobilitas Sosial terhadap Struktur Sosial

Mobilitas sosial dapat mengubah struktur sosial desa. Ketika banyak orang dari lapisan bawah berhasil naik kelas, batas-batas antar lapisan menjadi lebih cair. Struktur sosial yang tadinya kaku dapat menjadi lebih terbuka.

Mobilitas juga menciptakan **kelas menengah baru** di desa. Mereka adalah orang-orang yang mencapai status menengah melalui pendidikan, usaha, atau pekerjaan. Kelas menengah ini sering menjadi agen perubahan, membawa ide-ide baru, nilai-nilai modern, dan tuntutan akan tata kelola yang lebih baik.

Namun, mobilitasi sosial juga dapat menciptakan ketegangan baru. Orang-orang yang baru kaya mungkin dipandang rendah oleh kelompok atas lama yang menganggap mereka "kurang berdarah". Di sisi lain, mereka mungkin juga dianggap "sombong" oleh kelompok bawah yang dulu setara dengan mereka.

H. PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL DI ERA MODERNISASI

Struktur sosial desa tidak statis. Ia terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial desa.

1. Faktor-Faktor Perubahan Struktur Sosial

Kebijakan negara memiliki pengaruh besar. UU Desa No. 6 Tahun 2014, misalnya, mengubah struktur kekuasaan di desa. Kepala desa dan perangkatnya mendapatkan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar. Munculnya BPD sebagai lembaga legislatif desa menciptakan checks and balances baru. Alokasi dana desa yang signifikan mengubah lanskap ekonomi desa.

Pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi) membuka isolasi desa dan mempercepat arus informasi, barang, dan orang. Hal ini mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial desa.

Perkembangan teknologi informasi (internet, media sosial) mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan melakukan transaksi ekonomi. Ia juga membuka peluang baru dan menciptakan profesi-profesi baru.

Urbanisasi dan migrasi mengubah komposisi penduduk desa. Berkurangnya penduduk usia produktif mempengaruhi struktur ketenagakerjaan dan ekonomi desa. Remitansi dari perantau menjadi sumber ekonomi baru.

Industrialisasi di sekitar desa menciptakan kelas buruh baru dan mengubah mata pencaharian masyarakat. Ia juga membawa nilai-nilai dan gaya hidup baru.

Perkembangan pariwisata di desa-desa tertentu menciptakan struktur ekonomi baru dan mengubah pola interaksi sosial. Munculnya kelas pengusaha pariwisata, tenaga kerja jasa, dan pelaku ekonomi kreatif menggeser struktur sosial berbasis agraris.

2. Kecenderungan Perubahan Struktur Sosial

Pergeseran dari stratifikasi berbasis keturunan ke berbasis prestasi. Faktor keturunan memang masih berpengaruh, tetapi pengaruhnya semakin berkurang. Pendidikan, keterampilan, dan prestasi kerja semakin penting dalam menentukan status seseorang.

Meningkatnya kompleksitas dan diferensiasi sosial. Masyarakat desa tidak lagi sesederhana dulu. Profesi semakin beragam, kelompok-kelompok kepentingan semakin banyak, dan orientasi nilai semakin plural. Struktur sosial menjadi lebih kompleks.

Melonggarnya batas-batas antar lapisan. Mobilitas sosial semakin dimungkinkan. Batas antara petani kaya dan miskin, antara priyayi dan wong cilik, semakin kabur. Namun, bukan berarti kesenjangan hilang; ia mungkin muncul dalam bentuk baru.

Meningkatnya individualisme. Solidaritas komunal dan gotong royong mulai tergerus oleh nilai-nilai individualisme. Masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga daripada kepentingan bersama. Hal ini mempengaruhi struktur sosial yang tadinya berbasis kolektivitas.

Menguatnya peran perempuan. Perempuan semakin aktif dalam ekonomi, pendidikan, dan organisasi sosial. Hal ini menggeser struktur sosial yang tadinya didominasi laki-laki. Namun, kesetaraan penuh masih jauh dari kenyataan.

3. Yang Bertahan dan Yang Berubah

Meskipun modernisasi membawa banyak perubahan, beberapa aspek struktur sosial tradisional masih bertahan, meskipun dalam bentuk yang termodifikasi.

Ikatan kekerabatan masih kuat di banyak desa. Keluarga besar masih menjadi unit sosial penting, terutama dalam acara-acara ritual dan gotong royong. Jaringan kekerabatan juga masih menjadi sumber dukungan ekonomi dan sosial.

Penghormatan kepada orang tua dan tokoh masyarakat masih terjaga. Nilai-nilai kesopanan dan etika dalam interaksi antar generasi masih diajarkan dan dipraktikkan.

Nilai-nilai komunal seperti gotong royong masih hidup, meskipun intensitasnya mungkin berkurang. Dalam situasi tertentu seperti bencana atau hajatan, semangat gotong royong masih muncul.

Pengaruh adat masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun seringkali telah bercampur dengan nilai-nilai modern. Upacara adat masih dilaksanakan, hukum adat masih dirujuk dalam penyelesaian sengketa tertentu.

I. STUDI KASUS: STRUKTUR SOSIAL DI BERBAGAI DESA INDONESIA

Untuk memperjelas pemahaman tentang struktur sosial masyarakat desa, mari kita lihat beberapa contoh konkret dari berbagai daerah di Indonesia.

1. Desa di Jawa: Antara Priyayi dan Wong Cilik

Di desa-desa Jawa, struktur sosial tradisional sangat dipengaruhi oleh sistem feodal masa lalu. Ada pembagian antara golongan *priyayi* (keturunan bangsawan atau pejabat) dan *wong cilik* (rakyat biasa). Priyayi biasanya memiliki tanah lebih luas, pendidikan lebih baik, dan jaringan kekuasaan lebih luas. Mereka juga menggunakan bahasa Jawa halus (*krama*) yang menunjukkan status tinggi.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan ini masih terasa. Dalam pertemuan desa, orang-orang dari keluarga priyayi cenderung lebih dihormati, pendapatnya lebih didengar. Dalam acara-acara seperti pernikahan atau kenduri, mereka mendapat tempat khusus.

Namun, modernisasi mulai menggeser struktur ini. Pendidikan dan kekayaan kini menjadi sumber status baru. Seorang pengusaha sukses dari keluarga biasa dapat naik kelas dan disejajarkan dengan priyayi. Bahkan, banyak kepala desa sekarang berasal dari kalangan non-priyayi.

2. Desa di Bali: Sistem Kasta yang Mulai Kabur

Di desa-desa Bali, sistem kasta (wangsa) masih berpengaruh, meskipun tidak sekaku di masa lalu. Masyarakat terbagi dalam empat kasta: Brahmana (pendeta), Ksatria (bangsawan), Wesia (pedagang, petani kaya), dan Sudra (rakyat biasa).

Pengaruh kasta terlihat dalam penggunaan bahasa Bali. Ada tingkatan bahasa yang berbeda untuk berbicara dengan orang dari kasta berbeda. Dalam upacara keagamaan, peran-peran tertentu hanya boleh dilakukan oleh kasta tertentu. Dalam perkawinan, masih ada preferensi untuk menikah dalam kasta yang sama.

Namun, pengaruh kasta mulai berkurang, terutama di kalangan generasi muda dan di daerah perkotaan. Pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan kini menjadi sumber status yang penting. Banyak orang Sudra yang sukses dalam bisnis atau pendidikan dan mendapatkan penghormatan setara dengan kasta atas.

3. Desa di Minangkabau: Matrilineal dan Pengaruh Adat

Di desa-desa Minangkabau, struktur sosial sangat dipengaruhi oleh sistem matrilineal (garis keturunan ibu) dan adat. Harta pusaka (tanah, rumah gadang) diwariskan melalui garis perempuan. Laki-laki, meskipun memiliki peran sebagai pemimpin adat (*penghulu*), tidak mewarisi harta pusaka.

Struktur sosial di Minangkabau juga mengenal pembagian antara *andiko* (kaum bangsawan) dan masyarakat biasa. Gelar *datuk* (penghulu adat) diwariskan dalam keluarga tertentu. Seorang datuk memiliki otoritas dalam urusan adat dan disegani dalam masyarakat.

Merantau adalah tradisi kuat Minangkabau. Para perantau yang sukses kembali ke kampung dengan status ekonomi lebih tinggi dan sering menjadi tokoh masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika dalam struktur sosial tradisional.

4. Desa di Sulawesi Selatan: Bangsawan dan Masyarakat Biasa

Di desa-desa Bugis-Makassar, stratifikasi sosial tradisional cukup tegas. Ada golongan *ana' karung* (bangsawan tinggi), *ana' matola* (bangsawan menengah), *tau deceng* (orang merdeka), dan bekas golongan *ata* (hamba sahaya). Gelar kebangsawanan seperti *Andi* atau *Daeng* masih digunakan dan menunjukkan status.

Dalam praktik sosial, keturunan bangsawan masih sering dihormati, didahulukan, dan didengar pendapatnya. Dalam kontestasi politik lokal, latar belakang keturunan masih menjadi pertimbangan penting.

Namun, seperti di daerah lain, pengaruh pendidikan dan ekonomi mulai menggeser pentingnya status kebangsawanan. Profesional sukses dari keluarga biasa dapat memiliki status setara, bahkan lebih tinggi, daripada bangsawan miskin.

J. IMPLIKASI STRUKTUR SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Pemahaman tentang struktur sosial desa memiliki implikasi penting bagi upaya pembangunan desa. Pembangunan yang mengabaikan struktur sosial yang ada berisiko gagal atau bahkan menimbulkan konflik.

1. Pentingnya Pemetaan Sosial

Sebelum merancang program pembangunan, penting untuk melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) untuk memahami struktur sosial desa. Siapa kelompok-kelompok yang ada? Bagaimana hubungan antar kelompok? Siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya? Siapa yang terpinggirkan? Di mana letak kekuasaan dan pengaruh?

Pemetaan sosial membantu merancang intervensi yang tepat sasaran dan meminimalkan resistensi. Ia juga membantu mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin muncul dan merancang strategi mitigasi.

2. Mengatasi Ketimpangan Struktural

Pembangunan harus secara sadar berupaya mengatasi ketimpangan struktural yang ada. Program-program harus dirancang untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan: petani tanpa lahan, buruh tani, perempuan, kelompok miskin, dan minoritas.

Afirmasi positif mungkin diperlukan untuk memberikan akses lebih besar kepada kelompok-kelompok ini terhadap pendidikan, modal, pelatihan, dan posisi pengambilan keputusan. Misalnya, kuota untuk perempuan dalam lembaga desa, atau program kredit khusus untuk petani kecil.

3. Membangun Partisipasi Inklusif

Struktur sosial yang hierarkis seringkali menghambat partisipasi kelompok bawah dalam pengambilan keputusan. Mereka mungkin merasa tidak percaya diri untuk berbicara, atau suara mereka diabaikan.

Karena itu, perlu upaya khusus untuk membangun partisipasi yang inklusif. Forum-forum musyawarah harus dirancang agar semua kelompok merasa aman dan nyaman untuk menyuarakan pendapatnya. Fasilitasi yang netral dan profesional mungkin diperlukan untuk memastikan semua suara terdengar.

4. Memanfaatkan Modal Sosial yang Ada

Struktur sosial juga mengandung modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Jaringan kekerabatan, kepercayaan antar warga, dan norma gotong royong adalah aset berharga. Program pembangunan harus dirancang untuk memperkuat, bukan merusak, modal sosial ini.

Misalnya, program pemberdayaan dapat memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada (kelompok tani, kelompok pengajian, arisan) sebagai basis organisasi. Gotong royong dapat dimobilisasi untuk proyek-proyek pembangunan fisik yang membutuhkan tenaga kerja kolektif.

5. Mengelola Konflik Secara Konstruktif

Struktur sosial yang timpang berpotensi menimbulkan konflik. Pembangunan yang tidak adil dapat memicu kecemburuan sosial, resistensi, bahkan konflik terbuka. Karena itu, manajemen konflik harus menjadi bagian integral dari pembangunan desa.

Mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal (musyawarah, mediasi oleh tokoh adat) perlu diperkuat. Deteksi dini terhadap potensi konflik harus dilakukan secara rutin. Dialog antar kelompok harus difasilitasi untuk membangun saling pengertian.

K. RANGKUMAN

Struktur sosial masyarakat desa adalah bangunan yang kompleks, terdiri dari lapisan-lapisan sosial yang terbentuk di atas berbagai fondasi: keturunan, kekuasaan, kekayaan, pendidikan, usia, agama, dan pekerjaan. Lapisan-lapisan ini menentukan akses seseorang atau kelompok terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan kultural.

Stratifikasi sosial di desa dapat bersifat tertutup (seperti kasta di Bali), terbuka (berbasis prestasi), atau campuran. Ia mempengaruhi hubungan antar kelompok—antara atas dan bawah, mayoritas dan minoritas, tua dan muda, laki-laki dan perempuan—dalam berbagai pola: patron-klien, kompetisi, atau konflik.

Mobilitas sosial dimungkinkan melalui berbagai saluran: pendidikan, ekonomi, politik, perkawinan, dan migrasi. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap saluran-saluran ini. Ada hambatan struktural, kultural, diskriminatif, dan geografis yang membatasi mobilitas.

Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial desa. Stratifikasi berbasis keturunan bergeser ke berbasis prestasi. Struktur sosial menjadi lebih kompleks dan terdiferensiasi. Batas-batas antar lapisan mulai melonggar. Namun, banyak aspek struktur tradisional yang masih bertahan, meskipun dalam bentuk termodifikasi.

Pemahaman tentang struktur sosial sangat penting bagi pembangunan desa. Program pembangunan harus didasarkan pada pemetaan sosial yang akurat, berupaya mengatasi ketimpangan struktural, membangun partisipasi inklusif, memanfaatkan modal sosial yang ada, dan mengelola konflik secara konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, struktur sosial dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

L. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Amati desa Anda atau desa di sekitar Anda. Lapisan-lapisan sosial apa yang dapat Anda identifikasi? Apa dasar dari lapisan-lapisan tersebut (keturunan, kekuasaan, kekayaan, atau faktor lain)?
2. Bagaimana hubungan antara kelompok yang berbeda lapisan dalam keseharian? Apakah bersifat harmonis, kompetitif, atau ada ketegangan tertentu?
3. Siapa saja yang termasuk kelompok marginal atau terpinggirkan di desa Anda? Faktor apa yang menyebabkan mereka terpinggirkan?
4. Saluran mobilitas sosial apa yang paling efektif di desa Anda? Apakah ada contoh orang yang berhasil naik kelas melalui saluran tersebut?
5. Bagaimana pengaruh modernisasi (pendidikan, teknologi, urbanisasi) terhadap struktur sosial di desa Anda? Apakah membuat struktur lebih terbuka atau justru menciptakan ketimpangan baru?
6. Menurut Anda, bagaimana seharusnya program pembangunan desa memperhatikan struktur sosial yang ada agar dapat menjangkau semua kelompok secara adil?

BAB III

KARAKTERISTIK SOSIAL BUDAYA DESA

A. PENGANTAR: MEMAHAMI JIWA DAN IDENTITAS MASYARAKAT DESA

Setiap komunitas manusia memiliki jiwa dan identitas yang membedakannya dari komunitas lain. Jiwa itu tercermin dalam cara mereka berpikir, bertindak, berinteraksi, dan memaknai dunianya. Dalam masyarakat desa, jiwa kolektif ini terwujud dalam seperangkat karakteristik sosial budaya yang khas—sebuah mozaik nilai, norma, tradisi, dan pola hubungan yang diwariskan secara turun-temurun dan terus hidup dalam keseharian warga.

Karakteristik sosial budaya desa bukan sekadar artefak masa lalu yang statis dan beku. Ia adalah entitas hidup yang terus bernapas, beradaptasi, dan berdialektika dengan perubahan zaman. Di tengah arus modernisasi yang deras, karakteristik ini menjadi semacam "immune system" yang melindungi desa dari gempuran nilai-nilai asing yang tidak sesuai, sekaligus menjadi "modal sosial" yang memperkuat kohesi dan ketahanan masyarakat.

Bab ini akan mengupas secara mendalam berbagai karakteristik sosial budaya yang melekat pada masyarakat desa. Kita akan memulai dengan memahami kerangka teoretis tentang masyarakat tradisional menurut para ahli, kemudian menelusuri nilai-nilai inti seperti gotong royong dan solidaritas mekanik, menjelajahi kekayaan tradisi dan budaya lokal, serta menganalisis bagaimana karakteristik ini berfungsi sebagai perekat sosial dan modal pembangunan. Pada bagian akhir, kita akan membahas tantangan modernisasi serta upaya-upaya pelestarian yang dapat dilakukan agar nilai-nilai luhur ini tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

B. KERANGKA TEORETIS: MEMAHAMI MASYARAKAT DESA SEBAGAI GEMEINSCHAFT

Para sosiologi klasik telah lama memberikan perhatian pada karakteristik khas masyarakat desa yang membedakannya dari masyarakat kota. Pemikiran mereka menjadi landasan penting untuk memahami fenomena sosial budaya di pedesaan.

1. Gemeinschaft dan Gesellschaft: Ferdinand Tönnies

Ferdinand Tönnies (1855-1936), sosiolog Jerman, membuat dikotomi terkenal antara *Gemeinschaft* (community/komunitas) dan *Gesellschaft* (society/asosiasi). *Gemeinschaft* merujuk pada bentuk kehidupan bersama yang didasarkan pada ikatan batin yang alami dan organik—hubungan darah (kekerabatan), tempat (kedekatan wilayah), dan jiwa (persahabatan, nilai bersama). Ciri-cirinya adalah hubungan personal yang intim, saling mengenal secara mendalam, dan adanya rasa "kita" yang kuat.

Masyarakat desa, menurut Tönnies, adalah contoh paling jelas dari *Gemeinschaft*. Di dalamnya, orang-orang hidup bersama karena ikatan tradisi, kesamaan nilai, dan solidaritas spontan. Hubungan antarwarga bersifat personal dan menyeluruh—mereka tidak hanya berinteraksi sebagai petani atau tetangga, tetapi sebagai manusia utuh yang saling mengenal sejarah, keluarga, dan karakter masing-masing.

Sebaliknya, *Gesellschaft* adalah bentuk kehidupan yang lebih mekanis dan artifisial, khas masyarakat kota modern. Hubungan antarindividu bersifat impersonal, segmental, dan didasarkan pada kontrak serta kepentingan rasional. Orang berinteraksi sebagai pemilik peran—penjual dan pembeli, atasan dan bawahan—bukan sebagai pribadi utuh.

Dikotomi Tönnies ini membantu kita memahami mengapa karakteristik sosial budaya desa begitu berbeda dengan kota. Di desa, ikatan emosional dan tradisi masih menjadi perekat utama, sementara di kota, ikatan fungsional dan rasionalitas lebih dominan.

2. Tipologi Masyarakat Tradisional Menurut Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979), sosiolog Amerika, mengembangkan kerangka *pattern variables* yang membedakan masyarakat tradisional (termasuk desa) dari masyarakat modern. Dalam menganalisis masyarakat desa, Parsons mengidentifikasi lima ciri khas yang saling terkait :

a. Afektifitas (Affectivity)

Masyarakat desa memiliki hubungan yang sarat dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Hubungan antarwarga tidak didasarkan pada perhitungan rasional untung-rugi, tetapi pada ikatan emosional yang tulus. Wujudnya tampak dalam sikap tolong-menolong tanpa pamrih, ungkapan simpati terhadap musibah yang menimpa orang lain, dan partisipasi spontan dalam acara-acara suka maupun duka. Ketika ada tetangga yang sakit, warga berbondong-bondong menjenguk. Ketika ada warga yang meninggal, seluruh desa larut dalam duka dan membantu prosesi pemakaman. Ini semua adalah manifestasi dari afektifitas yang mendalam.

b. Orientasi Kolektif (Collectivity Orientation)

Konsekuensi logis dari afektifitas adalah orientasi kolektif—masyarakat desa sangat mementingkan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Mereka tidak suka menonjolkan diri, tidak ingin berbeda pendapat dari mayoritas, dan cenderung menjaga keseragaman dalam banyak hal. Keputusan-keputusan penting selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Keberhasilan seseorang dirayakan bersama, dan kegagalan seseorang ditanggung bersama. Orientasi kolektif ini tampak dalam berbagai kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, dan upacara adat yang melibatkan seluruh warga.

c. Partikularisme (Particularism)

Partikularisme berarti bahwa perlakuan terhadap orang lain didasarkan pada kekhususan hubungan, bukan pada standar universal. Orang diperlakukan berbeda tergantung pada siapa mereka—apakah keluarga dekat, tetangga, atau orang luar. Perlakuan istimewa diberikan kepada mereka yang memiliki ikatan kekerabatan atau kedekatan emosional. Dalam bahasa Parsons, lawan dari partikularisme adalah universalisme yang menjadi ciri masyarakat modern, di mana setiap orang diperlakukan sama berdasarkan standar yang berlaku untuk semua.

Di desa, partikularisme terlihat dalam berbagai praktik: tetangga dekat mendapat prioritas dalam pinjaman, keluarga besar mendapat perhatian lebih dalam pembagian warisan, atau orang sekampung mendapat harga khusus saat berjualan. Meskipun dari perspektif modern hal ini bisa dianggap tidak adil, dalam konteks desa ia justru memperkuat ikatan komunal dan rasa saling memiliki.

d. Askripsi (Ascription)

Askripsi berarti bahwa status dan penghargaan seseorang lebih didasarkan pada atribut yang melekat sejak lahir (keturunan, umur, jenis kelamin) daripada pada prestasi yang dicapai. Di desa, keturunan bangsawan atau tokoh adat masih dihormati secara khusus. Orang yang lebih tua disegarkan pendapatnya. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang secara tradisional sudah ditentukan.

Meskipun dalam perkembangannya faktor prestasi (seperti pendidikan dan kekayaan) mulai berpengaruh, unsur askripsi masih kuat dalam kehidupan desa. Seseorang dari keluarga "baik-baik" akan lebih mudah

dipercaya menduduki jabatan tertentu. Anak-anak dari tokoh masyarakat akan mewarisi jaringan dan pengaruh orang tuanya.

e. Kekabaran (Diffuseness)

Kekabaran atau *diffuseness* berarti bahwa hubungan antar pribadi di desa bersifat menyeluruh dan tidak terspesialisasi. Orang tidak membatasi interaksi pada peran tertentu, tetapi terlibat sebagai pribadi utuh. Akibatnya, komunikasi seringkali bersifat tidak langsung dan menggunakan bahasa yang tidak eksplisit.

Di desa, ketika seseorang ingin menyampaikan kritik atau keberatan, ia tidak akan mengatakannya secara terang-terangan, tetapi menggunakan sindiran, kiasan, atau perantara orang ketiga. Menolak undangan pun harus dilakukan dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan agar tidak menyinggung perasaan. Gaya komunikasi yang "kabur" ini sebenarnya adalah bentuk kesopanan dan penghormatan terhadap perasaan orang lain, yang sangat dihargai dalam budaya desa.

3. Masyarakat Desa sebagai Masyarakat Tradisional

Berdasarkan kerangka Parsons, masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai masyarakat tradisional—masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama dan belum terlalu terpengaruh oleh perubahan dari luar . Ciri-cirinya antara lain: ketergantungan tinggi pada lingkungan alam, struktur sosial yang relatif stabil, dan nilai-nilai kolektif yang kuat .

Namun demikian, tidak semua masyarakat desa dapat disebut tradisional dalam arti yang murni. Ada desa-desa yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat yang lebih modern, di mana pengaruh luar mulai masuk dan mengubah berbagai aspek kehidupan. Masyarakat transisi ini dicirikan oleh pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke sektor lain, peningkatan tingkat pendidikan, keterbukaan terhadap perubahan, dan mobilitas yang tinggi .

Dengan kata lain, karakteristik sosial budaya desa bersifat dinamis—ia dapat bergeser seiring waktu dan pengaruh yang masuk. Namun demikian, inti dari nilai-nilai tradisional seringkali masih bertahan meskipun dalam bentuk yang termodifikasi.

C. GOTONG ROYONG: JIWA DAN RUH KEHIDUPAN DESA

Di antara sekian banyak karakteristik sosial budaya desa, gotong royong adalah yang paling menonjol dan paling sering disebut. Ia adalah jiwa dan ruh yang menghidupi denyut nadi kehidupan masyarakat desa.

1. Pengertian dan Hakikat Gotong Royong

Gotong royong secara etimologis berasal dari kata "gotong" yang berarti pikul atau angkat, dan "royong" yang berarti bersama-sama. Secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat atau memikul beban secara bersama-sama. Dalam pengertian sosiologis, gotong royong adalah semangat bekerja bersama-sama untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan langsung, didasari oleh rasa kebersamaan dan kesadaran bahwa kepentingan bersama adalah kepentingan semua warga.

Gotong royong bukan sekadar aktivitas fisik bersama. Ia adalah manifestasi dari nilai-nilai yang lebih dalam: solidaritas, egalitarianisme, resiprositas (timbal balik), dan kepedulian sosial. Ketika warga bergotong royong membangun jalan desa, mereka tidak hanya memindahkan tanah dan batu, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, menegaskan kembali komitmen pada kebersamaan, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.

2. Bentuk-Bentuk Gotong Royong

Dalam praktiknya, gotong royong di desa dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk:

a. Gotong Royong dalam Aktivitas Produktif

Bentuk ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan produksi. Contoh paling klasik adalah *sambatan* atau *gugur gunung* di Jawa—tradisi gotong royong membangun rumah warga. Ketika seorang warga hendak membangun atau memperbaiki rumahnya, tetangga dan kerabat datang membantu tanpa dibayar. Tuan rumah cukup menyediakan makanan dan minuman selama proses pembangunan. Setelah selesai, di kemudian hari, tuan rumah akan membantu balik ketika tetangganya yang dulu membantu memiliki hajat serupa.

Di sektor pertanian, gotong royong tampak dalam praktik *liliuran* (sistem giliran menggarap sawah bersama) atau *sinoman* saat musim panen. Petani saling membantu memanen padi, bekerja di sawah milik satu petani hari ini, lalu besoknya pindah ke sawah petani lain.

b. Gotong Royong dalam Aktivitas Sosial dan Ritual

Bentuk ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam siklus hidup: kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian. Dalam acara-acara ini, warga desa secara spontan datang membantu: menyiapkan konsumsi, mendirikan tenda, mengatur tempat duduk, menerima tamu, dan berbagai tugas lainnya. Tidak ada yang memerintah, semua bergerak atas kesadaran sendiri.

Pada acara kematian, misalnya, begitu kabar duka menyebar, warga berbondong-bondong datang ke rumah duka. Kaum laki-laki membantu menggali kubur, mendirikan tenda, dan mengatur lalu lintas. Kaum perempuan membantu di dapur, menyiapkan konsumsi untuk takziah, dan menemani keluarga yang berduka. Semua dilakukan dengan sigap dan penuh empati.

c. Gotong Royong dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Bentuk ini berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan umum: pembangunan atau perbaikan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, balai desa, masjid, atau fasilitas umum lainnya. Dalam kegiatan ini, warga menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kadang material secara sukarela.

Contoh nyata dapat dilihat di berbagai desa di Indonesia. Di Desa Dawung, Sragen, gotong royong menjadi denyut nadi kehidupan sosial. Hampir setiap bulan warga mengadakan kerja bakti massal—membersihkan saluran air, meratakan jalan kampung, memperbaiki pos ronda, hingga merawat fasilitas umum. Tidak ada paksaan, tidak ada imbalan; semua dilakukan atas dasar kesadaran dan kepedulian bersama. Ketika pembangunan saluran irigasi di Dusun Ngrampal, warga bergotong royong mengerjakannya sehingga saluran sepanjang hampir 300 meter bisa selesai hanya dalam waktu satu minggu .

Di Desa Sidamukti, Cilacap, gotong royong menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur desa. Jalan yang dulu berlubang dan sulit dilalui kini berubah menjadi mulus. Jembatan yang menghubungkan desa dengan wilayah lain diperbaiki sehingga memudahkan akses transportasi. Saluran irigasi yang dibangun secara gotong royong meningkatkan hasil pertanian warga. Semua ini terwujud berkat kerja sama dan semangat kekeluargaan warga .

3. Fungsi dan Manfaat Gotong Royong

Gotong royong memiliki beragam fungsi dan manfaat bagi kehidupan desa:

Pertama, **memperkuat kohesi sosial**. Gotong royong menjadi ajang interaksi yang mempertemukan semua warga dari berbagai latar belakang. Dalam kerja bersama, sekat-sekat sosial—kaya-miskin, tua-muda, laki-laki-perempuan—melebur dalam satu tujuan bersama. Rasa kebersamaan dan solidaritas yang terbangun dalam gotong royong memperkuat ikatan sosial yang menjadi perekat masyarakat.

Kedua, **membangun rasa memiliki**. Ketika warga turun tangan membangun jalan atau jembatan desa, mereka merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Rasa memiliki ini mendorong mereka untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun bersama. Berbeda dengan proyek yang dikerjakan kontraktor dari luar, fasilitas hasil gotong royong biasanya lebih terawat karena ada ikatan emosional antara pemilik (warga) dengan aset tersebut.

Ketiga, **menghemat biaya pembangunan**. Gotong royong memobilisasi tenaga kerja sukarela sehingga biaya pembangunan dapat ditekan. Pemerintah desa atau tuan rumah cukup menyediakan material utama, sementara tenaga kerja berasal dari warga. Hal ini sangat berarti bagi desa dengan anggaran terbatas.

Keempat, **mempercepat penyelesaian pekerjaan**. Dengan melibatkan banyak tenaga kerja secara serentak, pekerjaan yang berat dan besar dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Proyek yang jika dikerjakan oleh segelintir orang bisa memakan waktu berbulan-bulan, dengan gotong royong dapat rampung dalam hitungan hari atau minggu.

Kelima, **menjaga kesehatan mental masyarakat**. Gotong royong menciptakan jejaring dukungan sosial yang kuat. Ketika seseorang tertimpa musibah, ia tahu bahwa ada komunitas yang akan membantunya. Rasa aman secara psikologis ini penting bagi kesehatan mental dan kebahagiaan warga.

Keenam, **menjadi sarana pendidikan nilai**. Melalui gotong royong, nilai-nilai seperti kebersamaan, kepedulian, kerelaan berkorban, dan tanggung jawab sosial diwariskan secara alami dari generasi tua ke generasi muda. Anak-anak yang melihat orang tuanya bergotong royong akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari cara hidup yang wajar.

4. Tantangan Gotong Royong di Era Modern

Meskipun masih kuat, gotong royong menghadapi tantangan serius di era modern. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Pergeseran orientasi dari kolektif ke individual. Modernisasi membawa nilai-nilai individualisme yang menekankan kebebasan pribadi dan pencapaian personal. Akibatnya, sebagian warga, terutama generasi muda, mulai enggan terlibat dalam kegiatan gotong royong yang dianggap menyita waktu dan tidak memberikan keuntungan langsung.

Mobilitas dan kesibukan ekonomi. Semakin banyak warga desa yang bekerja di luar sektor pertanian dengan jam kerja yang tetap. Mereka sulit meluangkan waktu untuk gotong royong di hari kerja. Bahkan di akhir pekan, banyak yang memilih istirahat atau mengurus kepentingan pribadi.

Masuknya ekonomi uang. Dahulu, gotong royong adalah cara paling efisien untuk menyelesaikan pekerjaan karena uang langka. Sekarang, banyak warga yang lebih memilih membayar tenaga kerja daripada harus meluangkan waktu untuk gotong royong. Praktik *sambatan* membangun rumah, misalnya, mulai tergantikan oleh kontraktor bangunan profesional.

Perubahan struktur sosial. Melemahnya ikatan kekerabatan dan meningkatnya heterogenitas penduduk desa (karena migrasi masuk) membuat basis sosial gotong royong—yaitu rasa saling kenal dan saling percaya—mulai terkikis.

Namun demikian, gotong royong tidak serta-merta hilang. Ia beradaptasi dalam bentuk-bentuk baru. Gotong royong sekarang bisa juga dilakukan melalui penggalangan dana online untuk warga yang tertimpa musibah, atau koordinasi melalui grup WhatsApp untuk kerja bakti. Inti dari gotong royong—kepedulian dan kebersamaan—tetap hidup, hanya mediumnya yang berubah.

D. SOLIDARITAS SOSIAL: PEREKAT YANG MEMPERSATUKAN

Jika gotong royong adalah wujud nyata dari kebersamaan, solidaritas sosial adalah fondasi yang mendasarinya. Solidaritaslah yang membuat warga desa merasa terikat satu sama lain, peduli terhadap nasib sesama, dan bersedia berkorban untuk kepentingan bersama.

1. Pengertian Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial, secara sederhana, dapat diartikan sebagai rasa kesatuan dan kebersamaan yang mengikat anggota-anggota dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ia adalah perasaan "kita" yang membuat individu merasa menjadi bagian dari suatu kolektivitas, bukan sekadar kumpulan orang yang kebetulan tinggal di tempat yang sama.

Emile Durkheim (1858-1917), sosiolog Perancis yang pemikirannya tentang solidaritas menjadi rujukan klasik, mendefinisikan solidaritas sebagai perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya, mereka akan membentuk persahabatan, menjadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan bersama .

Solidaritas merujuk pada hubungan antara individu dan/atau kelompok yang berdasarkan pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta pengalaman emosional bersama. Unsur-unsurnya meliputi kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama, dan kepentingan bersama di antara para anggota .

2. Solidaritas Mekanik: Tipe Solidaritas Masyarakat Desa

Durkheim membedakan dua tipe solidaritas: mekanik dan organik. Perbedaan ini berkaitan erat dengan tingkat kompleksitas pembagian kerja dalam masyarakat.

Solidaritas mekanik adalah tipe solidaritas yang berdasarkan pada kesadaran kolektif (*conscience collective*) yang kuat—yaitu sistem kepercayaan dan perasaan bersama yang rata-rata ada pada semua anggota masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, individu diikat oleh kesamaan: mereka melakukan pekerjaan yang kurang lebih sama, menganut nilai-nilai yang sama, dan memiliki pengalaman hidup yang serupa. Solidaritas ini disebut "mekanik" karena bagian-bagian masyarakat bekerja seperti bagian-bagian mesin yang sederhana—masing-masing serupa dan melakukan fungsi yang sama .

Solidaritas mekanik biasanya ditemukan pada masyarakat sederhana atau tradisional, termasuk masyarakat desa. Ciri-cirinya antara lain :

- **Kesadaran kolektif yang kuat**. Nilai-nilai, norma, dan kepercayaan dianut secara bersama oleh hampir semua anggota masyarakat. Penyimpangan dari nilai-nilai ini akan mendapat sanksi keras karena dianggap mengancam solidaritas kelompok.
- **Homogenitas**. Anggota masyarakat relatif homogen dalam pekerjaan, gaya hidup, dan pandangan hidup. Di desa agraris, misalnya, sebagian besar warga adalah petani dengan pola hidup yang serupa.
- **Individualitas rendah**. Identitas individu masih melebur dalam identitas kolektif. Orang lebih dikenal sebagai "warga Desa X" atau "anak dari Si Y" daripada sebagai individu otonom.
- **Hukum represif**. Pelanggaran terhadap norma akan dihukum dengan tujuan untuk mempertahankan solidaritas kelompok dan menegaskan kembali nilai-nilai bersama.

Contoh solidaritas mekanik dalam kehidupan desa sehari-hari: ketika ada warga yang tertimpa musibah, seluruh warga secara spontan datang memberikan pertolongan. Tidak perlu diminta, tidak perlu diorganisir—semua bergerak karena ada perasaan bersama bahwa "kita adalah satu keluarga" .

3. Solidaritas Organik: Tipe Solidaritas Masyarakat Modern

Sebagai pembanding, **solidaritas organik** adalah tipe solidaritas yang muncul dalam masyarakat kompleks dengan pembagian kerja yang rumit. Dalam solidaritas organik, individu diikat bukan oleh kesamaan, tetapi oleh **saling ketergantungan**. Masing-masing memiliki spesialisasi dan fungsi yang berbeda, tetapi mereka saling membutuhkan—seperti organ-organ dalam tubuh makhluk hidup yang berbeda fungsi tetapi saling bergantung.

Dalam solidaritas organik, kesadaran kolektif melemah dan memberi ruang bagi individualitas yang lebih besar. Hukum bersifat restitutif (bertujuan memulihkan keadaan) daripada represif. Masyarakat kota modern adalah contoh dari solidaritas organik .

4. Relevansi Solidaritas Mekanik dalam Masyarakat Desa Kontemporer

Meskipun masyarakat desa saat ini tidak semurni masa lalu—pembagian kerja sudah mulai terdiferensiasi, kontak dengan dunia luar semakin intensif, dan nilai-nilai mulai bergeser—unsur-unsur solidaritas mekanik masih kuat bertahan. Dalam banyak situasi, kesadaran kolektif masih menjadi kekuatan pengikat yang ampuh.

Penelitian tentang solidaritas sosial mahasiswa Kembang Anggalarang dalam pembangunan masyarakat Desa Panyutran, Pangandaran, menunjukkan bahwa dalam praktiknya, solidaritas mekanik dan organik dapat berbaur. Organisasi mahasiswa tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas (ciri solidaritas organik), tetapi juga diikat oleh kesadaran kolektif dan kebersamaan yang kuat (ciri solidaritas mekanik).

Interaksi dan komunikasi yang intensif selama proses pembangunan masyarakat memperkuat ikatan solidaritas di antara anggota .

Ini menunjukkan bahwa solidaritas mekanik tidak sepenuhnya tergantikan oleh solidaritas organik. Dalam komunitas sekecil desa, di mana orang saling mengenal secara personal dan memiliki sejarah bersama, ikatan-ikatan emosional dan kultural tetap menjadi perekat penting, bahkan ketika pembagian kerja sudah semakin kompleks.

E. TRADISI DAN BUDAYA LOKAL: WARISAN YANG HIDUP

Selain gotong royong dan solidaritas, masyarakat desa juga kaya akan tradisi dan budaya lokal yang menjadi penanda identitas sekaligus pedoman hidup. Tradisi dan budaya ini bukan sekadar tontonan atau upacara seremonial, tetapi memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat.

1. Upacara Adat dan Ritual

Hampir setiap desa di Indonesia memiliki upacara adat dan ritual yang berkaitan dengan siklus kehidupan (kelahiran, pernikahan, kematian) atau siklus pertanian (menanam, panen). Upacara-upacara ini sarat dengan nilai-nilai dan kearifan lokal yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam.

Murok Jerami pada Suku Mengkanau di Bangka Tengah adalah contoh tradisi yang masih terpelihara. Ritual adat ini berkaitan dengan panen padi dan menjadi simbol rasa syukur kepada alam. Uniknya, tradisi ini tidak hanya menjadi ritual adat, tetapi juga telah berkembang menjadi agenda wisata budaya Kabupaten Bangka Tengah. Setiap kali pesta adat digelar, desa mengalami perputaran ekonomi. UMKM setempat membuka lapak, wisatawan datang menyaksikan prosesi, dan produk khas desa seperti padi merah organik menjadi incaran. Tradisi Murok Jerami bahkan telah tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM, menegaskan bahwa tradisi ini tidak hanya bernilai lokal tetapi juga menjadi bagian dari warisan bangsa .

Garebek Gunung Tape di Desa Tawaran, Tuban, adalah contoh lain. Tradisi tahunan ini menampilkan gunungan tape—ribuan tape yang ditumpuk membentuk seperti gunung, lalu diarak keliling kampung dan diperebutkan warga. Tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Desa Tawaran dijuluki sebagai Desa Tape karena hampir seluruh warga menggantungkan hidup dari produksi tape. Sejak tradisi ini digelar secara rutin, pesanan tape meningkat drastis, bahkan banyak berasal dari luar daerah. Kades Tawaran menegaskan, "Tradisi Garebek Tape ini adalah warisan budaya yang berhasil menggerakkan UMKM. Kalau dahulu hanya tiga perajin, sekarang hampir seluruh warga membuat tape" .

Dua contoh ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya lokal tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang usang dan tidak relevan. Justru, jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi aset berharga—baik untuk memperkuat identitas maupun untuk menggerakkan ekonomi desa.

2. Kesenian Tradisional

Kesenian tradisional—tari, musik, teater, seni rupa—juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan desa. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan, kritik sosial, dan penguatan nilai-nilai.

Tayub di Jawa, Ronggeng di Pasundan, Reog di Ponorogo, Randai di Minangkabau, Tari Kecak di Bali—semua adalah contoh kekayaan seni tradisional yang lahir dan berkembang di desa. Sayangnya, banyak kesenian tradisional yang mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda. Mereka lebih tertarik pada hiburan modern seperti musik pop, film, dan media sosial. Beberapa generasi muda bahkan menganggap kesenian tradisional membosankan dan tidak relevan dengan zaman sekarang .

Tantangan ini membutuhkan respons kreatif. Di beberapa desa, kesenian tradisional mulai dikemas ulang agar lebih menarik bagi generasi muda, misalnya dengan kolaborasi antara musik tradisional dan modern, atau dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Yang penting, esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian tersebut tetap terjaga.

3. Bahasa Daerah

Bahasa daerah adalah salah satu unsur budaya yang paling rentan punah di era globalisasi. Di banyak desa, generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, lebih memilih bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing.

Padahal, bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah pembawa nilai-nilai, kearifan lokal, dan cara pandang khas suatu komunitas. Dalam bahasa daerah, tersimpan kosakata yang menggambarkan relasi sosial, pengetahuan tentang alam, dan filosofi hidup yang mungkin tidak dapat diterjemahkan tepat ke bahasa lain.

Upaya pelestarian bahasa daerah perlu dilakukan secara sadar, misalnya melalui muatan lokal di sekolah, lomba-lomba berbahasa daerah, atau penggunaan bahasa daerah dalam acara-acara resmi desa.

4. Sistem Pengetahuan dan Teknologi Tradisional

Masyarakat desa juga memiliki sistem pengetahuan dan teknologi tradisional yang terbukti adaptif terhadap lingkungan lokal. Pengetahuan tentang tanda-tanda alam untuk memprediksi cuaca, sistem irigasi tradisional seperti Subak di Bali, teknologi pembuatan kapal tradisional, pengobatan tradisional dengan tanaman herbal—semua adalah warisan leluhur yang masih relevan hingga kini.

Pengetahuan ini tidak perlu ditinggalkan begitu saja dengan alasan modernisasi. Justru, ia dapat dikombinasikan dengan pengetahuan modern untuk menciptakan solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Misalnya, petani yang memahami tanda-tanda alam dapat mengintegrasikannya dengan informasi cuaca dari BMKG untuk menentukan waktu tanam yang tepat.

F. FUNGSI KARAKTERISTIK SOSIAL BUDAYA DESA

Karakteristik sosial budaya yang khas pada masyarakat desa memiliki beragam fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup masyarakat.

1. Sebagai Perekat Sosial

Fungsi pertama dan paling utama adalah sebagai perekat sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan menciptakan ikatan yang kuat antarwarga. Ikatan ini membuat masyarakat desa lebih tahan terhadap guncangan—baik guncangan alam (bencana) maupun sosial (konflik). Ketika ada masalah, warga tidak merasa sendirian; ada komunitas yang siap membantu.

Dalam masyarakat yang semakin individualistis, fungsi perekat ini menjadi semakin penting. Desa yang berhasil mempertahankan nilai-nilai komunalnya akan menjadi oasis ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang sering membuat orang merasa terasing.

2. Sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan

Selain sebagai perekat, karakteristik sosial budaya desa juga berfungsi sebagai **modal sosial**—sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan bersama, termasuk pembangunan. Kepercayaan antarwarga (trust), jaringan sosial (networks), dan norma-norma resiprositas (norms of reciprocity) adalah aset berharga yang dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan efektivitas program-program pemerintah.

Program pembangunan yang memanfaatkan modal sosial yang ada—misalnya dengan melibatkan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, menggunakan mekanisme gotong royong, atau memanfaatkan jaringan kepercayaan—akan lebih mudah diterima dan lebih berkelanjutan dibandingkan program yang mengabaikan modal sosial.

3. Sebagai Sistem Jaminan Sosial Informal

Di desa, tidak ada program jaminan sosial formal seperti di kota. Namun, nilai-nilai gotong royong dan solidaritas berfungsi sebagai sistem jaminan sosial informal yang efektif. Ketika ada warga yang sakit, miskin, tertimpa musibah, atau meninggal, masyarakat secara spontan akan memberikan bantuan. Tidak ada formulir pendaftaran, tidak ada verifikasi data—yang ada adalah kepedulian tulus dan kesiapan untuk berbagi.

Sistem jaminan sosial informal ini sangat berarti, terutama bagi warga miskin yang mungkin tidak terjangkau oleh program-program formal. Ia adalah jaring pengaman yang menjaga agar warga tidak jatuh terlalu dalam ketika menghadapi masalah.

4. Sebagai Penyaring Pengaruh Luar

Karakteristik sosial budaya desa juga berfungsi sebagai penyaring (filter) terhadap pengaruh-pengaruh luar. Tidak semua hal baru diterima begitu saja. Masyarakat desa memiliki mekanisme seleksi—baik secara sadar melalui musyawarah, maupun secara alami melalui proses adaptasi—untuk menentukan mana pengaruh luar yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan mana yang harus ditolak.

Fungsi penyaring ini penting untuk menjaga agar modernisasi tidak sekadar menjadi "westernisasi" yang mematikan nilai-nilai lokal. Desa dapat menerima teknologi baru, tetapi menolak nilai-nilai individualisme yang ekstrem. Dapat menerima pendidikan modern, tetapi tetap mempertahankan penghormatan kepada orang tua.

5. Sebagai Identitas dan Kebanggaan Komunal

Dalam dunia yang semakin seragam, karakteristik sosial budaya desa menjadi penanda identitas yang membedakan satu komunitas dari komunitas lain. Tradisi, bahasa, kesenian, dan nilai-nilai khas menjadi sumber kebanggaan komunal. Warga merasa memiliki "sesuatu" yang tidak dimiliki orang lain—sesuatu yang membuat mereka unik dan istimewa.

Kebanggaan identitas ini penting untuk harga diri kolektif dan untuk menjaga agar warga, terutama generasi muda, tidak merasa rendah diri di hadapan budaya kota atau asing.

G. TANTANGAN MODERNISASI TERHADAP NILAI-NILAI TRADISIONAL

Meskipun kuat dan berakar dalam, karakteristik sosial budaya desa tidak kebal terhadap perubahan. Arus modernisasi yang deras membawa tantangan serius yang dapat menggerus nilai-nilai tradisional.

1. Masuknya Nilai-Nilai Individualisme

Modernisasi, terutama melalui pendidikan dan media, membawa nilai-nilai individualisme yang menekankan kebebasan pribadi, pencapaian personal, dan hak individu. Nilai-nilai ini, dalam kadar berlebihan, dapat berbenturan dengan nilai-nilai kolektivisme yang menjadi fondasi masyarakat desa.

Akibatnya, sebagian warga—terutama generasi muda—mulai mempertanyakan kewajiban-kewajiban komunal yang dianggap membatasi kebebasan. Mereka mungkin enggan ikut kerja bakti, tidak mau terlibat dalam kegiatan karang taruna, atau menolak sumbangan untuk acara desa. Semua dihitung dengan kalkulus untung-rugi individual, bukan lagi dengan pertimbangan kebersamaan.

2. Perubahan Gaya Hidup dan Pola Konsumsi

Modernisasi juga membawa perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Warga desa mulai mengadopsi gaya hidup kota: konsumtif, hedonis, dan berorientasi pada kesenangan sesaat. Media sosial, dengan segala pengaruhnya, memicu keinginan untuk memiliki barang-barang tertentu, berpenampilan dengan cara tertentu, dan menjalani gaya hidup tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan nilai-nilai lokal.

Gaya hidup baru ini dapat menggeser prioritas. Uang yang dulu ditabung untuk kebutuhan pokok atau disumbangkan untuk kegiatan sosial, sekarang habis untuk membeli ponsel baru, paket data, atau nongkrong di kafe. Gotong royong dianggap kuno, sementara kumpul-kumpul di kafe dianggap modern.

3. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Informasi

Media sosial dan teknologi informasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka akses informasi dan memperluas jaringan. Di sisi lain, ia dapat mengikis interaksi tatap muka yang menjadi ciri khas kehidupan desa. Warga yang sibuk dengan gawainya masing-masing mungkin kehilangan kesempatan untuk ngobrol santai, bersilaturahmi, atau sekadar menyapa tetangga.

Selain itu, media sosial juga membawa nilai-nilai dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia yang mungkin tidak sesuai dengan budaya lokal. Warga desa, terutama generasi muda, terpapar pada konten-konten yang dapat mengubah cara pandang, perilaku, dan aspirasi mereka.

4. Urbanisasi dan Berkurangnya Generasi Muda

Urbanisasi—perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke kota—adalah tantangan serius bagi keberlangsungan nilai-nilai tradisional. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus dan pelestari budaya, justru meninggalkan desa untuk mencari penghidupan di kota.

Akibatnya, terjadi kekosongan generasi. Tradisi-tradisi yang membutuhkan partisipasi pemuda—seperti kesenian daerah atau organisasi kepemudaan—terbengkalai. Nilai-nilai yang seharusnya diwariskan secara alami dari generasi tua ke muda terputus karena generasi muda tidak ada di desa.

5. Komersialisasi dan Ekonomi Uang

Masuknya ekonomi uang secara masif ke desa mengubah banyak hal. Dahulu, banyak urusan diselesaikan dengan barter jasa atau gotong royong. Sekarang, hampir semua urusan diselesaikan dengan uang. Mau bangun rumah? Bayar tukang. Mau panen? Bayar buruh. Mau bersih-bersih lingkungan? Bayar petugas kebersihan.

Komersialisasi ini, meskipun efisien, menggerus semangat gotong royong dan solidaritas. Hubungan sosial yang semula personal dan emosional berubah menjadi transaksional dan impersonal.

6. Penurunan Minat Generasi Muda terhadap Tradisi

Salah satu tantangan paling nyata adalah menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi dan budaya lokal. Mereka menganggap tradisi sebagai sesuatu yang kuno, membosankan, dan tidak relevan. Mereka lebih tertarik pada budaya populer global yang dianggap lebih keren dan lebih sesuai dengan identitas mereka sebagai generasi modern .

Akibatnya, banyak kesenian tradisional yang kekurangan pemain, upacara adat yang hanya dihadiri orang tua, dan bahasa daerah yang semakin jarang digunakan. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin banyak tradisi yang akan punah dalam satu atau dua generasi.

H. UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI TRADISIONAL

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya sadar dan sistematis untuk melestarikan nilai-nilai tradisional, sambil tetap terbuka terhadap kemajuan. Pelestarian tidak berarti membekukan tradisi dalam bentuk aslinya, tetapi menjaga agar esensi nilai-nilai luhur tetap hidup dan relevan, meskipun dalam bentuk yang mungkin termodifikasi.

1. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pendidikan adalah kunci utama pelestarian nilai-nilai tradisional. Kearifan lokal perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, baik formal (sekolah) maupun non-formal (pesantren, madrasah diniyah, kursus-kursus keterampilan).

Di sekolah, muatan lokal dapat diisi dengan materi tentang sejarah desa, bahasa daerah, kesenian tradisional, nilai-nilai gotong royong, dan kearifan ekologis. Anak-anak diajak untuk mengenal, mencintai, dan bangga terhadap warisan budayanya sendiri.

Di luar sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tradisional melalui teladan dan pengajaran langsung. Anak-anak yang sejak kecil diajak terlibat dalam kegiatan gotong royong, upacara adat, dan kesenian tradisional akan tumbuh dengan rasa memiliki dan kecintaan terhadap tradisi .

2. Revitalisasi dan Inovasi Tradisi

Tradisi tidak harus dipertahankan persis seperti bentuk aslinya. Ia dapat direvitalisasi dan diinovasi agar lebih relevan dengan konteks kekinian, tanpa kehilangan esensinya. Kesenian tradisional dapat dikemas ulang dengan sentuhan modern, upacara adat dapat dikolaborasikan dengan agenda wisata, nilai-nilai gotong royong dapat diimplementasikan dalam bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan kehidupan modern.

Di Desa Tawaran, Tuban, tradisi Garebek Gunung Tape direvitalisasi menjadi festival tahunan yang tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga menggerakkan ekonomi desa . Di Bangka Tengah, ritual Murok Jerami dikembangkan menjadi agenda wisata budaya yang mendatangkan wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga . Ini adalah contoh bagaimana inovasi dan revitalisasi dapat membuat tradisi tetap hidup dan bernilai.

3. Pemanfaatan Teknologi untuk Pelestarian Budaya

Teknologi, yang sering dianggap sebagai ancaman bagi tradisi, sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai alat pelestarian yang ampuh. Dokumentasi digital, media sosial, platform berbagi video, dan website desa dapat digunakan untuk merekam, mempromosikan, dan mengajarkan tradisi dan budaya lokal.

Generasi muda yang akrab dengan teknologi dapat dilibatkan dalam upaya ini. Mereka dapat membuat konten kreatif tentang budaya desa, mengelola akun media sosial untuk promosi wisata budaya, atau mengembangkan aplikasi yang memuat informasi tentang tradisi lokal. Dengan cara ini, teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan warisan budayanya.

Penelitian menunjukkan bahwa desa-desa mampu mengintegrasikan tradisi dengan inovasi seperti penggunaan teknologi digital untuk melestarikan kegiatan gotong royong dan seni budaya lokal. Strategi adaptasi yang efektif mencakup penggabungan tradisi dengan teknologi, pengembangan pariwisata budaya, dan penguatan komunitas digital desa .

4. Penguatan Kelembagaan Lokal

Lembaga-lembaga lokal—seperti lembaga adat, karang taruna, PKK, kelompok kesenian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya—memiliki peran strategis dalam pelestarian nilai-nilai tradisional. Mereka adalah wadah di mana tradisi dipraktikkan, diwariskan, dan dikembangkan.

Penguatan kelembagaan lokal dapat dilakukan melalui berbagai cara: pelatihan manajemen organisasi, pendampingan teknis, fasilitasi kegiatan, dan dukungan anggaran. Pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain perlu memberikan perhatian serius pada penguatan kelembagaan ini.

5. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

Pariwisata berbasis budaya dapat menjadi insentif ekonomi bagi pelestarian tradisi. Ketika tradisi memiliki nilai ekonomi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaganya. Upacara adat, kesenian tradisional, kuliner khas, dan kerajinan tangan dapat dikemas sebagai atraksi wisata yang menarik.

Namun, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengkomodifikasi tradisi secara berlebihan hingga kehilangan makna dan kesakralannya. Ada batas antara "memperkenalkan" dan "menjual" tradisi. Kearifan lokal harus menjadi panduan dalam mengelola pariwisata berbasis budaya.

6. Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat

Pada tingkat yang paling fundamental, yang diperlukan adalah membangun kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai tradisional. Masyarakat perlu memahami bahwa tradisi bukan sekadar warisan masa lalu yang usang, tetapi aset berharga yang memberikan identitas, kohesi sosial, dan pedoman hidup.

Kesadaran ini perlu ditanamkan melalui dialog-dialog publik, forum-forum diskusi, penyuluhan, dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Generasi muda perlu diajak berdialog tentang relevansi tradisi dalam kehidupan modern, dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian dengan cara-cara yang kreatif dan sesuai dengan zaman.

I. STUDI KASUS: PRAKTIK PELESTARIAN NILAI-NILAI TRADISIONAL

Untuk memperjelas bagaimana upaya pelestarian dilakukan dalam praktiknya, mari kita lihat beberapa studi kasus dari berbagai desa di Indonesia.

1. Desa Dawung, Sragen: Gotong Royong sebagai Identitas

Desa Dawung di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, adalah contoh desa yang berhasil mempertahankan semangat gotong royong di tengah arus modernisasi. Di desa ini, gotong royong bukan hanya slogan, tetapi benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, dari generasi tua hingga muda.

Hampir setiap bulan, warga mengadakan kerja bakti massal yang melibatkan seluruh RT. Kegiatannya beragam: membersihkan saluran air, meratakan jalan kampung, memperbaiki pos ronda, hingga merawat fasilitas umum seperti balai desa, masjid, dan sekolah. Tidak ada paksaan, tidak ada imbalan—semua dilakukan atas dasar kesadaran dan kepedulian bersama.

Salah satu kegiatan gotong royong terbesar adalah pembangunan saluran irigasi di Dusun Ngrampal, yang dikerjakan secara swadaya oleh warga. Pemerintah desa hanya menyediakan material utama, sementara

seluruh tenaga kerja berasal dari warga desa sendiri. Berkat kebersamaan ini, saluran sepanjang hampir 300 meter bisa selesai hanya dalam waktu satu minggu.

Kepala Desa Dawung menegaskan, "Gotong royong adalah identitas kita. Kalau semua desa di Indonesia menjaga semangat ini, saya yakin desa akan jadi tempat tinggal yang paling nyaman. Kami di Dawung ingin memberi contoh bahwa kemajuan tidak selalu harus mahal—asal warganya kompak, semua bisa dicapai."

Generasi muda pun dilibatkan aktif melalui Karang Taruna Dawung Muda, yang rutin mengadakan kegiatan sosial seperti penghijauan, penanaman pohon, dan kampanye kebersihan lingkungan. Dengan cara ini, nilai gotong royong tidak hanya berhenti pada generasi tua, tapi terus mengalir menjadi budaya lintas generasi .

2. Desa Bendasari, Ciamis: Menyeimbangkan Modernitas dan Tradisi

Desa Bendasari di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, menghadapi tantangan yang sama dengan banyak desa lain: bagaimana menyeimbangkan modernitas dan tradisi. Namun, desa ini melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keseimbangan tersebut.

Pemerintah desa bersama perangkat desa melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah program penyuluhan rutin yang memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Materi yang disampaikan mencakup sejarah, budaya, dan adat istiadat Desa Bendasari, serta dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat.

Selain penyuluhan, perangkat desa juga memanfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Melalui akun resmi desa di Facebook dan Instagram, mereka membagikan konten-konten tentang nilai-nilai luhur desa dan ajakan untuk melestarikannya.

Lokakarya interaktif juga diselenggarakan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam lokakarya ini, warga berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi bersama untuk menjaga harmonisasi antara kemajuan zaman dan nilai-nilai tradisional.

Hasilnya, warga desa kini semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi sambil tetap melestarikan praktik budaya. Rasa bangga terhadap identitas budaya meningkat. Warga telah membentuk kelompok-kelompok yang didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan tentang seni, bahasa, dan adat istiadat setempat .

3. Tradisi Murok Jerami di Bangka Tengah: Dari Ritual ke Wisata Budaya

Tradisi Murok Jerami pada Suku Mengkanau di Bangka Tengah adalah contoh sukses bagaimana sebuah tradisi dapat direvitalisasi dan dikembangkan menjadi aset ekonomi tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

Ritual adat yang berkaitan dengan panen padi ini telah dikemas menjadi agenda wisata budaya Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga setempat memasukkan ritual ini ke dalam kalender tahunan karena sarat dengan nilai kearifan lokal.

Dampak ekonominya signifikan. Setiap kali pesta adat digelar, desa mengalami perputaran ekonomi. UMKM setempat membuka lapak, wisatawan datang menyaksikan prosesi, dan produk khas desa seperti

padi merah organik menjadi incaran. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang unik, memberikan pengalaman berbeda yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.

Yang lebih penting, tradisi ini melibatkan generasi muda. Kepala Desa Namang mendorong anak-anak sekolah untuk selalu terlibat dalam prosesi, diajak menumbuk padi dan mengayun batang padi. "Keterlibatan anak-anak adalah cara paling efektif menanamkan rasa memiliki. Jika sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan tradisi, besar kemungkinan kelak mereka akan menjaga dan melanjutkannya" .

Tradisi Murok Jerami bahkan telah tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Nasional, menegaskan bahwa tradisi ini tidak hanya bernilai lokal tetapi juga menjadi bagian dari warisan bangsa.

J. RANGKUMAN

Karakteristik sosial budaya masyarakat desa merupakan kekayaan yang tak ternilai. Ia adalah jiwa dan identitas yang membedakan desa dari komunitas lain, sekaligus modal sosial yang menjadi fondasi bagi kohesi dan pembangunan.

Gotong royong adalah nilai inti yang paling menonjol—semangat bekerja bersama untuk kepentingan umum tanpa pamrih, yang terwujud dalam berbagai bentuk: sambatan, liliuran, kerja bakti, dan partisipasi dalam acara-acara sosial. Ia berfungsi sebagai perekat sosial, penghemat biaya, sistem jaminan sosial informal, dan sarana pendidikan nilai.

Solidaritas sosial, dalam kerangka Emile Durkheim sebagai solidaritas mekanik, adalah fondasi yang mendasari gotong royong. Berdasarkan kesadaran kolektif dan kesamaan, solidaritas ini mengikat warga dalam ikatan moral yang kuat. Meskipun masyarakat desa semakin kompleks, unsur-unsur solidaritas mekanik masih bertahan dan berbaur dengan solidaritas organik.

Tradisi dan budaya lokal—upacara adat, kesenian, bahasa, sistem pengetahuan—adalah manifestasi konkret dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ia bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi entitas hidup yang terus berkembang dan beradaptasi. Dalam banyak kasus, tradisi dapat menjadi aset ekonomi melalui pengembangan pariwisata budaya.

Namun, arus modernisasi membawa tantangan serius: individualisme, perubahan gaya hidup, pengaruh media sosial, urbanisasi, komersialisasi, dan menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi. Semua ini menggerus nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi fondasi kehidupan desa.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya sadar dan sistematis untuk melestarikan nilai-nilai tradisional: pendidikan berbasis kearifan lokal, revitalisasi dan inovasi tradisi, pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan pariwisata berbasis budaya, dan membangun kesadaran kritis masyarakat.

Studi kasus dari berbagai desa—Dawung di Sragen, Bendasari di Ciamis, Murok Jerami di Bangka Tengah—menunjukkan bahwa pelestarian bukanlah utopia. Dengan komitmen, kreativitas, dan kerja sama

semua pihak, nilai-nilai luhur dapat terus hidup dan relevan, bahkan menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman.

Pada akhirnya, karakteristik sosial budaya desa bukanlah beban yang menghambat kemajuan, tetapi justru aset yang memperkuat ketahanan dan daya saing desa. Desa yang maju adalah desa yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan modern, melahirkan sintesis kreatif yang melampaui dikotomi "tradisional versus modern". Seperti kata Kepala Desa Dawung, "kemajuan tidak selalu harus mahal—asal warganya kompak, semua bisa dicapai."

K. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Amati desa Anda atau desa di sekitar Anda. Praktik gotong royong apa saja yang masih berlangsung? Apakah ada perubahan bentuk atau intensitas dibandingkan masa lalu? Faktor apa yang menyebabkan perubahan tersebut?
2. Menurut Anda, apakah solidaritas mekanik (berbasis kesamaan) masih dominan di desa Anda, atau sudah bergeser ke solidaritas organik (berbasis saling ketergantungan)? Berikan contoh konkret!
3. Tradisi atau upacara adat apa yang masih dilestarikan di desa Anda? Apakah generasi muda masih terlibat aktif? Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana cara meningkatkannya?
4. Menurut Anda, bagaimana pengaruh media sosial dan teknologi digital terhadap nilai-nilai tradisional di desa? Apakah lebih banyak dampak positif atau negatif?
5. Upaya pelestarian seperti apa yang paling efektif menurut Anda untuk menjaga nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi? Siapa saja pihak yang harus terlibat?
6. Apakah tradisi dan modernitas selalu bertentangan? Bisakah keduanya berjalan beriringan secara harmonis? Berikan contoh dari pengalaman Anda!

BAB IV
UNSUR-UNSUR DINAMIKA SOSIAL

A. PENGANTAR: MEMBEDAH MESIN PENGGERAK PERUBAHAN SOSIAL

Setiap masyarakat, termasuk masyarakat desa, adalah sebuah sistem yang hidup dan bergerak. Ia bukan sekadar kumpulan individu yang statis, melainkan sebuah organisme kompleks di mana berbagai elemen saling berinteraksi, mempengaruhi, dan membentuk satu sama lain. Untuk memahami bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat, kita perlu membedah "mesin" yang menjadi penggeraknya—yaitu unsur-unsur dinamika sosial.

Bayangkan sebuah orkestra. Musik yang indah tidak dihasilkan oleh satu alat musik saja, melainkan oleh harmoni berbagai instrumen yang dimainkan bersama—biola, cello, flute, drum, dan lain-lain. Masing-masing memiliki peran dan karakteristiknya sendiri, tetapi bersama-sama mereka menciptakan simfoni yang utuh. Demikian pula dengan dinamika sosial. Ia lahir dari interaksi berbagai unsur yang saling

terkait: individu sebagai aktor utama, kelompok sebagai wadah interaksi, lembaga sebagai struktur yang mengatur, serta nilai dan norma sebagai pedoman perilaku.

Bab ini akan mengupas secara mendalam keempat unsur pokok dinamika sosial tersebut dalam konteks masyarakat desa. Kita akan memahami bagaimana individu dengan segala aspirasi, kreativitas, dan kebutuhannya menjadi motor penggerak perubahan. Bagaimana individu-individu berhimpun dalam kelompok-kelompok sosial yang menjadi arena interaksi dan aksi kolektif. Bagaimana kelompok-kelompok ini melembaga menjadi lembaga sosial dengan aturan main yang jelas. Serta bagaimana nilai dan norma menjadi kompas yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok. Pemahaman tentang keempat unsur ini dan interaksinya akan menjadi bekal penting untuk menganalisis dinamika sosial di tingkat desa secara komprehensif.

B. UNSUR PERTAMA: INDIVIDU SEBAGAI AKTOR UTAMA

Individu adalah unsur paling dasar dalam dinamika sosial. Tidak ada masyarakat tanpa individu. Namun, individu dalam konteks sosial bukanlah sekadar organisme biologis, melainkan makhluk sosial yang memiliki kesadaran, aspirasi, kreativitas, dan kebutuhan. Individulah yang menjadi aktor yang menggerakkan roda perubahan.

1. Individu sebagai Makhluk Sosial dan Unik

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), sebagaimana dikemukakan Aristoteles. Ia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Namun, setiap individu juga unik—memiliki kepribadian, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Dualitas inilah—sebagai makhluk sosial sekaligus pribadi unik—yang menjadi sumber dinamika.

Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya: kebutuhan fisik (makan, minum, tempat tinggal), kebutuhan psikologis (rasa aman, kasih sayang, penghargaan), dan kebutuhan sosial (berinteraksi, diakui, menjadi bagian dari kelompok). Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong individu untuk berinteraksi, bekerjasama, dan membentuk ikatan dengan individu lain.

Sebagai pribadi unik, setiap individu memiliki aspirasi, kepentingan, dan kreativitas yang mungkin berbeda dari individu lain. Perbedaan ini menjadi sumber keragaman, yang dalam kondisi tertentu dapat memicu inovasi dan kemajuan, tetapi dalam kondisi lain dapat menimbulkan konflik dan ketegangan.

2. Aspirasi Individu sebagai Motor Perubahan

Aspirasi adalah harapan, keinginan, atau cita-cita yang ingin dicapai seseorang. Aspirasi ini bisa bersifat material (ingin memiliki rumah, ingin anaknya sekolah tinggi) maupun non-material (ingin dihormati, ingin berguna bagi masyarakat). Aspirasi individu menjadi motor penggerak perubahan karena mendorong individu untuk bertindak, berusaha, dan mencari cara-cara baru untuk mencapai tujuannya.

Di desa, aspirasi individu dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Seorang petani yang bercita-cita meningkatkan hasil panennya akan mencari informasi tentang bibit unggul, pupuk yang tepat, atau teknik bertani baru. Seorang ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan keluarga mungkin memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Seorang pemuda yang bercita-cita menjadi pengusaha sukses mungkin merantau ke kota atau belajar bisnis melalui internet.

Aspirasi-aspirasi ini, ketika diwujudkan dalam tindakan nyata, menciptakan perubahan—baik pada diri individu itu sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Petani yang berhasil meningkatkan hasil panennya menjadi contoh bagi petani lain. Ibu rumah tangga yang sukses dengan usahanya menginspirasi perempuan lain untuk melakukan hal serupa. Pemuda yang sukses di perantauan dapat menjadi investor atau agen perubahan ketika kembali ke desa.

3. Kreativitas Individu sebagai Sumber Inovasi

Kreativitas adalah kemampuan individu untuk menciptakan hal-hal baru—ide, cara, produk, solusi—yang belum ada sebelumnya. Kreativitas adalah sumber inovasi, dan inovasi adalah salah satu pendorong utama perubahan sosial.

Di desa, kreativitas individu dapat muncul dalam berbagai bidang. Dalam bidang pertanian, petani kreatif mungkin mengembangkan metode tanam yang lebih efisien, menciptakan alat sederhana untuk memudahkan pekerjaan, atau mengolah hasil panen menjadi produk olahan bernilai tambah. Dalam bidang kerajinan, perajin kreatif mungkin menciptakan desain baru yang lebih diminati pasar, atau menggunakan bahan-bahan lokal yang sebelumnya tidak terpakai. Dalam bidang sosial, tokoh masyarakat kreatif mungkin menemukan cara baru untuk menyelesaikan konflik, menggalang partisipasi warga, atau memobilisasi sumber daya untuk kepentingan bersama.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak inovasi besar justru lahir dari individu-individu biasa yang memiliki kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru. Di desa, inovasi-inovasi kecil yang lahir dari kreativitas individu dapat terakumulasi menjadi perubahan besar dalam skala komunitas.

4. Kebutuhan Individu sebagai Pemicu Interaksi

Abraham Maslow, dalam teorinya yang terkenal tentang hierarki kebutuhan, mengidentifikasi lima tingkatan kebutuhan manusia: (1) kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan), (2) kebutuhan rasa aman (keamanan, perlindungan), (3) kebutuhan sosial (kasih sayang, rasa memiliki), (4) kebutuhan penghargaan (harga diri, pengakuan), dan (5) kebutuhan aktualisasi diri (mengembangkan potensi, menjadi diri sendiri).

Kebutuhan-kebutuhan ini, terutama yang paling mendasar, mendorong individu untuk berinteraksi dengan individu lain. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri; ia membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan pedagang untuk menjual hasil panennya. Ibu rumah tangga membutuhkan tetangga untuk bersosialisasi. Orang tua membutuhkan guru untuk mendidik anak-anaknya.

Interaksi yang lahir dari upaya memenuhi kebutuhan inilah yang menjadi fondasi bagi terbentuknya hubungan sosial, kelompok sosial, dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri.

5. Individu sebagai Agen Perubahan

Dalam sosiologi, konsep "agen perubahan" (*agent of change*) merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi penggerak perubahan sosial. Di tingkat desa, agen perubahan bisa datang dari berbagai latar belakang: kepala desa yang memiliki visi, tokoh agama yang berpengaruh, pemuda kreatif yang terpapar ide-ide baru, petani yang berhasil dengan inovasinya, atau perantau yang pulang kampung dengan membawa pengalaman dan modal.

Namun, tidak semua individu memiliki kapasitas yang sama untuk menjadi agen perubahan. Beberapa faktor mempengaruhinya:

Pertama, **pengetahuan dan wawasan**. Individu yang memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan lebih luas cenderung lebih mampu melihat peluang dan merancang perubahan.

Kedua, **keterampilan dan kapasitas**. Individu yang memiliki keterampilan tertentu—teknis, organisasi, komunikasi—lebih mampu mengimplementasikan ide-ide perubahan.

Ketiga, **jaringan sosial**. Individu yang memiliki jaringan luas—dengan tokoh masyarakat, pemerintah, atau pihak luar—lebih mudah mendapatkan dukungan dan sumber daya untuk mewujudkan perubahan.

Keempat, **keberanian dan keteguhan**. Perubahan seringkali menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan status quo. Individu yang berani mengambil risiko dan teguh pada pendirian lebih mungkin berhasil mendorong perubahan.

Kelima, **legitimasi dan kepercayaan**. Individu yang dipercaya masyarakat—karena ketokohannya, integritasnya, atau rekam jejaknya—lebih mudah memobilisasi dukungan untuk perubahan.

Dalam dinamika sosial desa, peran individu-individu kunci ini sangat penting. Seringkali, satu orang dengan visi, komitmen, dan kemampuan organisasi yang kuat dapat menjadi katalis yang menggerakkan seluruh komunitas menuju perubahan positif.

C. UNSUR KEDUA: KELOMPOK SOSIAL SEBAGAI WADAH INTERAKSI

Individu tidak hidup dalam isolasi. Mereka berinteraksi, berbagi pengalaman, dan bersama-sama membentuk realitas sosial. Dalam proses interaksi yang terus-menerus, individu-individu membentuk kelompok sosial—kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi menurut pola yang relatif mapan.

1. Pengertian dan Ciri-Ciri Kelompok Sosial

Secara sosiologis, kelompok sosial memiliki beberapa ciri utama:

Pertama, **terdapat interaksi antar anggota**. Anggota kelompok saling berkomunikasi, bertemu, dan mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini bisa bersifat langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media).

Kedua, **ada kesadaran bersama tentang keanggotaan**. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari kelompok dan menyadari bahwa orang lain juga menjadi anggota. Ada rasa "kita" yang membedakan dari "mereka" yang bukan anggota.

Ketiga, **ada ikatan bersama atau kepentingan bersama**. Kelompok terbentuk karena adanya kesamaan—kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, atau kesamaan nilai.

Keempat, **memiliki struktur dan pola perilaku yang relatif mapan**. Dalam kelompok, terbentuk peran-peran (siapa melakukan apa), norma-norma (aturan main), dan pola interaksi yang teratur.

Kelima, **bersifat dinamis**. Kelompok sosial tidak statis; ia dapat berubah, berkembang, atau bahkan bubar seiring waktu.

Di desa, kita dapat menemukan beragam kelompok sosial dengan berbagai basis dan tujuan.

2. Macam-Macam Kelompok Sosial di Desa

a. Kelompok Primer dan Sekunder

Berdasarkan intensitas dan kualitas hubungan, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan sekunder.

Kelompok primer (*primary group*) adalah kelompok di mana hubungan antar anggotanya bersifat intim, personal, dan menyeluruh. Anggota saling mengenal secara mendalam, berinteraksi secara langsung dan sering, serta terikat oleh ikatan emosional yang kuat. Contoh kelompok primer di desa adalah keluarga, tetangga dekat, atau kelompok bermain masa kecil.

Ciri-ciri kelompok primer: (1) hubungan bersifat personal dan akrab, (2) komunikasi bersifat dalam dan menyeluruh, (3) anggota diperlakukan sebagai pribadi utuh, bukan sekadar pemegang peran, (4) kontrol sosial bersifat informal, (5) tujuan kelompok cenderung tidak dirumuskan secara eksplisit.

Kelompok sekunder (*secondary group*) adalah kelompok di mana hubungan antar anggotanya bersifat impersonal, formal, dan terbatas pada kepentingan tertentu. Anggota tidak selalu saling mengenal secara mendalam, interaksi terbatas pada konteks tertentu, dan ikatan bersifat fungsional. Contoh kelompok sekunder di desa adalah organisasi pemerintahan desa, kelompok tani, atau koperasi.

Ciri-ciri kelompok sekunder: (1) hubungan bersifat formal dan impersonal, (2) komunikasi terbatas pada kepentingan tertentu, (3) anggota diperlakukan berdasarkan peran dan fungsinya, (4) kontrol sosial bersifat formal melalui aturan tertulis, (5) tujuan kelompok dirumuskan secara eksplisit.

Di desa, kelompok primer dan sekunder tidak selalu terpisah tegas. Seringkali, dalam kelompok sekunder seperti kelompok tani, hubungan antar anggota juga diwarnai oleh ikatan personal karena mereka juga bertetangga atau bersaudara.

b. Kelompok Formal dan Informal

Berdasarkan tingkat pelembagaan, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi kelompok formal dan informal.

Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi yang jelas, aturan tertulis, dan tujuan yang dirumuskan secara eksplisit. Keanggotaan biasanya didasarkan pada kriteria tertentu dan ada prosedur resmi untuk menjadi anggota. Contoh kelompok formal di desa: pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani yang terdaftar, koperasi, karang taruna, PKK.

Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi formal, aturan tidak tertulis, dan terbentuk secara spontan berdasarkan interaksi yang berulang. Keanggotaan bersifat cair dan tidak ada prosedur resmi. Contoh kelompok informal di desa: kelompok arisan ibu-ibu, kelompok ngopi bapak-bapak, kelompok pengajian keliling, kelompok bermain anak-anak.

c. Kelompok Berdasarkan Basis dan Tujuan

Di desa, kita dapat mengidentifikasi berbagai kelompok berdasarkan basis dan tujuannya:

Kelompok berbasis ekonomi: kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, koperasi simpan pinjam, arisan, BUMDes. Kelompok-kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui kerjasama, berbagi sumber daya, atau mengakses pasar.

Kelompok berbasis sosial dan kekerabatan: keluarga besar, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelompok kekerabatan (marga, klan). Kelompok-kelompok ini menjadi basis solidaritas dan dukungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kelompok berbasis agama: pengajian, majelis taklim, kelompok yasinan, kelompok doa, organisasi keagamaan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dll). Kelompok-kelompok ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman agama dan memperkuat spiritualitas, sekaligus arena interaksi sosial.

Kelompok berbasis usia dan gender: karang taruna (pemuda), PKK (ibu-ibu), kelompok lansia, kelompok remaja masjid. Kelompok-kelompok ini menjadi wadah bagi segmen tertentu untuk berorganisasi dan berkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Kelompok berbasis hobi dan minat: kelompok olahraga (voli, sepak bola), kelompok kesenian (karawitan, rebana, tari), kelompok pecinta alam, kelompok fotografi. Kelompok-kelompok ini menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat, sekaligus memperkuat ikatan sosial.

Kelompok berbasis kepentingan khusus: kelompok peduli lingkungan, kelompok siaga bencana, kelompok pengelola air bersih, kelompok wisata desa. Kelompok-kelompok ini terbentuk untuk merespon isu atau tantangan tertentu yang dihadapi masyarakat.

3. Fungsi Kelompok Sosial dalam Dinamika Desa

Kelompok sosial memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam dinamika masyarakat desa:

Pertama, **sebagai wadah sosialisasi dan internalisasi nilai**. Melalui kelompok, individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan cara hidup yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga mengajarkan nilai kesopanan. Kelompok pengajian mengajarkan nilai-nilai agama. Kelompok tani mengajarkan etika kerjasama. Proses sosialisasi ini membentuk kepribadian individu dan mempersiapkannya untuk berperan dalam masyarakat.

Kedua, **sebagai sarana kerjasama dan pemenuhan kebutuhan**. Individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Melalui kelompok, mereka dapat bekerjasama, berbagi sumber daya, dan saling membantu. Kelompok tani memungkinkan petani membeli pupuk bersama dengan harga lebih murah. Arisan memungkinkan ibu-ibu mengumpulkan modal secara bergiliran. Kelompok pengajian menjadi wadah untuk berbagi rezeki melalui sedekah dan infak.

Ketiga, **sebagai wadah partisipasi dan pengambilan keputusan**. Dalam kelompok, individu dapat menyuarakan aspirasi, berdiskusi, dan bersama-sama mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Musyawarah di kelompok tani menentukan pola tanam. Rapat karang taruna merencanakan kegiatan pemuda. Diskusi di kelompok pengajian membahas masalah sosial keagamaan.

Keempat, **sebagai sumber identitas dan rasa memiliki**. Menjadi anggota suatu kelompok memberikan rasa identitas—siapa saya, kelompok mana saya berasal. Ini penting untuk harga diri dan rasa aman psikologis. "Saya warga RT 05", "saya anggota kelompok tani Sido Makmur", "saya pengurus PKK"—pernyataan-pernyataan ini menegaskan identitas sosial seseorang.

Kelima, **sebagai agen kontrol sosial**. Kelompok mengawasi perilaku anggotanya dan menegakkan norma-norma yang berlaku. Sanksi sosial, meskipun informal, seringkali lebih efektif daripada sanksi formal dalam menjaga ketertiban. Warga yang melanggar norma akan mendapat teguran, dikucilkan, atau bahkan dikeluarkan dari kelompok.

Keenam, **sebagai wadah pengembangan kapasitas**. Melalui kelompok, individu dapat belajar keterampilan baru, bertukar pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri. Kelompok tani mengadakan pelatihan budidaya tanaman. PKK memberikan penyuluhan tentang gizi dan kesehatan. Karang taruna mengadakan kursus keterampilan bagi pemuda.

Ketujuh, **sebagai jembatan dengan dunia luar**. Kelompok sosial dapat menjadi saluran komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak di luar desa—pemerintah, LSM, perusahaan, atau desa lain. Kelompok tani dapat mengakses program penyuluhan dari dinas pertanian. BUMDes dapat bermitra dengan investor. Kelompok wisata dapat bekerjasama dengan biro perjalanan.

4. Dinamika Internal Kelompok

Setiap kelompok sosial memiliki dinamika internalnya sendiri—proses-proses yang terjadi di dalam kelompok yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangannya.

Pembentukan kelompok. Kelompok tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk melalui proses yang melibatkan interaksi berulang, tumbuhnya kesadaran bersama, dan perumusan tujuan bersama. Faktor-faktor seperti kesamaan kepentingan, kedekatan geografis, atau ancaman bersama dapat memicu pembentukan kelompok.

Struktur dan peran. Dalam kelompok, terbentuk struktur—pembagian peran dan posisi. Ada pemimpin, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota biasa. Ada yang aktif berbicara, ada yang lebih banyak diam. Ada yang menjadi inisiator ide, ada yang menjadi pelaksana. Struktur ini bisa formal (tertulis) maupun informal (tidak tertulis).

Kepemimpinan. Setiap kelompok memiliki pemimpin—baik formal (ketua yang dipilih) maupun informal (orang yang berpengaruh meski tidak menjabat). Gaya kepemimpinan—otoriter, demokratis, atau laissez-faire—mempengaruhi dinamika kelompok.

Norma kelompok. Kelompok mengembangkan norma-norma yang mengatur perilaku anggotanya—aturan tentang kehadiran, partisipasi, kontribusi, dan loyalitas. Norma ini bisa eksplisit (tertulis dalam AD/ART) maupun implisit (dipahami bersama).

Kohesi kelompok. Kohesi adalah tingkat solidaritas dan keterikatan antar anggota. Kelompok dengan kohesi tinggi lebih solid, anggotanya lebih loyal, dan lebih tahan terhadap tekanan. Sebaliknya, kelompok dengan kohesi rendah rentan konflik dan perpecahan.

Konflik internal. Tidak semua kelompok selalu harmonis. Perbedaan pendapat, persaingan, atau perebutan sumber daya dapat memicu konflik internal. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kreativitas dan perbaikan. Konflik yang tidak dikelola dapat menghancurkan kelompok.

Perubahan dan adaptasi. Kelompok tidak statis. Ia dapat berubah seiring waktu—tujuan berubah, anggota bertambah atau berkurang, struktur berubah. Kelompok yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan bertahan; yang tidak mampu akan mati.

5. Interaksi Antar Kelompok

Dinamika desa tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal masing-masing kelompok, tetapi juga oleh interaksi antar kelompok. Kelompok-kelompok yang berbeda—kelompok tani, kelompok pengajian, karang taruna, PKK, BPD—saling berinteraksi, bekerjasama, atau bersaing.

Kerjasama antar kelompok. Kelompok-kelompok dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok tani dan PKK bekerjasama dalam program ketahanan pangan keluarga. Karang taruna dan kelompok kesenian bekerjasama dalam festival budaya desa. BUMDes dan kelompok tani bekerjasama dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Kompetisi antar kelompok. Persaingan antar kelompok juga bisa terjadi—misalnya dalam memperebutkan bantuan pemerintah, dalam mempengaruhi kebijakan desa, atau dalam merebut simpati warga. Kompetisi yang sehat dapat mendorong inovasi dan peningkatan kinerja. Kompetisi yang tidak sehat dapat memicu konflik.

Konflik antar kelompok. Perbedaan kepentingan, perebutan sumber daya, atau sentimen historis dapat memicu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok bisa lebih berbahaya daripada konflik internal karena melibatkan lebih banyak orang dan berpotensi mempolarisasi masyarakat. Mediasi dan dialog antar kelompok menjadi penting untuk meredakan konflik.

Jaringan antar kelompok. Dalam jangka panjang, interaksi antar kelompok dapat membentuk jaringan yang lebih luas. Jaringan ini dapat menjadi saluran komunikasi, kerjasama, dan mobilisasi sumber daya yang efektif. Desa dengan jaringan antar kelompok yang kuat lebih tangguh menghadapi tantangan.

D. UNSUR KETIGA: LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI STRUKTUR PENGATUR

Ketika kelompok sosial bertahan dalam waktu lama dan mengembangkan aturan-aturan yang mapan, ia dapat berkembang menjadi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ia adalah struktur yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam bidang-bidang tertentu.

1. Pengertian dan Karakteristik Lembaga Sosial

Beberapa definisi lembaga sosial dari para ahli:

Koentjaraningrat mendefinisikan lembaga sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto mendefinisikan lembaga sosial sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat.

Paul B. Horton dan **Chester L. Hunt** mendefinisikan lembaga sosial sebagai sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diidentifikasi karakteristik utama lembaga sosial:

Pertama, **berupa sistem norma**. Lembaga sosial pada dasarnya adalah kumpulan norma—aturan, pedoman, atau patokan perilaku—yang mengatur bagaimana orang harus bertindak dalam situasi tertentu. Norma ini bisa tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, **terorganisir**. Norma-norma dalam lembaga sosial tersusun secara sistematis dan saling terkait membentuk suatu kesatuan yang utuh. Ada hierarki norma: dari yang paling abstrak (nilai) hingga yang paling konkret (aturan teknis).

Ketiga, **berkisar pada kebutuhan pokok**. Setiap lembaga sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan pokok tertentu dalam masyarakat. Lembaga keluarga memenuhi kebutuhan reproduksi dan sosialisasi anak. Lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan akan transmisi pengetahuan dan keterampilan. Lembaga ekonomi memenuhi kebutuhan akan produksi dan distribusi barang/jasa.

Keempat, **memiliki struktur dan peran**. Lembaga sosial memiliki struktur yang membedakan posisi-posisi (status) dan perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi (peran). Dalam lembaga keluarga, ada status ayah, ibu, anak, dengan peran masing-masing.

Kelima, **memiliki simbol dan budaya**. Lembaga sosial biasanya memiliki simbol-simbol yang menandai identitasnya—seragam, logo, lagu, ritual, atau bahasa khusus. Juga memiliki nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Keenam, **bersifat relatif permanen**. Lembaga sosial bertahan dalam waktu yang relatif lama, melampaui usia individu-individu yang menjadi anggotanya. Ia diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun dapat berubah secara perlahan.

Ketujuh, **memiliki sanksi**. Lembaga sosial memiliki mekanisme untuk menegakkan norma-normanya—memberikan penghargaan bagi yang patuh dan hukuman bagi yang melanggar. Sanksi bisa bersifat formal (denda, kurungan) maupun informal (celaan, pengucilan).

2. Jenis-Jenis Lembaga Sosial di Desa

Masyarakat desa memiliki beragam lembaga sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang kebutuhan yang dipenuhi:

a. Lembaga Keluarga

Keluarga adalah lembaga sosial paling dasar dan universal. Ia terbentuk dari ikatan perkawinan yang sah dan terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak (keluarga inti), atau mencakup juga kerabat lain (keluarga luas). Fungsi utama lembaga keluarga meliputi:

- Fungsi reproduksi: meneruskan keturunan
- Fungsi sosialisasi: menanamkan nilai dan norma kepada anak
- Fungsi afeksi: memberikan kasih sayang dan dukungan emosional
- Fungsi perlindungan: melindungi anggota dari berbagai ancaman
- Fungsi ekonomi: memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan
- Fungsi pengawasan sosial: mengontrol perilaku anggota agar sesuai norma

Di desa, keluarga memiliki peran yang sangat sentral. Ikatan kekerabatan masih kuat, dan keluarga besar seringkali menjadi unit sosial yang penting dalam berbagai kegiatan—pertanian, upacara adat, gotong royong.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda. Di desa, lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi:

Pendidikan formal: SD, SMP, SMA (atau sederajat) yang berada di wilayah desa atau di kecamatan terdekat. Sekolah menjadi tempat anak-anak desa memperoleh pengetahuan akademis dan keterampilan dasar.

Pendidikan non-formal: PAUD, Taman Kanak-Kanak, madrasah diniyah, pesantren, kursus-kursus keterampilan, kelompok belajar. Lembaga-lembaga ini melengkapi pendidikan formal dan seringkali lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Pendidikan informal: pendidikan dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam kegiatan adat dan keagamaan. Melalui pendidikan informal, anak-anak belajar tentang nilai-nilai, etika, dan keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah formal.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam dinamika desa. Ia membuka wawasan, meningkatkan kapasitas, dan menjadi saluran mobilitas sosial. Desa dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih maju dan lebih adaptif terhadap perubahan.

c. Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Di desa, lembaga ekonomi dapat berupa:

Lembaga ekonomi tradisional: pasar desa, lumbung padi, sistem bagi hasil pertanian, ijon (sistem pinjaman dengan jaminan hasil panen), dan praktik-praktik ekonomi adat lainnya.

Lembaga ekonomi modern: koperasi, Bank Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, kelompok tani yang terorganisir. Lembaga-lembaga ini muncul seiring dengan modernisasi dan masuknya ekonomi uang ke pedesaan.

Lembaga ekonomi informal: warung-warung kecil, pedagang keliling, jasa-jasa informal (tukang pijit, dukun, buruh lepas). Sektor informal ini menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi katup pengaman ekonomi desa.

Lembaga ekonomi mengalami perubahan paling cepat di era modernisasi. Masuknya teknologi, perubahan pola konsumsi, dan integrasi pasar global mengubah cara masyarakat desa berproduksi, bertransaksi, dan berkonsumsi.

d. Lembaga Agama

Lembaga agama mengatur kehidupan beragama masyarakat—keyakinan, ritual, dan moralitas. Di desa, lembaga agama memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bentuknya dapat berupa:

Tempat ibadah: masjid, musholla, gereja, pura, vihara. Tempat ibadah bukan hanya tempat ritual, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan silaturahmi.

Organisasi keagamaan: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan organisasi keagamaan lainnya yang memiliki cabang hingga tingkat desa. Organisasi ini menjadi wadah bagi warga untuk memperdalam agama dan berkegiatan sosial.

Tokoh agama: ulama, kyai, ustadz, pendeta, pastur, pemangku. Mereka adalah panutan dalam masalah agama dan seringkali menjadi rujukan dalam berbagai persoalan kehidupan.

Kelompok keagamaan: pengajian, majelis taklim, kelompok yasinan, kelompok doa. Kelompok-kelompok ini menjadi arena interaksi dan penguatan iman bagi warga.

Lembaga agama berperan penting dalam menjaga moralitas, memperkuat solidaritas, dan memberikan makna spiritual dalam kehidupan. Di banyak desa, tokoh agama memiliki pengaruh yang sejajar, bahkan kadang melebihi, tokoh pemerintahan.

e. Lembaga Adat

Lembaga adat mengatur kehidupan berdasarkan hukum adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat masih kuat di banyak desa, terutama di luar Jawa. Bentuknya dapat berupa:

Struktur adat: ada raja, sultan, atau kepala adat; ada dewan adat; ada tetua adat. Struktur ini menjalankan fungsi pemerintahan, peradilan, dan ritual berdasarkan adat.

Hukum adat: aturan-aturan tentang berbagai aspek kehidupan—perkawinan, warisan, sengketa tanah, pidana—yang bersumber dari adat istiadat. Di beberapa daerah, hukum adat masih diakui dan dipraktikkan berdampingan dengan hukum nasional.

Ritual adat: upacara-upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup (kelahiran, perkawinan, kematian), siklus pertanian (menanam, panen), atau peristiwa penting lainnya.

Norma adat: nilai-nilai dan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sanksi adat (denda adat, pengucilan) seringkali lebih efektif daripada sanksi formal.

Lembaga adat berperan penting dalam menjaga identitas budaya, mengatur hubungan sosial, dan menyelesaikan konflik secara damai berbasis kearifan lokal.

f. Lembaga Pemerintahan Desa

Lembaga pemerintahan desa adalah struktur formal yang mengatur urusan publik di tingkat desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga ini terdiri dari:

Pemerintah desa: kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun). Mereka menjalankan fungsi eksekutif—mengelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD): lembaga legislatif desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi warga, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Lembaga kemasyarakatan desa: lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah desa untuk membantu pelaksanaan pembangunan, seperti RT, RW, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa adalah lembaga yang paling langsung mempengaruhi kehidupan warga desa. Kebijakan dan programnya—mulai dari alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan administrasi—berdampak nyata pada kesejahteraan warga.

3. Fungsi Lembaga Sosial dalam Dinamika Desa

Lembaga sosial memiliki beragam fungsi dalam menjaga kelangsungan dan mengarahkan perubahan masyarakat:

Pertama, **memberikan pedoman perilaku**. Lembaga sosial menyediakan aturan main yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbagai situasi. Ini memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam interaksi sosial.

Kedua, **menjaga keutuhan masyarakat**. Dengan mengatur hubungan antar individu dan kelompok, lembaga sosial mencegah kekacauan dan disintegrasi. Ia menjadi perekat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat.

Ketiga, **memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial**. Lembaga sosial menyediakan basis untuk mengawasi dan mengoreksi perilaku menyimpang. Melalui sanksi, ia menegakkan norma-norma yang berlaku.

Keempat, **memelihara warisan budaya dan nilai-nilai**. Lembaga sosial, terutama lembaga adat dan lembaga pendidikan, menjadi agen transmisi nilai-nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Ia menjaga kontinuitas budaya di tengah perubahan.

Kelima, **memenuhi kebutuhan pokok masyarakat**. Setiap lembaga sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu—lembaga keluarga memenuhi kebutuhan reproduksi, lembaga ekonomi memenuhi kebutuhan material, lembaga agama memenuhi kebutuhan spiritual.

Keenam, **menjadi wadah partisipasi masyarakat**. Melalui lembaga-lembaga yang ada, warga dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik—menyuarakan aspirasi, mengambil keputusan, dan terlibat dalam pembangunan.

Ketujuh, **menjadi agen perubahan dan adaptasi**. Meskipun cenderung mempertahankan pola yang ada, lembaga sosial juga dapat menjadi agen perubahan. Ketika lingkungan berubah, lembaga sosial harus beradaptasi. Lembaga yang adaptif akan bertahan; yang tidak akan ditinggalkan masyarakat.

4. Interaksi Antar Lembaga Sosial

Lembaga-lembaga sosial di desa tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi, mempengaruhi, dan terkadang berbenturan. Memahami interaksi antar lembaga penting untuk menganalisis dinamika sosial secara utuh.

Kerjasama antar lembaga. Dalam banyak situasi, lembaga-lembaga bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah desa bekerjasama dengan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Lembaga pendidikan bekerjasama dengan lembaga agama dalam pendidikan karakter. Lembaga ekonomi (BUMDes) bekerjasama dengan kelompok tani dalam pengolahan hasil pertanian.

Tumpang tindih fungsi. Kadang terjadi tumpang tindih fungsi antar lembaga. Misalnya, lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa sama-sama memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Tumpang tindih ini dapat menjadi sumber kerjasama, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak diatur dengan baik.

Ketegangan dan konflik antar lembaga. Perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, atau perebutan pengaruh dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga. Misalnya, antara lembaga adat yang ingin mempertahankan tradisi dengan lembaga pendidikan modern yang membawa nilai-nilai baru. Antara lembaga agama yang konservatif dengan lembaga pemerintahan yang progresif.

Adaptasi dan perubahan lembaga. Interaksi dengan lembaga lain, terutama dengan pengaruh dari luar (pemerintah pusat, pasar global), memaksa lembaga-lembaga lokal untuk beradaptasi. Lembaga adat mungkin harus memodifikasi beberapa aturannya agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. Lembaga pertanian tradisional harus mengadopsi teknologi baru untuk tetap kompetitif.

E. UNSUR KEEMPAT: NILAI DAN NORMA SEBAGAI PEDOMAN PERILAKU

Unsur keempat yang menjadi motor dinamika sosial adalah nilai dan norma. Jika individu adalah aktor, kelompok adalah wadah, dan lembaga adalah struktur, maka nilai dan norma adalah kompas yang mengarahkan perilaku aktor dalam wadah dan struktur tersebut.

1. Pengertian Nilai Sosial

Nilai sosial adalah konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, benar, indah, dan berharga dalam masyarakat. Ia adalah standar etis dan estetis yang menjadi rujukan dalam menilai perilaku, objek, atau situasi. Nilai berada pada tingkat yang paling abstrak dalam sistem budaya.

Beberapa karakteristik nilai sosial:

Pertama, **abstrak**. Nilai tidak dapat dilihat, diraba, atau difoto. Ia hanya dapat dipahami dari manifestasinya dalam perilaku, bahasa, atau simbol.

Kedua, **bersifat ideal**. Nilai adalah sesuatu yang dicita-citakan, yang seharusnya, bukan yang senyatanya. Ada jarak antara "das Sollen" (yang seharusnya) dan "das Sein" (yang senyatanya).

Ketiga, **mempengaruhi perilaku**. Meskipun abstrak, nilai mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Ia menjadi motivasi dan pembenaran bagi tindakan.

Keempat, **relatif permanen**. Nilai cenderung bertahan lama, diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bukan berarti tidak dapat berubah. Nilai dapat bergeser seiring perubahan zaman.

Kelima, **terinternalisasi**. Nilai dihayati oleh individu sebagai bagian dari kepribadiannya, sehingga perilaku sesuai nilai terasa "wajar" dan tidak dipaksakan.

Di desa, nilai-nilai yang umum dianut antara lain: gotong royong (kerjasama sukarela), musyawarah (pengambilan keputusan bersama), tepo seliro (tenggang rasa), hormat kepada orang tua, rukun (harmoni sosial), sopan santun, dan religiusitas. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi berbagai praktik sosial.

2. Pengertian Norma Sosial

Norma sosial adalah aturan-aturan konkret yang menjadi pedoman perilaku dalam situasi tertentu. Jika nilai bersifat abstrak dan ideal, norma bersifat lebih konkret dan operasional. Norma adalah nilai yang sudah "dibumikan" menjadi aturan main.

Beberapa ciri norma sosial:

Pertama, **lebih konkret daripada nilai**. Norma dapat dirumuskan secara eksplisit, meskipun tidak selalu tertulis.

Kedua, **mengatur perilaku spesifik**. Norma memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu—bagaimana cara makan, bagaimana berbicara dengan orang tua, bagaimana berpakaian saat ke masjid.

Ketiga, **memiliki sanksi**. Pelanggaran norma akan mendapat sanksi, mulai dari yang ringan (celaan, sindiran) hingga berat (denda, pengucilan, hukuman fisik).

Keempat, **bertingkat-tingkat**. Ada norma yang sangat kuat (misalnya larangan membunuh) yang pelanggarannya mendapat sanksi berat, ada norma yang lemah (misalnya cara berpakaian) yang sanksinya ringan.

Kelima, **dapat berubah lebih cepat daripada nilai**. Norma lebih mudah berubah karena lebih terkait dengan konteks situasional.

3. Tingkatan Norma Sosial

Dalam sosiologi, norma sosial dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan mengikat dan sanksinya:

a. Cara (usage). Norma ini mengatur perilaku sehari-hari yang bersifat pribadi. Sanksi pelanggaran sangat ringan—sekadar celaan atau ejekan. Contoh: cara makan, cara berpakaian, cara duduk.

b. Kebiasaan (folkways). Norma yang mengatur perilaku yang diterima secara umum dalam masyarakat. Pelanggaran mendapat sanksi berupa celaan, teguran, atau dikucilkan. Contoh: kebiasaan memberi salam, kebiasaan mengucapkan terima kasih, kebiasaan menjenguk orang sakit.

c. Tata kelakuan (mores). Norma yang dianggap lebih penting karena terkait dengan nilai-nilai moral dasar masyarakat. Pelanggaran mendapat sanksi berat. Contoh: larangan mencuri, larangan berzina, larangan membunuh.

d. Adat istiadat (customs). Norma yang telah mengkristal dan diwariskan secara turun-temurun. Ia sangat kuat mengikat dan pelanggarannya mendapat sanksi adat. Contoh: aturan perkawinan adat, upacara adat, hukum adat.

e. Hukum (laws). Norma tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi formal yang tegas. Di desa, hukum bisa berupa peraturan desa (perdes) atau hukum nasional yang berlaku.

4. Fungsi Nilai dan Norma dalam Dinamika Sosial

Nilai dan norma memiliki fungsi yang sangat penting dalam dinamika sosial desa:

Pertama, **memberikan pedoman perilaku**. Nilai dan norma menjadi kompas yang mengarahkan individu dan kelompok dalam bertindak. Mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam situasi tertentu, sehingga interaksi berjalan lancar dan terprediksi.

Kedua, **menciptakan ketertiban sosial**. Dengan adanya pedoman bersama, perilaku individu menjadi lebih teratur dan tidak semrawut. Konflik dapat diminimalkan karena semua orang tahu batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilanggar.

Ketiga, **sebagai alat kontrol sosial**. Nilai dan norma, beserta sanksinya, menjadi mekanisme untuk mengendalikan perilaku menyimpang. Warga saling mengawasi dan mengingatkan jika ada yang melanggar.

Keempat, **memperkuat solidaritas**. Nilai-nilai bersama menciptakan rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Orang merasa terikat karena menganut nilai yang sama. Ini memperkuat kohesi sosial.

Kelima, **memberi makna dan legitimasi**. Nilai memberi makna pada tindakan dan institusi sosial. Gotong royong bukan sekadar bekerja bersama, tetapi perwujudan nilai kebersamaan. Upacara adat bukan sekadar ritual, tetapi penegasan kembali nilai-nilai leluhur.

Keenam, **mengarahkan perubahan sosial**. Nilai dan norma juga dapat menjadi sumber perubahan. Ketika nilai-nilai baru masuk dan diterima masyarakat, mereka mendorong perubahan dalam perilaku dan institusi. Sebaliknya, nilai-nilai lama dapat menjadi benteng yang menolak perubahan yang dianggap tidak sesuai.

5. Dinamika Nilai dan Norma di Desa

Nilai dan norma tidak statis. Mereka dapat berubah, bergeser, atau bahkan hilang seiring waktu. Di desa, dinamika nilai dan norma dipengaruhi oleh berbagai faktor:

Masuknya nilai-nilai baru. Melalui pendidikan, media, migrasi, dan interaksi dengan dunia luar, nilai-nilai baru masuk ke desa. Nilai tentang kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, individualisme, konsumerisme, mulai bersinggungan dengan nilai-nilai tradisional.

Pergeseran nilai. Akibat interaksi dengan nilai baru, nilai-nilai lama dapat bergeser. Nilai gotong royong mungkin bergeser dari partisipasi langsung ke partisipasi dalam bentuk uang. Nilai hormat kepada orang tua mungkin bergeser dari kepatuhan mutlak ke dialog antargenerasi.

Konflik nilai. Tidak jarang terjadi benturan antara nilai lama dan baru. Generasi tua mungkin mempertahankan nilai tradisional, sementara generasi muda lebih terbuka pada nilai modern. Benturan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan masyarakat.

Sinkretisme nilai. Seringkali, nilai-nilai baru tidak serta-merta menggantikan nilai lama, tetapi berbaur membentuk sintesis baru. Praktik keagamaan di desa sering merupakan perpaduan antara ajaran formal agama dengan kepercayaan lokal. Praktik ekonomi bisa merupakan perpaduan antara rasionalitas pasar dengan etika gotong royong.

Reaktualisasi nilai. Dalam situasi tertentu, nilai-nilai lama yang sempat ditinggalkan dapat dihidupkan kembali (reaktualisasi) karena dianggap relevan untuk menghadapi tantangan baru. Nilai gotong royong, misalnya, direaktualisasikan dalam program-program pembangunan partisipatif.

F. INTERAKSI ANTAR UNSUR: KUNCI MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL

Keempat unsur dinamika sosial—individu, kelompok, lembaga, dan nilai-norma—bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Mereka saling terkait, saling mempengaruhi, dan bersama-sama menciptakan gerak dan perubahan dalam masyarakat. Memahami interaksi antar unsur ini adalah kunci untuk memahami dinamika sosial secara utuh.

1. Individu dan Kelompok

Individu membentuk kelompok, tetapi kelompok juga membentuk individu. Di satu sisi, individu dengan aspirasi, kreativitas, dan kebutuhannya berinisiatif membentuk kelompok—kelompok tani, kelompok pengajian, karang taruna—untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, kelompok mempengaruhi individu—melalui sosialisasi, tekanan kelompok, dan dukungan sosial. Individu belajar nilai, memperoleh identitas, dan mengembangkan kapasitas melalui partisipasinya dalam kelompok.

Seorang petani yang bergabung dengan kelompok tani akan terpapar pada pengetahuan baru tentang teknik bertani, nilai-nilai kerjasama, dan jaringan dengan petani lain. Ini akan mengubah cara pandang dan perilakunya. Sebaliknya, petani yang inovatif dapat mempengaruhi kelompoknya dengan ide-ide baru, mendorong adopsi teknologi, atau menginisiasi kegiatan bersama.

2. Kelompok dan Lembaga

Kelompok yang bertahan lama dan mengembangkan aturan yang mapan dapat berkembang menjadi lembaga sosial. Kelompok tani yang semula hanya kumpulan petani yang bertemu secara informal, lama-kelamaan dapat memiliki struktur organisasi, AD/ART, dan program kerja yang jelas—menjadi lembaga ekonomi formal. Kelompok pengajian yang semula hanya kumpulan ibu-ibu belajar ngaji, dapat berkembang menjadi lembaga keagamaan dengan kepengurusan, jadwal tetap, dan kegiatan sosial.

Sebaliknya, lembaga sosial juga membentuk dan memayungi kelompok-kelompok di bawahnya. Pemerintah desa sebagai lembaga dapat membentuk kelompok-kelompok seperti PKK, karang taruna, atau kelompok tani sebagai mitra dalam pembangunan. Lembaga adat dapat membina kelompok-kelompok kesenian tradisional.

3. Lembaga dan Nilai-Norma

Lembaga sosial adalah perwujudan dari nilai dan norma. Lembaga keluarga mewujudkan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kesetiaan. Lembaga agama mewujudkan nilai ketakwaan, moralitas, dan kebersamaan. Lembaga adat mewujudkan nilai kearifan lokal dan harmoni dengan alam. Tanpa nilai dan norma yang mendasarinya, lembaga sosial akan kehilangan legitimasi dan makna.

Sebaliknya, nilai dan norma membutuhkan lembaga untuk dioperasionalkan dan ditegakkan. Nilai gotong royong diwujudkan dalam lembaga-lembaga seperti kelompok kerja bakti, arisan, atau sambatan. Nilai keadilan diwujudkan dalam lembaga peradilan (formal maupun adat). Lembaga menjadi instrumen untuk menerjemahkan nilai-nilai abstrak menjadi praktik nyata.

4. Nilai-Norma dan Individu

Nilai dan norma mempengaruhi individu melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Individu belajar nilai dan norma dari keluarga, sekolah, pergaulan, dan media. Nilai dan norma ini kemudian diinternalisasi menjadi bagian dari kepribadian—individu merasa bahwa perilaku sesuai nilai adalah "wajar" dan perilaku menyimpang terasa "salah" atau "ganjil".

Namun, individu juga dapat mempengaruhi nilai dan norma. Ketika banyak individu mulai mempertanyakan nilai tertentu, mengadopsi nilai baru, atau berperilaku berbeda dari norma yang berlaku, perlahan-lahan nilai dan norma dapat bergeser. Perubahan cara pandang tentang peran perempuan,

misalnya, dimulai dari individu-individu yang mempertanyakan norma tradisional dan berperilaku berbeda—perempuan bekerja, perempuan aktif di organisasi, perempuan menjadi pemimpin.

5. Siklus Dinamika Sosial

Interaksi keempat unsur ini membentuk semacam siklus dalam dinamika sosial:

Individu dengan aspirasi dan kebutuhannya → membentuk atau bergabung dengan **kelompok** untuk mencapai tujuan bersama → kelompok yang stabil mengembangkan aturan dan struktur, menjadi **lembaga** sosial → lembaga mengoperasionalkan dan menegakkan **nilai dan norma** tertentu → nilai dan norma membentuk dan mengarahkan perilaku **individu** (melalui sosialisasi) → individu yang terpengaruh nilai baru atau memiliki aspirasi baru mungkin membentuk kelompok baru atau mengubah kelompok yang ada → dan seterusnya.

Siklus ini terus berputar, kadang cepat, kadang lambat, kadang maju, kadang mundur, menciptakan dinamika yang terus-menerus dalam masyarakat.

G. STUDI KASUS: INTERAKSI UNSUR-UNSUR DINAMIKA SOSIAL DI DESA

Untuk memperjelas pemahaman tentang bagaimana keempat unsur dinamika sosial berinteraksi dalam praktiknya, mari kita lihat beberapa studi kasus.

1. Kasus 1: Pengembangan Desa Wisata

Banyak desa di Indonesia yang kini mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara individu, kelompok, lembaga, dan nilai-norma.

Tahap inisiasi: Seorang pemuda desa (individu) yang pernah bekerja di kota atau terpapar informasi tentang pariwisata, memiliki aspirasi untuk mengembangkan desanya sebagai destinasi wisata. Ia melihat potensi—pemandangan alam yang indah, tradisi unik, kerajinan lokal—yang belum dimanfaatkan.

Pembentukan kelompok: Pemuda tersebut mengajak teman-temannya (individu lain) yang memiliki minat sama. Mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)—sebuah kelompok sosial yang bertujuan mengembangkan potensi wisata desa.

Pengembangan ide dan mobilisasi dukungan: Kelompok ini kemudian melakukan berbagai kegiatan: mengidentifikasi potensi wisata, menyusun paket wisata, mempromosikan melalui media sosial, dan yang terpenting, melakukan sosialisasi kepada warga desa untuk mendapatkan dukungan. Mereka juga mendekati tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

Pelembagaan: Setelah mendapat dukungan, pemerintah desa (lembaga) merespons positif. Pokdarwis difasilitasi untuk menjadi lembaga yang lebih formal dengan kepengurusan yang jelas. Pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk pengembangan infrastruktur wisata. BUMDes (lembaga ekonomi desa) dilibatkan untuk mengelola aspek bisnis pariwisata.

Dinamika nilai-norma: Pengembangan pariwisata membawa perubahan nilai dan norma. Nilai tentang "privacy" mungkin bergeser karena rumah warga dikunjungi wisatawan. Nilai tentang kesopanan dalam berpakaian mungkin mendapat tantangan karena wisatawan asing berpakaian berbeda. Nilai tentang gotong royong diwujudkan dalam bentuk baru—warga bergotong royong menyiapkan homestay, menjadi pemandu wisata, atau menyajikan kuliner lokal.

Dampak pada individu: Warga desa yang terlibat dalam pariwisata mengalami perubahan—pengetahuan tentang dunia luar bertambah, pendapatan meningkat, rasa percaya diri tumbuh. Anak-anak muda yang tadinya ingin merantau ke kota, kini melihat peluang di desanya sendiri.

Siklus berlanjut: Keberhasilan Pokdarwis menginspirasi kelompok-kelompok lain—kelompok kerajinan, kelompok kuliner, kelompok seni—untuk aktif. Individu-individu baru muncul dengan ide-ide kreatif. Dinamika terus berlanjut.

2. Kasus 2: Modernisasi Pertanian

Modernisasi pertanian adalah contoh lain bagaimana unsur-unsur dinamika sosial berinteraksi.

Inovator individu: Seorang petani (individu) yang pernah mengikuti penyuluhan atau melihat informasi di media sosial, mencoba menggunakan bibit unggul dan pupuk organik. Hasil panennya meningkat signifikan. Ia menjadi contoh keberhasilan.

Pembentukan kelompok tani: Petani-petani lain yang tertarik berkumpul. Mereka membentuk kelompok tani untuk belajar bersama, membeli saprodi (sarana produksi) secara kolektif, dan mengakses program penyuluhan dari pemerintah. Kelompok tani ini menjadi wadah transfer pengetahuan dan kerjasama.

Dukungan lembaga: Pemerintah desa dan dinas pertanian (lembaga) memberikan dukungan: penyuluhan rutin, bantuan bibit dan pupuk, akses ke kredit usaha. Kelompok tani difasilitasi untuk menjadi mitra resmi program-program pemerintah.

Pergeseran nilai-norma: Modernisasi pertanian membawa pergeseran nilai. Nilai tentang "cukup" (nrimo) bergeser ke nilai tentang "berprestasi" dan "meningkatkan hasil". Nilai tentang ketergantungan pada alam bergeser ke nilai tentang penguasaan teknologi. Nilai tentang gotong royong dalam bentuk tradisional (liliuran) mungkin bergeser ke kerjasama yang lebih terorganisir dan berorientasi pasar.

Dampak pada struktur sosial: Petani yang berhasil secara ekonomi mungkin naik kelas sosial. Ia menjadi tokoh yang disegani, pendapatnya didengar dalam musyawarah desa. Ini menggeser struktur sosial yang mungkin sebelumnya didominasi oleh tuan tanah atau priyayi.

Dinamika berkelanjutan: Keberhasilan kelompok tani menginspirasi kelompok tani lain. Inovasi-inovasi baru terus bermunculan. Petani yang lebih muda mungkin mencoba teknik hidroponik atau pertanian organik. Dinamika terus berputar.

3. Kasus 3: Konflik dan Rekonsiliasi

Konflik sosial adalah bagian tak terelakkan dari dinamika masyarakat. Mari kita lihat bagaimana unsur-unsur dinamika sosial bekerja dalam situasi konflik.

Sumber konflik: Konflik bisa dipicu oleh berbagai hal—sengketa batas tanah, perebutan sumber air, perbedaan pilihan politik (misalnya dalam pemilihan kepala desa), atau provokasi dari luar. Sumber konflik ini melibatkan kepentingan individu atau kelompok yang berbenturan.

Eskalasi: Konflik meluas, melibatkan lebih banyak individu dan kelompok. Kelompok-kelompok yang tadinya netral mungkin terpaksa memihak. Identitas kelompok menguat—"kami" versus "mereka". Nilai-norma yang biasa mengatur interaksi mulai melemah; perilaku yang biasanya dilarang (kekerasan, ujaran kebencian) mungkin dianggap "wajar" dalam situasi konflik.

Peran lembaga: Lembaga-lembaga seperti pemerintah desa, kepolisian, lembaga adat, atau tokoh agama berperan penting dalam meredam konflik. Mereka menjadi mediator, mempertemukan pihak-pihak yang bertikai, mencari solusi damai. Efektivitas lembaga dalam mengelola konflik sangat tergantung pada legitimasi dan kepercayaan yang dimilikinya.

Peran nilai-norma: Nilai-nilai seperti musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal menjadi sumber daya penting untuk rekonsiliasi. Tokoh adat atau agama menggunakan nilai-nilai ini untuk mengajak pihak yang bertikai berdamai. Sanksi adat atau tekanan moral dapat menjadi instrumen untuk menghentikan kekerasan.

Rekonsiliasi dan pembelajaran: Setelah konflik mereda, masyarakat perlu melakukan rekonsiliasi—memulihkan hubungan, menyembuhkan luka, dan membangun kembali kepercayaan. Pengalaman konflik menjadi pembelajaran bagi individu, kelompok, dan lembaga. Mungkin muncul inisiatif untuk memperkuat mekanisme pencegahan konflik, seperti forum dialog antarkelompok atau penguatan lembaga mediasi.

Perubahan struktural: Konflik kadang membawa perubahan struktural. Jika konflik disebabkan oleh ketidakadilan struktural (misalnya ketimpangan akses tanah), penyelesaian konflik mungkin memerlukan perubahan kebijakan atau redistribusi sumber daya. Struktur sosial yang baru mungkin terbentuk.

H. RANGKUMAN

Dinamika sosial di desa digerakkan oleh empat unsur pokok yang saling terkait dan berinteraksi:

Individu adalah aktor utama dengan segala aspirasi, kreativitas, dan kebutuhannya. Individu-individu tertentu dapat menjadi agen perubahan yang menggerakkan roda dinamika. Namun, individu juga dibentuk oleh lingkungan sosialnya—oleh kelompok, lembaga, dan nilai-norma yang ada.

Kelompok sosial adalah wadah di mana individu berinteraksi, bekerjasama, dan membangun solidaritas. Di desa, terdapat beragam kelompok dengan berbagai basis dan tujuan—kelompok primer dan sekunder, formal dan informal, berbasis ekonomi, sosial, agama, usia, gender, hobi, dan kepentingan khusus. Kelompok berfungsi sebagai sarana sosialisasi, kerjasama, partisipasi, identitas, kontrol sosial, pengembangan kapasitas, dan jembatan dengan dunia luar.

Lembaga sosial adalah sistem norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Lembaga sosial memiliki struktur, aturan, dan sanksi yang relatif mapan. Di desa, lembaga-lembaga utama meliputi lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, adat, dan pemerintahan desa. Lembaga berfungsi memberikan pedoman, menjaga keutuhan, mengadakan kontrol, memelihara warisan budaya, memenuhi kebutuhan, menjadi wadah partisipasi, serta menjadi agen perubahan dan adaptasi.

Nilai dan norma adalah pedoman perilaku bagi individu dan kelompok. Nilai adalah konsepsi abstrak tentang yang baik dan berharga; norma adalah aturan konkret yang mengatur perilaku. Nilai dan norma berfungsi memberikan pedoman, menciptakan ketertiban, sebagai alat kontrol sosial, memperkuat solidaritas, memberi makna, dan mengarahkan perubahan sosial.

Keempat unsur ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dalam siklus dinamika sosial: individu membentuk kelompok, kelompok melembaga menjadi lembaga, lembaga mengoperasionalkan nilai-norma, nilai-norma membentuk individu, dan seterusnya. Memahami interaksi antar unsur ini adalah kunci untuk menganalisis dan mengelola dinamika sosial di desa.

Dalam praktiknya, interaksi keempat unsur ini terlihat dalam berbagai fenomena—pengembangan desa wisata, modernisasi pertanian, konflik dan rekonsiliasi, dan lain-lain. Setiap fenomena sosial dapat dianalisis dengan melihat peran individu, dinamika kelompok, fungsi lembaga, serta nilai dan norma yang terlibat.

Pemahaman tentang unsur-unsur dinamika sosial ini menjadi fondasi penting untuk memahami bab-bab selanjutnya yang akan membahas berbagai aspek kehidupan desa secara lebih spesifik—struktur sosial, karakteristik budaya, faktor perubahan, peran aktor-aktor kunci, dan strategi pembangunan.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Amati desa Anda atau desa di sekitar Anda. Siapa saja individu-individu yang berperan sebagai agen perubahan? Apa yang membuat mereka berpengaruh? Bagaimana mereka mempengaruhi dinamika desa?
2. Kelompok-kelompok apa saja yang ada di desa Anda? Bagaimana dinamika internal masing-masing kelompok? Bagaimana hubungan antar kelompok—apakah lebih banyak kerjasama atau kompetisi?
3. Lembaga sosial apa yang paling berpengaruh di desa Anda? Mengapa? Bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya? Apakah ada konflik atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga?
4. Nilai dan norma apa yang paling dijunjung tinggi di desa Anda? Apakah ada pergeseran nilai yang Anda amati—misalnya antara generasi tua dan muda? Bagaimana pergeseran itu mempengaruhi kehidupan sosial?
5. Pilih satu fenomena perubahan di desa Anda (misalnya masuknya internet, perkembangan wisata, perubahan pola pertanian). Analisis fenomena tersebut dengan menggunakan kerangka empat unsur dinamika sosial! Siapa individu kuncinya? Kelompok apa yang terlibat? Lembaga apa yang berperan? Nilai dan norma apa yang muncul atau bergeser?
6. Menurut Anda, unsur mana yang paling penting dalam dinamika sosial desa? Apakah individu, kelompok, lembaga, atau nilai-norma? Jelaskan alasan Anda!
7. Bagaimana cara memperkuat sinergi antar keempat unsur ini untuk mendorong perubahan positif di desa?

BAB V

FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL DI DESA

A. PENGANTAR: MEMAHAMI MESIN PENGGERAK PERUBAHAN

Tidak ada masyarakat yang benar-benar statis. Sepanjang sejarah, masyarakat desa senantiasa berubah—kadang perlahan dan hampir tak terasa, kadang cepat dan menggoncang sendi-sendi kehidupan. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek: struktur sosial, pola hubungan, sistem nilai, teknologi, mata pencaharian, hingga cara berpakaian dan bergaul. Pertanyaannya adalah: apa yang menggerakkan perubahan-perubahan tersebut? Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat desa berubah dari waktu ke waktu?

Memahami faktor-faktor perubahan sosial ibarat memahami mesin penggerak sebuah kendaraan. Dengan mengetahui komponen apa saja yang membuat mesin bekerja, kita dapat mengantisipasi ke mana kendaraan akan melaju, seberapa cepat, dan apa yang perlu dilakukan jika terjadi masalah. Dalam konteks pembangunan desa, pemahaman ini sangat penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan dampak negatif yang tidak diinginkan dapat diminimalkan.

Bab ini akan mengupas secara komprehensif faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial di desa. Kita akan membedah dua kategori utama: faktor internal yang bersumber dari dalam masyarakat desa itu sendiri, dan faktor eksternal yang datang dari luar. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi—kadang saling memperkuat, kadang saling bertentangan—dalam memicu perubahan. Pada bagian akhir, kita akan membedakan antara perubahan yang direncanakan (intended change) dan yang tidak direncanakan (unintended change), serta implikasinya bagi pembangunan desa.

B. KERANGKA TEORETIS: MEMAHAMI PERUBAHAN SOSIAL

Sebelum membahas faktor-faktor perubahan secara rinci, penting untuk memahami kerangka teoretis tentang perubahan sosial. Beberapa sosiolog telah memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tentang perubahan sosial.

1. Teori Evolusioner

Teori evolusioner memandang perubahan sosial sebagai proses bertahap dari masyarakat sederhana menuju masyarakat kompleks. Auguste Comte (1798-1857), bapak sosiologi, melihat perkembangan masyarakat melalui tiga tahap: teologis (masyarakat yang dijelaskan dengan kekuatan gaib), metafisik (masyarakat yang dijelaskan dengan kekuatan abstrak), dan positif (masyarakat yang dijelaskan dengan ilmu pengetahuan).

Herbert Spencer (1820-1903) membandingkan masyarakat dengan organisme hidup yang berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks melalui proses evolusi. Dalam pandangan ini, perubahan terjadi secara alamiah dan bertahap sebagai respons terhadap perubahan lingkungan.

Dalam konteks desa, teori evolusioner membantu kita memahami perubahan jangka panjang—dari komunitas agraris sederhana dengan struktur sosial homogen, menuju komunitas yang lebih kompleks dengan diferensiasi pekerjaan, stratifikasi sosial, dan lembaga-lembaga modern.

2. Teori Konflik

Teori konflik, yang dipelopori Karl Marx (1818-1883), memandang perubahan sosial sebagai hasil dari pertentangan antar kelas sosial. Menurut Marx, sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Konflik antara kelas yang menguasai alat produksi (borjuis) dan kelas pekerja (proletar) akan memicu perubahan revolusioner.

Dalam konteks desa, teori konflik relevan untuk menganalisis perubahan yang dipicu oleh ketegangan antara pemilik tanah dan petani penggarap, antara kelompok yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan tertentu, atau antara kelompok tradisionalis dan modernis.

3. Teori Fungsional

Teori fungsional, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902-1979) dan Robert Merton (1910-2003), memandang masyarakat sebagai sistem yang saling terkait. Perubahan terjadi ketika sistem mengalami ketidakseimbangan (disekuilibrium) dan bagian-bagian sistem melakukan penyesuaian untuk mencapai keseimbangan baru.

Dalam konteks desa, teori fungsional membantu kita memahami bagaimana perubahan di satu bidang (misalnya ekonomi) memicu perubahan di bidang lain (sosial, budaya, politik). Misalnya, masuknya teknologi pertanian baru tidak hanya mengubah cara bertani, tetapi juga pola hubungan antar petani, struktur kelembagaan, dan bahkan nilai-nilai yang dianut.

4. Teori Siklus

Teori siklus memandang perubahan sosial sebagai proses berulang, bukan linier. Oswald Spengler (1880-1936) dan Arnold Toynbee (1889-1975) melihat bahwa peradaban lahir, tumbuh, mencapai puncak, kemudian mengalami kemunduran—seperti siklus kehidupan manusia.

Dalam konteks desa, teori siklus dapat dilihat dalam dinamika kejayaan dan kemunduran desa-desa tertentu sepanjang sejarah. Ada desa yang pernah jaya karena menjadi pusat perdagangan, kemudian surut karena jalur perdagangan berpindah. Ada desa yang bangkit kembali setelah menemukan potensi baru (wisata, industri kreatif).

C. FAKTOR INTERNAL PERUBAHAN SOSIAL

Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari dalam masyarakat desa itu sendiri. Ia adalah kekuatan endogen yang mendorong perubahan dari dalam.

1. Perubahan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk adalah salah satu faktor internal paling fundamental yang memicu perubahan sosial. Perubahan demografis ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan desa.

a. Pertumbuhan Penduduk

Ketika jumlah penduduk desa bertambah (karena kelahiran atau migrasi masuk), terjadi peningkatan kepadatan. Konsekuensinya beragam:

- **Tekanan pada sumber daya**. Lahan pertanian yang terbatas harus dibagi untuk lebih banyak orang. Hasil panen yang sama harus mencukupi lebih banyak mulut. Akibatnya, terjadi kelangkaan dan kompetisi. Petani mungkin terpaksa mencari pekerjaan di luar sektor pertanian atau merantau ke kota.
- **Diferensiasi pekerjaan**. Tidak semua orang dapat menjadi petani karena lahan terbatas. Muncullah pekerjaan-pekerjaan baru: buruh tani, pedagang, pengrajin, tukang ojek, buruh bangunan. Struktur mata pencaharian menjadi lebih beragam.
- **Perubahan struktur sosial**. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, ikatan kekerabatan yang semula kuat mulai melemah. Hubungan menjadi lebih impersonal. Stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan tanah dan pekerjaan menjadi lebih menonjol.
- **Tekanan pada infrastruktur dan layanan**. Jalan, air bersih, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya harus melayani lebih banyak orang. Jika tidak diimbangi dengan pembangunan, kualitas layanan menurun dan timbul masalah sosial baru.
- **Potensi konflik**. Kompetisi yang meningkat dapat memicu konflik—antar petani memperebutkan air irigasi, antar warga memperebutkan akses ke sumber daya, atau antar kelompok pendatang dan penduduk asli.

b. Penurunan Penduduk

Sebaliknya, ketika jumlah penduduk desa berkurang (karena kematian atau migrasi keluar), terjadi berbagai konsekuensi:

- **Kekurangan tenaga kerja produktif**. Lahan pertanian terbengkalai karena tidak ada yang menggarap. Usaha-usaha ekonomi lesu. Kegotongroyongan dan kegiatan kolektif lainnya sulit dilakukan karena kekurangan orang.
- **Penuaan penduduk**. Yang tersisa di desa umumnya orang tua dan anak-anak. Penduduk usia produktif merantau ke kota. Akibatnya, desa kehilangan dinamisme, inovasi, dan generasi penerus.
- **Layanan publik tidak efisien**. Sekolah kekurangan murid, puskesmas sepi, fasilitas umum tidak terawat. Biaya per kapita untuk menyediakan layanan menjadi mahal.
- **Runtuhnya institusi lokal**. Karang taruna lumpuh karena pemudanya pergi. Kelompok tani bubar karena anggotanya berkurang. Gotong royong melemah karena tidak ada tenaga.

Penurunan penduduk akibat urbanisasi adalah masalah serius yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Ia menciptakan lingkaran setan: desa terbelakang karena kekurangan tenaga produktif, pemuda pergi merantau karena desa terbelakang, desa semakin terbelakang karena kehilangan pemuda, dan seterusnya.

2. Penemuan Baru (Inovasi)

Inovasi adalah penemuan baru—baik berupa ide, metode, alat, atau teknologi—yang diadopsi oleh masyarakat. Inovasi dapat bersifat **discovery** (penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diketahui) atau **invention** (penciptaan sesuatu yang benar-benar baru).

Dalam konteks desa, inovasi dapat terjadi di berbagai bidang:

a. Inovasi Teknologi Pertanian

Sektor pertanian adalah bidang paling vital di desa. Inovasi di bidang ini dapat mengubah fundamental kehidupan desa:

- **Bibit unggul**. Penemuan bibit padi, jagung, atau palawija yang lebih tahan hama dan berproduksi tinggi (seperti revolusi hijau di era 1970-an) meningkatkan hasil panen secara dramatis. Ini mengubah kehidupan petani—pendapatan naik, tetapi juga ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida meningkat.
- **Alat dan mesin pertanian**. Pengenalan traktor, mesin perontok padi (power thresher), atau pompa air mengubah cara bertani. Pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak tenaga manusia dan waktu, kini dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Namun, ini juga mengurangi lapangan kerja bagi buruh tani dan menggeser hubungan sosial dalam pertanian.
- **Teknik budidaya baru**. Sistem tanam jajar legowo, penggunaan mulsa plastik, atau teknik irigasi tetes mengubah praktik pertanian tradisional. Petani harus belajar cara baru, mengubah kebiasaan lama, dan beradaptasi dengan pengetahuan teknis yang lebih rumit.
- **Pascapanen dan pengolahan**. Inovasi dalam pengeringan, penggilingan, atau pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan (keripik, tepung, makanan ringan) membuka nilai tambah dan peluang ekonomi baru.

b. Inovasi Teknologi Tepat Guna

Selain pertanian, inovasi dalam teknologi tepat guna juga mempengaruhi kehidupan desa:

- **Energi alternatif**. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biogas dari kotoran ternak, atau panel surya membawa listrik ke desa-desa terpencil. Ini mengubah banyak hal: anak-anak bisa belajar malam, aktivitas ekonomi bisa berlangsung lebih lama, hiburan (TV, radio) masuk ke desa.
- **Teknologi pengolahan pangan**. Alat pengering hasil pertanian, mesin pengemas, atau teknologi pendingin (cold storage) memungkinkan desa mengolah dan menyimpan hasil panen lebih lama, mengurangi kerugian pascapanen.
- **Teknologi air bersih**. Pompa air, filter air, atau teknologi penjernihan air sederhana meningkatkan akses terhadap air bersih, mengurangi penyakit, dan meringankan beban perempuan yang biasanya bertugas mengambil air.
- **Teknologi informasi dan komunikasi**. Meskipun banyak berasal dari luar, adopsi teknologi informasi oleh masyarakat desa (seperti penggunaan ponsel untuk komunikasi, pemasaran, atau informasi harga) adalah bentuk inovasi yang mengubah banyak aspek kehidupan.

c. Inovasi Sosial dan Kelembagaan

Inovasi tidak selalu tentang teknologi. Inovasi sosial—cara-cara baru dalam berorganisasi, bekerjasama, atau menyelesaikan masalah—juga penting:

- **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**. Inovasi kelembagaan ini, yang diamanatkan UU Desa, mengubah cara desa mengelola aset dan usaha. Desa kini memiliki kendaraan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi secara profesional.
- **Sistem Informasi Desa (SID)**. Penggunaan teknologi informasi untuk administrasi dan pelayanan publik adalah inovasi yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi.
- **Kelompok usaha bersama (KUBE)**. Inovasi dalam pengorganisasian kelompok miskin untuk kegiatan ekonomi produktif membantu mereka keluar dari kemiskinan melalui kerjasama dan pendampingan.
- **Skema pembiayaan alternatif**. Lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, atau arisan yang dikelola secara modern menjadi inovasi yang memperluas akses modal bagi warga desa.

3. Konflik Sosial

Konflik sosial, meskipun sering dipandang negatif, dapat menjadi pendorong perubahan yang signifikan. Ketika terjadi benturan kepentingan antar kelompok, masyarakat dipaksa untuk mencari solusi, beradaptasi, dan seringkali berubah.

a. Konflik Sebagai Katalis Perubahan

Konflik dapat memicu perubahan dalam berbagai cara:

- **Mendorong inovasi kelembagaan**. Konflik agraria yang berkepanjangan dapat mendorong lahirnya kebijakan reforma agraria atau pembentukan lembaga penyelesaian sengketa tanah. Konflik perebutan sumber daya air dapat mendorong pembentukan organisasi pengelola air yang lebih partisipatif.
- **Mengubah struktur kekuasaan**. Konflik dapat menggeser siapa yang berkuasa. Gerakan petani yang berhasil merebut kembali tanahnya dari tuan tanah mengubah struktur kepemilikan dan relasi kuasa di desa. Pemilihan kepala desa yang sengit dapat menggeser elit lama dengan elit baru.
- **Meningkatkan kesadaran politik**. Konflik menyadarkan masyarakat tentang kepentingan bersama, hak-hak mereka, dan pentingnya solidaritas. Petani yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan belajar berorganisasi, membangun jaringan, dan memperjuangkan haknya.
- **Mendorong perubahan norma**. Konflik dapat memicu evaluasi terhadap norma-norma yang ada. Misalnya, konflik akibat praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat mendorong perubahan norma menuju kesetaraan yang lebih besar.

b. Konflik dan Rekonsiliasi

Perubahan yang dipicu konflik tidak selalu berlangsung mulus. Konflik dapat meninggalkan trauma, permusuhan, dan perpecahan. Proses rekonsiliasi menjadi penting untuk memulihkan hubungan dan membangun tatanan baru yang lebih baik.

Dalam banyak desa, mekanisme rekonsiliasi tradisional—seperti upacara adat perdamaian, mediasi oleh tokoh adat, atau kewajiban membayar denda adat—menjadi sarana untuk mengakhiri konflik dan membangun kembali konsensus sosial. Proses rekonsiliasi itu sendiri adalah bentuk perubahan sosial—pergeseran dari keadaan konflik ke keadaan damai, dari permusuhan ke kerjasama.

4. Gerakan Sosial dan Aksi Kolektif

Gerakan sosial—aksi kolektif yang terorganisir untuk mendorong atau menolak perubahan—juga merupakan faktor internal yang penting. Di desa, gerakan sosial bisa muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang tidak adil, ancaman terhadap sumber daya, atau aspirasi untuk perbaikan nasib.

Contoh gerakan sosial di tingkat desa:

- **Gerakan petani** menolak penggusuran lahan untuk proyek tambang atau perkebunan besar.
- **Gerakan perempuan** menuntut keterwakilan dalam lembaga desa atau menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.
- **Gerakan pemuda** mendorong pembangunan fasilitas olahraga, ruang kreatif, atau program pelatihan keterampilan.
- **Gerakan lingkungan** menolak praktik pertambangan atau penebangan hutan yang merusak ekosistem desa.

Gerakan-gerakan ini, meskipun mungkin tidak selalu berhasil mencapai tujuannya, tetap menjadi faktor perubahan karena ia menggerakkan orang, membangun kesadaran, dan mempengaruhi wacana publik di desa.

5. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran

Peningkatan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor internal penting yang mendorong perubahan. Ketika semakin banyak warga desa yang berpendidikan, cara pandang, aspirasi, dan perilaku mereka berubah.

Pendidikan membuka wawasan, mengajarkan cara berpikir kritis, dan memperkenalkan nilai-nilai baru. Warga yang berpendidikan cenderung:

- Lebih sadar akan hak-haknya sebagai warga negara
- Lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah
- Lebih terbuka terhadap ide-ide dan teknologi baru
- Lebih aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial
- Lebih peduli pada pendidikan anak-anak mereka
- Lebih mampu mengakses informasi dan peluang

Akumulasi individu-individu yang lebih terdidik ini pada akhirnya mengubah karakter masyarakat secara keseluruhan. Tuntutan akan layanan publik yang lebih baik, tata kelola yang lebih transparan, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas semakin mengemuka.

6. Perubahan Nilai dan Orientasi Hidup

Perubahan dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat juga dapat menjadi faktor internal perubahan. Nilai-nilai tidak statis; ia dapat bergeser seiring pengalaman kolektif dan interaksi dengan dunia luar.

Pergeseran nilai yang umum terjadi di desa:

- **Dari kolektivisme ke individualisme**. Nilai gotong royong dan kebersamaan mulai bergeser ke nilai kemandirian dan pencapaian pribadi. Orang lebih mengutamakan kepentingan keluarga inti daripada kepentingan kerabat luas atau komunitas.

- **Dari fatalisme ke rasionalisme**. Pandangan bahwa nasib sudah ditentukan (fatalisme) mulai bergeser ke keyakinan bahwa manusia dapat mengubah nasib melalui usaha dan perencanaan rasional. Petani tidak hanya pasrah pada alam, tetapi aktif mencari cara meningkatkan hasil.
- **Dari tradisional ke modern**. Orientasi pada masa lalu (menjaga tradisi, mengikuti cara leluhur) bergeser ke orientasi pada masa depan dan hal-hal baru. Generasi muda lebih tertarik pada hal-hal modern (gaya hidup, teknologi, hiburan) daripada tradisi lama.
- **Dari askriptif ke prestatif**. Penghargaan sosial yang semula berdasarkan faktor kelahiran (keturunan, umur, gender) bergeser ke berdasarkan prestasi (pendidikan, kekayaan, jabatan). Orang dihormati bukan karena siapa orang tuanya, tetapi karena apa yang telah dicapainya.

Pergeseran nilai ini, meskipun tidak selalu disadari, mendorong perubahan dalam perilaku sehari-hari, pilihan hidup, dan orientasi masa depan warga desa.

D. FAKTOR EKSTERNAL PERUBAHAN SOSIAL

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar masyarakat desa. Ia adalah kekuatan eksogen yang menerobos masuk dan mempengaruhi kehidupan desa.

1. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Arus globalisasi yang deras membawa pengaruh besar terhadap desa-desa di seluruh Indonesia.

a. Ekonomi Global dan Pasar

Desa tidak lagi terisolasi dari ekonomi global. Harga komoditas pertanian—karet, kelapa sawit, kopi, kakao—ditentukan oleh pasar dunia. Fluktuasi harga di bursa komoditas London atau New York langsung dirasakan petani di pelosok desa. Ketika harga karet dunia jatuh, petani karet di Jambi atau Kalimantan merasakan dampaknya—pendapatan turun, kemampuan beli menurun, dan ekonomi desa lesu.

Integrasi pasar ini juga membuka peluang. Produk-produk desa—kopi organik, kerajinan tangan, tenun ikat—kini dapat dijual ke pasar global melalui platform e-commerce. Wisatawan mancanegara datang ke desa-desa wisata, membawa devisa dan peluang ekonomi baru.

b. Budaya Global

Globalisasi membawa masuk nilai-nilai, gaya hidup, dan produk budaya dari berbagai belahan dunia—terutama dari Barat. Pengaruhnya terlihat dalam berbagai aspek:

- **Cara berpakaian**. Generasi muda desa kini lebih memilih jeans, kaos, dan pakaian ala selebriti daripada pakaian tradisional. Jilbab model baru, celana ketat, atau pakaian minim menjadi tren yang kadang berbenturan dengan nilai-nilai lokal.

- **Makanan dan minuman**. Warung-warung di desa menjual mi instan, sosis, nugget, dan makanan cepat saji lainnya yang menggeser konsumsi pangan lokal. Anak-anak lebih suka jajanan pabrikan daripada jajanan tradisional.
- **Hiburan**. Musik pop, film, dan serial asing mendominasi hiburan. Tayangan-tayangan dari televisi dan YouTube memperkenalkan gaya hidup glamor, hedonis, dan konsumtif yang kadang jauh dari realitas desa.
- **Bahasa**. Kata-kata asing (terutama Inggris) mulai masuk ke dalam percakapan sehari-hari. Generasi muda lebih bangga bisa berbahasa Inggris daripada menguasai bahasa daerah.
- **Pergaulan**. Nilai-nilai tentang pacaran, pergaulan bebas, dan kebebasan individu mulai mempengaruhi perilaku remaja desa, kadang menimbulkan konflik dengan norma-norma tradisional dan agama.

c. Pengaruh Positif Globalisasi

Tidak semua pengaruh globalisasi negatif. Ada juga dampak positif:

- **Akses informasi**. Globalisasi membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Petani dapat belajar teknik pertanian dari negara lain. Ibu-ibu dapat belajar resep masakan dari berbagai budaya. Pemuda dapat mengakses materi pembelajaran online.
- **Peluang ekonomi**. Pasar global membuka peluang bagi produk desa. Wisatawan asing membawa peluang di sektor pariwisata. Investasi asing dapat membuka lapangan kerja (meskipun perlu dikelola hati-hati).
- **Pertukaran budaya**. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran budaya. Kesenian tradisional desa dapat dipentaskan di panggung internasional. Nilai-nilai positif dari budaya lain (misalnya disiplin, kerja keras, penghargaan waktu) dapat diadopsi.

2. Kebijakan Pemerintah

Negara, melalui berbagai kebijakannya, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika desa. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong perubahan—baik yang direncanakan maupun tidak.

a. Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014)

UU Desa adalah contoh kebijakan yang membawa perubahan fundamental. Beberapa perubahan penting yang dipicu UU ini:

- **Otonomi desa**. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, tidak lagi sekadar "anak" dari kabupaten/kota. Ini mengubah relasi kekuasaan dan membuka ruang bagi kreativitas lokal.
- **Dana desa**. Alokasi dana yang signifikan dari APBN ke desa (rata-rata Rp 800 juta - Rp 1,4 miliar per desa per tahun) mengubah lanskap ekonomi desa. Uang dalam jumlah besar masuk ke desa, membuka peluang pembangunan, tetapi juga potensi korupsi dan konflik.
- **Kelembagaan baru**. UU Desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa, serta memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa. Ini mengubah struktur pemerintahan dan politik desa.
- **Perencanaan partisipatif**. UU Desa mewajibkan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini mendorong partisipasi dan demokratisasi di tingkat desa.

Dampak UU Desa sangat terasa di seluruh Indonesia. Desa-desa yang tadinya tidak punya anggaran, kini bisa membangun infrastruktur, mengembangkan BUMDes, memberikan insentif bagi perangkat desa, dan menjalankan berbagai program pemberdayaan. Namun, juga muncul masalah baru: kepala desa yang korup, konflik internal akibat perebutan dana, dan kesenjangan kapasitas dalam mengelola anggaran.

b. Program-Program Pembangunan Nasional

Berbagai program pembangunan nasional juga menjadi faktor perubahan di desa:

- **Program Keluarga Harapan (PKH)**. Program bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku: anak-anak harus sekolah, ibu hamil harus periksa ke puskesmas, balita harus diimunisasi.
- **Kartu Indonesia Sehat (KIS)** dan **Kartu Indonesia Pintar (KIP)**. Jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan ini meningkatkan akses warga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
- **Program pembangunan infrastruktur**. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan air bersih oleh pemerintah pusat dan daerah mengubah konektivitas, akses, dan kualitas hidup warga desa.
- **Program ketahanan pangan**. Bantuan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), dan penyuluhan pertanian mempengaruhi produktivitas dan praktik pertanian.
- **Program pemberdayaan masyarakat**. Program seperti PNPM Mandiri Perdesaan (meski kini telah berakhir, metodologinya banyak diadopsi) membangun kapasitas masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pengelolaan kegiatan kolektif.

c. Kebijakan Sektoral

Kebijakan di berbagai sektor juga mempengaruhi desa:

- **Kebijakan pertanian**. Subsidi pupuk, penetapan harga dasar gabah, kebijakan impor pangan, dan program asuransi pertanian mempengaruhi nasib petani.
- **Kebijakan kehutanan dan lingkungan**. Penetapan kawasan hutan, larangan penambangan, atau program reboisasi mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
- **Kebijakan tata ruang**. Alokasi lahan untuk perkebunan besar, industri, atau kawasan pariwisata mengubah struktur ekonomi dan sosial desa.
- **Kebijakan otonomi daerah**. Desentralisasi kewenangan ke kabupaten/kota mempengaruhi bagaimana desa berinteraksi dengan pemerintah di atasnya.

3. Pengaruh Media Massa dan Teknologi Informasi

Media massa dan teknologi informasi adalah faktor eksternal yang semakin dominan di era digital. Mereka menjadi saluran masuknya ide, nilai, informasi, dan gaya hidup baru ke desa.

a. Media Massa Tradisional

Televisi dan radio telah lama menjadi "jendela dunia" bagi warga desa. Melalui siaran televisi, warga desa menyaksikan gaya hidup kota, program-program hiburan, berita nasional dan internasional, serta iklan yang mempromosikan berbagai produk. Tayangan sinetron, infotainment, dan reality show membentuk imajinasi dan aspirasi, terutama generasi muda.

Media massa juga membawa pesan-pesan pembangunan. Iklan layanan masyarakat tentang keluarga berencana, kesehatan, atau pendidikan menyebarkan nilai-nilai baru. Berita tentang keberhasilan desa lain menginspirasi untuk meniru.

b. Teknologi Informasi dan Internet

Revolusi digital membawa perubahan yang lebih dahsyat. Kehadiran internet, ponsel pintar, dan media sosial mengubah banyak hal secara fundamental:

- **Akses informasi tak terbatas**. Warga desa kini dapat mengakses informasi apa pun dari seluruh dunia—berita, pengetahuan, hiburan, tutorial, dan lain-lain. Mereka tidak lagi bergantung pada informasi dari mulut ke mulut atau dari pemerintah.
- **Komunikasi instan**. Ponsel memungkinkan komunikasi dengan siapa pun, di mana pun, kapan pun. Petani dapat menanyakan harga komoditas ke pedagang di kota. Ibu dapat berkomunikasi dengan anaknya yang merantau. Remaja dapat berinteraksi dengan teman di media sosial.
- **Media sosial**. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan desa. Melalui media sosial, warga desa membangun jaringan, mengekspresikan diri, mencari hiburan, dan membentuk opini. Media sosial juga menjadi arena baru untuk interaksi sosial—berbagi kabar, berdiskusi, kadang juga berkonflik.
- **E-commerce dan pemasaran digital**. Platform jual beli online membuka peluang bagi produk desa untuk dipasarkan lebih luas. Pelaku UMKM desa dapat menjual produknya ke kota besar bahkan luar negeri tanpa harus memiliki toko fisik.
- **Layanan keuangan digital**. Mobile banking, e-wallet, dan layanan keuangan digital lainnya memudahkan transaksi dan memperluas akses keuangan.

c. Dampak Media dan Teknologi terhadap Dinamika Desa

Dampak media dan teknologi terhadap desa sangat kompleks:

Dampak positif:

- **Peningkatan pengetahuan**. Warga desa dapat belajar banyak hal—teknik pertanian, keterampilan usaha, informasi kesehatan, pengetahuan agama—dari internet.
- **Perluasan jaringan**. Media sosial memungkinkan warga desa terhubung dengan orang-orang di luar desa, termasuk perantau, pembeli potensial, atau komunitas dengan minat sama.
- **Kemudahan komunikasi**. Komunikasi dengan keluarga yang merantau, dengan dinas atau instansi, atau dengan mitra bisnis menjadi lebih mudah dan murah.
- **Peluang ekonomi baru**. Internet membuka peluang usaha baru: konten kreator, dropshipper, afiliator, atau pengelola media sosial. Generasi muda desa dapat menghasilkan uang dari rumah tanpa harus merantau.
- **Suara bagi yang tak bersuara**. Media sosial memberi ruang bagi kelompok marginal (perempuan, pemuda, minoritas) untuk menyuarakan aspirasi dan pendapatnya.

Dampak negatif:

- **Kesenjangan digital**. Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang mampu (punya ponsel pintar, paket data, literasi digital) diuntungkan; yang tidak mampu semakin tertinggal.

- **Budaya konsumtif**. Paparan iklan dan gaya hidup glamor di media sosial mendorong perilaku konsumtif, terutama di kalangan remaja. Mereka ingin memiliki barang-barang yang dilihatnya, meskipun tidak mampu.
- **Berita bohong (hoax)**. Penyebaran informasi palsu, fitnah, dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memicu konflik, menyesatkan opini publik, dan merusak kohesi sosial.
- **Kecanduan dan isolasi sosial**. Waktu yang berlebihan di media sosial dapat mengurangi interaksi tatap muka, melemahkan ikatan sosial yang nyata.
- **Pornografi dan konten negatif**. Akses bebas internet juga membuka pintu bagi konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai dan norma lokal, seperti pornografi, kekerasan, atau radikalisme.

4. Pengaruh Lingkungan Alam

Lingkungan alam juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial di desa. Bencana alam, perubahan iklim, atau penemuan sumber daya alam baru dapat memicu perubahan besar.

a. Bencana Alam

Gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, atau kekeringan dapat mengubah wajah desa dalam sekejap. Dampaknya meliputi:

- **Kerusakan fisik**. Rumah, lahan pertanian, infrastruktur hancur. Masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
- **Korban jiwa dan trauma**. Bencana dapat merenggut nyawa dan meninggalkan trauma psikologis yang mendalam.
- **Migrasi paksa**. Masyarakat mungkin harus direlokasi ke tempat lain, memutus ikatan dengan tanah leluhur dan mengubah struktur sosial.
- **Perubahan mata pencaharian**. Lahan pertanian yang rusak mungkin tidak bisa digarap lagi. Masyarakat terpaksa mencari pekerjaan baru.
- **Solidaritas dan perubahan sosial**. Di sisi lain, bencana sering memicu solidaritas luar biasa—baik dari dalam maupun luar. Ini dapat memperkuat ikatan sosial dan mendorong terbentuknya kelembagaan baru untuk penanggulangan bencana.

b. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global membawa dampak jangka panjang yang perlahan tapi pasti mengubah kehidupan desa:

- **Pergeseran musim**. Musim tanam yang tadinya bisa diprediksi menjadi tidak menentu. Petani kesulitan menentukan waktu tanam, meningkatkan risiko gagal panen.
- **Kekeringan dan banjir**. Intensitas cuaca ekstrem meningkat. Kekeringan berkepanjangan atau banjir bandang mengancam produksi pertanian.
- **Kenaikan permukaan air laut**. Desa-desa pesisir terancam abrasi dan intrusi air laut, merusak tambak dan lahan pertanian, serta mengancam pemukiman.
- **Perubahan pola penyakit**. Perubahan iklim mempengaruhi sebaran vektor penyakit (nyamuk, misalnya), meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah atau malaria.

Perubahan iklim memaksa desa-desa untuk beradaptasi—mengubah pola tanam, mencari varietas tanaman yang lebih tahan, membangun infrastruktur mitigasi, atau bahkan mempertimbangkan relokasi.

c. Penemuan Sumber Daya Alam

Penemuan sumber daya alam baru—tambang, minyak, gas, atau potensi wisata—dapat mengubah desa secara dramatis:

- **Boom ekonomi**. Investasi besar masuk, lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat meningkat. Desa yang tadinya miskin bisa mendadak kaya.
- **Perubahan demografis**. Pekerja dari luar berdatangan, mengubah komposisi penduduk dan struktur sosial.
- **Konflik**. Perebutan manfaat, sengketa lahan, atau dampak lingkungan dapat memicu konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
- **Perubahan nilai**. Masuknya uang dan budaya luar dapat menggeser nilai-nilai tradisional, memicu konsumerisme, dan mengubah gaya hidup.
- **Kerusakan lingkungan**. Eksploitasi sumber daya alam sering meninggalkan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang pada kehidupan desa.

5. Pengaruh Desa-Kota dan Migrasi

Hubungan desa-kota dan arus migrasi adalah faktor eksternal yang sangat signifikan dalam dinamika desa.

a. Urbanisasi

Urbanisasi—perpindahan penduduk dari desa ke kota—adalah fenomena massif yang mengubah desa secara fundamental. Dampaknya:

- **Pengurasan sumber daya manusia**. Desa kehilangan penduduk usia produktif, terdidik, dan energik. Yang tersisa adalah orang tua, anak-anak, dan mereka yang tidak mampu merantau.
- **Remitansi**. Para perantau mengirim uang ke keluarga di desa. Remitansi ini menjadi sumber ekonomi penting bagi banyak desa, bahkan melebihi pendapatan dari sektor pertanian.
- **Perubahan aspirasi**. Keberhasilan para perantau menjadi teladan dan mengubah aspirasi generasi muda. Mereka juga ingin merantau, sekolah tinggi, bekerja di kota, bukan menjadi petani.
- **Masuknya ide dan gaya hidup baru**. Ketika pulang kampung, para perantau membawa ide, pengetahuan, dan gaya hidup baru. Ini menjadi agen perubahan yang memperkenalkan modernisasi ke desa.
- **Perubahan struktur keluarga**. Keluarga menjadi terpisah secara geografis. Orang tua tinggal di desa, anak-anak merantau. Ikatan keluarga melemah, meskipun tetap terpelihara melalui komunikasi jarak jauh dan kunjungan tahunan.

b. Pengaruh Kota

Kota, sebagai pusat modernitas, memiliki daya tarik dan pengaruh besar terhadap desa:

- **Pasar bagi produk desa**. Kota menjadi tujuan utama produk-produk desa—hasil pertanian, kerajinan, tenaga kerja. Fluktuasi permintaan kota mempengaruhi ekonomi desa.

- **Pusat informasi dan inovasi**. Ide-ide baru, tren, dan teknologi biasanya lahir atau masuk melalui kota sebelum menyebar ke desa. Apa yang "viral" di kota, lama-lama akan sampai ke desa.
- **Tujuan pendidikan dan kesehatan**. Sekolah dan fasilitas kesehatan berkualitas umumnya berada di kota. Warga desa harus ke kota untuk mengaksesnya, membawa pulang pengalaman dan pengetahuan baru.
- **Referensi gaya hidup**. Gaya hidup kota—cara berpakaian, bergaul, mengisi waktu luang, mengonsumsi—menjadi referensi bagi warga desa, terutama generasi muda. Mereka ingin menjadi "modern" seperti orang kota.

6. Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Eksternal

LSM, organisasi keagamaan, partai politik, dan organisasi eksternal lainnya juga menjadi faktor perubahan di desa.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan, advokasi kebijakan, atau bantuan kemanusiaan sering bekerja di desa-desa. Peran mereka:

- **Pendampingan dan pelatihan**. LSM memberikan pelatihan tentang berbagai hal: pertanian organik, pengelolaan keuangan, advokasi hak, kesadaran gender, dan lain-lain. Ini meningkatkan kapasitas masyarakat.
- **Pengorganisasian masyarakat**. LSM membantu masyarakat untuk berorganisasi, membentuk kelompok, dan mengembangkan kepemimpinan lokal. Ini memperkuat struktur sosial dan kapasitas kolektif.
- **Advokasi kebijakan**. LSM membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya—misalnya dalam sengketa tanah, menolak tambang, atau menuntut pelayanan publik yang lebih baik.
- **Bantuan langsung**. Beberapa LSM memberikan bantuan langsung—bibit, modal usaha, atau pembangunan infrastruktur—untuk mengatasi masalah mendesak.
- **Memperkenalkan nilai-nilai baru**. LSM sering membawa nilai-nilai baru—kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup—yang mungkin belum akrab di desa.

b. Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau organisasi keagamaan lainnya memiliki pengaruh besar di desa. Mereka tidak hanya mengurus urusan agama, tetapi juga pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi pusat perubahan nilai dan pengetahuan.

Organisasi kemasyarakatan seperti organisasi perempuan, kepemudaan, atau profesi juga membawa pengaruh. Mereka menjadi saluran masuknya ide-ide baru, wadah pengembangan kapasitas, dan arena partisipasi sosial.

c. Partai Politik

Partai politik juga aktif di desa, terutama menjelang pemilihan umum. Mereka merekrut kader, melakukan sosialisasi, dan memobilisasi massa. Kehadiran partai politik memperkenalkan wacana politik, membangun kesadaran berpolitik, dan kadang menciptakan polarisasi di masyarakat.

E. INTERAKSI ANTAR FAKTOR: KOMPLEKSITAS PERUBAHAN

Dalam realitas, faktor-faktor perubahan sosial tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan bersama-sama membentuk dinamika yang kompleks.

1. Interaksi Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal dan eksternal sering berinteraksi dalam memicu perubahan. Misalnya:

- **Inovasi dan kebijakan pemerintah**. Inovasi lokal (faktor internal) dapat diadopsi dan diperluas melalui kebijakan pemerintah (faktor eksternal). Misalnya, inovasi BUMDes di satu desa kemudian didorong oleh pemerintah untuk direplikasi di desa lain.
- **Konflik dan intervensi LSM**. Konflik internal (misalnya sengketa tanah) dapat menarik perhatian LSM (faktor eksternal) yang kemudian memberikan pendampingan advokasi. Ini mengubah dinamika konflik dan dapat memicu perubahan kebijakan.
- **Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi**. Pertumbuhan penduduk (internal) yang tidak diimbangi perluasan lapangan kerja mendorong urbanisasi (migrasi ke kota). Urbanisasi ini kemudian membawa pengaruh balik ke desa melalui remitansi dan ide-ide baru (eksternal).
- **Perubahan nilai dan media massa**. Pergeseran nilai di kalangan generasi muda (internal) diperkuat oleh paparan media massa dan internet (eksternal). Sebaliknya, konten media massa juga dibentuk oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

2. Perubahan Berantai

Satu perubahan dapat memicu perubahan lain dalam efek domino atau bola salju. Misalnya:

- Masuknya listrik ke desa (kebijakan pemerintah) → memungkinkan anak-anak belajar malam → meningkatkan prestasi sekolah → lebih banyak yang melanjutkan pendidikan → meningkatkan kesadaran dan aspirasi → mendorong perubahan nilai dan perilaku → mempengaruhi pilihan politik dan partisipasi sosial.
- Pembangunan jalan desa (kebijakan pemerintah) → memudahkan akses ke kota → memudahkan pemasaran hasil pertanian → meningkatkan pendapatan petani → memungkinkan investasi dalam pendidikan anak → anak-anak lebih berpendidikan → sebagian merantau, sebagian kembali dengan ide baru → mengembangkan usaha baru di desa → diversifikasi ekonomi desa.

3. Konflik Antar Faktor

Tidak semua faktor bergerak searah. Sering terjadi konflik atau tarik-menarik antara faktor-faktor yang berbeda. Misalnya:

- Nilai-nilai global (individualisme, konsumerisme) berbenturan dengan nilai-nilai lokal (gotong royong, kesederhanaan). Generasi muda mungkin tertarik pada nilai global, sementara generasi tua mempertahankan nilai lokal. Terjadi ketegangan antar generasi.

- Kebijakan pemerintah yang mendorong investasi besar (tambang, perkebunan) berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada lahan yang sama. Konflik agraria pun terjadi.
- Media sosial membawa informasi dan hiburan, tetapi juga konten negatif (pornografi, radikalisme) yang bertentangan dengan nilai agama dan adat. Orang tua dan tokoh agama merasa khawatir, sementara remaja menikmati kebebasan akses.
- Modernisasi pertanian (penggunaan traktor, pupuk kimia) meningkatkan hasil panen tetapi juga merusak lingkungan dan menggeser hubungan sosial tradisional. Ada trade-off antara produktivitas dan keberlanjutan.

F. PERUBAHAN YANG DIRENCANAKAN DAN TIDAK DIRENCANAKAN

Dalam kajian perubahan sosial, penting untuk membedakan antara perubahan yang direncanakan (intended change) dan perubahan yang tidak direncanakan (unintended change).

1. Perubahan yang Direncanakan (Planned Change)

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang sengaja dikehendaki dan dirancang oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia adalah hasil intervensi sadar manusia terhadap proses sosial. Ciri-cirinya:

- **Ada agen perubahan** (change agent)—individu, kelompok, atau lembaga yang secara sadar berupaya mendorong perubahan.
- **Ada tujuan yang jelas**—apa yang ingin dicapai dirumuskan secara eksplisit.
- **Ada perencanaan**—langkah-langkah, strategi, dan sumber daya disiapkan untuk mencapai tujuan.
- **Biasanya melibatkan program atau proyek** dengan jangka waktu tertentu.

Di desa, contoh perubahan yang direncanakan antara lain:

- Program pembangunan infrastruktur desa (jalan, jembatan, irigasi) yang direncanakan dalam musyawarah desa dan dilaksanakan menggunakan dana desa.
- Program pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah yang dirancang oleh dinas sosial atau LSM.
- Kampanye kesehatan (imunisasi, KB, hidup bersih) oleh puskesmas.
- Pengembangan BUMDes yang direncanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
- Program keluarga berencana yang digalakkan pemerintah.

Perubahan yang direncanakan umumnya lebih mudah dikendalikan dan dampaknya dapat diprediksi. Namun, tidak berarti selalu berhasil. Banyak program pembangunan gagal karena perencanaan yang buruk, resistensi masyarakat, atau faktor-faktor tak terduga.

2. Perubahan yang Tidak Direncanakan (Unplanned Change)

Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak atau kendali manusia. Ia adalah hasil akumulasi dari berbagai kekuatan sosial, alam, atau ekonomi yang tidak dirancang secara sadar oleh siapa pun. Ciri-cirinya:

- **Tidak ada agen perubahan yang jelas**—perubahan terjadi sebagai konsekuensi dari berbagai faktor yang kompleks.
- **Tidak ada tujuan yang dirumuskan**—perubahan terjadi begitu saja, kadang tak terduga.
- **Sulit diprediksi dan dikendalikan**.
- **Dapat bersifat positif atau negatif**.

Di desa, contoh perubahan yang tidak direncanakan antara lain:

- Perubahan nilai dan gaya hidup akibat masuknya televisi dan internet. Tidak ada yang merencanakan agar remaja desa menjadi konsumtif atau individualis, tetapi itu terjadi sebagai dampak sampingan dari paparan media.
- Urbanisasi massal akibat desakan ekonomi. Tidak ada program yang secara sadar merancang agar pemuda desa merantau ke kota, tetapi itu terjadi karena faktor struktural.
- Perubahan pola tanam akibat perubahan iklim. Petani terpaksa beradaptasi dengan musim yang tidak menentu, bukan karena merencanakannya.
- Konflik sosial akibat kebijakan yang tidak populer. Pemerintah mungkin merencanakan pembangunan pabrik untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak merencanakan konflik yang timbul akibat dampak lingkungan.
- Tumbuhnya sektor informal di desa (warung, ojek, jasa) sebagai respons terhadap perubahan ekonomi. Tidak ada yang merencanakan hal ini secara sistematis.

3. Hubungan Antara Perubahan Direncanakan dan Tidak Direncanakan

Dalam realitas, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan sering berkelindan. Setiap intervensi yang direncanakan hampir pasti menimbulkan dampak tidak terduga (unintended consequences). Sebaliknya, perubahan tidak terencana sering direspons dengan intervensi terencana untuk mengatasinya.

Contoh 1: Program Dana Desa

Pemerintah merencanakan program dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di desa (perubahan direncanakan). Dampak positif yang diharapkan: infrastruktur terbangun, ekonomi bergerak, kesejahteraan naik. Namun, muncul juga dampak tidak terencana: korupsi oleh kepala desa, konflik antar warga memperebutkan proyek, kecemburuan antar desa, atau ketergantungan desa pada dana pusat.

Contoh 2: Revolusi Hijau

Pemerintah merencanakan program revolusi hijau (penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida) untuk meningkatkan produksi pangan (perubahan direncanakan). Hasilnya, produksi pangan meningkat drastis. Namun, muncul dampak tidak terencana: kerusakan lingkungan akibat pupuk kimia, ketergantungan petani pada input pabrikan, punahnya varietas lokal, dan kesenjangan antara petani kaya (yang mampu membeli input) dan petani miskin (yang tidak mampu).

Contoh 3: Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan jalan tol yang direncanakan untuk memperlancar transportasi dapat menimbulkan dampak tidak terencana bagi desa-desa yang dilaluinya. Harga tanah di sekitar tol melonjak, menguntungkan pemilik tanah tetapi menyulitkan petani penggarap. Munculnya rest area dan fasilitas pendukung menciptakan peluang ekonomi baru tetapi juga mengubah tata ruang dan pola hidup desa.

4. Implikasi bagi Pembangunan Desa

Pemahaman tentang perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan memiliki implikasi penting bagi pembangunan desa:

Pertama, **perencanaan harus antisipatif**. Perencana pembangunan harus berusaha mengantisipasi kemungkinan dampak tidak terencana dari suatu intervensi. Analisis dampak sosial (social impact assessment) perlu dilakukan sebelum program dijalankan.

Kedua, **fleksibilitas dan adaptasi**. Rencana tidak boleh kaku. Harus ada ruang untuk penyesuaian ketika dampak tidak terduga muncul. Monitoring dan evaluasi berkala penting untuk mendeteksi dini masalah dan melakukan koreksi.

Ketiga, **partisipasi masyarakat**. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memahami konteks lokal. Dengan partisipasi, potensi dampak negatif dapat diidentifikasi lebih awal, dan solusi dapat dirancang bersama.

Keempat, **penguatan kapasitas adaptif**. Desa perlu diperkuat kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap perubahan yang tidak terencana. Ini meliputi: sistem peringatan dini, jaringan pengaman sosial, diversifikasi mata pencaharian, dan kelembagaan lokal yang tangguh.

Kelima, **pembelajaran dari dampak**. Setiap program harus menjadi pembelajaran. Dampak tidak terencana—baik positif maupun negatif—harus didokumentasikan dan dianalisis untuk perbaikan program di masa depan.

G. STUDI KASUS: INTERAKSI FAKTOR PERUBAHAN DI BEBERAPA DESA

Untuk memperjelas pemahaman, mari kita lihat beberapa studi kasus tentang bagaimana faktor-faktor perubahan berinteraksi dalam konteks desa yang berbeda.

1. Kasus 1: Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta

Desa Pentingsari di Sleman, Yogyakarta, adalah contoh sukses transformasi desa melalui pariwisata. Perubahan di desa ini didorong oleh interaksi berbagai faktor:

Faktor internal:

- **Inovasi individu**. Seorang tokoh masyarakat (almarhum Pak Wiyono) memiliki visi untuk mengembangkan desanya sebagai desa wisata. Ia menjadi agen perubahan yang menginisiasi dan menggerakkan masyarakat.
- **Kelompok sadar wisata**. Masyarakat membentuk Pokdarwis yang menjadi wadah organisasi dan kerjasama dalam mengelola pariwisata.
- **Modal sosial**. Nilai gotong royong dan kebersamaan yang kuat menjadi fondasi untuk bekerjasama dalam menyediakan homestay, atraksi wisata, dan pelayanan kepada wisatawan.

Faktor eksternal:

- **Kebijakan pemerintah**. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi dalam bentuk promosi, pelatihan, dan bantuan infrastruktur mempercepat pengembangan desa wisata.
- **Globalisasi dan tren pariwisata**. Meningkatnya minat wisatawan, termasuk mancanegara, terhadap wisata pedesaan (desa wisata) menciptakan pasar yang menjanjikan.
- **Media dan teknologi**. Promosi melalui media sosial, website, dan platform pemesanan online memperluas jangkauan pasar.
- **Perguruan tinggi**. Kedekatan dengan Yogyakarta sebagai kota pelajar membawa interaksi dengan mahasiswa dan akademisi yang melakukan penelitian, KKN, atau sekadar berwisata, sekaligus membawa ide-ide baru.

Interaksi dan perubahan:

Interaksi faktor-faktor ini menghasilkan transformasi desa. Petani tidak hanya bertani, tetapi juga menjadi tuan rumah homestay, pemandu wisata, pelaku seni pertunjukan, atau pengrajin cenderamata. Pendapatan meningkat, lapangan kerja terbuka, dan generasi muda tertarik untuk tetap di desa. Namun, juga muncul tantangan baru: komersialisasi budaya, perubahan nilai, dan tekanan pada lingkungan.

2. Kasus 2: Desa Tertinggal di Nusa Tenggara Timur

Berbeda dengan Pentingsari, banyak desa di NTT yang masih tertinggal. Perubahan di desa-desa ini juga dipengaruhi interaksi faktor, tetapi dengan hasil yang berbeda.

Faktor internal:

- **Kondisi alam yang keras**. Iklim kering, tanah tandus, dan keterbatasan air membuat pertanian sulit berkembang. Ini menjadi hambatan internal yang besar.
- **Tingkat pendidikan rendah**. Keterbatasan akses pendidikan menyebabkan sumber daya manusia kurang berkembang.
- **Struktur sosial tradisional**. Ikatan adat yang kuat kadang menghambat inovasi dan perubahan.

Faktor eksternal:

- **Kebijakan pemerintah**. Program-program seperti dana desa, bantuan pangan, dan program pengentasan kemiskinan masuk ke desa.
- **LSM dan organisasi kemanusiaan**. Banyak LSM yang bekerja di NTT, memberikan bantuan dan pendampingan dalam berbagai bidang: pertanian adaptif, konservasi air, kesehatan, pendidikan.

- **Perubahan iklim**. Perubahan iklim memperparah kondisi alam yang sudah keras, dengan kekeringan yang semakin panjang dan curah hujan yang tidak menentu.

Interaksi dan tantangan:

Interaksi faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks. Bantuan dari luar (pemerintah, LSM) membantu masyarakat bertahan, tetapi kadang menciptakan ketergantungan. Inovasi-inovasi seperti teknologi konservasi air atau pertanian lahan kering diperkenalkan, tetapi adopsinya lambat karena keterbatasan sumber daya dan budaya. Urbanisasi ke kota-kota di NTT atau ke luar pulau terus terjadi, menguras tenaga produktif.

3. Kasus 3: Desa Terdampak Tambang di Kalimantan

Desa-desa di sekitar wilayah tambang batu bara di Kalimantan mengalami perubahan dramatis akibat interaksi berbagai faktor.

Faktor eksternal:

- **Investasi tambang**. Masuknya perusahaan tambang besar mengubah lanskap ekonomi dan fisik desa secara fundamental.
- **Kebijakan pemerintah**. Izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh pemerintah, membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya.
- **Migrasi masuk**. Pekerja dari berbagai daerah berdatangan, mengubah komposisi penduduk dan struktur sosial.

Faktor internal:

- **Konflik kepentingan**. Masyarakat terbelah antara yang mendukung tambang (karena lapangan kerja, kompensasi) dan yang menolak (karena dampak lingkungan, kehilangan lahan).
- **Perubahan mata pencaharian**. Petani beralih menjadi pekerja tambang, buruh, atau membuka usaha kecil untuk melayani pekerja tambang.
- **Perubahan nilai**. Masuknya uang dan budaya luar menggeser nilai-nilai tradisional, memicu konsumerisme dan gaya hidup baru.

Dampak tidak terencana:

Selain dampak yang direncanakan (lapangan kerja, pendapatan asli daerah), tambang membawa dampak tidak terencana: kerusakan lingkungan (deforestasi, pencemaran air), konflik sosial, kehancuran pertanian, dan masalah kesehatan. Ketika tambang tutup, desa sering ditinggalkan dengan kerusakan lingkungan dan krisis ekonomi.

H. RANGKUMAN

Perubahan sosial di desa didorong oleh dua kategori faktor utama: internal dan eksternal, yang saling berinteraksi dalam cara yang kompleks.

Faktor internal bersumber dari dalam masyarakat desa sendiri:

1. **Perubahan jumlah penduduk**—pertumbuhan atau penurunan—yang mempengaruhi tekanan pada sumber daya, diferensiasi pekerjaan, dan dinamika sosial.
2. **Penemuan baru (inovasi)**—baik di bidang teknologi pertanian, teknologi tepat guna, maupun inovasi sosial dan kelembagaan.
3. **Konflik sosial** yang dapat menjadi katalis perubahan, mendorong inovasi kelembagaan, mengubah struktur kekuasaan, dan meningkatkan kesadaran.
4. **Gerakan sosial dan aksi kolektif** yang mengorganisir masyarakat untuk mendorong atau menolak perubahan.
5. **Peningkatan pendidikan dan kesadaran** yang mengubah cara pandang, aspirasi, dan perilaku warga.
6. **Perubahan nilai dan orientasi hidup**—dari kolektivisme ke individualisme, fatalisme ke rasionalisme, tradisional ke modern, askriptif ke prestatif.

Faktor eksternal berasal dari luar masyarakat desa:

1. **Globalisasi**—integrasi ekonomi global, masuknya budaya global, dan pertukaran informasi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan desa.
2. **Kebijakan pemerintah**—UU Desa, program-program pembangunan nasional, dan kebijakan sektoral yang secara langsung mengubah lanskap desa.
3. **Media massa dan teknologi informasi**—televisi, internet, dan media sosial yang menjadi saluran masuknya ide, nilai, dan gaya hidup baru.
4. **Pengaruh lingkungan alam**—bencana alam, perubahan iklim, dan penemuan sumber daya baru yang memicu perubahan adaptif.
5. **Pengaruh desa-kota dan migrasi**—urbanisasi dan interaksi dengan kota yang membawa remitansi, ide baru, dan perubahan aspirasi.
6. **Pengaruh LSM dan organisasi eksternal**—yang membawa pendampingan, nilai baru, dan intervensi program.

Faktor-faktor ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam pola yang kompleks—kadang saling memperkuat, kadang saling bertentangan, dan sering menimbulkan efek berantai.

Penting untuk membedakan antara **perubahan yang direncanakan** (hasil intervensi sadar manusia) dan **perubahan yang tidak direncanakan** (dampak tak terduga dari berbagai kekuatan). Dalam praktiknya, keduanya selalu berkelindan. Setiap intervensi terencana hampir pasti menimbulkan dampak tidak terencana. Sebaliknya, perubahan tidak terencana sering direspons dengan intervensi terencana.

Pemahaman tentang faktor-faktor perubahan sosial dan interaksinya sangat penting bagi pembangunan desa. Perencanaan harus antisipatif, fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas adaptif masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, desa dapat mengelola perubahan—memanfaatkan peluang, meminimalkan risiko, dan mengarahkan dinamika menuju kehidupan yang lebih baik.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Amati desa Anda atau desa di sekitar Anda. Faktor internal apa yang paling dominan mendorong perubahan di desa tersebut? Jelaskan dengan contoh konkret!
2. Faktor eksternal apa yang paling berpengaruh di desa Anda? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya?
3. Berikan contoh interaksi antara faktor internal dan eksternal yang Anda amati di desa! Bagaimana keduanya saling mempengaruhi?
4. Identifikasi satu perubahan penting di desa Anda. Apakah perubahan itu lebih banyak didorong oleh faktor internal atau eksternal? Jelaskan!
5. Berikan contoh perubahan yang direncanakan di desa Anda. Apakah tujuan tercapai? Adakah dampak tidak terencana yang muncul?
6. Berikan contoh perubahan yang tidak direncanakan di desa Anda. Bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut?
7. Menurut Anda, bagaimana seharusnya pemerintah desa dan masyarakat merespons pengaruh globalisasi dan teknologi informasi? Sikap apa yang perlu diambil?
8. Dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, apa yang perlu dilakukan desa-desa untuk beradaptasi dan membangun ketahanan?

BAB VI

PERAN NILAI DAN NORMA DALAM KEHIDUPAN DESA

A. PENGANTAR: KOMPAS MORAL MASYARAKAT DESA

Setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi warganya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sistem ini ibarat kompas moral yang menunjukkan arah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Ia juga sekaligus menjadi rambu-rambu yang membatasi perilaku agar tidak keluar dari rel yang disepakati bersama. Tanpa sistem nilai dan norma, kehidupan bersama akan kacau balau—setiap orang bertindak semaunya, konflik tak terelakkan, dan masyarakat akan hancur.

Di desa, nilai dan norma memiliki peran yang sangat sentral. Berbeda dengan kota yang lebih mengandalkan aturan formal dan aparat penegak hukum, desa masih sangat mengandalkan kontrol sosial informal yang bersumber dari nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Sanksi sosial—seperti teguran, gunjingan, dikucilkan, atau dipermalukan di depan umum—seringkali lebih efektif daripada sanksi hukum formal dalam menjaga ketertiban. Seorang warga mungkin tidak takut pada polisi, tetapi ia sangat takut pada gunjingan tetangga atau teguran dari tokoh masyarakat yang dituakan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam peran nilai dan norma dalam kehidupan desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep nilai dan norma secara teoretis, kemudian menelusuri nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi di desa, seperti kejujuran, kerendahan hati, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Selanjutnya, kita akan membahas norma-norma yang mengatur kehidupan—norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum—serta bagaimana norma adat masih memegang peranan penting. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis fungsi kontrol sosial dari nilai dan norma, serta dampak ketika nilai dan norma mulai luntur: disorganisasi sosial dan potensi konflik.

B. KONSEP DASAR: MEMAHAMI NILAI DAN NORMA

1. Pengertian Nilai Sosial

Nilai sosial adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang indah dan apa yang tidak indah. Nilai adalah standar etis dan estetis yang menjadi rujukan dalam menilai perilaku, objek, atau situasi.

Beberapa definisi nilai dari para ahli:

Clyde Kluckhohn, antropolog Amerika, mendefinisikan nilai sebagai konsepsi—eksplisit atau implisit, khas bagi individu atau karakteristik bagi kelompok—mengenai apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara, dan tujuan akhir tindakan.

Kimball Young mendefinisikan nilai sebagai asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting.

Soerjono Soekanto mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diidentifikasi ciri-ciri nilai sosial:

Pertama, **abstrak**. Nilai tidak dapat dilihat, diraba, atau difoto. Ia hanya dapat dipahami dari manifestasinya dalam perilaku, bahasa, simbol, atau institusi. Kita tidak bisa melihat "kejujuran", tetapi kita bisa melihat orang yang berperilaku jujur.

Kedua, **bersifat ideal**. Nilai adalah sesuatu yang dicita-citakan, yang dianggap seharusnya, bukan yang senyatanya. Ada jarak antara "das Sollen" (yang seharusnya) dan "das Sein" (yang senyatanya). Nilai kejujuran adalah ideal, meskipun dalam kenyataan banyak orang yang tidak jujur.

Ketiga, **mempengaruhi perilaku**. Meskipun abstrak, nilai mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Nilai menjadi motivasi dan pembenaran bagi tindakan. Orang berbuat baik karena nilai kebaikan telah terinternalisasi dalam dirinya.

Keempat, **relatif permanen**. Nilai cenderung bertahan lama, diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bukan berarti tidak dapat berubah. Nilai dapat bergeser seiring perubahan zaman, meskipun biasanya lebih lambat daripada perubahan perilaku.

Kelima, **terinternalisasi**. Nilai dihayati oleh individu sebagai bagian dari kepribadiannya, sehingga perilaku sesuai nilai terasa "wajar" dan tidak dipaksakan dari luar. Orang jujur tidak merasa sedang "melakukan kebaikan", ia hanya menjadi dirinya sendiri.

2. Pengertian Norma Sosial

Norma sosial adalah aturan-aturan konkret yang menjadi pedoman perilaku dalam situasi tertentu. Jika nilai bersifat abstrak dan ideal, norma bersifat lebih konkret dan operasional. Norma adalah nilai yang sudah "dibumikan" menjadi aturan main.

Beberapa definisi norma dari para ahli:

Robert Merton mendefinisikan norma sebagai pola-pola perilaku yang diharapkan dalam situasi sosial tertentu.

Soerjono Soekanto mendefinisikan norma sebagai pedoman perilaku yang berisi perintah, larangan, atau ajakan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu.

Paul B. Horton dan **Chester L. Hunt** mendefinisikan norma sebagai petunjuk tentang bagaimana kita harus bertindak dalam situasi tertentu.

Ciri-ciri norma sosial:

Pertama, **lebih konkret daripada nilai**. Norma dapat dirumuskan secara eksplisit, meskipun tidak selalu tertulis. "Hormatilah orang tuamu" adalah norma yang konkret, meskipun tidak selalu tertulis di mana-mana.

Kedua, **mengatur perilaku spesifik**. Norma memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu—bagaimana cara makan, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana berpakaian saat ke masjid.

Ketiga, **memiliki sanksi**. Pelanggaran norma akan mendapat sanksi, mulai dari yang ringan (celaan, sindiran) hingga berat (denda, pengucilan, hukuman fisik). Sanksi ini adalah konsekuensi dari tidak dipatuhinya aturan.

Keempat, **bertingkat-tingkat**. Ada norma yang sangat kuat (misalnya larangan membunuh) yang pelanggarannya mendapat sanksi berat, ada norma yang lemah (misalnya cara berpakaian dalam situasi santai) yang sanksinya ringan.

Kelima, **dapat berubah lebih cepat daripada nilai**. Norma lebih mudah berubah karena lebih terkait dengan konteks situasional. Nilai kejujuran mungkin tetap, tetapi norma tentang bagaimana menunjukkan kejujuran bisa berubah.

3. Hubungan Antara Nilai dan Norma

Nilai dan norma memiliki hubungan yang erat. Nilai adalah sumber atau landasan bagi norma. Norma adalah perwujudan nilai dalam bentuk aturan yang lebih konkret. Nilai keadilan, misalnya, melahirkan norma "setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum". Nilai kesopanan melahirkan norma "gunakan bahasa yang halus saat berbicara dengan orang yang lebih tua".

Namun, tidak semua norma secara langsung berasal dari nilai. Ada norma yang lahir dari kebiasaan, kesepakatan praktis, atau bahkan dari kepentingan kelompok tertentu. Namun, agar norma efektif dan diterima masyarakat, ia idealnya bersumber dari nilai-nilai yang dianut bersama.

Hubungan nilai dan norma dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- **Nilai**: Kejujuran adalah baik.
- **Norma**: Jangan berbohong; kembalikan uang yang bukan hakmu; katakan apa adanya.
- **Sanksi**: Jika melanggar, akan dicap pembohong, tidak dipercaya orang, dikucilkan.

- **Nilai**: Hormat kepada orang tua adalah terpuji.
- **Norma**: Gunakan bahasa halus saat berbicara dengan orang tua; dahulukan orang tua saat makan; minta izin jika akan pergi.
- **Sanksi**: Jika melanggar, dianggap anak durhaka, ditegur, dicela.
- **Nilai**: Gotong royong adalah luhur.
- **Norma**: Ikut kerja bakti; bantu tetangga yang punya hajat; sumbang jika ada warga tertimpa musibah.
- **Sanksi**: Jika tidak ikut, dianggap tidak peduli, jarang diajak bicara, tidak dibantu ketika butuh.

4. Klasifikasi Norma Sosial

Norma sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dan kekuatan mengikatnya. Dalam sosiologi, dikenal beberapa tingkatan norma:

a. Cara (usage). Norma ini mengatur perilaku sehari-hari yang bersifat pribadi. Sanksi pelanggaran sangat ringan—sekadar celaan atau ejekan. Contoh: cara makan, cara berpakaian di rumah, cara duduk. Di desa, norma ini mungkin tidak terlalu ketat, tetapi tetap ada. Anak yang makan sambil berdiri mungkin ditegur orang tuanya.

b. Kebiasaan (folkways). Norma yang mengatur perilaku yang diterima secara umum dalam masyarakat. Pelanggaran mendapat sanksi berupa celaan, teguran, atau dikucilkan. Contoh: kebiasaan memberi salam, kebiasaan mengucapkan terima kasih, kebiasaan menjenguk orang sakit. Di desa, norma ini sangat penting. Warga yang tidak pernah menjenguk tetangga sakit akan dianggap sombong dan tidak peduli.

c. Tata kelakuan (mores). Norma yang dianggap lebih penting karena terkait dengan nilai-nilai moral dasar masyarakat. Pelanggaran mendapat sanksi berat. Contoh: larangan mencuri, larangan berzina, larangan membunuh. Di desa, pelanggaran mores bisa berakibat dikucilkan, diusir, atau dikenai sanksi adat.

d. Adat istiadat (customs). Norma yang telah mengkristal dan diwariskan secara turun-temurun. Ia sangat kuat mengikat dan pelanggarannya mendapat sanksi adat. Contoh: aturan perkawinan adat, upacara adat, hukum adat tentang warisan. Di desa, adat istiadat masih sangat kuat, terutama di luar Jawa.

e. Hukum (laws). Norma tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi formal yang tegas. Di desa, hukum bisa berupa peraturan desa (perdes) atau hukum nasional yang berlaku. Meskipun formal, efektivitas hukum sangat tergantung pada kesesuaiannya dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat.

C. NILAI-NILAI UTAMA DALAM MASYARAKAT DESA

Masyarakat desa memiliki seperangkat nilai utama yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun, diajarkan dalam keluarga, diperkuat dalam interaksi sehari-hari, dan dirayakan dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan.

1. Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah nilai universal yang dijunjung tinggi di hampir semua masyarakat, termasuk masyarakat desa. Di desa, kejujuran memiliki makna yang sangat mendalam karena kehidupan yang komunal membuat setiap orang saling mengenal dan mengawasi. Orang yang tidak jujur akan mudah diketahui dan mendapat cap buruk yang sulit dihapus.

Makna kejujuran di desa:

- **Jujur dalam perkataan**: Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak mengadu domba. Berbicara apa adanya, sesuai fakta. Jika berjanji, harus ditepati.
- **Jujur dalam perbuatan**: Tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi. Dalam transaksi jual beli, timbangan harus pas, kualitas barang harus sesuai yang dijanjikan.
- **Jujur dalam hati**: Ikhlas, tidak dengki, tidak iri hati. Meskipun ini lebih sulit diukur, masyarakat desa biasanya "tahu" siapa yang tulus dan siapa yang munafik.

Peran kejujuran dalam kehidupan desa:

Kejujuran adalah fondasi kepercayaan (trust). Di desa, banyak transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan. Petani meminjam uang ke tengkulak dengan janji lisan. Tetangga menitipkan anak atau barang tanpa surat perjanjian. Gotong royong berjalan karena setiap orang percaya bahwa suatu saat mereka akan dibantu balik.

Jika kejujuran rusak, kepercayaan runtuh. Orang tidak mau lagi berbisnis dengan pembohong. Tetangga tidak mau menitipkan apa-apa kepada yang pernah mencuri. Gotong royong macet karena orang takut ditipu. Itulah mengapa sanksi sosial terhadap ketidakjujuran sangat berat di desa.

Sanksi sosial bagi ketidakjujuran:

Orang yang terbukti berbohong atau mencuri akan mendapat cap negatif. Ia mungkin dijauhi, tidak diajak bicara, tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial. Anak-anaknya mungkin ikut terkena dampak—diolok-olok teman, tidak diajak main. Bahkan dalam kasus berat, pelaku bisa dikucilkan (diasingkan secara sosial) atau diusir dari desa. Sanksi informal ini seringkali lebih menakutkan daripada hukuman penjara.

2. Nilai Kerendahan Hati (Andap Asor)

Kerendahan hati adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi, terutama dalam budaya Jawa dan banyak budaya lain di Indonesia. Di desa, orang yang rendah hati dihormati, sementara orang yang sombong dijauhi.

Makna kerendahan hati di desa:

- **Tidak sombong**: Tidak memamerkan kekayaan, kepintaran, atau kedudukan. Orang kaya hidup sederhana seperti tetangganya. Pejabat desa tetap bergaul dengan warga biasa. Orang pintar tidak merasa paling benar.
- **Hormat kepada semua orang**: Menghormati semua orang, terlepas dari status sosialnya. Menyapa tetangga, tersenyum, menggunakan bahasa yang sopan.
- **Bersedia belajar dan menerima kritik**: Tidak merasa paling tahu, terbuka terhadap masukan dan kritik. Mau bertanya kepada yang lebih tahu, meskipun lebih muda atau lebih rendah statusnya.

- **Tidak suka menonjolkan diri**: Lebih suka diam dan bekerja daripada bicara dan pamer. Prestasi dibiarkan orang lain yang menilai.

Peran kerendahan hati dalam kehidupan desa:

Kerendahan hati menjaga harmoni sosial. Orang yang rendah hati tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Tetangga tidak iri karena ia tidak pamer kekayaan. Warga biasa tidak tersinggung karena pejabat desa tetap ramah dan mau mendengar. Kritik dan saran dapat disampaikan tanpa takut membuat yang dikritik marah.

Kerendahan hati juga memudahkan kerjasama. Dalam gotong royong, semua bekerja setara, tidak ada yang merasa lebih tinggi sehingga enggan melakukan pekerjaan kasar. Dalam musyawarah, pendapat didengar tanpa memandang status. Keputusan diambil bersama, bukan dipaksakan oleh yang merasa paling pintar.

Sanksi bagi kesombongan:

Orang sombong akan dijauhi. Tetangga enggan bergaul, enggan membantu. Dalam rapat desa, pendapatnya tidak didengar. Ia mungkin sukses secara materi, tetapi miskin secara sosial. Anak-anaknya mungkin juga dijauhi teman-temannya. Ini adalah sanksi yang sangat efektif di desa.

3. Nilai Hormat kepada Orang Tua dan Sesepuh

Nilai hormat kepada orang tua dan sesepuh adalah nilai universal di semua desa Indonesia. Usia dan pengalaman dihormati, nasihat orang tua didengar, dan keputusan sesepuh diikuti.

Makna hormat kepada orang tua dan sesepuh:

- **Menggunakan bahasa yang sopan**: Dalam banyak budaya daerah, ada tingkatan bahasa yang berbeda untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Di Jawa, misalnya, menggunakan bahasa krama (halus) kepada orang tua.
- **Tidak membantah**: Meskipun mungkin tidak setuju, anak-anak tidak boleh membantah orang tua secara kasar. Pendapat disampaikan dengan cara yang halus dan penuh hormat.
- **Mendahulukan orang tua**: Saat makan, orang tua didahulukan. Saat berjalan, orang tua dipersilakan di depan. Saat duduk, orang tua diberi tempat yang lebih baik.
- **Mendengarkan nasihat**: Orang tua dan sesepuh dianggap memiliki banyak pengalaman dan kearifan. Nasihat mereka didengar dan dipertimbangkan.
- **Meminta restu**: Dalam setiap keputusan penting—menikah, merantau, membangun rumah—anak-anak biasanya meminta restu orang tua.

Peran hormat kepada orang tua dalam kehidupan desa:

Nilai ini menjaga kesinambungan dan stabilitas. Orang tua menjadi penjaga nilai-nilai tradisional, meneruskannya kepada generasi muda. Mereka juga menjadi mediator dalam konflik, karena kata-kata mereka didengar semua pihak. Dalam musyawarah desa, suara sesepuh sangat berpengaruh. Keputusan yang tidak mendapat restu sesepuh sulit dilaksanakan.

Nilai ini juga menciptakan rasa aman. Orang tua tahu bahwa mereka akan dihormati dan dirawat oleh anak-anaknya. Anak-anak tahu bahwa mereka memiliki tempat untuk bertanya dan meminta nasihat. Ikatan antar generasi ini memperkuat kohesi sosial.

Pergeseran nilai hormat:

Di era modern, nilai hormat kepada orang tua mulai bergeser. Generasi muda lebih kritis, lebih berani menyampaikan pendapat, dan kadang menganggap nasihat orang tua ketinggalan zaman. Bahasa sopan mulai ditinggalkan. Ini kadang menimbulkan ketegangan antar generasi. Namun, inti nilai ini—bahwa orang tua harus dihormati—masih bertahan, meskipun bentuknya mungkin berubah.

4. Nilai Gotong Royong dan Kebersamaan

Gotong royong adalah nilai paling ikonik dari masyarakat desa. Ia adalah semangat bekerja bersama-sama untuk kepentingan umum, tanpa mengharapkan imbalan langsung, didasari oleh rasa kebersamaan dan kesadaran bahwa kepentingan bersama adalah kepentingan semua.

Makna gotong royong di desa:

- **Kerja bakti**: Bekerja bersama membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, membangun fasilitas umum. Semua warga turun tangan, tanpa dibayar.
- **Sambatan**: Gotong royong membangun rumah warga. Tetangga dan kerabat datang membantu, tuan rumah cukup menyediakan makanan.
- **Liliuran**: Gotong royong di sawah. Petani saling membantu saat tanam atau panen, bergiliran dari satu sawah ke sawah lain.
- **Sinoman**: Gotong royong dalam acara-acara sosial (pernikahan, khitanan, kematian). Warga membantu menyiapkan konsumsi, mendirikan tenda, melayani tamu.
- **Jimpitan**: Iuran sukarela dari warga (biasanya beras atau uang) untuk keperluan sosial, seperti ronda malam atau bantuan bagi warga tertimpa musibah.

Peran gotong royong dalam kehidupan desa:

Gotong royong memperkuat ikatan sosial. Dalam bekerja bersama, sekat-sekat sosial melebur. Kaya-miskin, tua-muda, laki-laki-perempuan, semua bekerja setara. Rasa kebersamaan tumbuh, solidaritas menguat.

Gotong royong juga menjadi mekanisme pemenuhan kebutuhan yang efisien. Dengan gotong royong, pekerjaan besar dapat diselesaikan cepat dan murah. Warga yang tidak mampu membayar tenaga kerja tetap bisa membangun rumah atau mengolah sawah karena dibantu tetangga.

Gotong royong juga menjadi sistem jaminan sosial. Ketika ada warga tertimpa musibah, masyarakat akan bergotong royong membantu—tenaga, materi, dan dukungan moral. Tidak ada yang merasa sendirian menghadapi masalah.

5. Nilai Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus dibicarakan bersama, dan keputusan diambil berdasarkan mufakat (kesepakatan bersama), bukan suara terbanyak.

Makna musyawarah di desa:

- **Setiap orang berhak didengar**: Dalam musyawarah, semua warga, tanpa memandang status, berhak menyampaikan pendapat. Pendapat yang paling kecil sekalipun harus dihargai.
- **Mencari titik temu**: Tujuannya bukan untuk menang-kalah, tetapi untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Prosesnya bisa panjang, dengan saling memberi dan menerima.
- **Mengutamakan kepentingan bersama**: Musyawarah bukan ajang memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi mencari yang terbaik untuk semua.
- **Menghormati kearifan lokal**: Dalam musyawarah, nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal menjadi rujukan penting, tidak hanya logika formal.

Peran musyawarah dalam kehidupan desa:

Musyawarah menjaga harmoni dan mencegah konflik. Dengan membicarakan masalah bersama, potensi kesalahpahaman dapat dihindari. Semua pihak merasa dilibatkan, sehingga keputusan yang diambil diterima dengan lapang dada, meskipun mungkin tidak sesuai persis dengan keinginan masing-masing.

Musyawarah juga menjadi wahana pembelajaran demokrasi. Warga belajar untuk menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan orang lain, menghargai perbedaan, dan mencapai kesepakatan bersama. Keterampilan ini penting tidak hanya untuk kehidupan desa, tetapi juga untuk partisipasi dalam demokrasi di tingkat yang lebih luas.

6. Nilai Religiusitas dan Spiritualitas

Masyarakat desa umumnya sangat religius. Agama dan kepercayaan menjadi sumber nilai, pedoman hidup, dan perekat sosial. Nilai-nilai agama—kejujuran, keadilan, kasih sayang, tolong-menolong—memperkuat nilai-nilai sosial yang sudah ada.

Manifestasi religiusitas di desa:

- **Tempat ibadah sebagai pusat kegiatan**: Masjid, gereja, pura, vihara tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan silaturahmi.
- **Ritual keagamaan bersama**: Pengajian, yasinan, kebaktian, sembahyang bersama—semua memperkuat ikatan komunitas.
- **Nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari**: Ajaran agama menjadi rujukan dalam berperilaku—jujur, tidak mencuri, tidak berzina, menyantuni fakir miskin.
- **Tokoh agama sebagai panutan**: Ulama, kyai, pendeta, pastur, pemangku—mereka tidak hanya mengurus urusan agama, tetapi juga menjadi rujukan moral dan sosial.

Peran religiusitas dalam kehidupan desa:

Religiusitas memberi makna dan tujuan hidup. Manusia tidak hanya hidup untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ini mendorong perilaku baik dan menghindari perilaku jahat, karena ada sanksi tidak hanya di dunia (hukum, sanksi sosial) tetapi juga di akhirat.

Religiusitas juga memperkuat solidaritas. Ritual bersama menciptakan perasaan kebersamaan dan ikatan batin. Perayaan hari besar agama menjadi ajang silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Bantuan sosial sering diorganisir melalui tempat ibadah.

Religiusitas juga menjadi benteng moral. Di tengah arus modernisasi yang membawa nilai-nilai baru, agama menjadi filter yang menyaring mana yang boleh diadopsi dan mana yang harus ditolak. Nilai-nilai agama yang kuat menjaga masyarakat dari perilaku menyimpang.

D. NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN DESA

Nilai-nilai yang abstrak diwujudkan dalam norma-norma konkret yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Di desa, norma-norma ini sangat beragam, mencakup hampir semua situasi sosial.

1. Norma Agama

Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama. Karena masyarakat desa umumnya religius, norma agama memiliki pengaruh yang sangat kuat.

Contoh norma agama di desa:

- **Kewajiban ibadah**: Sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu (Islam); kebaktian, persembahyangan (Kristen, Hindu, Buddha). Masyarakat desa umumnya sangat taat menjalankan ibadah.
- **Larangan agama**: Mencuri, berzina, minum minuman keras, berjudi (Islam); larangan serupa dengan penekanan berbeda dalam agama lain. Pelanggaran mendapat sanksi sosial yang berat.
- **Norma pergaulan**: Dalam Islam, ada aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (batasan aurat, tidak berduaan). Di desa, aturan ini cukup ketat, terutama di kalangan santri.
- **Norma makanan**: Halal-haram dalam Islam; pantangan tertentu dalam agama Hindu atau Buddha. Di desa, norma ini dipatuhi dengan ketat.

Penegakan norma agama:

Norma agama ditegakkan melalui berbagai mekanisme. Tokoh agama (kyai, ustadz, pendeta) secara rutin mengingatkan dalam ceramah dan pengajian. Orang tua mengajarkan dan mengawasi anak-anaknya. Masyarakat saling mengingatkan jika ada yang melanggar. Sanksi sosial bagi pelanggar berat bisa sangat keras: dicap "durhaka", dikucilkan, bahkan dalam kasus ekstrem diusir dari desa.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang baik dan buruk. Norma ini bersifat universal, meskipun interpretasinya bisa berbeda antar budaya.

Contoh norma kesusilaan di desa:

- **Jujur**: Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Norma ini sangat kuat di desa.
- **Adil**: Tidak pilih kasih, memberikan hak kepada yang berhak. Dalam pembagian warisan, misalnya, diharapkan dilakukan secara adil.

- **Kasih sayang**: Menyayangi keluarga, tetangga, dan sesama. Membantu yang lemah, menyantuni yatim piatu, menjenguk orang sakit.
- **Berani membela kebenaran**: Tidak diam melihat ketidakadilan, berani mengatakan yang benar meskipun pahit.

Penegakan norma kesusilaan:

Norma kesusilaan ditegakkan terutama melalui internalisasi. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan merasa bersalah, menyesal, dan malu. Sanksi dari luar berupa celaan, gunjingan, atau dikucilkan. Di desa, rasa malu adalah sanksi yang sangat efektif.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan tentang perilaku yang dianggap sopan dan tidak sopan dalam pergaulan sehari-hari. Norma ini sangat terkait dengan budaya lokal.

Contoh norma kesopanan di desa:

- **Cara berbicara**: Menggunakan bahasa yang sopan (krama) kepada orang yang lebih tua atau lebih dihormati. Tidak boleh berkata kasar, membentak, atau meninggikan suara tanpa alasan.
- **Cara berpakaian**: Berpakaian sopan, tidak terlalu terbuka, terutama saat ke tempat ibadah atau acara formal. Di desa, norma ini cukup ketat, terutama bagi perempuan.
- **Cara berperilaku**: Tidak boleh duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua; tidak boleh menyela pembicaraan orang yang lebih tua; harus memberi salam saat bertamu.
- **Cara makan**: Tidak boleh makan sambil berdiri atau berjalan; mendahulukan orang tua; menggunakan tangan kanan.

Penegakan norma kesopanan:

Norma kesopanan ditegakkan melalui teguran langsung dan tidak langsung. Anak yang tidak sopan akan ditegur orang tuanya. Remaja yang berpakaian tidak sopan akan "dikomentari" tetangga. Dalam kasus berat, bisa jadi bahan gunjingan di warung-warung kopi.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi formal. Di desa, norma hukum bisa berupa hukum nasional maupun peraturan desa (perdes).

Contoh norma hukum di desa:

- **Peraturan desa**: Aturan tentang iuran keamanan, tata ruang desa, pengelolaan pasar desa, atau larangan tertentu (misalnya larangan membuang sampah sembarangan).
- **Hukum nasional**: KUHP, UU Desa, UU Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Penegakan norma hukum:

Penegakan norma hukum di desa seringkali tidak seefektif di kota. Keterbatasan aparat, jarak, dan biaya membuat banyak pelanggaran tidak diproses secara formal. Masyarakat lebih mengandalkan norma

informal. Namun, untuk kasus-kasus berat (pembunuhan, perkosaan, korupsi dana desa), hukum formal biasanya diterapkan.

5. Norma Adat

Norma adat adalah aturan yang bersumber dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Di banyak desa, terutama di luar Jawa, norma adat masih sangat kuat dan efektif.

Contoh norma adat di desa:

- **Aturan perkawinan**: Siapa yang boleh menikah dengan siapa, bagaimana prosesi lamaran dan pernikahan, berapa mas kawin. Di beberapa daerah, ada larangan menikah dalam satu klan atau satu kasta.
- **Aturan warisan**: Bagaimana harta warisan dibagi, apakah mengikuti garis ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal), atau sistem parental (keduanya).
- **Aturan kepemilikan tanah**: Siapa yang berhak atas tanah ulayat, bagaimana tanah diwariskan, bagaimana hak guna tanah.
- **Aturan penyelesaian sengketa**: Bagaimana menyelesaikan konflik antar warga, antar keluarga, atau antar klan. Biasanya melalui mediasi oleh tokoh adat dan jika terbukti bersalah dikenai denda adat.

Penegakan norma adat:

Norma adat ditegakkan oleh lembaga adat—kepala adat, dewan adat, tetua adat. Mereka memiliki otoritas untuk memutuskan perkara dan menjatuhkan sanksi. Sanksi adat bisa berupa denda (babi, kerbau, emas), pengucilan, atau bahkan pengusiran dari komunitas. Sanksi ini sangat efektif karena keterikatan masyarakat dengan adat dan takut dikucilkan.

E. FUNGSI NILAI DAN NORMA SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Salah satu fungsi terpenting nilai dan norma adalah sebagai kontrol sosial—mekanisme untuk menjaga agar perilaku warga sesuai dengan aturan yang berlaku. Di desa, kontrol sosial berjalan sangat efektif meskipun tanpa aparat formal yang banyak.

1. Pengertian Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah proses yang dilakukan untuk mengendalikan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya adalah mencapai ketertiban sosial (social order)—keadaan di mana masyarakat teratur, stabil, dan dapat memprediksi perilaku orang lain.

Kontrol sosial dapat bersifat:

- **Preventif**: Mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya, melalui sosialisasi nilai dan norma sejak dini, melalui ceramah agama, atau melalui pengawasan lingkungan.
- **Represif**: Menindak pelanggaran yang telah terjadi. Misalnya, melalui teguran, sanksi sosial, atau hukuman.

2. Bentuk-Bentuk Kontrol Sosial di Desa

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma kepada individu sejak kecil. Di desa, sosialisasi dilakukan terutama oleh keluarga, tetapi juga oleh tetangga, guru mengaji, dan tokoh masyarakat. Anak-anak belajar tentang apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh, sejak dini. Nilai dan norma diinternalisasi sehingga menjadi bagian dari kepribadian.

b. Tekanan Sosial

Tekanan sosial adalah pengaruh tidak langsung dari lingkungan sosial yang mendorong individu untuk menyesuaikan diri. Misalnya, perasaan malu jika tidak ikut kerja bakti, atau takut menjadi bahan gunjingan jika berperilaku menyimpang. Tekanan sosial ini sangat efektif di desa karena setiap orang saling mengenal dan mengawasi.

c. Teguran dan Nasihat

Teguran langsung dari orang tua, tetangga, atau tokoh masyarakat adalah bentuk kontrol sosial yang umum. Jika ada anak muda yang berperilaku tidak sopan, orang tua atau tetangga akan menegur. Jika ada warga yang melanggar norma, tokoh masyarakat akan memanggil dan menasihati.

d. Gunjingan (Gosip)

Gunjingan atau gosip adalah bentuk kontrol sosial yang sangat efektif di desa. Orang yang melanggar norma akan menjadi bahan pembicaraan di warung kopi, di pengajian, di pertemuan arisan. Rasa malu karena digunjingkan seringkali lebih efektif daripada hukuman formal.

e. Pengucilan (Ostracism)

Dalam kasus pelanggaran berat, masyarakat dapat menjatuhkan sanksi pengucilan. Pelaku tidak diajak bicara, tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial, tidak dibantu jika membutuhkan. Pengucilan ini sangat menakutkan bagi warga desa karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.

f. Sanksi Adat

Untuk pelanggaran adat, sanksi bisa berupa denda (membayar dengan benda adat seperti kerbau, babi, emas), dikenai upacara pembersihan, atau dalam kasus ekstrem, dikeluarkan dari komunitas adat.

3. Efektivitas Kontrol Sosial di Desa

Kontrol sosial di desa sangat efektif karena beberapa faktor:

Pertama, **kehidupan yang komunal**. Semua orang saling mengenal, saling mengawasi, dan saling tergantung. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap perilaku menyimpang akan segera diketahui dan menjadi perhatian.

Kedua, **ikatan emosional yang kuat**. Hubungan antar warga tidak hanya fungsional, tetapi juga emosional. Teguran dari tetangga yang sudah seperti keluarga sendiri lebih menyentuh daripada teguran dari aparat formal.

Ketiga, **homogenitas nilai**. Masyarakat desa relatif homogen dalam nilai dan norma. Ada kesepakatan bersama tentang apa yang baik dan buruk. Ini membuat kontrol sosial lebih mudah karena semua orang memiliki standar yang sama.

Keempat, **sanksi yang efektif**. Sanksi sosial—rasa malu, gunjingan, pengucilan—seringkali lebih efektif daripada sanksi formal. Orang bisa saja tidak takut pada polisi atau penjara, tetapi ia sangat takut pada gunjingan tetangga.

F. DAMPAK LUNTURNYA NILAI DAN NORMA

Ketika nilai dan norma mulai luntur—tidak lagi dipegang teguh, tidak lagi ditaati, tidak lagi efektif mengontrol perilaku—maka akan terjadi disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah keadaan di mana lembaga-lembaga sosial tidak berfungsi dengan baik, nilai-nilai dan norma-norma melemah, dan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

1. Faktor-Faktor Penyebab Lunturnya Nilai dan Norma

a. Modernisasi dan Globalisasi

Arus modernisasi membawa nilai-nilai baru—individualisme, konsumerisme, hedonisme, kebebasan individu—yang kadang berbenturan dengan nilai-nilai tradisional. Generasi muda yang terpapar nilai-nilai ini mulai mempertanyakan dan meninggalkan norma-norma lama yang dianggap ketinggalan zaman.

b. Pengaruh Media dan Teknologi Informasi

Media sosial, televisi, dan internet membawa gaya hidup dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia. Tayangan yang menampilkan gaya hidup glamor, pergaulan bebas, dan konsumerisme mempengaruhi cara pandang dan perilaku, terutama generasi muda.

c. Urbanisasi dan Mobilitas

Urbanisasi menyebabkan banyak penduduk usia produktif meninggalkan desa. Akibatnya, terjadi kekosongan generasi. Nilai dan norma tidak terwariskan secara optimal karena generasi tua kehilangan "murid". Para perantau yang pulang kampung membawa nilai dan gaya hidup kota yang mungkin berbeda.

d. Pendidikan Formal

Pendidikan formal membuka wawasan, mengajarkan berpikir kritis, dan memperkenalkan nilai-nilai universal. Ini positif, tetapi kadang membuat generasi muda memandang rendah nilai-nilai tradisional yang dianggap tidak rasional atau tidak modern.

e. Melemahnya Institusi Lokal

Institusi-institusi yang selama ini menjadi penjaga nilai dan norma—keluarga besar, lembaga adat, kelompok keagamaan—mulai melemah. Keluarga inti menggantikan keluarga besar. Tokoh adat kehilangan pengaruh. Kelompok keagamaan kurang diminati generasi muda.

2. Gejala Disorganisasi Sosial

Ketika nilai dan norma mulai luntur, muncul gejala-gejala disorganisasi sosial:

a. Meningkatnya Perilaku Menyimpang

Kriminalitas, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan perilaku menyimpang lainnya meningkat. Kontrol sosial yang lemah membuat orang lebih berani melanggar aturan.

b. Konflik Sosial

Tanpa nilai dan norma yang menjadi perekat, konflik lebih mudah terjadi. Konflik antar tetangga, antar kelompok, antar generasi, atau antar pendatang dan penduduk asli. Penyelesaian konflik lebih sulit karena tidak ada rujukan bersama.

c. Individualisme dan Erosi Gotong Royong

Nilai gotong royong melemah, digantikan oleh individualisme. Orang lebih mengurus kepentingan sendiri, enggan terlibat dalam kegiatan bersama. Akibatnya, kegiatan kolektif seperti kerja bakti, ronda malam, atau sinoman macet.

d. Ketidakpercayaan (Distrust)

Orang mulai saling curiga. Transaksi tidak lagi didasarkan pada kepercayaan, tetapi pada kontrak formal yang rumit. Interaksi sosial menjadi kaku dan penuh perhitungan.

e. Anomie

Emile Durkheim menyebut anomie sebagai keadaan tanpa norma, di mana orang kehilangan pegangan tentang apa yang benar dan salah. Ini menimbulkan kebingungan, frustrasi, dan perilaku destruktif.

3. Dampak Konkret Lunturnya Nilai dan Norma di Desa

a. Melemahnya Gotong Royong

Di banyak desa, gotong royong mulai luntur. Kerja bakti hanya diikuti sedikit orang. Sambatan (gotong royong membangun rumah) sudah digantikan oleh kontraktor. Ronda malam sepi, digantikan oleh satpam bayaran.

b. Meningkatnya Konflik Antar Warga

Konflik kecil seperti sengketa batas tanah, rebutan air, atau masalah sampah mudah meletup karena tidak ada lagi nilai sabar, toleransi, dan musyawarah. Masyarakat lebih suka main hakim sendiri atau langsung melapor polisi.

c. Krisis Moral Remaja

Remaja desa mulai terjerumus dalam perilaku menyimpang: tawuran, minuman keras, narkoba, seks bebas. Nilai-nilai agama dan kesopanan yang diajarkan orang tua tidak lagi diindahkan.

d. Sikap Konsumtif dan Hedonisme

Gaya hidup konsumtif mulai menjangkiti desa. Remaja ingin memiliki ponsel mahal, motor keren, dan pakaian branded, meskipun tidak mampu. Gengsi menjadi ukuran status, bukan lagi kerendahan hati dan prestasi.

e. Sikap Apatis terhadap Kegiatan Desa

Warga enggan terlibat dalam kegiatan desa—rapat RT, musyawarah desa, kegiatan PKK, karang taruna. Mereka lebih memilih mengurus urusan pribadi atau menonton TV di rumah. Partisipasi sosial merosot.

4. Contoh Kasus: Lunturnya Nilai di Desa

Kasus 1: Desa X di Jawa Barat

Di Desa X, yang dulunya terkenal dengan kerukunan dan gotong royongnya, kini mulai menunjukkan gejala disorganisasi. Para pemuda lebih suka nongkrong di warung kopi sambil main game online daripada ikut kerja bakti. Ronda malam sepi, hanya diikuti beberapa orang tua. Akibatnya, angka pencurian meningkat. Warga mulai memasang kawat berduri dan kunci ganda di rumahnya.

Konflik antar tetangga juga semakin sering. Perebutan batas tanah, masalah parkir, atau suara bising jadi pemicu pertengkaran. Yang lebih parah, konflik antar kelompok pemuda dari dusun berbeda kadang berujung tawuran.

Kasus 2: Desa Y di Jawa Timur

Desa Y dulunya dikenal sebagai desa santri, dengan nilai agama yang kuat. Namun, masuknya internet dan media sosial mengubah banyak hal. Remaja lebih asyik dengan ponselnya daripada mengaji. Gaya berpakaian mulai berubah—remaja putri berpakaian lebih terbuka, meniru selebriti di TV. Pergaulan bebas mulai terlihat, dengan kasus hamil di luar nikah yang dulunya hampir tidak pernah terjadi.

Orang tua dan tokoh agama merasa cemas, tetapi merasa kewalahan menghadapi pengaruh media. Mereka sudah melarang, menasihati, tetapi pengaruh dari luar lebih kuat.

Kasus 3: Desa Z di Bali

Di Desa Z, nilai-nilai adat dan agama Hindu sangat kuat. Namun, pengembangan pariwisata membawa perubahan besar. Banyak pendatang masuk, membuka usaha, dan tinggal di desa. Interaksi dengan wisatawan asing yang berpakaian minim dan berperilaku bebas mulai mempengaruhi generasi muda. Upacara adat yang dulunya sakral, sekarang mulai "dijual" sebagai atraksi wisata. Generasi muda lebih tertarik bekerja di sektor pariwisata daripada mempelajari adat secara mendalam. Tokoh adat khawatir nilai-nilai luhur akan tergerus oleh komersialisasi.

G. STRATEGI MEMPERKUAT NILAI DAN NORMA DI DESA

Menghadapi ancaman lunturnya nilai dan norma, diperlukan upaya sadar dan sistematis untuk memperkuat kembali fondasi moral masyarakat desa.

1. Revitalisasi Peran Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam penanaman nilai. Keluarga perlu diperkuat perannya:

- **Pendidikan karakter di rumah**: Orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendidik anak, menanamkan nilai-nilai agama dan moral, serta memberi teladan.
- **Pengawasan terhadap anak**: Di era digital, pengawasan terhadap penggunaan gadget dan media sosial sangat penting.
- **Komunikasi antar generasi**: Membangun dialog antara orang tua dan anak agar nilai-nilai dapat ditransmisikan secara efektif, bukan dengan cara otoriter yang justru membuat anak memberontak.

2. Penguatan Kelembagaan Lokal

Lembaga-lembaga lokal yang menjadi penjaga nilai—lembaga adat, majelis taklim, kelompok keagamaan, karang taruna, PKK—perlu diperkuat:

- **Dukungan pemerintah desa**: Memberikan dukungan moral, fasilitasi, dan anggaran untuk kegiatan lembaga-lembaga tersebut.
- **Regenerasi kepemimpinan**: Memastikan ada kaderisasi agar lembaga tidak mati ketika tokohnya meninggal atau tua.
- **Revitalisasi program**: Mengemas kegiatan lembaga agar lebih menarik bagi generasi muda, tanpa kehilangan esensi.

3. Integrasi Nilai dalam Pendidikan Formal dan Non-Formal

Nilai-nilai luhur perlu diintegrasikan dalam pendidikan:

- **Muatan lokal di sekolah**: Mengajarkan budaya daerah, bahasa daerah, dan nilai-nilai lokal.
- **Pendidikan agama yang kontekstual**: Mengajarkan agama tidak hanya ritual, tetapi juga nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- **Kegiatan ekstrakurikuler**: Mengembangkan kegiatan yang menanamkan nilai—pramuka, kesenian tradisional, olahraga, keagamaan.

4. Pemanfaatan Teknologi untuk Promosi Nilai

Alih-alih menolak teknologi, lebih baik memanfaatkannya untuk promosi nilai:

- **Konten kreatif di media sosial**: Membuat konten yang menarik tentang nilai-nilai luhur, budaya lokal, dan tokoh panutan.
- **Film dan video pendek**: Memproduksi film pendek atau video yang mengangkat kearifan lokal dan nilai-nilai moral.
- **Platform digital untuk pembelajaran**: Mengembangkan aplikasi atau website yang berisi materi tentang nilai, norma, dan budaya lokal.

5. Keteladanan dari Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat—kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, guru—harus menjadi teladan. Nilai tidak hanya diajarkan, tetapi juga dicontohkan. Jika tokoh masyarakat berperilaku sesuai nilai, masyarakat akan mengikuti. Jika mereka sendiri melanggar, maka nilai akan kehilangan kredibilitas.

6. Penguatan Sanksi Sosial

Sanksi sosial perlu diperkuat, tanpa harus kembali ke cara-cara yang melanggar HAM. Masyarakat perlu berani menegur, mengingatkan, dan jika perlu, memberi sanksi bagi pelanggar norma. Rasa malu dan takut dikucilkan harus dihidupkan kembali sebagai mekanisme kontrol sosial.

7. Dialog Antar Generasi

Konflik nilai antara generasi tua dan muda sering terjadi karena kurangnya dialog. Perlu ada forum-forum pertemuan antar generasi untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari titik temu. Generasi tua perlu memahami perubahan zaman, generasi muda perlu menghargai kearifan lokal.

H. STUDI KASUS: UPAYA MEMPERKUAT NILAI DI BEBERAPA DESA

1. Desa Adat Tenganan, Bali

Desa Tenganan di Bali adalah contoh desa yang berhasil mempertahankan nilai dan norma adat di tengah arus pariwisata. Masyarakat Tenganan tetap menjalankan aturan adat dengan ketat. Wisatawan boleh datang, tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku—berpakaian sopan, tidak boleh mengganggu ritual, dan area tertentu tidak boleh dimasuki.

Kunci keberhasilan Tenganan adalah kelembagaan adat yang kuat. Ada awig-awig (aturan adat) yang mengatur semua aspek kehidupan, ada prajuru adat (pengurus adat) yang menjalankan aturan, dan ada sanksi yang jelas bagi pelanggar. Pariwisata dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai adat.

2. Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta

Desa Pentingsari mengembangkan pariwisata dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Gotong royong menjadi fondasi dalam mengelola homestay dan atraksi wisata. Semua warga terlibat, hasilnya dinikmati bersama. Nilai kesederhanaan dan keramahan dijaga, sehingga wisatawan merasa seperti di rumah sendiri.

Kunci keberhasilan Pentingsari adalah kepemimpinan tokoh masyarakat yang kuat (Pak Wiyono), pengorganisasian masyarakat yang baik melalui Pokdarwis, dan komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai lokal.

3. Kampung KB di Berbagai Daerah

Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang digalakkan BKKBN tidak hanya fokus pada pengendalian penduduk, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keluarga. Di berbagai desa, Kampung KB menjadi wadah untuk sosialisasi nilai-nilai: keagamaan, moral, gotong royong, dan kesetiakawanan

sosial. Kegiatannya meliputi pengajian, penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya.

I. RANGKUMAN

Nilai dan norma adalah fondasi kehidupan masyarakat desa. Nilai adalah konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, indah dan tidak indah. Norma adalah aturan konkret yang menjadi pedoman perilaku. Di desa, nilai-nilai utama seperti kejujuran, kerendahan hati, hormat kepada orang tua, gotong royong, musyawarah, dan religiusitas dijunjung tinggi. Norma-norma yang mengatur kehidupan meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan adat.

Fungsi utama nilai dan norma adalah sebagai kontrol sosial—mekanisme untuk menjaga agar perilaku warga sesuai aturan. Kontrol sosial di desa berjalan efektif melalui sosialisasi, tekanan sosial, teguran, gunjingan, pengucilan, dan sanksi adat. Kehidupan yang komunal, ikatan emosional yang kuat, homogenitas nilai, dan sanksi yang efektif membuat kontrol sosial di desa sangat ampuh.

Namun, nilai dan norma menghadapi tantangan serius dari modernisasi, globalisasi, media, urbanisasi, dan melemahnya institusi lokal. Lunturnya nilai dan norma menyebabkan disorganisasi sosial: meningkatnya perilaku menyimpang, konflik, individualisme, ketidakpercayaan, dan anomie. Di desa, gejala ini terlihat dalam melemahnya gotong royong, meningkatnya konflik, krisis moral remaja, sikap konsumtif, dan apatis terhadap kegiatan desa.

Menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya sadar untuk memperkuat nilai dan norma: revitalisasi peran keluarga, penguatan kelembagaan lokal, integrasi nilai dalam pendidikan, pemanfaatan teknologi, keteladanan tokoh masyarakat, penguatan sanksi sosial, dan dialog antar generasi. Contoh dari desa-desa yang berhasil mempertahankan nilai-nilai lokal menunjukkan bahwa upaya ini bisa berhasil jika dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pada akhirnya, nilai dan norma bukanlah belenggu yang menghambat kemajuan, tetapi justru fondasi yang kokoh untuk membangun desa yang maju, harmonis, dan berkelanjutan. Desa yang kuat nilai dan normanya akan memiliki ketahanan sosial yang tinggi, mampu menghadapi berbagai tantangan, dan tetap menjaga jati dirinya di tengah arus perubahan.

J. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Nilai-nilai apa saja yang paling dijunjung tinggi di desa Anda? Bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari?
2. Norma adat apa yang masih kuat di desa Anda? Apakah masih efektif dalam mengatur perilaku warga?
3. Bagaimana mekanisme kontrol sosial berjalan di desa Anda? Berikan contoh sanksi sosial yang pernah diterapkan!
4. Apakah Anda mengamati gejala lunturnya nilai dan norma di desa Anda? Gejala apa saja yang terlihat?

5. Faktor apa yang paling dominan menyebabkan lunturnya nilai dan norma di desa Anda? Jelaskan!
6. Bagaimana peran generasi muda dalam upaya pelestarian nilai dan norma di desa?
7. Menurut Anda, strategi apa yang paling efektif untuk memperkuat nilai dan norma di desa di tengah arus modernisasi?
8. Bagaimana sebaiknya masyarakat desa menyikapi pengaruh globalisasi dan teknologi informasi agar tidak merusak nilai-nilai lokal?

BAB VII

INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNITAS DESA

A. PENGANTAR: DARI INDIVIDU MENUJU MASYARAKAT

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, dan senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Dari hubungan-hubungan inilah lahir apa yang kita sebut masyarakat. Jika individu adalah batu bata, maka interaksi sosial adalah semen yang merekatkan batu bata itu menjadi sebuah bangunan yang kokoh bernama masyarakat. Tanpa interaksi, individu hanya kumpulan manusia yang tidak memiliki ikatan, tidak memiliki makna bersama, dan tidak memiliki kehidupan sosial.

Di desa, interaksi sosial memiliki warna yang khas. Berbeda dengan kota yang cenderung individualistis dan impersonal, interaksi di desa berlangsung secara intensif, personal, dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Setiap hari, warga desa bertemu, berbicara, bekerja sama, kadang bersaing, dan tak jarang berkonflik. Dari interaksi inilah terbangun jaringan makna, solidaritas, dan identitas bersama.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang interaksi sosial dalam komunitas desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep dasar interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya, dan bentuk-bentuknya. Selanjutnya, kita akan membahas tiga bentuk interaksi utama yang mewarnai kehidupan desa: kerja sama yang menjadi perekat sosial, persaingan yang mewarnai dinamika ekonomi dan politik, serta konflik yang tak terhindarkan namun harus dikelola. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis bagaimana ketiga bentuk interaksi ini berdinamika dalam keseharian masyarakat desa, serta bagaimana mengelola persaingan dan konflik agar tidak merusak tatanan sosial.

B. KONSEP DASAR INTERAKSI SOSIAL

1. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ia adalah proses di mana orang saling mempengaruhi dalam pikiran, perasaan, dan tindakan.

Beberapa definisi interaksi sosial dari para ahli:

Georg Simmel, sosiolog Jerman yang terkenal dengan studi tentang interaksi, memandang interaksi sosial sebagai inti dari sosiologi. Menurutnya, masyarakat terbentuk dari jaringan interaksi yang tak terhitung jumlahnya antara individu-individu.

Soerjono Soekanto mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

Gillin dan **Gillin** mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, dan antara individu dengan kelompok.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi sosial bukan sekadar "bertemu" atau "berbicara". Ia adalah proses saling mempengaruhi yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam interaksi, terjadi pertukaran makna, negosiasi kepentingan, dan pembentukan realitas bersama.

2. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi:

a. Kontak Sosial

Kontak sosial adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling bereaksi. Kontak dapat bersifat langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media). Di desa, kontak langsung sangat dominan karena warga tinggal berdekatan dan sering bertemu. Namun, di era digital, kontak tidak langsung melalui ponsel dan media sosial juga semakin penting.

Kontak sosial juga dapat bersifat primer (langsung bertemu) maupun sekunder (melalui perantara). Di desa, kontak primer masih utama, tetapi kontak sekunder melalui surat undangan, pengumuman di pengeras suara masjid, atau grup WhatsApp mulai umum.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mempengaruhi. Dalam komunikasi, terjadi interpretasi terhadap perilaku orang lain. Ketika seseorang tersenyum, orang lain mengartikan sebagai keramahan. Ketika seseorang diam, bisa diartikan sebagai tanda setuju, tidak setuju, atau sedang marah.

Di desa, komunikasi tidak hanya verbal, tetapi juga non-verbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bahkan diam memiliki makna. Orang desa umumnya pandai membaca makna di balik kata-kata dan perilaku. Mereka tahu kapan seseorang marah meskipun tidak berkata kasar, tahu kapan seseorang sungkan meskipun mengiyakan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Beberapa faktor mempengaruhi jalannya interaksi sosial:

a. Faktor Imitasi

Imitasi adalah meniru perilaku orang lain. Di desa, anak-anak meniru orang tuanya, remaja meniru tokoh idolanya, warga meniru tokoh masyarakatnya. Imitasi dapat mempercepat penyebaran nilai dan norma, tetapi juga dapat menyebarkan perilaku negatif.

b. Faktor Sugesti

Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Orang yang berwibawa, tokoh masyarakat, atau orang yang dihormati mudah memberikan sugesti. Nasihat kyai atau kepala desa mudah diikuti karena warga percaya pada mereka.

c. Faktor Identifikasi

Identifikasi adalah kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Remaja yang mengidolakan artis ingin menjadi seperti artis itu. Warga yang mengagumi tokoh sukses ingin seperti tokoh itu.

d. Faktor Simpati

Simpati adalah perasaan tertarik kepada orang lain. Di desa, simpati terlihat ketika warga menjenguk tetangga sakit, membantu yang kesusahan, atau ikut berduka. Simpati memperkuat ikatan sosial.

C. BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL

Para sosiolog membedakan interaksi sosial menjadi dua bentuk umum: asosiatif (mengarah pada kerjasama dan persatuan) dan disosiatif (mengarah pada perpecahan). Namun, dalam kehidupan nyata, kedua bentuk ini sering berkelindan.

1. Bentuk-Bentuk Interaksi Asosiatif

a. Kerja Sama (Cooperation)

Kerja sama adalah bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di desa, kerja sama adalah napas kehidupan. Gotong royong, sambatan, liliuran, dan sinoman adalah wujud nyata kerja sama.

b. Akomodasi (Acommodation)

Akomodasi adalah proses penyesuaian diri antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai keseimbangan. Di desa, akomodasi terjadi ketika dua keluarga yang bersengketa tanah berdamai melalui mediasi tokoh adat, atau ketika dua kelompok pemuda yang bertikai sepakat untuk rukun kembali.

c. Asimilasi (Assimilation)

Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru. Di desa transmigrasi, misalnya, terjadi asimilasi antara pendatang dari Jawa dan penduduk lokal. Makanan, bahasa, dan tradisi bercampur menjadi bentuk baru.

d. Akulturasi (Acculturation)

Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Di desa, akulturasi terlihat dalam arsitektur rumah yang memadukan gaya modern dengan ornamen tradisional, atau dalam kesenian yang memadukan alat musik tradisional dengan modern.

2. Bentuk-Bentuk Interaksi Disosiatif

a. Persaingan (Competition)

Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencapai tujuan yang sama tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Di desa, persaingan terjadi dalam berbagai bidang: ekonomi (bersaing mendapatkan pelanggan), sosial (bersaing mendapatkan pengaruh), politik (bersaing dalam pemilihan kepala desa).

b. Kontravensi (Contravention)

Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain, seperti perasaan tidak suka, kebencian, atau keraguan. Kontravensi bisa berupa hasutan, provokasi, atau menyebarkan isu. Di desa, kontravensi bisa terjadi ketika seseorang iri pada keberhasilan tetangga lalu menyebarkan fitnah.

c. Konflik (Conflict)

Konflik adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan. Konflik bisa bersifat terbuka (perkelahian, tawuran) maupun tertutup (saling memusuhi, tidak bertegur sapa).

D. KERJA SAMA: PEREKAT SOSIAL MASYARAKAT DESA

Kerja sama adalah bentuk interaksi yang paling dominan dan paling khas di desa. Ia menjadi perekat yang menyatukan warga dalam ikatan kebersamaan.

1. Bentuk-Bentuk Kerja Sama di Desa

a. Gotong Royong

Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang paling dikenal. Ia adalah semangat bekerja bersama-sama untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan langsung. Di desa, gotong royong terwujud dalam berbagai kegiatan:

- **Kerja bakti**: Membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, membangun fasilitas umum. Biasanya dilakukan rutin, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.
- **Ronda malam**: Berjaga keamanan secara bergilir. Warga laki-laki dewasa bergantian bertugas menjaga keamanan desa dari ancaman pencurian atau gangguan lainnya.
- **Jimpitan**: Iuran sukarela berupa beras atau uang yang dikumpulkan setiap malam untuk keperluan ronda atau kegiatan sosial lainnya.

b. Sambatan

Sambatan atau gugur gunung adalah gotong royong membangun rumah warga. Ketika seorang warga hendak membangun atau memperbaiki rumahnya, tetangga dan kerabat datang membantu tanpa dibayar. Tuan rumah cukup menyediakan makanan dan minuman. Setelah selesai, di kemudian hari, tuan rumah akan membantu balik ketika tetangganya yang dulu membantu memiliki hajat serupa.

Sambatan bukan hanya soal efisiensi tenaga, tetapi juga soal solidaritas. Dalam sambatan, ikatan sosial diperkuat. Orang saling mengenal lebih dekat, saling percaya, dan saling menghargai.

c. Liliuran

Liliuran atau gilir-giliran adalah gotong royong di sektor pertanian. Petani saling membantu saat musim tanam atau panen. Hari ini mereka membantu di sawah si A, besok di sawah si B, lusa di sawah si C, dan seterusnya hingga semua sawah selesai.

Liliuran sangat efisien karena pekerjaan yang berat dapat diselesaikan bersama. Ia juga memperkuat ikatan antar petani, menciptakan rasa kebersamaan dan saling ketergantungan.

d. Sinoman

Sinoman adalah gotong royong dalam acara-acara sosial seperti pernikahan, khitanan, atau kematian. Warga datang membantu: menyiapkan konsumsi, mendirikan tenda, mengatur tempat duduk, melayani tamu, dan berbagai tugas lainnya. Tidak ada yang memerintah, semua bergerak atas kesadaran sendiri.

Dalam acara kematian, sinoman terlihat sangat kuat. Begitu kabar duka menyebar, warga berbondong-bondong datang ke rumah duka. Kaum laki-laki membantu menggali kubur, mendirikan tenda, mengatur lalu lintas. Kaum perempuan membantu di dapur, menyiapkan konsumsi untuk takziah, menemani keluarga yang berduka.

e. Kelompok Arisan

Arisan adalah bentuk kerja sama di bidang simpan pinjam. Anggota arisan mengumpulkan uang secara rutin, lalu undian menentukan siapa yang mendapat giliran menerima uang terkumpul. Arisan bisa berbasis RT, basis profesi (arisan petani, arisan pedagang), atau basis sosial (arisan PKK, arisan pengajian).

Arisan tidak hanya fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial. Ia menjadi ajang pertemuan rutin, silaturahmi, dan berbagi kabar. Di beberapa desa, arisan juga menjadi wadah untuk kegiatan sosial lainnya.

2. Fungsi Kerja Sama bagi Masyarakat Desa

Kerja sama memiliki beragam fungsi vital bagi kehidupan desa:

Pertama, **memperkuat solidaritas**. Dalam bekerja bersama, ikatan antar warga menguat. Mereka saling mengenal lebih dekat, saling percaya, dan saling menghargai. Solidaritas mekanik—ikatan berdasarkan kesamaan—semakin kokoh.

Kedua, **membangun rasa memiliki**. Ketika warga bergotong royong membangun jalan atau jembatan desa, mereka merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Rasa memiliki ini mendorong mereka untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun bersama.

Ketiga, **menghemat biaya**. Kerja sama memobilisasi tenaga kerja sukarela sehingga biaya pembangunan dapat ditekan. Proyek yang jika dikerjakan kontraktor bisa mahal, dengan gotong royong dapat lebih murah.

Keempat, **mempercepat penyelesaian pekerjaan**. Dengan melibatkan banyak tenaga kerja secara serentak, pekerjaan yang berat dan besar dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

Kelima, **menjaga kesehatan mental**. Kerja sama menciptakan jejaring dukungan sosial yang kuat. Ketika seseorang tertimpa musibah, ia tahu ada komunitas yang akan membantunya. Rasa aman secara psikologis ini penting bagi kesehatan mental.

Keenam, **menjadi sarana pendidikan nilai**. Melalui kerja sama, nilai-nilai seperti kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial diwariskan secara alami dari generasi tua ke generasi muda.

3. Tantangan Kerja Sama di Era Modern

Meskipun masih kuat, kerja sama menghadapi tantangan serius:

Individualisme. Modernisasi membawa nilai-nilai individualisme yang menekankan kebebasan pribadi. Akibatnya, sebagian warga, terutama generasi muda, mulai enggan terlibat dalam kegiatan kerja sama yang dianggap menyita waktu.

Kesibukan ekonomi. Semakin banyak warga desa yang bekerja di luar sektor pertanian dengan jam kerja tetap. Mereka sulit meluangkan waktu untuk gotong royong di hari kerja.

Ekonomi uang. Dahulu, gotong royong adalah cara paling efisien karena uang langka. Sekarang, banyak warga yang lebih memilih membayar daripada harus meluangkan waktu.

Perubahan struktur sosial. Melemahnya ikatan kekerabatan dan meningkatnya heterogenitas penduduk membuat basis sosial kerja sama—rasa saling kenal dan saling percaya—mulai terkikis.

Namun, kerja sama tidak serta-merta hilang. Ia beradaptasi dalam bentuk-bentuk baru. Gotong royong sekarang bisa juga dilakukan melalui penggalangan dana online, atau koordinasi melalui grup WhatsApp. Inti dari kerja sama—kepedulian dan kebersamaan—tetap hidup, hanya mediumnya yang berubah.

E. PERSAINGAN: DINAMIKA EKONOMI DAN POLITIK DI DESA

Persaingan adalah bentuk interaksi yang wajar dalam masyarakat. Di desa, persaingan terjadi dalam berbagai bidang dan intensitas.

1. Bentuk-Bentuk Persaingan di Desa

a. Persaingan Ekonomi

Di sektor ekonomi, persaingan terjadi antar pelaku usaha:

- **Antar pedagang di pasar desa**: Siapa yang dapat menjual lebih banyak, siapa yang dapat menawarkan harga lebih murah, siapa yang dapat menarik lebih banyak pelanggan.
- **Antar petani**: Siapa yang dapat menghasilkan panen lebih baik, siapa yang dapat menjual dengan harga lebih tinggi, siapa yang lebih cepat mengadopsi teknologi baru.
- **Antar pelaku jasa**: Tukang ojek bersaing mendapatkan penumpang, buruh bangunan bersaing mendapatkan proyek, pengelola homestay bersaing mendapatkan wisatawan.

Persaingan ekonomi umumnya sehat, mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas. Namun, bisa juga berubah menjadi tidak sehat jika menggunakan cara-cara curang—menjual barang palsu, menipu pelanggan, atau menjatuhkan pesaing dengan fitnah.

b. Persaingan Sosial

Persaingan sosial adalah persaingan untuk mendapatkan status, pengakuan, atau pengaruh:

- **Persaingan menjadi pengurus organisasi**: Menjadi ketua RT, ketua RW, pengurus PKK, pengurus karang taruna. Posisi-posisi ini memberikan status dan pengaruh.
- **Persaingan menjadi tokoh masyarakat**: Siapa yang paling didengar, siapa yang paling dihormati, siapa yang menjadi panutan.
- **Persaingan dalam gaya hidup**: Siapa yang punya rumah paling bagus, mobil paling mewah, pakaian paling mahal, pesta paling meriah. Ini adalah persaingan gengsi yang kadang memicu konsumerisme.

c. Persaingan Politik

Persaingan politik paling terlihat saat pemilihan kepala desa (Pilkades). Calon-calon bersaing merebut suara warga. Kampanye dilakukan, janji-janji diumbar, tim sukses bergerak, dan kadang politik uang terjadi.

Pilkades adalah puncak persaingan politik di desa. Ia bisa menjadi ajang kompetisi yang sehat, tetapi juga bisa memecah belah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Keluarga bisa terbelah karena beda dukungan, tetangga bisa bermusuhan, dan konflik bisa berkepanjangan setelah Pilkades usai.

2. Dampak Positif Persaingan

Persaingan yang sehat membawa dampak positif:

- **Mendorong inovasi**. Petani yang bersaing akan mencari cara untuk meningkatkan hasil panen. Pedagang yang bersaing akan mencari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan.
- **Meningkatkan kualitas**. Persaingan mendorong setiap pihak untuk memberikan yang terbaik. Produk lebih baik, layanan lebih memuaskan.
- **Efisiensi**. Persaingan mendorong pelaku usaha untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas.
- **Pilihan bagi konsumen**. Dengan adanya persaingan, warga desa memiliki lebih banyak pilihan barang, jasa, atau bahkan pemimpin.

3. Dampak Negatif Persaingan

Jika tidak sehat, persaingan dapat berdampak negatif:

- **Konflik**. Persaingan yang sengit dapat berubah menjadi konflik terbuka. Pedagang bisa bertengkar rebutan pelanggan. Pendukung calon kepala desa bisa terlibat tawuran.
- **Kecemburuan sosial**. Keberhasilan seseorang dalam persaingan bisa menimbulkan iri dan dengki dari yang kalah. Ini bisa merusak kerukunan.
- **Praktik curang**. Untuk menang, orang bisa menggunakan cara-cara tidak jujur—menipu, memfitnah, menyuap.
- **Konsumerisme dan utang**. Persaingan gengsi bisa memicu gaya hidup konsumtif. Orang berlomba membeli barang-barang mewah, seringkali dengan berutang, demi menjaga status.

4. Mengelola Persaingan agar Tetap Sehat

Persaingan tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat dikelola:

- **Menanamkan nilai sportivitas**. Sejak dini, anak-anak diajarkan untuk bersaing secara sehat, menerima kekalahan dengan lapang dada, dan menghargai kemenangan orang lain.
- **Aturan yang jelas**. Persaingan ekonomi perlu diatur agar tidak merugikan konsumen atau merusak lingkungan. Persaingan politik perlu diatur agar tidak memecah belah.
- **Peran tokoh masyarakat**. Tokoh masyarakat dapat menjadi penengah jika persaingan mulai memanas. Mereka mengingatkan untuk tetap menjaga kerukunan.
- **Dialog antar pihak**. Jika persaingan menimbulkan ketegangan, perlu ada dialog antar pihak yang bersaing untuk mencari solusi bersama.

F. KONFLIK SOSIAL: KETEGANGAN YANG TAK TERHINDARKAN

Konflik adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan sosial. Di desa, konflik bisa muncul dari berbagai sebab dan dalam berbagai bentuk.

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik sosial adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan menentang pihak lain, disertai ancaman atau kekerasan. Konflik berbeda dengan persaingan. Dalam persaingan, pihak-pihak yang bersaing tidak saling melenyapkan, hanya berusaha lebih unggul. Dalam konflik, ada upaya untuk melumpuhkan atau bahkan menghancurkan pihak lain.

Lewis Coser, sosiolog konflik, mendefinisikan konflik sebagai perjuangan mengenai nilai-nilai atau klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan pihak-pihak yang berkonflik adalah menetralkan, melukai, atau melenyapkan lawan mereka.

2. Sumber-Sumber Konflik di Desa

a. Perebutan Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi yang terbatas sering menjadi pemicu konflik:

- **Sengketa tanah**. Tanah adalah sumber daya paling berharga di desa. Sengketa batas tanah antar tetangga, antar keluarga, atau antar desa sering terjadi. Bisa juga konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau tambang yang mengklaim tanah adat.
- **Perebutan air**. Di musim kemarau, air irigasi menjadi rebutan. Petani yang sawahnya di hulu mungkin mengambil air lebih banyak, merugikan petani di hilir. Ini bisa memicu konflik.
- **Bantuan sosial**. Dana desa, BLT, atau bantuan lainnya kadang menjadi sumber konflik. Warga berebut siapa yang berhak menerima. Tudingan nepotisme atau ketidakadilan bisa memicu ketegangan.
- **Warisan**. Pembagian warisan sering menjadi sumber konflik dalam keluarga. Apalagi jika tidak ada wasiat yang jelas atau jika salah satu pihak merasa dirugikan.

b. Perbedaan Kepentingan dan Pandangan

- **Konflik antar generasi**. Generasi tua dan muda sering berbeda pandangan tentang banyak hal: cara bertani, pendidikan anak, penggunaan teknologi, pergaulan remaja. Perbedaan ini bisa memicu ketegangan.
- **Konflik antara penduduk asli dan pendatang**. Di desa yang mengalami migrasi masuk, bisa timbul ketegangan antara penduduk asli dan pendatang. Pendatang dianggap merebut lapangan kerja atau mengubah budaya.
- **Konflik antara kelompok agama atau aliran**. Meskipun desa umumnya rukun, perbedaan agama atau aliran keagamaan bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi jika ada provokasi dari luar.

c. Faktor Politik

- **Pemilihan kepala desa**. Pilkades adalah momen rawan konflik. Kampanye hitam, politik uang, atau kecurangan dalam pemilihan bisa memicu konflik. Setelah Pilkades, pendukung calon yang kalah kadang tidak terima dan memicu ketegangan.
- **Kebijakan yang tidak populer**. Kebijakan kepala desa atau pemerintah daerah yang merugikan warga bisa memicu protes dan konflik. Misalnya, kebijakan tentang tata ruang, penggusuran, atau alokasi dana desa.

d. Faktor Sosial Budaya

- **Pelanggaran adat**. Pelanggaran terhadap norma adat bisa memicu konflik. Misalnya, perkawinan yang melanggar aturan adat, atau perilaku yang dianggap menghina adat.
- **Gunjingan dan fitnah**. Gunjingan yang menyebar di masyarakat bisa memicu konflik antar warga. Apalagi jika gunjingan itu menyangkut harga diri atau kehormatan keluarga.
- **Perselingkuhan dan masalah rumah tangga**. Masalah dalam rumah tangga bisa melibatkan keluarga besar dan memicu konflik antar keluarga.

3. Bentuk-Bentuk Konflik di Desa

a. Konflik Intrapersonal

Konflik dalam diri individu. Misalnya, orang yang dilema antara mematuhi orang tua atau mengikuti kata hati. Meskipun tidak melibatkan orang lain, konflik ini bisa berdampak pada perilaku sosial.

b. Konflik Interpersonal

Konflik antar individu. Misalnya, dua tetangga bertengkar karena masalah batas tanah, atau dua pemuda berkelahi karena rebutan pacar. Ini adalah bentuk konflik paling umum.

c. Konflik Intrakelompok

Konflik dalam satu kelompok. Misalnya, dalam kelompok tani, ada perbedaan pendapat tentang penggunaan dana kelompok. Atau dalam keluarga, terjadi konflik soal warisan. Konflik ini bisa melemahkan kelompok jika tidak dikelola.

d. Konflik Antarkelompok

Konflik antar kelompok. Misalnya, konflik antara kelompok tani dari dua dusun berbeda memperebutkan air. Atau konflik antara pendukung dua calon kepala desa. Konflik antarkelompok lebih berbahaya karena melibatkan lebih banyak orang dan berpotensi mempolarisasi masyarakat.

e. Konflik Vertikal

Konflik antara masyarakat dengan pihak yang lebih berkuasa. Misalnya, konflik antara warga desa dengan perusahaan tambang, atau antara warga dengan pemerintah daerah terkait kebijakan. Konflik vertikal sering melibatkan isu ketidakadilan dan hak asasi.

4. Dinamika Konflik di Desa

Konflik tidak terjadi begitu saja. Ia melalui proses:

a. Tahap Potensial

Pada tahap ini, benih-benih konflik sudah ada, tetapi belum muncul ke permukaan. Ada ketidakpuasan, perbedaan kepentingan, atau ketegangan yang terpendam. Misalnya, petani di hilir sudah lama merasa dirugikan karena petani di hulu mengambil air terlalu banyak. Namun, mereka belum menyuarakan protes.

b. Tahap Pemicu

Ada peristiwa yang memicu konflik meletus. Misalnya, petani di hulu membendung air sehingga petani di hilir tidak kebagian air sama sekali. Atau, saat Pilkades, salah satu calon dituduh curang. Peristiwa pemicu ini membuat ketegangan yang terpendam meledak.

c. Tahap Eskalasi

Konflik meluas dan memuncak. Semakin banyak orang terlibat. Pihak-pihak yang tadinya netral mungkin terpaksa memihak. Identitas kelompok menguat—"kami" versus "mereka". Emosi memuncak, perilaku bisa menjadi irasional. Kekerasan fisik mungkin terjadi.

d. Tahap Dekalasi

Konflik mulai mereda. Mungkin karena intervensi pihak ketiga (tokoh masyarakat, aparat), atau karena pihak-pihak yang bertikai mulai lelah. Mulai ada upaya untuk berdamai.

e. Tahap Penyelesaian

Konflik diselesaikan melalui berbagai cara—musyawarah, mediasi, arbitrase, atau jalur hukum. Jika berhasil, tercapai kesepakatan damai. Jika tidak, konflik bisa berlarut-larut atau meletus lagi di kemudian hari.

5. Dampak Konflik

Dampak Negatif:

- **Korban jiwa dan harta**. Konflik yang melibatkan kekerasan bisa menyebabkan luka-luka, bahkan kematian. Rumah, lahan, atau fasilitas umum bisa rusak.
- **Perpecahan sosial**. Konflik bisa memecah belah masyarakat. Hubungan yang tadinya harmonis menjadi renggang. Permusuhan bisa berlangsung lama.
- **Trauma**. Konflik meninggalkan trauma psikologis, terutama bagi anak-anak dan perempuan.
- **Kemunduran ekonomi**. Konflik mengganggu aktivitas ekonomi. Lahan tidak bisa digarap, pasar sepi, investasi kabur.
- **Migrasi**. Konflik bisa memaksa warga mengungsi atau pindah ke tempat lain.

Dampak Positif (menurut Lewis Coser):

- **Memperjelas masalah**. Konflik memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk mengartikulasikan kepentingan dan tuntutan mereka. Masalah yang tadinya terpendam menjadi terbuka dan bisa dicari solusinya.
- **Memperkuat solidaritas internal**. Dalam menghadapi ancaman dari luar, solidaritas kelompok bisa menguat. "Kita" menjadi lebih kompak melawan "mereka".
- **Mendorong perubahan sosial**. Konflik bisa memicu perubahan yang lebih adil. Misalnya, konflik agraria bisa mendorong kebijakan reforma agraria. Konflik buruh bisa mendorong perbaikan upah.

G. STUDI KASUS: INTERAKSI SOSIAL DI DESA

1. Kasus 1: Gotong Royong Membangun Jalan di Desa Suka Maju

Desa Suka Maju memiliki jalan yang rusak parah. Setiap musim hujan, jalan menjadi becek dan sulit dilalui. Warga kesulitan membawa hasil panen ke pasar. Pemerintah desa tidak memiliki anggaran cukup untuk memperbaiki jalan.

Dalam musyawarah desa, warga sepakat untuk bergotong royong memperbaiki jalan. Setiap keluarga diminta menyumbang tenaga atau materi sesuai kemampuan. Ada yang menyumbang batu, pasir, atau semen. Ada yang menyumbang tenaga. Pemerintah desa menyediakan makanan dan minuman selama kerja bakti.

Setiap hari Minggu, puluhan warga turun ke lokasi. Mereka bekerja bersama: menggali, mengangkut batu, mencampur semen, meratakan jalan. Anak-anak muda yang biasanya nongkrong di warung kopi ikut bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan konsumsi. Suasana penuh keakraban.

Dalam waktu dua bulan, jalan sepanjang dua kilometer selesai diperbaiki. Warga sangat bangga. Jalan yang mereka bangun sendiri terasa lebih berarti. Mereka berjanji akan merawatnya bersama.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kerja sama dapat mengatasi masalah bersama, memperkuat solidaritas, dan membangun rasa memiliki.

2. Kasus 2: Persaingan Pedagang di Pasar Desa

Pasar Desa Suka Ramai adalah pusat ekonomi warga. Ada puluhan pedagang yang berjualan berbagai kebutuhan. Di antara mereka, terjadi persaingan yang cukup ketat.

Bu Siti dan Bu Aminah, dua pedagang sembako, bersaing merebut pelanggan. Bu Siti memberikan harga sedikit lebih murah. Bu Aminah merespons dengan memberikan bonus atau layanan lebih ramah. Kadang mereka bersaing siapa yang buka lebih pagi dan tutup lebih malam.

Persaingan ini pada awalnya sehat. Konsumen diuntungkan dengan harga murah dan layanan baik. Namun, lama-kelamaan persaingan menjadi tidak sehat. Bu Siti menuduh Bu Aminah menipu timbangan. Bu Aminah membalas dengan menyebarkan fitnah bahwa barang Bu Siti kadaluarsa. Konflik mulai memanas.

Kepala pasar dan tokoh masyarakat turun tangan. Mereka mempertemukan kedua belah pihak, mendengarkan keluhan masing-masing, dan menasihati agar kembali bersaing secara sehat. Mereka mengingatkan bahwa persaingan boleh, tetapi tidak boleh merusak kerukunan. Akhirnya, Bu Siti dan Bu Aminah berdamai dan sepakat untuk bersaing secara sehat.

Kasus ini menunjukkan bahwa persaingan dapat menjadi tidak sehat jika tidak dikelola. Peran pihak ketiga (kepala pasar, tokoh masyarakat) penting untuk meredakan ketegangan.

3. Kasus 3: Konflik Pilkades di Desa Suka Damai

Pemilihan kepala desa di Desa Suka Damai berlangsung sengit. Dua calon bersaing ketat: Pak Ahmad yang incumbent dan Pak Budi yang penantang. Masing-masing memiliki pendukung fanatik.

Kampanye berlangsung panas. Tim sukses kedua calon saling serang. Isu-isu negatif disebarkan. Pak Ahmad dituduh korupsi dana desa. Pak Budi dituduh tidak kompeten dan punya masalah keluarga. Politik uang terjadi di mana-mana.

Saat penghitungan suara, Pak Ahmad dinyatakan menang tipis. Pendukung Pak Budi tidak terima, menuduh ada kecurangan. Mereka melakukan protes, bahkan merusak kantor desa. Bentrok dengan aparat keamanan terjadi. Beberapa orang luka-luka.

Konflik berkepanjangan setelah Pilkades. Keluarga dan tetangga yang beda dukungan menjadi bermusuhan. Ronda malam sepi karena warga tidak mau bertemu dengan yang berbeda pilihan. Gotong royong macet.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah kecamatan turun tangan. Mereka mempertemukan kedua kubu, melakukan mediasi, dan mencari solusi. Prosesnya panjang dan alot. Akhirnya, setelah beberapa bulan, ketegangan mulai mereda. Warga mulai saling bertegur sapa lagi, meskipun luka lama belum sepenuhnya sembuh.

Kasus ini menunjukkan bahwa konflik politik dapat memecah belah masyarakat. Pencegahannya membutuhkan pendidikan politik yang baik, penegakan aturan yang tegas, dan peran aktif tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan.

H. MENGELOLA INTERAKSI SOSIAL AGAR TETAP HARMONIS

Interaksi sosial—baik kerja sama, persaingan, maupun konflik—adalah keniscayaan dalam kehidupan desa. Yang membedakan desa yang maju dan harmonis dengan desa yang terbelakang dan konfliktif adalah kemampuannya dalam mengelola interaksi tersebut.

1. Memperkuat Kerja Sama

Kerja sama adalah fondasi kehidupan desa. Ia perlu terus diperkuat:

- **Menghidupkan kembali tradisi gotong royong**. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu secara rutin menggerakkan kegiatan gotong royong, tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk kegiatan sosial.
- **Menciptakan wadah kerja sama baru**. Selain tradisi lama, perlu diciptakan wadah kerja sama baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman—misalnya kelompok usaha bersama, koperasi modern, atau platform digital untuk gotong royong.
- **Memberikan penghargaan**. Warga yang aktif dalam kerja sama perlu diapresiasi, misalnya dengan penghargaan atau setidaknya ucapan terima kasih di forum desa.

2. Mengelola Persaingan

Persaingan perlu dikelola agar tetap sehat:

- **Aturan main yang jelas**. Pemerintah desa perlu membuat aturan yang jelas dalam berbagai bidang—perdagangan, penggunaan sumber daya, politik—agar persaingan tidak anarkis.
- **Penegakan aturan**. Aturan harus ditegakkan secara adil. Pelanggar harus mendapat sanksi, baik formal maupun informal.
- **Pendidikan etika bersaing**. Sejak dini, warga perlu dididik tentang etika bersaing: jujur, sportif, menghargai lawan, menerima kekalahan dengan lapang dada.
- **Fasilitasi dialog**. Jika persaingan mulai memanas, tokoh masyarakat perlu memfasilitasi dialog antar pihak yang bersaing.

3. Menyelesaikan Konflik

Konflik harus diselesaikan dengan bijak:

- **Deteksi dini**. Konflik lebih mudah diselesaikan pada tahap awal. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu peka terhadap gejala-gejala awal konflik—ketegangan, gunjingan, protes—dan segera mengambil langkah preventif.

- **Mediasi**. Jika konflik sudah terjadi, mediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dipercaya (tokoh adat, tokoh agama, pemerintah) sangat penting. Mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk berdialog dan mencari solusi.
- **Musyawarah**. Musyawarah adalah cara paling sesuai dengan budaya desa. Semua pihak dikumpulkan, masalah dibicarakan bersama, dan solusi dicari secara mufakat.
- **Akomodasi**. Kadang perlu ada akomodasi—saling memberi dan menerima—agar konflik dapat diselesaikan. Tidak semua pihak bisa mendapatkan semua yang diinginkan.
- **Penegakan hukum**. Untuk konflik yang melibatkan pelanggaran hukum, jalur hukum dapat ditempuh. Namun, jalur hukum sebaiknya menjadi pilihan terakhir, karena prosesnya lama dan biayanya mahal, serta bisa memperpanjang konflik.
- **Rekonsiliasi**. Setelah konflik selesai, perlu ada rekonsiliasi—memulihkan hubungan, menyembuhkan luka, dan membangun kembali kepercayaan. Upacara adat, doa bersama, atau kegiatan bersama dapat menjadi sarana rekonsiliasi.

I. RANGKUMAN

Interaksi sosial adalah nadi kehidupan masyarakat desa. Ia adalah proses saling mempengaruhi antara individu dan kelompok yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Interaksi terjadi jika ada kontak dan komunikasi, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.

Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi asosiatif (mengarah pada kerjasama dan persatuan) dan disosiatif (mengarah pada perpecahan). Tiga bentuk utama yang mewarnai kehidupan desa adalah kerja sama, persaingan, dan konflik.

Kerja sama adalah bentuk interaksi paling dominan di desa. Ia terwujud dalam gotong royong, sambatan, liliuran, sinoman, dan arisan. Kerja sama berfungsi memperkuat solidaritas, membangun rasa memiliki, menghemat biaya, mempercepat pekerjaan, menjaga kesehatan mental, dan menjadi sarana pendidikan nilai. Namun, kerja sama menghadapi tantangan dari individualisme, kesibukan ekonomi, ekonomi uang, dan perubahan struktur sosial.

Persaingan terjadi dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, dan politik. Persaingan sehat mendorong inovasi, peningkatan kualitas, efisiensi, dan pilihan bagi konsumen. Namun, persaingan tidak sehat dapat memicu konflik, kecemburuan sosial, praktik curang, dan konsumerisme. Persaingan perlu dikelola dengan aturan jelas, penegakan hukum, pendidikan etika, dan fasilitasi dialog.

Konflik adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan sosial. Sumbernya bisa dari perebutan sumber daya ekonomi, perbedaan kepentingan, faktor politik, atau faktor sosial budaya. Konflik melalui tahap potensial, pemicu, eskalasi, dekalasi, dan penyelesaian. Konflik berdampak negatif (korban, perpecahan, trauma, kemunduran ekonomi) tetapi juga bisa berdampak positif (memperjelas masalah, memperkuat solidaritas internal, mendorong perubahan sosial). Konflik perlu diselesaikan melalui deteksi dini, mediasi, musyawarah, akomodasi, dan rekonsiliasi.

Ketiga bentuk interaksi ini—kerja sama, persaingan, konflik—senantiasa hadir dalam kehidupan desa. Desa yang sehat adalah desa yang mampu mengelola ketiganya secara seimbang: kerja sama diperkuat, persaingan dikelola agar tetap sehat, dan konflik diselesaikan secara bijak. Dengan demikian, interaksi sosial menjadi energi positif yang menggerakkan kemajuan, bukan kekuatan destruktif yang menghancurkan kebersamaan.

J. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Amati desa Anda atau desa di sekitar Anda. Bentuk kerja sama apa yang masih kuat dilakukan? Adakah bentuk kerja sama baru yang muncul?
2. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan persaingan di desa? Dalam bidang apa? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial?
3. Konflik apa yang pernah terjadi di desa Anda? Apa penyebabnya? Bagaimana cara menyelesaikannya?
4. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik mengelola persaingan agar tetap sehat dan tidak merusak kerukunan?
5. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di desa?
6. Apakah gotong royong masih relevan di era modern? Jika ya, bagaimana bentuknya yang sesuai dengan zaman sekarang?
7. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial di desa? Apakah memperkuat atau justru melemahkan hubungan tatap muka?
8. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar konflik Pilkades tidak memecah belah masyarakat?
   embangkan

BAB VIII

LEMBAGA SOSIAL DI DESA

A. PENGANTAR: PILAR-PILAR PENOPANG KEHIDUPAN DESA

Setiap masyarakat membutuhkan struktur yang mengatur kehidupan bersama. Struktur itu berupa lembaga sosial—sistem norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Lembaga sosial ibarat pilar-pilar yang menopang bangunan masyarakat. Tanpa pilar-pilar ini, bangunan akan runtuh, kehidupan bersama akan kacau, dan masyarakat tidak akan mampu bertahan.

Di desa, lembaga sosial memiliki peran yang sangat vital. Ia tidak hanya mengatur, tetapi juga memberi makna, menjaga kontinuitas, dan menjadi wahana bagi warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Dari lembaga keluarga yang menjadi fondasi pertama sosialisasi nilai, hingga lembaga adat yang menjaga warisan leluhur; dari lembaga pendidikan yang mencerdaskan anak-anak desa, hingga lembaga ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian—semua bekerja bersama dalam suatu sistem yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan warga dan menjaga kelangsungan desa.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang lembaga-lembaga sosial di desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep lembaga sosial secara teoretis, kemudian menelusuri satu per satu lembaga utama yang ada di desa: lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga pemerintahan desa. Untuk setiap lembaga, kita akan membahas pengertian, fungsi, bentuk-bentuknya, serta dinamika yang terjadi. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis bagaimana lembaga-lembaga ini saling berinteraksi—bekerja sama, kadang tumpang tindih, kadang berbenturan—dalam menopang kehidupan masyarakat desa.

B. KONSEP DASAR LEMBAGA SOSIAL

1. Pengertian Lembaga Sosial

Lembaga sosial adalah sistem norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ia adalah struktur yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam bidang-bidang tertentu.

Beberapa definisi lembaga sosial dari para ahli:

Koentjaraningrat mendefinisikan lembaga sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial mencakup ide-ide, aturan-aturan, dan tindakan-tindakan yang terpola.

Soerjono Soekanto mendefinisikan lembaga sosial sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Norma-norma ini terorganisir dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

Paul B. Horton dan **Chester L. Hunt** mendefinisikan lembaga sosial sebagai sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. Lembaga sosial memiliki struktur, fungsi, dan pola perilaku yang relatif mapan.

Robert MacIver dan **Charles Page** mendefinisikan lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diidentifikasi karakteristik utama lembaga sosial:

Pertama, **berupa sistem norma**. Lembaga sosial pada dasarnya adalah kumpulan norma—aturan, pedoman, atau patokan perilaku—yang mengatur bagaimana orang harus bertindak dalam situasi tertentu. Norma ini bisa tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, **terorganisir**. Norma-norma dalam lembaga sosial tersusun secara sistematis dan saling terkait membentuk suatu kesatuan yang utuh. Ada hierarki norma: dari yang paling abstrak (nilai) hingga yang paling konkret (aturan teknis).

Ketiga, **berkisar pada kebutuhan pokok**. Setiap lembaga sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan pokok tertentu dalam masyarakat. Lembaga keluarga memenuhi kebutuhan reproduksi dan sosialisasi

anak. Lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan akan transmisi pengetahuan dan keterampilan. Lembaga ekonomi memenuhi kebutuhan akan produksi dan distribusi barang/jasa.

Keempat, **memiliki struktur dan peran**. Lembaga sosial memiliki struktur yang membedakan posisi-posisi (status) dan perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi (peran). Dalam lembaga keluarga, ada status ayah, ibu, anak, dengan peran masing-masing.

Kelima, **memiliki simbol dan budaya**. Lembaga sosial biasanya memiliki simbol-simbol yang menandai identitasnya—seragam, logo, lagu, ritual, atau bahasa khusus. Juga memiliki nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Keenam, **bersifat relatif permanen**. Lembaga sosial bertahan dalam waktu yang relatif lama, melampaui usia individu-individu yang menjadi anggotanya. Ia diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun dapat berubah secara perlahan.

Ketujuh, **memiliki sanksi**. Lembaga sosial memiliki mekanisme untuk menegakkan norma-normanya—memberikan penghargaan bagi yang patuh dan hukuman bagi yang melanggar. Sanksi bisa bersifat formal (denda, kurungan) maupun informal (celaan, pengucilan).

2. Fungsi Lembaga Sosial

Lembaga sosial memiliki beragam fungsi dalam menjaga kelangsungan dan mengarahkan perubahan masyarakat:

Pertama, **memberikan pedoman perilaku**. Lembaga sosial menyediakan aturan main yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbagai situasi. Ini memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam interaksi sosial.

Kedua, **menjaga keutuhan masyarakat**. Dengan mengatur hubungan antar individu dan kelompok, lembaga sosial mencegah kekacauan dan disintegrasi. Ia menjadi perekat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat.

Ketiga, **memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial**. Lembaga sosial menyediakan basis untuk mengawasi dan mengoreksi perilaku menyimpang. Melalui sanksi, ia menegakkan norma-norma yang berlaku.

Keempat, **memelihara warisan budaya dan nilai-nilai**. Lembaga sosial, terutama lembaga adat dan lembaga pendidikan, menjadi agen transmisi nilai-nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Ia menjaga kontinuitas budaya di tengah perubahan.

Kelima, **memenuhi kebutuhan pokok masyarakat**. Setiap lembaga sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu—lembaga keluarga memenuhi kebutuhan reproduksi, lembaga ekonomi memenuhi kebutuhan material, lembaga agama memenuhi kebutuhan spiritual.

Keenam, **menjadi wadah partisipasi masyarakat**. Melalui lembaga-lembaga yang ada, warga dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik—menyuarakan aspirasi, mengambil keputusan, dan terlibat dalam pembangunan.

Ketujuh, **menjadi agen perubahan dan adaptasi**. Meskipun cenderung mempertahankan pola yang ada, lembaga sosial juga dapat menjadi agen perubahan. Ketika lingkungan berubah, lembaga sosial harus beradaptasi. Lembaga yang adaptif akan bertahan; yang tidak akan ditinggalkan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Lembaga Sosial

Para sosiolog mengklasifikasikan lembaga sosial berdasarkan bidang kebutuhan yang dipenuhi. Secara umum, ada lima lembaga pokok yang ada di semua masyarakat:

1. **Lembaga Keluarga**: memenuhi kebutuhan reproduksi, sosialisasi anak, dan afeksi.
2. **Lembaga Pendidikan**: memenuhi kebutuhan transmisi pengetahuan, keterampilan, dan nilai.
3. **Lembaga Ekonomi**: memenuhi kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa.
4. **Lembaga Agama**: memenuhi kebutuhan spiritual dan moral.
5. **Lembaga Politik**: memenuhi kebutuhan pengaturan kekuasaan dan urusan publik.

Di desa, selain kelima lembaga tersebut, ada juga **lembaga adat** yang sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi. Lembaga adat mengatur kehidupan berdasarkan hukum adat dan menjadi penjaga nilai-nilai lokal.

C. LEMBAGA KELUARGA: FONDASI PERTAMA SOSIALISASI NILAI

Keluarga adalah lembaga sosial paling dasar dan universal. Ia adalah unit terkecil dalam masyarakat, tetapi memiliki peran yang sangat besar. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi individu untuk belajar tentang nilai, norma, dan cara hidup.

1. Pengertian dan Bentuk Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang sah, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka (keluarga inti), atau mencakup juga kerabat lain (keluarga luas).

Bentuk keluarga di desa:

- **Keluarga inti (nuclear family)**: Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Bentuk ini semakin umum di desa, terutama di kalangan generasi muda.
- **Keluarga luas (extended family)**: Selain keluarga inti, juga mencakup kerabat lain—kakek-nenek, paman-bibi, sepupu, atau bahkan kerabat jauh yang tinggal bersama. Bentuk ini masih umum di banyak desa, terutama di Jawa dan luar Jawa.
- **Keluarga poligami**: Di desa-desa yang membolehkan poligami, ada keluarga dengan seorang suami dan beberapa istri beserta anak-anak mereka. Meskipun jumlahnya tidak dominan, bentuk ini ada.
- **Keluarga dengan orang tua tunggal**: Akibat perceraian atau kematian, ada keluarga yang hanya memiliki satu orang tua. Jumlahnya meningkat seiring perubahan sosial.

2. Fungsi Lembaga Keluarga

Lembaga keluarga memiliki beragam fungsi yang sangat vital bagi individu maupun masyarakat:

a. Fungsi Reproduksi

Keluarga adalah lembaga yang melegitimasi hubungan seksual melalui perkawinan dan menjadi tempat lahirnya generasi penerus. Melalui fungsi ini, kelangsungan hidup masyarakat terjamin. Di desa, memiliki anak masih dianggap sangat penting—sebagai penerus keturunan, penerus usaha, dan jaminan di hari tua.

b. Fungsi Sosialisasi

Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan utama. Di dalam keluarga, anak belajar tentang nilai-nilai, norma, bahasa, dan cara hidup yang berlaku dalam masyarakat. Orang tua mengajarkan mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh. Mereka juga menanamkan nilai-nilai agama, kesopanan, dan etika.

Proses sosialisasi di keluarga berlangsung secara informal, melalui teladan, nasihat, teguran, dan hukuman. Anak belajar dari apa yang dilihat dan didengar sehari-hari. Jika orang tua jujur, anak cenderung jujur. Jika orang tua rajin ibadah, anak cenderung rajin. Jika orang tua kasar, anak bisa meniru kekasaran.

c. Fungsi Afeksi

Keluarga memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional. Di tengah kerasnya kehidupan, keluarga menjadi tempat berlindung, tempat berbagi suka dan duka. Rasa aman dan nyaman yang diperoleh dalam keluarga menjadi fondasi kesehatan mental anak.

Di desa, fungsi afeksi ini sangat penting. Ketika seseorang tertimpa musibah, keluarga adalah tempat pertama untuk berkeluh kesah dan mencari dukungan. Ketika seseorang berhasil, keluarga adalah yang pertama diajak berbagi kebahagiaan.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga melindungi anggotanya dari berbagai ancaman—fisik, psikologis, maupun sosial. Orang tua melindungi anak dari bahaya fisik, dari pengaruh buruk, dan dari perlakuan tidak adil. Suami melindungi istri, dan sebaliknya.

Di desa, perlindungan ini tidak hanya dari ancaman eksternal, tetapi juga dari tekanan sosial. Keluarga menjadi benteng ketika individu mendapat gunjingan atau perlakuan tidak adil dari masyarakat.

e. Fungsi Ekonomi

Keluarga adalah unit ekonomi yang memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan anggotanya. Orang tua bekerja untuk mencari nafkah. Anak-anak mungkin membantu dalam kegiatan ekonomi keluarga. Sumber daya dikumpulkan dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Di desa, fungsi ekonomi keluarga sangat terlihat. Rumah tangga petani adalah unit produksi sekaligus konsumsi. Semua anggota keluarga terlibat dalam kegiatan ekonomi—di sawah, di kebun, di pasar, atau di usaha rumah tangga.

f. Fungsi Pengawasan Sosial

Keluarga mengawasi perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma yang berlaku. Orang tua mengawasi pergaulan anak, menegur jika ada perilaku menyimpang, dan memberi sanksi jika perlu. Suami-istri saling mengingatkan.

Pengawasan ini sangat penting karena keluarga adalah garis pertahanan pertama terhadap perilaku menyimpang. Jika keluarga gagal menjalankan fungsi ini, anak-anak rentan terjerumus dalam perilaku negatif.

g. Fungsi Pemberian Status

Keluarga memberikan status sosial kepada individu—nama, identitas, dan posisi dalam masyarakat. Anak lahir dengan status sebagai anak dari orang tuanya, sebagai anggota keluarga tertentu, dan sebagai warga desa dengan segala hak dan kewajiban.

Di desa, status keluarga sangat berpengaruh. Anak dari keluarga tokoh masyarakat akan diperlakukan berbeda. Anak dari keluarga miskin mungkin mendapat diskriminasi. Status ini bisa menjadi modal, tetapi juga bisa menjadi beban.

3. Dinamika Keluarga di Desa

Lembaga keluarga tidak statis. Ia berubah seiring perubahan sosial:

Pergeseran dari keluarga luas ke keluarga inti. Akibat modernisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai, keluarga luas mulai ditinggalkan. Anak-anak yang menikah cenderung tinggal terpisah dari orang tua. Ini mengurangi kontrol keluarga besar, tetapi juga memberikan otonomi lebih bagi pasangan muda.

Meningkatnya peran perempuan. Perempuan desa kini semakin aktif dalam ekonomi dan organisasi sosial. Ini menggeser peran tradisional yang menempatkan perempuan hanya di ranah domestik. Namun, beban ganda (urusan rumah tangga dan pekerjaan publik) menjadi tantangan.

Meningkatnya perceraian. Angka perceraian di desa juga meningkat. Faktor ekonomi, perselingkuhan, atau ketidakcocokan menjadi penyebab. Perceraian berdampak pada anak-anak dan sering menimbulkan konflik antar keluarga besar.

Meningkatnya pernikahan dini. Di beberapa desa, pernikahan dini masih terjadi, terutama di kalangan kurang mampu. Faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan budaya menjadi penyebab. Pernikahan dini berdampak pada putus sekolah, kesehatan reproduksi, dan ekonomi keluarga.

Perubahan pola asuh. Dengan masuknya media dan teknologi, pola asuh anak berubah. Anak lebih banyak terpapar gadget, sementara orang tua mungkin tidak paham cara mengawasi penggunaan media digital.

D. LEMBAGA PENDIDIKAN: MENCERDASKAN KEHIDUPAN DESA

Pendidikan adalah kunci kemajuan. Lembaga pendidikan di desa berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, membuka wawasan, dan meningkatkan kapasitas warga.

1. Bentuk-Bentuk Lembaga Pendidikan di Desa

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang dan terstruktur, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di desa, lembaga pendidikan formal meliputi:

- **PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)** dan **TK (Taman Kanak-Kanak)**. Lembaga ini mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Keberadaannya semakin penting karena anak-anak perlu stimulasi sejak dini.
- **SD (Sekolah Dasar)** atau **MI (Madrasah Ibtidaiyah)**. Hampir setiap desa memiliki SD/MI, meskipun di desa terpencil mungkin hanya ada satu sekolah dengan fasilitas terbatas.
- **SMP (Sekolah Menengah Pertama)** atau **MTs (Madrasah Tsanawiyah)**. Tidak semua desa memiliki SMP/MTs. Anak-anak sering harus ke kecamatan atau kota untuk melanjutkan pendidikan.
- **SMA (Sekolah Menengah Atas)** atau **MA (Madrasah Aliyah)**. Biasanya hanya ada di kecamatan atau kabupaten. Anak desa yang ingin melanjutkan ke SMA harus keluar desa, kadang kost atau pulang-pergi.

Akses terhadap pendidikan formal masih menjadi masalah di banyak desa, terutama desa terpencil. Jarak, biaya, dan fasilitas yang terbatas menyebabkan angka putus sekolah masih tinggi.

b. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sistem formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang atau tidak. Di desa, lembaga pendidikan non-formal meliputi:

- **Madrasah Diniyah** atau **TPQ (Taman Pendidikan Quran)**. Lembaga ini mengajarkan agama Islam—baca Quran, akidah, akhlak, ibadah. Hampir setiap desa di Jawa memiliki madrasah diniyah, biasanya di masjid atau musholla.
- **Pesantren**. Di banyak desa, pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang penting. Santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga berbagai keterampilan. Pesantren juga sering menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi.
- **Kursus-kursus keterampilan**. Misalnya kursus menjahit, komputer, montir, atau bahasa Inggris. Lembaga ini biasanya dikelola oleh swasta atau LSM.
- **Kelompok belajar** (Kejar) untuk warga yang putus sekolah agar bisa mengikuti ujian kesetaraan (Paket A, B, C).
- **Pendidikan keaksaraan** untuk warga buta huruf, terutama di kalangan orang tua.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan. Di desa, pendidikan informal sangat penting. Anak-anak belajar dari orang tua, tetangga, dan tokoh masyarakat tentang nilai-nilai, keterampilan hidup, dan kearifan lokal.

Misalnya, anak petani belajar bertani dari orang tuanya sejak kecil. Anak pengrajin belajar membuat kerajinan dari melihat dan membantu orang tuanya. Anak-anak juga belajar tentang adat dan tradisi dari mengikuti upacara-upacara adat.

2. Fungsi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan memiliki beragam fungsi:

Pertama, **transmisi pengetahuan**. Pendidikan mewariskan pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda—pengetahuan akademis, keterampilan teknis, maupun kearifan lokal.

Kedua, **pengembangan potensi**. Pendidikan mengembangkan potensi individu—bakat, minat, dan kemampuan—agar dapat berkembang secara optimal.

Ketiga, **sosialisasi nilai**. Pendidikan menanamkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat—kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan lain-lain.

Keempat, **mempersiapkan tenaga kerja**. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dan mencari nafkah.

Kelima, **seleksi dan mobilitas sosial**. Pendidikan menjadi alat seleksi untuk menduduki posisi-posisi tertentu dan menjadi saluran mobilitas sosial. Anak desa yang berpendidikan dapat menjadi pegawai, guru, atau profesional lainnya.

Keenam, **agen perubahan**. Pendidikan membuka wawasan, mengajarkan cara berpikir kritis, dan memperkenalkan ide-ide baru. Ini menjadikan pendidikan sebagai agen perubahan sosial.

3. Dinamika Pendidikan di Desa

Lembaga pendidikan di desa menghadapi berbagai dinamika:

Peningkatan partisipasi. Partisipasi sekolah di desa terus meningkat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Orang tua rela berkorban untuk menyekolahkan anak.

Kesenjangan akses. Meskipun meningkat, kesenjangan akses masih terjadi. Desa terpencil kekurangan fasilitas dan guru. Anak miskin sering putus sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga.

Kualitas pendidikan. Mutu pendidikan di desa masih tertinggal dibanding kota. Kekurangan guru, fasilitas terbatas, dan akses terbatas ke sumber belajar menjadi penyebab.

Pendidikan karakter. Di tengah arus modernisasi, pendidikan karakter menjadi penting. Sekolah dan madrasah diniyah berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai moral.

Relevansi dengan kebutuhan lokal. Ada tantangan untuk membuat pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan desa. Kurikulum yang terlalu urban-oriented kadang tidak membekali anak dengan keterampilan yang dibutuhkan di desa.

E. LEMBAGA EKONOMI: MENGATUR PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI

Lembaga ekonomi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Di desa, lembaga ekonomi memiliki bentuk yang beragam, dari yang tradisional hingga modern.

1. Bentuk-Bentuk Lembaga Ekonomi di Desa

a. Sektor Pertanian dan Kelautan

Bagi sebagian besar desa, pertanian adalah sektor ekonomi utama. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pertanian meliputi:

- **Petani** sebagai unit produksi dasar. Petani mengelola lahan, menanam, merawat, dan memanen. Mereka bisa sebagai pemilik lahan, penggarap, atau buruh tani.
- **Kelompok tani (poktan)** dan **Gabungan Kelompok Tani (gapoktan)**. Lembaga ini mewadahi petani untuk bekerjasama—pengadaan saprodi (sarana produksi), pemasaran, atau mengakses program pemerintah.
- **Lumbung padi**. Lumbung adalah tempat menyimpan padi untuk cadangan pangan. Secara tradisional, lumbung berfungsi mengatasi paceklik. Sekarang, lumbung juga bisa dikelola secara kolektif.
- **Subak** di Bali. Sistem irigasi tradisional yang diatur secara demokratis dan spiritual. Subak mengatur pembagian air, jadwal tanam, dan upacara keagamaan terkait pertanian.
- **Nelayan** dan **kelompok nelayan** di desa pesisir. Mereka mengelola penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, dan pemasaran.

b. Pasar dan Perdagangan

Pasar adalah pusat kegiatan ekonomi di desa:

- **Pasar desa**. Pasar tradisional yang biasanya buka pada hari-hari tertentu (pasaran). Di sini, petani menjual hasil bumi, pedagang menjual kebutuhan sehari-hari, dan warga berbelanja. Pasar juga menjadi arena interaksi sosial.
- **Warung** dan **toko kelontong**. Usaha kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Warung biasanya dikelola oleh ibu-ibu dan menjadi tempat nongkrong warga.
- **Pedagang keliling**. Ada yang menjual sayur, ikan, bakso, atau jajanan. Mereka berkeliling desa dengan gerobak atau sepeda motor.
- **Tengkulak** atau **pengepul**. Pedagang perantara yang membeli hasil panen dari petani untuk dijual ke kota. Peran mereka penting, tetapi kadang merugikan petani karena menentukan harga.

c. Koperasi

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Di desa, ada berbagai jenis koperasi:

- **Koperasi Unit Desa (KUD)**. Koperasi serba usaha yang melayani petani—menyediakan saprodi, menampung hasil panen, memberikan kredit, dan menyediakan kebutuhan pokok.
- **Koperasi simpan pinjam**. Lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota. Sangat membantu warga yang tidak punya akses ke bank.
- **Koperasi perempuan**. Dikelola oleh kelompok perempuan, biasanya terkait dengan PKK atau arisan.

- **Koperasi tani** atau **koperasi nelayan**. Koperasi khusus untuk petani atau nelayan.

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang didirikan berdasarkan UU Desa. BUMDes bertujuan mengelola potensi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan menyejahterakan masyarakat. Bentuk usahanya beragam:

- **BUMDes simpan pinjam**. Memberikan layanan keuangan kepada warga.
- **BUMDes usaha bersama**. Mengelola usaha bersama, misalnya pengolahan hasil pertanian, peternakan, atau perikanan.
- **BUMDes pariwisata**. Mengelola destinasi wisata desa.
- **BUMDes jasa**. Menyediakan jasa—air bersih, transportasi, persewaan alat, atau jasa keamanan.
- **BUMDes perdagangan**. Menjual kebutuhan pokok, hasil pertanian, atau kerajinan.

BUMDes menjadi harapan baru bagi kemandirian ekonomi desa. Namun, tidak semua BUMDes berhasil. Banyak yang gagal karena pengelolaan tidak profesional, konflik kepentingan, atau modal terbatas.

e. Lembaga Keuangan Informal

Selain lembaga formal, di desa juga berkembang lembaga keuangan informal:

- **Arisan**. Anggota mengumpulkan uang secara rutin, lalu undian menentukan penerima. Arisan berfungsi sosial sekaligus ekonomi.
- **Bank titil** atau **rentenir**. Pemberi pinjaman informal dengan bunga tinggi. Mereka menjadi sumber kredit bagi warga yang tidak punya akses ke bank, meskipun sering menjerat.
- **Ijon**. Sistem pinjaman dengan jaminan hasil panen. Petani meminjam uang, dan saat panen harus menjual hasilnya kepada pemberi pinjaman dengan harga yang sudah ditentukan (biasanya lebih rendah). Sistem ini merugikan petani.

2. Fungsi Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi memiliki fungsi utama:

Pertama, **mengatur produksi**. Lembaga ekonomi mengatur apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan berapa jumlahnya. Kelompok tani, misalnya, mengatur pola tanam agar tidak kelebihan produksi.

Kedua, **mengatur distribusi**. Lembaga ekonomi mengatur bagaimana barang dan jasa didistribusikan dari produsen ke konsumen. Pasar, tengkulak, dan koperasi berperan dalam distribusi.

Ketiga, **mengatur konsumsi**. Lembaga ekonomi mempengaruhi pola konsumsi masyarakat—apa yang dibeli, berapa banyak, dan dari mana.

Keempat, **menyediakan lapangan kerja**. Lembaga ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi warga desa—petani, pedagang, buruh, pegawai koperasi, pengelola BUMDes.

Kelima, **meningkatkan pendapatan**. Melalui kegiatan ekonomi, warga memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keenam, **membangun kemandirian ekonomi**. Lembaga seperti koperasi dan BUMDes bertujuan membangun kemandirian ekonomi desa, mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

3. Dinamika Ekonomi Desa

Lembaga ekonomi desa menghadapi berbagai dinamika:

Masuknya ekonomi pasar. Ekonomi uang dan pasar semakin dominan. Petani tidak lagi bertani hanya untuk makan, tetapi untuk dijual. Ini membawa peluang, tetapi juga risiko fluktuasi harga.

Modernisasi pertanian. Penggunaan teknologi—traktor, bibit unggul, pupuk kimia—mengubah cara bertani. Produktivitas naik, tetapi juga ketergantungan pada input eksternal dan kerusakan lingkungan.

Persaingan dengan produk luar. Produk-produk pabrikan dari kota membanjiri desa, menggeser produk lokal. Petani dan perajin lokal kesulitan bersaing.

Krisis dan fluktuasi harga. Harga komoditas pertanian sering berfluktuasi, dipengaruhi pasar global. Petani sering rugi ketika harga jatuh.

Keterbatasan akses modal. Akses petani dan pelaku UMKM terhadap kredit formal masih terbatas. Mereka sering terjebak pada rentenir dengan bunga tinggi.

Peluang baru. Perkembangan teknologi dan pariwisata membuka peluang ekonomi baru. Produk desa bisa dijual online. Desa wisata menarik pengunjung.

F. LEMBAGA AGAMA: MEMENUHI KEBUTUHAN SPIRITUAL

Masyarakat desa umumnya religius. Lembaga agama memiliki peran yang sangat penting—tidak hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi.

1. Bentuk-Bentuk Lembaga Agama di Desa

a. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah pusat kehidupan keagamaan:

- **Masjid** dan **musholla** bagi umat Islam. Masjid tidak hanya untuk sholat, tetapi juga untuk pengajian, pendidikan (TPQ), dan kegiatan sosial. Musholla lebih kecil, biasanya di tingkat RT atau dusun.
- **Gereja** bagi umat Kristen dan Katolik. Di desa yang mayoritas non-Kristen, gereja mungkin hanya ada satu atau dua.
- **Pura** bagi umat Hindu, terutama di Bali dan Lombok.
- **Vihara** bagi umat Buddha.

Tempat ibadah menjadi simbol kehadiran komunitas agama, pusat kegiatan, dan tempat mencari ketenangan.

b. Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan mewadahi umat dalam kegiatan keagamaan dan sosial:

- **Nahdlatul Ulama (NU)** dan **Muhammadiyah** adalah dua organisasi Islam terbesar yang memiliki cabang hingga desa. Mereka mengelola masjid, sekolah, pesantren, dan kegiatan sosial.
- **Majelis taklim** adalah kelompok pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak yang rutin bertemu untuk belajar agama.
- **Remaja masjid** adalah organisasi pemuda yang mengelola kegiatan keagamaan dan sosial di masjid.
- **Kelompok yasinan** atau **tahlilan** adalah kelompok yang rutin membaca yasin dan tahlil, biasanya di rumah anggota secara bergilir.
- **Dewan Paroki** atau **majelis gereja** bagi umat Kristen/Katolik.
- **Parisada Hindu Dharma** bagi umat Hindu.

c. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah pemimpin spiritual sekaligus panutan sosial:

- **Ulama**, **kyai**, atau **ustadz** bagi umat Islam. Mereka tidak hanya mengajar agama, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai persoalan—sosial, politik, bahkan pribadi.
- **Pendeta** atau **pastor** bagi umat Kristen/Katolik.
- **Pemangku** atau **pedanda** bagi umat Hindu.

Tokoh agama memiliki pengaruh besar. Nasihat mereka didengar, fatwa mereka diikuti. Mereka sering menjadi mediator dalam konflik dan penjaga moral masyarakat.

2. Fungsi Lembaga Agama

Lembaga agama memiliki beragam fungsi:

Pertama, **memenuhi kebutuhan spiritual**. Lembaga agama memfasilitasi ibadah, ritual, dan doa yang memberi ketenangan batin, makna hidup, dan harapan.

Kedua, **membimbing moral**. Lembaga agama mengajarkan nilai-nilai moral—kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran. Ini menjadi fondasi perilaku individu dan masyarakat.

Ketiga, **memperkuat solidaritas**. Ritual bersama (sholat jamaah, kebaktian, sembahyang bersama) menciptakan perasaan kebersamaan. Kegiatan sosial keagamaan (santunan, bakti sosial) memperkuat ikatan.

Keempat, **memberikan pendidikan**. Lembaga agama menyelenggarakan pendidikan—TPQ, madrasah diniyah, pesantren, sekolah minggu—yang menanamkan nilai-nilai agama dan moral.

Kelima, **menjadi agen kontrol sosial**. Lembaga agama mengawasi perilaku umat, menegur yang melanggar, dan memberi sanksi moral. Ini melengkapi kontrol sosial dari lembaga lain.

Keenam, **memberikan pelayanan sosial**. Lembaga agama sering terlibat dalam kegiatan sosial—membantu fakir miskin, yatim piatu, korban bencana. Zakat, infak, sedekah dihimpun dan didistribusikan.

Ketujuh, **menjaga warisan budaya**. Lembaga agama, terutama di Bali dan daerah lain, menjadi penjaga tradisi dan upacara keagamaan yang juga merupakan warisan budaya.

3. Dinamika Keberagamaan di Desa

Lembaga agama menghadapi berbagai dinamika:

Keberagamaan yang tetap kuat. Di tengah modernisasi, keberagamaan di desa tetap kuat. Ritual keagamaan masih dijalankan, tokoh agama masih dihormati.

Pengaruh media. Media dan internet membawa pengaruh dalam pemahaman agama. Ada yang menjadi lebih konservatif, ada yang lebih liberal. Kelompok-kelompok keagamaan baru bermunculan.

Konflik antar aliran. Perbedaan paham dalam satu agama kadang memicu konflik, terutama jika ada provokasi dari luar. Tokoh agama berperan penting menjaga kerukunan.

Integrasi dengan adat. Di banyak desa, agama dan adat berintegrasi erat. Upacara adat juga memiliki dimensi keagamaan. Ini menciptakan sinkretisme yang unik.

Peran sosial yang meluas. Lembaga agama tidak hanya urusan ibadah, tetapi juga sosial, pendidikan, bahkan ekonomi (BUMDes masjid, koperasi pesantren).

G. LEMBAGA ADAT: PENJAGA WARISAN LELUHUR

Lembaga adat mengatur kehidupan berdasarkan hukum adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di banyak desa, terutama di luar Jawa, lembaga adat masih sangat kuat.

1. Bentuk-Bentuk Lembaga Adat di Desa

a. Struktur Kepemimpinan Adat

Struktur adat bervariasi antar daerah:

- Di desa-desa Bali, ada **bendesa adat** yang memimpin desa adat (desa pakraman).
- Di Minangkabau, ada **penghulu** atau **datuk** yang memimpin suku.
- Di Batak, ada **raja adat**.
- Di Bugis-Makassar, ada **arung** atau **datuk**.
- Di banyak desa di Jawa, struktur adat mungkin tidak sekuat di luar Jawa, tetapi tetap ada tokoh adat yang dihormati.

Struktur adat ini memiliki kewenangan dalam urusan adat—perkawinan, warisan, sengketa, upacara.

b. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan:

- **Hukum perkawinan adat**: Aturan tentang siapa yang boleh menikah, prosesi lamaran dan pernikahan, mas kawin, dan larangan perkawinan (misalnya dalam satu klan).
- **Hukum waris adat**: Aturan tentang pembagian harta warisan. Di Minangkabau, warisan mengikuti garis ibu (matrilineal). Di Batak, mengikuti garis ayah (patrilineal).

- **Hukum tanah adat**: Aturan tentang hak ulayat (tanah milik bersama), hak guna tanah, dan pengalihan hak tanah.
- **Hukum pidana adat**: Aturan tentang pelanggaran adat dan sanksinya. Misalnya, denda adat bagi yang melanggar norma.

Hukum adat masih diakui dan dipraktikkan di banyak desa, meskipun ada tumpang tindih dengan hukum nasional.

c. Upacara Adat

Upacara adat adalah ritual yang dilakukan secara turun-temurun:

- **Upacara daur hidup**: Kelahiran, potong rambut, khitanan, perkawinan, kematian.
- **Upacara pertanian**: Sebelum tanam, saat panen, bersih desa.
- **Upacara keagamaan**: Ngaben di Bali, Rambu Solo' di Toraja, Kasada di Tengger.

Upacara adat bukan sekadar ritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, menegaskan identitas, dan mewariskan nilai.

d. Lembaga Adat Modern

Di era otonomi daerah, banyak daerah membentuk lembaga adat dalam struktur formal, misalnya **Lembaga Adat Desa** atau **Dewan Adat**. Lembaga ini diakui dalam peraturan daerah dan diberi kewenangan tertentu.

2. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki beragam fungsi:

Pertama, **menjaga identitas budaya**. Lembaga adat menjadi penjaga tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lokal. Ia memastikan warisan leluhur tidak punah.

Kedua, **mengatur kehidupan sosial**. Lembaga adat mengatur hubungan antar warga, antar keluarga, antar klan. Aturan adat memberikan pedoman yang jelas.

Ketiga, **menyelesaikan konflik**. Lembaga adat menjadi mediator dalam konflik—sengketa tanah, masalah perkawinan, perselisihan antar keluarga. Penyelesaian adat sering lebih efektif daripada jalur formal.

Keempat, **memelihara solidaritas**. Upacara adat dan ritual bersama memperkuat ikatan sosial, mengingatkan bahwa mereka adalah satu komunitas.

Kelima, **menjaga kelestarian alam**. Banyak aturan adat yang melindungi lingkungan—larangan menebang pohon di hutan larangan, larangan memancing di sungai keramat, sistem sasi di Maluku yang mengatur panen sumber daya laut.

Keenam, **menjadi mitra pemerintah**. Lembaga adat dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, terutama di bidang sosial dan budaya.

3. Dinamika Lembaga Adat

Lembaga adat menghadapi berbagai dinamika:

Peleburan dengan agama. Di banyak tempat, adat dan agama berintegrasi erat. Upacara adat juga memiliki makna keagamaan. Ini menciptakan sinkretisme yang unik.

Tantangan modernisasi. Generasi muda mulai meninggalkan adat karena dianggap kuno. Upacara adat semakin jarang, bahasa daerah mulai punah.

Konflik dengan hukum nasional. Kadang terjadi benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, dalam kasus warisan, atau dalam kasus pidana adat yang dianggap melanggar HAM.

Revitalisasi adat. Di tengah ancaman punah, muncul gerakan revitalisasi adat. Upacara adat dihidupkan kembali, bahasa daerah diajarkan di sekolah, lembaga adat diperkuat.

Komersialisasi adat. Adat juga dikemas untuk pariwisata. Upacara adat menjadi atraksi wisata. Ini bisa menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berisiko mengkomodifikasi hal yang sakral.

H. LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA: STRUKTUR FORMAL PENGATUR URUSAN PUBLIK

Lembaga pemerintahan desa adalah struktur formal yang mengatur urusan publik di tingkat desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Struktur Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari:

- **Kepala Desa**. Pimpinan pemerintah desa yang dipilih langsung oleh warga untuk masa jabatan 6 tahun. Kepala desa memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **Perangkat Desa**. Membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Terdiri dari sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), dan kepala dusun (kadus). Sekdes memimpin sekretariat desa (urusan administrasi). Kaur mengurus bidang tertentu—keuangan, perencanaan, umum. Kadus mengurus wilayah dusun masing-masing.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga legislatif desa yang berfungsi:

- Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi warga.
- Mengawasi kinerja kepala desa.

Anggota BPD dipilih dari warga desa melalui musyawarah. Masa jabatannya 6 tahun.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah desa untuk membantu pelaksanaan pembangunan:

- **RT (Rukun Tetangga)** dan **RW (Rukun Warga)**. Lembaga terkecil yang mengurus lingkungan. RT/RW menjadi penghubung antara warga dan pemerintah desa.
- **PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)**. Lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
- **Karang Taruna**. Lembaga kepemudaan yang mengembangkan kegiatan pemuda—olahraga, seni, sosial, ekonomi.
- **LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**. Lembaga yang membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif.

2. Fungsi Pemerintahan Desa

Lembaga pemerintahan desa memiliki fungsi utama:

Pertama, **penyelenggaraan pemerintahan**. Mengurus administrasi kependudukan (KTP, KK, akta), surat menyurat, dan pelayanan administrasi lainnya.

Kedua, **pelaksanaan pembangunan**. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa—infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), fasilitas umum (balai desa, pasar), dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, **pembinaan kemasyarakatan**. Membina kehidupan masyarakat agar harmonis, aman, dan tertib. Mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Keempat, **pemberdayaan masyarakat**. Meningkatkan kapasitas masyarakat—pendidikan, keterampilan, ekonomi—agar lebih mandiri.

Kelima, **pelayanan publik**. Memberikan pelayanan kepada warga—administrasi, kesehatan dasar, pendidikan, dan lain-lain.

Keenam, **penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial.

3. Dinamika Pemerintahan Desa

Dengan UU Desa, pemerintahan desa mengalami perubahan besar:

Otonomi dan kewenangan. Desa memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur urusannya sendiri. Tidak lagi sekadar "anak" dari kabupaten/kota.

Dana desa. Alokasi dana yang signifikan dari APBN. Desa kini punya anggaran untuk membangun. Namun, ini juga membawa risiko korupsi dan konflik.

Profesionalisasi. Perangkat desa dituntut lebih profesional. Ada standar kompetensi, pelatihan, dan evaluasi kinerja.

Partisipasi. Perencanaan pembangunan harus partisipatif melalui musyawarah desa. Warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan. Ada kewajiban laporan dan publikasi.

Konflik dan dinamika politik. Kekuasaan dan dana yang lebih besar juga memicu konflik. Perebutan pengaruh, tudingan korupsi, dan ketegangan politik sering terjadi.

I. INTERAKSI DAN DINAMIKA ANTAR LEMBAGA SOSIAL

Lembaga-lembaga sosial di desa tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi, bekerja sama, kadang tumpang tindih, kadang berbenturan.

1. Kerja Sama Antar Lembaga

Dalam banyak situasi, lembaga-lembaga bekerja sama:

- **Keluarga dan pendidikan**. Keluarga mendukung pendidikan anak dengan menyekolahkan, membimbing belajar, dan bekerja sama dengan guru.
- **Pendidikan dan agama**. Sekolah bekerja sama dengan madrasah diniyah atau pesantren dalam pendidikan karakter. Banyak sekolah yang memasukkan muatan agama.
- **Ekonomi dan pemerintahan**. BUMDes bekerja sama dengan kelompok tani. Pemerintah desa mendukung pengembangan UMKM.
- **Agama dan adat**. Di banyak tempat, agama dan adat berintegrasi. Upacara adat juga bermakna keagamaan. Tokoh agama dan adat sering bekerja sama.
- **Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan**. Pemerintah desa bekerja sama dengan RT/RW, PKK, karang taruna dalam pelaksanaan program.

2. Tumpang Tindih Fungsi

Kadang terjadi tumpang tindih fungsi antar lembaga:

- **Lembaga adat dan lembaga agama** sama-sama mengatur perkawinan. Mana yang harus diutamakan?
- **Lembaga adat dan pemerintahan desa** sama-sama memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Sering ada ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional.
- **Lembaga pendidikan formal dan non-formal** sama-sama mendidik anak. Kadang ada perbedaan pendekatan atau bahkan konflik nilai.

3. Ketegangan dan Konflik Antar Lembaga

Tidak jarang terjadi ketegangan antar lembaga:

- **Antara lembaga adat dan agama** bisa terjadi jika ada perbedaan pandangan. Misalnya, tradisi adat tertentu dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
- **Antara lembaga pendidikan modern dan lembaga adat**. Sekolah mengajarkan nilai-nilai universal yang kadang berbenturan dengan nilai-nilai tradisional.

- **Antara lembaga ekonomi modern dan lembaga adat**. Investor yang ingin membuka usaha di tanah adat bisa berkonflik dengan masyarakat adat.
- **Antara lembaga pemerintahan desa dan lembaga adat** tentang siapa yang berwenang mengatur apa.

4. Sinergi untuk Pembangunan Desa

Untuk pembangunan desa yang efektif, sinergi antar lembaga diperlukan:

- **Perencanaan bersama**. Semua lembaga dilibatkan dalam musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan.
- **Pembagian peran yang jelas**. Masing-masing lembaga menjalankan perannya sesuai kewenangan dan kapasitas.
- **Koordinasi dan komunikasi**. Ada forum rutin untuk koordinasi antar lembaga.
- **Saling menghormati**. Masing-masing lembaga menghormati kewenangan dan peran lembaga lain.
- **Penyelesaian konflik**. Jika terjadi ketegangan, ada mekanisme untuk menyelesaikan secara musyawarah.

J. RANGKUMAN

Lembaga sosial adalah sistem norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Di desa, terdapat beberapa lembaga utama yang menjadi pilar kehidupan:

Lembaga keluarga adalah fondasi pertama sosialisasi nilai. Fungsi utamanya meliputi reproduksi, sosialisasi, afeksi, perlindungan, ekonomi, pengawasan sosial, dan pemberian status. Keluarga di desa mengalami dinamika: pergeseran ke keluarga inti, peningkatan peran perempuan, meningkatnya perceraian, pernikahan dini, dan perubahan pola asuh.

Lembaga pendidikan berperan mencerdaskan kehidupan desa. Bentuknya meliputi pendidikan formal (PAUD, SD, SMP, SMA), non-formal (madrasah diniyah, pesantren, kursus), dan informal. Fungsinya: transmisi pengetahuan, pengembangan potensi, sosialisasi nilai, persiapan tenaga kerja, seleksi dan mobilitas sosial, serta agen perubahan. Dinamikanya meliputi peningkatan partisipasi, kesenjangan akses, masalah kualitas, pendidikan karakter, dan relevansi dengan kebutuhan lokal.

Lembaga ekonomi mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Bentuknya meliputi sektor pertanian/kelautan, pasar dan perdagangan, koperasi, BUMDes, dan lembaga keuangan informal. Fungsinya mengatur kegiatan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian. Dinamikanya meliputi masuknya ekonomi pasar, modernisasi pertanian, persaingan dengan produk luar, fluktuasi harga, keterbatasan akses modal, dan peluang baru.

Lembaga agama memenuhi kebutuhan spiritual. Bentuknya meliputi tempat ibadah, organisasi keagamaan, dan tokoh agama. Fungsinya memenuhi kebutuhan spiritual, membimbing moral, memperkuat solidaritas, memberikan pendidikan, menjadi agen kontrol sosial, memberikan pelayanan sosial, dan menjaga warisan budaya. Dinamikanya meliputi keberagamaan yang tetap kuat, pengaruh media, konflik antar aliran, integrasi dengan adat, dan peran sosial yang meluas.

Lembaga adat menjaga warisan leluhur. Bentuknya meliputi struktur kepemimpinan adat, hukum adat, upacara adat, dan lembaga adat modern. Fungsinya menjaga identitas budaya, mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, memelihara solidaritas, menjaga kelestarian alam, dan menjadi mitra pemerintah. Dinamikanya meliputi peleburan dengan agama, tantangan modernisasi, konflik dengan hukum nasional, revitalisasi adat, dan komersialisasi adat.

Lembaga pemerintahan desa adalah struktur formal pengatur urusan publik. Strukturnya terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkat), BPD, dan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, PKK, karang taruna). Fungsinya menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, pelayanan publik, dan ketertiban. Dinamikanya meliputi otonomi desa, dana desa, profesionalisasi, partisipasi, transparansi, dan konflik politik.

Lembaga-lembaga ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi—bekerja sama, kadang tumpang tindih, kadang berbenturan. Untuk pembangunan desa yang efektif, diperlukan sinergi antar lembaga: perencanaan bersama, pembagian peran yang jelas, koordinasi, saling menghormati, dan penyelesaian konflik secara musyawarah.

Dengan sinergi yang baik, lembaga-lembaga sosial akan menjadi pilar yang kokoh menopang kehidupan desa, memenuhi kebutuhan warga, menjaga nilai-nilai luhur, sekaligus mendorong kemajuan di tengah arus perubahan.

K. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Lembaga keluarga di desa Anda mengalami perubahan apa saja dalam 10-20 tahun terakhir? Bagaimana dampaknya terhadap sosialisasi nilai pada anak?
2. Bagaimana akses dan kualitas pendidikan di desa Anda? Apa tantangan terbesar yang dihadapi?
3. Lembaga ekonomi apa yang paling berperan di desa Anda? Apakah BUMDes sudah berjalan efektif?
4. Bagaimana peran lembaga agama dalam kehidupan sehari-hari di desa Anda? Adakah pengaruh media terhadap pemahaman keagamaan?
5. Apakah lembaga adat masih kuat di desa Anda? Jika ya, dalam bidang apa saja kewenangannya? Jika tidak, mengapa?
6. Bagaimana hubungan antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa di daerah Anda? Apakah harmonis atau ada ketegangan?
7. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik membangun sinergi antar lembaga sosial untuk pembangunan desa?
8. Adakah konflik antar lembaga yang pernah terjadi di desa Anda? Bagaimana cara menyelesaikannya?

BAB IX

KEPEMIMPINAN SOSIAL DI DESA

A. PENGANTAR: DUA WAJAH KEKUASAAN DI DESA

Setiap masyarakat membutuhkan pemimpin. Pemimpin adalah sosok yang mengarahkan, mengoordinasi, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di desa, kepemimpinan memiliki wajah yang unik. Tidak seperti di kota atau di tingkat nasional yang kepemimpinannya hampir sepenuhnya formal dan birokratis, di desa kita menemukan dua wajah kekuasaan yang berjalan berdampingan: kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal.

Di satu sisi, ada Kepala Desa dan perangkatnya yang memperoleh legitimasi dari negara melalui pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Mereka adalah pemimpin formal yang memiliki kewenangan administratif, mengelola anggaran, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, ada tokoh-tokoh yang tidak memiliki jabatan formal, tetapi pengaruhnya sangat besar—bahkan kadang melebihi pemimpin formal. Mereka adalah kyai, tetua adat, tokoh masyarakat, atau sekadar orang yang disegani karena kearifan, kebaikan, atau pengalamannya. Mereka adalah pemimpin informal.

Dua tipe kepemimpinan ini tidak berdiri sendiri. Mereka berinteraksi, kadang saling mendukung dan memperkuat, kadang saling bersaing dan menciptakan ketegangan. Dinamika hubungan antara pemimpin formal dan informal ini sangat menentukan arah dan kualitas pembangunan desa. Desa yang maju dan harmonis biasanya adalah desa yang mampu mensinergikan kedua tipe kepemimpinan ini untuk kepentingan bersama.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang kepemimpinan sosial di desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep kepemimpinan secara teoretis, kemudian membedah dua tipe kepemimpinan—formal dan informal—dengan segala karakteristik, sumber legitimasi, dan perannya. Selanjutnya, kita akan menganalisis interaksi antara keduanya: pola-pola hubungan, potensi sinergi, dan potensi konflik. Pada bagian akhir, kita akan membahas bagaimana membangun sinergi kepemimpinan untuk pembangunan desa yang efektif.

B. KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain—individu atau kelompok—agar mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan tersebut dan menjalankannya dalam praktik.

Beberapa definisi kepemimpinan dari para ahli:

James MacGregor Burns, pakar kepemimpinan terkenal, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana pemimpin menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan yang mewakili nilai-nilai dan motivasi bersama—keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan harapan baik dari pemimpin maupun pengikut.

John C. Maxwell, penulis buku-buku kepemimpinan, mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh—tidak lebih, tidak kurang. Siapa pun yang memengaruhi orang lain, dialah pemimpin.

Kartini Kartono, sosiolog Indonesia, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa inti kepemimpinan adalah **pengaruh**. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu memengaruhi orang lain, baik melalui wewenang formal, kharisma pribadi, keahlian, atau kombinasi dari semuanya.

2. Unsur-Unsur Kepemimpinan

Kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok:

Pertama, **pemimpin**. Orang yang memiliki kemampuan memengaruhi. Pemimpin memiliki visi, nilai, dan karakter tertentu.

Kedua, **pengikut**. Orang atau kelompok yang dipengaruhi. Pengikut memiliki kebutuhan, harapan, dan kesediaan untuk dipimpin.

Ketiga, **tujuan**. Kepemimpinan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu, baik tujuan kelompok maupun tujuan bersama.

Keempat, **pengaruh**. Proses di mana pemimpin memengaruhi pengikut. Pengaruh ini bisa melalui berbagai cara: perintah, bujukan, teladan, atau motivasi.

Kelima, **situasi**. Kepemimpinan selalu terjadi dalam konteks tertentu. Situasi yang berbeda menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda.

3. Sumber Legitimasi Kepemimpinan

Mengapa orang mau dipimpin? Mengapa mereka mengakui seseorang sebagai pemimpin? Max Weber, sosiolog Jerman, mengidentifikasi tiga sumber legitimasi kekuasaan:

a. Legitimasi Tradisional

Kekuasaan dianggap sah karena berasal dari tradisi yang telah berlangsung lama. Orang dipatuhi karena mereka adalah penerus garis keturunan yang secara tradisional memang memegang kekuasaan. Di desa, legitimasi tradisional melekat pada keturunan bangsawan, tetua adat, atau pemimpin adat yang diwariskan secara turun-temurun.

b. Legitimasi Karismatik

Kekuasaan dianggap sah karena kualitas pribadi seseorang yang dianggap luar biasa—kharisma. Orang dipatuhi bukan karena jabatan atau keturunan, tetapi karena mereka dianggap memiliki kelebihan istimewa: kesaktian, kearifan, kesucian, atau keberanian. Di desa, kyai yang dianggap memiliki ilmu agama tinggi, atau dukun yang dianggap memiliki kekuatan gaib, memiliki legitimasi karismatik.

c. Legitimasi Legal-Rasional

Kekuasaan dianggap sah karena berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Orang dipatuhi karena mereka menduduki jabatan yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa yang dipilih dalam Pilkades memiliki legitimasi legal-rasional.

Dalam praktiknya, ketiga sumber legitimasi ini bisa melekat pada satu orang. Seorang kepala desa bisa memiliki legitimasi legal-rasional karena jabatannya, juga memiliki legitimasi karismatik karena kharisma pribadinya, dan mungkin juga memiliki legitimasi tradisional jika ia berasal dari keturunan tokoh masyarakat.

C. KEPEMIMPINAN FORMAL DI DESA

Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang melekat pada jabatan formal dalam struktur pemerintahan desa. Pemimpin formal memperoleh legitimasi dari negara melalui proses pemilihan atau pengangkatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Kepemimpinan Formal Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, struktur kepemimpinan formal desa terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih maksimal tiga kali masa jabatan.

Kewenangan kepala desa meliputi:

- Menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk administrasi kependudukan dan pelayanan publik.
- Melaksanakan pembangunan desa, baik fisik maupun non-fisik.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Memberdayakan masyarakat desa.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga desa dan pihak lain.
- Mengelola keuangan dan aset desa.
- Menetapkan peraturan desa bersama BPD.

Kepala desa juga berperan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana desa yang jumlahnya signifikan. Ini membuat posisi kepala desa sangat strategis sekaligus rawan konflik.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Mereka diangkat oleh kepala desa setelah melalui proses seleksi. Perangkat desa terdiri dari:

- **Sekretaris Desa (Sekdes)**. Membantu kepala desa dalam urusan administrasi dan kesekretariatan. Sekdes memimpin sekretariat desa yang mengurus surat-menyurat, kearsipan, dan administrasi umum.

- **Kepala Urusan (Kaur)**. Membantu kepala desa dalam urusan tertentu. Biasanya ada Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- **Kepala Dusun (Kadus)**. Membantu kepala desa dalam wilayah dusun masing-masing. Kadus adalah perangkat desa yang paling dekat dengan warga, karena mereka tinggal di dusun dan berinteraksi langsung dengan warga sehari-hari.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra kerja kepala desa. Anggota BPD dipilih dari warga desa melalui musyawarah. Kewenangan BPD meliputi:

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

BPD berperan penting dalam menjaga checks and balances di tingkat desa. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kapasitas anggotanya dan dinamika politik lokal.

2. Karakteristik Kepemimpinan Formal

Kepemimpinan formal di desa memiliki beberapa karakteristik:

Pertama, **berbasis aturan**. Kekuasaan kepala desa dan perangkatnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ada batasan-batasan formal tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada mekanisme pertanggungjawaban.

Kedua, **memiliki legitimasi legal-rasional**. Warga mematuhi kepala desa karena ia adalah pejabat yang sah menurut hukum. Kepala desa dipilih dalam proses demokratis dan memiliki surat keputusan pengangkatan.

Ketiga, **memiliki kewenangan formal**. Kepala desa berwenang mengeluarkan surat keputusan, menandatangani surat-surat resmi, mengelola anggaran, dan mengambil keputusan yang mengikat warga.

Keempat, **memiliki tanggung jawab administratif**. Kepala desa bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan—kependudukan, keuangan, pembangunan. Ada laporan yang harus dibuat, ada aturan yang harus diikuti.

Kelima, **memiliki masa jabatan terbatas**. Kepala desa menjabat selama 6 tahun dan bisa dipilih ulang maksimal tiga kali. Ini berbeda dengan pemimpin informal yang bisa memegang pengaruh seumur hidup.

Keenam, **terikat pada wilayah administratif**. Kewenangan kepala desa terbatas pada wilayah desa tertentu. Ia tidak bisa memerintah di luar wilayahnya.

3. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Formal

Kepemimpinan formal memiliki peran dan fungsi yang jelas:

- **Sebagai administrator**. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi kependudukan.

- **Sebagai pembangun**. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik dan non-fisik.
- **Sebagai pengelola keuangan**. Mengelola anggaran desa (APBDes) dan dana desa dari pusat.
- **Sebagai pengayom masyarakat**. Menjaga ketenteraman dan ketertiban, menyelesaikan masalah sosial.
- **Sebagai pemersatu**. Menjaga kerukunan antar warga, antar kelompok, dan antar lembaga.
- **Sebagai koordinator**. Mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
- **Sebagai representasi desa**. Mewakili desa dalam hubungan dengan pihak luar—pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, maupun swasta.

4. Tantangan Kepemimpinan Formal

Kepemimpinan formal di desa menghadapi berbagai tantangan:

Keterbatasan kapasitas. Tidak semua kepala desa memiliki kapasitas memadai untuk mengelola pemerintahan, apalagi dengan kompleksitas UU Desa dan dana desa. Pendidikan yang rendah, pengalaman terbatas, dan kurangnya pelatihan menjadi kendala.

Konflik kepentingan. Kepala desa bisa saja mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok pendukungnya. Ini bisa memicu konflik dan tudingan korupsi.

Tekanan politik. Kepala desa harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan—pendukungnya di Pilkades, kelompok oposisi, BPD, tokoh masyarakat, dan pemerintah di atasnya.

Beban administrasi. Pengelolaan dana desa membutuhkan administrasi yang rumit dan rapi. Banyak kepala desa yang kesulitan memenuhi tuntutan administratif ini.

Ekspektasi masyarakat. Masyarakat sering memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepala desa. Mereka diharapkan bisa menyelesaikan semua masalah, memberikan bantuan, dan membangun infrastruktur. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, kekecewaan muncul.

D. KEPEMIMPINAN INFORMAL DI DESA

Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang tidak melekat pada jabatan formal, tetapi pada pengaruh pribadi seseorang. Pemimpin informal tidak diangkat atau dipilih secara formal, tetapi diakui oleh masyarakat karena kualitas pribadi mereka.

1. Sumber Legitimasi Kepemimpinan Informal

Pemimpin informal memperoleh legitimasi dari berbagai sumber:

a. Kharisma

Kharisma adalah kualitas pribadi yang dianggap luar biasa—daya tarik, kemampuan bicara, kewibawaan, atau bahkan kesaktian. Orang dengan kharisma tinggi mampu memengaruhi orang lain hanya dengan kehadiran atau ucapannya. Mereka dianggap memiliki "sesuatu" yang membuat orang segan dan patuh.

Di desa, pemimpin karismatik bisa berupa kyai yang dianggap memiliki barokah, dukun yang dianggap sakti, atau orang tua yang dianggap memiliki "pamali" (kekuatan gaib). Pengikut mereka loyal dan patuh, sering tanpa mempertanyakan.

b. Pengetahuan dan Keahlian

Seseorang bisa menjadi pemimpin informal karena pengetahuannya yang luas atau keahliannya yang tinggi. Kyai yang menguasai ilmu agama, guru yang berpendidikan tinggi, petani yang berhasil dengan inovasinya, atau pengrajin yang mahir—mereka dihormati dan didengar pendapatnya dalam bidang masing-masing.

Pengetahuan ini tidak harus formal. Pengetahuan adat yang mendalam, pengetahuan tentang tanda-tanda alam, atau pengalaman panjang dalam hidup juga menjadi sumber legitimasi.

c. Keturunan dan Tradisi

Di banyak desa, keturunan tokoh masyarakat atau bangsawan masih dihormati. Mereka mewarisi legitimasi tradisional dari leluhurnya. Meskipun tidak menjabat secara formal, pendapat mereka didengar, dan mereka sering dimintai nasihat dalam berbagai persoalan.

d. Kebaikan dan Pengabdian

Seseorang yang dikenal baik hati, suka menolong, dan mengabdi pada masyarakat bisa menjadi pemimpin informal. Mereka mungkin tidak pintar bicara, tidak punya ilmu tinggi, dan bukan keturunan siapa-siapa. Tetapi karena kebaikannya, orang segan dan hormat. Ketika mereka berbicara, orang mendengar.

e. Usia dan Pengalaman

Di desa, usia dan pengalaman masih dihormati. Orang tua dianggap lebih bijaksana karena telah melalui banyak hal. Nasihat mereka dicari dalam berbagai persoalan. Mereka menjadi pemimpin informal, setidaknya dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat.

2. Tokoh-Tokoh Kepemimpinan Informal di Desa

a. Kyai atau Ulama

Di desa-desa yang mayoritas Muslim, kyai atau ulama adalah tokoh informal yang sangat berpengaruh. Mereka tidak hanya mengajar agama, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai persoalan—sosial, politik, bahkan ekonomi. Kyai memiliki jaringan luas, pesantren sebagai basis kekuasaan, dan santri sebagai pengikut setia.

Pengaruh kyai bisa melampaui batas desa. Kyai terkenal bisa memiliki pengikut dari berbagai desa, bahkan dari luar kabupaten. Dalam Pilkades, dukungan kyai sering diperebutkan calon. Dalam pemilu legislatif atau pilkada, para politisi berebut "restu" kyai.

b. Tetua Adat

Di desa-desa yang masih kuat memegang adat, tetua adat memiliki pengaruh besar. Mereka adalah penjaga hukum adat, pemimpin upacara adat, dan mediator dalam sengketa adat. Di Bali, ada bendesa adat. Di Minangkabau, ada penghulu. Di Batak, ada raja adat. Di Toraja, ada to parenge'.

Tetua adat tidak dipilih dalam pemilu, tetapi diangkat berdasarkan garis keturunan atau musyawarah adat. Mereka memiliki legitimasi tradisional yang kuat. Dalam urusan yang menyangkut adat—tanah ulayat, perkawinan adat, warisan—kata mereka adalah hukum.

c. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang disegani karena berbagai alasan—mantan kepala desa, pensiunan pejabat, pengusaha sukses, atau sekadar orang tua yang bijaksana. Mereka tidak memiliki jabatan formal, tetapi pengalaman, pengetahuan, atau keberhasilan mereka membuat orang menghormati dan mendengar pendapatnya.

Tokoh masyarakat sering menjadi penengah dalam konflik, menjadi penasihat bagi kepala desa, dan menjadi panutan bagi warga. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat.

d. Tokoh Agama Lain

Di desa dengan penduduk non-Muslim, tokoh agama lain juga memiliki pengaruh besar—pendeta, pastor, pemangku. Mereka adalah pemimpin spiritual sekaligus panutan sosial. Dalam masyarakat yang religius, pengaruh tokoh agama sangat besar.

e. Pemimpin Opini

Di era digital, muncul pemimpin opini baru—mereka yang aktif di media sosial, YouTube, atau grup WhatsApp. Mereka mungkin tidak memiliki legitimasi tradisional, tetapi kemampuan mereka memengaruhi opini publik melalui media digital membuat mereka berpengaruh.

3. Karakteristik Kepemimpinan Informal

Kepemimpinan informal memiliki karakteristik yang berbeda dengan kepemimpinan formal:

Pertama, **tidak berbasis jabatan**. Pengaruh pemimpin informal melekat pada pribadi, bukan pada jabatan. Jika mereka tidak lagi memiliki pengaruh, mereka kehilangan status kepemimpinan.

Kedua, **tidak terikat aturan formal**. Pemimpin informal tidak memiliki uraian tugas, tidak terikat aturan administratif, dan tidak harus membuat laporan pertanggungjawaban.

Ketiga, **memiliki pengaruh yang bersifat moral dan psikologis**. Orang mematuhi pemimpin informal bukan karena takut sanksi, tetapi karena hormat, segan, atau percaya.

Keempat, **tidak memiliki masa jabatan**. Pengaruh pemimpin informal bisa bertahan seumur hidup, bahkan bisa diwariskan (dalam kasus keturunan).

Kelima, **tidak terikat wilayah**. Pengaruh kyai bisa melampaui batas desa. Pengaruh tokoh masyarakat mungkin terbatas pada lingkungannya.

Keenam, **legitimasi berasal dari masyarakat, bukan negara**. Pemimpin informal diakui karena masyarakat mengakuinya, bukan karena surat keputusan.

4. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal

Kepemimpinan informal memiliki peran yang sangat penting:

Pertama, **sebagai panutan**. Pemimpin informal menjadi contoh dalam perilaku, sikap, dan nilai. Masyarakat meniru mereka—dalam beribadah, bertetangga, atau berusaha.

Kedua, **sebagai penjaga nilai dan norma**. Pemimpin informal menjaga agar nilai-nilai luhur dan norma-norma masyarakat tetap terpelihara. Mereka mengingatkan, menegur, dan memberi nasihat.

Ketiga, **sebagai mediator dan penengah**. Dalam konflik, pemimpin informal sering menjadi penengah yang efektif karena mereka dipercaya kedua belah pihak. Kyai mendamaikan keluarga yang bertikai. Tetua adat menyelesaikan sengketa tanah.

Keempat, **sebagai penyalur aspirasi**. Pemimpin informal menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa atau pihak lain. Mereka menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa.

Kelima, **sebagai mobilisator**. Pemimpin informal mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan—gotong royong, pembangunan, atau kegiatan sosial. Pengaruh mereka sangat efektif untuk mobilisasi.

Keenam, **sebagai pengawas sosial**. Pemimpin informal mengawasi perilaku masyarakat, menegur yang melanggar, dan melaporkan masalah kepada pihak berwenang jika perlu.

E. INTERAKSI ANTARA KEPEMIMPINAN FORMAL DAN INFORMAL

Dua tipe kepemimpinan ini—formal dan informal—tidak hidup dalam dunia terpisah. Mereka berinteraksi dalam berbagai pola, kadang sinergis, kadang kompetitif, kadang konfliktual.

1. Pola-Pola Interaksi

a. Pola Sinergis

Dalam pola ini, pemimpin formal dan informal bekerja sama secara harmonis. Mereka saling mendukung, saling melengkapi, dan bersama-sama menggerakkan pembangunan desa.

Bentuk sinergi:

- **Konsultasi**. Kepala desa secara rutin berkonsultasi dengan tokoh informal—kyai, tetua adat, tokoh masyarakat—sebelum mengambil keputusan penting. Ini memberikan legitimasi sosial pada kebijakan.
- **Dukungan**. Tokoh informal mendukung program-program kepala desa. Mereka mengajak warga untuk berpartisipasi, misalnya dalam gotong royong atau musyawarah.
- **Kolaborasi**. Pemerintah desa dan tokoh informal bersama-sama mengelola kegiatan—pembangunan masjid, pelestarian adat, penanganan konflik.
- **Pembagian peran**. Pemimpin formal mengurus administrasi dan pembangunan fisik, pemimpin informal mengurus pembinaan moral dan sosial. Keduanya berjalan beriringan.

Pola sinergis terjadi jika ada saling pengertian dan kepercayaan. Pemimpin formal tidak merasa terancam oleh pengaruh tokoh informal. Tokoh informal tidak merasa tersisih oleh pemimpin formal.

b. Pola Kompetitif

Dalam pola ini, pemimpin formal dan informal bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan masyarakat. Mereka mungkin memiliki visi yang berbeda, atau sama-sama ingin menjadi pusat perhatian.

Bentuk kompetisi:

- **Perebutan pengaruh**. Tokoh informal mungkin merasa pengaruhnya tergeser oleh kepala desa yang populer. Kepala desa mungkin merasa saingan dengan kyai yang memiliki banyak pengikut.
- **Perbedaan dukungan dalam Pilkades**. Tokoh informal mungkin mendukung calon yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan antara pendukung yang berbeda.
- **Kritik dan oposisi**. Tokoh informal bisa menjadi pengkritik kebijakan kepala desa. Mereka menyuarakan ketidakpuasan masyarakat dan menjadi oposisi informal.
- **Menggalang dukungan**. Masing-masing pihak berusaha menggalang dukungan masyarakat untuk memperkuat posisinya.

Pola kompetitif tidak selalu buruk. Kompetisi yang sehat bisa mendorong kedua pihak untuk bekerja lebih baik. Namun, jika berlebihan, bisa memicu konflik.

c. Pola Konfliktual

Dalam pola ini, terjadi konflik terbuka antara pemimpin formal dan informal. Ketegangan memuncak, hubungan memburuk, dan masyarakat bisa terbelah.

Penyebab konflik:

- **Kebijakan kontroversial**. Kepala desa mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijaga tokoh informal. Misalnya, kebijakan yang mengabaikan adat atau merugikan kelompok tertentu.
- **Persaingan sumber daya**. Perebutan sumber daya—tanah, bantuan, proyek—bisa memicu konflik.
- **Penghinaan atau pelecehan**. Salah satu pihak merasa dihina atau dilecehkan. Ini bisa memicu konflik pribadi yang meluas.
- **Provokasi**. Ada pihak ketiga yang memprovokasi agar konflik terjadi untuk kepentingan tertentu.

Konflik antara pemimpin formal dan informal bisa sangat merusak. Masyarakat bisa terbelah menjadi dua kubu. Pembangunan macet. Rasa saling curiga menguat.

d. Pola Independen

Dalam pola ini, pemimpin formal dan informal berjalan sendiri-sendiri, tidak banyak berinteraksi, juga tidak berkonflik. Masing-masing menjalankan perannya tanpa banyak campur tangan dari yang lain.

Pola ini bisa terjadi jika wilayah pengaruh mereka relatif terpisah. Pemimpin formal fokus pada urusan pemerintahan, pemimpin informal fokus pada urusan agama atau adat. Mereka tidak banyak bersinggungan.

Pola independen bisa berjalan baik selama tidak ada masalah yang memerlukan kerjasama. Namun, ketika ada masalah besar yang membutuhkan sinergi, ketiadaan komunikasi bisa menjadi kendala.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interaksi

Beberapa faktor mempengaruhi bagaimana interaksi antara pemimpin formal dan informal berlangsung:

a. Kepribadian Pemimpin

Kepribadian masing-masing pemimpin sangat menentukan. Pemimpin formal yang rendah hati, mau mendengar, dan menghormati tokoh informal akan lebih mudah membangun sinergi. Sebaliknya, pemimpin yang arogan dan merasa paling benar akan mudah berselisih.

Tokoh informal yang bijaksana, tidak ikut campur dalam urusan yang bukan wewenangnya, dan mendukung program positif akan memudahkan sinergi. Sebaliknya, tokoh informal yang suka mengatur, merasa paling berkuasa, atau sering mengkritik tanpa dasar akan memicu ketegangan.

b. Kultur Politik Lokal

Setiap desa memiliki kultur politik yang berbeda. Ada desa yang terbiasa dengan kepemimpinan kolektif dan musyawarah, sehingga sinergi lebih mudah. Ada desa yang terbiasa dengan persaingan keras, sehingga konflik lebih mungkin terjadi.

Kultur yang menghargai tokoh informal dan mengakui peran mereka akan memudahkan kerjasama. Kultur yang terlalu menekankan pada formalitas bisa mengabaikan tokoh informal dan memicu resistensi.

c. Isu dan Kepentingan

Isu yang dihadapi juga mempengaruhi interaksi. Isu yang menyangkut kepentingan bersama—bencana alam, ancaman keamanan, atau pembangunan besar—bisa mendorong sinergi. Isu yang menyangkut perbedaan nilai—misalnya tentang adat dan agama—bisa memicu konflik.

d. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat menjadi faktor penting. Jika masyarakat mendukung sinergi, mereka akan mendorong kedua pihak untuk bekerja sama. Jika masyarakat terbelah, mereka bisa memperkuat polarisasi.

e. Intervensi Pihak Luar

Pihak luar—pemerintah kecamatan/kabupaten, partai politik, LSM—bisa mempengaruhi interaksi. Mereka bisa menjadi mediator yang mendorong sinergi, atau bisa menjadi provokator yang memperburuk konflik.

3. Studi Kasus: Dinamika Interaksi Kepemimpinan

Kasus 1: Sinergi di Desa X

Desa X dipimpin oleh Kepala Desa Pak Ahmad, seorang mantan guru yang rendah hati dan suka bermusyawarah. Di desa itu juga tinggal Kyai Anwar, seorang ulama kharismatik yang memiliki pesantren besar.

Sejak awal menjabat, Pak Ahmad rutin bersilaturahmi ke pesantren Kyai Anwar. Ia meminta nasihat dan dukungan. Kyai Anwar merasa dihormati dan mendukung program-program Pak Ahmad. Ketika Pak Ahmad menggalang dana untuk pembangunan madrasah, Kyai Anwar menggerakkan santri dan masyarakat untuk berpartisipasi. Ketika Kyai Anwar mengadakan pengajian akbar, Pak Ahmad datang dan memberikan sambutan.

Sinergi ini membawa berkah bagi desa. Pembangunan berjalan lancar, masyarakat rukun, dan konflik dapat diselesaikan dengan mudah. Pak Ahmad terpilih lagi untuk dua periode berikutnya dengan dukungan luas, termasuk dari santri dan pengikut Kyai Anwar.

Kasus 2: Ketegangan di Desa Y

Desa Y dipimpin oleh Kepala Desa Budi, seorang pengusaha sukses yang merasa pintar dan tidak suka diatur. Ia jarang bersilaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Ketika ada program pembangunan, ia memutuskan sendiri tanpa musyawarah.

Di desa itu ada Mbah Karto, seorang tetua adat yang dihormati. Mbah Karto merasa tidak dihormati karena tidak pernah diajak bicara. Ia mulai mengkritik kebijakan Pak Budi di forum-forum pertemuan. Pak Budi tersinggung dan membalas dengan pernyataan yang meremehkan.

Ketegangan memuncak saat Pilkades berikutnya. Mbah Karto mendukung calon lain. Konflik mempolarisasi masyarakat. Pembangunan macet, gotong royong sepi, dan permusuhan antar pendukung terjadi. Butuh waktu lama untuk memulihkan kerukunan setelah Pilkades usai.

F. SINERGI KEPEMIMPINAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Mengingat pentingnya peran kedua tipe kepemimpinan, sinergi antara pemimpin formal dan informal menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

1. Pentingnya Sinergi

Sinergi kepemimpinan penting karena:

Pertama, **me lengkapi kekurangan masing-masing**. Pemimpin formal memiliki kewenangan dan akses sumber daya, tetapi mungkin kurang memiliki pengaruh moral dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Pemimpin informal memiliki pengaruh moral dan kedekatan, tetapi tidak memiliki kewenangan formal. Sinergi menggabungkan kekuatan keduanya.

Kedua, **memperkuat legitimasi kebijakan**. Kebijakan yang mendapat dukungan tokoh informal lebih mudah diterima masyarakat. Mereka bisa menjelaskan dan membela kebijakan, mengurangi resistensi.

Ketiga, **memudahkan mobilisasi**. Dengan dukungan tokoh informal, mobilisasi masyarakat untuk berbagai kegiatan (gotong royong, musyawarah, partisipasi) menjadi lebih mudah. Tokoh informal bisa menggerakkan pengikutnya.

Keempat, **mencegah dan menyelesaikan konflik**. Sinergi menciptakan komunikasi yang baik. Potensi konflik bisa dideteksi dini. Jika konflik terjadi, penyelesaian lebih mudah karena ada saling percaya.

Kelima, **menjaga keberlanjutan**. Sinergi menciptakan stabilitas. Program-program pembangunan bisa berkelanjutan karena didukung semua pihak, tidak tergantung pada satu figur saja.

2. Membangun Sinergi

Bagaimana membangun sinergi antara pemimpin formal dan informal?

a. Komunikasi dan Silaturahmi

Langkah pertama adalah komunikasi. Pemimpin formal perlu aktif bersilaturahmi dengan tokoh informal—berkunjung ke rumah, hadir di acara-acara mereka, dan membuka saluran komunikasi. Silaturahmi membangun kedekatan pribadi dan kepercayaan.

Pemimpin informal juga perlu terbuka terhadap komunikasi. Mereka perlu menyampaikan aspirasi dan masukan secara konstruktif, tidak hanya mengkritik dari luar.

b. Musyawarah dan Konsultasi

Pemimpin formal perlu melibatkan tokoh informal dalam musyawarah desa dan konsultasi sebelum mengambil keputusan penting. Ini bukan hanya soal mencari masukan, tetapi juga soal menghormati dan mengakui peran mereka.

Tokoh informal perlu bersedia hadir dalam forum-forum musyawarah dan memberikan kontribusi positif.

c. Saling Menghormati Peran

Pemimpin formal perlu menghormati peran tokoh informal. Tidak perlu merasa terancam oleh pengaruh mereka. Sebaliknya, anggap mereka sebagai mitra dalam pembangunan.

Pemimpin informal perlu menghormati kewenangan formal pemimpin desa. Tidak perlu ikut campur dalam urusan yang bukan wewenangnya. Dukung kebijakan yang baik, kritik yang buruk dengan cara yang santun.

d. Kolaborasi dalam Program

Pemimpin formal dan informal perlu berkolaborasi dalam program-program tertentu. Misalnya, dalam program pemberdayaan perempuan, kepala desa bisa bekerja sama dengan ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh istri tokoh informal. Dalam program pembangunan masjid, bisa kolaborasi dengan kyai.

Kolaborasi membangun pengalaman bekerja bersama dan memperkuat ikatan.

e. Penyelesaian Konflik secara Bersama

Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, selesaikan secara musyawarah. Libatkan pihak ketiga yang netral jika perlu. Jangan biarkan konflik berlarut.

3. Peran Masyarakat dalam Mendukung Sinergi

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung sinergi kepemimpinan:

- **Tidak mudah terprovokasi**. Jangan mudah percaya pada isu atau fitnah yang memecah belah pemimpin.
- **Mendukung yang baik dari kedua pihak**. Dukung kebijakan baik siapa pun yang mencetuskan, tanpa melihat siapa pemimpinnya.
- **Mendorong dialog**. Jika melihat ketegangan, dorong kedua pihak untuk berdialog.
- **Menjadi penengah**. Tokoh masyarakat bisa menjadi penengah jika konflik terjadi.

G. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI DESA

Di tengah berbagai tantangan, desa membutuhkan tipe kepemimpinan yang tidak hanya mengelola rutinitas, tetapi juga mampu mentransformasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Konsep kepemimpinan transformasional relevan untuk konteks ini.

1. Pengertian Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama, dan mampu membangkitkan kesadaran pengikut tentang pentingnya hasil yang diinginkan serta cara-cara baru untuk mencapainya.

Karakteristik pemimpin transformasional:

- **Memiliki visi yang jelas**. Mereka tahu ke mana masyarakat harus diarahkan dan mampu mengomunikasikan visi itu dengan inspiratif.
- **Menjadi teladan**. Mereka tidak hanya bicara, tetapi juga memberi contoh. Perilaku mereka konsisten dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan.
- **Memotivasi dan menginspirasi**. Mereka mampu membangkitkan semangat dan optimisme. Mereka membuat orang percaya bahwa perubahan mungkin dilakukan.
- **Memperhatikan individu**. Mereka peduli pada kebutuhan dan perkembangan masing-masing pengikut. Mereka mendengarkan, memberi perhatian, dan membantu.
- **Mendorong kreativitas**. Mereka mendorong pengikut untuk berpikir kreatif, mencari cara-cara baru, dan tidak takut mencoba.

2. Relevansi untuk Desa

Kepemimpinan transformasional sangat relevan untuk desa yang ingin maju dan mandiri:

- **Mengubah mindset**. Banyak masalah desa berakar pada mindset—pasrah, tergantung, takut berubah. Pemimpin transformasional mampu mengubah mindset ini.

- **Membangun visi bersama**. Mereka mampu merumuskan visi pembangunan desa bersama masyarakat, sehingga semua pihak merasa memiliki dan bergerak ke arah yang sama.
- **Menggerakkan partisipasi**. Mereka menginspirasi warga untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya menjadi penonton.
- **Membangun kapasitas**. Mereka mendorong pengembangan kapasitas warga—pendidikan, keterampilan, keberanian—agar mampu mandiri.
- **Menciptakan inovasi**. Mereka mendorong warga untuk berinovasi, mencari peluang baru, tidak terjebak pada cara-cara lama.

3. Contoh Pemimpin Transformasional di Desa

Pak Wiyono di Desa Pentingsari. Pak Wiyono, tokoh masyarakat di Desa Pentingsari, Yogyakarta, adalah contoh pemimpin transformasional. Ia memiliki visi mengubah desa pertanian biasa menjadi desa wisata yang maju. Ia tidak hanya bicara, tetapi juga memberi contoh dengan mengubah rumahnya menjadi homestay. Ia memotivasi warga untuk ikut, mendampingi mereka, dan mendorong kreativitas. Hasilnya, Pentingsari menjadi desa wisata terkenal yang memberdayakan seluruh warga.

Kyai Ahmad di Desa X. Di sebuah desa di Jawa Timur, Kyai Ahmad mentransformasi pesantrennya tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi. Ia mendirikan koperasi, melatih santri berwirausaha, dan mengembangkan usaha bersama. Pengaruhnya menginspirasi banyak desa di sekitarnya untuk melakukan hal serupa.

H. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI DESA

Peran perempuan dalam kepemimpinan desa semakin penting, meskipun masih banyak hambatan.

1. Kondisi Kepemimpinan Perempuan

Secara formal, perempuan bisa menjadi kepala desa. Undang-Undang Desa tidak membedakan gender. Namun, realitasnya, kepala desa perempuan masih sangat sedikit. Hambatan budaya, stereotip gender, dan kurangnya dukungan menjadi penyebab.

Di tingkat informal, peran perempuan lebih terlihat. Ibu-ibu PKK, pengajian, atau arisan sering dipimpin oleh perempuan. Mereka memiliki pengaruh dalam lingkupnya. Ibu-ibu bisa memengaruhi keputusan keluarga, termasuk pilihan politik.

2. Potensi dan Tantangan

Perempuan memiliki potensi besar dalam kepemimpinan:

- **Kedekatan dengan isu-isu keseharian**—kesehatan, pendidikan anak, gizi, lingkungan. Isu-isu ini penting dalam pembangunan.
- **Kemampuan membangun konsensus**. Perempuan umumnya lebih sabar, lebih suka musyawarah, dan lebih mampu membangun konsensus.

- **Integritas**. Studi menunjukkan perempuan cenderung lebih jujur dan kurang korup dalam mengelola keuangan publik.

Namun, tantangannya besar:

- **Budaya patriarki**. Masyarakat masih memandang pemimpin adalah laki-laki. Perempuan dianggap kurang cocok menjadi pemimpin.
- **Beban ganda**. Perempuan masih memikul beban domestik yang besar, sehingga sulit berkarier di publik.
- **Kurangnya dukungan**. Partai politik, tokoh masyarakat, dan keluarga sering kurang mendukung kepemimpinan perempuan.

3. Mendorong Kepemimpinan Perempuan

Beberapa langkah untuk mendorong kepemimpinan perempuan:

- **Pendidikan dan pelatihan**. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
- **Afirmasi**. Memberikan kuota atau dukungan khusus bagi perempuan dalam politik desa.
- **Pendampingan**. Memberikan pendampingan bagi calon pemimpin perempuan.
- **Mengubah mindset**. Melalui sosialisasi dan pendidikan, mengubah pandangan masyarakat tentang kepemimpinan perempuan.

I. MASA DEPAN KEPEMIMPINAN DESA

Kepemimpinan desa akan terus berkembang seiring perubahan sosial. Beberapa tren yang mungkin terjadi:

1. Profesionalisasi

Tuntutan akan profesionalisme semakin besar. Kepala desa dan perangkatnya dituntut memiliki kompetensi—manajerial, administratif, teknis. Pendidikan dan pelatihan menjadi penting. Ke depan, mungkin akan ada standar kompetensi yang lebih ketat.

2. Demokratisasi

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pengawasan pemimpin semakin kuat. Pilkades akan semakin kompetitif. Masyarakat semakin kritis. Pemimpin yang tidak berkinerja akan mudah diganti.

3. Digitalisasi

Teknologi akan mempengaruhi kepemimpinan. Pemimpin harus melek digital. Pelayanan publik online, media sosial untuk komunikasi, dan data digital untuk perencanaan akan menjadi standar.

4. Sinergi Formal-Informal

Sinergi antara pemimpin formal dan informal akan semakin penting. Kompleksitas masalah desa tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemimpin formal. Dukungan tokoh informal menjadi kunci.

5. Kepemimpinan Kolektif

Mungkin akan bergeser dari kepemimpinan individual ke kepemimpinan kolektif—tim kepemimpinan yang terdiri dari berbagai unsur: pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan. Mereka bersama-sama merumuskan visi dan menggerakkan pembangunan.

J. RANGKUMAN

Kepemimpinan sosial di desa memiliki karakteristik unik karena adanya dualisme antara kepemimpinan formal dan informal.

Kepemimpinan formal melekat pada jabatan dalam struktur pemerintahan desa: Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD. Mereka memiliki legitimasi legal-rasional, kewenangan formal, dan tanggung jawab administratif. Peran mereka meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan. Tantangannya meliputi keterbatasan kapasitas, konflik kepentingan, tekanan politik, dan ekspektasi masyarakat.

Kepemimpinan informal melekat pada pribadi tokoh-tokoh yang disegani: kyai, tetua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mereka memperoleh legitimasi dari kharisma, pengetahuan, keturunan, kebaikan, atau usia. Peran mereka sebagai panutan, penjaga nilai, mediator, penyalur aspirasi, mobilisator, dan pengawas sosial. Pengaruh mereka sering melampaui batas administratif.

Dua tipe kepemimpinan ini berinteraksi dalam berbagai pola: sinergis (saling mendukung), kompetitif (bersaing), konfliktual (berkonflik), atau independen (berjalan sendiri). Interaksi dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin, kultur politik lokal, isu dan kepentingan, dukungan masyarakat, dan intervensi pihak luar.

Sinergi antara pemimpin formal dan informal sangat penting untuk pembangunan desa. Sinergi melengkapi kekurangan masing-masing, memperkuat legitimasi kebijakan, memudahkan mobilisasi, mencegah konflik, dan menjaga keberlanjutan. Sinergi dibangun melalui komunikasi, musyawarah, saling menghormati, kolaborasi, dan penyelesaian konflik bersama.

Kepemimpinan transformasional—yang menginspirasi, memberi teladan, memotivasi, dan mendorong kreativitas—sangat relevan untuk mentransformasi desa. Kepemimpinan perempuan juga perlu didorong meskipun menghadapi banyak tantangan.

Masa depan kepemimpinan desa akan ditandai oleh profesionalisasi, demokratisasi, digitalisasi, sinergi formal-informal, dan mungkin bergeser ke kepemimpinan kolektif. Dengan sinergi yang baik antara pemimpin formal dan informal, desa dapat menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

K. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Siapa saja pemimpin informal di desa Anda? Apa yang membuat mereka berpengaruh? Bagaimana hubungan mereka dengan pemimpin formal (kepala desa dan perangkat)?
2. Bagaimana pola interaksi antara pemimpin formal dan informal di desa Anda? Apakah lebih banyak sinergis, kompetitif, atau konfliktual? Berikan contoh!
3. Pernahkah terjadi konflik antara pemimpin formal dan informal di desa Anda? Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya?
4. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan kepala desa agar dapat membangun sinergi dengan tokoh-tokoh informal?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi pemimpin informal di era modern? Bagaimana mereka bisa tetap relevan?
6. Bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan di desa Anda? Apakah ada tokoh perempuan yang berpengaruh? Mengapa jumlah kepala desa perempuan masih sedikit?
7. Menurut Anda, tipe pemimpin seperti apa yang dibutuhkan desa Anda saat ini? Pemimpin yang seperti apa yang bisa membawa perubahan?
8. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kepemimpinan di desa? Apakah ada pemimpin opini baru yang muncul dari media sosial?

BAB X

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM DINAMIKA SOSIAL

A. PENGANTAR: DESA DALAM ARUS BARU OTONOMI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lanskap pemerintahan desa di Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa diberikan otonomi yang lebih luas, kewenangan yang lebih jelas, dan—yang paling signifikan—sumber keuangan yang jauh lebih besar melalui Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewenangan, kelembagaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa .

Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi pemerintah desa. Jika sebelumnya pemerintah desa lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program-program yang sudah dirancang dari atas, kini pemerintah desa dituntut untuk mampu menjadi inisiator, perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pembangunan di wilayahnya. Pemerintah desa—yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya—harus mampu menjalankan empat fungsi utama: tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat .

Bab ini akan mengupas secara mendalam peran pemerintah desa dalam dinamika sosial dan pembangunan desa. Kita akan memulai dengan memahami landasan hukum dan struktur kelembagaan pemerintah desa,

kemudian menelusuri bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi-fungsinya—mulai dari perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa yang partisipatif, implementasi kebijakan termasuk pengelolaan Dana Desa, hingga pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, potensi konflik kepentingan, dan risiko korupsi, serta strategi untuk mengatasinya.

B. LANDASAN HUKUM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

1. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia didasarkan pada seperangkat regulasi yang komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur tentang desa secara umum, tetapi juga memberikan pedoman teknis dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa .

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU ini adalah dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia mengatur filosofi, asas, kewenangan, kelembagaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat desa .

b. Peraturan Pemerintah (PP)

Beberapa PP yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

- **PP No. 43 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang memuat tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan, serta kewenangan desa.
- **PP No. 60 Tahun 2014** tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, mengatur mekanisme penyaluran, penggunaan, hingga pengawasan Dana Desa.
- **PP No. 11 Tahun 2019** sebagai perubahan atas PP 43/2014, yang menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa .

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Permendagri memberikan pedoman teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- **Permendagri No. 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- **Permendagri No. 110 Tahun 2016** tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mengatur tata kerja dan fungsi BPD.
- Permendagri tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi standar minimal pelayanan dasar di desa/kelurahan .

d. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendes PDTT)

Permendes PDTT mengatur aspek-aspek yang lebih spesifik, seperti:

- **Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa** yang ditetapkan setiap tahun, menentukan arah penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan nasional dan lokal.
- **Permendes tentang BUMDes dan BUMDes Bersama**, memberikan pedoman pembentukan, pengelolaan, dan penguatan ekonomi desa.
- **Permendes tentang Indeks Desa Membangun (IDM)**, yang menjadi indikator penilaian perkembangan desa (desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal) .

e. Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) juga menerbitkan peraturan daerah yang mengatur desa di wilayahnya. Di tingkat paling bawah, desa memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur berbagai aspek kehidupan desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan lokal.

2. Struktur Kelembagaan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga di tingkat desa, yaitu: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Dalam bab ini, fokus utama kita adalah pada Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif, meskipun tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan lembaga-lembaga lain.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedudukan ini menempatkan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa .

Pemerintah Desa terdiri dari:

- **Kepala Desa**: Pimpinan pemerintah desa yang dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala desa memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, serta mengendalikan seluruh urusan pemerintahan desa.
- **Perangkat Desa**: Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari :
  - **Unsur staf (Sekretariat Desa)** : dipimpin oleh Sekretaris Desa (Sekdes), bertugas membantu kepala desa dalam urusan administrasi dan kesekretariatan. Sekretariat Desa mengelola surat-menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum lainnya.
  - **Unsur lini (pelaksana teknis lapangan)** : yaitu para Kepala Seksi (Kasi) yang bertugas melaksanakan urusan teknis tertentu, seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan lain-lain.
  - **Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)** : yaitu para Kepala Dusun (Kadus) yang bertugas membantu kepala desa dalam wilayah dusun masing-masing. Kadus adalah perangkat desa yang paling dekat dengan warga karena mereka tinggal di dusun dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sehari-hari.

Dalam struktur Pemerintah Desa, hubungan antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Seksi, dan para Kepala Dusun ditata dalam satu kesatuan komando dan terdapat pembagian kerja yang jelas. Hal ini

penting untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan menciptakan kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa .

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai tiga fungsi utama :

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota BPD dipilih dari warga desa melalui musyawarah, dengan masa jabatan 6 tahun. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, dan kemampuan keuangan desa .

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga ini mempunyai fungsi :

- Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Contoh lembaga kemasyarakatan desa antara lain: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

d. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa .

e. Kerjasama Antar Desa

Kerjasama antar desa dapat meliputi :

- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing.
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa.
- Bidang keamanan dan ketertiban.

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir .

C. FUNGSI DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH DESA

Pemerintah desa memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa. Tugas ini dijabarkan dalam empat fungsi utama: tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat .

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Fungsi pertama pemerintah desa adalah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup berbagai aspek administrasi dan pelayanan publik.

a. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemerintah desa bertanggung jawab mengelola data kependudukan warganya. Mulai dari pendaftaran penduduk baru (kelahiran, kedatangan), pencatatan mutasi penduduk (kematian, pindah), hingga penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan surat pindah. Data kependudukan ini menjadi basis penting bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

b. Pelayanan Publik

Pemerintah desa memberikan berbagai pelayanan publik kepada warga, seperti:

- Penerbitan surat keterangan (surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, surat pengantar untuk pembuatan KTP/KK, dan lain-lain).
- Pelayanan perizinan sederhana (izin keramaian, izin usaha mikro, dan lain-lain).
- Pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Pelayanan pengaduan masyarakat.

c. Administrasi Keuangan dan Aset Desa

Pemerintah desa mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), termasuk Dana Desa dari pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten, pendapatan asli desa, dan sumber lain yang sah. Pengelolaan keuangan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 .

Pemerintah desa juga bertanggung jawab mengelola aset desa—tanah kas desa, bangunan, pasar desa, dan aset lainnya. Aset ini harus diinventarisasi, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

d. Administrasi Umum dan Kearsipan

Tertib administrasi adalah fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah desa harus memiliki sistem administrasi dan kearsipan yang rapi—surat-menyurat terdokumentasi, keputusan-keputusan tercatat, dan laporan-laporan tersimpan dengan baik. Ini penting tidak hanya untuk kelancaran administrasi sehari-hari, tetapi juga untuk akuntabilitas dan keperluan audit.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Fungsi kedua pemerintah desa adalah melaksanakan pembangunan desa, baik pembangunan fisik (infrastruktur) maupun non-fisik (sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya).

a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pembangunan desa harus direncanakan secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah desa. Proses perencanaan ini dimulai dari tingkat paling bawah:

- **Musyawarah Dusun (Musdus)** : Di setiap dusun, warga berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan untuk wilayahnya . Tahapan Musdus meliputi undangan kepada pihak terkait, daftar hadir, notulensi, dokumentasi, dan usulan kegiatan prioritas pembangunan .
- **Musyawarah Desa (Musdes)** : Usulan dari berbagai dusun kemudian dibawa ke Musdes, forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa. Musdes dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok marjinal. Dalam forum ini, usulan-usulan dibahas, diprioritaskan, dan disepakati untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan desa.
- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)** : Forum ini secara khusus membahas dan menyepakati rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) . Musrenbangdes melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta perwakilan masyarakat lainnya. Pemerintah kecamatan hadir untuk memberikan arahan, pembinaan, serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan .

Dokumen perencanaan desa yang dihasilkan meliputi :

- **RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)** : dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan desa.
- **RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)** : dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDes, memuat program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun anggaran.
- **APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)** : dokumen keuangan tahunan yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

b. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur desa meliputi:

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jembatan, drainase.
- Pembangunan dan pemeliharaan irigasi untuk pertanian.
- Pembangunan fasilitas umum: balai desa, pasar desa, taman, tempat ibadah, lapangan olahraga.
- Pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih.
- Pembangunan sanitasi lingkungan.

Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas, memudahkan akses warga terhadap layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

c. Pembangunan Non-Fisik

Selain infrastruktur fisik, pemerintah desa juga bertanggung jawab atas pembangunan non-fisik:

- **Pembangunan sumber daya manusia**: melalui dukungan terhadap pendidikan (beasiswa, bantuan operasional sekolah), pelatihan keterampilan, dan penyuluhan.
- **Pembangunan kesehatan**: melalui dukungan terhadap Posyandu, Puskesdes (Puskesmas Pembantu), program kesehatan ibu dan anak, dan promosi hidup sehat.
- **Pembangunan ekonomi**: melalui pengembangan BUMDes, fasilitasi UMKM, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- **Pembangunan sosial budaya**: melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan, pelestarian seni dan budaya lokal, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

d. Pemanfaatan Dana Desa

Dana Desa yang mengalir setiap tahun dalam jumlah signifikan (rata-rata miliaran rupiah per desa) adalah instrumen utama pembangunan desa . Pemerintah desa bertanggung jawab mengelola dana ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban .

Penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat setiap tahun, namun tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Untuk tahun 2026, misalnya, Dana Desa lebih difokuskan untuk mendukung program Asta Cita sesuai kewenangan desa, meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim, peningkatan layanan kesehatan dasar, dan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih .

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Fungsi ketiga pemerintah desa adalah membina kehidupan masyarakat agar harmonis, aman, dan tertib.

a. Pembinaan Kerukunan Warga

Pemerintah desa bertanggung jawab menjaga kerukunan antar warga, antar kelompok, dan antar agama. Ini dilakukan melalui:

- Fasilitasi dialog antar kelompok.
- Mediasi dalam konflik.
- Penyelenggaraan kegiatan bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat.
- Pemberian sanksi sosial bagi yang melanggar norma kerukunan.

b. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Pemerintah desa bersama warga bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ini meliputi:

- Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau ronda malam.
- Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan desa (Satkamling, Linmas).

- Koordinasi dengan aparat keamanan (Polsek, Koramil) dalam menjaga keamanan.

c. Pembinaan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya

Pemerintah desa berperan membina nilai-nilai sosial dan budaya yang positif:

- Menjaga dan melestarikan nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas.
- Mendukung kegiatan adat dan budaya lokal.
- Memberikan penghargaan kepada warga yang berprestasi atau berjasa bagi masyarakat.
- Menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui berbagai forum.

d. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah desa membina organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa—RT, RW, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok pengajian, dan lain-lain. Pembinaan ini meliputi:

- Fasilitasi pembentukan organisasi.
- Pendampingan dalam penyusunan program dan kegiatan.
- Bantuan dana atau fasilitas.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi keempat pemerintah desa adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.

a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pemberdayaan dimulai dengan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat. Ini dilakukan melalui:

- Pelatihan-pelatihan keterampilan (menjahit, mengolah hasil pertanian, digital marketing, dll).
- Pendidikan dan penyuluhan (kesehatan, pertanian, keuangan, hukum).
- Pendampingan dalam mengelola usaha atau kegiatan produktif.
- Fasilitasi akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar.

b. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang terorganisir. Pemerintah desa perlu memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada:

- Membantu legalitas dan administrasi organisasi.
- Memfasilitasi penyusunan aturan internal (AD/ART).
- Memberikan pendampingan manajemen organisasi.
- Mendorong regenerasi kepemimpinan.

c. Pengembangan Ekonomi Produktif

Pemberdayaan ekonomi diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ini meliputi:

- Pengembangan BUMDes sebagai motor ekonomi desa.
- Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM (melalui koperasi, bank desa, atau program pemerintah).
- Fasilitasi pemasaran produk-produk desa (offline maupun online).
- Pengembangan potensi ekonomi lokal (wisata desa, produk unggulan desa).
- Pendampingan usaha bagi kelompok-kelompok produktif.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan juga berarti mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah desa perlu menciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang efektif:

- Menyelenggarakan musyawarah yang inklusif dan partisipatif.
- Menyediakan saluran aspirasi (kotak saran, formulir online, aplikasi pengaduan).
- Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- Memberikan apresiasi kepada warga yang aktif berpartisipasi.

D. PENGELOLAAN DANA DESA: AMANAH BESAR DENGAN TANTANGAN BESAR

Salah satu aspek paling krusial dalam peran pemerintah desa pasca-UU Desa adalah pengelolaan Dana Desa. Dana yang mengalir setiap tahun dalam jumlah besar ini adalah berkah sekaligus tantangan.

1. Signifikansi Dana Desa

Dana Desa adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada desa. Setiap tahun, rata-rata desa menerima dana miliaran rupiah dari APBN . Tujuannya jelas: mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di akar rumput .

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin besarnya manfaat. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana tersebut—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Di sinilah urgensi penguatan kapasitas aparatur desa, agar dana yang besar itu tidak berhenti pada seremonial pembangunan, tetapi benar-benar mengubah wajah desa .

2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus melalui lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban . Setiap tahapan memiliki prosedur yang harus dipatuhi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga penetapan APBDes. Dalam tahap ini, pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat menyepakati program dan kegiatan yang

akan didanai, beserta anggarannya. Perencanaan yang baik harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan atau kepentingan kelompok tertentu .

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah realisasi dari rencana yang telah disepakati. Pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan harus transparan—masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan, berapa anggarannya, dan siapa pelaksananya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan setiap transaksi keuangan secara tertib dan sistematis. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan bukti yang sah. Penatausahaan yang baik akan memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan) dan menyampaikannya kepada BPD dan pemerintah di atasnya (camat, bupati). Laporan ini harus disusun sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat.

e. Pertanggungjawaban

Tahap akhir adalah pertanggungjawaban. Kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD setiap tahun. LKPJ ini kemudian dievaluasi oleh BPD dan menjadi bahan penilaian kinerja kepala desa. Pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum terbuka dan media informasi desa.

3. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas . Transparansi berarti keterbukaan kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Akuntabilitas berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa. Pemeriksaan ini mencakup efektivitas pembinaan dan pengawasan, kepatuhan terhadap aturan, serta potensi penyimpangan . Temuan BPK menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah desa dan pemerintah di atasnya.

Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa perlu :

- Menyediakan media informasi yang dapat diakses luas oleh masyarakat, baik secara daring (portal desa, media sosial resmi) maupun fisik (papan pengumuman di balai desa).
- Memublikasikan dokumen-dokumen penting seperti draft RKPDes, laporan realisasi anggaran, dan rencana pembangunan jangka menengah.
- Menggunakan formulir masukan online atau sistem pengajuan pertanyaan pra-musyawarah untuk memungkinkan diskusi yang lebih tajam dan substansial.

4. Risiko dan Tantangan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa menghadapi berbagai risiko dan tantangan :

a. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian aparatur desa masih belum mahir dalam penyusunan anggaran berbasis kebutuhan riil atau pelaporan yang memenuhi standar akuntabilitas. Akibatnya, proyek bisa kurang tepat sasaran, bahkan memicu persoalan administratif atau hukum .

b. Prosedur Birokrasi yang Kompleks

Desa-desa di daerah terpencil sering mengalami kesulitan memenuhi seluruh persyaratan administratif sehingga pelaksanaan program bisa terhambat .

c. Transparansi yang Belum Optimal

Pemahaman tentang pentingnya pelaporan terbuka masih perlu diperkuat. Banyak desa yang belum memublikasikan informasi keuangan secara terbuka, sehingga publik tidak dapat mengawasi penggunaan dana .

d. Pengawasan Internal yang Terbatas

Banyak desa belum memiliki sistem dan sumber daya yang memadai untuk memantau pelaksanaan proyek secara efektif. Ini membuka celah bagi penyimpangan .

e. Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan

Dana yang besar dan pengawasan yang lemah menciptakan potensi korupsi. Kepala desa atau perangkat bisa tergoda untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok pendukungnya. Ketidakjelasan alokasi anggaran yang tidak tersosialisasi dengan baik dapat memicu tuduhan favoritisme atau bahkan dugaan korupsi .

E. TANTANGAN PEMERINTAH DESA DALAM DINAMIKA SOSIAL

Pemerintah desa, dengan segala kewenangan dan sumber daya yang dimilikinya, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi—teknis, politis, sosial, dan kultural.

1. Keterbatasan Kapasitas Aparatur

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa. Tidak semua kepala desa dan perangkat memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang memadai dalam manajemen pemerintahan, apalagi dengan kompleksitas UU Desa dan pengelolaan dana desa.

Keterbatasan ini terlihat dalam beberapa aspek :

- **Perencanaan yang kurang tepat**: Anggaran disusun tidak berbasis kebutuhan riil, tetapi berdasarkan keinginan atau sekadar meniru desa lain.
- **Administrasi yang berantakan**: Dokumen tidak lengkap, pencatatan tidak rapi, laporan terlambat. Dinas PMD Sukoharjo, misalnya, masih menemukan kekurangan dalam kelengkapan dokumen pendukung, seperti penulisan tanggal dan nomor yang tidak konsisten, KTP dan buku rekening yang tidak terbaca, serta kurangnya dokumentasi foto kegiatan .
- **Pelaporan yang tidak sesuai standar**: Laporan keuangan tidak sesuai dengan format yang ditentukan, menyulitkan audit.
- **Kurangnya pemahaman teknis**: Aparatur desa tidak paham teknis pembangunan atau pengadaan barang/jasa, sehingga proyek sering bermasalah.

Keterbatasan kapasitas ini menjadi penghambat utama efektivitas pembangunan desa. Sebesar apa pun dana yang digelontorkan, jika pengelolanya tidak kompeten, hasilnya tidak akan optimal.

2. Konflik Kepentingan dan Politik Lokal

Pemerintah desa adalah entitas politik. Kepala desa dipilih dalam kontestasi politik yang sering sengit. Ini membawa konsekuensi pada dinamika pemerintahan.

a. Tekanan dari Tim Sukses dan Pendukung

Kepala desa yang terpilih biasanya memiliki tim sukses dan kelompok pendukung. Mereka sering menuntut imbalan—posisi dalam pemerintahan, proyek, atau bantuan. Kepala desa bisa terjebak dalam politik balas budi yang mengabaikan prinsip meritokrasi dan keadilan.

b. Konflik dengan BPD

BPD sebagai lembaga pengawas bisa bersitegang dengan kepala desa jika memiliki afiliasi politik yang berbeda. Perbedaan persepsi antara kepala desa dan BPD mengenai skala prioritas program pembangunan dapat menjadi sumber ketegangan . Jika hubungan tidak harmonis, pemerintahan desa bisa mandek.

c. Konflik dengan Kelompok Oposisi

Kelompok yang kalah dalam Pilkades bisa menjadi oposisi yang kritis, bahkan cenderung menghalang-halangi program kepala desa. Ini bisa menciptakan polarisasi di masyarakat.

d. Konflik Kepentingan Pribadi

Aparatur desa bisa saja mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya di atas kepentingan umum. Misalnya, mengalokasikan proyek kepada perusahaan milik keluarga, atau memberikan bantuan kepada kerabat dekat.

Konflik dalam pemerintahan desa merupakan dinamika yang hampir tidak terelakkan, mengingat karakteristik desa sebagai ruang sosial-politik yang kompleks, tempat bertemunya berbagai kepentingan—baik ekonomi, sosial, maupun politik—dalam skala yang relatif kecil namun sangat personal .

3. Resistensi dan Ketidakpercayaan Masyarakat

Tidak semua program pemerintah desa diterima dengan baik oleh masyarakat. Resistensi bisa muncul karena berbagai alasan:

- **Kurangnya sosialisasi**: Masyarakat tidak dilibatkan atau tidak diberi informasi yang cukup tentang suatu program.
- **Ketidakpercayaan**: Masyarakat curiga pada niat pemerintah desa, menganggap program hanya menguntungkan kelompok tertentu.
- **Perbedaan nilai**: Program dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau agama.
- **Pengalaman buruk masa lalu**: Masyarakat pernah dirugikan oleh program serupa di masa lalu.

Ketidakpercayaan ini bisa memicu resistensi terbuka—protes, penolakan, bahkan sabotase program.

4. Beban Administrasi yang Berat

Pengelolaan dana desa yang besar membawa konsekuensi pada beban administrasi yang berat. Pemerintah desa harus membuat berbagai dokumen: perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes), pelaksanaan (SPj, laporan fisik, laporan keuangan), dan pertanggungjawaban (LKPJ, laporan akhir). Semua harus dibuat sesuai format, tepat waktu, dan dapat diaudit.

Bagi aparatur desa dengan kapasitas terbatas, beban ini bisa sangat memberatkan. Mereka bisa kewalahan, yang berakibat pada pelaporan yang terlambat atau tidak akurat. Ini kemudian berisiko pada sanksi administratif atau bahkan hukum.

5. Intervensi dari Luar

Pemerintah desa tidak bisa lepas dari intervensi pihak luar:

- **Pemerintah di atasnya** (kecamatan, kabupaten, provinsi) bisa melakukan intervensi dalam bentuk arahan, tekanan, atau bahkan pemaksaan kebijakan.
- **Partai politik** bisa mempengaruhi kebijakan desa, terutama menjelang pemilu.
- **Kepentingan bisnis** bisa mencoba mempengaruhi alokasi proyek atau izin usaha.
- **LSM** bisa memberikan tekanan melalui advokasi atau kampanye publik.

Intervensi ini bisa positif (memberikan arahan dan pendampingan) atau negatif (mengganggu kemandirian desa, memicu konflik kepentingan).

6. Tantangan Kultural

Selain tantangan struktural dan teknis, ada juga tantangan kultural:

- **Budaya paternalistik**: Masyarakat masih menggantungkan pada pemimpin, kurang inisiatif dan partisipasi. Ini menghambat pemberdayaan.
- **Budaya "nrimo" (menerima apa adanya)** : Menghambat dorongan untuk maju dan berinovasi.
- **Sikap apatis**: Masyarakat acuh tak acuh terhadap program pemerintah karena merasa tidak akan ada perubahan.
- **Individualisme yang meningkat**: Mengikis gotong royong dan partisipasi kolektif.

Tantangan-tantangan ini tidak bisa diatasi dengan kebijakan administratif semata. Ia membutuhkan pendekatan kultural yang lebih dalam dan jangka panjang.

F. STRATEGI MEMPERKUAT PERAN PEMERINTAH DESA

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk memperkuat peran pemerintah desa dalam dinamika sosial dan pembangunan.

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Investasi terpenting dalam penguatan pemerintah desa adalah peningkatan kapasitas aparaturnya. Program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan harus menjadi prioritas . Materi pelatihan mencakup :

- **Manajemen Keuangan Desa**: perencanaan anggaran berbasis kinerja, tata cara pengadaan barang/jasa, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit.
- **Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek**: memastikan setiap program berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas penyerapan anggaran.
- **Pemahaman Regulasi dan Kebijakan**: mencegah pelanggaran prosedur akibat ketidaktahuan, termasuk memahami regulasi terbaru terkait Dana Desa dan kebijakan lainnya.
- **Pengawasan dan Pengendalian Internal**: membekali aparatur untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan mengambil langkah korektif.
- **Komunikasi Publik dan Mediasi**: agar aparatur desa mampu berkomunikasi dengan baik, menjelaskan program kepada masyarakat, dan menjadi mediator dalam konflik .

Pelatihan ini tidak hanya membekali keterampilan teknis, tetapi juga membangun mentalitas pengabdian dan integritas. Aparatur desa yang kompeten adalah benteng pertama melawan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran .

2. Penguatan Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur yang jelas dan sederhana perlu dirancang untuk memudahkan aparatur desa bekerja. Ini meliputi:

- **Penyederhanaan prosedur administratif** tanpa mengorbankan akuntabilitas.
- **Pengembangan sistem informasi desa** yang terintegrasi untuk memudahkan perencanaan, pelaporan, dan publikasi informasi.
- **Penyediaan template dan panduan** yang mudah dipahami untuk dokumen-dokumen yang harus dibuat.
- **Penguatan sistem pengawasan internal** melalui peran sekretaris desa dan kasi yang membidangi pengawasan.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa perlu menciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang efektif :

- **Menerapkan model musyawarah yang inklusif**: Seluruh lapisan masyarakat—termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok adat, dan warga miskin—memiliki ruang bicara yang setara dan didengar secara serius. Fasilitator netral perlu memandu jalannya musyawarah dengan metode diskusi terstruktur .
- **Menyediakan akses informasi yang luas**: Semua dokumen penting harus tersedia minimal 7 hari sebelum pelaksanaan musyawarah agar warga memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya dan memberikan masukan .
- **Menyediakan saluran aspirasi**: Pemerintah desa perlu menyediakan saluran formal dan informal untuk menampung ide, keluhan, maupun kritik warga—bisa berupa kotak saran fisik, formulir digital, atau aplikasi pengaduan desa .
- **Menindaklanjuti usulan warga**: Setiap usulan yang masuk harus dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti dalam rentang waktu tertentu. Pemerintah desa juga wajib memublikasikan tindak lanjut dari usulan tersebut dalam forum terbuka .

4. Penguatan Regulasi Internal Desa

Peraturan Desa (Perdes) harus menjadi fondasi hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa . Idealnya, desa memiliki Perdes untuk setiap sektor strategis, seperti:

- Mekanisme penganggaran Dana Desa.
- Penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Prosedur penanganan aduan warga.
- Sistem sanksi dan disiplin bagi pelanggaran etika, administrasi, atau hukum .

Proses penyusunan atau revisi Perdes harus dilakukan dengan menjaring aspirasi melalui musyawarah dusun, uji publik, dan konsultasi dengan ahli. BPD harus terlibat aktif dan tidak hanya menjadi stempel formal semata .

5. Penguatan Sinergi dengan Stakeholder

Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai pihak sangat diperlukan:

- **Dengan pemerintah di atasnya** (kecamatan, kabupaten): untuk mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan dukungan.
- **Dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan**: sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- **Dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama**: untuk mendapatkan dukungan moral dan sosial, serta membantu memobilisasi partisipasi.
- **Dengan pihak swasta dan LSM**: untuk mendapatkan bantuan teknis, pendanaan, atau program kemitraan.
- **Dengan desa tetangga**: untuk kerjasama antar desa dalam bidang-bidang tertentu.

6. Penguatan Integritas dan Antikorupsi

Integritas adalah fondasi kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa harus membangun budaya antikorupsi melalui:

- **Keteladanan dari kepala desa dan perangkat**: Mereka harus menjadi contoh dalam kejujuran dan transparansi.
- **Sistem yang menutup celah korupsi**: Prosedur yang jelas, pengawasan yang ketat, dan transparansi informasi.
- **Penegakan sanksi**: Pelanggaran etika, administrasi, atau hukum harus ditindak tegas melalui mekanisme yang adil dan terbuka .
- **Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi** kepada seluruh aparatur dan masyarakat.

G. STUDI KASUS: PRAKTIK BAIK DAN TANTANGAN DI LAPANGAN

1. Praktik Baik: Desa Karangbawang, Purbalingga

Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, memberikan contoh praktik baik dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Di desa ini, Musyawarah Dusun (Musdus) dilaksanakan dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik .

Tahapan Musdus meliputi undangan kepada pihak terkait, daftar hadir, notulensi, dokumentasi kegiatan, dan usulan kegiatan prioritas pembangunan. Dokumen hasil Musdus ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes dan penyelarasan dengan RPJMDes .

Dengan sistem pendokumentasian yang lengkap—meliputi undangan, notulensi/berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi—forum ini tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memperkuat fondasi pengambilan keputusan pembangunan berbasis kebutuhan warga. Hasil-hasil musyawarah terefleksi dalam revisi RPJMDes dan Indeks Desa Membangun sebagai alat evaluasi dan perencanaan .

Praktik di Desa Karangbawang menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warga.

2. Tantangan: Temuan BPK dalam Pengelolaan Dana Desa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa. Dalam kurun waktu 2018-2024, BPK melakukan pemeriksaan strategis pada Belanja Desa, antara lain terkait efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta kepatuhan atas pengelolaan keuangan desa .

Temuan-temuan BPK menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti:

- Perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan.
- Pelaksanaan yang tidak sesuai aturan.
- Pelaporan yang tidak akurat.
- Temuan indikasi korupsi di sejumlah desa.

Temuan-temuan ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah desa dan pemerintah di atasnya. Kegiatan sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, seperti yang dilakukan BPK bersama

DPR RI di berbagai daerah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa agar pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel dan transparan .

3. Tantangan: Konflik di Pemerintahan Desa

Konflik dalam pemerintahan desa adalah dinamika yang umum terjadi. Konflik bisa dipicu oleh berbagai faktor :

- Perbedaan kepentingan antar kelompok.
- Ketidakjelasan atau kelonggaran dalam regulasi desa.
- Ketimpangan informasi yang memicu kecurigaan dan prasangka.
- Ketidakjelasan alokasi anggaran yang tidak tersosialisasi dengan baik.
- Perbedaan persepsi antara kepala desa dan BPD mengenai skala prioritas program pembangunan.

Konflik semacam ini jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk itu, diperlukan pendekatan pengelolaan konflik yang dirancang bukan hanya untuk meredam konflik yang sudah muncul, melainkan juga untuk mencegah konflik sejak dini melalui tata kelola yang transparan, sistemik, dan partisipatif .

H. RANGKUMAN

Pemerintah desa memegang peran yang sangat sentral dalam dinamika sosial dan pembangunan desa, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat, kewenangan yang lebih luas, dan sumber keuangan yang signifikan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Struktur kelembagaan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif memiliki empat fungsi utama: tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat .

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa melakukan serangkaian kegiatan:

- **Tata kelola pemerintahan**: administrasi kependudukan, pelayanan publik, administrasi keuangan dan aset desa, serta administrasi umum dan kearsipan.
- **Pelaksanaan pembangunan**: perencanaan partisipatif melalui musyawarah dusun dan musrenbangdes , pembangunan infrastruktur, pembangunan non-fisik, serta pemanfaatan Dana Desa .
- **Pembinaan kemasyarakatan**: menjaga kerukunan, keamanan dan ketertiban, nilai-nilai sosial budaya, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan.
- **Pemberdayaan masyarakat**: peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengembangan ekonomi produktif, dan peningkatan partisipasi .

Pengelolaan Dana Desa adalah aspek paling krusial. Dana desa harus dikelola melalui lima tahapan—perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban —dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas . Namun, pengelolaan dana desa menghadapi tantangan serius: keterbatasan kapasitas aparatur, prosedur birokrasi yang kompleks, transparansi yang belum optimal, pengawasan internal yang terbatas, dan potensi korupsi .

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah desa meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, konflik kepentingan dan politik lokal , resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat, beban administrasi yang berat, intervensi dari luar, serta tantangan kultural.

Untuk memperkuat peran pemerintah desa, diperlukan strategi komprehensif:

1. **Peningkatan kapasitas aparatur desa** melalui pelatihan berkelanjutan dalam manajemen keuangan, perencanaan proyek, regulasi, pengawasan, dan komunikasi publik .
2. **Penguatan sistem dan prosedur** yang jelas dan sederhana.
3. **Penguatan partisipasi masyarakat** melalui musyawarah inklusif, akses informasi luas, saluran aspirasi, dan tindak lanjut usulan .
4. **Penguatan regulasi internal desa** (Perdes) di berbagai sektor strategis .
5. **Penguatan sinergi dengan stakeholder** (pemerintah di atasnya, BPD, tokoh masyarakat, swasta, LSM, desa tetangga).
6. **Penguatan integritas dan antikorupsi** melalui keteladanan, sistem yang menutup celah korupsi, penegakan sanksi, dan pendidikan antikorupsi.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan perannya sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya, sistem yang mendukung, partisipasi masyarakat, dan integritas para penyelenggaranya. Pemerintah desa yang kuat, transparan, dan akuntabel akan menjadi motor penggerak pembangunan yang efektif, sekaligus menjadi perekat sosial yang menjaga harmoni di tengah dinamika masyarakat desa yang terus berubah.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah desa di daerah Anda? Apakah sudah berjalan partisipatif dan inklusif, atau masih didominasi oleh elite tertentu?
2. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah desa di daerah Anda dalam mengelola Dana Desa? Bagaimana upaya mengatasinya?
3. Bagaimana hubungan antara Kepala Desa dan BPD di daerah Anda? Apakah harmonis atau sering terjadi ketegangan? Apa dampaknya terhadap pembangunan desa?
4. Seberapa transparan pemerintah desa di daerah Anda dalam mengelola keuangan desa? Apakah masyarakat mudah mengakses informasi anggaran dan pelaporan?
5. Program pemberdayaan apa yang paling berhasil di desa Anda? Faktor apa yang menyebabkan keberhasilan tersebut?
6. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung program-program pemerintah desa?

7. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar lebih profesional dan berintegritas?
8. Bagaimana cara terbaik mengatasi konflik kepentingan dan mencegah korupsi di tingkat desa?

BAB XI

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH ADAT

A. PENGANTAR: PILAR KEEMPAT DALAM TATA KELOLA DESA

Dalam struktur sosial masyarakat desa, terdapat figur-figur yang meskipun tidak memiliki jabatan formal dalam pemerintahan, namun pengaruhnya sangat besar, bahkan kadang melebihi pemimpin formal. Mereka adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat—para penjaga nilai, pemelihara tradisi, pembimbing moral, dan perekat sosial. Keberadaan mereka ibarat pilar keempat dalam tata kelola desa, melengkapi tiga pilar formal: pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan.

Tokoh masyarakat dan tokoh adat memiliki posisi yang unik dan strategis. Mereka lahir dari rahim masyarakat sendiri, tumbuh dan hidup bersama masyarakat, serta memahami secara mendalam nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi warga. Mereka tidak dipilih dalam pemilu, tidak diangkat dengan surat keputusan, namun legitimasi mereka justru lebih kuat karena bersumber dari pengakuan dan kepercayaan masyarakat yang tulus. Dalam banyak hal, mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan warga, antara tradisi dan modernitas, antara kepentingan lokal dan tekanan global.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang peran tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam dinamika sosial desa. Kita akan memulai dengan memahami siapa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, apa sumber legitimasi mereka, dan bagaimana tipologi mereka. Selanjutnya, kita akan menelusuri berbagai peran yang mereka mainkan: sebagai agen perubahan, pemobilisasi massa, panutan moral, penjaga tradisi, mediator konflik, gatekeeper pengaruh luar, dan mitra pemerintah dalam pembangunan. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis dinamika hubungan mereka dengan pemerintah desa serta tantangan yang dihadapi di era modern, sekaligus strategi untuk memperkuat sinergi demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

B. MENGENAL TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH ADAT

1. Pengertian dan Tipologi

Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat karena berbagai kualitas yang melekat pada dirinya—pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan, kebaikan hati, atau prestasi. Mereka dihormati, disegani, dan menjadi rujukan bagi warga dalam berbagai persoalan. Tokoh masyarakat tidak selalu memiliki latar belakang formal tertentu; mereka bisa berasal dari berbagai kalangan: pensiunan pejabat, guru, pengusaha sukses, petani berprestasi, atau sekadar orang tua yang bijaksana.

Tokoh adat adalah individu yang memegang peran dalam struktur adat masyarakat. Mereka adalah penjaga dan pelaksana hukum adat, pemimpin upacara adat, dan pemelihara tradisi leluhur. Berbeda dengan tokoh masyarakat yang bisa muncul dari berbagai latar, tokoh adat biasanya memiliki legitimasi berdasarkan garis keturunan atau pengangkatan dalam struktur adat. Di berbagai daerah, mereka memiliki gelar khusus: datuk (Minangkabau), raja adat (Batak), bendesa adat (Bali), pua' (Dayak), atau tetua adat (berbagai daerah).

Tokoh agama adalah subkategori khusus dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh karena pengetahuan dan peran mereka dalam bidang keagamaan. Mereka bisa berupa kyai, ulama, ustadz (Islam); pendeta, pastor (Kristen/Katolik); pemangku, pedanda (Hindu); atau bhikkhu (Buddha). Di desa yang religius, tokoh agama sering memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan melampaui tokoh masyarakat lainnya.

Dalam praktiknya, ketiga kategori ini bisa tumpang tindih. Seorang tokoh adat bisa juga menjadi tokoh agama. Seorang kyai bisa juga dianggap sebagai tokoh masyarakat karena peran sosialnya. Namun, penting untuk membedakan secara konseptual karena sumber legitimasi dan ranah pengaruh mereka bisa berbeda.

2. Sumber Legitimasi

Mengapa tokoh masyarakat dan tokoh adat dihormati dan dipatuhi? Max Weber, sosiolog Jerman, mengidentifikasi tiga sumber legitimasi yang relevan di sini:

a. Legitimasi Tradisional

Tokoh adat memperoleh legitimasi dari tradisi yang telah berlangsung lama. Mereka adalah penerus garis keturunan yang secara turun-temurun memegang peran adat. Masyarakat mematuhi mereka karena "sudah begitu sejak dulu", karena leluhur mereka juga mematuhi. Legitimasi tradisional ini sangat kuat dan stabil, tetapi bisa melemah jika generasi muda mulai mempertanyakan tradisi.

b. Legitimasi Karismatik

Banyak tokoh masyarakat memperoleh legitimasi dari kharisma pribadi—kualitas luar biasa yang melekat pada diri mereka. Kharisma bisa berupa kewibawaan, kemampuan bicara yang memukau, kesaktian (dalam kepercayaan tradisional), atau kesucian (dalam konteks agama). Orang dengan kharisma tinggi mampu memengaruhi orang lain hanya dengan kehadiran atau ucapannya. Kyai yang dianggap memiliki barokah, dukun yang dianggap sakti, atau pemimpin spiritual yang dianggap suci memiliki legitimasi karismatik.

c. Legitimasi berdasarkan Pengetahuan dan Kebijaksanaan

Seorang bisa menjadi tokoh masyarakat karena pengetahuannya yang luas atau kebijaksanaannya yang diakui. Kyai yang menguasai ilmu agama, guru yang berpendidikan tinggi, tetua yang berpengalaman hidup, atau petani yang berhasil dengan inovasinya—mereka dihormati karena apa yang mereka ketahui dan mampu mereka lakukan. Masyarakat datang kepada mereka untuk meminta nasihat, petunjuk, atau solusi atas masalah.

d. Legitimasi berdasarkan Kebaikan dan Pengabdian

Ada pula tokoh masyarakat yang dihormati karena kebaikan hati dan pengabdiannya yang tulus. Mereka mungkin tidak pintar bicara, tidak punya ilmu tinggi, dan bukan keturunan siapa-siapa. Tetapi karena mereka selalu membantu, tidak pernah menyakiti, dan peduli pada sesama, masyarakat segan dan hormat. Ketika mereka berbicara, orang mendengar. Legitimasi jenis ini sangat kuat karena lahir dari interaksi langsung dan pengalaman nyata masyarakat.

3. Karakteristik Umum

Meskipun beragam, tokoh masyarakat dan tokoh adat umumnya memiliki beberapa karakteristik bersama:

- **Dikenal luas oleh masyarakat**. Nama dan figur mereka akrab di telinga warga. Mereka bukan orang asing atau pendatang baru.
- **Dihormati dan disegani**. Ada rasa hormat dan segan dari warga ketika berhadapan dengan mereka. Bukan karena takut, tetapi karena penghargaan.
- **Menjadi rujukan**. Warga datang kepada mereka untuk meminta nasihat, petunjuk, atau keputusan dalam berbagai persoalan—dari masalah pribadi hingga masalah desa.
- **Memiliki pengaruh**. Apa yang mereka katakan atau lakukan dapat memengaruhi opini dan perilaku warga. Dukungan mereka terhadap suatu program bisa membuat program itu diterima; penolakan mereka bisa membuat program itu gagal.
- **Memiliki jaringan luas**. Mereka biasanya memiliki relasi dengan berbagai pihak—pemerintah, tokoh lain, bahkan pihak luar desa. Jaringan ini menjadi modal penting dalam menjalankan peran mereka.
- **Memiliki integritas**. Masyarakat percaya bahwa mereka jujur, adil, dan tidak memihak kecuali pada kebenaran. Integritas ini adalah fondasi kepercayaan.

C. PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH ADAT

Tokoh masyarakat dan tokoh adat memainkan beragam peran yang sangat vital bagi kehidupan desa. Peran-peran ini bersifat multidimensi, mencakup aspek spiritual, kultural, sosial, politik, dan ekonomi.

1. Sebagai Agen Perubahan (Agent of Change)

Tokoh masyarakat dan tokoh adat adalah agen perubahan yang efektif. Mereka mampu memperkenalkan ide-ide baru, mendorong inovasi, dan menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Mengapa mereka efektif? Karena mereka memiliki kepercayaan masyarakat, memahami kondisi lokal, dan bisa berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami warga.

Dalam bidang pertanian, seorang tokoh masyarakat yang berhasil menerapkan metode tanam baru bisa menjadi contoh yang diikuti petani lain. Ketika ia menjelaskan manfaat pupuk organik atau teknik irigasi tetes, warga percaya karena ia bukan orang asing yang teoritis, tetapi petani seperti mereka yang telah membuktikan keberhasilan.

Dalam bidang kesehatan, tokoh agama bisa berperan besar dalam sosialisasi program kesehatan. Kyai yang menjelaskan bahwa imunisasi tidak bertentangan dengan agama akan lebih didengar daripada

petugas kesehatan yang mungkin dianggap "orang luar". Di masa pandemi COVID-19, peran tokoh agama dalam mengajak warga mematuhi protokol kesehatan sangat vital.

Dalam bidang pendidikan, tokoh masyarakat bisa mendorong warga untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika seorang tokoh yang dihormati mengatakan bahwa pendidikan penting dan memberikan contoh dengan menyekolahkan anak-anaknya, warga akan termotivasi.

Dalam bidang ekonomi, tokoh masyarakat bisa menjadi inisiator usaha bersama, koperasi, atau BUMDes. Mereka bisa menggalang partisipasi, membangun kepercayaan, dan menjadi jaminan moral bagi keberlangsungan usaha.

2. Sebagai Pemobilisasi Massa

Tokoh masyarakat dan tokoh adat memiliki kemampuan luar biasa untuk menggerakkan warga. Ketika mereka memanggil, warga datang. Ketika mereka mengajak, warga ikut. Kemampuan mobilisasi ini sangat penting dalam berbagai konteks.

Dalam pembangunan fisik, dukungan tokoh masyarakat bisa menentukan sukses tidaknya program. Ketika kepala desa ingin menggalang gotong royong membangun jalan, dukungan dari tokoh masyarakat akan membuat warga berbondong-bondong ikut. Sebaliknya, jika tokoh masyarakat tidak mendukung atau bahkan menentang, partisipasi warga akan rendah.

Dalam kegiatan sosial, tokoh masyarakat adalah motor penggerak. Mereka yang mengajak warga untuk menjenguk warga sakit, membantu keluarga tertimpa musibah, atau menggalang dana untuk kegiatan sosial. Kehadiran mereka dalam suatu kegiatan memberikan legitimasi dan mendorong partisipasi.

Dalam situasi darurat (bencana alam, wabah, konflik), tokoh masyarakat menjadi pusat komando informal. Mereka yang mengorganisasi evakuasi, mendistribusikan bantuan, dan menenangkan warga yang panik. Peran mereka sangat krusial karena mereka ada di tengah masyarakat, tidak perlu menunggu instruksi dari atas.

Dalam kontestasi politik, dukungan tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat diperebutkan. Calon kepala desa yang mendapat restu kyai atau tetua adat memiliki peluang besar untuk menang. Karena itu, para calon akan "sowan" (bersilaturahmi) ke tokoh-tokoh untuk meminta doa dan dukungan.

3. Sebagai Panutan Moral dan Etika

Tokoh masyarakat dan tokoh adat adalah teladan dalam perilaku. Masyarakat meniru mereka—dalam cara bicara, cara berpakaian, cara bergaul, cara beribadah, dan cara memperlakukan orang lain. Mereka menjadi standar moral yang hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang kyai menjadi contoh dalam kesalehan, kesederhanaan, dan keramahan. Seorang tetua adat menjadi contoh dalam menghormati tradisi, bersikap adil, dan menjaga martabat. Seorang tokoh masyarakat menjadi contoh dalam kerja keras, kejujuran, dan kepedulian sosial.

Dalam pendidikan anak-anak, figur tokoh masyarakat sangat penting. Anak-anak belajar nilai-nilai bukan hanya dari orang tua dan guru, tetapi juga dari melihat tokoh-tokoh yang dihormati di

lingkungannya. Ketika mereka melihat kyai yang dihormati, mereka belajar menghormati ulama. Ketika mereka melihat tetua adat yang disegani, mereka belajar menghargai tradisi.

Dalam menjaga moral publik, tokoh masyarakat berperan sebagai pengawas sosial. Mereka berani menegur jika ada perilaku menyimpang, mengingatkan jika ada yang melanggar norma, dan memberi nasihat jika ada yang salah. Teguran dari tokoh masyarakat sering lebih efektif daripada teguran formal karena ada ikatan emosional dan rasa hormat.

4. Sebagai Penjaga Tradisi dan Budaya

Tokoh adat adalah penjaga utama tradisi dan budaya lokal. Mereka yang memahami seluk-beluk adat istiadat, yang hafal mantra-mantra ritual, yang tahu tata cara upacara, dan yang paham nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi.

Dalam pelestarian upacara adat, tokoh adat menjadi sutradara sekaligus pemimpin. Mereka yang menentukan kapan upacara dilaksanakan, siapa saja yang harus terlibat, apa saja sesaji yang harus disiapkan, dan bagaimana urutan ritualnya. Tanpa mereka, upacara adat tidak bisa berjalan.

Dalam pewarisan tradisi, tokoh adat berperan sebagai guru. Mereka mengajarkan generasi muda tentang adat istiadat, nilai-nilai leluhur, dan kearifan lokal. Melalui cerita, nasihat, dan keterlibatan dalam upacara, mereka mewariskan warisan budaya kepada generasi penerus.

Dalam menjaga benda dan situs budaya, tokoh adat menjadi penjaga. Mereka tahu mana makam leluhur yang harus dihormati, mana hutan keramat yang tidak boleh diganggu, mana benda pusaka yang harus dirawat. Mereka juga yang berwenang memberi izin jika ada pihak luar yang ingin mempelajari atau memanfaatkan budaya lokal.

Dalam mengadaptasi tradisi, tokoh adat berperan sebagai filter. Mereka yang menentukan unsur-unsur tradisi mana yang harus dipertahankan, mana yang bisa dimodifikasi, dan mana yang harus ditinggalkan karena tidak relevan. Mereka menjadi penjaga agar tradisi tetap hidup, bukan menjadi museum yang beku.

5. Sebagai Mediator dan Penyelesai Konflik

Salah satu peran terpenting tokoh masyarakat dan tokoh adat adalah sebagai mediator dalam konflik. Di desa, konflik sering terjadi—sengketa tanah, masalah keluarga, perselisihan antar tetangga, perbedaan pendapat dalam organisasi. Tokoh masyarakat dan tokoh adat sering menjadi penengah yang efektif.

Mengapa mereka efektif? Pertama, mereka dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak ada prasangka bahwa mereka memihak. Kedua, mereka memahami akar masalah dan konteks sosialnya. Ketiga, mereka memiliki kewibawaan sehingga kata-kata mereka didengar. Keempat, mereka biasanya menggunakan pendekatan musyawarah dan kearifan lokal, bukan pendekatan hukum formal yang kaku dan memakan waktu.

Dalam sengketa tanah, tetua adat sering menjadi penengah. Mereka tahu sejarah kepemilikan tanah, tahu batas-batas adat, dan tahu siapa yang berhak atas tanah ulayat. Keputusan adat sering lebih diterima daripada keputusan pengadilan.

Dalam konflik keluarga, tokoh masyarakat yang dituakan bisa menjadi penengah. Mereka bisa menenangkan emosi, mengingatkan tentang nilai kekeluargaan, dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Perceraian, masalah warisan, atau pertengkaran antar saudara sering bisa diselesaikan dengan mediasi tokoh masyarakat.

Dalam konflik antar warga, tokoh masyarakat bisa menjadi jembatan. Mereka bisa mempertemukan pihak yang bertikai, memfasilitasi dialog, dan mendorong perdamaian. Seringkali, penyelesaian konflik diakhiri dengan upacara adat perdamaian yang dipimpin oleh tokoh adat.

Dalam konflik dengan pihak luar (perusahaan, pemerintah), tokoh masyarakat menjadi juru bicara dan negosiator. Mereka menyuarakan kepentingan warga, tetapi juga bisa menjadi penengah yang rasional. Peran ini penting agar konflik tidak berkepanjangan dan merugikan semua pihak.

6. Sebagai Gatekeeper Pengaruh Luar

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang deras, tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan sebagai gatekeeper—penjaga gerbang yang menyaring pengaruh luar agar sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Dalam pembangunan fisik, restu tokoh adat sering menjadi syarat mutlak. Pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum di wilayah adat harus mendapat persetujuan tokoh adat. Mereka bisa menunjukkan tempat-tempat yang keramat dan tidak boleh diganggu, atau mengingatkan agar pembangunan tidak merusak situs budaya. Dalam proses pembebasan lahan, tokoh adat bisa berperan penting dengan pendekatan kekerabatan, menghindari konflik yang mungkin timbul.

Dalam pengembangan pariwisata, tokoh adat menjadi penjaga agar pariwisata tidak mengkomodifikasi hal-hal yang sakral. Mereka bisa menentukan mana upacara adat yang boleh ditampilkan untuk wisatawan dan mana yang harus tetap privat. Mereka juga bisa mengatur agar wisatawan menghormati nilai-nilai lokal—berpakaian sopan, tidak boleh masuk ke area tertentu, dan lain-lain.

Dalam penerimaan teknologi baru, tokoh masyarakat bisa menjadi filter. Mereka bisa menguji apakah teknologi itu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, apakah membawa manfaat atau justru mudarat. Petani akan lebih percaya pada teknologi baru jika direkomendasikan oleh tokoh tani yang mereka hormati.

Dalam menghadapi pengaruh budaya global, tokoh agama dan tokoh adat menjadi benteng. Mereka mengingatkan generasi muda untuk tidak latah mengikuti tren yang bertentangan dengan nilai agama dan adat. Mereka memberikan alternatif kegiatan yang lebih positif—pengajian, latihan kesenian tradisional, kegiatan sosial.

7. Sebagai Mitra Pemerintah Desa

Hubungan antara tokoh masyarakat/adat dengan pemerintah desa idealnya bersifat kemitraan. Pemerintah desa membutuhkan dukungan tokoh untuk menjalankan program; tokoh membutuhkan pemerintah desa untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan, tokoh masyarakat dan adat dilibatkan dalam musyawarah desa. Aspirasi yang mereka sampaikan mewakili suara warga. Masukan mereka tentang prioritas pembangunan, nilai-nilai yang harus dijaga, dan potensi konflik yang harus dihindari sangat berharga.

Dalam pelaksanaan program, dukungan tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan. Program KB akan lebih mudah diterima jika tokoh agama mendukung. Program pertanian organik akan lebih cepat diadopsi jika tokoh tani menjadi pelopor. Program pelestarian lingkungan akan lebih efektif jika tokoh adat mengingatkan tentang sanksi adat bagi perusak lingkungan.

Dalam monitoring dan evaluasi, tokoh masyarakat bisa menjadi "mata dan telinga" pemerintah desa. Mereka tahu apa yang terjadi di masyarakat, tahu apakah program berjalan sesuai rencana, tahu keluhan dan aspirasi warga. Umpan balik dari mereka sangat berharga untuk perbaikan program.

Dalam situasi kritis, tokoh masyarakat menjadi mitra penting bagi pemerintah desa. Ketika terjadi konflik, mereka membantu mediasi. Ketika terjadi bencana, mereka membantu mobilisasi bantuan. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, mereka membantu menjelaskan dan meredam resistensi.

Sinergi antara kepemimpinan formal (pemerintah desa) dan informal (tokoh masyarakat dan adat) menciptakan tata kelola desa yang lebih kokoh dan berakar pada budaya setempat. Kepala desa yang cerdas akan merawat hubungan baik dengan para tokoh, secara rutin bersilaturahmi, meminta nasihat, dan melibatkan mereka dalam setiap langkah penting.

D. STUDI KASUS PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN ADAT

1. Kasus 1: Peran Kyai dalam Pembangunan Desa di Jawa Timur

Di sebuah desa di Jawa Timur, pembangunan masjid baru sempat terhambat karena warga terbelah dalam beberapa kelompok. Kelompok A ingin masjid dibangun di lokasi A karena lebih strategis. Kelompok B ingin di lokasi B karena tanahnya wakaf dari keluarga mereka. Konflik memanas, bahkan sampai saling mencaci.

Kyai Ahmad, ulama kharismatik di desa itu, turun tangan. Ia tidak langsung memihak, tetapi memanggil semua pihak untuk bermusyawarah di rumahnya. Dengan pendekatan keagamaan, ia mengingatkan bahwa masjid adalah rumah Allah, bukan untuk kepentingan kelompok. Ia juga menawarkan solusi kompromi: masjid tetap dibangun di lokasi A (yang lebih strategis), tetapi dengan nama yang mencantumkan nama keluarga pewakaf tanah di lokasi B sebagai penghormatan. Semua pihak setuju.

Setelah kesepakatan, Kyai Ahmad memimpin penggalangan dana dan gotong royong. Warga dari kedua kelompok yang tadinya bertikai kini bekerja bersama membangun masjid. Kyai Ahmad sendiri turun tangan memegang cangkul, memberi contoh bahwa pemimpin harus melayani, bukan dilayani.

Kasus ini menunjukkan bagaimana seorang tokoh agama dapat menjadi mediator konflik, pemersatu, dan motor penggerak pembangunan. Pengaruh moralnya melampaui struktur formal, dan kemampuannya mencari solusi yang memuaskan semua pihak menyelesaikan konflik yang mandek.

2. Kasus 2: Peran Tetua Adat dalam Sengketa Tanah di Bali

Di sebuah desa adat di Bali, terjadi sengketa tanah antara dua keluarga besar. Tanah itu adalah tanah adat (ayahan desa) yang secara turun-temurun digarap oleh keluarga A, tetapi keluarga B mengklaim bahwa

tanah itu adalah warisan dari leluhur mereka. Konflik sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sempat terjadi bentrok fisik.

Bendesa Adat (pemimpin adat) bersama para tetua adat turun tangan. Mereka tidak membawa kasus ini ke pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme adat. Mereka menelusuri sejarah tanah melalui lontar (naskah kuno) dan kesaksian para tetua. Mereka juga melakukan mediasi dengan pendekatan kekeluargaan, mengingatkan kedua keluarga bahwa mereka masih satu keturunan.

Setelah beberapa kali pertemuan, ditemukan fakta bahwa tanah itu memang hak keluarga B, tetapi sudah digarap keluarga A selama tiga generasi. Tetua adat kemudian memutuskan: tanah dikembalikan ke keluarga B, tetapi keluarga A diberi kompensasi berupa tanah lain yang setara dari kas desa adat. Kedua keluarga diminta melakukan upacara "prayascita" (pembersihan) sebagai simbol perdamaian.

Keputusan adat ini diterima kedua belah pihak. Mereka lega karena konflik berakhir tanpa harus melalui proses pengadilan yang mahal dan memakan waktu. Kasus ini menunjukkan bagaimana tokoh adat dengan kewenangan tradisionalnya mampu menyelesaikan sengketa yang rumit dengan pendekatan kearifan lokal.

3. Kasus 3: Tokoh Masyarakat sebagai Agen Perubahan di Desa Pentingsari, Yogyakarta

Desa Pentingsari di Sleman, Yogyakarta, adalah contoh sukses transformasi desa melalui pariwisata. Di balik sukses ini, ada peran sentral seorang tokoh masyarakat: almarhum Pak Wiyono.

Pak Wiyono adalah pensiunan guru yang memiliki visi mengubah desa pertanian yang biasa-biasa saja menjadi desa wisata. Ia tidak hanya bicara, tetapi juga memberi contoh dengan mengubah rumahnya menjadi homestay pertama. Ia kemudian mengajak tetangga-tetangganya untuk melakukan hal yang sama.

Dengan sabar, Pak Wiyono mendampingi warga. Ia mengajari mereka cara menyambut tamu, menyiapkan homestay, memasak makanan untuk wisatawan, dan mengelola keuangan. Ia juga menjadi penghubung dengan biro perjalanan, pemerintah, dan perguruan tinggi. Ia membangun kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi wadah organisasi dan kerjasama.

Karena dedikasi dan keteladanannya, warga percaya dan mau ikut. Dari satu homestay, kini berkembang puluhan homestay. Desa Pentingsari menjadi desa wisata terkenal, bahkan dikunjungi delegasi asing yang ingin belajar tentang pengembangan desa wisata.

Pak Wiyono tidak pernah menjadi kepala desa. Ia hanya warga biasa. Tetapi karena pengaruh dan perjuangannya, ia mampu mengubah nasib seluruh desa. Ia adalah contoh sempurna tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.

E. DINAMIKA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DESA

Hubungan antara tokoh masyarakat/adat dengan pemerintah desa bersifat dinamis. Ada kalanya hubungan itu harmonis dan sinergis, ada kalanya tegang dan konfliktual. Memahami dinamika ini penting untuk membangun tata kelola desa yang efektif.

1. Pola Hubungan Harmonis

Dalam pola harmonis, pemerintah desa dan tokoh masyarakat/adat bekerja sama dengan baik. Kepala desa secara rutin bersilaturahmi dengan para tokoh, meminta masukan, dan melibatkan mereka dalam setiap langkah penting. Tokoh masyarakat/adat mendukung program-program pemerintah desa dan membantu menggerakkan partisipasi warga.

Pola harmonis terjadi jika:

- **Kepala desa memiliki sikap rendah hati** dan mau mendengar. Ia tidak merasa paling tahu dan paling berkuasa.
- **Tokoh masyarakat/adat memiliki sikap mendukung** dan tidak merasa tersaingi. Mereka melihat kepala desa sebagai mitra, bukan lawan.
- **Ada komunikasi yang intensif**. Kedua pihak sering bertemu, berdialog, dan bertukar informasi.
- **Ada saling menghormati peran**. Kepala desa menghormati otoritas tokoh dalam bidangnya; tokoh menghormati kewenangan formal kepala desa.
- **Ada keberhasilan bersama**. Ketika program sukses, kedua pihak merasa sebagai bagian dari keberhasilan itu.

Pola harmonis sangat ideal untuk pembangunan desa. Sinergi antara kekuasaan formal dan pengaruh informal menciptakan kekuatan besar yang mampu menggerakkan seluruh potensi desa.

2. Pola Hubungan Tegang

Dalam pola tegang, terjadi friksi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat/adat. Bisa karena perbedaan pandangan, persaingan pengaruh, atau konflik kepentingan.

Pola tegang bisa disebabkan oleh:

- **Kepala desa yang arogan**, mengabaikan tokoh, merasa paling berkuasa, dan mengambil keputusan sepihak.
- **Tokoh masyarakat yang merasa tersaingi**, terutama jika sebelumnya mereka adalah pusat pengaruh dan kini tergeser oleh kepala desa yang populer.
- **Perbedaan dukungan dalam Pilkades**. Jika tokoh mendukung calon yang kalah, ia bisa menjadi oposisi yang kritis.
- **Kebijakan kontroversial**. Program kepala desa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dijaga tokoh bisa memicu resistensi.
- **Perebutan sumber daya**. Misalnya, alokasi dana desa untuk proyek yang tidak melibatkan tokoh atau kelompoknya.

Pola tegang bisa merugikan pembangunan. Program-program bisa terhambat karena kurang dukungan. Masyarakat bisa terbelah menjadi dua kubu. Konflik bisa berkepanjangan dan menguras energi yang seharusnya untuk pembangunan.

3. Strategi Membangun Sinergi

Mengingat pentingnya sinergi, kepala desa dan tokoh masyarakat/adat perlu secara sadar membangun hubungan yang harmonis. Beberapa strategi yang bisa ditempuh:

Bagi Kepala Desa:

- **Lakukan silaturahmi rutin**. Kunjungi tokoh-tokoh di rumahnya, hadir dalam acara-acara mereka, dan buka saluran komunikasi personal.
- **Libatkan dalam musyawarah**. Undang tokoh dalam setiap forum penting, minta pendapat, dan pertimbangkan masukan mereka.
- **Minta nasihat**. Sebelum mengambil keputusan penting, konsultasikan dengan tokoh. Ini bukan hanya soal mendapat masukan, tetapi juga soal penghormatan.
- **Akui kontribusi mereka**. Berikan apresiasi publik atas peran dan dukungan tokoh. Ini memperkuat legitimasi mereka dan membangun goodwill.
- **Jangan mempolitisasi**. Jangan libatkan tokoh dalam politik praktis yang bisa memecah belah. Jadikan mereka mitra pembangunan, bukan alat politik.

Bagi Tokoh Masyarakat/Adat:

- **Bersikap mendukung**. Dukung program-program positif pemerintah desa. Jika ada yang perlu dikritik, sampaikan dengan cara yang santun dan konstruktif.
- **Jangan merasa tersaingi**. Pemerintah desa adalah mitra, bukan lawan. Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan bersama.
- **Sampaikan aspirasi dengan bijak**. Jangan hanya mengkritik dari luar. Masuklah dalam forum formal, sampaikan aspirasi warga, dan bantu mencari solusi.
- **Jaga integritas**. Jangan sampai tergoda kepentingan pribadi atau kelompok. Tetaplah menjadi penyeimbang yang independen dan dipercaya semua pihak.
- **Libatkan generasi muda**. Siapkan generasi penerus yang memahami nilai-nilai luhur sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan.

F. TANTANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN ADAT DI ERA MODERN

Tokoh masyarakat dan tokoh adat tidak luput dari tantangan zaman. Beberapa tantangan utama yang mereka hadapi antara lain:

1. Erosi Pengaruh di Kalangan Generasi Muda

Generasi muda desa semakin terpapar budaya global melalui media sosial, internet, dan pergaulan. Mereka cenderung lebih terpesona pada selebritas, influencer, atau figur-figur populer dari luar daripada tokoh lokal. Nilai-nilai tradisional yang dijaga tokoh adat sering dianggap kuno dan tidak relevan. Bahasa daerah mulai ditinggalkan. Upacara adat dianggap membosankan. Tokoh masyarakat yang tidak melek teknologi bisa kehilangan relevansi di mata generasi muda.

Tantangan ini membutuhkan respons kreatif. Tokoh masyarakat dan adat perlu belajar menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Mereka perlu mengemas tradisi dengan cara yang lebih menarik bagi generasi muda—misalnya dengan kolaborasi seni, festival, atau konten digital. Mereka

juga perlu membuka ruang dialog dengan generasi muda, mendengarkan aspirasi mereka, dan mencari titik temu.

2. Kompetisi dengan Tokoh Baru

Era digital melahirkan tokoh-tokoh baru yang tidak lahir dari struktur tradisional. Mereka adalah influencer media sosial, youtuber, selebritas lokal, atau aktivis LSM. Mereka memiliki pengikut sendiri, kadang lebih banyak dari pengikut tokoh tradisional. Kompetisi pengaruh ini bisa menimbulkan ketegangan.

Tokoh tradisional tidak bisa mengabaikan fenomena ini. Mereka perlu membangun jaringan dengan tokoh-tokoh baru, tidak memposisikan sebagai lawan. Kolaborasi antara kearifan tradisional dan kreativitas digital bisa menjadi kekuatan besar.

3. Tekanan Ekonomi dan Komersialisasi

Banyak tokoh masyarakat dan adat yang hidup pas-pasan. Mereka tidak mendapatkan gaji dari peran sosialnya. Di tengah tekanan ekonomi, mereka bisa tergoda untuk mengkomersialkan peran—meminta imbalan untuk setiap nasihat, atau menggunakan pengaruh untuk keuntungan pribadi. Ini bisa mengikis integritas dan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, ada tekanan untuk mengkomersialkan tradisi. Upacara adat dijadikan atraksi wisata, ritual sakral dijual kepada turis. Tokoh adat berada di persimpangan: antara menjaga kesakralan tradisi dan memanfaatkan peluang ekonomi. Mereka perlu bijak menentukan batas-batasnya.

4. Konflik dengan Hukum Formal

Di beberapa kasus, keputusan adat bisa berbenturan dengan hukum nasional. Misalnya, sanksi adat yang dianggap melanggar HAM, atau aturan adat tentang perkawinan dan warisan yang berbeda dengan hukum nasional. Tokoh adat harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan tuntutan untuk menyesuaikan diri.

Tantangan ini membutuhkan dialog antara tokoh adat, pemerintah, dan ahli hukum. Perlu dicari titik temu di mana kearifan lokal tetap dihormati tanpa melanggar hukum nasional. Pengakuan negara terhadap keberadaan lembaga adat melalui UU Desa dan peraturan daerah adalah langkah positif yang perlu diperkuat.

5. Regenerasi Kepemimpinan

Banyak tokoh masyarakat dan adat yang sudah lanjut usia. Sementara itu, generasi muda kurang tertarik untuk mengambil alih peran. Mereka lebih memilih bekerja di kota, menjadi pegawai, atau berwirausaha daripada menjadi tokoh adat yang tidak menjanjikan penghasilan tetap. Akibatnya, terjadi kekosongan kepemimpinan. Ketika tokoh tua meninggal, tidak ada pengganti yang siap.

Regenerasi menjadi tantangan krusial. Perlu upaya sadar untuk melibatkan generasi muda, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan insentif agar mereka tertarik. Tokoh-tokoh tua perlu secara aktif membimbing dan mempersiapkan penerus.

6. Politisasi dan Kooptasi

Di era demokrasi dan otonomi desa, tokoh masyarakat dan adat sering menjadi incaran politisasi. Calon kepala desa, calon legislatif, atau partai politik berusaha merekrut mereka untuk mendukung kampanye. Ada imbalan yang ditawarkan—uang, proyek, atau jabatan. Ini bisa mengkooptasi independensi tokoh. Mereka bisa kehilangan posisi sebagai penyeimbang dan menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu.

Tokoh masyarakat dan adat perlu menjaga jarak dari politik praktis. Mereka boleh mendukung program, tetapi tidak boleh menjadi alat partai atau calon tertentu. Independensi adalah modal utama mereka. Jika hilang, kepercayaan masyarakat juga akan hilang.

G. MEMPERKUAT PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN ADAT

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, perlu ada upaya sistematis untuk memperkuat peran tokoh masyarakat dan adat.

1. Pengakuan dan Legitimasi Formal

Negara perlu terus memperkuat pengakuan terhadap keberadaan dan peran tokoh adat. UU Desa telah membuka ruang dengan mengakui lembaga adat sebagai bagian dari kelembagaan desa. Peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten juga perlu mengakomodasi peran tokoh adat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Pengakuan formal ini penting untuk memberikan legitimasi, melindungi dari intervensi yang tidak semestinya, dan membuka akses terhadap sumber daya. Namun, pengakuan formal harus dilakukan hati-hati agar tidak mengubah esensi kepemimpinan informal yang berbasis pada kepercayaan masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas

Tokoh masyarakat dan adat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan baru tanpa harus kehilangan kearifan lokal. Pelatihan-pelatihan bisa diberikan dalam berbagai bidang:

- **Manajemen konflik dan mediasi** untuk memperkuat peran mereka sebagai penengah.
- **Komunikasi publik dan literasi digital** agar mampu berkomunikasi efektif, termasuk memanfaatkan media sosial.
- **Pengetahuan tentang regulasi** agar bisa bersinergi dengan hukum formal tanpa kehilangan identitas adat.
- **Pengelolaan ekonomi dan kewirausahaan** agar bisa memanfaatkan potensi ekonomi tradisi.
- **Pelestarian budaya dan dokumentasi** untuk menjaga warisan leluhur.

Peningkatan kapasitas ini harus dilakukan dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal, bukan menggantinya dengan pengetahuan asing yang tidak relevan.

3. Dukungan Ekonomi

Banyak tokoh masyarakat dan adat yang hidup pas-pasan. Mereka mencurahkan waktu dan tenaga untuk masyarakat tanpa imbalan materi. Ini tidak bisa berkelanjutan. Diperlukan dukungan ekonomi agar mereka bisa fokus pada peran sosialnya.

Dukungan bisa dalam bentuk:

- **Insentif atau honorarium** dari APBDes untuk tokoh yang aktif menjalankan peran tertentu.
- **Pemberdayaan ekonomi** melalui program-program yang melibatkan tokoh, misalnya pengembangan BUMDes berbasis budaya.
- **Fasilitasi akses** terhadap modal, pasar, dan teknologi untuk usaha produktif yang dikelola tokoh.
- **Penghargaan** berupa dana pembinaan atau bantuan sosial.

Dukungan ekonomi ini harus diberikan dengan transparan dan akuntabel, agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketergantungan.

4. Regenerasi

Tokoh-tokoh tua perlu secara aktif membimbing generasi muda untuk menjadi penerus. Ini bisa dilakukan melalui:

- **Pendidikan informal** dalam keluarga dan masyarakat tentang nilai-nilai dan peran tokoh.
- **Pelibatan generasi muda** dalam kegiatan adat dan kemasyarakatan, sehingga mereka mengenal dan mencintai tradisinya.
- **Pendidikan formal** yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti muatan lokal tentang budaya daerah.
- **Kaderisasi terstruktur** melalui organisasi pemuda adat atau forum-forum generasi muda.

Regenerasi harus dilakukan dengan kesadaran bahwa generasi muda hidup di zaman yang berbeda. Mereka perlu dibekali kemampuan untuk mengadaptasi tradisi dengan konteks kekinian, bukan sekadar meniru apa yang dilakukan generasi tua.

5. Penguatan Jejaring

Tokoh masyarakat dan adat perlu memperkuat jejaring, baik sesama tokoh di desa, antar desa, maupun dengan pihak luar. Jejaring ini penting untuk:

- **Bertukar pengalaman** dan belajar dari praktik baik di tempat lain.
- **Memperkuat advokasi** ketika menghadapi masalah bersama.
- **Mengakses sumber daya** dari pemerintah, LSM, atau pihak lain.
- **Memperluas wawasan** tentang perkembangan di luar desa.

Forum-forum pertemuan tokoh adat dan masyarakat di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi perlu difasilitasi agar jejaring ini terbangun.

6. Perlindungan Hukum dan Budaya

Negara perlu memberikan perlindungan hukum bagi tokoh adat dalam menjalankan perannya, termasuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya. Perlindungan ini penting agar tokoh adat tidak menjadi korban kriminalisasi ketika membela kepentingan masyarakatnya.

Perlindungan juga perlu diberikan terhadap warisan budaya—upacara adat, pengetahuan tradisional, bahasa daerah—dari kepunahan atau klaim pihak luar. Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),

seperti yang dilakukan untuk tradisi Murok Jerami di Bangka Tengah, adalah langkah positif yang perlu diperluas.

H. RANGKUMAN

Tokoh masyarakat dan tokoh adat adalah pilar penting dalam kehidupan desa. Mereka memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, antara tradisi dan modernitas, antara kepentingan lokal dan tekanan global. Mereka memperoleh legitimasi dari tradisi, kharisma, pengetahuan, atau kebaikan hati, dan memiliki pengaruh yang besar karena kepercayaan masyarakat.

Peran tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat beragam dan multidimensi:

1. **Sebagai agen perubahan**, mereka memperkenalkan ide-ide baru dan menggerakkan masyarakat menuju perubahan positif.
2. **Sebagai pemobilisasi massa**, mereka mampu menggalang partisipasi warga dalam berbagai kegiatan.
3. **Sebagai panutan moral**, mereka menjadi teladan dalam perilaku dan menjaga nilai-nilai luhur.
4. **Sebagai penjaga tradisi dan budaya**, mereka melestarikan upacara adat, mewariskan nilai-nilai leluhur, dan menjaga situs budaya.
5. **Sebagai mediator dan penyelesai konflik**, mereka menjadi penengah yang efektif dalam berbagai sengketa.
6. **Sebagai gatekeeper pengaruh luar**, mereka menyaring pengaruh globalisasi agar sesuai dengan nilai-nilai lokal.
7. **Sebagai mitra pemerintah desa**, mereka mendukung program-program pembangunan dan membantu menggerakkan partisipasi.

Hubungan antara tokoh masyarakat/adat dengan pemerintah desa bersifat dinamis—bisa harmonis, bisa tegang. Sinergi antara kepemimpinan formal dan informal adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Sinergi ini dibangun melalui komunikasi intensif, saling menghormati peran, dan kolaborasi dalam program-program.

Tokoh masyarakat dan adat menghadapi berbagai tantangan di era modern: erosi pengaruh di kalangan generasi muda, kompetisi dengan tokoh baru, tekanan ekonomi dan komersialisasi, konflik dengan hukum formal, regenerasi kepemimpinan, dan politisasi. Menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat peran mereka: pengakuan formal, peningkatan kapasitas, dukungan ekonomi, regenerasi, penguatan jejaring, dan perlindungan hukum dan budaya.

Pada akhirnya, tokoh masyarakat dan tokoh adat adalah kekayaan sosial yang tak ternilai bagi desa. Mereka adalah penjaga memori kolektif, pemelihara nilai-nilai luhur, dan perekat sosial di tengah arus perubahan yang cepat. Desa yang kuat adalah desa yang mampu merawat para tokohnya, menghormati peran mereka, dan memanfaatkan kearifan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat akan menciptakan tata kelola desa yang kokoh, berakar pada budaya setempat, namun tetap terbuka pada kemajuan.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Siapa saja tokoh masyarakat dan tokoh adat yang paling berpengaruh di desa Anda? Apa yang membuat mereka berpengaruh? Bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah desa?
2. Pernahkah Anda menyaksikan peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik? Bagaimana prosesnya dan mengapa mereka efektif?
3. Bagaimana pandangan generasi muda di desa Anda terhadap tokoh adat dan tradisi lokal? Apakah mereka masih menghormati dan tertarik, atau sudah mulai acuh?
4. Adakah contoh di desa Anda di mana tokoh masyarakat menjadi agen perubahan yang berhasil? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana dampaknya?
5. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat/adat di daerah Anda? Apakah harmonis atau ada ketegangan? Jika ada ketegangan, apa penyebabnya?
6. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi tokoh masyarakat dan adat di era digital seperti sekarang? Bagaimana mereka bisa mengatasinya?
7. Bagaimana cara terbaik untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai lokal? Apa peran tokoh adat dalam regenerasi ini?
8. Menurut Anda, sejauh mana tokoh adat boleh mengkomersialkan tradisi untuk pariwisata? Di mana batas antara pelestarian dan komodifikasi?

BAB XII

PERAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DESA

A. PENGANTAR: HARAPAN DAN MASA DEPAN DESA

Pemuda adalah energi yang menggerakkan roda perubahan. Dalam setiap masyarakat, pemuda selalu menjadi kelompok yang paling dinamis, paling responsif terhadap perubahan, dan paling berani mengambil risiko. Mereka adalah jembatan antara masa lalu yang diwariskan generasi tua dan masa depan yang ingin mereka bangun sendiri. Di desa, pemuda bukan hanya penerus tradisi, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa desa melompat menuju kemajuan.

Namun, realitas yang kita hadapi seringkali paradoksal. Di satu sisi, pemuda dipuji sebagai harapan masa depan, subjek pembangunan, dan agen perubahan. Di sisi lain, banyak pemuda desa yang justru meninggalkan desanya, berbondong-bondong merantau ke kota, sehingga desa kehilangan energi mudanya. Desa menjadi tempat persinggahan orang tua dan anak-anak, sementara generasi produktifnya berada di perantauan. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang peran pemuda dalam perubahan sosial desa. Kita akan memulai dengan memahami siapa yang dimaksud dengan pemuda dalam konteks desa, apa potensi dan karakteristik mereka, serta bagaimana idealisme dan semangat mereka dapat menjadi kekuatan transformatif. Selanjutnya, kita akan membahas organisasi kepemudaan, terutama Karang Taruna, sebagai wadah kreativitas dan partisipasi. Kita akan mengeksplorasi berbagai bidang di mana pemuda dapat berperan: kewirausahaan dan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan digitalisasi desa, pelestarian

budaya dan seni, serta partisipasi dalam pembangunan dan politik desa. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi pemuda, terutama arus urbanisasi, serta strategi untuk menciptakan ekosistem yang membuat desa menarik bagi pemuda untuk berkarya dan membangun masa depan di kampung halamannya sendiri.

B. MEMAHAMI PEMUDA DESA

1. Siapa Pemuda Desa?

Pemuda adalah fase kehidupan antara anak-anak dan dewasa, periode transisi di mana seseorang mencari identitas, mengembangkan potensi, dan mulai mengambil peran dalam masyarakat. Batasan usia pemuda bervariasi menurut konteks. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dalam konteks desa, definisi ini bisa lebih fleksibel, mencakup mereka yang sudah menikah dan berkeluarga hingga usia 35-40 tahun, selama masih aktif dalam organisasi kepemudaan.

Pemuda desa memiliki karakteristik yang khas. Mereka umumnya lahir dan besar di desa, mengenal budaya dan nilai-nilai lokal, tetapi juga terpapar modernitas melalui pendidikan, media, dan interaksi dengan dunia luar. Mereka adalah generasi perbatasan, yang berdiri di antara dua dunia: tradisi yang diwariskan dan modernitas yang ditawarkan.

2. Potensi Pemuda Desa

Pemuda desa menyimpan potensi luar biasa yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan transformatif bagi desa.

a. Semangat dan Energi

Pemuda memiliki semangat yang membara, energi yang melimpah, dan idealisme yang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah, berani mencoba hal-hal baru, dan tidak takut gagal. Semangat ini adalah modal utama untuk mendorong perubahan. Ketika semangat ini diarahkan pada kegiatan produktif, hasilnya bisa luar biasa.

b. Idealisme dan Visi

Pemuda masih memiliki idealisme yang belum terkotori oleh pragmatisme dan kepentingan jangka pendek. Mereka bermimpi tentang desa yang lebih baik, lebih maju, lebih adil. Mimpi-mimpi ini adalah sumber visi yang dapat menginspirasi dan menggerakkan. Pemuda tidak hanya memikirkan apa yang ada, tetapi juga apa yang seharusnya ada.

c. Kreativitas dan Inovasi

Pemuda adalah kelompok yang paling kreatif dan inovatif. Mereka tidak terikat pada cara-cara lama, selalu mencari cara baru yang lebih baik. Di era digital, kreativitas ini semakin terbuka lebar. Mereka bisa

menjadi desainer grafis, content creator, pengembang aplikasi, atau pelaku ekonomi kreatif lainnya, tanpa harus meninggalkan desa.

d. Penguasaan Teknologi

Pemuda adalah digital natives. Mereka lahir dan besar di era digital, akrab dengan internet, media sosial, dan berbagai platform teknologi. Penguasaan teknologi ini adalah keunggulan komparatif yang sangat berharga di era revolusi industri 4.0. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk desa, mengembangkan wisata digital, atau menciptakan solusi-solusi inovatif bagi masalah desa.

e. Jaringan dan Koneksi

Pemuda, terutama yang pernah merantau untuk sekolah atau bekerja, memiliki jaringan yang luas—teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, komunitas online. Jaringan ini dapat menjadi sumber informasi, peluang, dan dukungan bagi pengembangan desa.

f. Keberanian Mengambil Risiko

Pemuda lebih berani mengambil risiko daripada orang tua yang cenderung hati-hati. Mereka tidak takut mencoba usaha baru, mengambil keputusan sulit, atau menghadapi tantangan. Keberanian ini penting dalam mendorong inovasi dan perubahan.

3. Tantangan Pemuda Desa

Di balik potensi besar, pemuda desa juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat peran mereka.

a. Keterbatasan Akses Pendidikan dan Pelatihan

Tidak semua pemuda desa memiliki akses terhadap pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan yang berkualitas. Sekolah lanjutan sering berada di kecamatan atau kabupaten, membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi. Perguruan tinggi hanya ada di kota-kota besar. Akibatnya, banyak pemuda yang hanya berpendidikan SMA atau bahkan putus sekolah.

b. Keterbatasan Akses Modal

Memulai usaha membutuhkan modal. Pemuda desa umumnya tidak memiliki akses terhadap permodalan formal seperti kredit bank karena tidak memiliki agunan atau rekam jejak usaha. Mereka sering terjebak pada rentenir dengan bunga tinggi. Ini menjadi penghambat utama bagi pengembangan kewirausahaan pemuda.

c. Minimnya Pendampingan dan Pembinaan

Ide-ide kreatif pemuda sering kandas di tengah jalan karena tidak ada pendampingan yang berkelanjutan. Mereka mungkin antusias memulai, tetapi ketika menghadapi masalah teknis, manajerial, atau pemasaran, tidak ada yang membimbing. Pendampingan dari pemerintah, LSM, atau sektor swasta masih sangat terbatas.

d. Pengaruh Negatif Globalisasi

Kemajuan teknologi dan akses informasi yang tak terbatas juga membawa pengaruh negatif. Pemuda bisa terpapar pada konten-konten negatif: pornografi, perjudian online, radikalisme, atau gaya hidup konsumtif dan hedonis. Jika tidak dibentengi nilai-nilai yang kuat, mereka bisa terjerumus pada perilaku menyimpang.

e. Krisis Identitas dan Nilai

Pemuda desa hidup dalam tarik-menarik antara nilai-nilai tradisional yang diwariskan orang tua dan nilai-nilai modern yang mereka serap dari media dan pergaulan. Mereka bisa mengalami kebingungan identitas—antara ingin menjadi "orang desa" yang menjunjung tradisi dan ingin menjadi "orang modern" yang dianggap keren. Krisis nilai ini bisa membuat mereka kehilangan arah.

f. Arus Urbanisasi

Tantangan terbesar mungkin adalah arus urbanisasi yang terus menguras energi muda desa. Pemuda-pemuda terdidik, kreatif, dan energik lebih memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau sekadar mencari pengalaman. Desa kehilangan aset paling berharganya. Yang tersisa seringkali adalah pemuda dengan pendidikan dan keterampilan terbatas, atau mereka yang tidak mampu merantau. Ini menciptakan lingkaran setan: desa tertinggal karena kekurangan pemuda potensial, pemuda pergi karena desa tertinggal.

C. KARANG TARUNA: WADAH ORGANISASI KEPEMUDAAN

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang menjadi wadah utama bagi pemuda desa untuk berorganisasi, berkreasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Memahami Karang Taruna adalah kunci untuk memahami peran pemuda desa.

1. Sejarah dan Landasan Hukum

Karang Taruna lahir pada tahun 1960 di Kampung Melayu, Jakarta, sebagai respons terhadap masalah sosial yang dihadapi pemuda saat itu. Sejak itu, organisasi ini berkembang ke seluruh Indonesia dan menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan generasi muda.

Landasan hukum Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Dalam Permensos tersebut, Karang Taruna didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

2. Tujuan dan Fungsi

Tujuan Karang Taruna adalah:

- Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial.
- Terbangunnya generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
- Terciptanya kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya potensi dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

Fungsi Karang Taruna meliputi:

- Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
- Penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- Penyelenggara pemberdayaan masyarakat.
- Penyelenggara pembangunan kepedulian sosial.
- Penyelenggara pengembangan usaha ekonomi produktif.
- Penumbuhan, penguatan, dan pengembangan peran aktif generasi muda dalam pembangunan.
- Penumbuhan, penguatan, dan pengembangan jejaring kelembagaan dan kemitraan.

3. Peran Strategis Karang Taruna

Karang Taruna memiliki peran strategis dalam berbagai bidang:

a. Wadah Kreativitas dan Ekspresi

Karang Taruna menjadi tempat pemuda menyalurkan kreativitas dan bakatnya—seni, olahraga, jurnalistik, fotografi, musik, teater. Berbagai lomba dan festival yang diselenggarakan Karang Taruna menjadi ajang unjuk kemampuan dan pengembangan diri.

b. Wadah Partisipasi dalam Pembangunan

Karang Taruna dilibatkan dalam musyawarah desa dan berbagai forum perencanaan pembangunan. Mereka menyuarakan aspirasi pemuda dan menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang melibatkan pemuda.

c. Wadah Pendidikan dan Pelatihan

Karang Taruna menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemuda—pelatihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, manajemen organisasi, dan lain-lain.

d. Wadah Pengembangan Ekonomi Produktif

Karang Taruna dapat mengembangkan unit-unit usaha ekonomi produktif, baik untuk membiayai kegiatan organisasi maupun untuk memberdayakan anggota secara ekonomi. Usaha bisa berupa koperasi, usaha bersama, atau pengelolaan aset ekonomi.

e. Wadah Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

Karang Taruna aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan—bakti sosial, donor darah, penanggulangan bencana, santunan anak yatim, dan lain-lain. Ini menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap sesama.

f. Agen Perubahan dan Kontrol Sosial

Karang Taruna dapat menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi dan modernisasi di desa, sekaligus menjadi agen kontrol sosial yang mengawasi dan mengingatkan jika terjadi penyimpangan.

4. Dinamika Karang Taruna

Dalam praktiknya, Karang Taruna menghadapi berbagai dinamika. Tidak semua Karang Taruna aktif dan berfungsi optimal. Ada yang hidup dan berkembang, ada yang mati suri, ada yang hanya aktif saat ada lomba atau acara tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan Karang Taruna antara lain:

- **Kepemimpinan**: Ketua yang visioner, energik, dan mampu menggerakkan anggota sangat menentukan.
- **Dukungan pemerintah desa**: Anggaran, fasilitas, dan pembinaan dari pemerintah desa sangat penting.
- **Partisipasi anggota**: Semakin banyak anggota yang aktif, semakin hidup organisasi.
- **Kegiatan yang menarik**: Program yang relevan dengan minat dan kebutuhan pemuda akan menarik partisipasi.
- **Mitra dan jaringan**: Kerjasama dengan pihak lain—pemerintah, swasta, LSM—memperluas peluang.

D. PERAN PEMUDA DALAM BERBAGAI BIDANG

Pemuda desa dapat berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan. Berikut adalah beberapa bidang utama di mana kontribusi pemuda sangat signifikan.

1. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

Di era digital, pemuda desa tidak lagi terbatas pada sektor pertanian tradisional. Mereka dapat mengembangkan berbagai usaha kreatif yang memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital.

a. Pengembangan Produk Lokal

Pemuda dapat mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah. Singkong diolah menjadi berbagai camilan kekinian. Buah-buahan diolah menjadi jus, sirup, atau manisan. Hasil pertanian diolah menjadi produk setengah jadi atau jadi. Dengan kemasan menarik dan cerita yang kuat, produk-produk ini dapat bersaing di pasar modern.

b. Desain Grafis dan Percetakan

Kebutuhan akan desain grafis semakin meningkat—desain kemasan produk, banner acara, undangan, konten media sosial. Pemuda yang menguasai aplikasi desain (Canva, Photoshop, CorelDraw) dapat membuka jasa desain grafis yang melayani kebutuhan desa dan sekitarnya.

c. Fotografi dan Videografi

Dokumentasi acara, pembuatan konten promosi, foto produk, video profil desa—semua membutuhkan jasa fotografi dan videografi. Pemuda yang memiliki keterampilan ini dapat membuka usaha yang menjanjikan, terutama di desa wisata.

d. Konten Kreator dan Influencer Lokal

Media sosial membuka peluang menjadi konten kreator. Pemuda dapat membuat konten tentang kehidupan desa, kuliner lokal, wisata tersembunyi, atau tips dan tutorial. Jika berhasil membangun audiens, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, endorse, atau kerjasama dengan berbagai pihak. Mereka juga bisa menjadi influencer lokal yang mempromosikan produk-produk desa.

e. Kuliner dan Katering

Kuliner selalu punya pasar. Pemuda dapat mengembangkan usaha kuliner—warung kopi, kafe sederhana, jajanan kekinian, atau jasa katering untuk acara-acara. Dengan memanfaatkan resep lokal dan dikemas dengan gaya modern, usaha kuliner bisa berkembang pesat.

f. Fashion dan Kriya

Pemuda dapat mengembangkan usaha fashion dengan memanfaatkan bahan lokal atau mengangkat motif tradisional. Mereka juga bisa mengembangkan kerajinan tangan—souvenir, aksesori, dekorasi—yang memiliki nilai seni dan ekonomi.

2. Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa

Penguasaan teknologi informasi adalah keunggulan pemuda yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa.

a. Pengelolaan Media Sosial Desa

Media sosial desa (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok) adalah etalase digital yang dapat mempromosikan potensi desa. Pemuda dapat menjadi pengelola konten yang kreatif, membuat postingan menarik, berinteraksi dengan audiens, dan membangun citra positif desa. Desa wisata, desa dengan produk unggulan, atau desa dengan potensi budaya sangat diuntungkan dengan pengelolaan media sosial yang baik.

b. Pengembangan Platform Digital

Pemuda yang memiliki kemampuan coding dapat mengembangkan platform digital untuk desa—website desa, aplikasi pemesanan homestay, marketplace produk desa, atau sistem informasi desa. Platform-platform ini dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas pasar, dan mempermudah akses informasi.

c. Digital Marketing

Pemasaran produk desa tidak lagi terbatas pada pasar lokal. Dengan digital marketing, produk dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Pemuda dapat mengelola toko online di marketplace (Shopee, Tokopedia, Lazada), berjualan di media sosial, atau mengikuti program-program pemasaran dari pemerintah atau swasta.

d. Pelatihan Literasi Digital

Tidak semua warga desa melek digital. Pemuda dapat berperan sebagai trainer yang mengajarkan keterampilan digital dasar—cara menggunakan aplikasi, cara berbelanja online yang aman, cara membuat konten, cara menghindari penipuan online. Ini adalah bentuk kontribusi sosial yang sangat berharga.

e. Pengembangan E-Government Desa

Pemerintah desa membutuhkan dukungan teknis dalam mengembangkan sistem informasi desa (SID) yang terintegrasi. Pemuda yang memiliki kemampuan IT dapat membantu merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem ini, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan.

3. Pelestarian Budaya dan Seni

Pemuda adalah pewaris budaya. Mereka memiliki peran penting dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni dan budaya lokal.

a. Revitalisasi Kesenian Tradisional

Banyak kesenian tradisional yang mulai ditinggalkan karena generasi muda menganggapnya kuno. Pemuda dapat melakukan revitalisasi—mempelajari kembali, berlatih, dan mementaskan kesenian tersebut dengan kemasan yang lebih menarik. Kolaborasi antara musik tradisional dan modern, atau antara seni tradisi dan teknologi, dapat menciptakan bentuk seni baru yang tetap berakar pada tradisi.

b. Event Organizer Budaya

Pemuda dapat menjadi penyelenggara acara-acara budaya—festival kesenian, lomba tradisional, pawai budaya, atau even tahunan yang menjadi agenda desa. Acara-acara ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga bisa menjadi atraksi wisata yang mendatangkan pengunjung.

c. Dokumentasi dan Digitalisasi Budaya

Pemuda dapat mendokumentasikan berbagai aspek budaya desa—upacara adat, kesenian, cerita rakyat, kuliner tradisional, bahasa daerah—dalam bentuk tulisan, foto, atau video. Dokumentasi ini kemudian dapat disebarluaskan melalui media sosial, YouTube, atau platform digital lainnya. Ini penting agar budaya tidak punah dan dikenal oleh generasi muda serta khalayak luas.

d. Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Budaya

Budaya dapat menjadi sumber inspirasi bagi produk-produk kreatif. Motif batik atau tenun tradisional dapat diaplikasikan pada berbagai produk fashion. Cerita rakyat dapat diadaptasi menjadi komik, animasi, atau film pendek. Kuliner tradisional dapat dikemas ulang menjadi produk kekinian. Pemuda dapat menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mengangkat nilai-nilai budaya.

4. Partisipasi dalam Pembangunan dan Politik Desa

Pemuda juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan politik desa.

a. Partisipasi dalam Musyawarah Desa

Pemuda perlu aktif dalam musyawarah desa, menyuarakan aspirasi dan kebutuhan generasi muda, serta berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Kehadiran mereka penting agar pembangunan desa tidak hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga masa depan.

b. Menjadi Anggota BPD atau Perangkat Desa

Semakin banyak pemuda yang duduk di BPD atau menjadi perangkat desa, semakin besar suara generasi muda dalam pengambilan keputusan. Ini juga menjadi bukti bahwa pemuda mampu memimpin dan mengelola pemerintahan.

c. Pengawasan dan Advokasi

Pemuda dapat menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan mengadvokasi isu-isu penting—lingkungan hidup, hak-hak warga, keadilan sosial.

d. Relawan Pembangunan

Pemuda dapat menjadi relawan dalam berbagai kegiatan pembangunan—gotong royong, program kesehatan, program pendidikan, penanggulangan bencana. Peran relawan ini sangat berarti, terutama di desa-desa dengan sumber daya terbatas.

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim

Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim semakin mendesak. Pemuda dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

a. Gerakan Penghijauan dan Konservasi

Pemuda dapat menginisiasi gerakan penghijauan, penanaman pohon, pembuatan taman desa, atau konservasi sumber mata air. Mereka juga bisa terlibat dalam pengelolaan hutan desa atau kawasan konservasi lainnya.

b. Pengelolaan Sampah

Masalah sampah menjadi persoalan serius di banyak desa. Pemuda dapat menginisiasi program pengelolaan sampah—bank sampah, komposting, daur ulang, atau gerakan mengurangi plastik. Ini tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber ekonomi.

c. Kampanye dan Edukasi Lingkungan

Pemuda dapat menjadi agen edukasi yang mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan kepada masyarakat luas—hemat energi, mengurangi sampah plastik, tidak membakar sampah, menjaga kebersihan sungai.

d. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemuda dapat terlibat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa—membangun sistem peringatan dini, membuat sumur resapan, mengembangkan pertanian tahan iklim, atau mempersiapkan desa menghadapi bencana.

E. STUDI KASUS: INSPIRASI DARI PEMUDA DESA

1. Kasus 1: Pemuda Penggerak Desa Wisata di Pentingsari

Di Desa Pentingsari, Yogyakarta, pemuda memiliki peran sentral dalam pengembangan desa wisata. Mereka yang menjadi pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku seni pertunjukan, dan pengelola media sosial desa. Mereka juga yang menjadi motor dalam berbagai kegiatan—paket wisata, outbound, pelatihan, dan promosi.

Karang Taruna Pentingsari menjadi wadah organisasi yang aktif. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan, evaluasi, dan pengembangan kapasitas. Mereka juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak—biro perjalanan, pemerintah, perguruan tinggi—untuk memajukan desa wisata.

Kisah Pentingsari menunjukkan bahwa dengan organisasi yang kuat dan semangat pemuda, desa dapat bertransformasi. Pemuda tidak perlu merantau ke kota; di desanya sendiri mereka bisa berkarya, berpenghasilan, dan membangun masa depan.

2. Kasus 2: Komunitas Pemuda Digital di Desa Ponggok, Klaten

Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, terkenal dengan wisata airnya yang dikelola oleh BUMDes. Di balik sukses ini, ada peran pemuda yang mengelola aspek digital. Mereka yang membuat website desa, mengelola media sosial, membuat konten promosi, dan berinteraksi dengan wisatawan online.

Pemuda Ponggok juga mengembangkan aplikasi untuk memudahkan reservasi homestay dan tiket wisata. Mereka memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas pasar. Berkat digitalisasi yang dikelola pemuda, Desa Ponggok menjadi contoh sukses desa wisata berbasis teknologi.

3. Kasus 3: Pemuda Pelestari Budaya di Desa Tenganan, Bali

Di Desa Tenganan, Bali, pemuda aktif dalam pelestarian budaya. Mereka belajar menenun kain gringsing, mempelajari tarian tradisional, dan terlibat dalam berbagai upacara adat. Mereka juga yang menjadi pemandu bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya Tenganan.

Yang menarik, pemuda Tenganan tidak anti terhadap modernitas. Mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya desa, membuat konten tentang tenun gringsing, dan berinteraksi dengan wisatawan. Mereka membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan.

4. Kasus 4: Inovasi Pemuda dalam Pengolahan Produk Lokal di Desa Bayan, Lombok

Di Desa Bayan, Lombok Utara, sekelompok pemuda mengembangkan inovasi pengolahan kopi lokal. Mereka tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengolahnya menjadi berbagai produk—bubuk kopi dengan kemasan menarik, kopi siap seduh, hingga produk turunan seperti sabun kopi dan lulur kopi.

Pemuda Bayan juga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memasarkan produknya. Mereka membuat konten tentang proses produksi, tentang keunikan kopi Bayan, dan tentang kehidupan desa. Produk mereka kini dikenal hingga ke luar daerah, bahkan ada yang diekspor.

Kisah ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas, potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Pemuda menjadi motor inovasi yang mengangkat produk desa ke pasar yang lebih luas.

F. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Meskipun memiliki potensi besar, pemuda desa menghadapi berbagai tantangan yang menghambat peran mereka.

1. Arus Urbanisasi

Ini adalah tantangan terbesar. Pemuda-pemuda terdidik, kreatif, dan energik memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau mencari pengalaman. Mereka tergiur oleh gemerlap kota, peluang kerja yang lebih banyak, dan gaji yang lebih tinggi. Desa kehilangan aset paling berharga.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa yang bermigrasi ke kota adalah usia produktif (15-35 tahun). Akibatnya, desa mengalami penuaan penduduk (aging population). Yang tersisa adalah orang tua dan anak-anak. Inovasi mandek, partisipasi lesu, dan pembangunan lambat.

Urbanisasi bukan fenomena yang bisa dihentikan paksa. Ini adalah konsekuensi dari ketimpangan pembangunan desa-kota. Selama desa tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak, pendidikan berkualitas, dan fasilitas hidup yang memadai, pemuda akan terus berbondong-bondong ke kota.

2. Keterbatasan Akses Modal

Memulai usaha membutuhkan modal. Pemuda desa umumnya tidak memiliki akses ke perbankan formal karena tidak memiliki agunan atau rekam jejak usaha. Mereka sering terjebak pada rentenir dengan bunga tinggi yang justru mematikan usaha.

Program-program kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah seringkali sulit diakses karena prosedur yang rumit dan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi pemuda. Ini menjadi penghambat utama pengembangan kewirausahaan pemuda.

3. Minimnya Pendampingan dan Pelatihan Berkelanjutan

Ide-ide kreatif pemuda sering kandas di tengah jalan karena tidak ada pendampingan yang berkelanjutan. Mereka mungkin antusias memulai, tetapi ketika menghadapi masalah teknis, manajerial, atau pemasaran, tidak ada yang membimbing.

Pelatihan-pelatihan yang ada sering bersifat seremonial, sekali selesai lalu tidak ada kelanjutan. Padahal, pengembangan usaha dan keterampilan membutuhkan pendampingan jangka panjang. Pemuda butuh mentor yang bisa menemani proses belajar mereka.

4. Minimnya Ruang Partisipasi

Dalam struktur pemerintahan desa yang masih didominasi generasi tua, suara pemuda sering tidak didengar. Dalam musyawarah desa, pemuda hanya menjadi penonton, bukan pengambil keputusan. Aspirasi mereka tentang lapangan kerja, tempat kreatif, atau fasilitas olahraga sering terabaikan.

Minimnya ruang partisipasi ini membuat pemuda merasa tidak memiliki tempat di desa. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan desanya sendiri. Akibatnya, mereka apatis atau memilih pergi.

5. Pengaruh Negatif Globalisasi

Media sosial dan internet, di samping membawa manfaat, juga membawa dampak negatif. Pemuda bisa terpapar pada konten-konten negatif—pornografi, perjudian online, radikalisme. Gaya hidup konsumtif dan hedonis yang ditampilkan selebritas media sosial bisa memicu perilaku konsumtif yang tidak sehat, bahkan mendorong mereka pada utang atau tindak kriminal.

Nilai-nilai tradisional yang mengajarkan kesederhanaan, gotong royong, dan kepedulian sosial bisa tergerus oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme yang dibawa globalisasi.

6. Krisis Identitas dan Nilai

Pemuda desa hidup dalam tarik-menarik antara dua dunia: dunia tradisi yang diwariskan orang tua dan dunia modern yang mereka lihat di media. Mereka bisa mengalami kebingungan identitas—antara ingin menjadi "orang desa" yang menjunjung tradisi dan ingin menjadi "orang modern" yang dianggap keren.

Krisis nilai ini bisa membuat mereka kehilangan pegangan. Mereka bisa terjerumus pada perilaku menyimpang—tawuran, narkoba, seks bebas—sebagai bentuk pelarian atau pencarian jati diri yang salah arah.

7. Kurangnya Apresiasi dan Pengakuan

Pemuda yang berprestasi di desa sering kurang mendapatkan apresiasi. Mereka yang memenangkan lomba, berhasil dalam usaha, atau menciptakan inovasi, tidak mendapat pengakuan yang memadai. Ini bisa mematahkan semangat.

Sebaliknya, yang sering mendapat perhatian justru pemuda yang bermasalah. Media lebih suka memberitakan tawuran pemuda daripada prestasi pemuda. Ini membentuk citra negatif yang tidak adil.

G. STRATEGI MEMPERKUAT PERAN PEMUDA

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk memperkuat peran pemuda dalam perubahan sosial desa.

1. Menciptakan Ekosistem yang Mendukung

Langkah paling fundamental adalah menciptakan ekosistem yang membuat desa menarik bagi pemuda untuk tinggal, berkarya, dan membangun masa depan. Ekosistem ini mencakup berbagai aspek:

a. Ekonomi yang Menjanjikan

Desa harus mampu menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha yang layak. Ini membutuhkan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi desa—pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, industri kecil. BUMDes harus dikembangkan sebagai motor ekonomi desa yang melibatkan pemuda.

Insentif perlu diberikan bagi pemuda yang memulai usaha di desa—kemudahan akses modal, pendampingan, pemasaran. Program-program seperti "wirausaha muda desa" atau "startup desa" dapat digalakkan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas harus diperluas. Beasiswa untuk pemuda desa yang ingin melanjutkan pendidikan perlu diperbanyak. Pelatihan-pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi desa harus diselenggarakan secara berkelanjutan.

Pendidikan vokasi yang berbasis potensi lokal perlu dikembangkan. Misalnya, sekolah pertanian modern di desa agraris, sekolah pariwisata di desa wisata, atau sekolah digital di desa yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif.

c. Fasilitas Publik yang Memadai

Desa harus memiliki fasilitas publik yang layak—akses internet cepat, ruang kreatif (co-working space), tempat berkumpul pemuda, fasilitas olahraga, perpustakaan atau taman baca. Fasilitas-fasilitas ini akan membuat desa lebih nyaman untuk ditinggali dan menjadi tempat pemuda mengembangkan potensi.

d. Ruang Partisipasi yang Luas

Pemuda harus dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan desa—perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Kuota untuk pemuda dalam kelembagaan desa (BPD, LPM, Karang Taruna) perlu diperluas. Aspirasi pemuda harus didengar dan ditindaklanjuti.

e. Apresiasi dan Pengakuan

Pemuda yang berprestasi harus mendapat apresiasi dan pengakuan—penghargaan, publikasi, dukungan untuk pengembangan lebih lanjut. Ini akan memotivasi mereka dan menjadi contoh bagi pemuda lain.

2. Penguatan Karang Taruna

Karang Taruna sebagai wadah organisasi pemuda perlu diperkuat.

a. Peningkatan Kapasitas Pengurus

Pengurus Karang Taruna perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan advokasi. Pelatihan-pelatihan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, tidak hanya sekali.

b. Dukungan Anggaran dan Fasilitas

Pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan Karang Taruna. Fasilitas sekretariat dan sarana pendukung lainnya perlu disediakan. Karang Taruna juga perlu difasilitasi untuk

mengakses sumber dana dari luar—pemerintah kabupaten/provinsi, CSR perusahaan, atau program-program kewirausahaan.

c. Penguatan Jejaring

Karang Taruna perlu menjalin jejaring dengan Karang Taruna desa lain, dengan organisasi pemuda di tingkat kecamatan/kabupaten, dengan pemerintah, swasta, dan LSM. Jejaring ini akan membuka peluang kerjasama, pembelajaran, dan advokasi bersama.

d. Pengembangan Program Unggulan

Setiap Karang Taruna perlu memiliki program unggulan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desanya—misalnya, program pengembangan wisata desa, program bank sampah, program pelatihan digital, atau program pelestarian budaya. Program unggulan akan menjadi identitas dan kebanggaan.

3. Pendampingan dan Pembinaan Berkelanjutan

Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan sangat penting, terutama bagi pemuda yang baru memulai usaha atau kegiatan.

a. Program Inkubasi

Pemerintah desa, bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, atau swasta, dapat mengembangkan program inkubasi bagi usaha pemuda. Program ini menyediakan pendampingan intensif, akses modal awal, ruang kerja, dan jaringan pemasaran selama periode tertentu.

b. Mentoring oleh Tokoh Sukses

Pemuda dapat didampingi oleh mentor—tokoh masyarakat yang sukses, pengusaha lokal, atau profesional—yang membimbing mereka dalam mengembangkan usaha atau karir. Hubungan mentoring ini bisa sangat berharga karena memberikan pembelajaran dari pengalaman nyata.

c. Komunitas Belajar

Fasilitasi terbentuknya komunitas belajar di kalangan pemuda—komunitas petani milenial, komunitas content creator, komunitas pecinta budaya. Dalam komunitas, mereka bisa saling belajar, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain.

4. Fasilitasi Akses Modal

Akses terhadap modal usaha harus difasilitasi.

a. Koperasi Pemuda

Pembentukan koperasi pemuda dapat menjadi solusi. Koperasi bisa menjadi wadah untuk menghimpun dana, memberikan pinjaman dengan bunga ringan, dan mengembangkan usaha bersama.

b. Lembaga Keuangan Mikro

Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan mikro untuk menyediakan produk kredit khusus bagi pemuda dengan persyaratan ringan dan pendampingan.

c. Dana Desa untuk Pemuda

Sebagian Dana Desa dapat dialokasikan untuk program-program pengembangan pemuda—pelatihan, modal usaha, pendampingan. Alokasi ini perlu direncanakan bersama Karang Taruna dan disepakati dalam musyawarah desa.

d. Crowdfunding dan Kemitraan

Platform crowdfunding dapat dimanfaatkan untuk menggalang dana bagi usaha pemuda yang memiliki potensi. Kemitraan dengan perusahaan melalui program CSR juga perlu dijajaki.

5. Pendidikan Nilai dan Karakter

Pendidikan nilai dan karakter penting untuk membentengi pemuda dari pengaruh negatif globalisasi dan membentuk mereka menjadi pribadi yang berintegritas.

a. Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

Kegiatan keagamaan dan budaya perlu digalakkan di kalangan pemuda—pengajian, kebaktian, latihan kesenian tradisional, upacara adat. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya akan menjadi fondasi moral yang kuat.

b. Pendidikan Antikorupsi dan Antinarkoba

Pemuda perlu diedukasi tentang bahaya korupsi, narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya. Mereka perlu memiliki kesadaran bahwa masa depan mereka sendiri yang akan hancur jika terjerumus pada hal-hal tersebut.

c. Pengembangan Soft Skills

Selain keterampilan teknis, pemuda juga perlu dibekali soft skills—komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, etos kerja, kreativitas. Soft skills ini penting untuk kesuksesan dalam karir dan kehidupan.

6. Promosi Desa sebagai Tempat yang Menarik

Persepsi bahwa desa itu "ndeso" (kampungan, ketinggalan zaman) harus diubah. Desa harus dipromosikan sebagai tempat yang menarik untuk hidup dan berkarya.

a. Kampanye Positif tentang Desa

Media sosial dapat digunakan untuk mengampanyekan gaya hidup di desa yang lebih sehat, lebih dekat dengan alam, lebih humanis, dan lebih terjangkau secara ekonomi. Kisah-kisah sukses pemuda yang berkarya di desa perlu dipublikasikan secara luas.

b. Event dan Festival

Penyelenggaraan event dan festival secara rutin dapat menjadi daya tarik. Festival musik, lomba kreativitas, pameran produk desa, atau even olahraga bisa menjadi ajang bagi pemuda untuk unjuk kebolehan sekaligus mempromosikan desa.

c. Infrastruktur Digital

Ketersediaan akses internet cepat dan fasilitas pendukung lainnya akan membuat desa lebih menarik bagi generasi digital. Mereka bisa bekerja secara remote untuk perusahaan di kota, sambil tetap tinggal di desa dengan biaya hidup lebih murah.

7. Penguatan Identitas dan Kebanggaan

Pemuda perlu dibangkitkan rasa bangga terhadap desanya, terhadap budaya dan tradisinya.

a. Pendidikan Sejarah dan Budaya Lokal

Sejarah desa, tokoh-tokohnya, budayanya, dan kearifan lokalnya perlu diajarkan kepada generasi muda, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mereka perlu tahu bahwa desanya memiliki nilai, memiliki keunikan, memiliki sesuatu yang patut dibanggakan.

b. Pelibatan dalam Kegiatan Adat dan Budaya

Pemuda perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan adat dan budaya, tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku. Ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan cinta terhadap warisan leluhur.

c. Apresiasi terhadap Prestasi

Setiap prestasi pemuda, sekecil apa pun, perlu diapresiasi dan dirayakan. Ini akan membangun rasa bangga dan memotivasi mereka untuk terus berprestasi.

H. RANGKUMAN

Pemuda adalah agen perubahan sekaligus aset masa depan desa. Dengan semangat, idealisme, kreativitas, dan penguasaan teknologi, mereka memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor inovasi dan transformasi sosial di desanya.

Pemuda desa dapat berperan dalam berbagai bidang:

1. **Kewirausahaan dan ekonomi kreatif**: mengembangkan produk lokal, desain grafis, fotografi, konten kreator, kuliner, fashion, dan kriya.
2. **Teknologi informasi dan digitalisasi desa**: mengelola media sosial desa, mengembangkan platform digital, digital marketing, pelatihan literasi digital, dan e-government.
3. **Pelestarian budaya dan seni**: revitalisasi kesenian tradisional, event organizer budaya, dokumentasi dan digitalisasi budaya, serta pengembangan produk kreatif berbasis budaya.
4. **Partisipasi dalam pembangunan dan politik desa**: aktif dalam musyawarah desa, menjadi anggota BPD atau perangkat desa, pengawasan dan advokasi, serta relawan pembangunan.
5. **Lingkungan hidup dan ketahanan iklim**: gerakan penghijauan, pengelolaan sampah, kampanye lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Karang Taruna sebagai wadah organisasi kepemudaan memiliki peran strategis untuk mengakomodasi dan membina kreativitas pemuda. Organisasi ini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengurus, dukungan anggaran dan fasilitas, penguatan jejaring, dan pengembangan program unggulan.

Namun, pemuda desa menghadapi berbagai tantangan: arus urbanisasi, keterbatasan akses modal, minimnya pendampingan, minimnya ruang partisipasi, pengaruh negatif globalisasi, krisis identitas, dan kurangnya apresiasi. Tantangan terbesar adalah arus urbanisasi yang terus menguras energi muda desa.

Untuk memperkuat peran pemuda, diperlukan strategi komprehensif:

1. **Menciptakan ekosistem yang mendukung** melalui ekonomi yang menjanjikan, pendidikan dan pelatihan berkualitas, fasilitas publik memadai, ruang partisipasi luas, dan apresiasi.
2. **Penguatan Karang Taruna** sebagai wadah organisasi pemuda.
3. **Pendampingan dan pembinaan berkelanjutan** melalui program inkubasi, mentoring, dan komunitas belajar.
4. **Fasilitasi akses modal** melalui koperasi pemuda, lembaga keuangan mikro, alokasi dana desa, dan kemitraan.
5. **Pendidikan nilai dan karakter** untuk membentengi dari pengaruh negatif.
6. **Promosi desa sebagai tempat yang menarik** untuk hidup dan berkarya.
7. **Penguatan identitas dan kebanggaan** terhadap desa dan budayanya.

Pada akhirnya, pemuda bukan hanya masa depan desa, tetapi juga masa kini. Mereka bukan objek pembangunan yang perlu "diselamatkan", tetapi subjek yang mampu menyelamatkan desanya sendiri. Desa yang maju adalah desa yang mampu memberikan ruang, kesempatan, dan dukungan bagi pemuda untuk berkarya. Sebaliknya, pemuda yang peduli adalah pemuda yang tidak hanya memikirkan masa depannya sendiri, tetapi juga masa depan desanya. Sinergi antara desa yang mendukung dan pemuda yang peduli akan menciptakan lingkaran kebajikan: pemuda betah di desa, desa maju, pemuda semakin berdaya, desa semakin maju. Inilah yang harus kita bangun bersama.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana kondisi pemuda di desa Anda? Apakah banyak yang merantau ke kota atau masih banyak yang tinggal? Apa yang membuat mereka memilih untuk tinggal atau pergi?
2. Apakah Karang Taruna di desa Anda aktif? Apa saja program unggulannya? Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keaktifannya?
3. Inovasi apa yang pernah dilakukan pemuda di desa Anda? Apakah ada usaha kreatif, pengembangan produk lokal, atau pemanfaatan teknologi untuk kemajuan desa?
4. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi pemuda di desa Anda? Bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan dan pengembangan pemuda? Apakah ada program khusus atau alokasi anggaran untuk pemuda?
6. Apakah pemuda di desa Anda dilibatkan dalam musyawarah desa dan perencanaan pembangunan? Apakah aspirasi mereka didengar?
7. Bagaimana cara terbaik untuk mendorong pemuda agar mau berwirausaha di desa, tidak hanya bercita-cita menjadi PNS atau pekerja di kota?

8. Apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kebanggaan pemuda terhadap desa dan budayanya di tengah arus globalisasi?

BAB XIII

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. PENGANTAR: SETENGAH LANGIT YANG MENENTUKAN ARAH

"Perempuan adalah tiang negara. Jika baik perempuannya, maka baiklah negara. Jika rusak perempuannya, maka rusaklah negara." Ungkapan yang sering dikaitkan dengan hadis Nabi ini menegaskan betapa sentralnya peran perempuan dalam menentukan kualitas suatu masyarakat. Dalam konteks desa, perempuan bukan sekadar "konco wingking" (teman di belakang) yang hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur. Mereka adalah aktor utama dalam pembangunan manusia, penggerak ekonomi keluarga, penjaga ketahanan pangan, dan perekat sosial yang menjaga harmoni komunitas.

Namun, realitas yang kita hadapi seringkali timpang. Di satu sisi, perempuan memikul beban ganda—mengurus rumah tangga sekaligus berkontribusi dalam ekonomi dan sosial. Di sisi lain, akses mereka terhadap sumber daya, pendidikan, pelatihan, dan ruang partisipasi publik masih terbatas. Suara mereka sering tidak terdengar dalam musyawarah desa. Representasi mereka dalam struktur pemerintahan masih minim. Kebijakan yang berpihak pada perempuan masih jauh dari memadai.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang peran perempuan dalam pembangunan desa. Kita akan memulai dengan memahami posisi perempuan dalam struktur sosial desa, kemudian menelusuri berbagai peran yang mereka mainkan: dalam ekonomi keluarga melalui UMKM, dalam ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan, dalam pembangunan manusia melalui posyandu dan PKK, serta dalam pendidikan anak dan transmisi nilai. Selanjutnya, kita akan menganalisis hambatan-hambatan yang mereka hadapi—beban ganda, akses terbatas, representasi minim, serta hambatan struktural dan kultural. Pada bagian akhir, kita akan membahas strategi pemberdayaan perempuan dan pentingnya kebijakan desa yang responsif gender.

B. MEMAHAMI POSISI PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL DESA

1. Peran Ganda Perempuan

Perempuan desa umumnya memikul peran ganda yang berat. Di ranah domestik, mereka bertanggung jawab atas urusan rumah tangga: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, dan berbagai pekerjaan domestik lainnya. Pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai "kerja" karena tidak menghasilkan uang, padahal secara ekonomi ia bernilai dan secara sosial sangat vital.

Di ranah publik, perempuan juga aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Mereka bekerja di sawah, di kebun, di pasar, atau menjalankan usaha kecil-kecilan dari rumah. Mereka aktif dalam

organisasi sosial seperti PKK, arisan, pengajian, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mereka juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga ketika suami tidak mampu bekerja atau merantau.

Peran ganda ini seringkali tidak diimbangi dengan pembagian kerja yang adil dalam rumah tangga. Suami dan anak laki-laki umumnya tidak terbiasa membantu pekerjaan domestik. Akibatnya, perempuan menanggung beban kerja yang sangat berat, yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.

2. Relasi Gender yang Timpang

Dalam banyak masyarakat desa, relasi gender masih timpang. Norma patriarki menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan utama, dan pencari nafkah utama. Perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat, yang tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Ketimpangan ini tercermin dalam berbagai aspek:

- **Dalam pengambilan keputusan keluarga**, suara perempuan sering tidak sekuat suara laki-laki. Keputusan tentang pendidikan anak, pembelian aset, atau pinjaman modal sering didominasi laki-laki.
- **Dalam akses terhadap sumber daya**, perempuan memiliki akses lebih terbatas terhadap tanah, modal, teknologi, dan informasi. Tanah warisan lebih sering jatuh ke tangan laki-laki. Kredit bank lebih sulit diakses perempuan karena tidak memiliki agunan.
- **Dalam partisipasi publik**, perempuan kurang terwakili dalam struktur pemerintahan desa, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan. Suara mereka kurang terdengar dalam musyawarah desa.
- **Dalam beban kerja**, perempuan menanggung beban kerja yang lebih berat, baik domestik maupun publik, tanpa pengakuan dan dukungan yang memadai.
- **Dalam kerentanan**, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi ekonomi.

Ketimpangan ini bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga masalah efektivitas pembangunan. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika perempuan diberdayakan, terjadi dampak berganda (multiplier effect) terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Anak-anak lebih sehat, lebih berpendidikan, dan ekonomi keluarga lebih kuat.

3. Potensi Perempuan yang Belum Tergarap

Di balik ketimpangan tersebut, perempuan desa menyimpan potensi luar biasa yang belum sepenuhnya tergarap:

- **Kedekatan dengan isu-isu keseharian**. Perempuan paling dekat dengan persoalan kesehatan keluarga, gizi anak, pendidikan, dan lingkungan rumah tangga. Mereka memahami kebutuhan riil keluarga dan masyarakat.
- **Kemampuan mengelola sumber daya**. Dalam mengatur rumah tangga dengan anggaran terbatas, perempuan mengembangkan kemampuan manajemen yang handal. Mereka pintar berhemat, pintar memutar uang, dan pintar mencari solusi kreatif.
- **Jejaring sosial yang kuat**. Melalui arisan, pengajian, PKK, dan kegiatan sosial lainnya, perempuan membangun jejaring sosial yang kuat. Jejaring ini bisa menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk berbagai kegiatan.

- **Kepercayaan dan solidaritas**. Dalam kelompok-kelompok perempuan, umumnya tumbuh rasa saling percaya dan solidaritas yang kuat. Ini memudahkan mereka untuk bekerjasama, bergotong royong, dan saling mendukung.
- **Kesabaran dan ketekunan**. Perempuan umumnya lebih sabar dan tekun dalam menghadapi masalah dan menjalankan usaha. Mereka tidak mudah menyerah dan mampu bertahan dalam situasi sulit.

C. ORGANISASI PEREMPUAN: PKK SEBAGAI UJUNG TOMBAK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi perempuan paling masif di Indonesia. Hampir di setiap desa, ada PKK dengan keanggotaan yang melibatkan ribuan perempuan. Memahami PKK adalah kunci untuk memahami peran perempuan dalam pembangunan desa.

1. Sejarah dan Landasan Hukum

PKK lahir pada tahun 1972 sebagai gerakan masyarakat yang bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Sejak itu, PKK berkembang ke seluruh Indonesia dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan manusia.

Landasan hukum PKK adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam Permendagri tersebut, PKK didefinisikan sebagai gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang keberadaannya diakui secara resmi dan berkoordinasi dengan pemerintah/ pemerintah daerah.

2. Tujuan dan Fungsi

Tujuan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Fungsi PKK meliputi:

- Penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- Gotong royong.
- Pendidikan dan peningkatan kapasitas keluarga.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga.
- Kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
- Perencanaan sehat.

3. Program Pokok PKK

PKK memiliki 10 program pokok yang menjadi panduan kegiatan di semua tingkatan:

1. **Penghayatan dan Pengamalan Pancasila**: menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

2. **Gotong Royong**: membudayakan semangat gotong royong dan kerjasama.
3. **Pangan**: meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan diversifikasi konsumsi.
4. **Sandang**: meningkatkan keterampilan membuat pakaian dan memilih sandang yang layak dan sehat.
5. **Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga**: mewujudkan rumah sehat dan pengelolaan rumah tangga yang baik.
6. **Pendidikan dan Keterampilan**: meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non-formal serta keterampilan keluarga.
7. **Kesehatan**: meningkatkan derajat kesehatan keluarga, termasuk kesehatan ibu dan anak, gizi, dan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. **Pengembangan Kehidupan Berkoperasi**: menumbuhkan jiwa koperasi dan mengembangkan usaha ekonomi produktif.
9. **Kelestarian Lingkungan Hidup**: menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
10. **Perencanaan Sehat**: merencanakan kehidupan keluarga yang sehat, termasuk perencanaan keuangan, pendidikan anak, dan masa depan.

4. Peran Strategis PKK

PKK memiliki peran strategis dalam berbagai bidang pembangunan:

a. Ujung Tombak Program Kesehatan Ibu dan Anak

PKK, melalui kader-kadernya, menjadi ujung tombak pelaksanaan posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Mereka yang menggerakkan masyarakat untuk datang ke posyandu, menimbang balita, memberikan imunisasi, memberikan penyuluhan gizi, dan memantau tumbuh kembang anak. Program-program seperti pemberian vitamin A, imunisasi dasar, dan penimbangan balita sangat bergantung pada peran aktif kader PKK.

b. Motor Penggerak Program Keluarga Berencana (KB)

PKK juga berperan penting dalam program KB. Kader PKK melakukan sosialisasi, mendampingi akseptor KB, dan memantau efek samping. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dan petugas kesehatan.

c. Penggerak Ketahanan Pangan Keluarga

Melalui program pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), PKK mendorong keluarga untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat di pekarangan rumah. Ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga menghemat pengeluaran rumah tangga.

d. Agen Sosialisasi Program Pembangunan

PKK menjadi agen sosialisasi berbagai program pemerintah—stunting, sanitasi total berbasis masyarakat, pola hidup bersih dan sehat, pencegahan COVID-19, dan lain-lain. Melalui pertemuan rutin, pengajian, dan arisan, informasi dari pemerintah disampaikan ke masyarakat luas.

e. Wadah Pemberdayaan Ekonomi

PKK juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan-kegiatan produktif: kelompok usaha bersama (KUBE), simpan pinjam, arisan, dan pelatihan keterampilan (menjahit, membatik, mengolah makanan, membuat kerajinan). Kegiatan-kegiatan ini membantu perempuan meningkatkan pendapatan keluarga.

f. Wadah Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas

Melalui pertemuan rutin, PKK menjadi wadah pendidikan dan pengembangan kapasitas perempuan. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan, gizi, pengasuhan anak, manajemen keuangan keluarga, dan berbagai keterampilan hidup lainnya.

5. Dinamika PKK

Dalam praktiknya, PKK menghadapi berbagai dinamika. Tidak semua PKK aktif dan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan PKK antara lain:

- **Kepemimpinan ketua**: Ketua yang visioner, energik, dan mampu menggerakkan anggota sangat menentukan.
- **Dukungan pemerintah desa**: Anggaran, fasilitas, dan dukungan moral dari kepala desa sangat penting.
- **Partisipasi anggota**: Semakin banyak anggota yang aktif, semakin hidup organisasi.
- **Program yang relevan**: Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anggota akan menarik partisipasi.
- **Kemitraan dengan pihak lain**: Kerjasama dengan puskesmas, dinas pertanian, dinas pendidikan, dan pihak lain memperluas jangkauan dan dampak PKK.

Kritik terhadap PKK antara lain adalah bahwa organisasi ini kadang terlalu birokratis dan kurang aspiratif. Program sering datang dari atas (top-down), bukan dari kebutuhan riil anggota. Anggota lebih banyak menjadi pelaksana daripada pengambil keputusan. Namun, di banyak desa, PKK tetap menjadi organisasi perempuan yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat.

D. PERAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA

Kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga sangat signifikan, baik secara langsung melalui pendapatan yang mereka hasilkan, maupun tidak langsung melalui penghematan dan pengelolaan sumber daya.

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Perempuan desa sangat aktif dalam berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha ini seringkali dijalankan dari rumah, dengan modal kecil, dan memanfaatkan keterampilan tradisional yang mereka miliki.

a. Kuliner dan Olahan Pangan

Ini adalah bidang yang paling banyak digeluti perempuan. Mereka membuat jajanan pasar, kue kering, makanan ringan, keripik, sirup, atau makanan siap saji untuk dijual di pasar, dititipkan di warung, atau dipasarkan secara online. Keahlian memasak yang diwariskan turun-temurun menjadi modal utama.

b. Kerajinan Tangan

Banyak perempuan desa yang mahir membuat kerajinan tangan: anyaman bambu, sulaman, batik, tenun, rajutan, atau kerajinan dari bahan daur ulang. Produk-produk ini tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi.

c. Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian

Perempuan aktif dalam budidaya sayuran, buah-buahan, atau tanaman obat di pekarangan. Mereka juga mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah—singkong diolah menjadi tepung atau keripik, pisang diolah menjadi sale atau keripik, mangga diolah menjadi manisan atau sirup.

d. Peternakan Skala Kecil

Banyak perempuan yang memelihara ayam, bebek, kambing, atau sapi dalam skala kecil. Hasilnya bisa dijual, bisa juga untuk konsumsi keluarga. Telur, daging, dan susu meningkatkan gizi keluarga sekaligus menambah pendapatan.

e. Jasa dan Perdagangan

Perempuan juga aktif dalam jasa—menjahit, merias pengantin, katering, atau membuka warung kecil di depan rumah. Mereka juga menjadi pedagang di pasar desa, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari.

2. Dampak Berganda Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang luar biasa terhadap kesejahteraan keluarga:

a. Peningkatan Pendapatan Keluarga

Ketika perempuan memiliki penghasilan sendiri, pendapatan keluarga meningkat. Ini meningkatkan daya beli keluarga, memungkinkan mereka mengakses pangan yang lebih baik, layanan kesehatan, dan pendidikan.

b. Alokasi Pendapatan untuk Kesejahteraan Anak

Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa pendapatan yang dikelola perempuan cenderung dialokasikan untuk kebutuhan anak dan keluarga—makanan bergizi, pendidikan, kesehatan—lebih besar dibandingkan pendapatan yang dikelola laki-laki. Ketika perempuan memiliki penghasilan, anak-anak lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih sejahtera.

c. Peningkatan Status dan Kepercayaan Diri

Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga. Mereka lebih dihormati, lebih didengar pendapatnya, dan lebih percaya diri. Ini mengubah relasi gender dalam rumah tangga menjadi lebih setara.

d. Jaring Pengaman Ekonomi

Usaha perempuan sering menjadi jaring pengaman ekonomi ketika suami kehilangan pekerjaan atau penghasilan utama keluarga terganggu. Di masa krisis, usaha kecil yang dijalankan perempuan bisa menjadi penyelamat keluarga dari kelaparan dan keterpurukan.

e. Peningkatan Keterampilan dan Jejaring

Melalui kegiatan usaha, perempuan mengembangkan keterampilan baru—manajemen, pemasaran, keuangan—dan memperluas jejaring sosial. Ini meningkatkan kapasitas mereka secara keseluruhan.

3. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Salah satu program yang menunjukkan kontribusi nyata perempuan dalam ketahanan pangan adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini mendorong keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara intensif untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat.

Perempuan menjadi aktor utama dalam program ini. Mereka yang merencanakan apa yang akan ditanam, menyemai benih, merawat tanaman, memanen, dan mengolah hasilnya. Pekarangan yang tadinya tidak terurus berubah menjadi sumber pangan bergizi yang berkelanjutan.

Manfaat KRPL sangat besar:

- **Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi** bagi keluarga, terutama sayuran dan buah-buahan segar.
- **Menghemat pengeluaran rumah tangga** karena tidak perlu membeli sayur dan buah.
- **Meningkatkan pendapatan** jika hasilnya dijual.
- **Melestarikan tanaman lokal** yang mungkin sudah langka di pasaran.
- **Memperbaiki lingkungan** karena pekarangan menjadi hijau dan asri.
- **Meningkatkan keterampilan bertani** anggota keluarga.

E. PERAN PEREMPUAN DALAM KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Perempuan adalah garda terdepan dalam pembangunan manusia di desa. Mereka yang paling bertanggung jawab atas kesehatan keluarga dan pendidikan anak.

1. Peran dalam Kesehatan Keluarga

a. Kader Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di desa. Kader posyandu, yang hampir seluruhnya adalah perempuan, adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap bulan menggerakkan masyarakat, menimbang balita, memberikan imunisasi, memberikan penyuluhan gizi, dan memantau tumbuh kembang anak.

Tanpa kader posyandu, program kesehatan ibu dan anak tidak akan berjalan. Mereka adalah jembatan antara masyarakat dan fasilitas kesehatan formal. Mereka juga yang pertama kali mendeteksi jika ada balita yang kurang gizi, ibu hamil yang bermasalah, atau penyakit yang mulai mewabah.

b. Pengelola Gizi Keluarga

Perempuan adalah pengelola utama gizi keluarga. Mereka yang merencanakan menu, memasak, dan memastikan anggota keluarga mendapatkan makanan bergizi. Pengetahuan mereka tentang gizi, variasi makanan, dan pengolahan pangan sangat menentukan status gizi anak dan anggota keluarga lainnya.

c. Perawat Pertama di Keluarga

Ketika ada anggota keluarga yang sakit, perempuanlah yang pertama kali merawat—memberi obat, mengompres, memasak makanan khusus, dan memutuskan kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Pengetahuan mereka tentang gejala penyakit, pengobatan tradisional, dan pertolongan pertama sangat berharga.

d. Promotor Kesehatan

Di lingkungannya, perempuan menjadi promotor kesehatan informal. Mereka berbagi informasi tentang imunisasi, KB, pola hidup bersih, pencegahan penyakit, dan berbagai isu kesehatan lainnya. Melalui arisan, pengajian, dan pertemuan sosial lainnya, informasi kesehatan menyebar dari satu perempuan ke perempuan lain.

2. Peran dalam Pendidikan Anak

a. Guru Pertama dan Utama

Ibu adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sejak dalam kandungan, ibu sudah berinteraksi dengan anak. Setelah lahir, ibu yang mengajarkan anak berbicara, berjalan, mengenal lingkungan, dan nilai-nilai dasar. Kualitas pengasuhan yang diberikan ibu sangat menentukan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.

b. Pendamping Belajar

Ketika anak mulai sekolah, ibulah yang paling sering mendampingi belajar—membantu mengerjakan PR, menemani membaca, memotivasi, dan mengawasi perkembangan akademik. Di desa, di mana tingkat pendidikan orang tua mungkin terbatas, peran ini tetap dijalankan dengan penuh dedikasi.

c. Penanam Nilai dan Karakter

Ibu adalah penanam nilai dan karakter utama. Mereka mengajarkan anak tentang agama, kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai luhur lainnya. Melalui cerita, nasihat, dan teladan, nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini.

d. Motivator dan Pengawas

Ibu yang memotivasi anak untuk sekolah tinggi, bercita-cita besar, dan tidak mudah menyerah. Mereka juga yang mengawasi pergaulan anak, memastikan mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Peran ini sangat penting di era digital dengan segala risikonya.

3. Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesehatan dan Pendidikan

Pemberdayaan perempuan memiliki korelasi positif yang kuat dengan indikator kesehatan dan pendidikan:

- **Tingkat kematian ibu dan anak** lebih rendah di daerah di mana perempuan berpendidikan dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
- **Status gizi anak** lebih baik ketika ibu memiliki pengetahuan gizi dan akses terhadap sumber daya.
- **Partisipasi sekolah anak** lebih tinggi ketika ibu berpendidikan dan memiliki pendapatan.
- **Kesenjangan gender dalam pendidikan** lebih kecil ketika perempuan dihargai dan didukung.

Investasi dalam pemberdayaan perempuan adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi dalam pembangunan manusia.

F. HAMBATAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN

Meskipun memiliki peran vital, perempuan desa menghadapi berbagai hambatan yang membatasi partisipasi dan kontribusi mereka.

1. Beban Ganda

Hambatan paling nyata adalah beban ganda. Perempuan harus mengurus rumah tangga (memasak, mencuci, membersihkan, mengasuh anak) sekaligus aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Beban ini sangat berat, apalagi jika tidak ada pembagian kerja yang adil dalam keluarga.

Akibatnya, perempuan sering kekurangan waktu untuk istirahat, mengembangkan diri, atau berpartisipasi dalam kegiatan publik. Mereka yang ingin aktif di organisasi atau memulai usaha harus rela mengurangi waktu tidur atau waktu bersama keluarga.

2. Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Anak perempuan di desa masih sering menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan. Keluarga dengan sumber daya terbatas lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki. Akibatnya, tingkat pendidikan perempuan desa umumnya lebih rendah daripada laki-laki.

Perempuan juga kurang mendapatkan akses terhadap pelatihan-pelatihan keterampilan. Pelatihan pertanian, misalnya, lebih sering menyasar laki-laki, meskipun perempuan juga aktif bertani. Pelatihan kewirausahaan kadang tidak mempertimbangkan keterbatasan waktu dan mobilitas perempuan.

3. Akses Terbatas terhadap Modal dan Sumber Daya Ekonomi

Perempuan kesulitan mengakses kredit formal karena tidak memiliki agunan atau rekam jejak usaha. Mereka sering terjebak pada rentenir dengan bunga tinggi. Akses terhadap tanah, teknologi, dan informasi pasar juga lebih terbatas dibanding laki-laki.

4. Minimnya Representasi dalam Struktur Pemerintahan

Perempuan sangat minim terwakili dalam struktur pemerintahan desa. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kepala desa yang perempuan. Dalam keanggotaan BPD dan perangkat desa, proporsi perempuan juga sangat rendah.

Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan kurang terwakili dalam pengambilan keputusan. Program-program pembangunan sering tidak sensitif gender, bahkan kadang merugikan perempuan.

5. Hambatan Kultural dan Norma Sosial

Norma patriarki yang kuat membatasi ruang gerak perempuan. Perempuan dianggap "tabu" jika terlalu aktif di publik. Mereka yang berani berbicara di forum bisa dicap "kurang ajar" atau "tidak tahu diri". Suami yang membiarkan istri bekerja di luar bisa dicap "tidak mampu menafkahi".

Norma-norma ini sangat membatasi partisipasi perempuan. Banyak perempuan potensial yang memilih diam karena takut dicibir. Banyak yang tidak berani mencalonkan diri dalam Pilkades karena dianggap "bukan tempatnya perempuan".

6. Kerentanan terhadap Kekerasan

Perempuan desa rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan: kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan praktik-praktik eksploitatif lainnya. Budaya yang menganggap kekerasan domestik sebagai "urusan internal keluarga" membuat korban sulit mendapatkan keadilan.

Kekerasan tidak hanya melukai fisik dan mental perempuan, tetapi juga menghancurkan martabat dan kepercayaan diri mereka, yang sangat diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

7. Stereotip dan Prasangka

Perempuan sering dihadapkan pada stereotip yang merendahkan: "perempuan itu emosional", "perempuan tidak cocok jadi pemimpin", "otak perempuan tidak secerdas laki-laki", "urusan perempuan ya di dapur saja". Stereotip ini menghambat perempuan untuk mengembangkan potensi dan mengambil peran publik.

G. UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk memberdayakan perempuan desa.

1. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan adalah kunci pemberdayaan. Upaya yang perlu dilakukan:

- **Beasiswa khusus untuk anak perempuan** dari keluarga miskin agar bisa melanjutkan sekolah.
- **Pendidikan non-formal dan keaksaraan** bagi perempuan dewasa yang putus sekolah.
- **Pelatihan-pelatihan keterampilan** yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan waktu perempuan: pelatihan di tingkat desa, waktu fleksibel, dan menyediakan fasilitas penitipan anak.

- **Pendidikan kewirausahaan** untuk membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan memulai dan mengelola usaha.

2. Penguatan Organisasi Perempuan

Organisasi perempuan seperti PKK, arisan, dan kelompok pengajian perlu diperkuat sebagai wadah pemberdayaan:

- **Peningkatan kapasitas pengurus** melalui pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, dan advokasi.
- **Dukungan anggaran dan fasilitas** dari pemerintah desa untuk kegiatan organisasi perempuan.
- **Pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi** yang melibatkan anggota, seperti kelompok usaha bersama, koperasi, atau simpan pinjam.
- **Penguatan jejaring** antar organisasi perempuan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

3. Fasilitasi Akses Modal

Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memfasilitasi akses perempuan terhadap modal usaha:

- **Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi perempuan**, misalnya untuk modal usaha kelompok atau pelatihan.
- **Kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan mikro** untuk menyediakan produk kredit khusus perempuan dengan persyaratan ringan.
- **Pengembangan koperasi perempuan** yang menghimpun dana anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah.
- **Fasilitasi akses ke program-program kredit pemerintah** seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan pendampingan.

4. Peningkatan Representasi Perempuan

Perempuan perlu didorong untuk mengambil peran publik dan terwakili dalam struktur pemerintahan:

- **Afirmasi kuota 30% perempuan** dalam keanggotaan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.
- **Pelatihan kepemimpinan dan politik** bagi perempuan untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin.
- **Pendampingan bagi calon pemimpin perempuan** dalam Pilkades atau pemilihan legislatif.
- **Sosialisasi kepada masyarakat** tentang pentingnya keterwakilan perempuan.

5. Kebijakan Desa yang Responsif Gender

Pemerintah desa perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan programnya responsif gender:

- **Analisis gender dalam perencanaan pembangunan**: setiap program dianalisis dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan.
- **Anggaran yang responsif gender**: mengalokasikan anggaran untuk program-program yang secara khusus menjawab kebutuhan perempuan.
- **Data terpilah gender**: mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan spesifik perempuan.
- **Peraturan desa yang melindungi hak-hak perempuan**, misalnya tentang perlindungan korban KDRT, larangan perkawinan anak, atau afirmasi bagi perempuan.

6. Sosialisasi dan Advokasi Kesetaraan Gender

Perubahan norma dan stereotip membutuhkan sosialisasi dan advokasi yang terus-menerus:

- **Kampanye tentang kesetaraan gender** melalui media sosial, spanduk, pertemuan-pertemuan desa.
- **Pendidikan tentang hak-hak perempuan** di sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat.
- **Pelibatan laki-laki** dalam advokasi kesetaraan gender, misalnya melalui program "suami siaga" atau kelompok laki-laki peduli.
- **Pemberian penghargaan** bagi tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender.

7. Perlindungan Hukum dan Layanan bagi Korban Kekerasan

Perempuan korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dan layanan yang memadai:

- **Pembentukan unit layanan pengaduan** di tingkat desa yang mudah diakses perempuan.
- **Kerjasama dengan puskesmas, kepolisian, dan lembaga layanan** untuk memberikan pendampingan medis, psikologis, dan hukum.
- **Sosialisasi tentang mekanisme pelaporan** dan hak-hak korban.
- **Penegakan hukum yang tegas** terhadap pelaku kekerasan.

H. STUDI KASUS: INSPIRASI DARI PEREMPUAN DESA

1. Kasus 1: Kelompok Perempuan Penggerak Ekonomi di Desa Ponggok, Klaten

Di Desa Ponggok, Klaten, yang terkenal dengan wisata airnya, perempuan memiliki peran sentral dalam mengelola homestay dan usaha kuliner. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok usaha yang didampingi pemerintah desa dan BUMDes. Mereka mendapatkan pelatihan manajemen usaha, tata boga, dan pemasaran digital.

Ibu-ibu PKK juga aktif mengelola dapur umum untuk menyediakan konsumsi bagi wisatawan. Mereka bergiliran memasak, sehingga semua anggota mendapat bagian. Hasilnya, pendapatan keluarga meningkat, dan perempuan memiliki penghasilan sendiri yang membuat mereka lebih berdaya.

Kisah Ponggok menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan akses terhadap peluang ekonomi, perempuan dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang signifikan.

2. Kasus 2: Kader Posyandu Pahlawan Gizi di Desa Nusa Tenggara Timur

Di sebuah desa terpencil di NTT, kader posyandu berjuang melawan stunting dengan sumber daya terbatas. Mereka berjalan kaki berjam-jam untuk menjangkau balita di dusun-dusun terpencil. Mereka membawa bubur kacang hijau, memberikan penyuluhan gizi, dan memotivasi ibu-ibu untuk datang ke posyandu.

Berkat kegigihan mereka, angka stunting di desa itu turun signifikan. Mereka tidak hanya menimbang balita, tetapi juga menjadi sahabat, pendengar keluhan, dan pemberi semangat bagi ibu-ibu. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan masa depan generasi.

3. Kasus 3: Perempuan Penggerak KRPL di Desa Bayan, Lombok

Di Desa Bayan, Lombok Utara, sekelompok perempuan mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Mereka menanam berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Hasilnya tidak hanya untuk konsumsi keluarga, tetapi juga dijual di pasar desa dan ke homestay-homestay wisatawan.

Kelompok ini juga mengembangkan pengolahan hasil—membuat keripik, manisan, dan minuman dari hasil pekarangan. Mereka mendapatkan pelatihan dari dinas pertanian dan pendampingan dari LSM. Kini, pekarangan yang tadinya tidak terproduktif berubah menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan.

4. Kasus 4: Perempuan Kepala Desa di Beberapa Daerah

Meskipun jumlahnya masih sedikit, semakin banyak perempuan yang terpilih menjadi kepala desa. Di berbagai daerah, perempuan kepala desa membuktikan bahwa mereka mampu memimpin dan membawa perubahan.

Di Desa Meurandeh, Aceh, misalnya, seorang kepala desa perempuan berhasil menggerakkan pembangunan infrastruktur, memberdayakan kelompok perempuan, dan menurunkan angka stunting secara signifikan. Ia juga dikenal tegas dalam mengelola keuangan desa, transparan, dan anti-korupsi.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa dengan kesempatan yang sama, perempuan mampu memimpin dan berkontribusi setara dengan laki-laki.

I. KEBUTUHAN STRATEGIS DAN PRAKTIS PEREMPUAN

Dalam merancang program pemberdayaan perempuan, penting untuk membedakan antara kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis.

1. Kebutuhan Praktis

Kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan sehari-hari perempuan dalam peran mereka yang sudah ada. Kebutuhan ini bersifat langsung dan mendesak, dan jika dipenuhi akan meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam peran mereka saat ini. Contoh:

- Akses terhadap air bersih dan sanitasi.
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Bantuan modal usaha.
- Pelatihan keterampilan praktis (menjahit, memasak).
- Ketersediaan fasilitas penitipan anak.

Pemenuhan kebutuhan praktis penting dan harus dilakukan. Namun, ia tidak secara langsung mengubah relasi gender yang timpang. Perempuan tetap dalam peran tradisionalnya, hanya saja dengan kondisi yang lebih baik.

2. Kebutuhan Strategis

Kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang berkaitan dengan posisi subordinat perempuan dalam masyarakat. Pemenuhannya bertujuan mengubah relasi gender yang timpang dan memberdayakan perempuan secara fundamental. Contoh:

- Kesetaraan akses terhadap pendidikan.
- Penghapusan diskriminasi dalam hukum dan kebijakan.
- Peningkatan representasi dalam pengambilan keputusan.
- Penghapusan kekerasan berbasis gender.
- Pembagian kerja domestik yang adil.
- Penguatan organisasi dan jaringan perempuan.

Pemenuhan kebutuhan strategis lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama karena menyangkut perubahan norma, nilai, dan struktur sosial. Namun, ini adalah jalan menuju kesetaraan gender yang sejati.

Program pemberdayaan perempuan yang ideal adalah yang mampu memadukan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis secara simultan. Kelompok simpan pinjam, misalnya, tidak hanya memenuhi kebutuhan modal (praktis), tetapi juga membangun solidaritas dan kepercayaan diri perempuan (strategis). Pelatihan keterampilan tidak hanya memberi kemampuan teknis (praktis), tetapi juga membuka wawasan tentang hak-hak perempuan (strategis).

J. RANGKUMAN

Perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan desa. Mereka adalah aktor utama dalam ekonomi keluarga, penjaga ketahanan pangan, garda terdepan dalam kesehatan dan pendidikan anak, serta perekat sosial yang menjaga harmoni komunitas. Kontribusi mereka melampaui sektor domestik dan merambah ke ranah publik, meskipun sering tidak terlihat dan tidak dihargai setimpal.

PKK sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia menjadi ujung tombak berbagai program pembangunan manusia di desa—posyandu, KB, ketahanan pangan, sosialisasi program, dan pemberdayaan ekonomi. Organisasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi motor pemberdayaan perempuan jika dikelola dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan anggota.

Dalam ekonomi, perempuan berkontribusi melalui berbagai UMKM—kuliner, kerajinan, budidaya pertanian, peternakan, dan jasa. Pemberdayaan ekonomi perempuan terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect): pendapatan keluarga meningkat, alokasi untuk kesejahteraan anak lebih besar, status perempuan meningkat, dan keluarga lebih tahan terhadap krisis. Program **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)** menunjukkan bagaimana perempuan dapat menjadi motor ketahanan pangan berbasis keluarga.

Dalam kesehatan dan pendidikan, perempuan adalah garda terdepan. Sebagai kader posyandu, pengelola gizi keluarga, perawat pertama, dan promotor kesehatan, mereka menjaga kesehatan keluarga.

Sebagai guru pertama dan utama, pendamping belajar, dan penanam nilai, mereka menentukan kualitas generasi mendatang.

Namun, perempuan menghadapi berbagai **hambatan** yang membatasi partisipasi dan kontribusi mereka: beban ganda, akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, akses terbatas terhadap modal, minimnya representasi dalam struktur pemerintahan, hambatan kultural dan norma sosial, kerentanan terhadap kekerasan, serta stereotip dan prasangka.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan **strategi pemberdayaan** yang komprehensif:

1. **Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan** melalui beasiswa, pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kewirausahaan.
2. **Penguatan organisasi perempuan** seperti PKK melalui peningkatan kapasitas, dukungan anggaran, program pemberdayaan ekonomi, dan penguatan jejaring.
3. **Fasilitasi akses modal** melalui alokasi dana desa, kerjasama dengan lembaga keuangan, pengembangan koperasi perempuan, dan fasilitasi akses ke program kredit pemerintah.
4. **Peningkatan representasi perempuan** melalui afirmasi kuota, pelatihan kepemimpinan, pendampingan calon pemimpin, dan sosialisasi ke masyarakat.
5. **Kebijakan desa yang responsif gender** melalui analisis gender, anggaran responsif gender, data terpilah gender, dan peraturan desa yang melindungi hak-hak perempuan.
6. **Sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender** melalui kampanye, pendidikan hak-hak perempuan, pelibatan laki-laki, dan pemberian penghargaan.
7. **Perlindungan hukum dan layanan bagi korban kekerasan** melalui unit pengaduan, kerjasama dengan layanan terkait, sosialisasi, dan penegakan hukum.

Pemberdayaan perempuan bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga masalah efektivitas pembangunan. Ketika perempuan diberdayakan, seluruh keluarga dan masyarakat mendapat manfaat. Anak-anak lebih sehat, lebih berpendidikan, ekonomi lebih kuat, dan masyarakat lebih harmonis. Investasi dalam pemberdayaan perempuan adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi.

Pada akhirnya, desa yang maju adalah desa yang mampu mengakui, menghargai, dan memberdayakan potensi setengah langitnya. Desa yang tidak hanya memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi, tetapi juga secara aktif mendorong mereka untuk memimpin. Desa yang mengubah kebijakan dan praktiknya agar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan. Inilah desa yang kita cita-citakan—desa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

K. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari di desa Anda? Apakah ada pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga?
2. Seberapa aktif PKK di desa Anda? Apa saja program unggulannya? Apakah program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota?

3. Usaha ekonomi apa saja yang dijalankan perempuan di desa Anda? Apakah ada kelompok usaha bersama atau koperasi perempuan?
4. Bagaimana akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan di desa Anda? Apakah ada kesenjangan dengan laki-laki?
5. Seberapa besar keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa? Apakah ada perempuan di BPD, perangkat desa, atau sebagai kepala desa?
6. Apakah di desa Anda ada kasus kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana penanganannya? Apakah ada layanan pengaduan dan pendampingan?
7. Menurut Anda, program atau kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk memberdayakan perempuan di desa Anda?
8. Bagaimana cara terbaik untuk mengubah norma dan stereotip yang membatasi peran perempuan di ruang publik?

BAB XIV

MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. PENGANTAR: KEKAYAAN TAK TERLIHAT YANG MENENTUKAN KEMAJUAN

Setiap desa memiliki kekayaan yang tidak selalu tampak secara fisik. Ia tidak tercatat dalam neraca keuangan desa, tidak termuat dalam inventaris aset, dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, kekayaan ini seringkali lebih menentukan kemajuan desa daripada infrastruktur fisik atau anggaran pembangunan. Kekayaan itu adalah modal sosial—jaringan kepercayaan, norma kebersamaan, dan relasi timbal balik yang mengikat warga dalam ikatan komunal.

Modal sosial ibarat minyak yang melumasi mesin pembangunan. Tanpanya, mesin akan berderit, tersendat, dan akhirnya mogok. Dengan modal sosial yang kuat, program-program pembangunan berjalan lancar, partisipasi masyarakat tinggi, konflik dapat diminimalkan, dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati bersama. Sebaliknya, desa dengan modal sosial lemah, sekaya apa pun sumber daya alamnya atau sebesar apa pun dana desa yang digelontorkan, akan sulit maju karena masyarakatnya tidak percaya, tidak mau bekerjasama, dan tidak memiliki komitmen bersama.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang modal sosial dalam pembangunan desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep modal sosial menurut para ahli, kemudian menelusuri tiga elemen utamanya: kepercayaan (trust), jaringan (networks), dan norma resiprositas (reciprocity). Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana modal sosial berfungsi dalam kehidupan desa—dalam gotong royong, arisan, sistem keamanan lingkungan, dan berbagai kegiatan kolektif lainnya. Pada bagian inti, kita akan membahas bagaimana modal sosial dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan politik untuk mempercepat pembangunan desa, serta bagaimana program-program pembangunan dapat dirancang untuk memperkuat, bukan merusak, modal sosial yang ada.

B. MEMAHAMI KONSEP MODAL SOSIAL

1. Pengertian Modal Sosial

Modal sosial adalah konsep yang relatif baru dalam wacana pembangunan, namun akarnya telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat tradisional. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang memperkaya pemahaman kita tentang konsep ini.

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, mendefinisikan modal sosial sebagai "jumlah sumber daya, aktual maupun virtual, yang terakumulasi pada seorang individu atau kelompok berkat memiliki jaringan hubungan timbal balik yang lebih atau kurang terlembagakan yang didasarkan pada perkenalan dan pengakuan bersama." Bagi Bourdieu, modal sosial adalah salah satu bentuk modal (selain modal ekonomi, budaya, dan simbolik) yang dapat dikonversi menjadi keuntungan sosial.

James Coleman, sosiolog Amerika, mendefinisikan modal sosial sebagai "aspek struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu dalam struktur tersebut." Coleman menekankan bahwa modal sosial bersifat produktif—ia memungkinkan pencapaian tujuan yang tidak mungkin dicapai tanpa keberadaannya.

Robert Putnam, yang paling populer dengan konsep ini, mendefinisikan modal sosial sebagai "fitur-fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi." Dalam studinya tentang Italia, Putnam menunjukkan bahwa perbedaan kinerja pemerintahan di Italia utara dan selatan disebabkan oleh perbedaan modal sosial—di utara yang memiliki modal sosial tinggi, pemerintahan lebih efektif dan masyarakat lebih sejahtera.

Francis Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai "serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka." Fukuyama menekankan bahwa kepercayaan adalah komponen kunci modal sosial.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disintesiskan bahwa **modal sosial adalah sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial—kepercayaan, jaringan, dan norma—yang memfasilitasi kerjasama dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama**.

2. Tiga Elemen Utama Modal Sosial

Para ahli sepakat bahwa modal sosial memiliki tiga elemen utama:

a. Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang lain akan bertindak sesuai dengan harapan kita, tidak akan merugikan kita, dan akan memenuhi komitmennya. Kepercayaan adalah fondasi semua hubungan sosial. Tanpa kepercayaan, orang akan selalu curiga, transaksi akan membutuhkan kontrak formal yang rumit, dan kerjasama akan sulit terwujud.

Dalam kehidupan desa, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Orang percaya bahwa tetangganya tidak akan mencuri jika mereka meninggalkan rumah. Mereka percaya bahwa dalam arisan, uang yang disetor akan dikembalikan sesuai giliran. Mereka percaya bahwa dalam sambatan, bantuan yang diberikan hari ini akan dibalas di kemudian hari. Kepercayaan ini mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan berbagai kegiatan kolektif berjalan lancar.

b. Jaringan Sosial (Social Networks)

Jaringan sosial adalah struktur hubungan antar individu atau kelompok yang memungkinkan terjadinya interaksi, pertukaran, dan kerjasama. Jaringan bisa berbasis kekerabatan (keluarga, klan), ketetanggaan (RT, RW), kesamaan minat (kelompok tani, kelompok pengajian), atau kesamaan asal (perantau).

Di desa, jaringan sosial sangat kuat. Orang terhubung dalam berbagai jaringan yang saling tumpang tindih: mereka tetangga, sekaligus kerabat, sekaligus anggota kelompok tani, sekaligus peserta arisan. Jaringan ini menjadi saluran informasi, dukungan, dan mobilisasi sumber daya.

c. Norma Resiprositas (Norms of Reciprocity)

Norma resiprositas adalah aturan tidak tertulis yang mengatur hubungan timbal balik: jika seseorang memberi bantuan, ia berhak menerima bantuan di masa depan. Norma ini menciptakan kewajiban moral dan harapan bersama yang menjadi dasar kerjasama berkelanjutan.

Dalam kehidupan desa, norma resiprositas terwujud dalam berbagai tradisi: sambatan (gotong royong membangun rumah), liliuran (gotong royong di sawah), sinoman (gotong royong dalam hajatan), dan jimpitan (iuran sukarela untuk keamanan). Orang membantu bukan karena dibayar, tetapi karena mereka tahu suatu saat mereka juga akan membutuhkan bantuan.

Ketiga elemen ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Kepercayaan memungkinkan jaringan terbentuk dan berkembang. Jaringan memperkuat kepercayaan melalui interaksi berulang. Norma resiprositas menjaga agar kepercayaan dan jaringan tetap berfungsi. Bersama-sama, mereka menciptakan modal sosial yang menjadi fondasi kehidupan komunal.

3. Karakteristik Modal Sosial

Modal sosial memiliki beberapa karakteristik penting:

Pertama, **bersifat kumulatif**. Semakin sering digunakan, modal sosial semakin kuat. Kepercayaan yang terus-menerus diperkuat oleh interaksi positif. Jaringan yang aktif semakin luas. Norma resiprositas yang terus dipraktikkan semakin mengakar. Sebaliknya, jika jarang digunakan, modal sosial bisa melemah dan hilang.

Kedua, **tidak berkurang jika digunakan**. Berbeda dengan modal ekonomi yang berkurang ketika digunakan, modal sosial justru bertambah. Semakin banyak orang bekerjasama, semakin kuat kepercayaan di antara mereka. Semakin banyak informasi mengalir dalam jaringan, semakin berharga jaringan itu.

Ketiga, **sulit diukur**. Modal sosial tidak mudah diukur seperti modal ekonomi. Ia tidak tampak dan tidak dapat dikuantifikasi dengan tepat. Namun, keberadaannya dapat dirasakan dari fenomena sosial—tingkat partisipasi dalam kegiatan kolektif, tingkat kepercayaan antar warga, frekuensi interaksi sosial.

Keempat, **melekat pada hubungan, bukan individu**. Modal sosial bukan milik individu, tetapi milik hubungan antar individu. Seseorang dapat memiliki banyak modal sosial jika ia memiliki banyak hubungan kepercayaan dengan orang lain. Tetapi modal sosial itu sendiri ada dalam hubungan, bukan dalam diri individu.

Kelima, **dapat dikonversi menjadi modal lain**. Modal sosial dapat dikonversi menjadi modal ekonomi (misalnya, jaringan kepercayaan memudahkan akses modal usaha), modal politik (dukungan dalam pemilihan), atau modal budaya (pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari jaringan).

C. MODAL SOSIAL DALAM KEHIDUPAN DESA

Masyarakat desa Indonesia kaya akan modal sosial. Berbagai tradisi dan praktik keseharian mencerminkan kuatnya kepercayaan, jaringan, dan norma resiprositas.

1. Gotong Royong: Manifestasi Modal Sosial

Gotong royong adalah bentuk paling nyata modal sosial di desa. Ia adalah kerja sama sukarela untuk kepentingan bersama, tanpa imbalan langsung, didasari oleh kepercayaan dan norma timbal balik.

a. Kerja Bakti

Kerja bakti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, atau membangun fasilitas umum adalah kegiatan rutin di banyak desa. Warga datang bersama, membawa peralatan, dan bekerja bahu-membahu. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang dibayar. Semua didasari kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan fasilitas yang baik adalah kepentingan bersama.

b. Sambatan atau Gugur Gunung

Sambatan adalah gotong royong membangun rumah warga. Ketika seorang warga hendak membangun atau memperbaiki rumahnya, tetangga dan kerabat datang membantu tanpa dibayar. Tuan rumah cukup menyediakan makanan dan minuman. Di kemudian hari, tuan rumah akan membantu balik ketika tetangganya yang dulu membantu memiliki hajat serupa.

c. Liliuran

Liliuran atau gilir-giliran adalah gotong royong di sektor pertanian. Petani saling membantu saat musim tanam atau panen. Hari ini mereka membantu di sawah si A, besok di sawah si B, lusa di sawah si C, dan seterusnya hingga semua sawah selesai.

d. Sinoman

Sinoman adalah gotong royong dalam acara-acara sosial seperti pernikahan, khitanan, atau kematian. Warga datang membantu: menyiapkan konsumsi, mendirikan tenda, mengatur tempat duduk, melayani tamu, dan berbagai tugas lainnya.

Gotong royong tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memperkuat modal sosial. Dalam bekerja bersama, kepercayaan diperkuat, jaringan diperluas, dan norma timbal balik dipraktikkan dan diwariskan.

2. Arisan: Modal Sosial dalam Ekonomi

Arisan adalah praktik pengumpulan uang secara rutin oleh sekelompok orang, yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak menerima uang terkumpul. Secara ekonomi, arisan adalah mekanisme tabungan dan pinjaman sederhana. Namun, secara sosial, arisan adalah wadah penguatan modal sosial.

Dalam arisan, orang bertemu secara rutin, berinteraksi, berbagi kabar, dan memperkuat ikatan. Arisan juga menjadi wadah solidaritas—ketika ada anggota yang tertimpa musibah, arisan bisa menjadi mekanisme untuk menggalang bantuan. Arisan juga bisa menjadi wadah untuk kegiatan sosial lainnya, seperti pengajian atau kerja bakti.

Arisan menunjukkan bagaimana modal sosial dapat dikonversi menjadi modal ekonomi. Kepercayaan antar anggota arisan memungkinkan mereka untuk mempercayakan uangnya kepada pengurus arisan, tanpa kontrak formal dan tanpa jaminan selain kepercayaan. Ini adalah bentuk kredit mikro berbasis kepercayaan yang sangat efisien.

3. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) atau Ronda Malam

Siskamling atau ronda malam adalah sistem keamanan lingkungan yang melibatkan warga secara bergilir. Setiap malam, beberapa warga bertugas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan. Sistem ini didasari oleh kepercayaan bahwa setiap warga akan menjalankan tugasnya dengan baik, dan kesadaran bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama.

Ronda malam tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Dalam ronda, warga dari berbagai latar belakang—kaya-miskin, tua-muda, berpendidikan-kurang berpendidikan—duduk bersama, ngobrol, berbagi cerita, dan memperkuat solidaritas.

4. Jaringan Perantau

Salah satu bentuk modal sosial yang sangat penting di desa adalah jaringan dengan perantau. Hampir setiap desa memiliki warganya yang merantau ke kota atau bahkan ke luar negeri. Jaringan antara perantau dan kampung halaman menjadi sumber daya yang sangat berharga.

a. Remitansi

Perantau mengirim uang ke keluarga di desa. Remitansi ini sering menjadi sumber ekonomi penting, bahkan di beberapa desa melebihi pendapatan dari sektor pertanian. Uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, modal usaha, atau pembangunan rumah.

b. Investasi

Perantau yang sukses sering berinvestasi di kampung halaman—membangun rumah, membuka usaha, membeli tanah, atau berinvestasi dalam proyek-proyek desa. Investasi ini menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

c. Informasi dan Jaringan

Perantau menjadi sumber informasi tentang peluang kerja di kota, tentang harga komoditas, tentang program-program pemerintah, atau tentang perkembangan di luar desa. Mereka juga menjadi penghubung antara desa dengan dunia luar, membuka akses ke jaringan yang lebih luas.

d. Dukungan Sosial dan Politik

Perantau sering menjadi pendukung kegiatan sosial di desa—membangun masjid, memperbaiki jalan, membantu korban bencana. Mereka juga bisa menjadi pendukung politik bagi calon-calon tertentu dalam Pilkades atau pemilihan lainnya.

Jaringan perantau menunjukkan bagaimana modal sosial dapat menjembatani desa dan kota, tradisi dan modernitas, lokal dan global.

5. Kelembagaan Lokal

Berbagai kelembagaan lokal di desa—kelompok tani, kelompok pengajian, PKK, karang taruna—adalah wadah modal sosial. Di dalamnya, orang berinteraksi secara rutin, membangun kepercayaan, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Kelompok tani, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi—pengadaan saprodi bersama, pemasaran bersama—tetapi juga sebagai wadah sosialisasi nilai, transfer pengetahuan, dan penguatan solidaritas. Petani yang tergabung dalam kelompok tani memiliki kepercayaan lebih tinggi satu sama lain dan lebih mudah bekerjasama.

D. FUNGSI MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

Modal sosial memiliki beragam fungsi yang sangat penting bagi pembangunan desa.

1. Mengurangi Biaya Transaksi

Dalam setiap kegiatan ekonomi dan sosial, ada biaya transaksi—biaya untuk mencari informasi, biaya untuk melakukan negosiasi, biaya untuk memastikan kepatuhan, biaya untuk mengatasi konflik. Modal sosial yang tinggi mengurangi biaya-biaya ini.

Ketika orang saling percaya, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengawasan atau kontrak formal. Transaksi jual beli di pasar desa sering hanya berdasarkan kepercayaan—utang dulu, bayar nanti. Pinjaman antar tetangga tanpa bunga dan tanpa surat perjanjian adalah hal biasa. Semua ini dimungkinkan oleh kepercayaan.

Dalam program pembangunan, biaya transaksi juga berkurang. Ketika masyarakat percaya pada pemerintah desa dan aparaturnya, mereka tidak perlu melakukan protes atau pengawasan berlebihan. Mereka percaya bahwa dana desa akan dikelola dengan baik, sehingga program berjalan lancar.

2. Memfasilitasi Kerjasama dan Tindakan Kolektif

Modal sosial memudahkan terjadinya kerjasama dan tindakan kolektif. Ketika orang saling percaya dan memiliki norma bersama, mereka lebih mudah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Gotong royong membangun jalan desa adalah contoh klasik. Warga datang bersama, bekerja tanpa imbalan, karena mereka percaya bahwa hasilnya akan dinikmati bersama dan bahwa suatu saat mereka juga akan dibantu. Tanpa kepercayaan dan norma timbal balik, gotong royong tidak akan pernah terjadi.

Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan dimungkinkan oleh adanya kepercayaan bahwa suara mereka akan didengar dan bahwa partisipasi mereka berarti. Jika masyarakat tidak percaya, mereka akan apatis dan tidak mau terlibat.

3. Memperlancar Arus Informasi

Jaringan sosial yang kuat menjadi saluran informasi yang efisien. Informasi tentang peluang kerja, tentang harga komoditas, tentang program bantuan pemerintah, tentang inovasi pertanian, dengan cepat menyebar melalui jaringan kekerabatan, ketetanggaan, atau organisasi kemasyarakatan.

Petani yang tergabung dalam kelompok tani akan lebih cepat mengetahui informasi tentang bibit unggul atau pupuk bersubsidi. Ibu-ibu PKK akan lebih cepat mendapat informasi tentang program imunisasi atau posyandu. Remaja yang aktif di karang taruna akan lebih tahu tentang peluang pelatihan atau lomba.

Arus informasi yang lancar ini sangat penting untuk pembangunan. Informasi adalah sumber daya. Mereka yang memiliki akses informasi lebih cepat akan lebih mampu memanfaatkan peluang dan menghindari risiko.

4. Menciptakan Jaring Pengaman Sosial

Modal sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) informal. Ketika seseorang tertimpa musibah—sakit, kehilangan pekerjaan, bencana alam—komunitas akan bergerak membantu. Tetangga menjenguk, memberi sumbangan, membantu pekerjaan. Keluarga besar menampung, memberi pinjaman. Kelompok pengajian atau arisan menggalang dana.

Jaring pengaman informal ini sangat penting, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial formal. Ia mencegah mereka jatuh lebih dalam ketika menghadapi masalah. Ia juga menciptakan rasa aman yang penting bagi kesehatan mental.

5. Memperkuat Kontrol Sosial

Modal sosial memperkuat kontrol sosial. Dalam komunitas dengan modal sosial tinggi, orang saling mengenal, saling mengawasi, dan saling mengingatkan. Perilaku menyimpang akan segera diketahui dan mendapat sanksi sosial—teguran, gunjingan, atau bahkan pengucilan.

Kontrol sosial ini efektif menjaga ketertiban dan mengurangi perilaku negatif seperti korupsi, kriminalitas, atau penyalahgunaan wewenang. Kepala desa yang jujur akan didukung; yang korup akan mendapat tekanan dari masyarakat.

6. Meningkatkan Partisipasi dan Rasa Memiliki

Modal sosial yang kuat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) dan partisipasi. Orang merasa menjadi bagian dari komunitas, peduli pada nasib bersama, dan tergerak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif.

Dalam pembangunan, rasa memiliki ini sangat penting. Ketika warga merasa memiliki program pembangunan—karena mereka dilibatkan dalam perencanaan, karena program itu menjawab kebutuhan mereka, karena mereka ikut mengawasi—mereka akan lebih peduli dan berkontribusi. Program yang dirasakan sebagai "milik kita" akan lebih berhasil daripada program yang dirasakan sebagai "proyek pemerintah".

E. KONVERSI MODAL SOSIAL MENJADI MODAL EKONOMI DAN POLITIK

Salah satu aspek paling menarik dari modal sosial adalah kemampuannya untuk dikonversi menjadi bentuk modal lain—modal ekonomi dan modal politik. Konversi ini sangat penting bagi pembangunan desa.

1. Konversi Menjadi Modal Ekonomi

Modal sosial dapat dikonversi menjadi modal ekonomi melalui berbagai mekanisme:

a. Akses Permodalan

Kepercayaan dan jaringan sosial memudahkan akses terhadap permodalan. Dalam arisan, orang mendapatkan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan, hanya berdasarkan kepercayaan. Dalam kelompok simpan pinjam, orang bisa meminjam uang dengan persyaratan ringan karena ada jaminan sosial—rasa malu jika tidak mengembalikan.

Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang kuat dapat mengakses kredit program pemerintah dengan lebih mudah karena ada kelompok yang menjadi penanggung jawab bersama. Pengusaha kecil yang memiliki jaringan luas dapat meminjam modal dari kerabat atau teman tanpa prosedur bank yang rumit.

b. Akses Pasar

Jaringan sosial membuka akses ke pasar. Petani yang memiliki jaringan dengan tengkulak atau pedagang akan lebih mudah menjual hasil panennya. Pengrajin yang memiliki jaringan dengan perantau di kota bisa menitipkan produknya untuk dijual di sana. UMKM yang tergabung dalam asosiasi atau koperasi bisa mengikuti pameran bersama atau memasok ke pasar modern.

Di era digital, jaringan online melalui media sosial juga menjadi akses pasar yang penting. Kelompok-kelompok UMKM yang saling mendukung dengan mempromosikan produk satu sama lain menunjukkan bagaimana modal sosial (dalam bentuk jejaring) dikonversi menjadi modal ekonomi.

c. Akses Informasi Ekonomi

Informasi tentang harga komoditas, tentang peluang usaha, tentang teknologi baru, tentang program bantuan pemerintah, mengalir melalui jaringan sosial. Petani yang memiliki jaringan luas akan lebih cepat

tahu kapan waktu terbaik menjual hasil panennya. Pengusaha yang terhubung dalam asosiasi akan lebih cepat tahu tentang peluang tender atau program kemitraan.

d. Pengurangan Risiko

Dalam usaha, risiko selalu ada. Modal sosial membantu mengurangi risiko melalui kerjasama dan saling membantu. Kelompok tani yang menanam bersama dapat mengurangi risiko gagal panen karena ada diversifikasi. Kelompok usaha bersama dapat saling menutup jika salah satu anggota mengalami kerugian. Jaringan sosial juga menjadi sumber dukungan ketika usaha mengalami kesulitan.

e. Reputasi dan Kepercayaan Pasar

Dalam transaksi ekonomi, reputasi sangat penting. Modal sosial membangun reputasi melalui jaringan kepercayaan. Seseorang yang dikenal jujur dan dapat dipercaya dalam komunitasnya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis. Sebaliknya, orang dengan reputasi buruk akan sulit berbisnis meskipun memiliki modal besar.

2. Konversi Menjadi Modal Politik

Modal sosial juga dapat dikonversi menjadi modal politik—kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan, memenangkan dukungan, atau menduduki jabatan publik.

a. Dukungan dalam Pemilihan

Dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan legislatif, dukungan dari tokoh masyarakat dan jaringan sosial sangat menentukan. Calon yang memiliki jaringan luas dan dipercaya masyarakat akan lebih mudah memenangkan dukungan. Tim sukses yang efektif adalah mereka yang mampu memobilisasi jaringan sosial yang ada.

b. Legitimasi Kebijakan

Kebijakan yang mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Kepala desa yang memiliki modal sosial tinggi—dipercaya masyarakat, memiliki jaringan luas—akan lebih mudah menjalankan program-programnya karena masyarakat percaya dan mendukung.

c. Akses ke Sumber Daya Publik

Jaringan dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, atau partai politik dapat membuka akses terhadap sumber daya publik—bantuan keuangan, proyek pembangunan, program pemberdayaan. Desa yang memiliki jaringan kuat dengan pemerintah kabupaten akan lebih mudah mengakses berbagai program.

d. Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan

Dalam musyawarah desa, suara tokoh masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi lebih didengar. Mereka dapat mempengaruhi keputusan tentang prioritas pembangunan, alokasi anggaran, atau pemilihan pejabat desa.

3. Contoh Konversi Modal Sosial di Desa

Contoh 1: BUMDes Berbasis Kepercayaan

Sebuah desa mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bergerak di bidang simpan pinjam. BUMDes ini tidak meminta agunan fisik dari peminjam, hanya berdasarkan kepercayaan dan rekomendasi dari ketua RT atau tokoh masyarakat. Tingkat pengembalian pinjaman sangat tinggi karena peminjam merasa malu jika tidak mengembalikan pinjaman—mereka akan kehilangan kepercayaan dan reputasi di masyarakat.

BUMDes ini sukses besar. Modal sosial (kepercayaan dan jaringan) dikonversi menjadi modal ekonomi (simpan pinjam yang berjalan lancar). Keuntungan BUMDes kemudian digunakan untuk pembangunan desa dan dividen bagi warga.

Contoh 2: Jaringan Perantau untuk Pembangunan Desa

Seorang perantau sukses di Jakarta memiliki jaringan luas dengan sesama perantau dari desanya. Mereka membentuk paguyuban perantau yang secara rutin menggalang dana untuk pembangunan desa. Dana digunakan untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, memberikan beasiswa, atau membantu korban bencana.

Jaringan perantau ini juga menjadi penghubung antara desa dengan dunia luar. Mereka membawa informasi tentang peluang kerja, tentang program pemerintah, tentang teknologi baru. Mereka juga menjadi mitra bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.

Contoh 3: Kelompok Tani dan Akses Program Pemerintah

Sekelompok petani di suatu desa tergabung dalam kelompok tani yang solid. Kelompok ini memiliki pengurus yang dipercaya, aturan bersama, dan pertemuan rutin. Karena soliditasnya, mereka mudah mengakses program-program pemerintah—bantuan bibit, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, atau pelatihan.

Mereka juga bisa bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan peneliti untuk mengadopsi inovasi baru. Mereka bahkan bisa mengakses kredit program dengan persyaratan ringan karena kelompok bertindak sebagai penanggung jawab bersama.

Modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma) di sini dikonversi menjadi akses terhadap sumber daya dan teknologi yang meningkatkan produktivitas pertanian.

F. MODAL SOSIAL DAN KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Modal sosial memiliki korelasi yang kuat dengan keberhasilan program pembangunan desa. Program-program yang dirancang dengan mempertimbangkan modal sosial yang ada cenderung lebih berhasil daripada yang mengabaikannya.

1. Mengapa Program yang Mengabaikan Modal Sosial Gagal?

Banyak program pembangunan yang gagal bukan karena kurangnya dana atau teknologi, tetapi karena mengabaikan modal sosial yang ada. Beberapa penyebab kegagalan:

a. Top-Down dan Tidak Partisipatif

Program yang dirancang secara top-down oleh pemerintah pusat atau donor, tanpa melibatkan masyarakat lokal, sering gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan budaya setempat. Masyarakat merasa program itu bukan "milik mereka" dan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyukseskannya.

b. Mengabaikan Kelembagaan Lokal

Program yang membentuk struktur baru di desa tanpa melibatkan atau bahkan mengabaikan kelembagaan lokal yang ada (kelompok tani, kelompok pengajian, PKK, adat) sering ditolak atau tidak berkelanjutan. Ketika program selesai, struktur baru itu mati karena tidak berakar dalam masyarakat.

c. Merusak Kepercayaan

Program yang tidak transparan, yang memicu konflik, atau yang menimbulkan kecemburuan sosial dapat merusak kepercayaan antar warga. Kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan dan dapat menghambat kerjasama di masa depan.

d. Menciptakan Ketergantungan

Program yang terlalu memberikan bantuan cuma-cuma tanpa membangun kapasitas masyarakat dapat menciptakan ketergantungan dan merusak kemandirian. Gotong royong dan swadaya masyarakat melemah karena orang terbiasa menerima bantuan.

e. Memicu Konflik

Program yang tidak adil dalam distribusi manfaat, yang memicu persaingan tidak sehat, atau yang dijalankan dengan cara yang memihak kelompok tertentu, dapat memicu konflik dan merusak kohesi sosial.

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berbasis Modal Sosial

Agar program pembangunan berhasil dan berkelanjutan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a. Partisipasi Bermakna

Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai objek pelaksana. Partisipasi harus bermakna, bukan sekadar formalitas. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan secara serius.

b. Menghormati Kelembagaan Lokal

Program pembangunan harus menghormati dan memanfaatkan kelembagaan lokal yang ada, bukan membentuk struktur baru yang paralel. Kelompok tani, PKK, karang taruna, lembaga adat, harus menjadi mitra utama, bukan pesaing.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan program harus transparan dan akuntabel. Masyarakat harus dapat mengakses informasi tentang anggaran, pelaksanaan, dan hasil program. Ini penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan.

d. Membangun Kapasitas

Program harus membangun kapasitas masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan lokal harus menjadi bagian integral dari program.

e. Adil dan Inklusif

Manfaat program harus didistribusikan secara adil, tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Kelompok marginal—miskin, perempuan, penyandang disabilitas—harus mendapat perhatian khusus agar tidak tertinggal.

f. Memperkuat Modal Sosial

Program harus dirancang untuk memperkuat, bukan merusak, modal sosial yang ada. Gotong royong, kerjasama, kepercayaan, dan solidaritas harus dipelihara dan dikembangkan.

3. Contoh: Pengelolaan Dana Desa Berbasis Modal Sosial

Dana Desa adalah program besar yang mengucurkan triliunan rupiah ke desa-desa. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada modal sosial desa.

Desa dengan Modal Sosial Tinggi:

- Masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah perencanaan. Partisipasi tinggi karena ada kepercayaan bahwa suara mereka didengar.
- Pengelolaan dana transparan. Informasi anggaran dan realisasi dipublikasikan dan dapat diakses masyarakat. Kepercayaan terjaga.
- Pelaksanaan program melibatkan swadaya masyarakat. Gotong royong dihidupkan, mengurangi biaya proyek.
- Konflik dapat diminimalkan karena ada mekanisme musyawarah dan mediasi yang kuat.
- Hasil pembangunan dirasakan bersama. Kepercayaan semakin kuat, partisipasi semakin tinggi.

Desa dengan Modal Sosial Rendah:

- Musyawarah sepi, hanya diikuti elite. Masyarakat apatis karena tidak percaya suara mereka akan didengar.
- Pengelolaan dana tidak transparan. Muncul tudingan korupsi dan konflik.
- Pelaksanaan program diserahkan pada kontraktor. Swadaya masyarakat rendah.
- Konflik sering terjadi—antar kelompok memperebutkan proyek, tudingan KKN.
- Hasil pembangunan tidak optimal, kepercayaan semakin rendah.

Dana Desa bisa menjadi berkah atau malapetaka tergantung pada modal sosial desa. Di desa dengan modal sosial tinggi, Dana Desa memperkuat pembangunan dan mempererat kebersamaan. Di desa dengan modal sosial rendah, Dana Desa bisa memicu konflik dan kerusakan sosial.

G. MEMBANGUN DAN MEMELIHARA MODAL SOSIAL

Modal sosial bukan barang jadi yang ada begitu saja. Ia perlu dibangun, dipelihara, dan diperkuat secara terus-menerus.

1. Memperkuat Kepercayaan

Kepercayaan dibangun melalui interaksi positif yang berulang. Untuk memperkuat kepercayaan:

- **Konsistensi dan keandalan**: Orang harus dapat diandalkan untuk memenuhi janji dan komitmennya. Kepala desa yang konsisten dan dapat diandalkan akan dipercaya masyarakat.
- **Kejujuran dan transparansi**: Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Pengelolaan dana desa yang transparan membangun kepercayaan. Sebaliknya, ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan.
- **Keterbukaan**: Pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan kritik lebih dipercaya daripada yang tertutup dan defensif.
- **Keadilan**: Perlakuan yang adil terhadap semua warga membangun kepercayaan. Pilih kasih dan favoritisme merusaknya.
- **Kompetensi**: Orang dipercaya jika mereka dianggap kompeten dalam bidangnya. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa penting untuk membangun kepercayaan.

2. Memperkuat Jaringan

Jaringan sosial perlu dirawat dan diperluas:

- **Memfasilitasi pertemuan rutin**: Pemerintah desa dapat memfasilitasi pertemuan rutin berbagai kelompok—PKK, karang taruna, kelompok tani, pengajian. Pertemuan memperkuat ikatan dan memudahkan koordinasi.
- **Mendorong organisasi kemasyarakatan**: Organisasi yang aktif adalah wadah jaringan. Pemerintah desa perlu mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan, baik secara moral maupun material.
- **Memanfaatkan teknologi**: Media sosial dan grup WhatsApp dapat memperkuat jaringan, terutama di kalangan generasi muda dan perantau. Informasi dapat menyebar cepat, komunikasi lebih mudah.
- **Menjalin hubungan dengan pihak luar**: Jaringan tidak hanya internal desa, tetapi juga dengan pihak luar—pemerintah kabupaten, LSM, perguruan tinggi, swasta. Pemerintah desa perlu aktif menjalin hubungan ini.
- **Merawat hubungan dengan perantau**: Perantau adalah aset berharga. Pemerintah desa perlu menjaga komunikasi, mengundang dalam acara-acara desa, dan melibatkan mereka dalam pembangunan.

3. Memperkuat Norma Resiprositas

Norma resiprositas diperkuat melalui praktik dan keteladanan:

- **Menghidupkan tradisi gotong royong**: Pemerintah desa perlu secara rutin menggerakkan kegiatan gotong royong, bukan hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk kegiatan sosial.
- **Memberi apresiasi**: Warga yang aktif dalam kegiatan sosial perlu diapresiasi, misalnya dengan penghargaan atau setidaknya ucapan terima kasih di forum desa.

- **Menjadi teladan**: Kepala desa dan perangkat harus menjadi teladan dalam praktik resiprositas—aktif dalam kegiatan sosial, membantu warga yang kesulitan, tidak pelit.
- **Mengajarkan nilai-nilai**: Nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial perlu diajarkan sejak dini, melalui keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan.
- **Menciptakan insentif sosial**: Norma resiprositas diperkuat jika ada insentif sosial—penghargaan, reputasi baik, rasa dihormati—bagi mereka yang mempraktikkannya.

4. Menjaga Inklusivitas

Modal sosial harus inklusif, tidak eksklusif. Jaringan yang hanya mencakup kelompok tertentu (elite, kelompok agama tertentu, kelompok etnis tertentu) bisa menjadi sumber konflik, bukan kerjasama. Untuk menjaga inklusivitas:

- **Pastikan semua kelompok terwakili** dalam forum-forum desa—perempuan, pemuda, kelompok miskin, minoritas.
- **Cegah diskriminasi** dalam program pembangunan. Semua warga harus mendapat akses yang adil terhadap manfaat pembangunan.
- **Bangun jembatan antar kelompok** melalui kegiatan bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat.
- **Perkuat identitas bersama** sebagai warga desa, di atas identitas kelompok yang lebih sempit.

5. Menyelesaikan Konflik Secara Konstruktif

Konflik adalah ancaman terbesar bagi modal sosial. Konflik yang tidak dikelola dapat menghancurkan kepercayaan, memecah belah jaringan, dan mengikis norma kerjasama. Untuk itu:

- **Deteksi dini konflik** melalui sistem pemantauan dan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat.
- **Fasilitasi penyelesaian konflik** melalui mediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dipercaya.
- **Gunakan pendekatan kearifan lokal** dalam penyelesaian konflik—musyawarah, mediasi adat, rekonsiliasi simbolik.
- **Pulihkan hubungan pasca-konflik** melalui kegiatan bersama, dialog, dan jika perlu ritual adat perdamaian.

H. STUDI KASUS: MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

1. Kasus 1: Desa Pentingsari, Yogyakarta

Desa Pentingsari adalah contoh sukses pembangunan desa wisata berbasis modal sosial. Kunci suksesnya terletak pada kuatnya modal sosial yang ada:

- **Kepercayaan**: Masyarakat percaya pada visi Pak Wiyono, tokoh penggerak. Mereka percaya bahwa pengembangan wisata akan membawa manfaat bersama, bukan hanya untuk segelintir orang.
- **Jaringan**: Jaringan kekerabatan dan ketetanggaan yang kuat memudahkan koordinasi dan kerjasama. Jaringan dengan pihak luar—perguruan tinggi, biro perjalanan, pemerintah—dibangun secara bertahap.

- **Norma resiprositas**: Gotong royong menjadi fondasi pengelolaan homestay dan atraksi wisata. Warga saling membantu, berbagi tamu, dan bersama-sama menjaga kualitas pelayanan.
- **Kelembagaan lokal**: Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan PKK menjadi wadah organisasi yang memperkuat kerjasama.

Hasilnya, Pentingsari menjadi desa wisata terkenal yang memberdayakan seluruh warga. Modal sosial yang kuat menjadi fondasi bagi konversi menjadi modal ekonomi—pendapatan dari pariwisata meningkat, lapangan kerja terbuka, kesejahteraan meningkat.

2. Kasus 2: Pengelolaan Dana Desa yang Transparan di Desa Karangbawang, Purbalingga

Desa Karangbawang di Purbalingga dikenal sebagai desa dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif. Praktik ini memperkuat modal sosial desa:

- **Musyawarah dusun** dilaksanakan dengan tertib dan terdokumentasi. Semua warga bisa menyampaikan aspirasi. Hasil musyawarah menjadi dasar perencanaan pembangunan.
- **Informasi anggaran** dipublikasikan secara terbuka melalui papan pengumuman, website desa, dan media sosial. Masyarakat bisa mengakses kapan saja.
- **Pelaksanaan pembangunan** melibatkan swadaya masyarakat. Gotong royong dihidupkan, mengurangi biaya proyek dan meningkatkan rasa memiliki.
- **Pertanggungjawaban** disampaikan secara terbuka dalam forum musyawarah desa. Warga bisa bertanya, mengkritisi, dan memberikan masukan.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat tinggi. Partisipasi dalam musyawarah dan kegiatan desa meningkat. Konflik akibat tudingan korupsi atau ketidakadilan dapat diminimalkan. Pembangunan berjalan lancar dan hasilnya dirasakan bersama.

3. Kasus 3: Jaringan Perantau di Desa Bayan, Lombok

Desa Bayan di Lombok Utara memiliki jaringan perantau yang sangat kuat. Para perantau, yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan bahkan di luar negeri, tetap terhubung dengan kampung halaman melalui paguyuban dan media sosial.

Jaringan ini menjadi sumber daya yang sangat berharga:

- **Remitansi** dari perantau menjadi sumber ekonomi penting bagi keluarga di desa.
- **Investasi** perantau digunakan untuk membangun rumah, membuka usaha, dan mengembangkan potensi desa. Beberapa perantau bahkan pulang kampung dan menjadi penggerak ekonomi lokal.
- **Informasi** tentang peluang kerja, teknologi baru, dan perkembangan di luar desa mengalir melalui jaringan ini. Petani Bayan mendapatkan informasi tentang harga kopi di pasar global.
- **Dukungan sosial** dari perantau sangat terasa saat terjadi bencana gempa 2018. Paguyuban perantau bergerak cepat menggalang dana dan bantuan.
- **Dukungan politik** dari perantau juga penting. Mereka menjadi pendukung bagi program-program pembangunan desa dan kadang menjadi donatur bagi kegiatan-kegiatan desa.

Modal sosial (jaringan perantau) di sini dikonversi menjadi modal ekonomi (remitansi, investasi), modal informasi (pengetahuan tentang peluang), dan modal sosial politik (dukungan untuk pembangunan desa).

I. RANGKUMAN

Modal sosial adalah kekayaan tak terlihat yang menjadi fondasi kehidupan desa. Ia terdiri dari tiga elemen utama: kepercayaan (trust), jaringan sosial (networks), dan norma resiprositas (norms of reciprocity). Ketiga elemen ini saling terkait dan bersama-sama memfasilitasi kerjasama, mengurangi biaya transaksi, memperlancar arus informasi, menciptakan jaring pengaman sosial, memperkuat kontrol sosial, dan meningkatkan partisipasi.

Dalam kehidupan desa, modal sosial terwujud dalam berbagai praktik: gotong royong (kerja bakti, sambatan, liliuran, sinoman), arisan, sistem keamanan lingkungan (ronda malam), jaringan perantau, dan kelembagaan lokal (kelompok tani, PKK, karang taruna, pengajian). Praktik-praktik ini tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mewariskan nilai-nilai komunal.

Modal sosial dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan politik. Sebagai modal ekonomi, ia membuka akses permodalan, pasar, informasi ekonomi, dan mengurangi risiko usaha. Sebagai modal politik, ia menjadi basis dukungan dalam pemilihan, legitimasi kebijakan, akses ke sumber daya publik, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Keberhasilan program pembangunan desa sangat tergantung pada modal sosial. Program yang dirancang dengan mempertimbangkan modal sosial yang ada—partisipatif, menghormati kelembagaan lokal, transparan, membangun kapasitas, adil, dan memperkuat modal sosial—cenderung lebih berhasil dan berkelanjutan. Sebaliknya, program yang mengabaikan modal sosial—top-down, tidak partisipatif, merusak kepercayaan, menciptakan ketergantungan, memicu konflik—sering gagal meskipun didanai besar.

Dana Desa adalah contoh nyata bagaimana modal sosial menentukan keberhasilan. Di desa dengan modal sosial tinggi, Dana Desa menjadi berkah yang memperkuat pembangunan dan mempererat kebersamaan. Di desa dengan modal sosial rendah, Dana Desa bisa menjadi petaka yang memicu konflik dan kerusakan sosial.

Modal sosial perlu dibangun, dipelihara, dan diperkuat secara terus-menerus melalui:

1. **Memperkuat kepercayaan** dengan konsistensi, kejujuran, transparansi, keadilan, dan kompetensi.
2. **Memperkuat jaringan** dengan memfasilitasi pertemuan rutin, mendorong organisasi kemasyarakatan, memanfaatkan teknologi, menjalin hubungan dengan pihak luar, dan merawat hubungan dengan perantau.
3. **Memperkuat norma resiprositas** dengan menghidupkan tradisi gotong royong, memberi apresiasi, menjadi teladan, mengajarkan nilai-nilai, dan menciptakan insentif sosial.
4. **Menjaga inklusivitas** dengan memastikan semua kelompok terwakili, mencegah diskriminasi, membangun jembatan antar kelompok, dan memperkuat identitas bersama.
5. **Menyelesaikan konflik secara konstruktif** melalui deteksi dini, mediasi, pendekatan kearifan lokal, dan pemulihan hubungan.

Pada akhirnya, modal sosial adalah aset terbesar desa. Ia tidak tercatat dalam neraca keuangan, tidak termuat dalam inventaris aset, tetapi menentukan apakah desa akan maju atau tertinggal, apakah

masyarakat akan bersatu atau terpecah, apakah pembangunan akan berkelanjutan atau hanya proyek musiman. Desa yang cerdas adalah desa yang merawat modal sosialnya sebaik merawat infrastruktur fisiknya, karena dari modal sosiallah semua pembangunan berakar.

J. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana tingkat kepercayaan antar warga di desa Anda? Apakah masih tinggi atau sudah mulai menurun? Faktor apa yang mempengaruhinya?
2. Jaringan sosial apa saja yang kuat di desa Anda? Apakah jaringan kekerabatan, organisasi kemasyarakatan, atau jaringan perantau? Bagaimana jaringan-jaringan itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari?
3. Praktik gotong royong apa yang masih hidup di desa Anda? Apakah ada perubahan bentuk atau intensitas dibandingkan masa lalu?
4. Bagaimana hubungan antara desa Anda dengan para perantau? Apakah mereka masih terhubung dan berkontribusi untuk pembangunan desa?
5. Menurut Anda, bagaimana pengelolaan dana desa di daerah Anda? Apakah sudah transparan dan partisipatif? Apakah ada dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat?
6. Adakah program pembangunan yang pernah gagal di desa Anda karena mengabaikan modal sosial yang ada? Apa penyebabnya?
7. Bagaimana cara terbaik untuk memperkuat modal sosial di desa di tengah arus modernisasi dan individualisme?
8. Menurut Anda, apa yang lebih penting untuk kemajuan desa: modal finansial (dana desa) atau modal sosial (kepercayaan, jaringan)? Mengapa?

BAB XV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. PENGANTAR: DARI OBJEK MENUJU SUBJEK PEMBANGUNAN

Selama berpuluh-puluh tahun, paradigma pembangunan di Indonesia cenderung top-down. Pemerintah pusat merancang program, pemerintah daerah melaksanakan, dan masyarakat desa menjadi objek atau penerima pasif. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, tidak dimintai pendapat tentang kebutuhan mereka, dan tidak dilibatkan dalam evaluasi. Akibatnya, banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil, tidak berkelanjutan, dan bahkan menciptakan ketergantungan.

Paradigma ini mulai berubah sejak era reformasi, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa kini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Masyarakat desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek yang aktif menentukan arah pembangunan desanya. Inilah esensi pemberdayaan masyarakat: membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengidentifikasi potensi dan masalahnya sendiri, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi solusi secara partisipatif.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang pemberdayaan masyarakat desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep pemberdayaan menurut para ahli, prinsip-prinsipnya, serta tujuannya. Selanjutnya, kita akan menelusuri berbagai metode pemberdayaan, seperti pendampingan, pelatihan, fasilitasi, dan advokasi, serta pendekatan partisipatif seperti Participatory Rural Appraisal (PRA). Kita juga akan mengulas berbagai program pemberdayaan yang pernah dan sedang berjalan, seperti PNPM Mandiri Perdesaan, program Desa Mandiri, serta inisiatif dari lembaga swadaya masyarakat, untuk melihat efektivitasnya. Pada bagian akhir, kita akan membahas indikator keberhasilan pemberdayaan dan strategi untuk memastikan keberlanjutan pasca-program.

B. MEMAHAMI KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jadi, pemberdayaan berarti upaya untuk membangun kekuatan atau kemampuan. Dalam konteks masyarakat, pemberdayaan adalah proses membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengurus dirinya sendiri, mengatasi masalahnya sendiri, dan mencapai kesejahteraan secara mandiri.

Beberapa definisi pemberdayaan dari para ahli:

Jim Ife, ahli pemberdayaan masyarakat dari Australia, mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Pemberdayaan mencakup tiga dimensi: (1) pengembangan kemampuan, (2) akses terhadap sumber daya, dan (3) partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Edi Suharto, pakar pekerjaan sosial Indonesia, mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan masyarakat agar mereka dapat mengontrol dan mempengaruhi kehidupannya sendiri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Ginandjar Kartasasmita mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disintesiskan bahwa **pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun kapasitas, kemandirian, dan kekuasaan masyarakat agar mampu mengidentifikasi potensi dan masalahnya sendiri, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi solusi secara partisipatif, sehingga mereka dapat mengontrol dan menentukan arah kehidupan mereka sendiri**.

2. Perbedaan Pemberdayaan dengan Pendekatan Pembangunan Konvensional

Pemberdayaan berbeda secara fundamental dengan pendekatan pembangunan konvensional:

Aspek	Pendekatan Konvensional	Pendekatan Pemberdayaan
Paradigma	Top-down, sentralistik	Bottom-up, partisipatif
Peran masyarakat	Objek pembangunan	Subjek pembangunan
Perencanaan	Dilakukan oleh pemerintah/ahli	Dilakukan bersama masyarakat
Kebutuhan	Ditentukan dari atas	Diidentifikasi masyarakat sendiri
Pelaksanaan	Dilakukan oleh kontraktor/lembaga luar	Dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan
Hasil	Fisik, jangka pendek	Kapasitas, kemandirian, jangka panjang
Keberlanjutan	Rendah, tergantung dana luar	Tinggi, karena masyarakat memiliki
Indikator keberhasilan	Terserapnya anggaran, terbangunnya fisik	Meningkatnya kemandirian masyarakat

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek: Peningkatan Kapasitas

Dalam jangka pendek, pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek:

- Pengetahuan tentang potensi dan masalah desa.
- Keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan.
- Kemampuan organisasi dan manajemen.
- Kemampuan analisis dan perencanaan.
- Kemampuan advokasi dan negosiasi.

b. Tujuan Jangka Menengah: Kemandirian

Dalam jangka menengah, pemberdayaan bertujuan membangun kemandirian masyarakat:

- Mampu mengidentifikasi masalah dan potensi sendiri.
- Mampu merencanakan program sendiri.
- Mampu melaksanakan program sendiri.
- Mampu mengevaluasi dan belajar dari pengalaman.
- Mampu mengakses sumber daya (modal, informasi, teknologi) sendiri.

c. Tujuan Jangka Panjang: Kesejahteraan Berkelanjutan

Dalam jangka panjang, pemberdayaan bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan:

- Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.
- Membaiknya kesehatan dan pendidikan masyarakat.
- Terpeliharanya lingkungan hidup.
- Menguatnya kelembagaan lokal.
- Terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan gender.

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Partisipasi Bermakna

Masyarakat harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Partisipasi bukan sekadar formalitas, di mana masyarakat hanya diminta hadir dan menyetujui agenda yang sudah ditentukan. Partisipasi yang bermakna berarti masyarakat memiliki ruang untuk mempengaruhi keputusan.

b. Kesetaraan dan Keadilan

Pemberdayaan harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan. Semua kelompok masyarakat—laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, tua dan muda, mayoritas dan minoritas—harus memiliki akses yang sama terhadap proses pemberdayaan dan manfaatnya. Kelompok marginal perlu mendapat perhatian khusus.

c. Menghormati Kearifan Lokal

Pemberdayaan harus menghormati kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan kelembagaan tradisional yang ada. Ia tidak boleh memaksakan nilai-nilai asing yang tidak sesuai. Sebaliknya, ia harus menggali dan memanfaatkan potensi lokal sebagai basis pengembangan.

d. Berkelanjutan

Pemberdayaan harus dirancang untuk berkelanjutan. Hasil-hasilnya harus dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri setelah program berakhir. Ini berarti membangun kapasitas lokal, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan sistem yang mandiri.

e. Holistik dan Terpadu

Pemberdayaan tidak boleh parsial. Masalah masyarakat bersifat multidimensi—ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan. Pemberdayaan harus pendekatan holistik yang memadukan berbagai aspek dan melibatkan berbagai pihak.

f. Berbasis Potensi, Bukan Kekurangan

Pendekatan berbasis kekurangan (deficit-based approach) melihat masyarakat sebagai "masalah"—miskin, bodoh, tertinggal, tidak berdaya. Pendekatan ini cenderung membuat masyarakat pasif dan tergantung. Sebaliknya, pendekatan berbasis aset (asset-based approach) melihat masyarakat sebagai "potensi"—memiliki pengetahuan lokal, keterampilan, sumber daya alam, modal sosial. Pemberdayaan harus menggali dan mengembangkan potensi ini.

C. METODE DAN PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

Ada berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa.

1. Metode-Metode Pemberdayaan

a. Pendampingan

Pendampingan adalah metode paling utama dalam pemberdayaan. Fasilitator desa atau pendamping masyarakat hadir di tengah masyarakat, bukan sebagai "guru" yang menggurui, tetapi sebagai "sahabat" yang menemani proses belajar masyarakat. Peran pendamping meliputi:

- **Motivator**: membangkitkan kesadaran, semangat, dan kepercayaan diri masyarakat.
- **Fasilitator**: memfasilitasi proses-proses partisipatif—musyawarah, diskusi, perencanaan.
- **Mediator**: menjadi penengah jika terjadi konflik, menjembatani masyarakat dengan pihak luar.
- **Teknisi**: membantu masyarakat dengan pengetahuan teknis yang diperlukan.
- **Organiser**: membantu masyarakat membangun dan memperkuat organisasi lokal.

Pendampingan harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya sekali-sekali. Pendamping harus benar-benar hadir, terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan membangun hubungan kepercayaan.

b. Pelatihan

Pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pelatihan dapat bersifat teknis (misalnya: cara membuat pupuk organik, cara mengelola keuangan kelompok, cara memasarkan produk online) maupun non-teknis (misalnya: kepemimpinan, manajemen konflik, advokasi kebijakan).

Pelatihan yang efektif harus:

- Dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan keinginan pelatih.
- Menggunakan metode partisipatif—bukan ceramah satu arah, tetapi diskusi, simulasi, praktik langsung.
- Melibatkan praktisi atau tokoh yang sudah sukses sebagai narasumber.
- Berkelanjutan, tidak sekali selesai. Ada follow-up dan pendampingan pasca-pelatihan.

c. Fasilitasi

Fasilitasi adalah proses membantu masyarakat untuk mencapai tujuannya sendiri. Fasilitator tidak memberikan jawaban, tetapi membantu masyarakat menemukan jawabannya sendiri. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, menyediakan informasi yang diperlukan, memfasilitasi diskusi, dan membantu masyarakat mencapai konsensus.

Fasilitasi diperlukan dalam berbagai forum—musyawarah desa, pertemuan kelompok, perencanaan program, evaluasi kegiatan. Fasilitator yang baik adalah yang netral, tidak memihak, dan mampu membuat semua pihak merasa didengar.

d. Advokasi

Advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pihak lain (pemerintah, perusahaan) agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Advokasi bisa dilakukan melalui dialog, lobi, kampanye publik, atau aksi bersama.

Dalam pemberdayaan, masyarakat perlu dibekali kemampuan advokasi agar dapat memperjuangkan hak-haknya sendiri. Mereka perlu tahu cara menyusun argumentasi, cara mengakses informasi publik, cara berkomunikasi dengan pejabat, cara membangun opini publik.

e. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah proses membangun dan memperkuat organisasi lokal yang menjadi wadah perjuangan masyarakat. Organisasi bisa berupa kelompok tani, kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama, koperasi, atau forum warga.

Organisasi yang kuat memungkinkan masyarakat untuk bertindak kolektif, bukan hanya individual. Mereka bisa menggalang sumber daya, membagi tugas, melakukan advokasi bersama, dan mempertahankan hasil-hasil pembangunan.

f. Riset Partisipatif

Riset partisipatif adalah riset yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, dengan bantuan fasilitator, untuk memahami kondisi, potensi, dan masalah mereka. Masyarakat dilibatkan dalam semua tahap—merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan.

Hasil riset partisipatif lebih bermakna bagi masyarakat karena mereka sendiri yang menemukannya. Riset ini juga membangun kesadaran kritis tentang realitas yang mereka hadapi.

2. Pendekatan Partisipatif: Participatory Rural Appraisal (PRA)

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah pendekatan yang banyak digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. PRA dikembangkan pada tahun 1980-an sebagai alternatif dari metode survei konvensional yang mahal, memakan waktu, dan tidak partisipatif.

Prinsip-prinsip PRA:

- **Masyarakat sebagai pelaku**, bukan objek.
- **Belajar dari masyarakat**, bukan mengajari mereka.
- **Menggali dan memanfaatkan pengetahuan lokal**, bukan memaksakan pengetahuan luar.
- **Membiarkan masyarakat menganalisis sendiri**, bukan dianalisis oleh orang luar.
- **Bersikap fleksibel dan kreatif**, tidak terpaku pada metode baku.

Teknik-teknik PRA:

1. **Pemetaan partisipatif (participatory mapping)** : masyarakat diajak membuat peta desa mereka sendiri—batas wilayah, pemukiman, lahan pertanian, sumber air, hutan, fasilitas umum, dan potensi lainnya. Peta ini tidak hanya menggambarkan kondisi fisik, tetapi juga persepsi masyarakat tentang wilayahnya.

2. **Transect walk**: berjalan bersama masyarakat melintasi wilayah desa untuk mengamati kondisi lahan, tanaman, sumber daya, dan masalah lingkungan. Selama perjalanan, masyarakat menjelaskan apa yang mereka lihat, apa masalahnya, dan apa potensinya.
3. **Kalender musiman**: masyarakat membuat kalender yang menggambarkan kegiatan sepanjang tahun—musim tanam, musim panen, musim paceklik, musim hujan, musim kemarau, musim sakit, dan lain-lain. Kalender ini membantu memahami ritme kehidupan masyarakat.
4. **Diagram kelembagaan (institutional diagram)** : masyarakat memetakan lembaga-lembaga yang ada di desa—pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, pengajian, arisan, dan lain-lain—serta hubungan antar lembaga tersebut.
5. **Matriks prioritas**: masyarakat menentukan prioritas masalah dan solusi dengan cara memberikan peringkat atau skor. Ini membantu mengidentifikasi apa yang paling mendesak dan penting menurut masyarakat sendiri.
6. **Sejarah desa**: masyarakat menceritakan sejarah desa—asal-usul, perkembangan, peristiwa penting, tokoh-tokoh, perubahan yang terjadi. Ini memberikan pemahaman tentang konteks historis dan dinamika desa.
7. **Venn diagram**: masyarakat menggambarkan hubungan antara berbagai kelompok dan lembaga, menunjukkan siapa yang dekat, siapa yang jauh, siapa yang berpengaruh, dan siapa yang terpinggirkan.

Hasil PRA adalah pemahaman yang mendalam tentang kondisi desa dari perspektif masyarakat sendiri, serta rumusan masalah dan potensi yang diidentifikasi bersama. Hasil ini kemudian menjadi dasar untuk perencanaan program yang partisipatif.

D. TAHAP-TAHAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat bukan peristiwa sekali jadi, tetapi proses bertahap. Secara umum, proses pemberdayaan dapat dibagi menjadi beberapa tahap:

1. Tahap Penyadaran

Tahap pertama adalah membangun kesadaran kritis masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak sadar akan potensi yang mereka miliki, tidak sadar akan hak-hak mereka, atau menerima nasib begitu saja (fatalisme). Mereka perlu disadarkan bahwa mereka bisa mengubah nasibnya sendiri.

Kegiatan dalam tahap penyadaran:

- Diskusi-diskusi informal tentang kondisi desa.
- Kunjungan ke desa-desa yang sudah sukses untuk belajar.
- Pertemuan dengan tokoh-tokoh inspiratif.
- Pemutaran film atau video tentang keberhasilan pemberdayaan.
- Dialog reflektif tentang pengalaman dan aspirasi masyarakat.

Tujuan tahap ini adalah masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki potensi, bahwa mereka bisa berubah, dan bahwa mereka harus menjadi subjek, bukan objek.

2. Tahap Pengorganisasian

Setelah kesadaran terbangun, masyarakat perlu diorganisir. Individu-individu yang memiliki kesadaran sama perlu dihimpun dalam wadah bersama. Organisasi menjadi alat untuk bertindak kolektif.

Kegiatan dalam tahap pengorganisasian:

- Identifikasi tokoh-tokoh potensial yang bisa menjadi penggerak.
- Pembentukan kelompok-kelompok berdasarkan minat atau kebutuhan (kelompok tani, kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama).
- Penyusunan struktur organisasi dan pembagian peran.
- Penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan.
- Penyusunan aturan main bersama (AD/ART).

Tujuan tahap ini adalah terbentuknya organisasi lokal yang kuat dan representatif sebagai wadah perjuangan masyarakat.

3. Tahap Perencanaan Partisipatif

Masyarakat bersama fasilitator melakukan perencanaan program secara partisipatif. Mereka mengidentifikasi masalah dan potensi, menetapkan prioritas, merumuskan tujuan, dan merancang kegiatan.

Kegiatan dalam tahap perencanaan:

- Pemetaan potensi dan masalah menggunakan teknik PRA.
- Musyawarah desa untuk membahas hasil pemetaan.
- Penentuan prioritas melalui voting atau matriks prioritas.
- Perumusan tujuan dan indikator keberhasilan.
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Tujuan tahap ini adalah tersusunnya rencana program yang benar-benar berasal dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan dari atas.

4. Tahap Pelaksanaan

Masyarakat melaksanakan program yang telah direncanakan, dengan pendampingan dari fasilitator. Pelaksanaan bisa berupa kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) maupun non-fisik (pelatihan, pengembangan usaha, advokasi).

Prinsip pelaksanaan:

- **Masyarakat sebagai pelaku utama**, bukan hanya tenaga kasar. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan.
- **Transparan**: semua informasi tentang pelaksanaan—anggaran, kemajuan, hambatan—terbuka untuk semua anggota.
- **Akuntabel**: ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
- **Fleksibel**: rencana dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Mereka menilai apakah program berjalan sesuai rencana, apakah tujuan tercapai, apa hambatan yang dihadapi, dan apa yang perlu diperbaiki.

Metode monitoring dan evaluasi partisipatif:

- Pertemuan rutin untuk membahas kemajuan program.
- Kunjungan lapangan bersama untuk melihat hasil fisik.
- Diskusi kelompok untuk menilai dampak.
- Penyusunan laporan bersama.
- Refleksi dan pembelajaran bersama.

Tujuan tahap ini adalah masyarakat belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, dan merencanakan langkah selanjutnya.

6. Tahap Terminasi dan Keberlanjutan

Pada tahap ini, fasilitator secara bertahap mengurangi keterlibatannya dan akhirnya keluar. Masyarakat diharapkan sudah mampu menjalankan program secara mandiri. Program pemberdayaan yang berhasil adalah yang mampu bertahan dan berkembang setelah fasilitator pergi.

Kegiatan dalam tahap terminasi:

- Penguatan kapasitas organisasi lokal.
- Pengembangan jejaring dengan pihak-pihak lain.
- Pencarian sumber pendanaan alternatif.
- Penyusunan rencana strategis jangka panjang.
- Perayaan keberhasilan dan refleksi akhir.

E. PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA

Berbagai program pemberdayaan telah dan sedang dilaksanakan di desa-desa Indonesia, baik oleh pemerintah, LSM, maupun swasta.

1. PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program pemberdayaan terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Program ini berlangsung dari tahun 2007 hingga 2014, sebelum digantikan oleh Dana Desa.

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

- Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
- Membangun infrastruktur dasar perdesaan.

Mekanisme PNPM:

- Masyarakat difasilitasi untuk melakukan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.
- Usulan-usulan dari masyarakat dikumpulkan dan diprioritaskan.
- Dana disalurkan langsung ke desa untuk membiayai usulan prioritas.
- Masyarakat sendiri yang melaksanakan proyek, mengelola keuangan, dan mempertanggungjawabkannya.
- Ada pendamping dari tingkat kecamatan hingga desa yang memfasilitasi proses.

Kelebihan PNPM:

- Sangat partisipatif. Masyarakat benar-benar dilibatkan dalam semua tahap.
- Membangun kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan proyek.
- Dana bergulir untuk ekonomi produktif memberdayakan usaha mikro.
- Infrastruktur yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan karena direncanakan masyarakat sendiri.

Kritik terhadap PNPM:

- Birokrasi yang rumit kadang menghambat pelaksanaan.
- Pendampingan tidak merata kualitasnya.
- Keberlanjutan program setelah PNPM berakhir tidak terjamin di semua desa.

Meskipun PNPM telah berakhir, metodologinya banyak diadopsi dalam pengelolaan Dana Desa. Musyawarah desa, perencanaan partisipatif, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek adalah warisan PNPM yang masih hidup.

2. Program Desa Mandiri

Program Desa Mandiri adalah program yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendorong desa-desa mencapai status "Desa Mandiri" berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM mengelompokkan desa menjadi lima status:

- **Desa Sangat Tertinggal**
- **Desa Tertinggal**
- **Desa Berkembang**
- **Desa Maju**
- **Desa Mandiri**

Program Desa Mandiri bertujuan mendorong desa untuk naik kelas, dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, dari tertinggal menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju, dan akhirnya menjadi desa mandiri.

Strategi yang digunakan antara lain:

- Pendampingan intensif bagi desa-desa tertinggal.

- Bantuan teknis untuk pengembangan potensi desa.
- Insentif bagi desa yang berhasil naik kelas.
- Penguatan BUMDes sebagai motor ekonomi desa.
- Pengembangan produk unggulan desa.

3. Program Pemberdayaan dari LSM

Banyak LSM yang memiliki program pemberdayaan di desa-desa. Pendekatan mereka umumnya lebih partisipatif, lebih fokus pada isu-isu tertentu, dan lebih fleksibel daripada program pemerintah.

Contoh LSM dengan program pemberdayaan desa:

- **Yayasan Bina Swadaya**: fokus pada pengembangan kewirausahaan sosial dan ekonomi kerakyatan.
- **Yayasan Bina Desa**: fokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan penguatan kelembagaan petani.
- **Yayasan KEHATI**: fokus pada konservasi lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
- **Yayasan Dian Desa**: fokus pada pengembangan teknologi tepat guna untuk masyarakat desa.
- **Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra)** : fokus pada pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro.

Program LSM biasanya lebih kecil cakupannya, tetapi lebih intensif pendampingannya. Mereka juga lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan lokal.

4. Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Banyak perusahaan, terutama yang beroperasi di sekitar desa, memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility). Program CSR bisa berupa pembangunan infrastruktur, beasiswa, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha mikro.

CSR yang baik adalah yang tidak sekadar "amal" (charity), tetapi benar-benar memberdayakan masyarakat. Perusahaan perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, tidak memaksakan program yang tidak sesuai, dan memastikan keberlanjutan pasca-program.

5. Dana Desa

Dana Desa adalah program terbesar saat ini. Setiap tahun, rata-rata desa menerima dana miliaran rupiah dari APBN. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Potensi Dana Desa untuk pemberdayaan sangat besar. Jika dikelola dengan prinsip partisipatif dan akuntabel, Dana Desa dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang luar biasa. Namun, jika dikelola secara top-down dan tidak transparan, Dana Desa hanya akan menjadi proyek fisik tanpa makna.

F. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PEMBERDAYAAN

Tidak semua program pemberdayaan berhasil. Ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan.

1. Faktor Keberhasilan

a. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Program yang berhasil adalah program yang melibatkan masyarakat sejak awal. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima, tetapi sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator. Partisipasi yang tinggi menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab.

b. Pendampingan yang Intensif dan Berkualitas

Pendamping yang kompeten, berdedikasi, dan diterima masyarakat sangat menentukan keberhasilan. Mereka mampu membangkitkan kesadaran, memfasilitasi proses partisipatif, dan membantu masyarakat mengatasi masalah.

c. Adanya Pemimpin Lokal yang Kuat

Keberhasilan pemberdayaan sering ditentukan oleh adanya tokoh lokal yang visioner, dipercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat. Tokoh ini bisa dari pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, atau pemuda.

d. Kelembagaan Lokal yang Kuat

Organisasi lokal yang kuat—kelompok tani, kelompok simpan pinjam, koperasi—menjadi wadah untuk tindakan kolektif. Organisasi ini perlu diperkuat kapasitasnya agar mampu menjalankan fungsi pemberdayaan.

e. Adanya Potensi yang Dapat Dikembangkan

Pemberdayaan akan lebih mudah jika desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan—sumber daya alam, sumber daya manusia, kearifan lokal, atau lokasi strategis. Potensi ini menjadi basis pengembangan.

f. Dukungan dari Pihak Luar

Dukungan dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, atau swasta dapat mempercepat pemberdayaan. Dukungan bisa berupa dana, tenaga ahli, akses pasar, atau jaringan.

g. Proses yang Bertahap dan Berkelanjutan

Pemberdayaan tidak bisa instan. Ia membutuhkan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Terburu-buru mengejar target fisik sering mengorbankan proses pemberdayaan yang sesungguhnya.

2. Faktor Kegagalan

a. Pendekatan Top-Down

Program yang dirancang dari atas, tanpa melibatkan masyarakat, sering gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Masyarakat merasa program itu bukan "milik mereka" dan tidak punya tanggung jawab untuk menyukseskannya.

b. Partisipasi Palsu (Pseudo-Participation)

Masyarakat dilibatkan secara formal, tetapi tidak punya pengaruh nyata. Keputusan sudah ditentukan dari atas, masyarakat hanya diminta menyetujui. Ini menciptakan sinisme dan apatisme.

c. Ketergantungan pada Fasilitator atau Donor

Jika masyarakat terlalu tergantung pada fasilitator atau donor, program akan berhenti ketika mereka pergi. Pemberdayaan yang sejati harus membangun kemandirian, bukan ketergantungan.

d. Konflik Internal

Konflik antar kelompok, antar elite, atau antar warga dapat menghambat pemberdayaan. Energi habis untuk berkonflik, bukan untuk membangun.

e. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Penyalahgunaan dana menghancurkan kepercayaan dan memicu konflik. Masyarakat menjadi apatis, tidak mau lagi berpartisipasi.

f. Kapasitas Pendamping Rendah

Pendamping yang tidak kompeten, tidak berdedikasi, atau tidak diterima masyarakat dapat merusak proses pemberdayaan. Mereka mungkin menggurui, memaksakan kehendak, atau bahkan korupsi.

g. Tekanan Politik dan Kepentingan Elite

Kadang elite lokal merasa terancam oleh pemberdayaan yang membangun kesadaran dan kekuatan masyarakat. Mereka bisa menghalangi, mengkooptasi, atau memanipulasi program.

h. Fokus pada Fisik, Bukan Proses

Banyak program terlalu fokus pada hasil fisik—berapa meter jalan, berapa unit bangunan—dan melupakan proses pemberdayaan. Akibatnya, fisik terbangun tetapi masyarakat tetap pasif dan tergantung.

G. MENGUKUR KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN

Keberhasilan pemberdayaan tidak bisa diukur hanya dari indikator fisik atau penyerapan anggaran. Ada indikator yang lebih substantif:

1. Indikator Proses

- **Partisipasi**: Seberapa banyak warga yang terlibat dalam musyawarah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi? Apakah kelompok marginal (perempuan, miskin, minoritas) juga terlibat?
- **Kesadaran kritis**: Apakah masyarakat semakin sadar akan potensi, masalah, dan hak-haknya? Apakah mereka semakin kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak?

- **Kemampuan organisasi**: Apakah organisasi lokal semakin kuat? Apakah mereka memiliki AD/ART, pengurus yang aktif, pertemuan rutin, dan program kerja?
- **Kemampuan perencanaan**: Apakah masyarakat mampu menyusun rencana yang realistis dan partisipatif? Apakah rencana itu didasarkan pada analisis yang baik?
- **Kemampuan pengelolaan keuangan**: Apakah masyarakat mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel? Apakah mereka bisa membuat laporan keuangan?

2. Indikator Hasil

- **Kemandirian**: Apakah masyarakat sudah mampu menjalankan program tanpa bantuan luar? Apakah mereka bisa mengakses sumber daya sendiri?
- **Keberlanjutan**: Apakah program tetap berjalan setelah fasilitator pergi? Apakah ada regenerasi kepemimpinan?
- **Peningkatan kesejahteraan**: Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah akses terhadap pendidikan dan kesehatan membaik?
- **Penguatan jaringan**: Apakah masyarakat memiliki jaringan dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung mereka?
- **Kesetaraan**: Apakah kesenjangan antar kelompok berkurang? Apakah perempuan dan kelompok marginal lebih berdaya?

3. Indikator Dampak Jangka Panjang

- **Penurunan kemiskinan**: Apakah angka kemiskinan di desa menurun?
- **Peningkatan kualitas hidup**: Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) desa meningkat?
- **Keberlanjutan lingkungan**: Apakah lingkungan hidup tetap terjaga atau bahkan membaik?
- **Ketahanan sosial**: Apakah masyarakat lebih tangguh menghadapi krisis—bencana, goncangan ekonomi, konflik?

H. STUDI KASUS: PEMBERDAYAAN DI DESA

1. Kasus 1: Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta

Desa Pentingsari adalah contoh sukses pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Proses pemberdayaan di Pentingsari melalui beberapa tahap:

Tahap Penyadaran:

Pak Wiyono, seorang pensiunan guru, memiliki visi mengubah desa pertanian menjadi desa wisata. Ia mulai berdialog dengan warga, mengajak mereka melihat potensi desa—udara sejuk, pemandangan indah, keramahan warga. Ia juga mengajak warga studi banding ke desa wisata lain untuk melihat keberhasilan.

Tahap Pengorganisasian:

Warga yang tertarik kemudian membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Mereka menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan membuat aturan bersama. Pokdarwis menjadi wadah koordinasi dan pengambilan keputusan bersama.

Tahap Perencanaan:

Pokdarwis bersama warga merencanakan pengembangan desa wisata. Mereka memetakan potensi—homestay mana yang bisa dikembangkan, atraksi apa yang bisa ditawarkan, paket wisata apa yang bisa dibuat. Mereka juga merencanakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan.

Tahap Pelaksanaan:

Warga mulai membenahi rumahnya untuk dijadikan homestay. Ibu-ibu berlatih memasak untuk menyediakan makanan bagi wisatawan. Pemuda berlatih menjadi pemandu wisata dan pelaku seni pertunjukan. Mereka mulai menerima tamu, awalnya dari kenalan, lalu semakin luas.

Tahap Monitoring dan Evaluasi:

Pokdarwis rutin mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi kegiatan. Mereka membahas apa yang sudah berjalan, apa masalahnya, dan apa yang perlu diperbaiki. Wisatawan juga diminta memberikan masukan.

Hasil:
Sekarang Pentingsari menjadi desa wisata terkenal. Pendapatan warga meningkat. Pemuda tidak perlu merantau ke kota. Kelembagaan lokal (Pokdarwis, PKK, karang taruna) semakin kuat. Yang terpenting, masyarakat memiliki rasa percaya diri dan mampu mengelola desa wisata secara mandiri.

2. Kasus 2: PNPM Mandiri Perdesaan di Sebuah Desa di Jawa Tengah

Di sebuah desa di Jawa Tengah, PNPM Mandiri Perdesaan berhasil membangun jalan desa yang sangat dibutuhkan warga. Prosesnya:

- Fasilitator desa memfasilitasi musyawarah desa untuk mengidentifikasi prioritas.
- Warga sepakat bahwa jalan menuju lahan pertanian adalah prioritas utama.
- Warga menyusun rencana teknis dan anggaran secara partisipatif.
- Dana dicairkan, warga sendiri yang melaksanakan pembangunan, bukan kontraktor.
- Ibu-ibu PKK menyediakan konsumsi bagi pekerja gotong royong.
- Setiap minggu ada pertemuan untuk memantau kemajuan dan mengatasi masalah.
- Jalan selesai tepat waktu, dengan kualitas yang baik, dan biaya lebih hemat karena swadaya.
- Warga sangat bangga karena jalan itu adalah hasil kerja mereka sendiri.

Dampak pemberdayaan: warga belajar tentang perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan, dan kerja gotong royong. Mereka juga lebih percaya diri untuk mengelola proyek-proyek berikutnya.

3. Kasus 3: Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Bayan, Lombok

Di Desa Bayan, Lombok Utara, sekelompok perempuan membentuk kelompok simpan pinjam dengan pendampingan LSM. Prosesnya:

- Fasilitator LSM melakukan pendekatan, berdialog dengan perempuan tentang kebutuhan mereka.

- Perempuan mengidentifikasi bahwa mereka butuh akses modal untuk usaha kecil.
- Mereka sepakat membentuk kelompok, menyusun aturan bersama, dan memilih pengurus.
- Mereka mulai menabung secara rutin. Tabungan terkumpul, lalu dipinjamkan ke anggota secara bergilir.
- Fasilitator memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.
- Kelompok berkembang. Tabungan semakin besar. Anggota mulai mengembangkan usaha—jualan jajanan, membuat keripik, beternak ayam.
- Setelah gempa 2018, kelompok ini menjadi jaring pengaman yang membantu anggotanya pulih.

Dampak pemberdayaan: perempuan memiliki akses modal, pendapatan meningkat, dan yang lebih penting, mereka memiliki kepercayaan diri, solidaritas, dan kemampuan mengelola organisasi.

I. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN

Pemberdayaan yang berhasil adalah yang berkelanjutan. Artinya, hasil-hasilnya dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri setelah program berakhir. Untuk mencapai keberlanjutan, beberapa prinsip perlu diperhatikan:

1. Membangun Kapasitas Lokal

Investasi utama pemberdayaan adalah pada manusia. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mandiri. Pelatihan, pendampingan, dan pendidikan harus menjadi fokus utama, bukan sekadar kegiatan pelengkap.

2. Memperkuat Kelembagaan Lokal

Organisasi lokal—kelompok tani, koperasi, PKK, karang taruna—adalah wadah keberlanjutan. Organisasi yang kuat akan mampu melanjutkan kegiatan setelah program berakhir, menggalang sumber daya, dan meregenerasi kepemimpinan. Program pemberdayaan harus memperkuat, bukan menggantikan, kelembagaan lokal.

3. Mengembangkan Sumber Daya Lokal

Pemberdayaan harus berbasis pada sumber daya lokal—sumber daya alam, pengetahuan lokal, kearifan tradisional, modal sosial. Ketergantungan pada sumber daya luar (dana, teknologi, tenaga ahli) harus dikurangi secara bertahap.

4. Menciptakan Sistem yang Mandiri

Masyarakat perlu memiliki sistem yang memungkinkan mereka terus belajar dan berkembang. Misalnya, sistem tabungan dan pinjaman yang dikelola sendiri, sistem dokumentasi pengetahuan, sistem monitoring dan evaluasi internal, atau sistem kaderisasi kepemimpinan.

5. Membangun Jaringan

Tidak ada masyarakat yang benar-benar mandiri. Kemandirian bukan berarti isolasi. Masyarakat perlu memiliki jaringan dengan pihak-pihak lain—pemerintah, LSM, perguruan tinggi, swasta, desa lain—untuk

mendapatkan informasi, dukungan, dan peluang. Jaringan ini perlu dibangun selama program dan dipelihara setelahnya.

6. Merancang Strategi Keluar (Exit Strategy)

Fasilitator atau lembaga pendamping perlu memiliki strategi keluar yang jelas. Mereka harus merencanakan pengurangan keterlibatan secara bertahap, memastikan bahwa masyarakat sudah siap mandiri, dan meninggalkan sistem yang dapat berjalan sendiri.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Bahkan setelah program berakhir, masyarakat perlu terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatannya. Mereka perlu belajar dari pengalaman, menyesuaikan dengan perubahan, dan terus meningkatkan kinerja.

J. RANGKUMAN

Pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengidentifikasi potensi dan masalahnya sendiri, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi solusi secara partisipatif. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Pemberdayaan berbeda secara fundamental dengan pendekatan pembangunan konvensional yang top-down, sentralistik, dan menempatkan masyarakat sebagai objek. Pemberdayaan bertujuan jangka pendek (peningkatan kapasitas), jangka menengah (kemandirian), dan jangka panjang (kesejahteraan berkelanjutan). Prinsip-prinsipnya meliputi partisipasi bermakna, kesetaraan dan keadilan, menghormati kearifan lokal, berkelanjutan, holistik dan terpadu, serta berbasis potensi.

Metode pemberdayaan meliputi pendampingan, pelatihan, fasilitasi, advokasi, pengorganisasian masyarakat, dan riset partisipatif. Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan berbagai tekniknya (pemetaan partisipatif, transect walk, kalender musiman, dll) sangat efektif untuk membangun kesadaran dan perencanaan partisipatif.

Proses pemberdayaan melalui tahap-tahap: penyadaran, pengorganisasian, perencanaan partisipatif, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi partisipatif, serta terminasi dan keberlanjutan.

Berbagai program pemberdayaan telah dan sedang dilaksanakan: PNPM Mandiri Perdesaan (meski telah berakhir, metodologinya banyak diadopsi), Program Desa Mandiri, program-program LSM, CSR perusahaan, dan yang terbesar saat ini adalah Dana Desa. Program-program ini berhasil jika dikelola dengan prinsip partisipatif dan akuntabel, namun bisa gagal jika top-down, korup, atau mengabaikan proses.

Faktor keberhasilan pemberdayaan meliputi: partisipasi tinggi, pendampingan berkualitas, pemimpin lokal kuat, kelembagaan lokal kuat, potensi yang dapat dikembangkan, dukungan luar, dan proses yang bertahap. Faktor kegagalan meliputi: pendekatan top-down, partisipasi palsu, ketergantungan, konflik internal, korupsi, kapasitas pendamping rendah, tekanan elite, dan fokus pada fisik.

Keberhasilan pemberdayaan diukur bukan dari seberapa besar dana yang digulirkan atau berapa meter jalan yang dibangun, tetapi dari seberapa besar kemandirian masyarakat setelah program berakhir. Indikatornya meliputi indikator proses (partisipasi, kesadaran, kemampuan organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan), indikator hasil (kemandirian, keberlanjutan, peningkatan kesejahteraan, penguatan jaringan, kesetaraan), dan indikator dampak jangka panjang (penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, ketahanan sosial).

Pemberdayaan berkelanjutan memerlukan: membangun kapasitas lokal, memperkuat kelembagaan lokal, mengembangkan sumber daya lokal, menciptakan sistem yang mandiri, membangun jaringan, merancang strategi keluar, dan monitoring evaluasi berkelanjutan.

Pada akhirnya, pemberdayaan adalah proses panjang dan tidak mudah. Ia membutuhkan kesabaran, komitmen, dan kepercayaan. Namun, hasilnya sangat berharga: masyarakat yang percaya diri, mandiri, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Inilah esensi pembangunan yang sejati.

K. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana pengalaman desa Anda dengan program-program pemberdayaan yang pernah ada? Apakah lebih banyak yang berhasil atau gagal? Mengapa?
2. Apakah musyawarah desa di daerah Anda sudah berjalan partisipatif, atau masih didominasi oleh elite tertentu? Bagaimana keterlibatan kelompok marginal?
3. Menurut Anda, apa yang lebih penting dalam pemberdayaan: hasil fisik (jalan, jembatan) atau proses (peningkatan kapasitas, kemandirian)? Mengapa?
4. Bagaimana peran pendamping atau fasilitator dalam pemberdayaan di desa Anda? Apakah mereka efektif?
5. Apa potensi terbesar desa Anda yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan? Bagaimana strategi mengembangkannya?
6. Bagaimana cara memastikan bahwa program pemberdayaan berkelanjutan setelah fasilitator atau donor pergi?
7. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendekatan partisipatif di desa Anda? Bagaimana mengatasinya?
8. Menurut Anda, bagaimana seharusnya Dana Desa dikelola agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar proyek fisik?

BAB XVI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

A. PENGANTAR: WARISAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN

Desa dan alam adalah dua entitas yang tak terpisahkan. Sejak awal peradaban, desa tumbuh dan berkembang di tengah hamparan alam yang menyediakan sumber penghidupan. Sawah yang membentang hijau, hutan yang menyimpan kekayaan hayati, sungai yang mengalirkan air kehidupan, dan laut yang menyajikan aneka ikan—semua adalah anugerah yang menjadi fondasi ekonomi dan budaya masyarakat

desa. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana bukan hanya soal teknik pertanian atau kehutanan, tetapi juga soal keberlanjutan hidup, keadilan antargenerasi, dan kedaulatan masyarakat.

Namun, realitas yang kita hadapi seringkali paradoksal. Di satu sisi, desa kaya akan sumber daya alam. Di sisi lain, kemiskinan masih menjadi wajah banyak desa. Kekayaan alam seringkali tidak membawa kesejahteraan bagi pemiliknya. Sumber daya dieksploitasi oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya mendapat remah-remah. Lahan terdegradasi, hutan gundul, air tercemar, dan konflik agraria berkepanjangan. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam desa. Kita akan memulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar: keberlanjutan (sustainability) dan keadilan. Selanjutnya, kita akan membahas identifikasi potensi desa sebagai langkah awal pengelolaan. Kita akan mengeksplorasi berbagai model pengelolaan—pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan (HKm), pertanian organik dan agroforestri, pengelolaan sumber daya air partisipatif, serta pengembangan ekowisata berbasis alam. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis isu-isu krusial seperti konflik agraria, eksploitasi oleh pihak luar, serta strategi untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat atas sumber daya alamnya.

B. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pengelolaan sumber daya alam desa harus didasarkan pada dua prinsip utama: keberlanjutan dan keadilan.

1. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability)

Keberlanjutan berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi habis-habisan untuk keuntungan jangka pendek, karena anak cucu kita juga berhak menikmatinya. Prinsip keberlanjutan mencakup tiga aspek:

a. Keberlanjutan Ekologis

Pengelolaan sumber daya alam harus menjaga fungsi ekosistem. Hutan tidak boleh digunduli hingga gersang, karena ia berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, dan habitat keanekaragaman hayati. Lahan pertanian tidak boleh terus-menerus dipupuk kimia hingga rusak struktur tanahnya. Sungai tidak boleh tercemar limbah sehingga biota air mati.

Keberlanjutan ekologis berarti memanfaatkan sumber daya alam dalam batas daya dukungnya. Eksploitasi yang melebihi daya dukung akan merusak ekosistem dan pada akhirnya merugikan manusia sendiri. Banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, adalah konsekuensi dari pengabaian keberlanjutan ekologis.

b. Keberlanjutan Ekonomi

Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Artinya, sumber daya alam harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat terus-menerus menghasilkan pendapatan, tidak hanya untuk satu atau dua musim.

Agroforestri, misalnya, menggabungkan tanaman tahunan (pohon) dengan tanaman semusim (pertanian). Pohon memberikan hasil jangka panjang (kayu, buah, getah), sementara tanaman semusim memberikan hasil jangka pendek. Ini menciptakan keberlanjutan ekonomi.

c. Keberlanjutan Sosial

Pengelolaan sumber daya alam harus dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik. Ia harus melibatkan masyarakat, menghormati kearifan lokal, dan mendistribusikan manfaat secara adil. Program yang baik secara ekologis dan ekonomis tetapi ditolak masyarakat tidak akan berkelanjutan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menegaskan bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya alam harus dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut. Ini mencakup:

a. Keadilan Intra-generasi

Manfaat sumber daya alam harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat yang hidup sekarang. Tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite atau pihak luar, sementara mayoritas masyarakat miskin tetap miskin. Akses terhadap sumber daya harus terbuka bagi semua, terutama kelompok marginal.

b. Keadilan Inter-generasi

Seperti dalam prinsip keberlanjutan, keadilan juga berarti bahwa generasi mendatang berhak menikmati sumber daya alam yang sama. Kita tidak boleh mewariskan lahan kritis, hutan gundul, dan air tercemar kepada anak cucu.

c. Keadilan Prosedural

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam. Mereka berhak mengetahui, berpartisipasi, dan mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Tidak boleh ada keputusan sepihak yang mengabaikan aspirasi masyarakat.

C. MENGIDENTIFIKASI POTENSI SUMBER DAYA ALAM DESA

Langkah pertama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa. Setiap desa memiliki kekhasan sendiri. Ada desa yang kaya akan lahan pertanian subur, ada yang memiliki hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi, ada yang dikaruniai sumber air melimpah, ada yang memiliki potensi wisata alam, dan ada yang kaya akan hasil laut.

1. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif adalah metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam desa. Dalam proses ini, masyarakat sendiri yang memetakan wilayah desanya—batas-batas, jenis lahan, penggunaan lahan, sumber daya yang ada, dan masalah yang dihadapi.

Teknik yang dapat digunakan antara lain:

- **Pembuatan peta desa** oleh masyarakat di atas kertas atau dengan bantuan teknologi GIS sederhana.
- **Transect walk**: berjalan bersama masyarakat melintasi desa untuk mengamati langsung kondisi lahan, tanaman, sumber air, dan potensi lainnya.
- **Diskusi kelompok** untuk mengidentifikasi sumber daya apa saja yang dimiliki desa, bagaimana pemanfaatannya selama ini, dan apa masalahnya.
- **Wawancara dengan tokoh kunci**: petani tua, nelayan, perambah hutan, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sumber daya alam.

2. Jenis-Jenis Potensi Sumber Daya Alam Desa

Secara umum, potensi sumber daya alam desa dapat dikelompokkan menjadi:

a. Sumber Daya Lahan dan Pertanian

Lahan adalah sumber daya paling fundamental bagi desa agraris. Potensi lahan meliputi:

- Lahan sawah untuk padi dan palawija.
- Lahan kering untuk jagung, kedelai, kacang tanah.
- Lahan perkebunan untuk kopi, kakao, karet, kelapa sawit, tebu.
- Lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman sayuran, buah-buahan, dan obat keluarga.

Desa Pandansari di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, misalnya, tumbuh sebagai desa pertanian yang bergantung pada lahan-lahan marginal di sekitar hutan konservasi. Namun, praktik monokultur dan tingginya penggunaan pupuk kimia serta pestisida membuat lahan cepat terdegradasi . Ini menunjukkan bahwa identifikasi potensi tidak cukup hanya dengan mengetahui jenis lahan, tetapi juga memahami kondisi dan tantangannya.

b. Sumber Daya Hutan

Banyak desa yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Potensi hutan meliputi:

- Hasil hutan kayu: berbagai jenis kayu yang dapat dimanfaatkan secara lestari.
- Hasil hutan bukan kayu: rotan, bambu, madu, getah, buah-buahan, jamur, tanaman obat.
- Jasa lingkungan: hutan sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, dan habitat keanekaragaman hayati.
- Potensi ekowisata: keindahan alam, keunikan ekosistem, flora-fauna langka.

Di Desa Bale Redelong, Aceh, masyarakat hidup berdampingan dengan hutan lindung seluas 828 hektare di kaki Gunung Burni Telong. Kawasan ini memiliki tutupan hutan yang masih relatif baik dan menjadi sumber penghidupan masyarakat . Potensi hutan di sini tidak hanya kayu, tetapi juga kopi yang ditanam dengan sistem agroforestri dan madu dari lebah Apis cerana.

c. Sumber Daya Air

Air adalah sumber kehidupan. Potensi sumber daya air desa meliputi:

- Sumber mata air untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga.
- Sungai untuk irigasi, perikanan, dan potensi wisata.

- Danau atau waduk untuk perikanan dan wisata.
- Air tanah untuk berbagai keperluan.

Desa Tajuk di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, adalah salah satu desa yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah tangkapan air bagi wilayah hilir . Konservasi sumber air di desa-desa seperti ini sangat krusial.

d. Sumber Daya Laut dan Pesisir

Bagi desa pesisir, laut adalah sumber utama penghidupan. Potensinya meliputi:

- Perikanan tangkap: berbagai jenis ikan, udang, cumi, dan biota laut lainnya.
- Perikanan budidaya: tambak, keramba jaring apung, budidaya rumput laut.
- Hutan mangrove: pelindung pantai, habitat biota, dan potensi ekowisata.
- Terumbu karang: keanekaragaman hayati dan potensi wisata selam.

e. Potensi Wisata Alam

Semakin banyak desa yang mengembangkan potensi wisata alam. Ini bisa berupa:

- Pemandangan alam: persawahan, pegunungan, pantai, air terjun.
- Keunikan ekosistem: hutan mangrove, terumbu karang, padang savana.
- Flora-fauna khas: burung, kupu-kupu, bunga langka.
- Aktivitas wisata: tracking, river tubing, outbound, camping.

Di Desa Bale Redelong, pengembangan ekowisata juga dilakukan dengan pemugaran kawasan Air Terjun Peteri Pintu yang berada di wilayah kelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Upaya ini tidak hanya bertujuan mendatangkan wisatawan, tetapi juga memperluas pasar potensial bagi produk-produk lokal seperti madu .

D. MODEL-MODEL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Berbagai model pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan telah dikembangkan dan dipraktikkan di desa-desa Indonesia.

1. Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Salah satu model yang paling menjanjikan adalah skema Perhutanan Sosial, yang mencakup Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam skema ini, masyarakat diberikan hak kelola atas kawasan hutan negara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kewajiban menjaga kelestariannya .

a. Hutan Desa (HD)

Hutan Desa adalah kawasan hutan yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dibentuk sebagai unit pengelola yang bertanggung jawab. Hingga pertengahan 2024, di Provinsi Aceh saja tercatat 46 unit Hutan Desa dengan luas 83.350 hektare .

LPHD Bale Redelong di Aceh menjadi contoh nyata keberhasilan skema ini. Sejak 2018, masyarakat memperoleh hak kelola atas 828 hektare hutan lindung. Dengan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk WRI Indonesia dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, LPHD Bale Redelong berhasil mengelola hutannya secara lestari .

b. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

HKm adalah kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Bah Aceh Tengah adalah contoh keberhasilan transformasi pengelolaan hutan melalui skema HKm. Sebelum program HKm, masyarakat setempat mengelola hutan lindung secara informal dan eksploitatif tanpa kepastian hukum, yang mengakibatkan konflik tenurial dan pemasaran hasil hutan ilegal .

Setelah memperoleh izin HKm melalui Keputusan Menteri No. SK.1038/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023, terjadi perubahan signifikan menuju tata kelola hutan yang legal, partisipatif, dan berbasis konservasi. Strategi peningkatan partisipasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan, pelatihan teknis, perencanaan partisipatif (RKPS), dan pembangunan infrastruktur .

Implementasi rencana kerja HKm menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi, agroforestri, dan konservasi. Skema HKm terbukti memperkuat akses legal, mengurangi konflik lahan, dan mendorong integrasi antara kelestarian hutan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui pendekatan partisipatif .

c. Manfaat Perhutanan Sosial

Skema Perhutanan Sosial memberikan banyak manfaat:

- **Kepastian hukum**: Masyarakat memiliki hak legal untuk mengelola hutan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai perambah liar.
- **Pengurangan konflik**: Dengan adanya kejelasan hak, konflik tenurial dapat diminimalkan.
- **Peningkatan kesejahteraan**: Masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hutan secara legal, seperti kopi, madu, rotan, atau ekowisata.
- **Kelestarian hutan**: Karena memiliki hak kelola jangka panjang, masyarakat berkepentingan untuk menjaga hutannya.

Data dari Provinsi Aceh menunjukkan bahwa hingga Juni 2024, akses masyarakat terhadap Perhutanan Sosial telah mencapai 171.911,94 hektare, atau sekitar 40% dari target area. Sebanyak 109 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah terbentuk dan 10 di antaranya telah meraih predikat gold dan silver .

2. Agroforestri dan Pertanian Berkelanjutan

Agroforestri adalah sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman tahunan (pohon) dengan tanaman semusim (pertanian) atau peternakan. Sistem ini meniru ekosistem hutan alami yang memiliki banyak lapisan dan keanekaragaman hayati tinggi.

a. Praktik Agroforestri di Bale Redelong

Di Desa Bale Redelong, masyarakat mulai menerapkan sistem agroforestri dengan menanam kopi di bawah naungan pohon. Praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas kopi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga tutupan hutan. Data Global Forest Watch (GFW) menunjukkan bahwa tutupan hutan primer di wilayah kelola LPHD Bale Redelong tetap terjaga tanpa adanya deforestasi selama tiga tahun terakhir (2021–2023) .

Selain kopi, masyarakat juga mengembangkan budidaya madu dari lebah Apis cerana di sekitar area kebun kopi. KUPS Kulem Kolak, misalnya, memproduksi madu dengan lebih dari 50 stup dan menjualnya seharga Rp300.000 per liter. Pendapatan rata-rata kelompok dari usaha ini mencapai Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan . Integrasi antara madu dan kopi menjadi strategi ganda yang efektif untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

b. Pertanian Organik di Pandansari

Di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Universitas Brawijaya menggandeng Kelompok Tani Baran Sukosari dalam program penguatan keterampilan konservasi agroforestri kopi dan pelatihan pertanian organik . Program ini merupakan upaya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi kondisi lahan kering pegunungan yang rentan terhadap perubahan iklim.

Sistem kebun campuran berbasis kopi atau agroforestri, yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, dikembalikan dan dipulihkan melalui pelatihan pembibitan tanaman kopi dan pohon keras, serta pengenalan teknik budidaya kopi yang berkelanjutan .

Selain untuk petani kopi, program ini juga mencakup pelatihan pertanian organik bagi Ibu-ibu PKK. Mereka memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan kompos, pemanfaatan limbah organik, dan teknik menanam yang minim pestisida kimia, yang dapat diterapkan baik di kebun rumah maupun lahan kelompok . Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ekonomi desa tetapi juga mempromosikan keseimbangan lingkungan.

c. Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan

Universitas Brawijaya juga mendirikan Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan di Desa Pandansari sebagai bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat Strategis yang mendukung SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 15 (Kehidupan di Darat) .

Melalui sekolah lapang ini, petani didorong untuk belajar secara praktis. Mereka tidak hanya menerima materi ceramah, tetapi juga mengikuti praktik langsung di lahan demoplot. Salah satu kegiatan penting adalah pelatihan membuat pupuk kompos dari limbah organik rumah tangga dan hasil panen, yang selama ini kerap terbuang .

Evaluasi program menunjukkan hasil menggembirakan. Berdasarkan pre-test dan post-test, terjadi lonjakan signifikan pemahaman peserta mengenai prinsip pertanian organik dan keberlanjutan. Nilai rata-rata post-test mencapai 96,33, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pelatihan yang hanya 73,33 .

3. Pengelolaan Sumber Daya Air Partisipatif

Air adalah sumber daya yang paling vital dan sekaligus paling rawan konflik. Pengelolaan sumber daya air yang melibatkan partisipasi semua pengguna adalah kunci untuk mencegah konflik dan menjamin ketersediaan air bagi pertanian dan kebutuhan rumah tangga.

a. Program Desa Peduli Sumber Air (DPSA)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Program Desa Peduli Sumber Air (DPSA) untuk mendorong konservasi sumber air melalui pendekatan partisipatif desa . Program ini sejalan dengan semangat Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda nasional pengendalian krisis air bersih.

Di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, program ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa, tokoh lingkungan, dan pemerintah daerah. Masyarakat diajak memahami pentingnya konservasi sumber air, mengingat wilayah pegunungan seperti Getasan memiliki fungsi ekologis penting bagi daerah hilir .

Menurut Muh Haris, Anggota DPR RI yang mendukung program ini, upaya pelestarian sumber air harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. "Desa Peduli Sumber Air adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan air bersih bagi generasi mendatang. Air adalah sumber kehidupan, dan menjaga kelestariannya berarti menjaga masa depan lingkungan dan ekonomi masyarakat," ujarnya .

b. Aksi Nyata Konservasi Air

Program konservasi air tidak boleh berhenti pada sosialisasi, tetapi harus berlanjut pada aksi nyata di lapangan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- Rehabilitasi daerah tangkapan air melalui penanaman pohon.
- Pembuatan sumur resapan dan biopori.
- Perlindungan mata air dari pencemaran.
- Pengelolaan limbah rumah tangga agar tidak mencemari sungai.
- Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang hemat air.

4. Pengembangan Ekowisata Berbasis Alam

Ekowisata adalah model pengelolaan sumber daya alam yang memadukan konservasi dan ekonomi. Dengan mengembangkan ekowisata, masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari keindahan alamnya, sekaligus termotivasi untuk menjaganya.

a. Prinsip Ekowisata

Ekowisata yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip:

- **Berbasis masyarakat**: Masyarakat lokal harus menjadi pemilik dan pengelola utama, bukan hanya penonton.
- **Konservasi**: Kegiatan wisata harus mendukung upaya pelestarian alam, tidak merusaknya.
- **Edukasi**: Wisatawan mendapat pembelajaran tentang alam dan budaya lokal.
- **Ekonomi**: Memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.
- **Berkelanjutan**: Tidak melebihi daya dukung lingkungan.

b. Contoh Pengembangan Ekowisata

Di Desa Bale Redelong, pengembangan ekowisata dilakukan dengan pemugaran kawasan Air Terjun Peteri Pintu yang berada di wilayah kelola LPHD. Upaya ini didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. Ekowisata ini tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga memperluas pasar potensial bagi produk-produk lokal seperti madu .

Di desa-desa lain, ekowisata dikembangkan dalam berbagai bentuk: tracking di hutan, susur sungai, pengamatan burung, fotografi alam, berkemah, atau sekadar menikmati pemandangan persawahan dan pegunungan.

E. INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pengelolaan sumber daya alam desa tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Diperlukan inovasi dan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian.

1. Pemantauan Hutan dengan Teknologi

Di Desa Bale Redelong, tim patroli perlindungan dan pengamanan hutan diberikan peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi perubahan tutupan lahan dan menggunakan perangkat pemantauan. Mereka menggunakan Global Forest Watch (GFW) untuk memverifikasi peringatan pembukaan lahan, dibantu citra satelit resolusi tinggi, serta melakukan simulasi verifikasi lapangan .

Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman deforestasi. Jika ada peringatan pembukaan lahan dari citra satelit, tim patroli segera turun ke lapangan untuk memverifikasi. Verifikasi lapangan ini dilaksanakan secara rutin dengan didukung oleh panduan resmi penanganan kasus pembukaan lahan yang telah disepakati sebagai acuan bersama .

2. Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian

Di Desa Plakat Tinggi, program pemberdayaan masyarakat memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Teknologi ini mencakup penggunaan alat dan mesin yang efisien energi, serta penerapan metode irigasi hemat air. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari dan biogas mulai diperkenalkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil .

Di Desa Pandansari, pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah organik adalah contoh teknologi sederhana namun sangat bermanfaat. Limbah organik yang selama ini terbuang dapat diolah menjadi pupuk yang menyuburkan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia .

3. Inovasi Kelembagaan: IAD Lanskap Kayan

Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, terbentuk Integrated Area Development (IAD) Lanskap Kayan pada tahun 2023. IAD adalah kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial yang menjadi yang kesembilan di Indonesia. Melalui IAD, masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan untuk mengembangkan komoditas yang ramah lingkungan .

Inovasi kelembagaan ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar desa, antar sektor, dan dengan pihak-pihak pendukung. Pemerintah Kabupaten Bulungan bahkan mengalokasikan Dana Desa sebesar 10% serta skema APBD dalam program Bulungan Hijau, dengan alokasi mencapai Rp7 miliar pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp8 miliar pada tahun 2026 .

F. TANTANGAN DAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pengelolaan sumber daya alam desa tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan dan konflik seringkali menghadang.

1. Konflik Agraria

Konflik agraria adalah salah satu masalah paling serius. Sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang konsesi hutan atau tambang, maupun antar kelompok masyarakat sendiri, sering terjadi.

a. Kasus Suku Anak Dalam di Jambi

Konflik agraria di Provinsi Jambi menjadi sorotan. Selama bertahun-tahun, Suku Anak Dalam dan petani di Kabupaten Batanghari serta Muaro Jambi harus berhadapan dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang mengklaim lahan tempat mereka hidup turun-temurun .

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menilai persoalan tumpang-tindih lahan sering muncul akibat lemahnya koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menentukan status kawasan hutan maupun izin usaha. Akibatnya, masyarakat adat dan petani kecil kerap kehilangan akses terhadap tanah yang sudah mereka kelola selama puluhan tahun .

Harris menegaskan, penyelesaian agraria tidak boleh berhenti pada mediasi administratif semata, melainkan harus menjamin keadilan sosial bagi masyarakat adat. "Kalau tanah terus hilang, kita sedang mencabut akar kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan generasi muda di desa," ucapnya .

b. Kasus Transmigrasi Madoro di Poso

Konflik agraria juga dialami warga transmigrasi Madoro di Desa Kancuu, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selama 12 tahun, mereka harus menunggu hak-hak keperdataannya karena terkendala konflik dengan PT Sawit Jaya Abadi .

Baru pada September 2025, setelah intervensi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) dan rapat-rapat lintas kementerian, Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat. Sebanyak 100 KK menerima SHM pekarangan seluas total 25 hektare, dan 40 KK menerima SHM lahan usaha satu dengan luas 30 hektare .

Kisah ini menunjukkan betapa panjang dan rumitnya penyelesaian konflik agraria. Diperlukan kerja sama lintas lembaga—eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, BPN, dan KLHK—untuk mengurai konflik yang menahun .

2. Eksploitasi oleh Pihak Luar

Sumber daya alam desa seringkali menjadi incaran pihak luar—perusahaan tambang, perkebunan, kehutanan, atau pariwisata. Dengan modal besar dan akses terhadap kebijakan, mereka seringkali lebih diuntungkan daripada masyarakat lokal.

a. Ketimpangan Manfaat

Dalam banyak kasus, perusahaan mendapatkan keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam, sementara masyarakat lokal hanya mendapat kompensasi kecil, bahkan seringkali harus menanggung dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, dan hilangnya akses terhadap sumber daya tradisional.

b. Lemahnya Posisi Tawar Masyarakat

Masyarakat desa seringkali memiliki posisi tawar yang lemah dalam berhadapan dengan perusahaan. Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi, tidak memiliki kemampuan advokasi, dan seringkali terpecah belah. Perusahaan dapat dengan mudah memanfaatkan perpecahan ini dengan politik "bagi dan kuasai".

c. Kriminalisasi Petani

Dalam kasus-kasus ekstrem, petani atau masyarakat adat yang mempertahankan haknya atas tanah dan hutan bisa dikriminalisasi. Mereka dituduh sebagai perambah liar atau pencuri hasil hutan, padahal mereka hanya mempertahankan hak turun-temurun.

3. Degradasi Lingkungan

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan yang parah. Hutan gundul, lahan kritis, sungai tercemar, air tanah menipis, dan keanekaragaman hayati menurun. Degradasi ini pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri, yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk penghidupannya.

Di Desa Pandansari, misalnya, praktik monokultur dan tingginya penggunaan pupuk kimia serta pestisida membuat lahan cepat terdegradasi. Keanekaragaman hayati pun kian terancam, sementara petani tidak sepenuhnya menyadari dampak jangka panjang yang merugikan .

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim membawa dampak serius bagi desa-desa, terutama yang bergantung pada pertanian. Musim tanam yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, banjir bandang, dan serangan hama baru mengancam produksi pangan. Petani harus beradaptasi dengan cepat, tetapi seringkali tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup.

Desa Pandansari, dengan lahan kering pegunungannya, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sistem kebun campuran berbasis kopi atau agroforestri terbukti lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, sehingga program pemulihan agroforestri menjadi sangat penting .

G. STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Penguatan Hak Masyarakat atas Sumber Daya Alam

Langkah paling fundamental adalah memberikan kepastian hak masyarakat atas sumber daya alam di sekitarnya. Skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, HKm, Hutan Adat) adalah terobosan penting. Hingga pertengahan 2024, di Aceh saja telah diberikan akses kepada masyarakat seluas 171.911,94 hektare .

Penyelesaian konflik agraria juga harus menjadi prioritas. Kasus warga Trans Madoro di Poso yang baru terselesaikan setelah 12 tahun menunjukkan betapa pentingnya ada lembaga seperti Satgas PKA yang secara khusus menangani konflik agraria lintas sektor .

2. Penguatan Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal seperti LPHD, Kelompok Tani, KUPS, dan koperasi harus diperkuat. Mereka adalah ujung tombak pengelolaan sumber daya alam. Penguatan mencakup:

- **Kapasitas organisasi**: Pelatihan manajemen, kepemimpinan, administrasi.
- **Kapasitas teknis**: Pelatihan budidaya, pengolahan hasil, pemasaran.
- **Kapasitas advokasi**: Kemampuan bernegosiasi dengan pihak luar, mengakses kebijakan.
- **Akses terhadap pendampingan**: Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, seperti yang dilakukan YKAN dan IPB University di Bulungan atau WRI Indonesia di Bale Redelong .

3. Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi

Pengelolaan sumber daya alam harus memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian. Contoh-contoh yang telah disebutkan:

- Penggunaan Global Forest Watch untuk pemantauan hutan .
- Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah organik .
- Pengembangan energi terbarukan seperti biogas dan tenaga surya .
- Sistem irigasi hemat air .

Inovasi kelembagaan seperti IAD Lanskap Kayan juga perlu dikembangkan untuk menciptakan sinergi antar desa dan antar sektor .

4. Pendekatan Partisipatif

Pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Desa Sidamukti di Cilacap menjadi contoh penerapan pendekatan partisipatif ini. Pemerintahan desa dan warga bahu-membahu, memastikan keterlibatan penuh semua unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan .

Langkah-langkah partisipatif yang dilakukan di Sidamukti meliputi:

- Membentuk kelompok kerja masyarakat yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok.
- Melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan.
- Mengembangkan rencana pengelolaan bersama dengan kelompok kerja masyarakat.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana bersama masyarakat .

Pendekatan ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab, mendorong kreativitas dan inovasi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan .

5. Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan pada satu jenis sumber daya atau satu komoditas sangat berisiko. Fluktuasi harga, perubahan iklim, atau serangan hama dapat menghancurkan ekonomi desa. Diversifikasi ekonomi menjadi penting.

Di Bale Redelong, masyarakat tidak hanya bergantung pada kopi, tetapi juga mengembangkan madu. Integrasi antara kopi dan madu ini menjadi strategi ganda yang efektif . Pengembangan ekowisata juga menjadi sumber pendapatan alternatif.

6. Penguatan Jaringan dan Kemitraan

Tidak ada desa yang bisa mengelola sumber daya alamnya sendirian. Diperlukan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak:

- **Dengan pemerintah**: untuk mendapatkan dukungan kebijakan, pendampingan, dan akses program.
- **Dengan LSM**: untuk pendampingan teknis, advokasi, dan penguatan kapasitas.
- **Dengan perguruan tinggi**: untuk riset, inovasi, dan teknologi.
- **Dengan sektor swasta**: untuk akses pasar, investasi, dan CSR.
- **Dengan desa lain**: untuk berbagi pengalaman dan kerjasama antar desa.

Kolaborasi multipihak yang dilakukan di Bale Redelong—antara LPHD, KPH, WRI Indonesia, dan Pemerintah Daerah—menjadi kunci keberhasilan . Demikian pula kerjasama antara Pemkab Bulungan, YKAN, dan IPB University dalam IAD Lanskap Kayan .

7. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan membutuhkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini.

Di Desa Plakat Tinggi, program pemberdayaan mengintegrasikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penduduk desa diajak untuk memahami dampak negatif dari praktik eksploitasi yang tidak ramah lingkungan .

Di Desa Pandansari, Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem desa penyangga taman nasional. "Petani harus menjadi penjaga alam," tegas Yusron Sugiarto, ketua tim pengabdian UB .

H. STUDI KASUS: PRAKTIK BAIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

1. Desa Bale Redelong, Aceh: Sukses dengan Perhutanan Sosial

Desa Bale Redelong di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, adalah contoh gemilang pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan. Melalui skema Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh hak kelola atas 828 hektare hutan lindung. Dengan pendampingan dari KPH Wilayah III Aceh dan WRI Indonesia, LPHD Bale Redelong berhasil mengelola hutannya secara lestari .

Hasilnya nyata: tutupan hutan primer di wilayah kelola tetap terjaga tanpa deforestasi selama tiga tahun (2021–2023). Dari sisi ekonomi, masyarakat mengembangkan agroforestri kopi dan budidaya madu. KUPS Kulem Kolak memproduksi madu dengan pendapatan rata-rata Rp1,5–2,5 juta per bulan. Ekowisata Air Terjun Peteri Pintu juga dikembangkan untuk mendatangkan wisatawan sekaligus memperluas pasar produk lokal .

Pembelajaran dari Bale Redelong: pendampingan kolaboratif multipihak dan peningkatan kapasitas kelompok secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan .

2. Desa Pandansari, Malang: Agroforestri dan Pertanian Organik

Desa Pandansari di lereng Gunung Bromo Tengger Semeru menghadapi tantangan lahan kering dan degradasi akibat praktik monokultur serta penggunaan pupuk kimia berlebihan. Universitas Brawijaya hadir dengan program Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan .

Petani dilatih memulihkan sistem agroforestri kopi, membuat pupuk kompos dari limbah organik, dan menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan. Ibu-ibu PKK juga dilatih pertanian organik di pekarangan rumah .

Hasilnya, pengetahuan petani meningkat drastis (nilai post-test 96,33 dari sebelumnya 73,33). Lahan mulai pulih, ketergantungan pada pupuk kimia berkurang, dan ketahanan pangan keluarga meningkat .

3. Desa Sidamukti, Cilacap: Pendekatan Partisipatif

Desa Sidamukti di Cilacap menjadi pelopor pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi .

Program reboisasi lahan kritis, misalnya, melibatkan masyarakat secara aktif menanam ribuan pohon. Warga memahami bahwa hutan penting untuk menyerap karbon, mencegah erosi, dan menyediakan habitat satwa liar. Mereka juga menyadari bahwa reboisasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi desa .

Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab, mendorong kreativitas, dan menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan relevan .

4. Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara: Pembangunan Hijau Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan menggandeng YKAN dan IPB University untuk mempercepat pembangunan hijau. Program percontohan di 10 desa di Kecamatan Peso menjadi pusat pelatihan dan pendampingan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan .

Terbentuknya IAD Lanskap Kayan, kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial, menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan dengan komoditas ramah lingkungan. Dukungan anggaran dari APBD melalui program Bulungan Hijau (Rp8 miliar tahun 2026) dan alokasi 10% Dana Desa menunjukkan komitmen politik yang kuat .

Kolaborasi ini menjadi model pembangunan hijau yang terintegrasi, melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat.

I. RANGKUMAN

Pengelolaan sumber daya alam desa adalah isu strategis yang menentukan masa depan desa dan bangsa. Sumber daya alam adalah warisan sekaligus amanah yang harus dikelola dengan bijaksana untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Prinsip dasar pengelolaan adalah **keberlanjutan (sustainability)** dan **keadilan**. Keberlanjutan mencakup aspek ekologis (menjaga fungsi ekosistem), ekonomi (memberikan manfaat berkelanjutan), dan sosial (dapat diterima masyarakat). Keadilan mencakup distribusi manfaat yang adil antar generasi dan dalam generasi, serta keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan.

Langkah pertama pengelolaan adalah **mengidentifikasi potensi** desa melalui pemetaan partisipatif. Setiap desa memiliki kekhasan: lahan pertanian, hutan, air, laut, atau potensi wisata. Pemahaman yang baik tentang potensi dan tantangan adalah dasar perencanaan.

Berbagai **model pengelolaan berkelanjutan** telah dikembangkan:

1. **Perhutanan Sosial** (Hutan Desa dan HKm) memberikan hak kelola kepada masyarakat, mengurangi konflik, dan mendorong kelestarian hutan sekaligus kesejahteraan. Contoh sukses di Bale Redelong, Aceh dan Bah Aceh Tengah .
2. **Agroforestri dan pertanian organik** mengintegrasikan tanaman tahunan dengan tanaman semusim, meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga lingkungan. Praktik di Pandansari, Malang dan Bale Redelong membuktikan efektivitasnya.
3. **Pengelolaan sumber daya air partisipatif** melibatkan semua pengguna untuk menjamin ketersediaan air dan mencegah konflik. Program Desa Peduli Sumber Air adalah langkah ke arah itu.
4. **Ekowisata** memadukan konservasi dan ekonomi, memberi insentif bagi masyarakat untuk menjaga alam.

Inovasi dan teknologi seperti **Global Forest Watch** untuk pemantauan hutan dan teknologi tepat guna untuk pertanian semakin memperkuat pengelolaan.

Namun, berbagai **tantangan dan konflik** masih membayangi: konflik agraria seperti dialami Suku Anak Dalam di Jambi dan warga Trans Madoro di Poso ; eksploitasi oleh pihak luar yang merugikan masyarakat lokal; degradasi lingkungan; dan dampak perubahan iklim.

Untuk mengatasinya, diperlukan **strategi komprehensif**:

1. **Penguatan hak masyarakat** atas sumber daya alam melalui skema Perhutanan Sosial dan penyelesaian konflik agraria.
2. **Penguatan kelembagaan lokal** seperti LPHD, kelompok tani, dan KUPS.
3. **Penerapan teknologi tepat guna** dan inovasi.
4. **Pendekatan partisipatif** yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap .
5. **Diversifikasi ekonomi** untuk mengurangi risiko.
6. **Penguatan jaringan dan kemitraan** multipihak .
7. **Pendidikan dan kesadaran lingkungan** untuk perubahan perilaku jangka panjang .

Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya alam desa bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal politik, ekonomi, dan budaya. Ia adalah perjuangan untuk kedaulatan masyarakat atas sumber daya yang menjadi haknya. Ia adalah upaya untuk mewariskan bumi yang lebih baik kepada anak cucu. Dan ia adalah fondasi bagi desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sebagaimana pesan Yusron Sugiarto kepada petani Pandansari: **"Petani harus menjadi penjaga alam. Dengan mengurangi pupuk kimia, memanfaatkan limbah organik, dan menjaga keseimbangan ekosistem, mereka tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga warisan lingkungan untuk generasi berikutnya"** .

J. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Apa potensi sumber daya alam terbesar di desa Anda? Bagaimana pengelolaannya selama ini? Apakah sudah berkelanjutan dan adil?
2. Apakah di desa Anda ada konflik terkait sumber daya alam (sengketa lahan, rebutan air, konflik dengan perusahaan)? Bagaimana penyelesaiannya?
3. Apakah ada program Perhutanan Sosial (Hutan Desa/HKm) di desa atau sekitar desa Anda? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan kelestarian hutan?
4. Bagaimana praktik pertanian di desa Anda? Apakah masih menggunakan pupuk kimia secara berlebihan? Adakah inisiatif menuju pertanian organik atau agroforestri?
5. Bagaimana ketersediaan air di desa Anda? Apakah ada upaya konservasi sumber air yang melibatkan masyarakat?
6. Apakah desa Anda memiliki potensi ekowisata? Jika ya, bagaimana pengembangannya? Apakah melibatkan masyarakat?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya alam? Apakah ada peraturan desa (Perdes) yang mengatur hal ini?
8. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan desa Anda untuk mengelola sumber daya alam secara lebih baik: kepastian hak, pendampingan teknis, akses pasar, atau penguatan kelembagaan?

BAB XVII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA

A. PENGANTAR: MANUSIA SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN

Dalam setiap diskursus pembangunan, selalu ada pertanyaan mendasar: apa yang menjadi faktor penentu kemajuan suatu komunitas? Apakah sumber daya alam yang melimpah? Apakah infrastruktur yang modern? Apakah lokasi yang strategis? Pengalaman di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa jawabannya bukan pada salah satu faktor tersebut, melainkan pada kualitas manusianya. Sumber daya alam yang kaya akan sia-sia jika dikelola oleh manusia yang tidak kompeten. Infrastruktur canggih akan cepat rusak jika tidak dirawat oleh manusia yang tidak disiplin. Lokasi strategis tidak akan berarti jika manusia di dalamnya tidak memiliki visi dan kreativitas.

Di desa, realitas ini terlihat sangat nyata. Kita bisa menyaksikan dua desa dengan potensi alam serupa, namun hasil pembangunannya jauh berbeda. Desa yang satu maju pesat, warganya sejahtera, inovasi bermunculan. Desa yang lain stagnan, warganya miskin, dan ketergantungan pada bantuan tinggi. Perbedaan itu terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Desa pertama memiliki warga yang berpendidikan, terampil, dan memiliki mentalitas pembangunan. Desa kedua warganya kurang berpendidikan, tidak memiliki keterampilan yang relevan, dan terjebak dalam mentalitas fatalistik.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang pengembangan sumber daya manusia desa. Kita akan memulai dengan memahami mengapa SDM menjadi faktor penentu kemajuan desa. Selanjutnya, kita akan membahas fondasi pengembangan SDM, yaitu pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan kesetaraan. Kita juga akan mengeksplorasi pentingnya pelatihan vokasional berbasis potensi lokal, serta

peningkatan kapasitas aparatur desa dan kader pemberdayaan. Pada bagian akhir, kita akan membahas strategi pengembangan SDM yang berkelanjutan dan peran berbagai pihak dalam mewujudkannya.

B. MENGAPA PENGEMBANGAN SDM DESA SANGAT PENTING?

1. Kesenjangan antara Dana dan Kapasitas

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, triliunan rupiah Dana Desa mengalir ke desa-desa di seluruh Indonesia. Setiap desa, rata-rata menerima dana miliaran rupiah per tahun. Ini adalah berkah yang luar biasa. Namun, berkah ini sekaligus menjadi tantangan besar. Apakah aparatur desa memiliki kapasitas untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana sebesar itu? Apakah masyarakat memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perencanaan dan pengawasan?

Realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi kesenjangan antara besarnya dana yang digulirkan dengan kapasitas SDM yang tersedia. Banyak desa yang kesulitan merencanakan program yang benar-benar sesuai kebutuhan. Banyak yang keliru dalam administrasi keuangan sehingga berurusan dengan aparat penegak hukum. Banyak yang terjebak dalam proyek-proyek fisik tanpa makna pemberdayaan. Dana desa yang seharusnya menjadi berkah, bisa menjadi petaka jika SDM tidak siap.

Pengembangan SDM menjadi jawaban atas kesenjangan ini. Dengan SDM yang berkualitas, dana desa dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Program-program pembangunan dapat dirancang secara partisipatif dan inovatif. Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif. Dana desa benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan.

2. SDM sebagai Subjek, Bukan Objek Pembangunan

Paradigma pembangunan yang lama menempatkan masyarakat sebagai objek. Mereka adalah penerima pasif program-program yang dirancang dari atas. Dalam paradigma ini, kualitas SDM tidak terlalu penting karena masyarakat hanya perlu mengikuti instruksi. Namun, paradigma pembangunan kekinian menempatkan masyarakat sebagai subjek. Merekalah yang harus menjadi aktor utama pembangunan di desanya.

Menjadi subjek pembangunan membutuhkan kualitas SDM yang memadai. Masyarakat harus mampu:

- **Mengidentifikasi potensi dan masalah** desanya sendiri. Ini membutuhkan kemampuan analisis dan kesadaran kritis.
- **Merencanakan program** yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi. Ini membutuhkan kemampuan perencanaan dan visi.
- **Melaksanakan program** secara efektif dan efisien. Ini membutuhkan keterampilan teknis dan manajerial.
- **Mengelola keuangan** secara transparan dan akuntabel. Ini membutuhkan pengetahuan administrasi keuangan.
- **Memantau dan mengevaluasi** hasil pembangunan. Ini membutuhkan kemampuan analisis dan refleksi kritis.

- **Mengadvokasi kepentingan** desa kepada pihak luar. Ini membutuhkan kemampuan komunikasi dan negosiasi.

Tanpa kualitas SDM yang memadai, masyarakat tidak akan mampu menjalankan peran sebagai subjek pembangunan. Mereka akan tetap menjadi objek, tergantung pada pihak luar, dan pembangunan tidak akan berkelanjutan.

3. Menghadapi Perubahan Zaman

Dunia berubah dengan sangat cepat. Revolusi industri 4.0, digitalisasi, perubahan iklim, dan dinamika global lainnya membawa tantangan dan peluang baru bagi desa. Desa tidak bisa lagi hidup dalam isolasi, mengandalkan cara-cara lama. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan.

Petani harus belajar tentang teknologi pertanian modern, tentang perubahan pola cuaca, tentang pasar global. Pelaku UMKM harus belajar tentang pemasaran digital, tentang branding, tentang e-commerce. Pemuda desa harus memiliki keterampilan yang relevan dengan ekonomi digital. Aparatur desa harus memahami teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Semua ini membutuhkan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Desa yang mampu mengembangkan SDM-nya akan dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan zaman. Desa yang abai akan tertinggal dan semakin terpinggirkan.

4. Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Kemiskinan seringkali bersifat turun-temurun. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung tumbuh menjadi dewasa miskin, dan seterusnya. Ini adalah lingkaran setan kemiskinan antargenerasi. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas SDM—pendidikan rendah, keterampilan minim, dan mentalitas yang tidak mendukung kemajuan.

Pengembangan SDM adalah kunci untuk memutus rantai ini. Dengan pendidikan yang berkualitas, anak-anak dari keluarga miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau menjadi wirausaha yang sukses. Mereka bisa menjadi agen perubahan yang mengangkat keluarga dan komunitasnya.

Investasi dalam pengembangan SDM, terutama pada anak-anak dan generasi muda, adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan. Ia tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memutus siklus kemiskinan dan membangun masa depan desa yang lebih cerah.

C. FONDASI PENGEMBANGAN SDM: PENDIDIKAN FORMAL

Pendidikan formal adalah fondasi pengembangan SDM. Ia memberikan pengetahuan dasar, keterampilan literasi dan numerasi, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan dan pembelajaran selanjutnya.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD adalah fondasi dari fondasi. Usia dini (0-6 tahun) adalah masa emas (golden age) perkembangan otak. Stimulasi yang tepat pada masa ini akan membentuk kecerdasan, karakter, dan kemampuan sosial anak di masa depan. Sebaliknya, kurangnya stimulasi pada masa ini akan menyebabkan kerugian yang sulit dipulihkan.

Mengapa PAUD penting di desa?

- **Kesiapan sekolah**: Anak yang mengikuti PAUD lebih siap memasuki pendidikan dasar. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan belajar, memiliki kemampuan dasar membaca dan berhitung, serta keterampilan sosial.
- **Deteksi dini**: PAUD memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan tumbuh kembang, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal.
- **Pembiasaan nilai**: PAUD menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, kemandirian, dan sopan santun sejak dini.
- **Pemberdayaan orang tua**: PAUD juga menjadi sarana edukasi bagi orang tua tentang pengasuhan anak yang baik.

Tantangan PAUD di desa:

- **Keterbatasan akses**: Tidak semua desa memiliki PAUD. Di desa terpencil, anak-anak sering tidak terjangkau layanan PAUD.
- **Kualitas tenaga pendidik**: Banyak guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi yang memadai. Mereka seringkali adalah relawan dengan latar belakang pendidikan seadanya.
- **Sarana dan prasarana**: Banyak PAUD yang beroperasi di tempat seadanya, dengan alat peraga yang minim.
- **Kesadaran orang tua**: Masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya PAUD. Mereka menganggap pendidikan baru penting saat SD.

Strategi penguatan PAUD desa:

- Pemerintah desa perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan dan operasional PAUD.
- Pelatihan dan pendampingan bagi guru PAUD secara berkelanjutan.
- Sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya PAUD.
- Kemitraan dengan puskesmas untuk integrasi layanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini (Posyandu-PAUD terintegrasi).

2. Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs, SMA/MA/SMK) adalah jenjang pendidikan wajib yang diamanatkan konstitusi. Pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan dasar 9 tahun, dan mendorong partisipasi pendidikan menengah.

Tantangan akses pendidikan di desa:

- **Jarak**: Di desa terpencil, SD mungkin ada di desa, tetapi SMP dan SMA hanya ada di kecamatan atau kabupaten. Jarak yang jauh menjadi hambatan, terutama bagi keluarga miskin.

- **Biaya**: Meskipun sekolah negeri gratis, masih ada biaya-biaya tidak langsung—transportasi, seragam, buku, uang saku—yang memberatkan keluarga miskin.
- **Kualitas**: Sekolah di desa seringkali tertinggal kualitasnya dibanding sekolah di kota. Kekurangan guru, fasilitas terbatas, dan akses terbatas ke sumber belajar menjadi penyebab.
- **Pandangan orang tua**: Masih ada orang tua yang memandang pendidikan tidak penting, terutama bagi anak perempuan. Mereka lebih memilih anaknya bekerja membantu ekonomi keluarga.

Strategi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di desa:

- **Beasiswa**: Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi.
- **Transportasi gratis**: Menyediakan antar-jemput bagi siswa yang sekolahnya jauh.
- **Meningkatkan kualitas guru**: Melalui pelatihan, pendampingan, dan insentif bagi guru yang bertugas di desa terpencil.
- **Fasilitas pendukung**: Membangun perpustakaan desa, laboratorium sederhana, dan akses internet untuk mendukung pembelajaran.
- **Pendidikan inklusif**: Memastikan anak-anak berkebutuhan khusus juga mendapat akses pendidikan.

3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)

Tidak semua warga desa beruntung dapat mengenyam pendidikan formal. Banyak yang putus sekolah karena berbagai alasan—kemiskinan, harus bekerja, menikah muda, atau faktor lainnya. Mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Program pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA) adalah jawabannya.

Mengapa pendidikan kesetaraan penting?

- **Memberi kesempatan kedua**: Warga yang putus sekolah dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah yang setara dengan formal. Ijazah ini penting untuk melanjutkan pendidikan, mencari kerja, atau mengikuti seleksi tertentu.
- **Meningkatkan kepercayaan diri**: Pendidikan meningkatkan rasa percaya diri dan membuka wawasan.
- **Membangun SDM dewasa**: Banyak peserta didik kesetaraan adalah orang dewasa yang telah memiliki pengalaman hidup. Pendidikan membantu mereka memahami realitas secara lebih kritis.

Tantangan pendidikan kesetaraan di desa:

- **Stigma**: Ijazah Paket kadang masih dipandang rendah dibanding ijazah formal.
- **Motivasi**: Orang dewasa yang sudah bekerja dan berkeluarga sulit meluangkan waktu untuk belajar.
- **Tutor berkualitas**: Program kesetaraan membutuhkan tutor yang sabar dan mampu mengajar orang dewasa.

Strategi penguatan pendidikan kesetaraan:

- **Sosialisasi** untuk menghilangkan stigma tentang ijazah Paket.
- **Fleksibilitas waktu**: Kelas diadakan di luar jam kerja, misalnya malam hari atau akhir pekan.
- **Keterkaitan dengan keterampilan vokasional**: Mengintegrasikan pendidikan kesetaraan dengan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan warga.
- **Pendampingan dan motivasi** dari tutor dan tokoh masyarakat.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi tidak harus di kota. Pemerintah dapat mendorong pendirian perguruan tinggi di daerah, atau program-program pendidikan jarak jauh yang dapat diakses warga desa. Beasiswa untuk pemuda desa yang ingin kuliah juga sangat penting.

Strategi peningkatan akses pendidikan tinggi bagi pemuda desa:

- **Beasiswa afirmasi** bagi pemuda desa berprestasi dari keluarga miskin.
- **Kemitraan dengan perguruan tinggi** untuk program kuliah di desa atau kuliah jarak jauh.
- **Bimbingan belajar** dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi.
- **Informasi yang luas** tentang berbagai peluang beasiswa dan studi lanjut.

D. PELATIHAN VOKASIONAL BERBASIS POTENSI LOKAL

Pendidikan formal memberikan fondasi pengetahuan, tetapi tidak selalu membekali keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Di sinilah peran pelatihan vokasional. Pelatihan vokasional yang efektif adalah yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan pasar.

1. Prinsip Pelatihan Vokasional di Desa

a. Berbasis Potensi Lokal

Setiap desa memiliki potensi unggulan yang berbeda. Ada desa yang potensinya di bidang pertanian, ada yang di perikanan, perkebunan, peternakan, kerajinan, atau pariwisata. Pelatihan vokasional harus dirancang untuk mengembangkan potensi tersebut, bukan potensi yang tidak relevan.

Di desa agraris, pelatihan yang relevan adalah teknik budidaya tanaman, pengolahan hasil panen, atau pemasaran hasil pertanian. Di desa pesisir, pelatihan yang relevan adalah teknik penangkapan ikan ramah lingkungan, budidaya rumput laut, atau pengolahan hasil laut. Di desa wisata, pelatihan yang relevan adalah pemandu wisata, manajemen homestay, atau kuliner lokal.

b. Berorientasi Pasar

Pelatihan tidak boleh hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga bagaimana produk yang dihasilkan dapat dipasarkan. Peserta perlu dibekali pengetahuan tentang pasar, tentang selera konsumen, tentang kemasan yang menarik, tentang harga yang kompetitif, dan tentang strategi pemasaran, termasuk pemasaran digital.

c. Partisipatif dan Praktis

Pelatihan harus dirancang bersama masyarakat, bukan dipaksakan dari atas. Metode pelatihan harus praktis, bukan teoritis. Peserta belajar dengan melakukan, bukan hanya mendengar ceramah. Demonstrasi, praktik langsung, dan studi banding ke tempat yang sudah sukses sangat efektif.

d. Berkelanjutan

Pelatihan tidak boleh sekali selesai. Harus ada pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan dan dikembangkan. Peserta juga perlu difasilitasi untuk mengakses modal, peralatan, dan pasar.

2. Jenis-Jenis Pelatihan Vokasional

a. Pelatihan Budidaya Tanaman

Untuk desa agraris, pelatihan budidaya tanaman sangat penting. Materinya dapat mencakup:

- Teknik budidaya tanaman unggulan (padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan).
- Penggunaan bibit unggul.
- Pengelolaan kesuburan tanah, termasuk pembuatan pupuk organik.
- Pengendalian hama terpadu (PHT) yang ramah lingkungan.
- Sistem irigasi hemat air.
- Teknik panen dan pascapanen yang benar.

b. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perikanan/Peternakan

Produk mentah memiliki nilai jual rendah. Dengan diolah, nilai jualnya dapat meningkat berkali-kali lipat. Pelatihan pengolahan hasil sangat strategis. Contohnya:

- Pengolahan singkong menjadi keripik, tepung mocaf, atau berbagai camilan.
- Pengolahan pisang menjadi sale, keripik, atau bolu.
- Pengolahan ikan menjadi abon, nugget, bakso, atau kerupuk.
- Pengolahan susu menjadi yogurt, keju, atau permen susu.
- Pengolahan buah menjadi jus, sirup, manisan, atau selai.

c. Pelatihan Peternakan

Untuk desa dengan potensi peternakan, pelatihan dapat mencakup:

- Teknik beternak ayam kampung, kambing, sapi, atau kelinci.
- Manajemen pakan dan kesehatan ternak.
- Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik atau biogas.
- Pemuliaan ternak.

d. Pelatihan Kerajinan Tangan

Banyak desa yang memiliki tradisi kerajinan tangan. Pelatihan dapat mengembangkan dan memodernisasi tradisi ini:

- Desain produk yang lebih kekinian.
- Teknik pembuatan yang lebih efisien.
- Penggunaan bahan baku alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan.
- Pengemasan yang menarik.
- Standarisasi kualitas.

e. Pelatihan Digital Marketing

Di era digital, pemasaran online menjadi sangat penting. Pelatihan digital marketing mencakup:

- Dasar-dasar internet dan media sosial.
- Membuat konten yang menarik untuk promosi (foto produk, video pendek, caption).
- Mengelola toko online di marketplace (Shopee, Tokopedia, Lazada).
- Menggunakan WhatsApp untuk bisnis.
- Iklan digital sederhana.

f. Pelatihan Manajemen Usaha

Keterampilan teknis saja tidak cukup. Pelaku UMKM juga perlu dibekali keterampilan manajemen usaha:

- Pembukuan sederhana.
- Manajemen keuangan (memisahkan uang pribadi dan usaha).
- Perhitungan harga pokok dan harga jual.
- Strategi pengembangan usaha.
- Manajemen sumber daya manusia (jika memiliki karyawan).

g. Pelatihan Pariwisata

Untuk desa wisata, pelatihan dapat mencakup:

- Pemanduan wisata.
- Manajemen homestay.
- Kuliner lokal untuk wisatawan.
- Atraksi seni dan budaya.
- Pelayanan prima (customer service).
- Pengelolaan dampak lingkungan pariwisata.

3. Contoh Praktik Pelatihan Vokasional

a. Pelatihan Pertanian Organik di Pandansari, Malang

Di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Universitas Brawijaya memberikan pelatihan pertanian organik kepada petani dan ibu-ibu PKK. Petani dilatih membuat pupuk kompos dari limbah organik rumah tangga dan hasil panen yang selama ini terbuang. Ibu-ibu PKK dilatih memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran organik .

Hasilnya menggembirakan. Pemahaman petani tentang pertanian organik meningkat drastis (nilai post-test 96,33 dari sebelumnya 73,33). Ketergantungan pada pupuk kimia berkurang. Lahan mulai pulih. Ketahanan pangan keluarga meningkat karena ibu-ibu menanam sayur sendiri .

b. Pelatihan Pengolahan Pangan di Berbagai Daerah

Di berbagai desa, pelatihan pengolahan pangan telah melahirkan produk-produk UMKM yang sukses. Singkong yang tadinya dijual murah, setelah diolah menjadi keripik dengan berbagai rasa, harganya melonjak. Pisang yang tadinya busuk tak terurus, setelah diolah menjadi sale, menjadi camilan favorit.

Ikan yang tadinya dijual segar, setelah diolah menjadi abon atau bakso ikan, nilai jualnya meningkat berkali-kali lipat.

c. Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM

Banyak UMKM desa yang produknya berkualitas tetapi tidak laku karena pemasaran terbatas. Pelatihan digital marketing membuka peluang baru. Produk-produk desa dapat dipasarkan melalui media sosial dan marketplace hingga ke luar kota, bahkan luar negeri. Para pemuda yang melek teknologi menjadi motor dalam upaya ini.

E. PENGEMBANGAN SDM APARATUR DESA DAN KADER PEMBERDAYAAN

Aparatur desa dan kader pemberdayaan adalah garda terdepan pembangunan desa. Kualitas mereka sangat menentukan efektivitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Mengapa Aparatur Desa Perlu Dikembangkan?

Aparatur desa—kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun—memikul tanggung jawab besar. Mereka adalah manajer pembangunan desa. Tugas mereka meliputi:

- **Perencanaan**: Menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara partisipatif dan sesuai aturan.
- **Pelaksanaan**: Mengelola program pembangunan, mengelola keuangan desa, memberikan pelayanan publik.
- **Pengawasan**: Memastikan program berjalan sesuai rencana, mengawasi kinerja perangkat.
- **Pertanggungjawaban**: Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Beban ini sangat berat, apalagi dengan kompleksitas aturan dan besarnya dana yang dikelola. Tanpa kapasitas yang memadai, aparatur desa bisa keliru, bisa gagal, bahkan bisa tersandung kasus hukum.

2. Materi Pengembangan Aparatur Desa

a. Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Desa

- Tugas pokok dan fungsi aparatur desa.
- Tata naskah dinas dan kearsipan.
- Pelayanan publik yang prima.
- Penyusunan peraturan desa (Perdes).

b. Perencanaan Pembangunan Desa

- Teknik perencanaan partisipatif.
- Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang berkualitas.
- Penyelarasan dengan kebijakan di atasnya (RPJMD, RKP).

c. Pengelolaan Keuangan Desa

- Siklus pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban).
- Pemahaman aturan pengelolaan Dana Desa.
- Transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- Pencegahan korupsi.

d. Teknis Pembangunan

- Pengadaan barang dan jasa di desa.
- Teknis pembangunan infrastruktur sederhana.
- Pengawasan proyek.

e. Kepemimpinan dan Komunikasi

- Kepemimpinan transformasional.
- Komunikasi efektif dengan masyarakat.
- Fasilitasi musyawarah.
- Manajemen konflik.

f. Etika dan Integritas

- Kode etik aparatur desa.
- Pencegahan konflik kepentingan.
- Budaya antikorupsi.

3. Pengembangan Kader Pemberdayaan

Kader pemberdayaan adalah relawan masyarakat yang menjadi motor penggerak di berbagai bidang: kader posyandu, kader PKK, kader KB, fasilitator desa, pendamping kelompok tani, dan lain-lain. Mereka adalah ujung tombak pembangunan manusia di desa.

Kader pemberdayaan perlu dikembangkan kapasitasnya melalui:

- **Pelatihan teknis** sesuai bidangnya (kader posyandu dilatih tentang gizi dan imunisasi, kader PKK dilatih tentang manajemen organisasi, fasilitator desa dilatih tentang fasilitasi partisipatif).
- **Motivasi dan penguatan mental** karena mereka bekerja sebagai relawan tanpa gaji.
- **Pendampingan berkelanjutan** oleh tenaga profesional (bidan, penyuluh pertanian, pekerja sosial).
- **Penghargaan dan insentif** sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

F. PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SDM DESA

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM desa melalui tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Pendidikan

Perguruan tinggi dapat:

- Memberikan beasiswa bagi pemuda desa berprestasi.
- Mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan desa, misalnya agribisnis, teknologi pangan, pariwisata, atau pembangunan masyarakat.
- Menyelenggarakan program kuliah di desa atau kuliah jarak jauh yang dapat diakses warga desa.
- Melibatkan mahasiswa dalam program-program pengembangan desa melalui KKN tematik.

2. Penelitian

Penelitian perguruan tinggi dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan desa:

- Riset tentang potensi dan masalah desa.
- Pengembangan teknologi tepat guna untuk desa.
- Dokumentasi dan analisis praktik-praktik baik pemberdayaan.
- Rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Ini adalah bentuk kontribusi paling langsung. Contoh program pengabdian yang telah disebutkan:

- Universitas Brawijaya di Desa Pandansari: pelatihan pertanian organik, pembuatan pupuk kompos, dan pendirian Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan .
- Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Bulungan: pendampingan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di 10 desa percontohan .
- Perguruan tinggi lain di berbagai daerah dengan program-program serupa.

Pengabdian masyarakat yang efektif harus:

- **Berbasis kebutuhan riil**, bukan keinginan dosen.
- **Partisipatif**, melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek.
- **Berkelanjutan**, tidak hanya proyek sekali selesai.
- **Memberdayakan**, membangun kapasitas masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DESA YANG BERKELANJUTAN

Pengembangan SDM desa bukan proyek jangka pendek, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan strategi berkelanjutan.

1. Pendekatan Holistik dan Terpadu

Pengembangan SDM tidak bisa parsial. Pendidikan, pelatihan, kesehatan, gizi, dan penguatan mental saling terkait. Anak yang kekurangan gizi tidak akan optimal belajarnya. Remaja yang tidak percaya diri

sulit mengembangkan potensi. Dewasa yang sakit-sakitan tidak bisa produktif. Perempuan yang dibebani pekerjaan domestik berat sulit mengikuti pelatihan.

Karena itu, pengembangan SDM harus dilakukan secara holistik, memadukan berbagai intervensi:

- **Pendidikan**: PAUD, formal, kesetaraan, pelatihan vokasional.
- **Kesehatan dan gizi**: Posyandu, layanan kesehatan, edukasi gizi.
- **Penguatan mental**: Konseling, kelompok dukungan, pelatihan motivasi.
- **Pemberdayaan ekonomi**: Modal usaha, pendampingan, akses pasar.
- **Kesetaraan gender**: Mengurangi beban ganda perempuan, mendorong partisipasi.

2. Berbasis Potensi dan Kebutuhan Lokal

Tidak ada resep tunggal pengembangan SDM yang berlaku untuk semua desa. Setiap desa memiliki potensi, masalah, dan konteks yang berbeda. Program pengembangan SDM harus dirancang berdasarkan:

- **Potensi unggulan desa**: Apa yang bisa dikembangkan?
- **Masalah prioritas**: Apa hambatan utama yang dihadapi?
- **Karakteristik masyarakat**: Tingkat pendidikan, mata pencaharian, budaya.
- **Ketersediaan sumber daya**: Dana, tenaga pendamping, infrastruktur.

3. Partisipatif

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Merekalah yang paling tahu kebutuhan dan potensi mereka. Mereka juga yang akan menjalankan dan memanfaatkan hasil pengembangan SDM. Partisipasi menciptakan rasa memiliki, yang sangat penting untuk keberlanjutan.

4. Pendampingan Berkelanjutan

Pelatihan sekali tidak cukup. Perlu ada pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan. Pendampingan bisa dilakukan oleh tenaga profesional (penyuluh, fasilitator), atau oleh kader lokal yang telah dilatih.

Di Desa Pandansari, misalnya, setelah pelatihan pertanian organik, petani terus didampingi oleh tim dari Universitas Brawijaya. Mereka tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi juga dibantu dalam praktik di lahan demoplot. Ini memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya teori, tetapi benar-benar menjadi keterampilan yang terinternalisasi .

5. Kemitraan Multipihak

Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengembangkan SDM desa sendirian. Diperlukan kemitraan antara:

- **Pemerintah desa**: sebagai penanggung jawab utama pembangunan desa, penyedia dana dan fasilitas.
- **Pemerintah daerah (kabupaten/provinsi)** : sebagai penyedia kebijakan, pendampingan teknis, dan sumber daya.
- **Pemerintah pusat**: sebagai pembuat regulasi, penyedia dana (Dana Desa, dana alokasi khusus), dan program-program nasional.

- **Perguruan tinggi**: sebagai sumber pengetahuan, inovasi, dan tenaga pendamping.
- **LSM**: sebagai mitra advokasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas.
- **Sektor swasta**: sebagai mitra dalam pelatihan vokasional, penyedia magang, dan akses pasar.
- **Organisasi masyarakat**: PKK, karang taruna, kelompok tani, sebagai mitra pelaksana di tingkat akar rumput.

Kolaborasi multipihak seperti yang dilakukan di Bulungan—antara Pemkab, YKAN, IPB University, dan masyarakat—menjadi model yang patut dicontoh .

6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Program pengembangan SDM perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya. Indikator keberhasilan tidak hanya jumlah peserta pelatihan, tetapi juga perubahan perilaku dan dampak terhadap kesejahteraan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program ke depan.

7. Regenerasi

Pengembangan SDM harus memperhatikan regenerasi. Ketika kader-kader lama pensiun atau tidak aktif, harus ada kader baru yang siap menggantikan. Karena itu, pelibatan generasi muda dalam setiap program pengembangan SDM sangat penting.

H. STUDI KASUS: PENGEMBANGAN SDM DI DESA

1. Desa Pandansari, Malang: Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan

Desa Pandansari di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, adalah contoh sukses pengembangan SDM berbasis perguruan tinggi. Desa ini berada di kawasan pegunungan dengan lahan kering dan rentan terhadap perubahan iklim. Praktik monokultur dan penggunaan pupuk kimia berlebihan telah menyebabkan degradasi lahan .

Universitas Brawijaya hadir dengan program Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan intensif di lahan demoplot. Petani belajar membuat pupuk kompos dari limbah organik, memulihkan sistem agroforestri kopi, dan menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan. Ibu-ibu PKK juga dilatih pertanian organik di pekarangan rumah .

Hasilnya sangat menggembirakan. Pemahaman petani tentang pertanian organik meningkat drastis (nilai post-test 96,33 dari sebelumnya 73,33). Lahan mulai pulih, ketergantungan pada pupuk kimia berkurang, dan ketahanan pangan keluarga meningkat. Para petani tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem .

2. Desa Plakat Tinggi: Program Pemberdayaan Terpadu

Di Desa Plakat Tinggi, program pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek pengembangan SDM. Program ini dirancang secara terpadu untuk mengatasi berbagai masalah sekaligus .

Pertama, program memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada masyarakat, termasuk teknik pertanian modern, pengolahan hasil panen, dan kerajinan tangan. Kedua, masyarakat juga diedukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan. Ketiga, program memperkenalkan teknologi tepat guna seperti penggunaan energi matahari dan biogas untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil .

Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa pengembangan SDM tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada kesadaran lingkungan dan kemandirian energi. Masyarakat tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga lebih sadar akan pentingnya keberlanjutan.

3. Desa di Kabupaten Bulungan: Pengembangan SDM untuk Pengelolaan SDA

Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pengembangan SDM difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah kabupaten menggandeng YKAN dan IPB University untuk mempercepat pembangunan hijau .

Program percontohan di 10 desa di Kecamatan Peso menjadi pusat pelatihan dan pendampingan. Masyarakat dilatih tentang pengelolaan hutan lestari, pengembangan komoditas ramah lingkungan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dibentuk dan diperkuat kapasitasnya .

Hasilnya, terbentuk IAD Lanskap Kayan, kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran signifikan untuk program ini (Rp7 miliar tahun 2025, Rp8 miliar tahun 2026), dan desa-desa mengalokasikan 10% Dana Desa untuk mendukungnya .

4. Desa-Desa dengan Pelatihan Digital Marketing

Di berbagai desa, pelatihan digital marketing bagi UMKM telah membuka peluang baru. Para pemuda desa yang melek teknologi menjadi motor dalam upaya ini. Mereka belajar membuat konten promosi yang menarik, mengelola toko online di marketplace, dan memasarkan produk melalui media sosial.

Hasilnya, produk-produk desa—kopi, kerajinan, makanan olahan—kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Penjualan meningkat, pendapatan naik, dan yang terpenting, para pemuda mendapatkan lapangan kerja baru di desanya sendiri.

I. RANGKUMAN

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa adalah faktor penentu utama kemajuan desa. SDM yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, memanfaatkan dana desa secara efektif, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menjadi penghambat pembangunan, betapapun besarnya dana dan sumber daya yang tersedia.

Pengembangan SDM desa mencakup tiga pilar utama:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah fondasi pengembangan SDM. Dimulai dari **PAUD** yang menjadi fondasi perkembangan anak usia dini, dilanjutkan dengan **pendidikan dasar dan menengah** yang menjadi hak setiap warga negara, serta **pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C)** yang memberikan kesempatan kedua bagi warga yang putus sekolah. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas di desa masih menghadapi tantangan jarak, biaya, dan kualitas, yang membutuhkan intervensi dari pemerintah desa dan daerah.

2. Pelatihan Vokasional Berbasis Potensi Lokal

Pendidikan formal perlu dilengkapi dengan pelatihan vokasional yang membekali keterampilan praktis. Pelatihan yang efektif harus **berbasis potensi lokal, berorientasi pasar, partisipatif, praktis, dan berkelanjutan**. Jenis pelatihan dapat beragam: budidaya tanaman, pengolahan hasil pertanian/perikanan/peternakan, kerajinan, digital marketing, manajemen usaha, dan pariwisata. Contoh sukses di Pandansari, Malang, menunjukkan bagaimana pelatihan pertanian organik mampu meningkatkan kapasitas petani dan memulihkan lahan.

3. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kader Pemberdayaan

Aparatur desa adalah manajer pembangunan desa. Mereka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen pemerintahan, perencanaan, pengelolaan keuangan, teknis pembangunan, kepemimpinan, dan etika. Kader pemberdayaan (kader posyandu, PKK, fasilitator desa) adalah ujung tombak pembangunan manusia di desa. Mereka perlu dilatih, didampingi, dan diapresiasi.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM desa melalui tridharma: pendidikan (beasiswa, program studi relevan, KKN tematik), penelitian (riset potensi dan masalah desa, pengembangan teknologi tepat guna), dan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan, pendampingan). Contoh kolaborasi UB di Pandansari dan IPB-YKAN di Bulungan menunjukkan efektivitas peran ini.

Strategi pengembangan SDM desa yang berkelanjutan harus:

1. **Holistik dan terpadu**, memadukan pendidikan, kesehatan, gizi, penguatan mental, pemberdayaan ekonomi, dan kesetaraan gender.
2. **Berbasis potensi dan kebutuhan lokal**, tidak ada resep tunggal untuk semua desa.
3. **Partisipatif**, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap.
4. **Didampingi berkelanjutan**, tidak hanya pelatihan sekali.
5. **Melibatkan kemitraan multipihak**: pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan organisasi masyarakat.
6. **Dimonitor dan dievaluasi** secara berkala untuk perbaikan program.
7. **Memperhatikan regenerasi**, melibatkan generasi muda sebagai penerus.

Pada akhirnya, investasi dalam pengembangan SDM adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan. Ia tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian, martabat, dan masa depan desa. Sebagaimana pesan Yusron Sugiarto kepada petani Pandansari: **"Petani harus menjadi penjaga alam. Dengan mengurangi pupuk kimia, memanfaatkan limbah organik, dan menjaga keseimbangan ekosistem, mereka tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga warisan lingkungan untuk generasi berikutnya"** . Ini adalah esensi pengembangan SDM: membangun manusia yang tidak hanya terampil, tetapi juga sadar dan bertanggung jawab.

J. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana kondisi pendidikan di desa Anda? Apakah ada PAUD? Apakah anak-anak bisa mengakses pendidikan dasar dan menengah dengan mudah? Apa tantangan terbesarnya?
2. Apakah di desa Anda ada warga yang putus sekolah? Apakah ada program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) yang dapat mereka ikuti?
3. Pelatihan vokasional apa yang paling dibutuhkan di desa Anda sesuai dengan potensi lokal? Apakah sudah ada program pelatihan seperti itu? Seberapa efektif?
4. Bagaimana kualitas aparatur desa di tempat Anda? Apakah mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa? Pelatihan apa yang mereka butuhkan?
5. Siapa saja kader pemberdayaan yang aktif di desa Anda (kader posyandu, kader PKK, fasilitator desa)? Apakah mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai?
6. Apakah ada perguruan tinggi atau LSM yang aktif melakukan program pengembangan SDM di desa Anda? Seperti apa programnya dan bagaimana dampaknya?
7. Menurut Anda, apa prioritas pengembangan SDM di desa Anda: pendidikan formal, pelatihan vokasional, atau penguatan aparatur? Mengapa?
8. Bagaimana cara terlibih baik melibatkan generasi muda dalam pembangunan desa dan pengembangan SDM?

BAB XVIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. PENGANTAR: NAFAS YANG MENGHIDUPKAN PEMBANGUNAN

Pembangunan desa bukanlah proyek fisik semata. Ia adalah proses sosial yang melibatkan manusia, hubungan, dan makna. Di dalamnya, ada aspirasi yang perlu disuarakan, ada kepentingan yang perlu diakomodasi, ada konflik yang perlu dikelola, dan ada keputusan yang perlu diambil bersama. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan akan kehilangan nafasnya. Ia akan menjadi sekadar rangkaian proyek yang dingin, tidak bermakna, dan tidak berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat adalah roh dari pembangunan desa. Ia adalah manifestasi dari kedudukan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Dalam partisipasi, masyarakat tidak hanya menerima hasil pembangunan, tetapi juga terlibat dalam proses menentukan apa yang akan dibangun, bagaimana membangunnya, siapa yang akan terlibat, dan bagaimana hasilnya akan dinikmati bersama. Partisipasi menciptakan rasa memiliki, yang pada gilirannya mendorong tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep partisipasi, tingkatan-tingkatannya, dan mengapa ia penting. Selanjutnya, kita akan membahas forum partisipasi tertinggi di desa: Musyawarah Desa (Musdes), serta mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. Kita juga akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi warga. Pada bagian akhir, kita akan membahas bagaimana

membangun partisipasi yang bermakna (meaningful participation), bukan sekadar formalitas, dengan transparansi informasi sebagai prasyarat utamanya.

B. MEMAHAMI KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Latin "pars" (bagian) dan "capere" (mengambil). Jadi, secara harfiah, partisipasi berarti "mengambil bagian". Dalam konteks pembangunan, partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi.

Beberapa definisi partisipasi dari para ahli:

Conyers (1991) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan program, dan penerimaan manfaat dari hasil pembangunan.

Oakley (1991) membedakan partisipasi menjadi dua: partisipasi sebagai alat (instrumental participation) dan partisipasi sebagai tujuan (transformative participation). Partisipasi sebagai alat adalah keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak luar. Partisipasi sebagai tujuan adalah proses membangun kapasitas masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Tosun (1999) mengembangkan tipologi partisipasi yang terkenal, mulai dari partisipasi pasif, partisipasi dalam konsultasi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pembangunan desa Indonesia, partisipasi diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif melalui Musyawarah Desa.

2. Tingkatan Partisipasi

Partisipasi bukanlah konsep dikotomis (ada atau tidak ada). Ia adalah spektrum dengan berbagai tingkatan. Sherry Arnstein (1969) mengembangkan "tangga partisipasi" yang terkenal, yang membedakan delapan tingkat partisipasi, dari yang terendah (manipulasi) hingga tertinggi (kontrol warga). Dalam konteks yang lebih sederhana, kita dapat membedakan beberapa tingkatan partisipasi:

a. Partisipasi Pasif (Manipulasi dan Terapi)

Pada tingkat ini, masyarakat hanya menjadi penerima informasi. Mereka diberi tahu tentang apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, atau apa yang sudah terjadi. Tidak ada ruang untuk memberikan masukan atau mempengaruhi keputusan. Partisipasi semacam ini sebenarnya bukan partisipasi sejati, melainkan mobilisasi atau bahkan manipulasi.

b. Partisipasi dalam Konsultasi

Masyarakat dimintai pendapat melalui survei, pertemuan, atau konsultasi publik. Namun, tidak ada jaminan bahwa masukan mereka akan digunakan. Pihak berwenang tetap memegang kendali penuh atas keputusan. Partisipasi ini bisa menjadi formalitas untuk melegitimasi keputusan yang sudah diambil.

c. Partisipasi dalam Perencanaan

Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Mereka dapat menyampaikan aspirasi, mendiskusikan prioritas, dan menyusun rencana bersama. Namun, keputusan akhir mungkin masih berada di tangan pemerintah atau elit desa.

d. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat memiliki hak untuk ikut memutuskan. Dalam musyawarah desa, misalnya, warga bersama-sama mengambil keputusan tentang rencana pembangunan dan anggaran desa. Suara mereka memiliki bobot yang sama dengan suara pemerintah desa.

e. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Masyarakat terlibat dalam melaksanakan program pembangunan. Mereka bisa menjadi tenaga kerja, pengelola, atau pengawas. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan lokal.

f. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Masyarakat menikmati hasil pembangunan. Ini adalah tingkat partisipasi minimal yang harus ada dalam setiap program. Namun, pemanfaatan hasil tidak otomatis berarti partisipasi. Yang penting adalah bagaimana hasil itu didistribusikan dan apakah masyarakat merasa memiliki akses yang adil.

g. Partisipasi dalam Evaluasi

Masyarakat dilibatkan dalam menilai keberhasilan program. Mereka memberikan masukan tentang apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Evaluasi partisipatif sangat penting untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

h. Kontrol Warga (Citizen Control)

Ini adalah tingkat partisipasi tertinggi. Masyarakat memiliki kendali penuh atas program pembangunan. Mereka yang memutuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

3. Mengapa Partisipasi Penting?

a. Meningkatkan Kualitas Keputusan

Masyarakat lokal adalah yang paling tahu tentang kebutuhan, potensi, dan masalah di wilayahnya. Dengan melibatkan mereka, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan realitas lokal dan lebih responsif terhadap kebutuhan riil.

b. Membangun Rasa Memiliki

Ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, mereka merasa memiliki program tersebut. Rasa memiliki ini mendorong mereka untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Program yang dibangun dengan partisipasi masyarakat cenderung lebih berkelanjutan.

c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Partisipasi dapat meningkatkan efektivitas program karena program lebih tepat sasaran. Partisipasi juga dapat meningkatkan efisiensi karena masyarakat dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, dan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada kontraktor luar.

d. Membangun Kapasitas Masyarakat

Melalui partisipasi, masyarakat belajar tentang perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Mereka mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kesadaran kritis. Partisipasi adalah sekolah demokrasi yang nyata.

e. Memperkuat Kohesi Sosial

Partisipasi mempertemukan berbagai kelompok dalam masyarakat. Mereka berdiskusi, berdebat, dan mencapai kesepakatan bersama. Ini memperkuat ikatan sosial dan modal sosial yang menjadi fondasi kehidupan desa.

f. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Partisipasi yang bermakna disertai transparansi dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, sehingga mempersulit terjadinya korupsi.

C. MUSYAWARAH DESA: FORUM PARTISIPASI TERTINGGI

Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa. Di sinilah warga desa, bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membahas dan menyepakati berbagai kebijakan penting, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

1. Landasan Hukum

Musyawarah Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Dalam regulasi tersebut, Musdes didefinisikan sebagai forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Hal-hal strategis yang harus dimusyawarahkan meliputi:

- Penataan desa.
- Perencanaan pembangunan desa.
- Kerja sama desa.
- Rencana investasi yang masuk ke desa.
- Pembentukan BUMDes.
- Penambahan dan pelepasan aset desa.
- Kejadian luar biasa.

2. Tahapan Perencanaan Partisipatif

Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan yang berjenjang dan partisipatif:

a. Musyawarah Dusun (Musdus)

Tahap pertama adalah musyawarah di tingkat dusun. Di sini, warga dusun berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan untuk wilayahnya. Usulan-usulan ini kemudian dikelompokkan dan diprioritaskan.

Di Desa Karangbawang, Purbalingga, misalnya, Musdus dilaksanakan dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Tahapan Musdus meliputi undangan kepada pihak terkait, daftar hadir, notulensi, dokumentasi, dan usulan kegiatan prioritas pembangunan . Dokumen hasil Musdus ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes.

b. Musyawarah Antar Dusun

Usulan dari berbagai dusun kemudian dibawa ke forum antar dusun untuk dibahas dan diselaraskan. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar prioritas desa dapat ditetapkan secara lebih terpadu.

c. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes adalah puncak dari proses perencanaan. Forum ini dihadiri oleh:

- Pemerintah Desa (kepala desa dan perangkat).
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Lembaga kemasyarakatan desa.
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.
- Perwakilan kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal.
- Unsur dari kecamatan (camat atau perwakilannya) sebagai pembina.

Dalam Musdes, usulan-usulan dari dusun dan antar dusun dibahas secara mendalam. Warga dapat menyampaikan pendapat, mengajukan argumen, dan berdebat secara sehat. Tujuannya adalah mencapai mufakat tentang program prioritas dan alokasi anggaran.

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Hasil Musdes kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan:

- **RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)** : dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan desa.

- **RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)** : dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDes, memuat program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun anggaran.
- **APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)** : dokumen keuangan tahunan yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

3. Prinsip-Prinsip Musyawarah Desa

Agar Musdes benar-benar menjadi forum partisipasi yang bermakna, beberapa prinsip harus dipegang teguh:

a. Inklusivitas

Semua kelompok dalam masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok miskin, dan minoritas harus terwakili dan didengar suaranya. Tidak boleh ada diskriminasi atau eksklusi.

b. Keterbukaan Informasi

Semua informasi yang relevan—tentang anggaran, program, kebijakan—harus tersedia untuk publik sebelum Musdes dilaksanakan. Warga perlu waktu untuk mempelajari dan merenungkan informasi tersebut. Dokumen-dokumen penting harus dipublikasikan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan Musdes.

c. Kesetaraan

Dalam Musdes, semua peserta memiliki hak yang sama untuk berbicara. Tidak boleh ada dominasi oleh elit desa atau kelompok tertentu. Fasilitator yang netral perlu memandu jalannya diskusi agar semua suara terdengar.

d. Musyawarah untuk Mufakat

Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Voting hanya dilakukan sebagai jalan terakhir jika mufakat benar-benar tidak tercapai. Proses musyawarah harus diutamakan karena di situlah terjadi dialog, negosiasi, dan pembelajaran bersama.

e. Akuntabilitas

Keputusan yang diambil dalam Musdes harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Ada mekanisme untuk memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

D. BENTUK-BENTUK PARTISIPASI LAINNYA

Selain dalam perencanaan melalui Musdes, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud dalam berbagai bentuk lain.

1. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Masyarakat dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan. Ini bisa dalam bentuk:

- **Gotong royong**: Warga bersama-sama mengerjakan proyek pembangunan fisik, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, atau fasilitas umum. Gotong royong tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memperkuat solidaritas.
- **Swadaya**: Masyarakat menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya—tanah, bahan bangunan, atau dana—untuk mendukung pembangunan.
- **Tenaga kerja lokal**: Dalam proyek yang menggunakan kontraktor, diupayakan agar tenaga kerja lokal yang diutamakan.
- **Pengelolaan program**: Masyarakat dilibatkan dalam mengelola program, misalnya menjadi pengurus BUMDes, pengelola pasar desa, atau pengelola wisata desa.

2. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Ini adalah bentuk partisipasi yang paling dasar. Masyarakat harus dapat menikmati hasil pembangunan. Akses terhadap fasilitas publik (jalan, air bersih, listrik, pasar, sekolah, puskesmas) harus terbuka bagi semua warga, tanpa diskriminasi. Distribusi manfaat harus adil.

3. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi

Masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi jalannya pembangunan dan menilai hasilnya. Bentuknya bisa:

- **Pengawasan langsung**: Warga memantau pelaksanaan proyek di lapangan, memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi, dan melaporkan jika ada penyimpangan.
- **Partisipasi dalam pertemuan evaluasi**: Warga diundang dalam pertemuan untuk membahas kemajuan program, kendala yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut.
- **Mekanisme pengaduan**: Desa menyediakan saluran bagi warga untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau saran terkait pembangunan. Saluran ini bisa berupa kotak saran, formulir online, atau pertemuan rutin.
- **Audit sosial**: Masyarakat bersama lembaga independen melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan program desa.

4. Partisipasi dalam Kelembagaan Desa

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui kelembagaan yang ada:

- Menjadi anggota atau pengurus RT/RW.
- Menjadi anggota atau pengurus PKK, karang taruna, kelompok tani, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
- Menjadi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- Menjadi relawan atau kader dalam program-program desa (kader posyandu, kader KB, kader lingkungan).

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI

Partisipasi masyarakat tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendorong maupun yang menghambat.

1. Faktor Pendorong Partisipasi

a. Kesadaran dan Pengetahuan

Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki pengetahuan tentang pembangunan dan pemerintahan desa, cenderung lebih aktif berpartisipasi. Pendidikan dan akses terhadap informasi berperan penting di sini.

b. Kepercayaan

Kepercayaan (trust) adalah modal sosial yang sangat penting. Jika masyarakat percaya pada pemerintah desa, percaya bahwa suara mereka akan didengar, dan percaya bahwa partisipasi mereka berarti, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Sebaliknya, jika mereka curiga dan tidak percaya, mereka akan apatis.

c. Manfaat yang Nyata

Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka melihat manfaat nyata dari partisipasi mereka. Jika partisipasi hanya formalitas tanpa hasil, mereka akan enggan terlibat.

d. Kepemimpinan yang Responsif

Pemimpin desa yang responsif, terbuka, dan mau mendengar akan mendorong partisipasi. Mereka menciptakan ruang dialog, menghargai masukan, dan menindaklanjuti aspirasi warga.

e. Budaya Gotong Royong

Desa-desa dengan tradisi gotong royong yang kuat memiliki modal sosial yang memudahkan partisipasi. Warga sudah terbiasa bekerja bersama, bermusyawarah, dan mengambil keputusan kolektif.

f. Dukungan Kebijakan

Kebijakan yang mewajibkan partisipasi, seperti UU Desa dan peraturan teknisnya, menjadi kerangka yang mendorong partisipasi. Namun, kebijakan saja tidak cukup; implementasi dan penegakannya yang penting.

2. Faktor Penghambat Partisipasi

a. Ketidakpercayaan dan Kecurigaan

Jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah desa—karena pengalaman buruk di masa lalu, karena korupsi, atau karena ketidakterbukaan—mereka akan enggan berpartisipasi. Mereka merasa partisipasi tidak akan mengubah apa-apa.

b. Dominasi Elit

Dalam banyak musyawarah desa, suara didominasi oleh elit desa—kepala desa, perangkat, tokoh masyarakat tertentu. Warga biasa, terutama perempuan, pemuda, dan kelompok marginal, tidak memiliki ruang untuk berbicara. Akibatnya, mereka merasa partisipasi tidak berarti dan memilih diam.

c. Kurangnya Informasi

Jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang cukup—tentang anggaran, program, kebijakan—mereka tidak dapat berpartisipasi secara bermakna. Mereka tidak tahu apa yang harus disuarakan, apa yang harus diawasi, atau apa yang harus dinilai.

d. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Bagi masyarakat miskin yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meluangkan waktu untuk menghadiri musyawarah atau kegiatan partisipasi lainnya adalah beban. Mereka mungkin lebih memilih bekerja daripada datang ke pertemuan yang tidak jelas manfaatnya.

e. Rendahnya Pendidikan dan Kesadaran

Masyarakat dengan pendidikan rendah mungkin tidak memahami prosedur perencanaan, bahasa birokrasi, atau isu-isu pembangunan yang kompleks. Mereka merasa tidak mampu berpartisipasi dan menyerahkan segalanya kepada elit.

f. Politisasi dan Konflik

Dalam situasi politik yang memanas, partisipasi bisa menjadi ajang konflik antar kelompok pendukung. Warga yang tidak ingin terlibat dalam konflik memilih untuk tidak datang. Partisipasi menjadi rendah karena takut terlibat dalam pertikaian.

g. Partisipasi Palsu (Pseudo-Participation)

Kadang pemerintah desa mengadakan musyawarah hanya untuk memenuhi persyaratan formal. Warga diundang, tetapi keputusan sudah ditentukan sebelumnya. Aspirasi mereka tidak didengar. Setelah beberapa kali mengalami hal ini, warga menjadi apatis dan enggan datang.

h. Hambatan Geografis

Di desa-desa terpencil dengan wilayah luas dan akses sulit, warga dari dusun yang jauh mungkin kesulitan menghadiri musyawarah di pusat desa. Ini menjadi hambatan fisik yang nyata.

F. MEMBANGUN PARTISIPASI YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION)

Partisipasi tidak cukup hanya secara formal. Yang diperlukan adalah partisipasi yang bermakna, di mana masyarakat benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Bagaimana membangun partisipasi yang bermakna?

1. Transparansi Informasi sebagai Prasyarat

Transparansi informasi adalah fondasi partisipasi yang bermakna. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara cerdas jika mereka tidak memiliki informasi yang memadai. Karena itu, pemerintah desa wajib:

- **Mempublikasikan dokumen-dokumen penting**: RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban kepala desa, dan informasi lainnya harus dapat diakses oleh publik. Media publikasi bisa beragam: papan pengumuman di balai desa, website desa, media sosial, atau grup WhatsApp.
- **Menyediakan informasi sebelum musyawarah**: Dokumen-dokumen yang akan dibahas dalam musyawarah harus dibagikan kepada warga minimal 7 hari sebelumnya. Ini memberi mereka waktu untuk mempelajari dan merenungkan, serta berdiskusi dengan kelompoknya.
- **Menggunakan bahasa yang dipahami**: Informasi harus disajikan dalam bahasa yang sederhana dan dipahami masyarakat awam. Jika perlu, ada sesi penjelasan atau sosialisasi sebelum musyawarah.
- **Menyediakan saluran untuk bertanya**: Masyarakat harus memiliki akses untuk bertanya, meminta klarifikasi, atau mengakses informasi lebih lanjut.

2. Membangun Kapasitas Masyarakat

Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif. Ini bisa dilakukan melalui:

- **Pendidikan dan pelatihan**: Pelatihan tentang perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan, advokasi, atau kepemimpinan.
- **Sekolah lapang atau sekolah desa**: Forum belajar bersama yang membahas isu-isu pembangunan desa.
- **Kunjungan belajar**: Mengajak warga ke desa-desa yang sudah sukses dalam pembangunan partisipatif untuk belajar dari pengalaman mereka.
- **Pendampingan**: Fasilitator desa mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

3. Menciptakan Ruang Partisipasi yang Inklusif

Semua kelompok harus memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- **Afirmasi kelompok marginal**: Memberikan perhatian khusus pada keterlibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin. Misalnya, dengan menyediakan kuota khusus dalam musyawarah, atau mengadakan pertemuan terpisah untuk menggali aspirasi mereka.
- **Fasilitasi yang netral**: Menggunakan fasilitator yang netral dan terampil untuk memandu diskusi, memastikan semua suara terdengar, dan mencegah dominasi oleh segelintir orang.
- **Metode partisipatif yang kreatif**: Menggunakan metode yang memungkinkan semua orang berpartisipasi, tidak hanya yang pandai bicara di forum formal. Misalnya, diskusi kelompok kecil, permainan peran, atau penggunaan gambar dan diagram.
- **Aksesibilitas fisik**: Memastikan tempat musyawarah dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Bagi warga dari dusun jauh, bisa disediakan transportasi atau pertemuan dilakukan bergilir di dusun-dusun.

4. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan adalah fondasi partisipasi. Untuk membangun kepercayaan:

- **Konsistensi dan keandalan**: Pemerintah desa harus konsisten dalam menjalankan komitmen dan dapat diandalkan.
- **Transparansi dan akuntabilitas**: Terbuka tentang anggaran dan program, serta mau mempertanggungjawabkannya.
- **Responsivitas**: Menindaklanjuti aspirasi dan masukan warga. Jika ada usulan yang tidak bisa diakomodasi, jelaskan alasannya dengan jujur.
- **Keteladanan**: Pemimpin desa harus menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan, dan dedikasi.

5. Membangun Budaya Partisipasi

Partisipasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal budaya. Budaya partisipasi perlu ditanamkan dan dipelihara:

- **Sosialisasi terus-menerus**: Terus-menerus mensosialisasikan pentingnya partisipasi dan hak masyarakat untuk terlibat.
- **Penghargaan bagi partisipan**: Memberikan apresiasi kepada warga yang aktif berpartisipasi, misalnya dengan ucapan terima kasih di forum publik atau penghargaan sederhana.
- **Melibatkan generasi muda**: Menanamkan nilai partisipasi sejak dini melalui pendidikan di sekolah dan organisasi kepemudaan.
- **Konsistensi**: Melaksanakan musyawarah dan forum partisipatif lainnya secara rutin dan konsisten, sehingga menjadi kebiasaan.

6. Memperkuat Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal—RT/RW, PKK, karang taruna, kelompok tani, pengajian—adalah wadah partisipasi yang sudah ada. Mereka perlu diperkuat:

- **Dukungan pemerintah desa**: Memberikan dukungan moral, fasilitasi, dan anggaran bagi kegiatan kelembagaan lokal.
- **Peningkatan kapasitas pengurus**: Melatih pengurus dalam manajemen organisasi, perencanaan program, dan advokasi.
- **Jejaring antar kelembagaan**: Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar lembaga.

G. STUDI KASUS: PRAKTIK PARTISIPASI DI DESA

1. Desa Karangbawang, Purbalingga: Musyawarah Dusun yang Tertib

Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, menjadi contoh praktik baik dalam perencanaan partisipatif. Di desa ini, Musyawarah Dusun (Musdus) dilaksanakan dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik .

Tahapan Musdus meliputi:

- Undangan kepada pihak terkait.
- Daftar hadir peserta.
- Notulensi/berita acara.
- Dokumentasi kegiatan.
- Usulan kegiatan prioritas pembangunan.

Dokumen hasil Musdus ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes dan penyelarasan dengan RPJMDes. Dengan sistem pendokumentasian yang lengkap, forum ini tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memperkuat fondasi pengambilan keputusan pembangunan berbasis kebutuhan warga .

Praktik di Desa Karangbawang menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warga.

2. Desa Sidamukti, Cilacap: Percontohan Partisipasi Masyarakat

Desa Sidamukti di Cilacap dikenal sebagai percontohan partisipasi masyarakat dalam memajukan kesejahteraan. Pemerintahan desa dan warga bahu-membahu, memastikan keterlibatan penuh semua unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan .

Langkah-langkah yang dilakukan di Sidamukti meliputi:

- Membentuk kelompok kerja masyarakat yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok.
- Melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan.
- Mengembangkan rencana pengelolaan bersama dengan kelompok kerja masyarakat.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana bersama masyarakat .

Pendekatan ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab, mendorong kreativitas dan inovasi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan .

3. Desa Bale Redelong, Aceh: Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan

Di Desa Bale Redelong, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pengelolaan hutan desa. Masyarakat membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang menjadi wadah partisipasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan .

Melalui LPHD, masyarakat terlibat dalam:

- Perencanaan pengelolaan hutan.
- Pelaksanaan kegiatan patroli dan perlindungan hutan.
- Pengembangan usaha berbasis hutan (kopi, madu, ekowisata).
- Monitoring dan evaluasi dampak pengelolaan.

Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi (melalui usaha kopi dan madu), tetapi juga menjaga kelestarian hutan (tidak ada deforestasi selama tiga tahun) .

H. TANTANGAN MEMBANGUN PARTISIPASI BERMAKNA

Meskipun ada contoh-contoh sukses, membangun partisipasi bermakna di desa bukan tanpa tantangan.

1. Budaya Paternalistik

Dalam banyak masyarakat desa, masih kuat budaya paternalistik—masyarakat menggantungkan pada pemimpin, segan berbeda pendapat, dan cenderung pasrah. Pemimpin dianggap paling tahu dan paling berhak memutuskan. Warga biasa tidak berani bersuara. Budaya ini menghambat partisipasi kritis.

2. Dominasi Elit

Dalam praktiknya, musyawarah desa sering didominasi oleh segelintir elit—kepala desa, perangkat, tokoh masyarakat tertentu. Warga biasa, terutama perempuan dan kelompok marginal, tidak memiliki ruang untuk berbicara. Keputusan sudah diatur sebelumnya, musyawarah hanya formalitas.

3. Partisipasi Palsu (Pseudo-Participation)

Kadang pemerintah desa mengadakan musyawarah hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, bukan untuk benar-benar mendengar aspirasi warga. Warga diundang, tetapi tidak punya pengaruh nyata terhadap keputusan. Ini menciptakan sinisme dan apatisme.

4. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Bagi warga miskin yang harus bekerja keras setiap hari, meluangkan waktu untuk musyawarah adalah beban. Mereka mungkin lebih memilih bekerja daripada datang ke pertemuan yang tidak jelas manfaatnya. Ini adalah hambatan nyata yang perlu diatasi dengan desain partisipasi yang fleksibel dan menghargai waktu warga.

5. Rendahnya Kapasitas Masyarakat

Tidak semua warga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif. Mereka mungkin tidak memahami istilah teknis, tidak bisa membaca dokumen anggaran, atau tidak berani berbicara di forum publik. Ini membutuhkan upaya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

6. Konflik dan Polarisasi

Di desa-desa yang terpolarisasi secara politik, partisipasi bisa menjadi ajang konflik antar kelompok pendukung. Warga yang tidak ingin terlibat konflik memilih untuk tidak datang. Partisipasi menjadi rendah.

7. Ketidakterbukaan Informasi

Banyak pemerintah desa yang masih belum terbuka dalam mengelola informasi. Dokumen anggaran sulit diakses, informasi program tidak disosialisasikan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki bekal untuk berpartisipasi secara cerdas.

I. RANGKUMAN

Partisipasi masyarakat adalah roh dari pembangunan desa. Ia adalah manifestasi dari kedudukan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Partisipasi menciptakan rasa memiliki, yang pada gilirannya mendorong tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan.

Partisipasi memiliki berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi pasif (sekadar menerima informasi), partisipasi dalam konsultasi (memberi masukan), hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Tingkat tertinggi adalah kontrol warga (citizen control), di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas program pembangunan.

Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum partisipasi tertinggi di tingkat desa. Di sinilah warga membahas dan menyepakati kebijakan strategis, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Musdes yang berkualitas harus memenuhi prinsip inklusivitas, keterbukaan informasi, kesetaraan, musyawarah untuk mufakat, dan akuntabilitas. Proses perencanaan partisipatif dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan ke Musyawarah Antar Dusun, dan berpuncak pada Musdes.

Selain dalam perencanaan, partisipasi juga dapat terwujud dalam **pelaksanaan** (gotong royong, swadaya), **pemanfaatan hasil** (akses terhadap fasilitas publik), **monitoring dan evaluasi** (pengawasan, audit sosial), serta **kelembagaan desa** (menjadi pengurus RT/RW, PKK, karang taruna, BPD).

Faktor pendorong partisipasi meliputi: kesadaran dan pengetahuan, kepercayaan, manfaat yang nyata, kepemimpinan yang responsif, budaya gotong royong, dan dukungan kebijakan. Faktor penghambat meliputi: ketidakpercayaan, dominasi elit, kurangnya informasi, keterbatasan waktu dan sumber daya, rendahnya pendidikan, politisasi dan konflik, partisipasi palsu, dan hambatan geografis.

Untuk membangun **partisipasi yang bermakna (meaningful participation)** , diperlukan:

1. **Transparansi informasi** sebagai prasyarat utama. Dokumen penting harus dipublikasikan, informasi disediakan sebelum musyawarah, menggunakan bahasa yang dipahami, dan ada saluran untuk bertanya.
2. **Membangun kapasitas masyarakat** melalui pendidikan, pelatihan, sekolah lapang, kunjungan belajar, dan pendampingan.
3. **Menciptakan ruang partisipasi yang inklusif** dengan afirmasi kelompok marginal, fasilitasi netral, metode kreatif, dan aksesibilitas fisik.
4. **Membangun kepercayaan** melalui konsistensi, transparansi, responsivitas, dan keteladanan.
5. **Membangun budaya partisipasi** melalui sosialisasi, penghargaan, pelibatan generasi muda, dan konsistensi.
6. **Memperkuat kelembagaan lokal** seperti RT/RW, PKK, karang taruna, kelompok tani, dan pengajian.

Studi kasus dari Desa Karangbawang (perencanaan partisipatif yang tertib), Desa Sidamukti (percontohan partisipasi masyarakat), dan Desa Bale Redelong (partisipasi dalam pengelolaan hutan) menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna dapat diwujudkan dan membawa hasil positif.

Namun, tantangan masih besar: budaya paternalistik, dominasi elit, partisipasi palsu, keterbatasan waktu dan sumber daya, rendahnya kapasitas, konflik, dan ketidakterbukaan informasi. Mengatasi tantangan ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak: pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan yang terpenting, masyarakat sendiri.

Pada akhirnya, partisipasi yang bermakna bukan hanya tentang prosedur, tetapi tentang nilai: bahwa setiap warga desa, tanpa kecuali, memiliki hak untuk bersuara dan menentukan masa depan desanya. Partisipasi adalah demokrasi dalam bentuknya yang paling nyata dan paling dekat dengan rakyat. Membangun partisipasi berarti membangun kedaulatan rakyat di akar rumput.

J. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah desa di tempat Anda? Apakah benar-benar partisipatif, atau masih didominasi oleh elite tertentu? Siapa saja yang biasanya hadir, dan siapa yang jarang hadir?
2. Apakah Anda merasa aspirasi Anda didengar dalam musyawarah desa? Apakah ada bukti bahwa aspirasi warga ditindaklanjuti dalam program pembangunan?
3. Seberapa transparan pemerintah desa di tempat Anda dalam mengelola informasi? Apakah Anda dapat mengakses dokumen anggaran dan laporan dengan mudah?
4. Kelompok apa saja yang paling rentan tidak terlibat dalam partisipasi di desa Anda? Mengapa, dan bagaimana cara melibatkan mereka?
5. Apa faktor terbesar yang menghambat partisipasi warga di desa Anda? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?
6. Pernahkah Anda terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan, misalnya dalam gotong royong atau swadaya? Bagaimana pengalaman Anda?
7. Bagaimana peran media sosial atau teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi warga di desa Anda? Apakah ada grup WhatsApp, website desa, atau media lain yang digunakan?
8. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk membangun budaya partisipasi yang autentik di desa, bukan sekadar formalitas?

BAB XIX

KONFLIK SOSIAL DI DESA DAN CARA PENYELESAIANNYA

A. PENGANTAR: KETIKA HARMONI TERGOYAH

Desa seringkali digambarkan sebagai ruang yang tenang, harmonis, dan penuh dengan nilai kebersamaan. Masyarakat desa hidup dalam ikatan gotong royong yang kuat, saling mengenal satu sama lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Namun, seperti halnya masyarakat pada umumnya, desa juga tidak luput dari potensi konflik. Bahkan, karena intensitas interaksi yang tinggi dan ikatan emosional yang kuat, konflik di desa bisa menjadi sangat personal dan dampaknya bisa sangat meluas.

Konflik sosial adalah bagian yang tak terelakkan dari dinamika masyarakat. Ia adalah bumbu kehidupan sosial yang, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi katalis perubahan positif. Namun, jika dibiarkan berlarut, ia bisa menghancurkan tatanan sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Memahami konflik—akar penyebabnya, bentuk-bentuknya, dan cara penyelesaiannya—adalah keniscayaan bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam pembangunan desa.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang konflik sosial di desa dan cara penyelesaiannya. Kita akan memulai dengan memahami konsep konflik dan membedakannya dari persaingan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi berbagai sumber konflik yang umum terjadi di desa, mulai dari sengketa tanah, perebutan sumber daya ekonomi, hingga konflik politik dan perbedaan nilai. Kita juga akan menganalisis bentuk-bentuk konflik, dinamika yang menyertainya, serta dampak yang ditimbulkan. Pada bagian inti, kita akan membahas berbagai cara penyelesaian konflik, baik melalui jalur non-litigasi (mediasi, musyawarah adat) maupun jalur litigasi (hukum formal), serta pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal. Beberapa studi kasus akan disajikan untuk memperkaya pemahaman, termasuk peran tokoh adat seperti "Pepel" di Kalimantan Timur dan strategi inovatif "Sedekah Bumi" di Desa Tenjolayar, Majalengka.

B. MEMAHAMI KONFLIK SOSIAL

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik sosial adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Konflik berbeda dengan persaingan. Dalam persaingan, pihak-pihak yang bersaing tidak saling melenyapkan; mereka hanya berusaha lebih unggul. Dalam konflik, ada upaya untuk melumpuhkan, melemahkan, atau bahkan menghancurkan pihak lain.

Lewis Coser, sosiolog konflik terkemuka, mendefinisikan konflik sebagai perjuangan mengenai nilai-nilai atau klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan pihak-pihak yang berkonflik adalah menetralkan, melukai, atau melenyapkan lawan mereka. Coser juga menekankan bahwa konflik memiliki fungsi positif, seperti memperjelas masalah, memperkuat solidaritas internal kelompok, dan mendorong perubahan sosial.

Wirawan dalam bukunya "Konflik dan Manajemen Konflik" menjelaskan bahwa konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai tujuan, sumber daya, atau persepsi, dan di mana pihak-pihak tersebut memandang satu sama lain sebagai penghalang atau pengganggu terhadap pencapaian tujuan mereka .

Dalam konteks desa, konflik sosial dapat didefinisikan sebagai pertentangan antar warga, antar kelompok, atau antara warga dengan pihak luar (pemerintah, perusahaan) yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta berpotensi merusak kohesi sosial yang telah terbangun.

2. Perbedaan Konflik dan Persaingan

Aspek	Persaingan	Konflik
Tujuan	Menjadi yang terbaik atau terunggul	Melumpuhkan atau mengalahkan lawan

Aspek	Persaingan	Konflik
Cara	Cara-cara yang diterima secara sosial	Berbagai cara, termasuk kekerasan
Hubungan antar pihak	Saling berlomba, tetapi tidak bermusuhan	Saling bermusuhan, ada niat untuk merugikan
Hasil	Peningkatan kualitas, efisiensi	Kerusakan, trauma, perpecahan
Contoh di desa	Pedagang bersaing mendapatkan pelanggan	Dua keluarga bertikai karena sengketa tanah

3. Teori-Teori Konflik

a. Teori Konflik Realistis

Dikemukakan oleh Lewis Coser, teori ini menyatakan bahwa konflik muncul karena adanya pertentangan kepentingan yang nyata (realistis), misalnya tentang sumber daya yang terbatas. Konflik ini bisa diselesaikan jika tercapai kesepakatan tentang distribusi sumber daya.

b. Teori Konflik Non-Realistis

Konflik muncul bukan karena pertentangan kepentingan yang nyata, melainkan karena kebutuhan untuk melepaskan ketegangan, atau karena persepsi yang salah terhadap pihak lain. Prasangka, stereotip, dan kesalahpahaman sering menjadi pemicu konflik jenis ini.

c. Teori Konflik Fungsional

Konflik dipandang memiliki fungsi positif bagi masyarakat, antara lain: (1) memperjelas masalah-masalah yang terpendam, (2) mendorong terbentuknya koalisi dan aliansi baru, (3) memperkuat solidaritas internal kelompok, dan (4) mendorong perubahan sosial yang lebih adil .

C. SUMBER-SUMBER KONFLIK DI DESA

Konflik di desa dapat bersumber dari berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun personal. Berdasarkan penelitian di berbagai daerah, berikut adalah sumber-sumber utama konflik di desa.

1. Sengketa Tanah dan Sumber Daya Alam

Tanah adalah sumber daya paling fundamental di desa. Ia bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga identitas, warisan leluhur, dan simbol status sosial. Tidak mengherankan jika sengketa tanah menjadi penyebab utama konflik di banyak desa.

a. Sengketa Batas Tanah

Konflik antar tetangga karena batas tanah yang tidak jelas sering terjadi. Ini bisa dipicu oleh ketiadaan sertifikat, patok yang bergeser, atau klaim sepihak atas tanah yang dianggap milik sendiri.

b. Sengketa Warisan

Pembagian warisan, terutama jika tidak ada wasiat yang jelas atau jika salah satu pihak merasa dirugikan, bisa memicu konflik berkepanjangan dalam keluarga. Di beberapa daerah, perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional tentang warisan juga menjadi sumber konflik .

c. Konflik Agraria dengan Perusahaan

Konflik antara masyarakat desa dengan perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, atau tambang adalah salah satu bentuk konflik paling serius. Masyarakat adat sering kehilangan akses terhadap tanah leluhurnya yang diklaim sebagai kawasan hutan negara atau konsesi perusahaan.

Studi di Desa Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah, mengungkap konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Masyarakat kehilangan hak atas tanah adat yang menjadi sumber penghidupan mereka, bahkan terjadi pelanggaran HAM termasuk penembakan terhadap warga. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik agraria bisa berdampak sangat tragis ketika negara dan aparat keamanan berada di pihak perusahaan .

Demikian pula konflik di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang melibatkan ribuan keluarga petani. Ketidakjelasan batas kawasan, tumpang tindih izin, dan tidak adanya skema penyelesaian yang adil membuat konflik ini menjadi "bom waktu sosial" di pedesaan .

2. Perebutan Sumber Daya Ekonomi

Selain tanah, sumber daya ekonomi lain seperti air, pasar, atau bantuan sosial juga bisa menjadi sumber konflik.

a. Perebutan Air Irigasi

Di musim kemarau, air irigasi menjadi rebutan. Petani di hulu yang mengambil air lebih banyak bisa merugikan petani di hilir. Konflik semacam ini sering terjadi di daerah pertanian dengan sistem irigasi yang tidak memadai.

b. Persaingan Ekonomi

Persaingan antar pedagang di pasar desa, antar pelaku jasa, atau antar kelompok tani bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Praktik curang, penipuan, atau saling menjatuhkan bisa memperburuk hubungan.

c. Perebutan Bantuan Sosial

Dana desa, BLT, bantuan pangan, atau program bantuan lainnya sering menjadi sumber konflik. Warga berebut siapa yang berhak menerima. Tudingan nepotisme, ketidakadilan, atau kecurangan dalam pendistribusian bisa memicu ketegangan .

3. Faktor Politik

a. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pilkades adalah momen paling rawan konflik di banyak desa. Kampanye hitam, politik uang, atau kecurangan dalam pemilihan bisa memicu konflik berkepanjangan. Setelah Pilkades, pendukung calon yang kalah kadang tidak terima dan memicu ketegangan yang bisa berlangsung bertahun-tahun .

Penelitian di Desa Jambu, Kabupaten Luwu, menunjukkan bahwa konflik politik menjadi salah satu bentuk konflik yang sering terjadi, selain konflik pribadi dan konflik antar kelas sosial .

b. Kebijakan yang Tidak Populer

Kebijakan kepala desa atau pemerintah daerah yang merugikan warga bisa memicu protes dan konflik. Misalnya, kebijakan tentang tata ruang, penggusuran, alokasi dana desa, atau kerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap merugikan masyarakat.

4. Faktor Sosial dan Budaya

a. Konflik Antar Kelompok Etnis atau Agama

Di desa-desa yang heterogen secara etnis atau agama, potensi konflik selalu ada, terutama jika ada isu-isu sensitif atau provokasi dari luar. Namun, banyak desa di Indonesia yang justru menjadi contoh kerukunan antar etnis dan agama berkat kearifan lokal dan toleransi yang kuat.

b. Pelanggaran Adat

Pelanggaran terhadap norma adat bisa memicu konflik. Misalnya, perkawinan yang melanggar aturan adat (seperti kawin dengan orang dari klan yang dilarang), atau perilaku yang dianggap menghina adat. Di masyarakat adat Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dikenal istilah "Moruk Malu" yaitu bentuk pelanggaran adat yang berdampak serius terhadap pelaku, korban, dan komunitas secara keseluruhan .

c. Konflik dalam Rumah Tangga

Pertengkaran suami-istri, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau masalah warisan bisa melibatkan keluarga besar dan memicu konflik antar keluarga. Di banyak desa, tokoh adat atau tokoh masyarakat sering menjadi mediator dalam konflik semacam ini .

d. Perkelahian Antar Warga

Perkelahian yang dipicu masalah sepele—senggolan di pasar, rebutan pacar, atau ejekan—bisa berkembang menjadi konflik antar keluarga, antar kelompok, bahkan antar dusun .

5. Faktor Komunikasi dan Informasi

a. Kesalahpahaman

Banyak konflik bermula dari kesalahpahaman sederhana. Pesan yang tidak sampai, informasi yang simpang siur, atau persepsi yang berbeda bisa memicu ketegangan.

b. Hoaks dan Provokasi

Di era digital, penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial menjadi faktor pemicu konflik yang signifikan. Penelitian tentang mitigasi konflik di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, menemukan bahwa penyebaran hoaks, adanya provokator, dan kesalahpahaman antar warga justru membuat kerusuhan semakin parah saat konflik terjadi .

D. BENTUK-BENTUK KONFLIK DI DESA

Konflik di desa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria.

1. Berdasarkan Pihak yang Berkonflik

a. Konflik Intrapersonal

Konflik dalam diri individu. Misalnya, orang yang dilema antara mematuhi orang tua atau mengikuti kata hati. Meskipun tidak melibatkan orang lain, konflik ini bisa berdampak pada perilaku sosial.

b. Konflik Interpersonal

Konflik antar individu. Misalnya, dua tetangga bertengkar karena masalah batas tanah, atau dua pemuda berkelahi karena rebutan pacar. Ini adalah bentuk konflik paling umum .

c. Konflik Intrakelompok

Konflik dalam satu kelompok. Misalnya, dalam kelompok tani, ada perbedaan pendapat tentang penggunaan dana kelompok. Atau dalam keluarga, terjadi konflik soal warisan. Konflik ini bisa melemahkan kelompok jika tidak dikelola.

d. Konflik Antarkelompok

Konflik antar kelompok. Misalnya, konflik antara dua kelompok tani dari dusun berbeda memperebutkan air irigasi. Atau konflik antara pendukung dua calon kepala desa. Konflik antarkelompok lebih berbahaya karena melibatkan lebih banyak orang dan berpotensi mempolarisasi masyarakat .

e. Konflik Vertikal

Konflik antara masyarakat dengan pihak yang lebih berkuasa. Misalnya, konflik antara warga desa dengan perusahaan tambang atau perkebunan , atau antara warga dengan pemerintah daerah terkait kebijakan yang merugikan.

2. Berdasarkan Tingkat Kekerasan

a. Konflik Laten

Konflik yang tidak tampak ke permukaan. Ada ketegangan, ada potensi ledakan, tetapi belum meletus. Biasanya berupa rasa tidak puas, kebencian terpendam, atau persaingan yang tidak sehat.

b. Konflik Terbuka

Konflik yang sudah tampak ke permukaan dalam bentuk protes, demonstrasi, atau aksi-aksi lainnya. Belum sampai pada kekerasan fisik.

c. Konflik Kekerasan

Konflik yang sudah melibatkan kekerasan fisik, perusakan, bahkan sampai jatuh korban jiwa. Contohnya adalah konflik antar desa yang terjadi di beberapa daerah , atau konflik agraria yang berujung pada bentrok dengan aparat keamanan .

E. DINAMIKA KONFLIK: TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN

Konflik tidak terjadi begitu saja. Ia melalui proses yang dapat diidentifikasi. Memahami tahap-tahap ini penting untuk melakukan intervensi sedini mungkin.

1. Tahap Potensial (Latent Conflict)

Pada tahap ini, benih-benih konflik sudah ada, tetapi belum muncul ke permukaan. Ada ketidakpuasan, perbedaan kepentingan, atau ketegangan yang terpendam. Misalnya, petani di hilir sudah lama merasa dirugikan karena petani di hulu mengambil air terlalu banyak. Namun, mereka belum menyuarakan protes. Atau, ada sengketa batas tanah antar tetangga yang belum dibicarakan.

2. Tahap Pemicu (Triggering)

Ada peristiwa yang memicu konflik meletus. Peristiwa ini bisa berupa hal kecil—perkataan yang tidak mengenakkan, senggolan fisik, atau tindakan sepihak yang dianggap melanggar kesepakatan. Misalnya, petani di hulu membendung air sehingga petani di hilir sama sekali tidak kebagian air. Atau, saat Pilkades, salah satu calon dituduh curang oleh pendukung lawan.

3. Tahap Eskalasi

Konflik meluas dan memuncak. Semakin banyak orang terlibat. Pihak-pihak yang tadinya netral mungkin terpaksa memihak karena ikatan keluarga atau solidaritas kelompok. Identitas kelompok menguat—"kami" versus "mereka". Emosi memuncak, perilaku bisa menjadi irasional. Kekerasan fisik mungkin terjadi. Penelitian di Lombok Tengah menunjukkan bahwa pada tahap ini, penyebaran hoaks dan provokasi justru membuat kerusuhan semakin parah .

4. Tahap Dekalasi

Konflik mulai mereda. Mungkin karena intervensi pihak ketiga (tokoh masyarakat, aparat, pemerintah), atau karena pihak-pihak yang bertikai mulai lelah. Mulai ada upaya untuk berdamai, meskipun mungkin masih ada kecurigaan dan ketegangan.

5. Tahap Penyelesaian dan Rekonsiliasi

Konflik diselesaikan melalui berbagai cara—musyawarah, mediasi, arbitrase, atau jalur hukum. Jika berhasil, tercapai kesepakatan damai. Setelah itu, perlu ada proses rekonsiliasi untuk memulihkan

hubungan, menyembuhkan luka, dan membangun kembali kepercayaan. Jika tidak, konflik bisa berlarut-larut atau meletus lagi di kemudian hari.

F. DAMPAK KONFLIK

Konflik selalu membawa dampak, baik negatif maupun positif.

1. Dampak Negatif

a. Korban Jiwa dan Kerugian Fisik

Konflik yang melibatkan kekerasan bisa menyebabkan luka-luka, bahkan kematian. Rumah, lahan pertanian, fasilitas umum, dan harta benda lainnya bisa rusak atau hancur. Konflik agraria di Desa Bangkal Seruyan, misalnya, mengakibatkan penembakan terhadap warga .

b. Trauma Psikologis

Konflik meninggalkan trauma yang dalam, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan lansia. Mereka mungkin mengalami ketakutan, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Seperti diungkapkan dalam konflik Tesso Nilo, "warga dan petaninya menjadi trauma" .

c. Perpecahan Sosial

Konflik bisa memecah belah masyarakat. Hubungan yang tadinya harmonis menjadi renggang. Tetangga yang dulu akrab bisa menjadi saling curiga. Permusuhan bisa berlangsung lama, bahkan diwariskan ke generasi berikutnya.

d. Kerugian Ekonomi

Konflik mengganggu aktivitas ekonomi. Lahan tidak bisa digarap, pasar sepi, investasi kabur, wisatawan tidak datang. Biaya untuk pemulihan pasca-konflik juga besar.

e. Migrasi

Konflik bisa memaksa warga mengungsi atau pindah ke tempat lain. Mereka kehilangan rumah, tanah, dan mata pencaharian.

2. Dampak Positif (Fungsional)

Lewis Coser dalam "The Functions of Social Conflict" mengidentifikasi beberapa fungsi positif konflik:

a. Memperjelas Masalah

Konflik memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk mengartikulasikan kepentingan dan tuntutan mereka. Masalah yang tadinya terpendam menjadi terbuka dan bisa dicari solusinya.

b. Memperkuat Solidaritas Internal

Dalam menghadapi ancaman dari luar, solidaritas kelompok bisa menguat. "Kami" menjadi lebih kompak melawan "mereka". Ini bisa terlihat dalam gerakan perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan .

c. Mendorong Perubahan Sosial

Konflik bisa memicu perubahan yang lebih adil. Misalnya, konflik agraria bisa mendorong reforma kebijakan pertanahan. Konflik buruh bisa mendorong perbaikan upah dan kondisi kerja. Gerakan masyarakat Janji Maria melawan Toba Pulp Lestari (TPL) adalah contoh bagaimana konflik bisa mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran publik .

d. Membantu Pembentukan Identitas

Konflik dengan pihak luar bisa memperkuat identitas kelompok. Masyarakat adat semakin menyadari identitas dan hak-haknya ketika berhadapan dengan perusahaan atau negara.

G. CARA PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui berbagai jalur, tergantung pada jenis, tingkat keparahan, dan konteks sosial budaya masyarakat.

1. Pendekatan Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Pendekatan ini lebih sesuai dengan budaya desa yang mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Ia juga lebih cepat, murah, dan tidak memutus hubungan sosial para pihak.

a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memutuskan, tetapi memfasilitasi dialog.

Di Desa Jambu, Kabupaten Luwu, pendekatan dominan yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik adalah mediasi. Pemerintah desa mengundang pihak yang bersengketa, mendengarkan kedua belah pihak, dan membantu mereka mencari solusi . Model pendekatan yang digunakan meliputi mediasi, sharing/kompromi, kolaborasi, dan penghindaran.

b. Peran Tokoh Adat

Di banyak desa, tokoh adat memegang peran sentral sebagai mediator dan bahkan hakim adat. Mereka dihormati, dipercaya, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai dan norma adat.

Studi di Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan peran sentral Fukun dan Dato (tokoh adat) dalam menyelesaikan konflik "Moruk Malu". Proses penyelesaiannya sangat sistematis dan sakral: dimulai dari inisiatif damai oleh keluarga, pelibatan mediator, hingga pemanggilan tokoh adat yang bertindak sebagai penengah dan penentu keputusan. Dalam prosesnya, tetua adat berpegang pada tiga asas pokok: **asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan**. Keputusan adat bersifat

final dan tidak dapat diganggu gugat, mencerminkan tingginya penghormatan masyarakat terhadap otoritas adat .

Kisah **Pepel**, Kepala Adat Dayak Paser di Desa Sekuan Makmur, Kalimantan Timur, juga mengilustrasikan peran vital tokoh adat. Di usia lebih dari 90 tahun, Pepel menjadi lapis pertama penyelesaian berbagai konflik, mulai dari sengketa batas lahan hingga konflik rumah tangga. Dengan kalimat sederhana seperti "Ingat masa-masa baik. Mengakui kesalahan dan berjanji jangan mengulanginya," banyak pasangan yang akhirnya tidak jadi bercerai. Pepel menjalankan filosofi lokal "jaut ngukut lumut pentur bawo" yang berarti orangtua di kampung harus melindungi dan menaungi masyarakatnya dari lahir sampai meninggal .

c. Musyawarah Desa

Musyawarah desa bisa menjadi forum untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan banyak pihak atau menyangkut kepentingan umum. Seluruh elemen masyarakat berkumpul, membahas masalah, dan mencari solusi bersama. Prinsip musyawarah mufakat menjadi pedoman utama.

d. Kearifan Lokal dan Ritual Adat

Banyak desa memiliki mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Di Desa Tenjolayar, Majalengka, misalnya, dikembangkan pendekatan inovatif bernama **"Sedekah Bumi"**. Ritual adat ini melibatkan seluruh warga desa untuk bersama-sama mengumpulkan hasil bumi, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, yang kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh warga. Melalui Sedekah Bumi, warga diajarkan nilai-nilai luhur seperti berbagi, toleransi, dan gotong royong. Kepala Desa Tenjolayar menyatakan, "Sedekah Bumi telah terbukti efektif dalam merajut kembali kebersamaan dan memupus perselisihan." Seorang warga menambahkan, "Dulu, kami sering terlibat gesekan kecil. Tapi sejak ada Sedekah Bumi, konflik-konflik seperti itu sudah jarang terjadi" .

e. Mediasi oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik. Penelitian di Desa Jambu, Kabupaten Luwu, mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik meliputi: mengundang pihak yang bersengketa, turun langsung ke lapangan, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Pendekatan yang dominan adalah mediasi .

f. Rekonsiliasi Pasca-Konflik

Setelah konflik selesai, perlu ada upaya untuk memulihkan hubungan dan menyembuhkan luka. Ini bisa dilakukan melalui:

- **Upacara adat perdamaian**: Seperti yang dilakukan di berbagai daerah dengan ritual simbolis.
- **Dialog lanjutan**: Untuk memastikan kesepakatan dijalankan dan tidak ada lagi ketegangan.
- **Kegiatan bersama**: Gotong royong, perayaan hari besar, atau kegiatan sosial lainnya yang mempertemukan mantan pihak yang bertikai.

2. Pendekatan Litigasi (Jalur Hukum)

Untuk konflik tertentu, terutama yang melibatkan pelanggaran hukum berat, jalur hukum formal mungkin diperlukan.

a. Pelaporan ke Kepolisian

Untuk kasus kekerasan fisik, penganiayaan, atau tindak pidana lainnya, warga dapat melapor ke polisi.

b. Gugatan ke Pengadilan

Untuk sengketa perdata seperti sengketa tanah, warisan, atau kontrak, warga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama.

c. Advokasi melalui Komnas HAM

Untuk kasus pelanggaran HAM berat, seperti yang terjadi dalam konflik agraria di Bangkal Seruyan, masyarakat dapat mengadu ke Komnas HAM. Laporan penelitian dari TuK Indonesia, PPMAN, dan WALHI Kalimantan Tengah telah diserahkan kepada Komnas HAM pada Oktober 2024 .

3. Pendekatan Terpadu: Mitigasi Risiko Konflik

Penelitian tentang mitigasi konflik di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, mengidentifikasi tiga tahapan penting dalam mitigasi risiko konflik :

a. Peacekeeping (Penjaga Perdamaian)

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama konflik berlangsung. Ini bisa dilakukan dengan penjagaan perbatasan wilayah konflik, patroli bersama, dan pengamanan oleh aparat.

b. Peacemaking (Penciptaan Perdamaian)

Upaya untuk menghentikan konflik dan mencapai kesepakatan damai. Ini dilakukan melalui mediasi, dialog, dan negosiasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa peacemaking di Kecamatan Pujut belum optimal karena adanya penyebaran hoaks, provokasi, dan kesalahpahaman yang justru memperparah situasi .

c. Peacebuilding (Pembangunan Perdamaian)

Upaya jangka panjang untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Ini meliputi penguatan komunikasi antar warga, pendidikan perdamaian, pembangunan institusi lokal yang kuat, dan penguatan modal sosial.

H. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK

Mencegah konflik lebih baik daripada menyelesaikannya. Beberapa strategi pencegahan yang efektif:

1. Identifikasi Akar Masalah Secara Dini

Langkah pertama yang dilakukan perangkat desa Tenjolayar adalah mengidentifikasi akar permasalahan konflik. Mereka melakukan diskusi mendalam dengan warga, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk menggali penyebab mendasar yang memicu pertikaian .

2. Membangun Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang terbuka dan efektif antar warga, antar kelompok, dan antara warga dengan pemerintah desa dapat mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menjadi konflik.

3. Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-Nilai Perdamaian

Di Desa Tenjolayar, perangkat desa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan nilai-nilai kebersamaan .

4. Penegakan Aturan dan Sanksi yang Jelas

Untuk mencegah potensi konflik di masa depan, perangkat desa Tenjolayar memberlakukan aturan dan sanksi yang jelas terhadap segala bentuk kekerasan atau perpecahan. Kepala Desa menekankan bahwa "hukum harus tegak tanpa pandang bulu, agar semua warga merasa terlindungi dan konflik dapat dicegah" .

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Warga

Perangkat desa Tenjolayar mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa. Dengan memberikan ruang bagi warga untuk terlibat, mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap harmoni desa. Kepala Desa Tenjolayar menyatakan, "Keberhasilan mengatasi konflik di Desa Tenjolayar tidak lepas dari peran serta seluruh warga. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perdamaian, dan kita semua harus bekerja sama untuk memastikan terwujudnya desa yang harmonis dan tanpa pertikaian" .

6. Memperkuat Kelembagaan Lokal

Lembaga adat, kelompok tani, PKK, karang taruna, dan organisasi masyarakat lainnya perlu diperkuat agar mampu menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi konflik besar.

7. Membangun dan Merawat Modal Sosial

Gotong royong, arisan, kerja bakti, dan kegiatan bersama lainnya harus terus dihidupkan. Kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang menjadi perekat masyarakat.

8. Mitigasi Hoaks dan Provokasi

Di era digital, literasi digital menjadi penting. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengenali hoaks, tidak mudah terprovokasi, dan menggunakan media sosial secara bijak.

I. STUDI KASUS: PRAKTIK PENYELESAIAN KONFLIK DI DESA

1. Kasus 1: Peran Fukun dan Dato di Desa Kamanasa, Malaka

Di Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, konflik adat yang dikenal dengan sebutan "Moruk Malu" diselesaikan melalui peran sentral Fukun dan Dato (tokoh adat). Proses penyelesaiannya sangat sistematis dan sakral, dimulai dari inisiatif damai oleh keluarga, pelibatan mediator, hingga pemanggilan tokoh adat yang bertindak sebagai penengah dan penentu keputusan.

Dalam menjalankan perannya, tetua adat berpegang pada tiga asas pokok: **asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan**. Keputusan yang diambil bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, mencerminkan tingginya penghormatan masyarakat terhadap otoritas adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Fukun dan Dato sangat penting dalam menyelesaikan konflik Moruk Malu, termasuk dalam mempertimbangkan dan memberikan sanksi kepada pelaku dan pihak korban .

2. Kasus 2: Pepel, Kepala Adat Dayak Paser di Kalimantan Timur

Pepel, Kepala Adat Dayak Paser di Desa Sekuan Makmur, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, adalah contoh nyata peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik. Di usia lebih dari 90 tahun, Pepel menjadi lapis pertama penyelesaian berbagai masalah, mulai dari sengketa batas lahan hingga konflik rumah tangga.

Dengan pendekatan sederhana namun penuh kearifan, Pepel memberi wejangan kepada pasangan yang hendak bercerai: "Ingat masa-masa baik. Mengakui kesalahan dan berjanji jangan mengulanginya." Banyak pasangan yang akhirnya tidak jadi bercerai setelah dimediasi oleh Pepel. Jika mediasi berhasil, mereka membuat surat perjanjian yang ditandatangani suami-istri dan kepala adat. Jika gagal, mereka membuat surat kesepakatan cerai yang menjadi bekal untuk melanjutkan proses ke pengadilan agama.

Pepel menjalankan filosofi lokal "jaut ngukut lumut pentur bawo" yang berarti orangtua di kampung harus melindungi dan menaungi masyarakatnya dari lahir sampai meninggal. Meskipun mendapat biaya operasional dari pemerintah desa, Pepel menegaskan bahwa tugas orangtua di kampung memang demikian: "Orangtua seperti saya yang menunggu mati ini memang mestinya menghabiskan hidup buat hal berguna" .

3. Kasus 3: Strategi "Sedekah Bumi" di Desa Tenjolayar, Majalengka

Desa Tenjolayar di Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menjadi contoh sukses pencegahan dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Mereka mengembangkan pendekatan inovatif bernama **"Sedekah Bumi"**—ritual adat yang melibatkan seluruh warga desa untuk bersama-sama mengumpulkan hasil bumi, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, yang kemudian dibagikan secara merata.

Melalui ritual ini, warga diajarkan nilai-nilai luhur seperti berbagi, toleransi, dan gotong royong. Rasa kebersamaan yang terjalin menumbuhkan kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan harus saling menghargai. Hal ini menjadi benteng ampuh untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Strategi Desa Tenjolayar mendapat pengakuan nasional, termasuk Penghargaan Desa Inklusif dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 dan penghargaan dari Kementerian PPPA atas program

pencegahan kekerasan berbasis gender. Keberhasilan ini direplikasi oleh banyak desa lain, dan perangkat desa Tenjolayar sering diundang untuk berbagi pengalaman dan memberikan pelatihan tentang strategi mereka .

4. Kasus 4: Konflik Agraria di Desa Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah

Kasus ini menunjukkan sisi gelap konflik yang tidak terselesaikan. Konflik antara warga Desa Bangkal dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) berlangsung lama dan menimbulkan korban jiwa. Laporan penelitian dari TuK Indonesia, PPMAN, dan WALHI Kalimantan Tengah mengungkap pelanggaran HAM, dugaan bisnis keamanan yang melibatkan kepolisian, pengabaian hak masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan.

Pelajaran penting dari kasus ini adalah: (1) pentingnya penyelesaian konflik agraria secara adil dan komprehensif, (2) perlunya pengawasan ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di sekitar desa, (3) pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat, dan (4) peran kritis lembaga keuangan dalam memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan .

J. RANGKUMAN

Konflik sosial adalah bagian yang tak terelakkan dari dinamika masyarakat desa. Ia lahir dari berbagai sumber: sengketa tanah dan sumber daya alam, perebutan sumber daya ekonomi, faktor politik, perbedaan nilai dan budaya, serta kesalahpahaman dan hoaks. Konflik memiliki bentuk yang beragam—dari yang laten hingga kekerasan, dari interpersonal hingga vertikal—dan melalui tahap-tahap perkembangan yang dapat diidentifikasi.

Dampak konflik bisa sangat merusak: korban jiwa, trauma psikologis, perpecahan sosial, kerugian ekonomi, dan migrasi. Namun, konflik juga memiliki fungsi positif: memperjelas masalah, memperkuat solidaritas internal kelompok, mendorong perubahan sosial, dan membantu pembentukan identitas.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui berbagai jalur:

1. **Pendekatan non-litigasi** yang lebih sesuai dengan budaya desa, meliputi:
   - **Mediasi** oleh pemerintah desa atau tokoh masyarakat, seperti yang dilakukan di Desa Jambu .
   - **Peran tokoh adat** sebagai mediator dan hakim adat, seperti Fukun dan Dato di Malaka dan Pepel di Kalimantan Timur .
   - **Musyawarah desa** yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
   - **Kearifan lokal dan ritual adat**, seperti "Sedekah Bumi" di Desa Tenjolayar .
   - **Rekonsiliasi pasca-konflik** melalui upacara adat, dialog lanjutan, dan kegiatan bersama.
2. **Pendekatan litigasi** untuk konflik yang melibatkan pelanggaran hukum berat: pelaporan ke polisi, gugatan ke pengadilan, atau advokasi ke Komnas HAM.
3. **Pendekatan terpadu mitigasi risiko konflik**: peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding .

Mencegah konflik lebih baik daripada menyelesaikannya. Strategi pencegahan yang efektif meliputi: identifikasi akar masalah secara dini, membangun komunikasi yang efektif, pendidikan nilai-nilai

perdamaian, penegakan aturan yang jelas, pemberdayaan masyarakat dan pelibatan warga, penguatan kelembagaan lokal, merawat modal sosial, serta mitigasi hoaks dan provokasi.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengelola konflik sangat tergantung pada kearifan kita dalam membaca situasi, kemampuan kita dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, serta komitmen kita untuk selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Desa yang kuat adalah desa yang mampu mengelola konfliknya secara konstruktif, menjadikannya sebagai pembelajaran, dan bangkit dengan tatanan sosial yang lebih kokoh dan lebih adil.

K. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Konflik apa saja yang pernah terjadi di desa Anda? Apa penyebab utamanya?
2. Bagaimana cara masyarakat desa Anda menyelesaikan konflik? Apakah lebih banyak menggunakan jalur adat/musyawarah atau jalur hukum?
3. Siapa saja tokoh yang berperan sebagai mediator dalam konflik di desa Anda? Apa yang membuat mereka dipercaya?
4. Apakah di desa Anda ada kearifan lokal atau ritual adat yang berfungsi untuk mencegah atau menyelesaikan konflik?
5. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap konflik di desa Anda? Apakah memperparah atau membantu penyelesaian?
6. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan desa Anda untuk mencegah konflik di masa depan?
7. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik di desa?
8. Apa yang bisa dipelajari dari strategi "Sedekah Bumi" di Desa Tenjolayar atau peran tokoh adat seperti Pepel di Kalimantan Timur?

BAB XX

TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA MODERNISASI

A. PENGANTAR: DESA DI PERSIMPANGAN ZAMAN

Desa tidak pernah benar-benar statis. Sepanjang sejarah, ia terus bergerak dan berubah, meskipun kadang perubahan itu berlangsung begitu perlahan hingga hampir tak terasa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, arus perubahan yang menerpa desa begitu deras dan mendasar. Modernisasi, dengan segala atributnya—teknologi, pasar, media, pendidikan, urbanisasi—telah mengubah wajah desa secara fundamental. Desa yang dulu terisolasi kini terhubung dengan jaringan global. Petani yang dulu hanya mengenal pasar lokal kini harus bersaing dengan produk impor. Nilai-nilai yang dulu dipegang teguh kini mulai dipertanyakan.

Transformasi sosial di era modernisasi adalah tema yang kompleks dan multidimensi. Ia mencakup perubahan dalam struktur ekonomi (dari agraris ke industri/jasa), perubahan dalam pola hubungan sosial (dari kolektif ke individualistis), perubahan dalam sistem nilai (dari tradisional ke rasional), dan perubahan dalam mobilitas penduduk (dari menetap ke migran). Setiap perubahan membawa dampak, ada

yang positif dan ada yang negatif. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat desa dapat mengelola perubahan ini agar tetap mempertahankan jati diri sambil meraih kemajuan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang transformasi sosial desa di era modernisasi. Kita akan memulai dengan memahami konsep modernisasi dan transformasi sosial menurut para ahli. Selanjutnya, kita akan menelusuri berbagai dimensi perubahan: perubahan struktur ekonomi dan mata pencaharian, perubahan pola hubungan sosial dan sistem nilai, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi, serta peningkatan mobilitas sosial dan geografis. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis dampak positif dan negatif dari transformasi ini, serta bagaimana desa menunjukkan ketahanan dengan mengadaptasi nilai-nilai baru tanpa harus kehilangan identitasnya sepenuhnya.

B. MEMAHAMI MODERNISASI DAN TRANSFORMASI SOSIAL

1. Pengertian Modernisasi

Modernisasi adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Istilah ini pertama kali populer pada pertengahan abad ke-20, ketika para sosiolog mencoba memahami perubahan yang terjadi di negara-negara berkembang pasca-kolonial.

Beberapa definisi modernisasi dari para ahli:

Soerjono Soekanto mendefinisikan modernisasi sebagai suatu bentuk perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Modernisasi menyangkut perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai sosial, dan orientasi hidup masyarakat.

Wilbert Moore mendefinisikan modernisasi sebagai transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara Barat yang stabil.

Alex Inkeles mendefinisikan modernisasi sebagai perubahan sikap, nilai, dan perilaku individu dari yang tradisional menjadi yang modern. Menurutnya, manusia modern memiliki ciri-ciri: (1) terbuka terhadap pengalaman baru, (2) siap menghadapi perubahan, (3) berorientasi masa depan, (4) percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) menghargai perencanaan, (6) memiliki aspirasi tinggi untuk diri dan anak-anaknya.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa modernisasi mencakup tiga dimensi utama:

- **Dimensi struktural**: perubahan dalam organisasi sosial, lembaga-lembaga, dan hubungan-hubungan sosial.
- **Dimensi kultural**: perubahan dalam nilai, norma, dan orientasi hidup.
- **Dimensi individual**: perubahan dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir individu.

2. Teori-Teori Modernisasi

Beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan proses modernisasi:

a. Teori Evolusioner

Teori ini memandang modernisasi sebagai proses evolusi linear dari masyarakat sederhana ke masyarakat kompleks. Auguste Comte menggambarkan perkembangan masyarakat dalam tiga tahap: teologis, metafisik, dan positif. Herbert Spencer membandingkan masyarakat dengan organisme yang berkembang dari sederhana ke kompleks. Dalam pandangan ini, modernisasi adalah takdir semua masyarakat; mereka akan bergerak dari tradisional ke modern, meskipun dengan kecepatan berbeda.

b. Teori Fungsional-Struktural

Talcott Parsons mengembangkan konsep "pattern variables" untuk membedakan masyarakat tradisional dan modern. Masyarakat tradisional dicirikan oleh afektivitas, orientasi kolektif, partikularisme, askripsi, dan kekabaran. Masyarakat modern dicirikan oleh sebaliknya: netralitas afektif, orientasi diri, universalisme, prestasi, dan spesifisitas. Modernisasi adalah pergeseran dari kutub tradisional ke kutub modern dalam kelima variabel ini.

c. Teori Difusi

Teori ini menekankan bahwa modernisasi terjadi melalui difusi (penyebaran) nilai-nilai, teknologi, dan lembaga-lembaga modern dari pusat-pusat modernitas (biasanya negara-negara Barat) ke masyarakat tradisional. Media massa, pendidikan, migrasi, dan investasi asing menjadi saluran difusi utama.

d. Teori Ketergantungan dan Sistem Dunia

Sebagai kritik terhadap teori modernisasi, teori ketergantungan (Andre Gunder Frank) dan teori sistem dunia (Immanuel Wallerstein) berargumen bahwa modernisasi di negara berkembang tidak bisa dipisahkan dari eksploitasi oleh negara maju. Ketergantungan pada pasar global dan investasi asing justru melanggengkan keterbelakangan. Modernisasi tidak selalu membawa kemajuan; ia bisa juga membawa ketimpangan dan ketergantungan.

3. Pengertian Transformasi Sosial

Transformasi sosial adalah perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi masyarakat. Berbeda dengan perubahan sosial biasa yang bisa bersifat parsial, transformasi sosial bersifat total dan menyeluruh, mengubah hampir semua aspek kehidupan.

Piotr Sztompka membedakan tiga tingkat perubahan sosial:

- **Perubahan kecil**: perubahan dalam aspek-aspek tertentu yang tidak mengubah struktur dasar masyarakat.
- **Perubahan besar**: perubahan dalam beberapa aspek yang signifikan, tetapi tidak mengubah keseluruhan.
- **Transformasi**: perubahan fundamental yang mengubah struktur dasar masyarakat, termasuk sistem nilai, lembaga-lembaga utama, dan pola hubungan sosial.

Modernisasi di desa dapat dikategorikan sebagai transformasi sosial karena ia mengubah secara fundamental:

- **Struktur ekonomi**: dari agraris ke industri/jasa.
- **Struktur sosial**: dari komunal ke individualistis, dari hierarkis ke lebih egaliter.
- **Sistem nilai**: dari tradisional ke rasional.

- **Pola hubungan**: dari personal ke impersonal.
- **Mobilitas**: dari menetap ke migran.

C. DIMENSI-DIMENSI TRANSFORMASI SOSIAL DI DESA

Transformasi sosial di desa terjadi dalam berbagai dimensi yang saling terkait.

1. Transformasi Struktur Ekonomi dan Mata Pencaharian

Dimensi paling nyata dari transformasi desa adalah perubahan dalam struktur ekonomi dan mata pencaharian penduduk.

a. Dari Agraris ke Non-Agrarish

Secara tradisional, desa identik dengan pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, atau penggarap. Lahan pertanian adalah sumber utama penghidupan. Siklus hidup diatur oleh musim tanam dan panen. Nilai-nilai dan ritual banyak terkait dengan pertanian.

Namun, modernisasi telah mengubah wajah ini. Di banyak desa, sektor pertanian semakin menyusut. Lahan pertanian berkurang akibat alih fungsi menjadi perumahan, industri, atau infrastruktur. Anak-anak muda tidak lagi tertarik menjadi petani karena dianggap kurang menjanjikan. Mereka lebih memilih bekerja di sektor industri, jasa, atau merantau ke kota.

Data menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu, sektor industri, perdagangan, dan jasa semakin dominan. Desa-desa di sekitar kawasan industri atau destinasi wisata mengalami transformasi paling cepat.

b. Munculnya Sektor Industri

Di desa-desa yang berdekatan dengan kawasan industri, terjadi perubahan besar. Lahan pertanian berubah menjadi pabrik. Penduduk desa yang tadinya petani menjadi buruh pabrik. Mereka bekerja dengan jam tetap, sistem upah, dan hirarki perusahaan. Pola hidup berubah: dari yang mengikuti ritme alam menjadi mengikuti ritme mesin dan jam kerja.

Dampak positif: terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, berkurangnya pengangguran. **Dampak negatif**: hilangnya lahan pertanian, perubahan gaya hidup, potensi eksploitasi buruh.

c. Berkembangnya Sektor Jasa

Di desa-desa yang mengembangkan pariwisata, sektor jasa berkembang pesat. Homestay, rumah makan, pemandu wisata, transportasi, dan kerajinan tangan menjadi sumber pendapatan baru. Petani tidak hanya bertani, tetapi juga menjadi tuan rumah bagi wisatawan. Ibu-ibu rumah tangga bisa mendapatkan penghasilan dari menjual makanan atau kerajinan.

Di Desa Pentingsari, Yogyakarta, misalnya, pengembangan desa wisata telah mengubah mata pencaharian warga. Petani tetap bertani, tetapi juga mengelola homestay. Ibu-ibu aktif di dapur umum dan kelompok

kuliner. Pemuda menjadi pemandu wisata dan pelaku seni pertunjukan. Pendapatan warga meningkat signifikan.

d. Munculnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Modernisasi juga mendorong tumbuhnya UMKM di desa. Akses terhadap teknologi, informasi, dan pasar memungkinkan warga desa mengembangkan usaha kecil-kecilan. Kuliner, kerajinan, fashion, dan produk kreatif lainnya bermunculan. Platform e-commerce dan media sosial membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

e. Urbanisasi dan Migrasi

Salah satu aspek penting transformasi ekonomi adalah meningkatnya mobilitas penduduk. Banyak penduduk desa, terutama generasi muda, memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan atau pendidikan. Ini menciptakan fenomena "desa yang ditinggalkan"—desa dengan populasi usia produktif yang menurun, sementara yang tersisa adalah orang tua dan anak-anak.

Namun, urbanisasi juga membawa dampak balik. Para perantau mengirim uang (remitansi) ke keluarga di desa. Ketika pulang kampung, mereka membawa pengalaman, pengetahuan, dan gaya hidup baru. Mereka bisa menjadi agen perubahan yang memperkenalkan inovasi ke desa.

2. Transformasi Pola Hubungan Sosial dan Sistem Nilai

Dimensi kedua adalah perubahan dalam pola hubungan antarwarga dan sistem nilai yang mendasarinya.

a. Dari Kolektivisme ke Individualisme

Masyarakat desa tradisional sangat kolektif. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sangat kuat. Orang hidup dalam jaringan kekerabatan yang luas. Kepentingan pribadi tunduk pada kepentingan bersama. Sanksi sosial sangat efektif mengendalikan perilaku menyimpang.

Modernisasi membawa nilai-nilai individualisme. Orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga inti. Mereka menghitung untung-rugi dalam setiap tindakan, termasuk dalam hubungan sosial. Gotong royong mulai luntur; orang lebih memilih membayar daripada meluangkan waktu untuk kerja bakti.

Contoh konkret: Dahulu, membangun rumah dilakukan dengan gotong royong (sambatan). Tetangga dan kerabat datang membantu tanpa dibayar. Sekarang, orang lebih memilih menggunakan kontraktor atau tukang bayaran. Alasan utamanya: lebih cepat, lebih profesional, dan tidak perlu repot menyiapkan makanan. Namun, di balik itu, terjadi erosi solidaritas.

b. Dari Partikularisme ke Universalisme

Dalam masyarakat tradisional, perlakuan terhadap orang lain didasarkan pada siapa mereka—apakah keluarga, kerabat, atau orang luar. Perlakuan khusus diberikan kepada mereka yang memiliki ikatan kekerabatan atau kedekatan emosional. Inilah yang disebut partikularisme.

Modernisasi membawa universalisme—perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan standar yang berlaku untuk semua. Dalam transaksi ekonomi, misalnya, orang tidak lagi melihat apakah pembeli

itu saudara atau bukan; yang penting adalah uang dan barang. Dalam rekrutmen kerja, yang penting adalah kualifikasi, bukan hubungan keluarga.

Universalisme membawa keadilan, tetapi juga mengikis ikatan primordial yang selama ini menjadi perekat sosial.

c. Dari Askripsi ke Prestasi

Dalam masyarakat tradisional, status seseorang ditentukan oleh faktor kelahiran (askripsi)—keturunan bangsawan, umur, jenis kelamin. Orang dihormati bukan karena apa yang dicapai, tetapi karena siapa mereka.

Modernisasi membawa pergeseran ke prestasi. Orang dihormati karena pendidikan, kekayaan, atau jabatan yang diraih. Anak petani bisa menjadi pejabat, dokter, atau pengusaha sukses. Status tidak lagi ditentukan oleh garis keturunan.

Ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar. Namun, juga menciptakan tekanan untuk terus berprestasi dan ketidakpastian status.

d. Dari Fatalisme ke Rasionalisme

Masyarakat tradisional cenderung fatalistis—menerima nasib apa adanya. Kegagalan panen dianggap sebagai takdir, bukan akibat kesalahan manusia. Musibah dianggap sebagai hukuman dewa atau roh halus. Sikap ini membuat orang pasif, tidak berusaha memperbaiki nasib.

Modernisasi membawa rasionalisme—keyakinan bahwa manusia dapat mengubah nasibnya melalui usaha dan perencanaan rasional. Petani tidak hanya pasrah pada alam; mereka mencari bibit unggul, pupuk yang tepat, dan teknik baru. Mereka belajar dari kegagalan dan merencanakan masa depan.

Rasionalisme membawa kemajuan, tetapi juga bisa mengikis nilai-nilai spiritual dan hubungan harmonis dengan alam.

e. Dari Religius-Magis ke Sekular

Dalam masyarakat tradisional, hampir semua aspek kehidupan diwarnai oleh kepercayaan religius dan magis. Ritual dilakukan sebelum tanam dan panen. Sesaji diberikan kepada roh penjaga. Tabu dan pantangan mengatur perilaku sehari-hari.

Modernisasi, terutama melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan, membawa sekularisasi. Orang mulai membedakan antara ranah sakral dan profan. Ritual-ritual mulai ditinggalkan atau dijalankan sekadar sebagai tradisi tanpa makna spiritual yang dalam. Ilmu pengetahuan menggantikan takhayul dalam menjelaskan fenomena alam.

Namun, di banyak desa, religiusitas tetap kuat, bahkan kadang menguat sebagai reaksi terhadap modernisasi. Yang terjadi seringkali bukan sekularisasi, tetapi transformasi keberagamaan—agama menjadi lebih personal, lebih sadar, dan lebih terkait dengan etika sosial.

3. Transformasi Gaya Hidup dan Pola Konsumsi

Dimensi ketiga adalah perubahan dalam gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat.

a. Dari Konsumsi Subsisten ke Konsumsi Pasar

Dahulu, masyarakat desa sebagian besar memproduksi sendiri apa yang mereka konsumsi. Mereka menanam padi untuk dimakan, memelihara ayam untuk telur dan daging, membuat sendiri pakaian sederhana. Kebutuhan uang tunai terbatas untuk membeli barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri.

Sekarang, pola konsumsi berubah drastis. Orang lebih suka membeli daripada memproduksi sendiri. Beras tetap dibeli, meskipun mereka petani. Sayur dan lauk dibeli di pasar. Pakaian dibeli jadi. Makanan dan minuman kemasan menjadi konsumsi sehari-hari. Akibatnya, kebutuhan uang tunai meningkat, dan orang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkannya.

b. Dari Produk Lokal ke Produk Global

Pasar desa kini dipenuhi produk-produk dari luar. Mi instan, sosis, nugget, dan makanan olahan lainnya menggeser konsumsi pangan lokal. Pakaian jadi dari kota menggeser pakaian tradisional. Perabot rumah tangga dari pabrik menggeser kerajinan lokal. Media global (TV, internet) memperkenalkan gaya hidup dan produk dari berbagai belahan dunia.

Dampaknya, industri lokal terdesak. Perajin tradisional kesulitan bersaing dengan produk pabrik yang lebih murah dan bervariasi. Pengetahuan tradisional tentang pengolahan pangan dan kerajinan mulai punah.

c. Dari Sederhana ke Konsumtif

Masyarakat desa tradisional hidup sederhana. Kebutuhan terbatas pada sandang, pangan, papan yang memadai. Hidup mewah atau berlebihan dipandang tidak baik, bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

Modernisasi, terutama melalui iklan dan media, mendorong konsumerisme. Orang didorong untuk terus membeli barang-barang baru—ponsel terbaru, motor keren, pakaian branded. Gengsi menjadi ukuran status. Akibatnya, banyak keluarga yang terjerat utang untuk memenuhi gaya hidup konsumtif.

d. Dari Tradisional ke Modern dalam Berpakaian dan Bergaul

Cara berpakaian juga berubah. Pakaian tradisional (sarung, kebaya, ikat kepala) semakin jarang digunakan sehari-hari, hanya untuk acara-acara tertentu. Jeans, kaos, dan pakaian ala selebriti menjadi pakaian sehari-hari, terutama generasi muda. Jilbab model baru, celana ketat, dan pakaian minim menjadi tren yang kadang berbenturan dengan nilai-nilai lokal.

Pola pergaulan juga berubah. Pacaran, yang dulu tabu, kini menjadi hal biasa. Pergaulan bebas, seks pranikah, dan gaya hidup hedonis mulai merambah desa, meskipun masih dalam skala terbatas. Media sosial menjadi arena baru pergaulan, dengan segala risiko dan dampaknya.

e. Dari Hiburan Tradisional ke Hiburan Modern

Hiburan tradisional—wayang, ketoprak, reog, tari-tarian—semakin ditinggalkan. Generasi muda lebih memilih menonton TV, main game online, atau berselancar di media sosial. Acara-acara hajatan lebih sering menampilkan organ tunggal atau band daripada kesenian tradisional.

Padahal, hiburan tradisional tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menanamkan nilai. Wayang, misalnya, mengandung filosofi hidup dan ajaran moral. Kesenian tradisional juga menjadi perekat sosial, mempertemukan warga dari berbagai kalangan.

4. Peningkatan Mobilitas Sosial dan Geografis

Dimensi keempat adalah perubahan dalam mobilitas—baik mobilitas sosial (perubahan status) maupun mobilitas geografis (perpindahan tempat).

a. Mobilitas Sosial Vertikal

Dalam masyarakat tradisional, mobilitas sosial sangat terbatas. Status ditentukan oleh kelahiran. Anak petani akan menjadi petani. Anak bangsawan akan tetap bangsawan. Pendidikan dan kekayaan tidak banyak mengubah status.

Modernisasi membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar. Pendidikan menjadi tangga untuk naik kelas. Anak petani yang berpendidikan bisa menjadi guru, pegawai negeri, atau profesional. Kekayaan juga menjadi sumber status baru. Pedagang sukses atau pengusaha bisa mendapatkan penghormatan setara dengan priyayi.

Namun, mobilitas sosial juga menciptakan ketegangan baru. "Orang baru" yang kaya kadang dipandang rendah oleh "orang lama" yang merasa lebih berdarah. Kecemburuan sosial antara yang berhasil dan yang tidak juga bisa memicu konflik.

b. Mobilitas Geografis: Urbanisasi

Urbanisasi adalah fenomena massal yang mengubah wajah desa. Jutaan penduduk desa, terutama generasi muda, berbondong-bondong ke kota mencari pekerjaan, pendidikan, atau sekadar pengalaman. Desa kehilangan penduduk usia produktif, kreatif, dan energik.

Dampak urbanisasi:

- **Kekosongan generasi**: Desa ditinggalkan oleh generasi muda. Yang tersisa adalah orang tua dan anak-anak. Inovasi mandek, partisipasi lesu.
- **Remitansi**: Para perantau mengirim uang ke keluarga di desa. Remitansi menjadi sumber ekonomi penting bagi banyak desa, bahkan melebihi pendapatan dari sektor pertanian.
- **Perubahan aspirasi**: Keberhasilan para perantau menjadi teladan dan mengubah aspirasi generasi muda. Mereka juga ingin merantau, sekolah tinggi, bekerja di kota.
- **Masuknya ide baru**: Ketika pulang kampung, para perantau membawa ide, pengetahuan, dan gaya hidup baru. Ini menjadi agen perubahan yang memperkenalkan modernisasi ke desa.

c. Mobilitas Sirkuler

Tidak semua perantau menetap di kota. Ada yang melakukan mobilitas sirkuler—pergi ke kota untuk bekerja, pulang kampung secara periodik (lebaran, liburan), lalu kembali lagi ke kota. Pola ini mempertahankan ikatan dengan desa asal, sekaligus memungkinkan akses ke peluang di kota.

Mobilitas sirkuler menciptakan hubungan timbal balik yang intensif antara desa dan kota. Desa tetap menjadi "rumah" yang memberikan identitas dan jaring pengaman sosial. Kota menjadi sumber pendapatan dan pengalaman baru.

d. Migrasi Internasional

Fenomena yang semakin marak adalah migrasi internasional—warga desa bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Mereka pergi ke Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan negara lain untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik, atau pekerja perkebunan.

Migrasi internasional membawa dampak besar:

- **Remitansi besar**: Uang yang dikirim dalam jumlah signifikan, seringkali jauh lebih besar daripada pendapatan di desa.
- **Perubahan sosial**: Keluarga yang ditinggalkan mengalami perubahan struktur dan peran. Ibu atau ayah menjadi orang tua tunggal untuk waktu lama.
- **Masalah sosial**: Tidak jarang terjadi masalah dalam keluarga—perceraian, anak bermasalah, atau kekerasan dalam rumah tangga.
- **Kebanggaan dan status**: Keluarga yang punya TKI/ TKW sering dipandang lebih sukses, meskipun harus membayar mahal dengan perpisahan.

D. DAMPAK TRANSFORMASI SOSIAL: ANALISIS BERIMBANG

Setiap perubahan membawa dampak, ada yang positif dan ada yang negatif. Penting untuk menganalisis secara berimbang agar kita tidak jatuh pada nostalgia masa lalu yang berlebihan atau optimisme buta terhadap modernisasi.

1. Dampak Positif

a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Modernisasi telah membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk desa. Urbanisasi dan migrasi memberikan akses ke pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi. UMKM dan sektor jasa menciptakan lapangan kerja baru. Remitansi dari perantau meningkatkan daya beli keluarga.

Di banyak desa, rumah-rumah kini lebih bagus, terbuat dari bata dan beton, bukan lagi bambu dan kayu. Sepeda motor menjadi alat transportasi utama, menggantikan sepeda atau jalan kaki. Akses terhadap pangan, sandang, dan perumahan yang layak meningkat.

b. Peningkatan Akses Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan meningkat. Orang tua rela berkorban untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Anak-anak desa kini bisa mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi, baik melalui sekolah di kota maupun program jarak jauh.

Pendidikan membuka wawasan, meningkatkan kapasitas, dan menjadi saluran mobilitas sosial. Anak petani bisa menjadi dokter, insinyur, atau pejabat. Ini adalah kemajuan yang patut disyukuri.

c. Peningkatan Akses Kesehatan

Fasilitas kesehatan semakin mudah diakses. Puskesmas, posyandu, dan bidan desa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi, pelayanan ibu hamil, dan penanganan penyakit dasar semakin baik. Angka kematian ibu dan anak menurun. Usia harapan hidup meningkat.

d. Keterbukaan dan Rasionalitas

Modernisasi membuka wawasan masyarakat. Mereka tidak lagi hidup dalam isolasi dan prasangka. Mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih rasional dalam berpikir, dan lebih kritis terhadap kebijakan yang tidak adil. Ini adalah fondasi penting untuk demokrasi dan pembangunan.

e. Pemberdayaan Perempuan

Modernisasi membuka peluang bagi perempuan. Mereka tidak lagi terbatas pada ranah domestik. Perempuan desa kini aktif dalam pendidikan, ekonomi, dan organisasi sosial. Mereka bisa menjadi pengusaha, pemimpin, atau profesional. Ini adalah kemajuan besar dalam kesetaraan gender.

f. Inovasi dan Kreativitas

Kontak dengan dunia luar memicu inovasi dan kreativitas. Petani mencoba teknik baru. Pengrajin mengembangkan desain baru. Pemuda menciptakan konten kreatif. Ekonomi kreatif tumbuh. Desa tidak lagi hanya konsumen, tetapi juga produsen ide dan kreasi.

2. Dampak Negatif

a. Lunturnya Nilai Gotong Royong dan Solidaritas

Dampak negatif yang paling sering disesalkan adalah lunturnya nilai gotong royong. Orang lebih sibuk dengan urusan sendiri, enggan terlibat dalam kegiatan bersama. Ronda malam sepi. Kerja bakti hanya diikuti sedikit orang. Ketika ada tetangga kesusahan, bantuan tidak lagi spontan seperti dulu.

Individualisme meningkat. Orang menghitung untung-rugi dalam setiap tindakan sosial. Hubungan menjadi transaksional. Ini mengikis kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan desa.

b. Kesenjangan Sosial

Modernisasi tidak selalu membawa pemerataan. Justru seringkali menciptakan kesenjangan baru. Yang memiliki akses ke pendidikan, modal, dan jaringan akan maju. Yang tidak memiliki akses akan tertinggal. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar.

Di desa, kesenjangan terlihat jelas. Ada keluarga yang rumahnya megah, mobilnya banyak, anaknya sekolah di kota. Ada keluarga yang masih tinggal di gubuk reyot, anaknya putus sekolah, makan seadanya. Kesenjangan ini bisa memicu kecemburuan sosial dan konflik.

c. Degradasi Lingkungan

Modernisasi seringkali membawa dampak negatif pada lingkungan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri mengurangi lahan produktif. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan merusak tanah dan air. Limbah industri dan rumah tangga mencemari sungai. Sampah plastik menumpuk di mana-mana.

Kerusakan lingkungan pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Petani kehilangan lahan subur. Nelayan kehilangan tangkapan. Warga kekurangan air bersih. Bencana banjir dan longsor semakin sering terjadi.

d. Krisis Identitas dan Nilai

Generasi muda desa hidup dalam tarik-menarik antara dua dunia. Di satu sisi, mereka mewarisi nilai-nilai tradisional dari orang tua. Di sisi lain, mereka terpapar nilai-nilai modern dari media dan pergaulan. Mereka bisa mengalami kebingungan identitas—antara ingin menjadi "orang desa" yang menjunjung tradisi dan ingin menjadi "orang modern" yang dianggap keren.

Krisis nilai ini bisa membuat mereka kehilangan pegangan. Mereka bisa terjerumus pada perilaku menyimpang—tawuran, narkoba, seks bebas—sebagai bentuk pelarian atau pencarian jati diri yang salah arah.

e. Kriminalitas dan Patologi Sosial

Modernisasi juga membawa masalah-masalah sosial baru. Kriminalitas meningkat, termasuk pencurian, narkoba, dan kekerasan. Kenakalan remaja semakin meresahkan. Prostitusi dan seks bebas mulai merambah desa. Konflik antar kelompok, antar dusun, atau antar pendukung politik semakin sering.

Desa tidak lagi menjadi tempat yang aman dan tenteram seperti dulu. Orang harus memasang kunci ganda di rumahnya. Orang tua khawatir melepas anaknya bergaul. Ini adalah harga yang harus dibayar dari modernisasi.

f. Kehilangan Pengetahuan dan Keterampilan Tradisional

Seiring dengan perubahan, banyak pengetahuan dan keterampilan tradisional yang hilang. Cara membuat kerajinan tangan, resep masakan tradisional, pengetahuan tentang tanaman obat, teknik bertani tradisional yang ramah lingkungan—semua itu perlahan punah karena tidak lagi diajarkan dan dipraktikkan.

Generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari tradisi. Mereka menganggapnya kuno dan tidak relevan. Akibatnya, ketika krisis datang—misalnya krisis pangan atau krisis energi—mereka tidak memiliki pengetahuan alternatif yang bisa diandalkan.

E. KETAHANAN DESA: ADAPTASI TANPA KEHILANGAN IDENTITAS

Meskipun modernisasi membawa perubahan besar, desa tidak serta-merta kehilangan identitasnya. Banyak desa yang menunjukkan ketahanan luar biasa, mampu mengadaptasi nilai-nilai baru tanpa harus kehilangan jati diri.

1. Sinkretisme Nilai

Yang terjadi seringkali bukan pergantian total nilai lama dengan nilai baru, melainkan sinkretisme—perpaduan antara keduanya. Nilai-nilai modern diadopsi, tetapi tetap dalam bingkai nilai tradisional. Gotong royong mungkin luntur dalam bentuk aslinya, tetapi muncul dalam bentuk baru: arisan, kelompok usaha bersama, atau penggalangan dana online. Individualisme tidak sepenuhnya menggantikan kolektivisme; orang tetap peduli pada tetangga, meskipun dengan cara yang berbeda.

2. Revitalisasi Tradisi

Di banyak desa, terjadi revitalisasi tradisi. Tradisi-tradisi yang mulai ditinggalkan dihidupkan kembali, tetapi dengan kemasan baru yang lebih menarik. Upacara adat dikemas sebagai atraksi wisata. Kesenian tradisional dikolaborasikan dengan musik modern. Bahasa daerah diajarkan di sekolah sebagai muatan lokal.

Revitalisasi ini tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memberi nilai ekonomi. Tradisi yang semula hanya ritual, kini bisa menjadi sumber pendapatan. Ini adalah adaptasi cerdas terhadap modernisasi.

3. Penguatan Identitas Komunal

Ironisnya, modernisasi justru bisa memicu penguatan identitas komunal. Ketika terhadapan dengan budaya global, orang merasa perlu untuk menegaskan identitas lokalnya. Ini terlihat dalam berbagai gerakan "kembali ke desa", "kembali ke tradisi", atau "cinta produk lokal".

Di beberapa desa, terjadi penguatan kelembagaan adat. Hukum adat kembali diberlakukan. Upacara adat semakin meriah. Bahasa daerah semakin dibanggakan. Ini adalah respons terhadap ancaman homogenisasi budaya.

4. Inovasi Lokal

Desa juga menunjukkan kemampuan berinovasi. Mereka tidak hanya menerima teknologi dan ide dari luar, tetapi juga menciptakan inovasi lokal yang sesuai dengan konteks mereka. Teknologi tepat guna dikembangkan untuk mengatasi masalah spesifik. Model ekonomi berbasis komunitas (seperti BUMDes) diciptakan untuk memperkuat ekonomi lokal. Sistem pertanian berkelanjutan dikembangkan untuk mengatasi degradasi lingkungan.

Inovasi lokal ini membuktikan bahwa modernisasi tidak harus berarti westernisasi. Desa dapat memilih dan memilah apa yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhannya.

5. Komunitas Digital

Di era digital, muncul bentuk baru komunitas desa—komunitas digital. Warga desa terhubung dalam grup WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya. Mereka berbagi informasi, berkoordinasi, dan saling mendukung melalui platform digital. Komunitas digital ini memperkuat ikatan sosial yang mungkin mulai longgar dalam interaksi fisik.

Perantau juga terhubung melalui komunitas digital. Mereka tetap mengikuti perkembangan desa, memberikan masukan, dan berkontribusi meskipun berada jauh. Ini adalah bentuk baru solidaritas yang melampaui batas geografis.

F. STUDI KASUS: TRANSFORMASI DI BEBERAPA DESA

1. Desa Pentingsari, Yogyakarta: Modernisasi Berbasis Tradisi

Desa Pentingsari di Sleman, Yogyakarta, adalah contoh sukses transformasi desa yang memadukan modernitas dan tradisi. Desa yang tadinya pertanian biasa, kini menjadi desa wisata terkenal.

Transformasi ekonomi: Petani tidak hanya bertani, tetapi juga mengelola homestay, menjadi pemandu wisata, pelaku seni pertunjukan, dan pengrajin cenderamata. Pendapatan meningkat, lapangan kerja terbuka.

Transformasi sosial: Gotong royong tetap hidup, tetapi dalam bentuk baru. Warga bekerjasama mengelola homestay, berbagi tamu, dan bersama-sama menjaga kualitas pelayanan. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi wadah organisasi yang memperkuat solidaritas.

Pelestarian tradisi: Kesenian tradisional tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan sebagai atraksi wisata. Upacara adat tetap dilaksanakan. Nilai-nilai keramahan dan kesederhanaan dijaga.

Pentingsari membuktikan bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan tradisi. Desa bisa maju secara ekonomi tanpa kehilangan jati diri.

2. Desa Ponggok, Klaten: Digitalisasi Desa

Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, adalah contoh transformasi melalui digitalisasi. Desa ini terkenal dengan wisata airnya yang dikelola oleh BUMDes. Namun, yang membedakan adalah pemanfaatan teknologi digital secara intensif.

Transformasi ekonomi: BUMDes mengembangkan aplikasi untuk memudahkan reservasi homestay dan tiket wisata. Pemuda desa mengelola media sosial dan website desa untuk promosi. Pemasaran digital memperluas jangkauan pasar.

Transformasi sosial: Informasi desa tersedia secara online, meningkatkan transparansi. Warga terhubung dalam grup WhatsApp, memudahkan koordinasi. Pemuda yang melek teknologi menjadi motor penggerak.

Inovasi: Desa mengembangkan sistem informasi desa (SID) yang terintegrasi, memudahkan pelayanan publik dan administrasi.

Ponggok menunjukkan bahwa modernisasi teknologi dapat menjadi peluang, bukan ancaman. Dengan memanfaatkan teknologi secara cerdas, desa dapat melompat maju.

3. Desa Bayan, Lombok: Bertahan di Tengah Arus

Desa Bayan di Lombok Utara adalah desa adat yang masih kuat memegang tradisi. Masyarakatnya tetap menjalankan ritual adat, menggunakan bahasa lokal, dan mempertahankan arsitektur tradisional. Namun, mereka tidak anti-modernitas.

Adaptasi ekonomi: Kopi lokal dikembangkan dengan teknik modern, dikemas menarik, dan dipasarkan secara online. Homestay dikelola untuk wisatawan yang ingin merasakan kehidupan desa adat.

Selektif terhadap perubahan: Masyarakat menerima teknologi yang bermanfaat (ponsel, internet, alat pertanian modern), tetapi menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan adat. Mereka tetap menjalankan ritual, meskipun wisatawan hadir.

Penguatan identitas: Tradisi justru diperkuat sebagai daya tarik wisata. Upacara adat dikemas sebagai atraksi, tetapi tidak kehilangan kesakralannya.

Bayan menunjukkan bahwa desa dapat bersikap selektif terhadap modernisasi. Mereka yang memiliki identitas kuat tidak mudah tergoyahkan.

G. RANGKUMAN

Transformasi sosial di era modernisasi adalah perubahan fundamental yang dialami desa-desa di Indonesia. Proses ini mencakup perubahan dalam struktur ekonomi, pola hubungan sosial, sistem nilai, gaya hidup, dan mobilitas penduduk.

Modernisasi adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ia mencakup dimensi struktural (perubahan organisasi sosial), kultural (perubahan nilai), dan individual (perubahan sikap). Teori-teori modernisasi memberikan berbagai perspektif, dari yang evolusioner hingga yang kritis.

Transformasi sosial di desa terjadi dalam berbagai dimensi:

1. **Transformasi struktur ekonomi dan mata pencaharian**: dari agraris ke non-agraris, munculnya sektor industri dan jasa, berkembangnya UMKM, serta meningkatnya urbanisasi dan migrasi.
2. **Transformasi pola hubungan sosial dan sistem nilai**: dari kolektivisme ke individualisme, dari partikularisme ke universalisme, dari askripsi ke prestasi, dari fatalisme ke rasionalisme, dan dari religius-magis ke sekular.
3. **Transformasi gaya hidup dan pola konsumsi**: dari konsumsi subsisten ke konsumsi pasar, dari produk lokal ke produk global, dari sederhana ke konsumtif, dari tradisional ke modern dalam berpakaian dan bergaul, serta dari hiburan tradisional ke hiburan modern.
4. **Peningkatan mobilitas sosial dan geografis**: mobilitas sosial vertikal melalui pendidikan dan kekayaan, urbanisasi massal, mobilitas sirkuler, serta migrasi internasional.

Dampak positif dari transformasi ini meliputi: peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, keterbukaan dan rasionalitas, pemberdayaan perempuan, serta inovasi dan kreativitas.

Dampak negatif meliputi: lunturnya nilai gotong royong dan solidaritas, kesenjangan sosial, degradasi lingkungan, krisis identitas dan nilai, kriminalitas dan patologi sosial, serta kehilangan pengetahuan dan keterampilan tradisional.

Meskipun menghadapi berbagai dampak negatif, desa menunjukkan **ketahanan** yang luar biasa. Mereka melakukan sinkretisme nilai, revitalisasi tradisi, penguatan identitas komunal, inovasi lokal, dan membentuk komunitas digital. Mereka mampu mengadaptasi nilai-nilai baru tanpa harus kehilangan identitasnya sepenuhnya.

Studi kasus dari Desa Pentingsari (modernisasi berbasis tradisi), Desa Ponggok (digitalisasi desa), dan Desa Bayan (selektif terhadap perubahan) menunjukkan bahwa tidak ada jalan tunggal dalam menghadapi modernisasi. Setiap desa dapat menemukan jalannya sendiri, sesuai dengan potensi, nilai, dan konteksnya.

Pada akhirnya, transformasi sosial bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau ditolak. Ia adalah keniscayaan sejarah. Yang penting adalah bagaimana masyarakat desa dapat mengelola transformasi ini secara sadar, memilih dan memilah apa yang baik bagi mereka, serta mempertahankan jati diri di tengah arus perubahan. Desa yang kuat adalah desa yang mampu berubah tanpa kehilangan akar.

H. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana perubahan ekonomi yang paling mencolok di desa Anda dalam 10-20 tahun terakhir? Apakah sektor pertanian masih dominan, atau sudah bergeser ke sektor lain?
2. Apakah nilai gotong royong masih kuat di desa Anda? Jika mulai luntur, faktor apa yang menyebabkan? Jika masih kuat, dalam bentuk apa saja?
3. Bagaimana pengaruh media sosial dan internet terhadap gaya hidup dan pola pergaulan generasi muda di desa Anda?
4. Apakah banyak warga desa Anda yang merantau ke kota atau ke luar negeri? Bagaimana dampaknya terhadap desa—ekonomi, sosial, budaya?
5. Menurut Anda, apa dampak positif terbesar dari modernisasi bagi desa Anda? Apa dampak negatif terbesarnya?
6. Apakah di desa Anda ada upaya untuk melestarikan tradisi di tengah arus modernisasi? Seperti apa bentuknya?
7. Bagaimana cara terbaik agar generasi muda tetap mencintai desa dan budayanya di tengah godaan modernitas?
8. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk mengelola dampak negatif modernisasi dan memperkuat dampak positifnya?

BAB XXI

PENGARUH TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DI DESA

A. PENGANTAR: DESA DALAM GUMPALAN DIGITAL

Jika kita melakukan perjalanan ke desa-desa di Indonesia saat ini, pemandangan yang akan kita saksikan sangat berbeda dengan dua dekade lalu. Di warung-warung kopi, sekelompok pemuda duduk bersama, masing-masing sibuk dengan ponsel pintarnya. Di sawah, seorang petani di sela-sela pekerjaannya sesekali membuka ponsel untuk mengecek harga komoditas. Di pasar desa, pedagang memasang poster bertuliskan nomor WhatsApp dan akun media sosial. Anak-anak sekolah asyik menonton YouTube atau bermain game online. Ini adalah wajah baru desa di era digital.

Revolusi digital telah merambah hingga ke pelosok desa. Internet, telepon seluler, dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengubah cara masyarakat desa berkomunikasi, mengakses informasi, bertransaksi, dan bahkan berpikir. Desa yang dulu terisolasi kini terhubung dengan jaringan global. Informasi dari belahan dunia mana pun dapat diakses dalam hitungan detik. Produk-produk desa dapat dipasarkan hingga ke luar negeri melalui platform e-commerce.

Namun, seperti dua sisi mata uang, digitalisasi juga membawa tantangan dan risiko. Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Tidak semua memiliki keterampilan untuk memanfaatkannya secara optimal. Tidak semua pengaruhnya positif—berita bohong, penipuan online, dan lunturnya interaksi tatap muka adalah ancaman nyata.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang pengaruh teknologi dan digitalisasi di desa. Kita akan memulai dengan memotret kondisi terkini penetrasi teknologi di desa. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai pemanfaatan teknologi untuk pembangunan desa: Sistem Informasi Desa (SID) untuk pelayanan publik, e-commerce dan pemasaran digital untuk UMKM, akses informasi dan pengetahuan untuk petani dan nelayan, serta pendidikan dan kesehatan berbasis digital. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis tantangan-tantangan serius yang menyertai digitalisasi: kesenjangan digital (digital divide), maraknya hoaks dan penipuan online, serta potensi lunturnya interaksi sosial langsung, serta strategi untuk mengatasinya.

B. REVOLUSI DIGITAL: MENJEJAKI DESA

1. Penetrasi Teknologi di Desa

Dalam dua dekade terakhir, penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di desa mengalami lonjakan yang luar biasa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan tren yang terus meningkat.

a. Kepemilikan Telepon Seluler

Telepon seluler, terutama ponsel pintar (smartphone), telah menjadi barang yang hampir dimiliki setiap keluarga. Harganya yang semakin terjangkau, ditambah dengan maraknya ponsel bekas berkualitas, membuat akses terhadap perangkat ini semakin luas. Di banyak desa, bahkan anak-anak usia SD sudah memiliki ponsel sendiri.

b. Akses Internet

Jaringan internet semakin menjangkau wilayah pedesaan. Program pemerintah seperti Palapa Ring yang membangun infrastruktur serat optik di seluruh Indonesia telah memperluas akses. Operator seluler juga terus memperluas jangkauan 4G mereka ke daerah-daerah terpencil. Meskipun masih ada desa-desa yang blank spot, secara umum akses internet semakin mudah.

c. Penggunaan Media Sosial

Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap warga desa yang memiliki ponsel pintar memiliki akun media sosial. Mereka menggunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kerabat; untuk mengakses informasi dan hiburan; untuk berbelanja dan berjualan; bahkan untuk urusan pemerintahan.

d. Transformasi Warung Kopi

Warung kopi, yang dulu menjadi tempat ngobrol santai, kini bertransformasi menjadi "warnet" informal. Banyak warung yang menyediakan Wi-Fi gratis untuk menarik pengunjung. Para pemuda nongkrong sambil main game online, nonton YouTube, atau berselancar di media sosial.

2. Faktor Pendorong Digitalisasi Desa

Beberapa faktor mendorong cepatnya digitalisasi di desa:

a. Infrastruktur yang Semakin Baik

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah dan swasta telah memperluas jangkauan sinyal. Program Palapa Ring, pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station), dan perluasan jaringan 4G menjadi faktor utama.

b. Harga Perangkat yang Terjangkau

Ponsel pintar entry-level dapat dibeli dengan harga yang relatif terjangkau. Pasar ponsel bekas juga berkembang pesat, memungkinkan warga dengan anggaran terbatas tetap bisa memiliki perangkat.

c. Konten yang Menarik

Konten-konten di media sosial dan YouTube sangat beragam dan menarik. Hiburan, informasi, tutorial, berita, gosip selebriti—semua tersedia. Ini menjadi daya tarik kuat, terutama bagi generasi muda.

d. Kebutuhan Komunikasi dengan Perantau

Banyak keluarga desa memiliki anggota keluarga yang merantau di kota atau luar negeri. Aplikasi pesan instan dan video call menjadi kebutuhan untuk tetap terhubung. Ini menjadi salah satu pendorong utama adopsi teknologi.

e. Dukungan Pemerintah dan Program Digitalisasi

Pemerintah melalui berbagai program mendorong digitalisasi desa. Program Desa Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan berbagai pelatihan lainnya turut mempercepat adopsi teknologi.

3. Profil Pengguna Teknologi di Desa

Pengguna teknologi di desa tidak homogen. Ada beberapa segmen dengan karakteristik berbeda:

a. Generasi Muda (Digital Natives)

Mereka yang lahir di era digital sangat akrab dengan teknologi. Ponsel dan internet adalah bagian dari kehidupan mereka sejak kecil. Mereka cepat mengadopsi aplikasi baru, aktif di media sosial, dan mahir mencari informasi online. Kelompok ini menjadi motor digitalisasi di desa.

b. Generasi Dewasa (Digital Migrants)

Mereka yang lahir sebelum era digital, tetapi belajar dan beradaptasi. Mereka mungkin tidak secekatan generasi muda, tetapi mampu menggunakan teknologi untuk kebutuhan tertentu—komunikasi dengan keluarga, cek harga, atau media sosial terbatas.

c. Kelompok Marjinal (Digital Excluded)

Mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi. Bisa karena faktor usia (lansia), ekonomi (tidak mampu membeli perangkat), pendidikan (buta huruf digital), atau geografis (tinggal di daerah blank spot). Mereka berisiko tertinggal dalam era digital.

C. PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Digitalisasi membuka peluang luar biasa untuk mempercepat pembangunan desa. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk memanfaatkan teknologi bagi kemajuan desa.

1. Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) adalah platform digital yang mengintegrasikan berbagai data dan layanan desa. SID dapat diakses melalui website atau aplikasi, baik oleh perangkat desa maupun masyarakat umum.

a. Manfaat SID untuk Administrasi Kependudukan

- **Database penduduk terintegrasi**: Data kependudukan tersimpan rapi, mudah diakses, dan dapat diperbarui secara real-time.
- **Layanan administrasi online**: Warga dapat mengajukan pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, surat keterangan, dan dokumen lainnya secara online, tanpa harus datang ke kantor desa.
- **Tracking status pengajuan**: Warga dapat memantau status pengajuan mereka secara online.

b. Manfaat SID untuk Pengelolaan Keuangan Desa

- **Transparansi anggaran**: APBDes, realisasi anggaran, dan laporan keuangan dapat dipublikasikan secara online, dapat diakses oleh siapa saja.
- **Efisiensi pengelolaan**: Pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik.
- **Memudahkan pelaporan**: Laporan keuangan dapat disusun secara otomatis dari data yang terinput.

c. Manfaat SID untuk Perencanaan Pembangunan

- **Data perencanaan terintegrasi**: RPJMDes, RKPDes, dan usulan dari dusun terdokumentasi dengan baik.
- **Partisipasi warga**: Warga dapat memberikan masukan dan usulan secara online.
- **Monitoring proyek**: Perkembangan proyek pembangunan dapat dipantau secara online, lengkap dengan foto dan dokumentasi.

d. Manfaat SID untuk Pelayanan Publik

- **Informasi publik**: Informasi tentang program desa, jadwal kegiatan, pengumuman, dan berita desa dapat diakses masyarakat.
- **Pengaduan masyarakat**: Warga dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi melalui fitur pengaduan online.
- **Forum diskusi**: Warga dapat berdiskusi tentang berbagai isu desa secara online.

Contoh implementasi SID: Di Desa Ponggok, Klaten, SID telah diimplementasikan dengan baik. Warga dapat mengakses berbagai informasi, mengurus administrasi secara online, dan memantau pengelolaan keuangan desa. Ini meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

2. Digital Marketing dan E-commerce untuk UMKM

Salah satu dampak terbesar digitalisasi adalah terbukanya akses pasar bagi produk-produk UMKM desa.

a. Platform E-commerce

UMKM desa kini dapat menjual produknya melalui berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Ini membuka akses ke pasar nasional, bahkan internasional, tanpa harus memiliki toko fisik di kota-kota besar.

Contoh: Produk kopi dari Desa Bayan, Lombok, dipasarkan melalui platform e-commerce hingga ke berbagai kota di Indonesia. Produk kerajinan dari desa-desa di Bali dan Jawa juga merambah pasar global melalui platform seperti Etsy atau Amazon.

b. Media Sosial sebagai Etalase

Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi etalase digital yang efektif. UMKM dapat mempromosikan produk mereka dengan foto dan video yang menarik, berinteraksi langsung dengan calon pembeli, dan membangun brand awareness.

c. Pemasaran Digital (Digital Marketing)

Pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai teknik pemasaran digital:

- **Search Engine Optimization (SEO)** : membuat konten yang mudah ditemukan di mesin pencari.
- **Social Media Marketing**: mempromosikan produk melalui media sosial.
- **Influencer Marketing**: bekerjasama dengan influencer lokal untuk mempromosikan produk.
- **Email Marketing**: membangun database pelanggan dan mengirimkan promosi berkala.

d. Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital seperti e-wallet (GoPay, OVO, Dana, LinkAja) dan mobile banking memudahkan transaksi. Pelanggan dapat membayar secara online, tanpa perlu transfer manual. Ini meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan.

e. Logistik dan Pengiriman

Kemitraan dengan jasa ekspedisi seperti JNE, J&T, SiCepat, dan lainnya memudahkan pengiriman produk ke seluruh Indonesia. Beberapa platform e-commerce bahkan menyediakan layanan logistik terintegrasi.

3. Akses Informasi dan Pengetahuan

Internet membuka akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap informasi dan pengetahuan.

a. Informasi Pertanian

Petani dapat mengakses informasi tentang:

- **Harga komoditas** secara real-time, membantu mereka menentukan waktu terbaik untuk menjual.
- **Teknik budidaya** modern, seperti penggunaan bibit unggul, pengendalian hama terpadu, dan pertanian organik.
- **Prakiraan cuaca**, membantu mereka merencanakan masa tanam dan panen.
- **Program pemerintah**, seperti bantuan bibit, pupuk bersubsidi, dan penyuluhan.

b. Informasi Perikanan dan Kelautan

Nelayan dapat mengakses informasi tentang:

- **Prakiraan cuaca dan gelombang laut**, meningkatkan keselamatan melaut.
- **Harga ikan** di berbagai tempat pelelangan.
- **Teknik budidaya** perikanan yang lebih efisien.
- **Daerah penangkapan ikan** potensial.

c. Informasi Kesehatan

Masyarakat dapat mengakses informasi tentang:

- **Penyakit dan cara pencegahannya**.
- **Gizi dan pola makan sehat**.
- **Kesehatan ibu dan anak**.
- **Layanan kesehatan** yang tersedia.

d. Informasi Pendidikan

Siswa dan mahasiswa dapat mengakses:

- **Materi pembelajaran online** melalui platform seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, atau Zenius.
- **Video tutorial** di YouTube tentang berbagai mata pelajaran.
- **Jurnal dan publikasi ilmiah**.
- **Informasi beasiswa** dan peluang studi lanjut.

e. Informasi Pemerintahan dan Kebijakan

Masyarakat dapat mengakses informasi tentang:

- **Program-program pemerintah** di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pusat.
- **Peraturan perundang-undangan** yang relevan.
- **Hak-hak warga negara** dan cara mengaksesnya.

4. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Digital

Digitalisasi membuka peluang baru dalam pendidikan dan pelatihan.

a. Pendidikan Jarak Jauh

Anak-anak desa kini dapat mengakses pendidikan berkualitas melalui program pendidikan jarak jauh. Platform pembelajaran online menyediakan materi dari guru-guru terbaik, video pembelajaran interaktif, dan latihan soal.

b. Kursus Online

Berbagai platform kursus online seperti Coursera, Udemy, dan Skill Academy menyediakan pelatihan dalam berbagai bidang: digital marketing, desain grafis, pemrograman, fotografi, bahasa asing, dan lain-lain. Warga desa dapat meningkatkan keterampilan mereka tanpa harus meninggalkan desa.

c. Webinar dan Seminar Online

Webinar (seminar online) menjadi semakin populer. Warga desa dapat mengikuti seminar dari para ahli di berbagai bidang, tanpa harus bepergian ke kota. Topiknya beragam: pertanian, kesehatan, kewirausahaan, pengembangan diri, dan lain-lain.

d. Konten Edukatif di Media Sosial

Banyak kreator konten yang membuat video edukatif di YouTube, TikTok, dan Instagram. Topiknya mulai dari sains, sejarah, keterampilan praktis, hingga pengembangan diri. Ini menjadi sumber belajar informal yang efektif.

5. Layanan Kesehatan Berbasis Digital (Telemedicine)

Digitalisasi juga merambah layanan kesehatan melalui telemedicine.

a. Konsultasi Online

Warga desa dapat berkonsultasi dengan dokter secara online melalui aplikasi seperti Halodoc, Alodokter, atau layanan telemedicine lainnya. Ini sangat membantu bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

b. Informasi Kesehatan Online

Masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan yang akurat dari sumber terpercaya. Mereka bisa mencari tahu tentang gejala penyakit, cara pencegahan, dan pengobatan yang tepat.

c. Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak

Beberapa aplikasi menyediakan informasi dan pengingat untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak. Ini membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak di desa.

d. Monitoring Penyakit

Data kesehatan dapat dikumpulkan dan dianalisis secara digital, membantu pemerintah dan tenaga kesehatan memantau penyebaran penyakit dan merencanakan intervensi yang tepat.

6. Pertanian Berbasis Teknologi (Agroteknologi)

Teknologi digital juga merambah sektor pertanian melalui berbagai inovasi.

a. Internet of Things (IoT) untuk Pertanian

Sensor-sensor dapat dipasang di lahan pertanian untuk memantau kelembaban tanah, suhu, dan kebutuhan air. Data ini dikirim ke ponsel petani, membantu mereka mengatur irigasi secara efisien.

b. Drone untuk Pemetaan dan Penyemprotan

Drone dapat digunakan untuk memetakan lahan pertanian, memantau kesehatan tanaman, dan bahkan menyemprotkan pupuk atau pestisida secara presisi.

c. Aplikasi Pertanian

Berbagai aplikasi pertanian tersedia untuk membantu petani: aplikasi identifikasi hama penyakit, aplikasi jadwal tanam, aplikasi perhitungan pupuk, dan lain-lain.

d. Pasar Online untuk Hasil Pertanian

Platform khusus untuk hasil pertanian seperti TaniHub, Sayurbox, atau e-commerce lainnya mempertemukan petani langsung dengan konsumen atau pengecer, memotong rantai distribusi yang panjang.

7. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Digital

Desa-desa wisata memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan pengelolaan.

a. Promosi melalui Media Sosial

Akun Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube digunakan untuk mempromosikan keindahan alam, keunikan budaya, dan atraksi wisata desa. Konten visual yang menarik menjadi daya tarik utama.

b. Platform Pemesanan Online

Wisatawan dapat memesan homestay, tiket wisata, dan paket perjalanan secara online melalui website desa, aplikasi, atau platform kerjasama dengan agen perjalanan online (OTA) seperti Traveloka, Agoda, atau Airbnb.

c. Digitalisasi Pengelolaan

Pengelolaan homestay, jadwal kunjungan, dan keuangan wisata dapat dilakukan secara digital. Ini meningkatkan efisiensi dan transparansi.

D. TANTANGAN DIGITALISASI DI DESA

Di balik berbagai peluang dan manfaat, digitalisasi juga membawa tantangan serius yang perlu diantisipasi.

1. Kesenjangan Digital (Digital Divide)

Kesenjangan digital adalah kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan teknologi dengan mereka yang tidak. Kesenjangan ini terjadi dalam beberapa dimensi:

a. Kesenjangan Akses Infrastruktur

Tidak semua desa memiliki akses internet yang memadai. Desa-desa terpencil, terutama di wilayah pegunungan, pulau terluar, atau daerah perbatasan, masih banyak yang blank spot. Sinyal internet lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, warga di desa-desa ini tidak dapat menikmati manfaat digitalisasi.

b. Kesenjangan Ekonomi

Tidak semua warga mampu membeli perangkat yang memadai. Ponsel pintar dan paket data masih menjadi beban ekonomi bagi keluarga miskin. Mereka mungkin harus memilih antara membeli pulsa atau membeli beras. Akibatnya, akses terhadap teknologi menjadi privilese, bukan hak.

c. Kesenjangan Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bijak. Tidak semua warga memilikinya. Orang tua, lansia, dan mereka dengan pendidikan rendah mungkin tidak tahu cara menggunakan aplikasi, mencari informasi yang benar, atau melindungi diri dari penipuan online. Mereka rentan tertinggal.

d. Kesenjangan Gender

Perempuan di desa seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi dibanding laki-laki. Norma budaya, beban ganda, dan prioritas keluarga bisa menjadi penghambat. Akibatnya, potensi perempuan untuk memanfaatkan teknologi tidak optimal.

e. Kesenjangan Generasi

Generasi muda (digital natives) jauh lebih mahir menggunakan teknologi daripada generasi tua (digital migrants). Ini bisa menciptakan ketegangan antar generasi. Anak muda mungkin frustrasi karena orang tua tidak paham teknologi. Orang tua mungkin merasa kehilangan otoritas karena anak lebih pintar.

2. Maraknya Berita Bohong (Hoaks) dan Disinformasi

Kemudahan menyebarkan informasi di media sosial juga berarti kemudahan menyebarkan berita bohong.

a. Kerentanan Masyarakat Desa

Masyarakat desa, dengan tingkat literasi digital yang mungkin lebih rendah, sangat rentan terhadap hoaks. Mereka mungkin tidak terbiasa memverifikasi informasi, tidak tahu cara mengecek fakta, dan cenderung percaya pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka.

b. Dampak Hoaks

Hoaks dapat berdampak serius:

- **Kesehatan**: Hoaks tentang vaksin, pengobatan, atau COVID-19 dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
- **Politik**: Hoaks politik dapat memecah belah masyarakat, memicu konflik, dan merusak demokrasi.
- **Sosial**: Hoaks tentang isu SARA dapat memicu permusuhan antar kelompok.
- **Ekonomi**: Hoaks tentang produk tertentu dapat merugikan pelaku usaha.

c. Faktor Penyebab

Beberapa faktor menyebabkan hoaks mudah menyebar di desa:

- **Rendahnya literasi digital**.
- **Kuatnya ikatan sosial**: Orang cenderung percaya informasi yang dibagikan oleh keluarga atau teman.
- **Kurangnya akses ke sumber informasi terpercaya**.
- **Emosi dan sentimen**: Hoaks sering dirancang untuk membangkitkan emosi—marah, takut, benci—yang membuat orang kurang rasional.

3. Penipuan Online dan Kejahatan Digital

Digitalisasi juga membuka peluang bagi kejahatan.

a. Jenis Penipuan Online

- **Phishing**: Penipuan yang mengelabui korban untuk memberikan data pribadi (password, nomor rekening) melalui website palsu atau email tipuan.
- **Penipuan belanja online**: Penjual fiktif menawarkan barang murah, setelah uang dikirim, barang tidak datang.
- **Penipuan investasi**: Tawaran investasi dengan imbal hasil tidak wajar, yang ternyata skema ponzi atau penipuan.
- **Penipuan lowongan kerja**: Tawaran kerja dengan gaji besar, korban diminta membayar biaya pendaftaran atau pelatihan.
- **Penipuan pinjaman online ilegal**: Pinjaman online dengan bunga sangat tinggi dan cara penagihan yang tidak manusiawi.

b. Kerentanan Masyarakat Desa

Masyarakat desa rentan terhadap penipuan online karena:

- **Kurangnya pengetahuan** tentang modus penipuan.
- **Kebutuhan ekonomi**: Godaan untuk mendapatkan uang cepat atau barang murah sangat kuat.
- **Kepercayaan yang tinggi**: Orang desa cenderung lebih percaya pada orang lain, termasuk pada penjual online yang tidak dikenal.

c. Dampak Penipuan

Korban penipuan bisa kehilangan tabungan, terlilit utang, bahkan mengalami trauma psikologis. Penipuan juga merusak kepercayaan terhadap teknologi dan ekonomi digital.

4. Lunturnya Interaksi Sosial Langsung

Salah satu kekhawatiran terbesar tentang digitalisasi adalah potensi lunturnya interaksi sosial langsung.

a. Fenomena "Mati Gaya"

Di warung kopi, orang duduk bersama tetapi masing-masing sibuk dengan ponselnya. Mereka tidak saling bicara, hanya sesekali menatap layar. Ini fenomena yang semakin umum di desa. Interaksi tatap muka berkurang, digantikan oleh interaksi virtual.

b. Dampak pada Gotong Royong

Gotong royong dan kegiatan kolektif lainnya bisa terpengaruh. Orang lebih memilih berselancar di dunia maya daripada ikut kerja bakti. Ronda malam sepi. Pertemuan RT/RW jarang dihadiri. Solidaritas sosial yang dibangun melalui interaksi langsung mulai tergerus.

c. Dampak pada Anak dan Remaja

Anak-anak dan remaja menghabiskan banyak waktu di depan layar. Mereka kurang bergerak, kurang bermain di luar, dan kurang berinteraksi dengan teman sebaya secara langsung. Ini bisa berdampak pada kesehatan fisik (obesitas, gangguan mata), kesehatan mental (kecanduan, kecemasan), dan perkembangan sosial (kurang empati, kurang keterampilan sosial).

d. Dampak pada Keluarga

Anggota keluarga, terutama anak dan orang tua, bisa menjadi asing satu sama lain. Makan bersama, waktu ngobrol, dan aktivitas bersama berkurang. Setiap orang sibuk dengan dunia mayanya sendiri.

5. Kecanduan Gawai dan Media Sosial

Kecanduan gawai dan media sosial adalah masalah nyata, terutama di kalangan generasi muda.

a. Gejala Kecanduan

- Menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar.
- Merasa cemas atau gelisah jika tidak bisa mengakses ponsel.
- Mengabaikan tugas, pekerjaan, atau kewajiban karena main ponsel.
- Gangguan tidur karena begadang main game atau scroll media sosial.

b. Dampak Kecanduan

- **Kesehatan fisik**: Gangguan mata, sakit leher, obesitas karena kurang gerak.
- **Kesehatan mental**: Kecemasan, depresi, rendah diri, terutama karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial.
- **Prestasi belajar menurun**.
- **Konflik keluarga** karena penggunaan ponsel yang berlebihan.

6. Konten Negatif dan Pornografi

Akses internet yang bebas juga membuka pintu bagi konten negatif, termasuk pornografi.

a. Kemudahan Akses

Anak-anak dan remaja dengan mudah dapat mengakses konten pornografi melalui internet. Tanpa pengawasan dan filter yang memadai, mereka bisa terpapar konten yang tidak sesuai usia.

b. Dampak Pornografi

Pornografi dapat merusak perkembangan psikoseksual anak, membentuk pemahaman yang keliru tentang seks dan relasi, serta mendorong perilaku seksual berisiko. Di desa yang masih memegang nilai-nilai tradisional dan agama, ini bisa menjadi masalah serius.

7. Polarisasi dan Radikalisasi Online

Media sosial juga menjadi sarana penyebaran paham radikal dan polarisasi.

a. Polarisasi Sosial

Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan keyakinan pengguna, menciptakan "gelembung filter" (filter bubble). Akibatnya, orang semakin terkunci dalam pandangannya sendiri, sulit menerima perbedaan, dan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah.

b. Radikalisasi

Kelompok radikal memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham mereka, merekrut anggota baru, dan memprovokasi kekerasan. Remaja dan pemuda yang sedang mencari identitas rentan menjadi target.

8. Ketergantungan pada Teknologi Asing

Sebagian besar platform digital yang digunakan di desa adalah produk perusahaan asing (Google, Facebook, WhatsApp, TikTok, dll). Ini menimbulkan kekhawatiran tentang:

- **Kedaulatan data**: Data warga desa disimpan di server luar negeri.
- **Ketergantungan ekonomi**: Uang yang dibelanjakan untuk iklan dan transaksi online sebagian besar mengalir ke perusahaan asing.
- **Pengaruh budaya**: Konten yang didominasi budaya asing dapat mengikis nilai-nilai lokal.

E. STRATEGI MENGATASI TANTANGAN DIGITALISASI

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan bahwa digitalisasi membawa manfaat maksimal dengan risiko minimal.

1. Memperluas Akses Infrastruktur Digital

Pemerintah perlu terus memperluas akses infrastruktur digital ke seluruh pelosok desa.

a. Program Palapa Ring dan Perluasan Jaringan

Program Palapa Ring yang membangun infrastruktur serat optik di seluruh Indonesia perlu dilanjutkan dan diperluas. Pemerintah juga perlu mendorong operator seluler untuk membangun BTS di daerah terpencil, mungkin dengan skema subsidi atau kewajiban layanan universal (universal service obligation).

b. Penyediaan Akses Publik

Di desa-desa yang belum terjangkau jaringan atau warganya belum mampu membeli perangkat pribadi, perlu disediakan akses publik. Balai desa, sekolah, perpustakaan desa, atau pusat-pusat komunitas dapat dilengkapi dengan komputer dan koneksi internet gratis.

c. Subsidi Perangkat

Pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan perangkat bagi keluarga miskin, siswa berprestasi, atau kelompok rentan lainnya. Program seperti ini sudah ada di beberapa daerah dan perlu diperluas.

2. Meningkatkan Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, kritis, dan aman. Ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki semua warga di era digital.

a. Pendidikan Literasi Digital di Sekolah

Kurikulum sekolah perlu memasukkan materi literasi digital. Anak-anak perlu diajarkan tentang:

- Cara mencari informasi yang benar.
- Cara mengecek fakta (fact-checking).
- Etika berkomunikasi di media sosial.
- Keamanan digital (password, privasi).
- Bahaya hoaks, penipuan online, dan konten negatif.

b. Pelatihan Literasi Digital untuk Masyarakat Umum

Pemerintah desa, bersama dengan dinas terkait, LSM, atau perguruan tinggi, perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat umum. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta:

- Untuk pemula: cara menggunakan ponsel, aplikasi dasar, berkomunikasi dengan keluarga.
- Untuk menengah: cara berjualan online, membuat konten, menggunakan media sosial untuk promosi.
- Untuk lanjutan: keamanan digital, manajemen data, pengembangan aplikasi sederhana.

c. Kampanye Publik tentang Bahaya Hoaks dan Penipuan

Kampanye publik melalui berbagai media (spanduk, poster, siaran radio desa, media sosial) perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoaks dan penipuan online. Masyarakat perlu diedukasi tentang ciri-ciri hoaks, cara memverifikasi informasi, dan modus-modus penipuan.

d. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat berperan penting dalam meningkatkan literasi digital. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan literasi digital dalam pengajian, ceramah, atau pertemuan-pertemuan masyarakat. Karena mereka dipercaya, pesan mereka lebih mudah diterima.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif digitalisasi.

a. Regulasi tentang Konten Negatif

Regulasi tentang konten negatif (pornografi, kekerasan, radikalisme) perlu diperkuat dan ditegakkan. Platform digital harus bertanggung jawab atas konten yang ada di platform mereka dan wajib memblokir konten negatif.

b. Penegakan Hukum terhadap Penipuan Online

Aparat penegak hukum perlu serius menangani kasus penipuan online. Pelaku harus ditindak tegas. Masyarakat perlu diedukasi tentang cara melaporkan penipuan.

c. Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diimplementasikan secara efektif. Masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan data pribadi oleh platform digital atau pihak lain.

4. Penguatan Interaksi Sosial Langsung

Digitalisasi tidak boleh menggantikan interaksi sosial langsung; ia harus menjadi pelengkap.

a. Menghidupkan Kembali Kegiatan Komunitas

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu terus menghidupkan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan warga secara langsung: kerja bakti, gotong royong, ronda malam, pengajian, arisan, olahraga bersama, dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan ini penting untuk memelihara kohesi sosial.

b. Kampanye "Digital Detox"

Kampanye untuk mengurangi waktu di depan layar dan lebih banyak berinteraksi langsung perlu dilakukan. Keluarga didorong untuk memiliki waktu bebas gawai, misalnya saat makan bersama atau di akhir pekan.

c. Ruang Publik yang Nyaman

Desa perlu menyediakan ruang publik yang nyaman untuk berinteraksi: taman, lapangan, balai pertemuan, tempat duduk di bawah pohon rindang. Ruang publik yang nyaman akan menarik warga untuk berkumpul dan berinteraksi.

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Penguatan Nilai Lokal

Alih-alih mengikis nilai lokal, teknologi dapat digunakan untuk memperkuatnya.

a. Digitalisasi Budaya Lokal

Budaya lokal—cerita rakyat, tarian, musik, upacara adat, bahasa daerah—dapat didokumentasikan dan dipromosikan melalui media digital. Konten digital tentang budaya lokal dapat menarik minat generasi muda dan wisatawan.

b. Konten Kreatif Berbasis Nilai Lokal

Pemuda desa dapat didorong untuk menciptakan konten kreatif (video, musik, tulisan) yang mengangkat nilai-nilai lokal. Ini bisa menjadi alternatif hiburan yang lebih sehat dan mendidik daripada konten asing.

c. Platform Digital untuk Produk Lokal

Pengembangan platform digital khusus untuk produk-produk lokal (pasar desa online) dapat memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada platform asing.

6. Pemberdayaan Kelompok Rentan

Kelompok rentan—perempuan, lansia, difabel, masyarakat miskin—perlu mendapat perhatian khusus dalam program digitalisasi.

a. Pelatihan Khusus

Pelatihan literasi digital yang dirancang khusus untuk kelompok rentan, dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan mereka.

b. Pendampingan

Pendampingan berkelanjutan untuk membantu kelompok rentan mengadopsi dan memanfaatkan teknologi.

c. Konten yang Ramah

Pengembangan konten digital yang ramah bagi kelompok rentan, misalnya dengan teks besar untuk lansia, audio untuk tunanetra, atau bahasa sederhana untuk yang kurang berpendidikan.

7. Kolaborasi Multipihak

Mengatasi tantangan digitalisasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

a. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat menyediakan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur. Pemerintah daerah mengimplementasikan program-program di tingkat lokal.

b. Swasta

Perusahaan teknologi dapat berkontribusi melalui program CSR, pelatihan, atau penyediaan platform yang aman dan ramah.

c. LSM dan Organisasi Masyarakat

LSM dapat melakukan advokasi, pendampingan, dan pendidikan literasi digital.

d. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian, pengembangan teknologi tepat guna, dan program pengabdian masyarakat.

e. Komunitas dan Tokoh Masyarakat

Komunitas lokal dan tokoh masyarakat berperan penting dalam sosialisasi dan pendampingan di tingkat akar rumput.

F. STUDI KASUS: DIGITALISASI DI DESA

1. Desa Ponggok, Klaten: Digitalisasi Pelayanan Publik dan Ekonomi

Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, adalah contoh sukses digitalisasi desa. Desa ini terkenal dengan wisata airnya yang dikelola oleh BUMDes. Namun, yang membedakan adalah pemanfaatan teknologi digital secara intensif.

Sistem Informasi Desa (SID) : Desa Ponggok mengembangkan SID yang terintegrasi. Warga dapat mengakses berbagai informasi, mengurus administrasi secara online, dan memantau pengelolaan keuangan desa. Transparansi meningkat, partisipasi masyarakat juga meningkat.

Digitalisasi Pengelolaan Wisata: Pengelolaan wisata menggunakan aplikasi yang memudahkan reservasi, pembayaran, dan pelaporan. Data pengunjung, pendapatan, dan kepuasan wisatawan terdokumentasi dengan baik.

Pemasaran Digital: Promosi wisata dilakukan melalui media sosial dan website. Konten visual yang menarik di Instagram dan TikTok berhasil menarik banyak wisatawan.

Dampak: Pendapatan desa meningkat, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin melek teknologi. Ponggok menjadi contoh desa digital yang sukses.

2. Desa Bayan, Lombok: Pemasaran Digital Produk Lokal

Desa Bayan di Lombok Utara adalah desa adat yang kuat memegang tradisi. Namun, mereka tidak anti-modernitas. Mereka memanfaatkan digitalisasi untuk mempromosikan produk lokal.

Kopi Bayan: Kopi lokal dikemas dengan baik dan dipasarkan secara online melalui platform e-commerce dan media sosial. Produknya kini dikenal hingga ke luar daerah, bahkan ada yang diekspor.

Kerajinan Tenun: Tenun khas Bayan juga dipasarkan secara online. Foto-foto produk yang menarik di Instagram dan Facebook menarik minat pembeli dari berbagai kota.

Wisata Budaya: Upacara adat dan atraksi budaya dipromosikan melalui media sosial. Wisatawan datang untuk menyaksikan keunikan budaya Bayan.

Dampak: Pendapatan masyarakat meningkat, produk lokal dikenal luas, dan yang terpenting, digitalisasi tidak mengikis nilai-nilai tradisional. Masyarakat justru semakin bangga dengan budayanya.

3. Desa di Kecamatan Plakat Tinggi: Program Pemberdayaan Digital

Di Desa Plakat Tinggi, program pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan literasi digital dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pelatihan Literasi Digital: Masyarakat dilatih menggunakan ponsel pintar, mengakses internet, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha.

Teknologi Tepat Guna: Program memperkenalkan teknologi ramah lingkungan seperti biogas dan panel surya, serta mengajarkan cara menggunakan perangkat digital untuk memantau dan mengelolanya.

Dampak: Masyarakat tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan.

4. Desa Pandansari, Malang: Digitalisasi Pertanian

Di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, digitalisasi merambah sektor pertanian melalui program dari Universitas Brawijaya.

Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan: Petani tidak hanya dilatih tentang pertanian organik, tetapi juga tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk mengakses informasi, memantau harga, dan memasarkan produk.

Pemasaran Online: Hasil pertanian, terutama kopi, dipasarkan melalui platform online. Petani belajar membuat foto produk yang menarik dan mempromosikannya di media sosial.

Dampak: Pengetahuan petani meningkat, pendapatan naik, dan lahan pertanian mulai pulih.

G. RANGKUMAN

Revolusi digital telah merambah hingga ke pelosok desa. Internet, telepon seluler, dan media sosial telah mengubah cara masyarakat desa berkomunikasi, mengakses informasi, dan bertransaksi. Desa yang dulu terisolasi kini terhubung dengan jaringan global.

Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan desa sangat beragam:

1. **Sistem Informasi Desa (SID)** untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi keuangan, dan perencanaan pembangunan.
2. **Digital marketing dan e-commerce** untuk memperluas akses pasar UMKM, dari tingkat lokal hingga global.
3. **Akses informasi dan pengetahuan** yang melimpah bagi petani, nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
4. **Pendidikan dan pelatihan berbasis digital** yang membuka akses pembelajaran berkualitas tanpa batas geografis.
5. **Layanan kesehatan berbasis digital (telemedicine)** yang memudahkan akses konsultasi dokter.
6. **Pertanian berbasis teknologi (agroteknologi)** seperti IoT, drone, dan aplikasi pertanian.
7. **Pengembangan desa wisata berbasis digital** melalui promosi media sosial dan platform pemesanan online.

Namun, **digitalisasi juga membawa tantangan serius**:

1. **Kesenjangan digital (digital divide)** dalam berbagai dimensi: akses infrastruktur, ekonomi, literasi digital, gender, dan generasi.
2. **Maraknya berita bohong (hoaks)** yang dapat merugikan kesehatan, politik, dan kohesi sosial.
3. **Penipuan online** yang merugikan secara ekonomi dan psikologis.
4. **Lunturnya interaksi sosial langsung** yang mengancam gotong royong dan solidaritas.
5. **Kecanduan gawai dan media sosial** yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental.
6. **Konten negatif dan pornografi** yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.
7. **Polarisasi dan radikalisasi online** yang memecah belah masyarakat.
8. **Ketergantungan pada teknologi asing** yang mengancam kedaulatan data dan ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan **strategi komprehensif**:

1. **Memperluas akses infrastruktur digital** melalui program pemerintah, penyediaan akses publik, dan subsidi perangkat.
2. **Meningkatkan literasi digital** melalui pendidikan di sekolah, pelatihan masyarakat, kampanye publik, dan pemberdayaan tokoh masyarakat.
3. **Penguatan regulasi dan penegakan hukum** untuk melindungi masyarakat dari konten negatif dan kejahatan digital.
4. **Penguatan interaksi sosial langsung** melalui kegiatan komunitas, kampanye digital detox, dan penyediaan ruang publik yang nyaman.
5. **Pemanfaatan teknologi untuk penguatan nilai lokal** melalui digitalisasi budaya dan pengembangan konten kreatif berbasis nilai lokal.
6. **Pemberdayaan kelompok rentan** melalui pelatihan khusus, pendampingan, dan konten yang ramah.
7. **Kolaborasi multipihak** antara pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.

Studi kasus dari berbagai desa—Ponggok, Bayan, Plakat Tinggi, Pandansari—menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi berkah jika dikelola dengan baik. Desa-desa ini berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa kehilangan jati diri. Mereka menjadi contoh bahwa desa tidak harus menjadi konsumen pasif teknologi, tetapi dapat menjadi produsen inovasi dan kreativitas.

Pada akhirnya, digitalisasi bukanlah tujuan, tetapi alat. Ia bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Tugas kita adalah memastikan bahwa teknologi digital melayani manusia, bukan sebaliknya. Tugas kita adalah memanfaatkannya untuk memperkuat, bukan merusak, nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kebersamaan. Di desa, di mana nilai-nilai itu masih kuat, kita memiliki peluang untuk menciptakan model digitalisasi yang manusiawi dan berkelanjutan.

H. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana kondisi akses internet dan penggunaan teknologi digital di desa Anda? Apakah semua warga memiliki akses yang sama? Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang tertinggal?
2. Apakah desa Anda sudah memiliki Sistem Informasi Desa (SID)? Jika ya, seberapa efektif penggunaannya? Apakah masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah?
3. Bagaimana pengalaman UMKM di desa Anda dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran? Apa kendala yang dihadapi?
4. Pernahkah Anda atau warga di desa Anda mengalami penipuan online atau terpapar berita bohong (hoaks)? Bagaimana dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana dampak media sosial terhadap interaksi sosial di desa Anda? Apakah gotong royong dan kegiatan bersama masih kuat, atau mulai tergerus?
6. Apakah ada program atau pelatihan literasi digital di desa Anda? Jika ya, siapa yang menyelenggarakan dan bagaimana efektivitasnya?
7. Bagaimana peran generasi muda dalam digitalisasi desa? Apakah mereka menjadi motor penggerak atau justru terjerumus dalam dampak negatif?
8. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan desa Anda untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal sekaligus melindungi diri dari dampak negatifnya?

BAB XXII

EKONOMI SOSIAL DAN KEMANDIRIAN DESA

A. PENGANTAR: MEMBANGUN EKONOMI DARI AKAR RUMPUT

Selama berpuluh-puluh tahun, pembangunan ekonomi desa seringkali dipahami sebagai proses yang digerakkan dari luar. Investasi asing, perusahaan besar, dan program-program top-down dianggap sebagai mesin utama pertumbuhan. Desa diposisikan sebagai objek yang pasif, penerima manfaat dari kebijakan yang dirancang di kota. Paradigma ini terbukti tidak berkelanjutan. Desa tetap miskin meskipun sumber dayanya dikeruk. Ketergantungan pada pihak luar semakin kuat. Kesenjangan antara desa dan kota semakin melebar.

Paradigma baru pembangunan desa menekankan pada kemandirian. Desa harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mengelola potensi yang dimilikinya, dan menentukan arah ekonominya. Kemandirian bukan berarti isolasi. Desa tetap dapat berinteraksi dengan dunia luar, tetapi atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. Desa adalah subjek, bukan objek. Desa adalah pemilik, bukan sekadar penonton.

Ekonomi sosial menjadi fondasi bagi kemandirian desa. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mengejar keuntungan individu, ekonomi sosial menekankan pada prinsip kolektivitas, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Keuntungan bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dalam ekonomi sosial, masyarakat adalah pemilik sekaligus penentu kebijakan ekonomi.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang ekonomi sosial dan kemandirian desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep ekonomi sosial dan ekonomi kerakyatan sebagai landasan teoretis. Selanjutnya, kita akan membahas dua pilar utama ekonomi desa: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kita akan mengeksplorasi peran vital UMKM dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, serta strategi pengembangannya. Kita juga akan membahas BUMDes sebagai instrumen kelembagaan desa untuk mengelola potensi ekonomi secara profesional, dengan berbagai bidang usaha yang dapat dikembangkan. Pada bagian akhir, kita akan membahas indikator kemandirian desa, terutama Pendapatan Asli Desa (PADes), serta strategi untuk mencapainya.

B. MEMAHAMI EKONOMI SOSIAL DAN EKONOMI KERAKYATAN

1. Pengertian Ekonomi Sosial

Ekonomi sosial adalah pendekatan ekonomi yang menempatkan kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama di atas akumulasi keuntungan individu. Ia menekankan pada nilai-nilai kolektivitas, solidaritas, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan.

Beberapa karakteristik ekonomi sosial:

- **Kepemilikan kolektif**: Aset ekonomi dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, bukan oleh individu atau kelompok kecil.
- **Pengelolaan partisipatif**: Keputusan ekonomi diambil secara demokratis, melibatkan seluruh anggota.
- **Orientasi sosial**: Tujuan utama bukan keuntungan finansial, tetapi pemenuhan kebutuhan anggota dan kesejahteraan bersama.
- **Keberlanjutan**: Kegiatan ekonomi dirancang untuk berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- **Solidaritas**: Ada mekanisme untuk saling membantu dan melindungi anggota yang lemah.

Bentuk-bentuk ekonomi sosial antara lain koperasi, koperasi simpan pinjam, kelompok usaha bersama, arisan, lumbung pangan, dan BUMDes.

2. Ekonomi Kerakyatan: Landasan Filosofis Indonesia

Ekonomi kerakyatan adalah konsep yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Konsep ini tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Mubyarto, tokoh ekonomi kerakyatan Indonesia, mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Dalam ekonomi kerakyatan, rakyat adalah pemilik dan penentu kebijakan ekonomi. Mereka berpartisipasi aktif dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka juga menikmati hasilnya secara adil.

Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan:

- **Berpihak pada rakyat**: Kebijakan ekonomi harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elite atau pemilik modal.
- **Kekeluargaan dan gotong royong**: Semangat kerjasama dan saling membantu menjadi landasan kegiatan ekonomi.
- **Demokrasi ekonomi**: Rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi dan menikmati hasilnya.
- **Kemandirian**: Ekonomi harus dibangun di atas kekuatan sendiri, tidak tergantung pada pihak luar.
- **Berkeadilan**: Distribusi pendapatan dan kekayaan harus adil, tidak timpang.

Ekonomi kerakyatan menjadi landasan filosofis bagi pengembangan ekonomi desa. Koperasi, BUMDes, dan UMKM adalah perwujudan konkret dari ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

3. Perbedaan Ekonomi Sosial dengan Ekonomi Kapitalis

Aspek	Ekonomi Kapitalis	Ekonomi Sosial
Tujuan	Akumulasi keuntungan individu	Kesejahteraan bersama
Kepemilikan	Pribadi/swasta	Kolektif/bersama
Pengelolaan	Hierarkis, top-down	Partisipatif, demokratis
Distribusi	Berdasarkan modal	Berdasarkan kebutuhan dan kontribusi
Nilai dasar	Kompetisi, individualism	Solidaritas, kolektivisme
Keberlanjutan	Sering mengabaikan dampak sosial dan lingkungan	Memperhatikan dampak sosial dan lingkungan

4. Relevansi Ekonomi Sosial untuk Desa

Ekonomi sosial sangat relevan untuk desa karena:

a. Sesuai dengan Nilai-Nilai Lokal

Masyarakat desa memiliki nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas yang kuat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip ekonomi sosial. Koperasi, arisan, dan kelompok usaha bersama adalah bentuk-bentuk ekonomi yang sudah lama dikenal dan dipraktikkan di desa.

b. Mengurangi Ketergantungan pada Pihak Luar

Dengan membangun ekonomi sosial yang kuat, desa dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar—tengkulak, rentenir, atau perusahaan besar. Desa memiliki kontrol atas sumber daya ekonominya sendiri.

c. Mencegah Kesenjangan

Ekonomi sosial mendorong distribusi yang lebih adil. Keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi dirasakan oleh seluruh anggota. Ini mencegah kesenjangan sosial yang tajam.

d. Membangun Ketahanan Ekonomi

Dalam krisis, ekonomi sosial lebih tangguh karena berbasis pada solidaritas dan saling membantu. Ketika anggota kesulitan, ada mekanisme untuk menolongnya. Ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang cenderung individualistis.

C. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DESA

UMKM adalah tulang punggung ekonomi desa. Mereka menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjadi sumber pendapatan bagi jutaan keluarga.

1. Peran Vital UMKM Desa

a. Penyerap Tenaga Kerja

UMKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di desa. Berbeda dengan industri besar yang padat modal, UMKM bersifat padat karya. Mereka memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan tinggi atau pendidikan formal, termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

b. Menggerakkan Ekonomi Lokal

UMKM menciptakan siklus ekonomi di tingkat lokal. Petani menjual hasilnya ke pengolah, pengolah menjual ke pedagang, pedagang menjual ke konsumen. Uang berputar di desa, tidak langsung mengalir ke kota. Ini memperkuat ekonomi lokal.

c. Melestarikan Pengetahuan dan Keterampilan Lokal

Banyak UMKM berbasis pada pengetahuan dan keterampilan tradisional: membuat kerajinan, mengolah makanan, membatik, menenun. Dengan mengembangkan UMKM, pengetahuan dan keterampilan ini tetap hidup dan diwariskan.

d. Menjadi Katup Pengaman Ekonomi

Dalam krisis ekonomi, UMKM sering menjadi katup pengaman. Ketika industri besar merumahkan pekerja, UMKM masih bisa bertahan. Ketika orang kehilangan pekerjaan, mereka bisa memulai usaha kecil-kecilan.

e. Mendorong Inovasi dan Kreativitas

UMKM, terutama yang dikelola generasi muda, menjadi wadah inovasi dan kreativitas. Mereka menciptakan produk-produk baru, mengembangkan desain kekinian, dan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.

2. Jenis-Jenis UMKM Desa

UMKM desa sangat beragam, tergantung pada potensi lokal:

a. UMKM Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian

- Petani padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan.
- Pengolah hasil pertanian: keripik pisang, sale pisang, sirup jahe, abon lele, bakso ikan, dll.
- Produk olahan: tepung mocaf, minyak kelapa, gula aren, kopi bubuk.

b. UMKM Peternakan dan Pengolahan Hasil Peternakan

- Peternak ayam, kambing, sapi, kelinci.
- Pengolah hasil peternakan: abon sapi, dendeng, telur asin, susu segar, yogurt.

c. UMKM Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan

- Nelayan, pembudidaya ikan, rumput laut.
- Pengolah hasil perikanan: ikan asin, ikan asap, bakso ikan, nugget ikan, kerupuk ikan.

d. UMKM Kerajinan

- Anyaman bambu, rotan, pandan.
- Kerajinan kayu, ukiran.
- Batik, tenun, sulaman.
- Kerajinan dari bahan daur ulang.

e. UMKM Kuliner dan Jasa Makanan

- Warung makan, rumah makan.
- Jajanan pasar, kue kering.
- Katering untuk acara.

f. UMKM Jasa

- Salon, tata rias.
- Bengkel, servis elektronik.
- Jasa fotografi, videografi.
- Jasa desain grafis, percetakan.

g. UMKM Pariwisata

- Homestay, penginapan.
- Pemandu wisata.
- Penyewaan alat wisata.
- Atraksi seni dan budaya.

3. Tantangan UMKM Desa

UMKM desa menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya:

a. Keterbatasan Modal

Modal adalah masalah klasik UMKM. Mereka kesulitan mengakses kredit perbankan karena tidak memiliki agunan atau rekam jejak usaha yang terdokumentasi. Mereka sering terjebak pada rentenir dengan bunga tinggi yang justru mematikan usaha.

b. Keterbatasan Akses Pasar

Produk UMKM sering kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Mereka hanya menjual di pasar lokal dengan harga rendah. Mereka tidak memiliki akses ke supermarket, hotel, atau pasar modern lainnya. Mereka juga kesulitan bersaing dengan produk pabrikan yang lebih murah.

c. Keterbatasan Teknologi

Banyak UMKM masih menggunakan teknologi tradisional yang tidak efisien. Mereka belum memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, pembukuan, atau manajemen usaha.

d. Keterbatasan Manajemen

Pengelolaan usaha masih bersifat tradisional. Pembukuan sederhana, bahkan tidak ada. Keuangan pribadi dan usaha tercampur. Perencanaan usaha lemah. Ini menyulitkan pengembangan dan akses ke permodalan.

e. Keterbatasan SDM

Keterampilan pengelola UMKM terbatas. Mereka mungkin ahli dalam memproduksi, tetapi lemah dalam pemasaran, keuangan, atau manajemen. Pendidikan rendah dan minimnya pelatihan menjadi penyebab.

f. Perizinan dan Legalitas

Banyak UMKM yang tidak memiliki izin usaha atau sertifikasi produk (PIRT, halal, SNI). Ini menyulitkan mereka untuk masuk ke pasar modern atau mengikuti tender.

g. Ketergantungan pada Tengkulak

Di sektor pertanian dan perikanan, tengkulak memainkan peran penting. Mereka menyediakan modal, tetapi dengan syarat petani/nelayan harus menjual hasilnya kepada mereka dengan harga yang seringkali rendah. Ini menciptakan ketergantungan yang merugikan.

4. Strategi Penguatan UMKM Desa

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif:

a. Fasilitasi Akses Modal

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** : Pemerintah perlu mempermudah akses KUR bagi UMKM desa, dengan prosedur sederhana dan bunga ringan.
- **Lembaga Keuangan Mikro**: Mengembangkan lembaga keuangan mikro (koperasi simpan pinjam, BUMDes simpan pinjam) yang melayani UMKM dengan persyaratan ringan.
- **Dana Desa**: Mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk modal usaha kelompok atau pinjaman bergulir bagi UMKM.
- **Skema Pembiayaan Alternatif**: Crowdfunding, modal ventura, atau kemitraan dengan investor.

b. Fasilitasi Akses Pasar

- **Pemasaran Digital**: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk memanfaatkan e-commerce dan media sosial.
- **Kemitraan dengan Korporasi**: Memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan hotel, restoran, supermarket, atau perusahaan.
- **Pameran dan Expo**: Mengikutsertakan UMKM dalam pameran di tingkat lokal, regional, dan nasional.
- **Branding dan Kemasan**: Pendampingan dalam pengembangan merek, desain kemasan yang menarik, dan cerita produk (storytelling).
- **Sertifikasi**: Membantu UMKM mendapatkan sertifikasi PIRT, halal, SNI, dan lainnya.

c. Peningkatan Kapasitas

- **Pelatihan Teknis**: Pelatihan produksi, pengolahan, pengemasan, dan pengendalian kualitas.
- **Pelatihan Manajemen**: Pelatihan pembukuan sederhana, manajemen keuangan, perencanaan usaha.
- **Pelatihan Digital Marketing**: Pelatihan fotografi produk, pembuatan konten, pengelolaan media sosial, dan e-commerce.
- **Pendampingan Berkelanjutan**: Pendampingan usaha oleh tenaga ahli atau fasilitator.

d. Penguatan Kelembagaan

- **Kelompok Usaha Bersama (KUBE)** : Memfasilitasi pembentukan KUBE agar UMKM dapat bekerjasama, saling belajar, dan mengakses program bersama.
- **Koperasi**: Mengembangkan koperasi sebagai wadah UMKM untuk pengadaan bahan baku bersama, pemasaran bersama, dan akses modal bersama.
- **BUMDes sebagai Induk UMKM**: BUMDes dapat berperan sebagai induk yang memayungi UMKM, menyediakan layanan pendukung, dan membantu pemasaran.

e. Perbaikan Infrastruktur dan Logistik

- **Infrastruktur dasar**: Jalan, listrik, air bersih, dan internet yang memadai sangat penting bagi UMKM.
- **Fasilitas bersama**: Rumah produksi bersama, gudang pendingin, atau alat produksi bersama yang dapat digunakan UMKM dengan biaya terjangkau.
- **Logistik**: Kemitraan dengan jasa ekspedisi untuk memudahkan pengiriman produk.

D. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BUMDes adalah instrumen kelembagaan desa untuk mengelola potensi ekonomi secara profesional. Ia adalah "perusahaan desa" yang dapat bergerak di berbagai bidang usaha.

1. Landasan Hukum dan Filosofi BUMDes

BUMDes didirikan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021** tentang BUMDes. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mengelola potensi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Filosofi BUMDes adalah:

- **Dari desa, oleh desa, untuk desa**. BUMDes adalah milik desa, dikelola oleh putra-putri desa, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- **Profesional tetapi berpihak**. BUMDes harus dikelola secara profesional, tetapi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
- **Menggali potensi lokal**. BUMDes mengembangkan usaha yang berbasis pada potensi desa—sumber daya alam, sumber daya manusia, atau kearifan lokal.
- **Membangun kemandirian**. BUMDes adalah instrumen untuk mengurangi ketergantungan desa pada pihak luar.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes

- **Koperatif**: BUMDes dikelola dengan semangat kerjasama, partisipasi, dan gotong royong.
- **Partisipatif**: Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- **Emansipatif**: BUMDes memberdayakan masyarakat, tidak menciptakan ketergantungan.
- **Transparan**: Pengelolaan BUMDes harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Akuntabel**: Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
- **Sustainable**: Usaha BUMDes harus berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

BUMDes dapat bergerak di berbagai bidang, sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa:

a. BUMDes Simpan Pinjam

BUMDes menyediakan layanan simpan pinjam bagi warga. Ini membantu masyarakat mengakses modal dengan bunga ringan, tanpa harus ke rentenir. Contoh: BUMDes Sumber Rejeki di Desa Kemadohbatur, Semarang, yang mengelola unit simpan pinjam dengan omzet miliaran rupiah.

b. BUMDes Usaha Bersama

BUMDes mengelola usaha bersama di berbagai sektor:

- **Pertanian**: Pengadaan saprodi (bibit, pupuk) bersama, pengolahan hasil pertanian, pemasaran bersama.

- **Peternakan**: Pengadaan pakan, pengolahan hasil peternakan, pemasaran.
- **Perikanan**: Pengadaan benih, pakan, pengolahan, pemasaran.

c. BUMDes Pengelola Pasar Desa

BUMDes mengelola pasar desa, memungut retribusi, merawat fasilitas pasar, dan mengembangkan pasar. Ini meningkatkan pendapatan asli desa dan kualitas layanan pasar.

d. BUMDes Pengelola Sumber Daya Alam

BUMDes mengelola potensi sumber daya alam desa: air bersih, hutan desa, tambang galian C, atau wisata alam. Contoh: BUMDes di Desa Ponggok, Klaten, yang mengelola wisata air dan menjadi salah satu BUMDes tersukses di Indonesia.

e. BUMDes Pengelola Wisata Desa

BUMDes mengembangkan dan mengelola destinasi wisata desa: homestay, paket wisata, atraksi budaya, kuliner, dan oleh-oleh. Contoh: BUMDes di Desa Pentingsari, Yogyakarta, yang mengelola desa wisata.

f. BUMDes Jasa

BUMDes menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat:

- **Transportasi**: menyediakan angkutan desa, persewaan kendaraan.
- **Air bersih**: mengelola penyediaan air bersih.
- **Persewaan alat**: menyewakan alat pertanian, alat pesta, sound system.
- **Jasa keamanan**: menyediakan jasa keamanan lingkungan.
- **Jasa kebersihan**: mengelola sampah dan kebersihan lingkungan.

g. BUMDes Perdagangan

BUMDes menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, atau menjadi distributor produk-produk tertentu. Ini membantu menstabilkan harga dan menyediakan barang kebutuhan dengan mudah.

h. BUMDes Induk UMKM

BUMDes berperan sebagai induk yang memayungi UMKM desa. BUMDes menyediakan layanan:

- **Pemasaran**: memasarkan produk UMKM melalui toko BUMDes atau platform online.
- **Modal**: menyediakan pinjaman modal dengan bunga ringan.
- **Pendampingan**: memberikan pelatihan dan pendampingan usaha.
- **Fasilitas**: menyediakan fasilitas bersama seperti rumah produksi, alat produksi, atau gudang.

4. Faktor Keberhasilan BUMDes

Tidak semua BUMDes berhasil. Banyak yang gagal karena berbagai faktor. Berdasarkan pengalaman dari BUMDes yang sukses, beberapa faktor keberhasilan dapat diidentifikasi:

a. Profesionalisme Pengelola

BUMDes harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Mereka harus memiliki pengetahuan manajemen, keuangan, dan pemasaran. Mereka juga harus jujur dan dapat dipercaya. Pengelola BUMDes tidak boleh ditunjuk berdasarkan "balas budi" politik, tetapi berdasarkan kompetensi.

b. Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah desa harus mendukung BUMDes, tetapi tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan operasional. Dukungan bisa berupa modal awal, fasilitas, dan pembinaan. Namun, campur tangan berlebihan justru bisa merusak profesionalisme.

c. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus merasa memiliki BUMDes. Mereka dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Partisipasi masyarakat juga berarti menggunakan layanan BUMDes dan membeli produk BUMDes.

d. Pemilihan Bidang Usaha yang Tepat

BUMDes harus memilih bidang usaha yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan pasar. Jangan asal memilih usaha yang sedang tren, tanpa mempertimbangkan kesiapan. Riset pasar dan analisis kelayakan usaha sangat penting.

e. Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

BUMDes harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Laporan keuangan harus dibuat secara teratur dan dipublikasikan. Pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah desa harus berjalan efektif.

f. Inovasi dan Adaptasi

BUMDes harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Produk dan layanan harus terus dikembangkan. Pemasaran harus memanfaatkan teknologi digital. Manajemen harus terus belajar.

g. Jejaring dan Kemitraan

BUMDes harus membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak: pemerintah daerah, perusahaan swasta (CSR), perbankan, LSM, dan BUMDes lain. Kemitraan ini membuka akses ke modal, pasar, teknologi, dan pengetahuan.

5. Contoh BUMDes Sukses

a. BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten

BUMDes ini mengelola wisata air Umbul Ponggok yang terkenal. Selain itu, mereka juga mengelola homestay, restoran, toko oleh-oleh, dan unit simpan pinjam. Pendapatan BUMDes mencapai miliaran rupiah per tahun. Sebagian pendapatan disetor ke desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), sebagian lagi untuk pengembangan usaha dan dividen bagi warga.

Faktor sukses: Pengelola profesional, dukungan penuh pemerintah desa, partisipasi masyarakat, inovasi terus-menerus, dan pemasaran digital yang agresif.

b. BUMDes Sumber Rejeki, Desa Kemadohbatur, Semarang

BUMDes ini awalnya hanya mengelola unit simpan pinjam. Kini berkembang mengelola berbagai unit: air bersih, pasar desa, persewaan alat pesta, dan perdagangan. Omzet simpan pinjam mencapai miliaran rupiah. BUMDes ini sangat membantu masyarakat mengakses modal tanpa harus ke rentenir.

Faktor sukses: Kepercayaan masyarakat tinggi, pengelola jujur dan profesional, tata kelola transparan, dan diversifikasi usaha yang tepat.

c. BUMDes Pentingsari, Yogyakarta

BUMDes ini mengelola desa wisata Pentingsari. Mereka mengelola homestay, paket wisata, atraksi budaya, kuliner, dan toko oleh-oleh. Seluruh warga desa terlibat, baik sebagai pemilik homestay, pelaku seni, pemandu wisata, atau pelaku UMKM.

Faktor sukses: Keterlibatan seluruh warga, pengelolaan profesional, promosi efektif, dan pelestarian nilai-nilai lokal sebagai daya tarik.

E. KEMANDIRIAN DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES)

Kemandirian desa adalah tujuan utama pembangunan desa. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, dan menentukan arah pembangunannya sendiri. Salah satu indikator penting kemandirian desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes).

1. Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal. Sumber PADes meliputi:

- **Hasil usaha desa**: laba BUMDes, hasil pengelolaan pasar desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan wisata desa.
- **Hasil aset desa**: sewa tanah desa, sewa bangunan desa, sewa peralatan desa.
- **Swadaya dan partisipasi masyarakat**: sumbangan sukarela masyarakat untuk pembangunan desa.
- **Lain-lain pendapatan asli desa**: retribusi pasar, retribusi wisata, dan lain-lain.

2. Mengapa PADes Penting?

a. Mengurangi Ketergantungan pada Transfer Dana

Desa yang memiliki PADes besar tidak terlalu tergantung pada Dana Desa dari pusat atau Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten. Mereka memiliki sumber pendanaan sendiri yang dapat digunakan sesuai prioritas lokal.

b. Meningkatkan Otonomi dan Kewenangan

Dengan PADes yang besar, desa memiliki otonomi yang lebih besar. Mereka tidak perlu tunduk pada arahan dari atas yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Mereka dapat menentukan sendiri arah pembangunannya.

c. Mendorong Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan PADes, desa harus kreatif mengembangkan potensi ekonominya. Ini mendorong inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa.

d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Jika masyarakat melihat bahwa desa mampu menghasilkan pendapatan sendiri dan mengelolanya dengan baik, kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa meningkat. Ini mendorong partisipasi dan gotong royong.

3. Strategi Meningkatkan PADes

a. Optimalisasi BUMDes

BUMDes adalah sumber PADes utama. Dengan mengembangkan BUMDes secara profesional, desa dapat memperoleh laba yang disetor sebagai PADes. Diversifikasi usaha BUMDes juga penting untuk meningkatkan pendapatan.

b. Pengelolaan Aset Desa

Aset desa—tanah kas, bangunan, pasar, kolam, hutan—harus dikelola secara optimal. Aset yang tidak produktif dapat dikembangkan, misalnya tanah kas disewakan untuk pertanian atau dibangun pasar. Aset yang sudah produktif harus dikelola dengan baik agar pendapatannya meningkat.

c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Setiap desa memiliki potensi ekonomi unggulan. Ada desa yang potensinya di sektor pertanian, ada yang di perikanan, kerajinan, atau pariwisata. Potensi ini harus dikembangkan secara optimal. BUMDes dapat menjadi motor pengembangan.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Swadaya dan partisipasi masyarakat juga dapat menjadi sumber PADes. Gotong royong mengurangi biaya pembangunan. Sumbangan sukarela dapat dihimpun untuk kegiatan tertentu. Namun, ini harus dilakukan dengan prinsip sukarela, tidak boleh memaksa.

e. Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital dapat meningkatkan PADes. Misalnya, pemasaran online produk UMKM desa, pengelolaan wisata berbasis digital, atau platform pembayaran digital untuk retribusi pasar dan wisata.

f. Kerjasama Antar Desa (KSAD)

Desa dapat bekerjasama dengan desa tetangga untuk mengembangkan potensi bersama. Misalnya, pengembangan kawasan wisata terpadu, pengelolaan pasar bersama, atau pembangunan infrastruktur bersama. Kerjasama ini dapat meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi.

4. Indikator Kemandirian Desa

Selain PADes, kemandirian desa juga dapat diukur dari indikator lain:

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Kementerian Desa mengembangkan IDM untuk mengklasifikasikan desa menjadi lima status: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM dihitung berdasarkan tiga indeks: indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi.

b. Ketahanan Pangan

Desa mandiri harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mereka memiliki cadangan pangan dan sistem distribusi yang memadai. Mereka tidak tergantung pada pasokan dari luar.

c. Ketahanan Energi

Desa mandiri mengembangkan sumber energi alternatif—biogas, panel surya, mikrohidro—untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

d. Kemandirian Fiskal

Rasio PADes terhadap total APBDes menjadi indikator penting. Semakin besar rasio PADes, semakin mandiri desa secara fiskal.

e. Kapasitas Kelembagaan

Desa mandiri memiliki kelembagaan yang kuat: pemerintah desa yang profesional, BPD yang efektif, BUMDes yang berkembang, dan organisasi kemasyarakatan yang aktif.

F. RANGKUMAN

Ekonomi sosial dan kemandirian desa adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Ekonomi sosial, dengan prinsip kolektivitas, gotong royong, dan kesejahteraan bersama, menjadi fondasi bagi kemandirian desa. Desa yang ekonominya kuat, yang warganya sejahtera, dan yang mampu mengelola sumber dayanya sendiri, adalah desa yang mandiri.

UMKM desa adalah tulang punggung ekonomi lokal. Mereka menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi, dan menjadi sumber pendapatan bagi jutaan keluarga. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan: keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, manajemen, SDM, perizinan, dan ketergantungan pada tengkulak. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi komprehensif: fasilitasi akses modal, fasilitasi akses pasar, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan perbaikan infrastruktur.

BUMDes adalah instrumen kelembagaan desa untuk mengelola potensi ekonomi secara profesional. BUMDes dapat bergerak di berbagai bidang: simpan pinjam, usaha bersama, pengelolaan pasar, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan wisata, jasa, perdagangan, dan sebagai induk UMKM. Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh profesionalisme pengelola, dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemilihan bidang usaha yang tepat, tata kelola yang baik, inovasi, dan jejaring.

Kemandirian desa adalah tujuan utama pembangunan. Indikator penting kemandirian adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes mengurangi ketergantungan pada transfer dana, meningkatkan otonomi, mendorong kreativitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Strategi meningkatkan PADes meliputi optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan kerjasama antar desa.

Pada akhirnya, ekonomi sosial dan kemandirian desa bukan hanya soal angka dan statistik. Ia adalah soal martabat. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, yang tidak perlu meminta-minta, yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Ia adalah perwujudan dari cita-cita kemerdekaan: rakyat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

G. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana kondisi UMKM di desa Anda? Apa jenis usaha yang paling dominan? Apa tantangan terbesar yang mereka hadapi?
2. Apakah desa Anda sudah memiliki BUMDes? Jika ya, bidang usaha apa saja yang dikelola? Bagaimana kinerjanya? Jika belum, potensi apa yang bisa dikembangkan menjadi BUMDes?
3. Bagaimana akses UMKM terhadap permodalan di desa Anda? Apakah ada koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro yang melayani mereka?
4. Apakah produk UMKM di desa Anda sudah dipasarkan secara online? Bagaimana pengalaman mereka dalam memanfaatkan e-commerce dan media sosial?
5. Berapa besar Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa Anda? Dari sumber apa saja? Apakah PADes sudah cukup signifikan dibandingkan total APBDes?
6. Apa potensi ekonomi terbesar di desa Anda yang belum dikembangkan secara optimal? Apa kendalanya?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung pengembangan UMKM dan BUMDes? Apakah ada program atau kebijakan khusus?
8. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan desa Anda untuk mencapai kemandirian ekonomi?

BAB XXIII

KEARIFAN LOKAL DALAM DINAMIKA SOSIAL

A. PENGANTAR: KEBIJAKSANAAN YANG TUMBUH DARI BUMI SENDIRI

Setiap masyarakat memiliki caranya sendiri dalam memahami dunia dan mengatur kehidupan. Cara itu lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan alam, dengan sesama, dan dengan Yang Transenden. Ia terakumulasi dalam bentuk nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan, dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Inilah yang kita sebut kearifan lokal—kebijaksanaan yang tumbuh dari bumi sendiri, yang telah teruji oleh waktu, dan yang menjadi identitas sekaligus pedoman hidup suatu komunitas.

Di tengah arus globalisasi yang deras, kearifan lokal seringkali dipandang sebagai sesuatu yang usang, penghambat kemajuan, atau sekadar benda museum yang layak dikagumi tetapi tidak perlu dipraktikkan. Pandangan ini keliru. Kearifan lokal bukanlah entitas yang mati dan beku. Ia terus berkembang, beradaptasi, dan berdialektika dengan nilai-nilai baru dari luar. Ia bukan penghalang kemajuan, tetapi justru fondasi yang kokoh untuk membangun kemajuan yang berkelanjutan dan berkarakter.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang kearifan lokal dalam dinamika sosial desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep kearifan lokal, karakteristiknya, dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi berbagai contoh kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari sistem pengelolaan sumber daya alam seperti Subak di Bali dan Sasi di Maluku, hingga nilai-nilai sosial seperti tepo sliro di Jawa, dalihan na tolu di Batak, dan sipakatau di Bugis-Makassar. Pada bagian akhir, kita akan membahas bagaimana kearifan lokal dapat difungsikan sebagai filter budaya dan fondasi pembangunan berkelanjutan, serta strategi pelestariannya di tengah arus modernisasi.

B. MEMAHAMI KEARIFAN LOKAL

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal terdiri dari dua kata: "kearifan" yang berarti kebijaksanaan, dan "lokal" yang berarti setempat. Jadi, secara harfiah, kearifan lokal adalah kebijaksanaan setempat—pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas lokal dan menjadi pedoman hidup mereka.

Beberapa definisi kearifan lokal dari para ahli:

Moendardjito mendefinisikan kearifan lokal sebagai elemen-elemen budaya daerah yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Kearifan lokal memiliki ciri-ciri: mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Sartini mendefinisikan kearifan lokal sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus yang mengatur kehidupan masyarakat.

Permadi mendefinisikan kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam merespon berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah:

- **Pengetahuan lokal**: pengetahuan tentang alam, tentang pertanian, tentang pengobatan, tentang navigasi, dan lain-lain.
- **Nilai-nilai lokal**: nilai tentang baik-buruk, benar-salah, indah-tidak indah, yang menjadi pedoman perilaku.
- **Norma-norma lokal**: aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan pemanfaatan sumber daya.
- **Praktik-praktik lokal**: cara-cara melakukan sesuatu yang telah teruji efektif dan berkelanjutan.

2. Karakteristik Kearifan Lokal

Kearifan lokal memiliki beberapa karakteristik penting:

a. Teruji oleh Waktu

Kearifan lokal bukanlah produk instan. Ia lahir dari pengalaman panjang suatu komunitas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Praktik-praktik yang terbukti merugikan atau tidak berkelanjutan akan ditinggalkan. Yang bertahan adalah yang terbukti bermanfaat dan berkelanjutan.

b. Adaptif

Kearifan lokal tidak kaku. Ia mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan nilai-nilai baru. Kearifan lokal yang tidak adaptif akan punah dengan sendirinya.

c. Terintegrasi dengan Kehidupan

Kearifan lokal tidak berdiri sendiri. Ia terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan—ekonomi, sosial, budaya, agama, politik. Misalnya, upacara adat pertanian tidak hanya ritual, tetapi juga mengatur siklus tanam dan panen, memperkuat solidaritas, dan melestarikan varietas padi lokal.

d. Bersifat Komunal

Kearifan lokal adalah milik bersama komunitas, bukan individu. Ia diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas kolektif.

e. Kontekstual

Kearifan lokal lahir dari konteks spesifik suatu tempat. Kearifan lokal di daerah pegunungan berbeda dengan di pesisir. Kearifan lokal di masyarakat agraris berbeda dengan di masyarakat nelayan. Ia tidak bisa langsung ditransplantasikan ke tempat lain tanpa penyesuaian.

3. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal memiliki beragam fungsi dalam kehidupan masyarakat:

a. Sebagai Pedoman Hidup

Kearifan lokal memberikan pedoman tentang bagaimana bersikap dan bertindak dalam berbagai situasi. Nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, gotong royong, dan musyawarah menjadi kompas moral yang mengarahkan perilaku.

b. Sebagai Penjaga Kelestarian Alam

Banyak kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Larangan menebang pohon di hutan larangan, aturan tentang musim panen, dan sistem irigasi tradisional adalah contoh bagaimana kearifan lokal menjaga kelestarian alam.

c. Sebagai Perekat Sosial

Kearifan lokal memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Gotong royong, upacara adat bersama, dan nilai-nilai kebersamaan menciptakan ikatan yang kuat antar warga.

d. Sebagai Sumber Identitas

Kearifan lokal adalah sumber identitas dan kebanggaan komunal. Bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, upacara adat, dan kesenian tradisional adalah penanda siapa mereka dan dari mana mereka berasal.

e. Sebagai Filter Budaya

Kearifan lokal berfungsi sebagai filter yang menyaring pengaruh budaya luar. Tidak semua nilai dan praktik dari luar diterima begitu saja. Hanya yang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang akan diadopsi.

f. Sebagai Fondasi Pembangunan

Kearifan lokal dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kontekstual. Model pembangunan yang mengabaikan kearifan lokal seringkali gagal karena tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat.

C. CONTOH-CONTOH KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Indonesia kaya akan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki kearifannya sendiri yang unik. Berikut beberapa contoh:

1. Subak di Bali

Subak adalah sistem irigasi tradisional di Bali yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Lebih dari sekadar sistem teknis pengairan, Subak adalah organisasi sosial-religius yang mengatur pembagian air, jadwal tanam, dan upacara keagamaan terkait pertanian.

Prinsip-prinsip Subak:

- **Demokrasi**: Keputusan diambil secara musyawarah oleh seluruh anggota.
- **Spiritualitas**: Pertanian tidak hanya urusan teknis, tetapi juga spiritual. Upacara dilakukan di pura Subak untuk memohon kesuburan dan keselamatan.

- **Kebersamaan**: Air dibagi secara adil, tidak boleh ada yang mengambil lebih dari haknya.
- **Keseimbangan**: Subak menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Relevansi Subak saat ini:

- Sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan.
- Model demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
- Integrasi nilai spiritual dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya.

2. Sasi di Maluku

Sasi adalah tradisi larangan untuk mengambil sumber daya alam (laut, sungai, hutan) dalam jangka waktu tertentu, untuk memberikan kesempatan bagi sumber daya tersebut pulih. Setelah waktu tertentu, sasi dibuka dan masyarakat boleh mengambil secara bersama-sama.

Prinsip-prinsip Sasi:

- **Keberlanjutan**: Sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi habis-habisan; harus ada waktu untuk pemulihan.
- **Keadilan**: Setelah sasi dibuka, semua anggota masyarakat berhak mengambil, bukan hanya kelompok tertentu.
- **Sanksi adat**: Pelanggaran sasi mendapat sanksi adat yang berat, sehingga efektif sebagai pengendali.
- **Keterlibatan tokoh adat**: Sasi dipimpin dan diawasi oleh tokoh adat yang disegani.

Relevansi Sasi saat ini:

- Model pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang telah teruji.
- Alternatif bagi pengelolaan perikanan dan kehutanan modern yang sering gagal.
- Menunjukkan bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan.

3. Tepo Sliro di Jawa

Tepo sliro (atau tepa selira) adalah nilai Jawa yang berarti tenggang rasa, toleransi, dan menghargai perasaan orang lain. Ini adalah prinsip etika dalam pergaulan sosial.

Implementasi tepo sliro:

- Tidak berkata kasar yang menyakiti hati orang lain.
- Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
- Menghormati perbedaan pendapat.
- Menjaga perasaan orang lain, tidak membuatnya malu di depan umum.
- Berusaha memahami posisi dan perasaan orang lain sebelum bertindak.

Relevansi tepo sliro saat ini:

- Di tengah polarisasi sosial dan politik, tepo sliro mengajarkan toleransi dan saling menghargai.
- Dalam masyarakat multikultural, tepo sliro menjadi modal penting untuk kerukunan.
- Di dunia maya yang seringkali penuh ujaran kebencian, tepo sliro menjadi nilai yang sangat relevan.

4. Dalihan Na Tolu di Batak

Dalihan na tolu (tungku nan tiga) adalah filosofi sosial masyarakat Batak yang mengatur hubungan antara tiga unsur: hula-hula (kelompok pemberi istri), dongan tubu (kerabat satu marga), dan boru (kelompok penerima istri). Ketiganya harus seimbang dan harmonis, seperti tungku yang menopang periuk.

Prinsip-prinsip dalihan na tolu:

- **Somba marhula-hula**: Hormat kepada hula-hula (kelompok pemberi istri).
- **Manat mardongan tubu**: Hati-hati dengan sesama kerabat semarga, menjaga silaturahmi.
- **Elek marboru**: Menyayangi dan membimbing boru (kelompok penerima istri).

Relevansi dalihan na tolu saat ini:

- Model pengelolaan hubungan sosial yang kompleks.
- Prinsip keseimbangan dan harmoni dalam relasi antar kelompok.
- Dapat diadaptasi untuk mengelola hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang beragam.

5. Sipakatau di Bugis-Makassar

Sipakatau adalah filosofi Bugis-Makassar yang berarti saling memanusiakan. Ini adalah prinsip yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi, dengan penuh hormat dan martabat.

Prinsip-prinsip sipakatau:

- **Sipakalebbi**: Saling menghormati dan memuliakan.
- **Sipakatau**: Saling memanusiakan, tidak merendahkan orang lain.
- **Sipakainga**: Saling mengingatkan dalam kebaikan.

Relevansi sipakatau saat ini:

- Dalam masyarakat yang seringkali dehumanisasi, sipakatau mengingatkan pentingnya menghormati martabat manusia.
- Nilai universal yang relevan untuk semua budaya.
- Dapat menjadi dasar bagi penghormatan HAM dan anti-diskriminasi.

6. Kearifan Lokal Lainnya

- **Hutan Larangan** di berbagai daerah: kawasan hutan yang tidak boleh diganggu karena fungsi ekologis dan spiritualnya.
- **Awig-awig** di Bali: aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat.
- **Panglima Laot** di Aceh: lembaga adat yang mengatur tata cara melaut dan menyelesaikan sengketa di laut.
- **Tana' Ulen** di Dayak: hutan cadangan yang tidak boleh digarap, sebagai sumber pangan cadangan saat paceklik.

D. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI FILTER BUDAYA DAN FONDASI PEMBANGUNAN

Di tengah arus globalisasi yang deras, kearifan lokal memiliki peran strategis sebagai filter budaya sekaligus fondasi pembangunan.

1. Kearifan Lokal sebagai Filter Budaya (Cultural Filter)

Globalisasi membawa masuk berbagai nilai, gaya hidup, dan produk budaya dari berbagai belahan dunia. Tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai lokal. Kearifan lokal berfungsi sebagai filter yang menyaring pengaruh luar:

- **Nilai-nilai yang sesuai** dengan kearifan lokal dapat diadopsi dan diintegrasikan.
- **Nilai-nilai yang bertentangan** dapat ditolak atau dimodifikasi agar sesuai.

Misalnya, nilai demokrasi universal dapat diadopsi, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan budaya musyawarah lokal. Nilai kesetaraan gender dapat diterima, tetapi tetap dalam koridor agama dan adat yang menghormati kodrat laki-laki dan perempuan.

Dengan filter budaya, masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, meskipun terbuka terhadap perubahan.

2. Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang mengabaikan kearifan lokal seringkali gagal karena tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, pembangunan yang berpijak pada kearifan lokal akan lebih mudah diterima, lebih berkelanjutan, dan lebih bermakna.

Contoh konkret:

- **Sistem Subak** menjadi fondasi bagi pertanian berkelanjutan di Bali. Alih-alih menggantinya dengan sistem irigasi modern yang mahal, pemerintah justru melestarikan dan memperkuat Subak.
- **Tradisi Sasi** diintegrasikan ke dalam program pengelolaan sumber daya laut. Masyarakat lebih patuh pada sasi daripada pada aturan formal yang datang dari luar.
- **Nilai gotong royong** menjadi basis bagi berbagai program pembangunan partisipatif. Dana desa lebih efektif jika dikelola dengan semangat gotong royong.

3. Kearifan Lokal dan Pembangunan Karakter

Kearifan lokal juga menjadi sumber pembangunan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, hormat kepada orang tua, dan cinta tanah air, dapat ditanamkan melalui pendidikan berbasis kearifan lokal.

Implementasi:

- **Muatan lokal** di sekolah mengajarkan bahasa daerah, kesenian tradisional, dan nilai-nilai lokal.
- **Kegiatan ekstrakurikuler** seperti pramuka, karang taruna, dan kesenian tradisional menanamkan nilai-nilai tersebut.

- **Keteladanan** dari tokoh masyarakat dan tokoh adat menjadi contoh nyata.

E. TANTANGAN PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal menghadapi berbagai tantangan di era modern:

1. Arus Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan kearifan lokal. Individualisme menggerus gotong royong. Konsumerisme menggeser kesederhanaan. Hedonisme bertabrakan dengan nilai-nilai spiritual. Generasi muda lebih terpesona pada budaya pop global daripada budaya sendiri.

2. Pendidikan Formal yang Kurang Berbasis Lokal

Kurikulum pendidikan nasional cenderung seragam dan berorientasi pada nilai-nilai universal. Muatan lokal sering menjadi pelengkap, bukan inti. Akibatnya, anak-anak kurang mengenal dan mencintai budayanya sendiri.

3. Urbanisasi

Pemuda desa merantau ke kota, putus hubungan dengan desa dan budayanya. Mereka yang kembali mungkin sudah terasing dari tradisi. Pengetahuan dan keterampilan tradisional tidak diwariskan.

4. Komersialisasi

Kearifan lokal sering dikomersialkan untuk pariwisata. Upacara adat menjadi tontonan, kehilangan makna spiritualnya. Nilai-nilai luhur direduksi menjadi komoditas.

5. Konflik dengan Hukum Formal

Kadang kearifan lokal berbenturan dengan hukum nasional. Misalnya, sanksi adat yang dianggap melanggar HAM, atau aturan adat tentang warisan yang berbeda dengan hukum nasional. Ini menimbulkan dilema.

6. Kurangnya Dokumentasi

Banyak kearifan lokal yang tidak terdokumentasi. Ia hanya hidup dalam ingatan para tetua. Ketika tetua meninggal, pengetahuan itu ikut mati.

F. STRATEGI PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi pelestarian yang komprehensif:

1. Dokumentasi dan Digitalisasi

Kearifan lokal perlu didokumentasikan secara sistematis. Pengetahuan tentang pengobatan tradisional, upacara adat, teknologi tradisional, dan nilai-nilai lokal harus dicatat, direkam, dan didokumentasikan. Digitalisasi memungkinkan dokumentasi ini diakses secara luas oleh generasi muda.

2. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Kurikulum sekolah perlu mengintegrasikan kearifan lokal secara lebih substansial, bukan sekadar muatan lokal tempelan. Siswa perlu belajar tentang sejarah desanya, tokoh-tokohnya, budayanya, dan nilai-nilainya. Mereka juga perlu diajarkan keterampilan-keterampilan tradisional.

3. Revitalisasi Tradisi

Tradisi-tradisi yang mulai ditinggalkan perlu direvitalisasi. Upacara adat, kesenian tradisional, dan ritual-ritual perlu dihidupkan kembali. Revitalisasi harus dilakukan dengan melibatkan generasi muda, agar mereka memiliki rasa memiliki.

4. Penguatan Kelembagaan Adat

Lembaga adat perlu diperkuat, baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu mengakui dan bermitra dengan lembaga adat dalam berbagai program pembangunan.

5. Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Pembangunan

Kearifan lokal harus diintegrasikan ke dalam berbagai program pembangunan. Program konservasi lingkungan dapat memanfaatkan tradisi sasi atau hutan larangan. Program pertanian dapat memanfaatkan sistem subak atau pengetahuan lokal tentang varietas padi. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat kearifan lokal itu sendiri.

6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif. Kerajinan tradisional, kuliner lokal, fashion etnik, dan wisata budaya dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan. Ini memberi insentif ekonomi bagi pelestarian.

7. Advokasi Kebijakan

Diperlukan advokasi kebijakan untuk melindungi dan memperkuat kearifan lokal. Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Desa perlu diimplementasikan secara efektif. Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan melestarikan kearifan lokal.

8. Dialog Antargenerasi

Perlu ada dialog intensif antara generasi tua dan muda. Generasi tua mentransmisikan pengetahuan dan nilai. Generasi muda memberikan perspektif baru dan energi. Dialog ini penting untuk memastikan bahwa kearifan lokal tetap hidup dan relevan.

G. STUDI KASUS: PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL

1. Subak di Bali: Bertahan di Tengah Modernisasi

Subak telah bertahan selama berabad-abad. Meskipun tekanan modernisasi sangat kuat—alih fungsi lahan, pariwisata, perubahan sosial—Subak tetap eksis. Bahkan, UNESCO menetapkannya sebagai Warisan Budaya Dunia, yang semakin memperkuat posisinya.

Faktor ketahanan Subak:

- **Pengakuan dan dukungan pemerintah**: Pemerintah Bali sangat mendukung Subak, menjadikannya bagian dari pembangunan daerah.
- **Nilai spiritual yang kuat**: Subak tidak hanya sistem teknis, tetapi juga sistem keagamaan. Ini memberi makna lebih dalam.
- **Organisasi yang kuat**: Subak memiliki struktur organisasi yang jelas dan aturan yang mengikat.
- **Kemampuan beradaptasi**: Subak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, misalnya dengan mengintegrasikan pariwisata.

2. Sasi di Maluku: Integrasi dengan Program Konservasi

Tradisi Sasi di Maluku mulai bangkit kembali setelah sempat terpinggirkan. Pemerintah daerah dan LSM bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mengintegrasikan Sasi ke dalam program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut.

Hasilnya: Masyarakat lebih patuh pada Sasi daripada pada aturan formal. Sumber daya laut pulih. Pendapatan masyarakat meningkat karena hasil laut yang melimpah saat Sasi dibuka.

3. Tepo Sliro di Jawa: Nilai yang Tetap Relevan

Nilai tepo sliro (tenggang rasa) tetap relevan di tengah masyarakat modern. Di berbagai forum, tokoh masyarakat dan tokoh agama terus mengingatkan pentingnya tepo sliro, terutama di tengah polarisasi politik.

Implementasi: Sekolah-sekolah di Jawa memasukkan nilai tepo sliro dalam pendidikan karakter. Kampanye di media sosial mengajak masyarakat untuk berinteraksi dengan santun dan menghargai perbedaan.

H. RANGKUMAN

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan yang tumbuh dari bumi sendiri. Ia adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang telah teruji oleh waktu dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Kearifan lokal memiliki karakteristik: teruji oleh waktu, adaptif, terintegrasi dengan kehidupan, bersifat komunal, dan kontekstual.

Fungsi kearifan lokal meliputi: pedoman hidup, penjaga kelestarian alam, perekat sosial, sumber identitas, filter budaya, dan fondasi pembangunan.

Indonesia kaya akan kearifan lokal. Contoh-contohnya antara lain:

- **Subak** di Bali: sistem irigasi yang mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan spiritual.
- **Sasi** di Maluku: tradisi larangan mengambil sumber daya untuk memberikan waktu pemulihan.
- **Tepo sliro** di Jawa: nilai tenggang rasa dan toleransi.
- **Dalihan na tolu** di Batak: filosofi keseimbangan hubungan sosial.
- **Sipakatau** di Bugis-Makassar: nilai saling memanusiakan.

Kearifan lokal berfungsi sebagai **filter budaya** (cultural filter) yang menyaring pengaruh negatif globalisasi. Ia juga menjadi **fondasi pembangunan berkelanjutan** yang kontekstual dan partisipatif.

Namun, kearifan lokal menghadapi berbagai tantangan: arus globalisasi, pendidikan yang kurang berbasis lokal, urbanisasi, komersialisasi, konflik dengan hukum formal, dan kurangnya dokumentasi.

Untuk melestarikannya, diperlukan strategi komprehensif:

1. **Dokumentasi dan digitalisasi** pengetahuan lokal.
2. **Pendidikan berbasis kearifan lokal** yang lebih substansial.
3. **Revitalisasi tradisi** dengan melibatkan generasi muda.
4. **Penguatan kelembagaan adat** dan kemitraan dengan pemerintah.
5. **Pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan**.
6. **Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal**.
7. **Advokasi kebijakan** untuk perlindungan dan penguatan kearifan lokal.
8. **Dialog antargenerasi** untuk transmisi pengetahuan dan nilai.

Pada akhirnya, kearifan lokal bukanlah penghalang kemajuan. Justru sebaliknya, ia adalah fondasi yang kokoh untuk membangun kemajuan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkarakter. Dengan berpegang pada kearifan lokal, masyarakat desa dapat melangkah maju tanpa kehilangan jati diri. Mereka dapat membuka diri terhadap perubahan tanpa tercerabut dari akar. Mereka dapat menjadi diri mereka sendiri di tengah dunia yang semakin seragam.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Apa saja kearifan lokal yang masih hidup di desa Anda? Apakah ada tradisi, nilai, atau praktik yang masih dijalankan?
2. Bagaimana pandangan generasi muda di desa Anda terhadap kearifan lokal? Apakah mereka masih tertarik dan bangga, atau mulai acuh?
3. Apakah ada konflik antara kearifan lokal dengan nilai-nilai modern di desa Anda? Bagaimana cara mengatasinya?
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam melestarikan kearifan lokal? Apakah ada program atau kegiatan yang mendukung pelestarian?
5. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam melestarikan kearifan lokal di era digital seperti sekarang?

6. Apakah kearifan lokal di desa Anda sudah didokumentasikan? Jika belum, bagaimana cara terbaik untuk mendokumentasikannya?
7. Bagaimana kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa, misalnya dalam pariwisata atau ekonomi kreatif?
8. Menurut Anda, apa nilai-nilai universal yang terkandung dalam kearifan lokal yang masih relevan hingga kini?

BAB XXIV

MANFAAT DINAMIKA SOSIAL BAGI KEMAJUAN DESA

A. PENGANTAR: DARI DINAMIKA MENUJU KEMAJUAN

Sepanjang perjalanan buku ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek dinamika sosial desa. Kita telah memahami konsep dasarnya, struktur sosial yang menjadi kerangkanya, nilai dan norma yang menjadi pedomannya, interaksi yang menjadi denyut nadinya, lembaga-lembaga yang menjadi pilarnya, kepemimpinan yang menjadi pengarahnya, serta peran berbagai aktor—pemuda, perempuan, tokoh masyarakat—yang menjadi penggeraknya. Kita juga telah menganalisis faktor-faktor perubahan, tantangan modernisasi, dan strategi pemberdayaan. Kini sampailah kita pada pertanyaan fundamental: untuk apa semua ini? Apa sebenarnya manfaat dari dinamika sosial yang sehat bagi desa?

Dinamika sosial bukanlah tujuan akhir. Ia adalah proses, jalan menuju sesuatu yang lebih besar: kemajuan desa. Dinamika yang sehat—ditandai oleh partisipasi aktif, interaksi yang konstruktif, konflik yang dikelola dengan baik, dan adaptasi yang cerdas terhadap perubahan—akan membawa desa pada kondisi yang lebih baik. Sebaliknya, dinamika yang tidak sehat—apatisme, konflik berkepanjangan, stagnasi, atau disintegrasi—akan membawa desa pada kemunduran.

Bab ini akan merangkum bagaimana proses-proses sosial yang dinamis pada akhirnya bermuara pada kemajuan desa. Kita akan membahas manfaat dinamika sosial dalam dua dimensi: dimensi material (kesejahteraan ekonomi, akses terhadap layanan dasar) dan dimensi non-material (kebahagiaan, rasa aman, kohesi sosial, pelestarian budaya). Pada bagian akhir, kita akan merenungkan tentang makna kemajuan desa yang sesungguhnya—bukan sekadar angka-angka statistik, tetapi kualitas hidup manusia secara utuh.

B. DINAMIKA SOSIAL YANG SEHAT: ALIRAN SUNGAI KEHIDUPAN

Dinamika sosial yang sehat ibarat aliran sungai yang membawa kehidupan. Airnya mengalir, tidak tergenang dan tidak pula banjir. Ia membersihkan, menyuburkan, dan menghidupkan segala yang dilaluinya. Apa ciri-ciri dinamika sosial yang sehat?

1. Partisipasi Aktif

Dalam dinamika sosial yang sehat, masyarakat tidak menjadi penonton pasif. Mereka aktif berpartisipasi dalam berbagai forum—musyawarah desa, pertemuan RT, kegiatan gotong royong, organisasi

kemasyarakatan. Mereka menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi sungguh-sungguh bermakna.

2. Interaksi yang Konstruktif

Warga desa sering bertemu, berdiskusi, dan berinteraksi. Interaksi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi substantif. Mereka membahas masalah bersama, bertukar pikiran, mencari solusi. Perbedaan pendapat adalah hal biasa, bahkan disambut sebagai sumber ide baru. Namun, perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.

3. Konflik yang Dikelola dengan Baik

Konflik tidak dihindari, tetapi dikelola dengan baik. Ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai—mediasi oleh tokoh masyarakat, musyawarah adat, atau jalur formal jika diperlukan. Konflik tidak dibiarkan berlarut dan memecah belah, tetapi diselesaikan dengan cara yang memperkuat, bukan merusak, ikatan sosial.

4. Inovasi dan Kreativitas

Masyarakat terbuka terhadap ide-ide baru. Mereka tidak terjebak pada cara-cara lama yang sudah terbukti tidak efektif. Pemuda didorong untuk berinovasi. Teknologi baru diadopsi secara selektif. Kreativitas dihargai dan dikembangkan.

5. Adaptasi terhadap Perubahan

Masyarakat tidak kaku menghadapi perubahan. Mereka mampu membaca tanda-tanda zaman, menilai mana perubahan yang bermanfaat dan mana yang merusak, serta menyesuaikan diri secara cerdas. Mereka tidak anti-perubahan, tetapi juga tidak kehilangan jati diri.

6. Solidaritas dan Kohesi Sosial

Ikatan sosial tetap kuat di tengah perubahan. Gotong royong, meskipun bentuknya mungkin berubah, masih hidup. Rasa saling percaya tinggi. Ketika ada warga yang kesusahan, yang lain dengan sigap membantu.

7. Kelembagaan yang Kuat

Lembaga-lembaga desa—pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, lembaga adat—berfungsi dengan baik. Mereka menjadi wadah partisipasi, pengambilan keputusan, dan aksi kolektif. Ada regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan.

C. MANFAAT DIMENSI MATERIAL: KESEJAHTERAAN YANG TERLIHAT

Manfaat paling nyata dari dinamika sosial yang sehat adalah peningkatan kesejahteraan material masyarakat. Indikator-indikatornya dapat diukur dan diamati.

1. Peningkatan Pendapatan dan Penurunan Kemiskinan

Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, ide-ide baru bermunculan, inovasi berkembang, dan usaha ekonomi tumbuh. UMKM berkembang, BUMDes maju, produk-produk desa memiliki nilai tambah. Pasar baru terbuka, termasuk melalui platform digital. Akibatnya, pendapatan masyarakat meningkat. Angka kemiskinan menurun.

Contoh konkret: Di Desa Ponggok, Klaten, dinamika sosial yang sehat—ditandai oleh partisipasi aktif masyarakat, kerjasama yang erat, dan inovasi terus-menerus—telah mengubah desa pertanian biasa menjadi desa wisata yang maju. Pendapatan warga meningkat drastis. BUMDes Tirta Mandiri yang mengelola wisata air Umbul Ponggok menghasilkan miliaran rupiah per tahun. Sebagian laba dibagikan sebagai dividen kepada warga, sebagian lagi untuk pembangunan desa.

2. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar

Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat memiliki daya beli lebih besar untuk mengakses layanan dasar: pangan bergizi, perumahan layak, kesehatan, pendidikan. Pemerintah desa juga memiliki sumber daya lebih besar untuk membangun dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Indikator:

- **Pangan**: Masyarakat mampu membeli makanan bergizi. Angka stunting dan gizi buruk menurun.
- **Perumahan**: Rumah-rumah warga semakin layak. Tidak ada lagi rumah dengan dinding bambu usang, lantai tanah, dan atap bocor.
- **Kesehatan**: Akses ke fasilitas kesehatan meningkat. Masyarakat mampu berobat ketika sakit. Angka kematian ibu dan anak menurun. Usia harapan hidup meningkat.
- **Pendidikan**: Anak-anak desa dapat bersekolah hingga jenjang tinggi. Angka putus sekolah menurun. Beasiswa tersedia bagi yang berprestasi namun kurang mampu.

3. Perbaikan Infrastruktur

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan gotong royong menghasilkan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Jalan desa mulus, jembatan kokoh, irigasi berfungsi baik, listrik menyala terang, air bersih mengalir, internet menjangkau.

Contoh konkret: Di Desa Karangbawang, Purbalingga, perencanaan partisipatif yang tertib dan terdokumentasi menghasilkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap, sehingga hasilnya sesuai kebutuhan dan mereka merasa memiliki.

4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Dinamika sosial yang sehat mendorong produktivitas ekonomi. Petani mengadopsi teknologi baru, meningkatkan hasil panen. Nelayan melaut lebih aman dan efisien. Pengrajin mengembangkan desain baru. Pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran digital. BUMDes berkembang dan membuka lapangan kerja baru.

D. MANFAAT DIMENSI NON-MATERIAL: KEBAHAGIAAN YANG TAK TERUKUR

Kemajuan desa tidak hanya diukur dari indikator material. Ada dimensi non-material yang tak kalah penting, bahkan lebih fundamental: kebahagiaan, rasa aman, kohesi sosial, dan pelestarian identitas budaya.

1. Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup

Pada akhirnya, pembangunan bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Desa yang maju adalah desa yang penduduknya bahagia. Mereka merasa hidupnya berarti, puas dengan apa yang mereka capai, dan optimis dengan masa depan.

Kebahagiaan tidak selalu berkorelasi linear dengan pendapatan. Ada desa-desa yang secara ekonomi maju tetapi warganya stres, individualistis, dan tidak bahagia. Sebaliknya, ada desa-desa yang secara ekonomi sederhana tetapi warganya bahagia karena ikatan sosial kuat, lingkungan asri, dan kehidupan spiritual kaya.

Dinamika sosial yang sehat—partisipasi, solidaritas, rasa saling percaya—berkontribusi besar pada kebahagiaan. Orang merasa menjadi bagian dari komunitas, dihargai, dan didukung. Mereka tidak merasa sendiri menghadapi masalah.

2. Rasa Aman

Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Di desa dengan dinamika sosial sehat, tingkat kriminalitas rendah. Warga merasa aman berjalan di malam hari, aman meninggalkan rumah, aman bahwa anak-anak mereka bermain di lingkungan yang terjaga. Sistem keamanan lingkungan (ronda malam) berjalan efektif karena partisipasi warga tinggi.

Rasa aman juga mencakup rasa aman secara ekonomi. Warga tahu bahwa jika mereka mengalami kesulitan, ada jaring pengaman sosial—keluarga, tetangga, komunitas—yang akan membantu.

3. Kohesi Sosial dan Solidaritas

Kohesi sosial adalah tingkat keterikatan antar warga dalam suatu komunitas. Dalam desa dengan kohesi sosial tinggi, warga saling mengenal, saling percaya, dan saling membantu. Ada rasa "kita" yang kuat. Konflik dapat diminimalkan atau diselesaikan dengan cepat.

Gotong royong, meskipun bentuknya berubah, masih hidup. Arisan, kelompok pengajian, kegiatan sosial, dan kerja bakti tetap berjalan. Ini bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga soal merawat kebersamaan.

4. Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan adalah modal sosial yang sangat berharga. Dalam desa dengan dinamika sosial sehat, tingkat kepercayaan antar warga tinggi. Mereka percaya bahwa tetangganya tidak akan mencuri, bahwa dalam arisan uang akan kembali, bahwa dalam kerjasama usaha keuntungan akan dibagi adil.

Kepercayaan juga meluas pada kepercayaan terhadap pemerintah desa. Warga percaya bahwa kepala desa dan perangkatnya jujur, transparan, dan bekerja untuk kepentingan bersama. Ini memudahkan pelaksanaan program dan mobilisasi partisipasi.

5. Pelestarian Budaya dan Identitas

Desa yang maju adalah desa yang tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus modernisasi. Nilai-nilai lokal tetap dijunjung. Tradisi dilestarikan, meskipun mungkin dikemas ulang agar relevan dengan zaman. Bahasa daerah masih digunakan. Kesenian tradisional tetap hidup.

Pelestarian budaya bukan berarti menutup diri dari perubahan. Ini adalah sikap selektif: mengambil yang baik dari luar, tetapi tetap berpegang pada akar sendiri. Desa yang mampu melakukan ini adalah desa yang percaya diri, tidak rendah diri di hadapan budaya asing.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

Desa yang maju adalah desa yang lingkungannya asri, bersih, dan sehat. Sungai tidak tercemar, udara segar, sampah terkelola, ruang terbuka hijau tersedia. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal kesehatan dan kualitas hidup.

Dinamika sosial yang sehat mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan, menanam pohon, melestarikan sumber air. Ada sanksi sosial bagi yang merusak lingkungan.

E. BAGAIMANA DINAMIKA SOSIAL MENGHASILKAN MANFAAT?

Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana proses-proses sosial yang dinamis menghasilkan manfaat-manfaat tersebut.

1. Partisipasi Aktif Menghasilkan Kebijakan yang Tepat Sasaran

Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dalam perencanaan, kebijakan dan program yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil. Tidak ada lagi proyek "gedung serbaguna" yang tidak terpakai, atau bantuan bibit yang tidak sesuai dengan kondisi lahan. Dana desa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, pembangunan lebih efektif dan efisien.

2. Inovasi Pemuda Mendorong Ekonomi Kreatif

Pemuda yang kreatif dan melek teknologi menjadi motor inovasi. Mereka mengembangkan produk-produk baru, memanfaatkan pemasaran digital, menciptakan konten promosi, dan membuka lapangan kerja baru. Desa yang memberi ruang bagi pemuda untuk berkreasi akan melesat maju.

3. Penguatan Kelembagaan Meningkatkan Efektivitas Kolektif

Ketika kelembagaan desa—pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, BUMDes—kuat dan berfungsi baik, aksi kolektif menjadi lebih efektif. Masyarakat dapat bekerjasama mengerjakan

proyek besar, mengelola sumber daya bersama, dan menyelesaikan masalah kolektif. Gotong royong yang terorganisir lebih efektif daripada gotong royong spontan.

4. Kepemimpinan yang Responsif Memandu Arah Perubahan

Kepemimpinan desa yang responsif, visioner, dan melayani menjadi pengarah dinamika sosial. Mereka tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga memberi arah. Mereka memfasilitasi partisipasi, mendorong inovasi, mengelola konflik, dan menjaga agar perubahan tetap pada rel yang benar.

5. Modal Sosial yang Kuat Mengurangi Biaya Transaksi

Kepercayaan, jaringan, dan norma resiprositas yang kuat mengurangi biaya transaksi dalam berbagai kegiatan. Orang tidak perlu membuat kontrak formal yang rumit untuk bekerjasama. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengawasan. Ini membuat kegiatan ekonomi dan sosial lebih efisien.

6. Konflik yang Dikelola dengan Baik Mencegah Disintegrasi

Konflik yang tidak dikelola dapat menghancurkan desa. Sebaliknya, konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pembelajaran dan perubahan positif. Mediasi oleh tokoh masyarakat, musyawarah adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjaga agar konflik tidak berkepanjangan dan merusak.

F. INDIKATOR KEMAJUAN DESA: LEBIH DARI SEKADAR ANGKA

Bagaimana kita mengukur kemajuan desa? Pemerintah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggabungkan tiga indeks: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Berdasarkan IDM, desa diklasifikasikan menjadi sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Indikator-indikator dalam IDM meliputi:

- **Ketahanan sosial**: pendidikan, kesehatan, modal sosial, permukiman.
- **Ketahanan ekonomi**: keragaman produksi, akses ke pusat perdagangan, akses keuangan, keterbukaan wilayah.
- **Ketahanan ekologi**: kualitas lingkungan, potensi bencana, tanggap bencana.

Namun, angka-angka ini hanyalah proksi. Kemajuan desa yang sesungguhnya adalah ketika:

- **Setiap anak** dapat bersekolah setinggi mungkin, tanpa terkendala biaya atau jarak.
- **Setiap keluarga** memiliki rumah layak huni, akses air bersih, dan sanitasi yang baik.
- **Setiap warga** yang sakit dapat berobat tanpa khawatir biaya.
- **Setiap lansia** dihormati dan dirawat dengan penuh kasih sayang.
- **Setiap pemuda** memiliki ruang untuk berkarya dan masa depan yang cerah di desanya.
- **Setiap perempuan** memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memimpin.
- **Setiap kelompok marginal** (miskin, difabel, minoritas) dilindungi dan diberdayakan.

- **Gotong royong** dan solidaritas tetap hidup, menjadi perekat sosial.
- **Lingkungan** asri, bersih, dan lestari.
- **Budaya dan tradisi** tetap dijaga dan dibanggakan.
- **Masyarakat** merasa bahagia, aman, dan optimis dengan masa depan.

Inilah kemajuan desa yang sesungguhnya—kemajuan yang holistik, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang dirasakan oleh seluruh warga, dan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi.

G. STUDI KASUS: DESA-DESA YANG BERHASIL MERAIH KEMAJUAN

1. Desa Ponggok, Klaten: Kemajuan Ekonomi dan Sosial

Desa Ponggok adalah contoh desa yang berhasil meraih kemajuan berkat dinamika sosial yang sehat. Partisipasi masyarakat tinggi, inovasi terus berkembang, dan kelembagaan desa kuat. BUMDes Tirta Mandiri yang mengelola wisata air Umbul Ponggok menjadi salah satu BUMDes tersukses di Indonesia.

Manfaat yang diraih:

- **Ekonomi**: Pendapatan warga meningkat, lapangan kerja terbuka, BUMDes menghasilkan miliaran rupiah.
- **Sosial**: Partisipasi masyarakat tinggi, gotong royong tetap hidup, kohesi sosial kuat.
- **Lingkungan**: Lingkungan desa tertata rapi, bersih, dan asri, menjadi daya tarik wisata.
- **Pendidikan**: Banyak anak desa yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi berkat dukungan ekonomi keluarga dan beasiswa dari desa.

2. Desa Pentingsari, Yogyakarta: Kemajuan Berbasis Budaya

Desa Pentingsari adalah contoh desa yang maju dengan tetap mempertahankan identitas budayanya. Pengembangan desa wisata dilakukan dengan melibatkan seluruh warga. Gotong royong, kesederhanaan, dan keramahan menjadi daya tarik utama.

Manfaat yang diraih:

- **Ekonomi**: Pendapatan warga meningkat dari sektor pariwisata. Homestay, kuliner, kerajinan, dan atraksi budaya menjadi sumber pendapatan.
- **Budaya**: Tradisi dan kesenian lokal tetap hidup, bahkan dikembangkan. Generasi muda terlibat aktif.
- **Sosial**: Solidaritas warga kuat, gotong royong tetap terjaga. Masyarakat merasa bangga dengan desanya.

3. Desa Bayan, Lombok: Kemajuan dengan Kearifan Lokal

Desa Bayan adalah desa adat yang kuat memegang tradisi, tetapi tidak anti-modernitas. Mereka mengembangkan kopi lokal dan tenun dengan memanfaatkan teknologi digital, tanpa meninggalkan nilai-nilai adat.

Manfaat yang diraih:

- **Ekonomi**: Produk kopi dan tenun Bayan dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara. Pendapatan warga meningkat.
- **Budaya**: Tradisi adat tetap dijalankan. Upacara adat justru menjadi daya tarik wisata. Generasi muda bangga dengan budayanya.
- **Lingkungan**: Hutan adat tetap terjaga karena ada sanksi adat bagi yang merusak.

4. Desa Karangbawang, Purbalingga: Kemajuan dari Perencanaan Partisipatif

Desa Karangbawang menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif yang tertib dapat menghasilkan kemajuan. Musyawarah dusun dilaksanakan dengan baik, usulan warga didokumentasikan, dan hasilnya menjadi dasar perencanaan desa.

Manfaat yang diraih:

- **Infrastruktur**: Pembangunan infrastruktur tepat sasaran karena direncanakan bersama.
- **Partisipasi**: Masyarakat merasa aspirasinya didengar, sehingga partisipasi meningkat.
- **Kepercayaan**: Transparansi perencanaan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.

H. RANGKUMAN

Dinamika sosial yang sehat—ditandai oleh partisipasi aktif, interaksi konstruktif, konflik terkelola, inovasi, adaptasi, solidaritas, dan kelembagaan kuat—adalah prasyarat bagi kemajuan desa. Manfaatnya terlihat dalam dua dimensi:

Dimensi material:

- Peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan.
- Peningkatan akses terhadap layanan dasar: pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.
- Perbaikan infrastruktur.
- Peningkatan produktivitas ekonomi.

Dimensi non-material:

- Kebahagiaan dan kepuasan hidup.
- Rasa aman.
- Kohesi sosial dan solidaritas.
- Kepercayaan (trust).
- Pelestarian budaya dan identitas.
- Kualitas lingkungan hidup.

Indikator kemajuan desa tidak hanya angka-angka statistik, tetapi kualitas hidup manusia secara utuh. Desa yang maju adalah desa yang penduduknya bahagia, merasa aman, memiliki kohesi sosial kuat, dan bangga dengan budayanya.

Studi kasus dari Ponggok, Pentingsari, Bayan, dan Karangbawang menunjukkan bahwa kemajuan desa dapat diraih dengan berbagai cara—pengembangan ekonomi, pariwisata, pelestarian budaya, atau perencanaan partisipatif. Yang penting adalah dinamika sosial yang sehat menjadi penggeraknya.

Pada akhirnya, dinamika sosial bukanlah tujuan, tetapi jalan. Tujuannya adalah desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, di mana setiap warganya dapat hidup bahagia dan bermartabat. Inilah cita-cita pembangunan desa yang sesungguhnya.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Anda, apa indikator kemajuan desa yang paling penting? Apakah pendapatan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau kebahagiaan warga?
2. Bagaimana dinamika sosial di desa Anda? Apakah partisipasi warga tinggi, gotong royong masih kuat, dan konflik dapat dikelola dengan baik?
3. Apa manfaat paling nyata dari dinamika sosial yang positif yang Anda rasakan di desa Anda?
4. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam mencapai kemajuan desa di era modern seperti sekarang?
5. Bagaimana cara mengukur kebahagiaan dan kepuasan hidup warga desa? Apakah mungkin dijadikan indikator kemajuan?
6. Apakah ada contoh desa di sekitar Anda yang berhasil maju berkat dinamika sosial yang sehat? Apa yang bisa dipelajari dari mereka?
7. Menurut Anda, apa yang lebih penting: kemajuan material atau kemajuan non-material? Mengapa?
8. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dinamika sosial yang sehat dan mendorong kemajuan desa?

BAB XXV

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN DESA

A. PENGANTAR: DUA SISI MATA UANG PERUBAHAN

Perubahan adalah keniscayaan. Tidak ada masyarakat yang benar-benar statis, termasuk masyarakat desa. Sepanjang sejarah, desa-desa di Nusantara telah mengalami berbagai perubahan—datangnya agama-agama besar, masuknya pengaruh kolonial, penetrasi pasar, modernisasi pertanian, hingga revolusi digital. Setiap gelombang perubahan membawa dampak, ada yang positif dan ada yang negatif. Ibarat dua sisi mata uang, perubahan selalu hadir dengan wajah ganda.

Memahami dampak perubahan sosial secara seimbang adalah penting. Sikap nostalgia yang berlebihan pada masa lalu akan membuat kita buta terhadap peluang yang ditawarkan perubahan. Sebaliknya, optimisme buta terhadap modernisasi akan membuat kita abai terhadap risiko dan kerugian yang ditimbulkannya. Yang diperlukan adalah pandangan dialektis—melihat perubahan sebagai proses yang kompleks, dengan potensi berkah dan petaka sekaligus, dan yang terpenting, bagaimana masyarakat dapat beradaptasi secara cerdas.

Bab ini akan menganalisis secara mendalam dampak perubahan sosial terhadap kehidupan desa. Kita akan membahas dampak positif yang membawa kemajuan dan kesejahteraan, serta dampak negatif yang mengancam kohesi sosial, nilai-nilai luhur, dan keseimbangan hidup. Kita akan menggunakan perspektif dialektis, melihat bagaimana setiap dampak positif seringkali disertai dampak negatif, dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Pada bagian akhir, kita akan membahas tentang adaptasi dan resiliensi—bagaimana masyarakat desa dapat membangun ketahanan untuk menghadapi dampak negatif sambil tetap memetik manfaat dari perubahan.

B. DAMPAK POSITIF PERUBAHAN SOSIAL: BERKAH YANG TERASA

Perubahan sosial, terutama yang terkait dengan modernisasi dan kemajuan teknologi, telah membawa berbagai berkah bagi kehidupan desa.

1. Kemajuan Teknologi dan Kemudahan Hidup

a. Akses Informasi yang Melimpah

Dulu, informasi sulit didapat di desa. Surat kabar datang terlambat, radio hanya menyiarkan berita terbatas, dan televisi baru masuk ke desa-desa pada era 1990-an. Kini, dengan internet dan ponsel pintar, informasi dari seluruh dunia dapat diakses dalam hitungan detik. Petani dapat mengetahui harga komoditas secara real-time. Nelayan dapat memantau prakiraan cuaca dan gelombang laut. Ibu rumah tangga dapat mencari resep masakan, tips kesehatan, atau tutorial keterampilan. Anak sekolah dapat mengakses materi pembelajaran dari sumber mana pun.

b. Kemudahan Komunikasi

Dulu, berkomunikasi dengan keluarga yang merantau harus melalui surat yang memakan waktu berminggu-minggu, atau melalui telepon umum yang mahal dan sulit diakses. Kini, dengan ponsel dan aplikasi pesan instan, komunikasi menjadi mudah dan murah. Video call memungkinkan bertatap muka meskipun terpisah ribuan kilometer. Keluarga yang terpisah oleh rantau tetap dapat terhubung secara emosional.

c. Kemudahan Transaksi

Dulu, transaksi ekonomi hanya bisa dilakukan secara tunai dan tatap muka. Kini, dengan e-commerce dan pembayaran digital, produk desa dapat dijual ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Petani tidak lagi harus menjual ke tengkulak dengan harga murah; mereka bisa menjual langsung ke konsumen melalui platform online. Pembayaran dapat dilakukan secara digital, mengurangi risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar.

2. Terbukanya Peluang Ekonomi Baru

a. Diversifikasi Mata Pencaharian

Perubahan sosial membuka peluang ekonomi baru yang tidak ada sebelumnya. Di desa-desa yang mengembangkan pariwisata, muncul lapangan kerja baru: pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku seni pertunjukan, pengrajin cenderamata, penyedia jasa transportasi, dan lain-lain. Di desa-desa yang memanfaatkan teknologi digital, muncul profesi baru: content creator, digital marketer, dropshipper, afiliator. Generasi muda tidak lagi terbatas pada pilihan menjadi petani atau merantau ke kota; mereka dapat berkarya dan berpenghasilan dari desa.

b. Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal

Dengan akses informasi dan teknologi, produk lokal dapat ditingkatkan nilai tambahnya. Singkong tidak lagi hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi keripik, tepung mocaf, atau berbagai camilan kekinian. Kopi tidak lagi hanya dijual biji, tetapi diolah menjadi bubuk dengan kemasan menarik, bahkan dikembangkan menjadi produk turunan seperti sabun kopi atau lulur kopi. Kerajinan tangan tidak lagi hanya dijual di pasar lokal, tetapi dipasarkan secara online hingga ke mancanegara.

c. Akses ke Pasar yang Lebih Luas

E-commerce dan media sosial membuka akses ke pasar yang lebih luas. Produk-produk desa dapat menjangkau konsumen di kota-kota besar, bahkan di luar negeri. Ini meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UMKM desa.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

a. Akses Pendidikan yang Lebih Baik

Dulu, anak-anak desa hanya bisa bersekolah sampai tingkat dasar karena SMP dan SMA hanya ada di kecamatan atau kota. Kini, dengan program wajib belajar dan berbagai bantuan, akses pendidikan semakin luas. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi semakin banyak. Sekolah-sekolah di desa juga semakin berkualitas berkat program peningkatan kualitas guru dan pengadaan fasilitas.

Pendidikan jarak jauh dan platform pembelajaran online juga membuka akses ke materi pembelajaran berkualitas. Anak-anak desa dapat belajar dari guru-guru terbaik melalui video pembelajaran, mengikuti kursus online, atau mengakses perpustakaan digital.

b. Akses Kesehatan yang Lebih Baik

Fasilitas kesehatan di desa semakin baik. Puskesmas, pustu (puskesmas pembantu), dan posyandu menjangkau hampir seluruh desa. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memungkinkan warga desa berobat tanpa khawatir biaya. Tenaga kesehatan, seperti bidan desa dan perawat, semakin banyak. Program-program kesehatan seperti imunisasi, KB, dan pencegahan stunting semakin efektif.

Telemedicine juga mulai merambah desa. Warga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis secara online, tanpa harus bepergian jauh ke kota. Ini sangat membantu, terutama bagi warga dengan penyakit kronis atau mereka yang tinggal di daerah terpencil.

c. Infrastruktur yang Semakin Baik

Pembangunan infrastruktur di desa semakin pesat, terutama sejak digulirkannya Dana Desa. Jalan-jalan desa yang dulu rusak dan becek kini mulus beraspal. Jembatan-jembatan yang dulu rapuh kini kokoh.

Irigasi diperbaiki, meningkatkan produktivitas pertanian. Listrik menjangkau hampir seluruh desa. Air bersih semakin mudah diakses. Internet mulai masuk ke desa-desa.

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi

a. Kesadaran akan Hak-Hak

Pendidikan dan akses informasi meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Mereka tahu bahwa mereka berhak mendapatkan layanan publik yang baik, berhak berpartisipasi dalam pembangunan desa, berhak mengakses bantuan-bantuan pemerintah, dan berhak menyuarakan pendapat. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan yang pasif, tetapi mulai menuntut hak-haknya.

b. Partisipasi dalam Pembangunan

Kesadaran akan hak diikuti oleh partisipasi yang lebih tinggi. Masyarakat semakin aktif dalam musyawarah desa, dalam perencanaan pembangunan, dalam pengawasan program, dan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Mereka tidak lagi hanya menerima apa yang diberikan, tetapi ikut menentukan apa yang harus dibangun dan bagaimana membangunnya.

c. Kesadaran akan Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Mereka rutin memeriksakan kehamilan, mengimunisasi anak, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan juga meningkat. Orang tua rela berkorban untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Kesadaran akan lingkungan juga tumbuh. Masyarakat mulai peduli pada pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian sumber daya alam.

C. DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN SOSIAL: PERTAJA TERSEMBUNYI

Di balik berbagai berkah tersebut, perubahan sosial juga membawa dampak negatif yang tidak boleh diabaikan. Ibarat pisau bermata dua, perubahan bisa melukai jika tidak digunakan dengan bijak.

1. Lunturnya Nilai-Nilai Tradisional

a. Memudarnya Gotong Royong

Salah satu keluhan paling umum di desa adalah lunturnya nilai gotong royong. Dulu, membangun rumah dilakukan dengan sambatan, tetangga dan kerabat datang membantu tanpa dibayar. Kini, orang lebih memilih menggunakan tukang bayaran. Dulu, kerja bakti membersihkan lingkungan diikuti hampir seluruh warga. Kini, hanya sedikit yang hadir; yang lain sibuk dengan urusan masing-masing atau memilih membayar iuran.

Memudarnya gotong royong bukan hanya soal hilangnya efisiensi, tetapi juga hilangnya solidaritas. Dalam gotong royong, orang tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Ketika gotong royong luntur, ikatan sosial pun melemah.

b. Melemahnya Solidaritas Mekanik

Émile Durkheim membedakan dua tipe solidaritas: mekanik dan organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan—kesamaan pekerjaan, nilai, pengalaman. Ini adalah tipe solidaritas masyarakat tradisional. Solidaritas organik didasarkan pada saling ketergantungan karena pembagian kerja yang kompleks.

Modernisasi menggeser solidaritas mekanik ke organik. Orang tidak lagi terikat oleh kesamaan, tetapi oleh saling ketergantungan. Pergeseran ini wajar, bahkan tak terelakkan. Namun, ia juga menimbulkan rasa keterasingan (anomie) bagi sebagian orang, terutama generasi tua. Mereka merasa tidak lagi memiliki ikatan yang kuat dengan komunitasnya. Mereka merasa asing di tengah perubahan yang cepat.

c. Krisis Identitas pada Generasi Muda

Generasi muda desa hidup dalam tarik-menarik antara dua dunia. Di satu sisi, mereka mewarisi nilai-nilai tradisional dari orang tua dan lingkungan. Di sisi lain, mereka terpapar nilai-nilai modern dari media sosial, internet, dan pergaulan. Mereka bisa mengalami kebingungan identitas—antara ingin menjadi "orang desa" yang menjunjung tradisi dan ingin menjadi "orang modern" yang dianggap keren.

Krisis identitas ini bisa membuat mereka kehilangan pegangan. Mereka mungkin meninggalkan tradisi tanpa memiliki nilai baru yang kokoh sebagai pengganti. Akibatnya, mereka rentan terhadap pengaruh negatif.

2. Meningkatnya Kesenjangan Sosial

a. Kesenjangan Ekonomi

Modernisasi tidak selalu membawa pemerataan. Seringkali, ia justru menciptakan kesenjangan baru. Yang memiliki akses ke pendidikan, modal, teknologi, dan informasi akan maju. Yang tidak memiliki akses akan tertinggal. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar.

Di desa, kesenjangan ini terlihat jelas. Ada keluarga yang rumahnya megah, mobilnya banyak, anaknya sekolah di kota. Ada keluarga yang masih tinggal di gubuk reyot, anaknya putus sekolah, makan seadanya. Kesenjangan ini bisa memicu kecemburuan sosial, konflik, dan berbagai masalah sosial lainnya.

b. Kesenjangan Digital (Digital Divide)

Digitalisasi membawa manfaat besar, tetapi juga menciptakan kesenjangan baru antara mereka yang melek teknologi dan yang tidak. Yang melek teknologi dapat mengakses informasi, peluang ekonomi, dan layanan publik dengan lebih mudah. Yang tidak melek teknologi semakin tertinggal.

Kesenjangan digital terjadi dalam beberapa dimensi:

- **Akses**: Tidak semua warga memiliki perangkat yang memadai (ponsel pintar, komputer) dan akses internet.
- **Keterampilan**: Tidak semua warga memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.
- **Manfaat**: Yang sudah melek teknologi dapat memetik manfaat lebih besar dari digitalisasi.

c. Kesenjangan Antargenerasi

Generasi muda, sebagai digital natives, lebih cepat menguasai teknologi daripada generasi tua. Ini menciptakan kesenjangan pengetahuan dan kekuasaan. Anak muda mungkin lebih tahu tentang banyak hal daripada orang tua mereka. Ini bisa mengubah relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat.

3. Masalah Sosial Baru

a. Kenakalan Remaja

Modernisasi dan pengaruh media sosial membawa perubahan dalam perilaku remaja. Tayangan kekerasan, pornografi, dan gaya hidup hedonis di media sosial dapat memicu perilaku menyimpang. Tawuran antar kelompok pemuda, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas mulai merambah desa-desa.

Orang tua dan tokoh masyarakat seringkali kewalahan menghadapi fenomena ini. Mereka merasa nilai-nilai yang mereka tanamkan tidak lagi mempan. Remaja lebih percaya pada apa yang mereka lihat di media sosial daripada nasihat orang tua.

b. Kriminalitas

Kriminalitas di desa cenderung meningkat. Pencurian, penipuan, dan kekerasan semakin sering terjadi. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, tetapi juga faktor lain seperti lemahnya kontrol sosial dan pengaruh lingkungan pergaulan.

c. Konsumerisme dan Jeratan Utang

Media sosial dan iklan mendorong gaya hidup konsumtif. Remaja dan dewasa muda ingin memiliki ponsel terbaru, motor keren, pakaian branded, dan mengikuti tren yang sedang viral. Gengsi menjadi ukuran status. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam utang, baik ke rentenir, bank, atau pinjaman online ilegal. Beban utang ini bisa menghancurkan ekonomi keluarga.

d. Masalah Kesehatan Mental

Perubahan yang cepat dan tekanan hidup modern juga berdampak pada kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan depresi mulai banyak ditemui, terutama di kalangan generasi muda. Tekanan untuk sukses, untuk mengikuti tren, untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat, bisa sangat membebani. Sayangnya, kesadaran akan kesehatan mental masih rendah, dan layanan kesehatan mental di desa hampir tidak ada.

4. Degradasi Lingkungan

a. Alih Fungsi Lahan

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi mendorong alih fungsi lahan. Lahan pertanian yang subur berubah menjadi perumahan, industri, atau infrastruktur. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun, ketahanan pangan terancam.

b. Pencemaran

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan mencemari tanah dan air. Limbah rumah tangga dan industri mencemari sungai. Sampah plastik menumpuk di mana-mana. Polusi udara dari kendaraan bermotor dan pabrik mulai dirasakan.

c. Eksploitasi Sumber Daya

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, baik oleh pihak luar maupun masyarakat sendiri, mengancam kelestarian lingkungan. Hutan gundul, tambang terbuka, penangkapan ikan dengan bahan peledak—semua ini merusak ekosistem dan mengancam masa depan.

5. Konflik Sosial

a. Konflik Antar Kelompok

Perubahan sosial dapat memicu konflik antar kelompok. Kelompok pendatang dan penduduk asli bisa berseteru memperebutkan sumber daya. Kelompok pendukung partai politik berbeda bisa terlibat konflik saat pemilihan. Kelompok agama yang berbeda bisa terprovokasi oleh isu-isu sensitif.

b. Konflik Antar Generasi

Perbedaan nilai dan pandangan antara generasi tua dan muda bisa memicu konflik. Generasi tua merasa nilai-nilai yang mereka junjung tidak dihormati. Generasi muda merasa terkekang oleh tradisi yang dianggap kuno. Komunikasi yang buruk bisa membuat konflik semakin meruncing.

c. Konflik dalam Keluarga

Perubahan sosial juga berdampak pada dinamika keluarga. Pola asuh berubah, peran gender bergeser, mobilitas meningkat. Keluarga yang dulu menjadi tempat berlindung yang aman, kini bisa menjadi sumber konflik. Perceraian, KDRT, dan masalah keluarga lainnya meningkat.

6. Anomie: Keterasingan di Tengah Perubahan

Konsep anomie dari Émile Durkheim relevan untuk memahami dampak negatif perubahan sosial. Anomie adalah keadaan tanpa norma, ketika norma-norma lama telah luntur tetapi norma baru belum terbentuk. Orang kehilangan pegangan, tidak tahu apa yang benar dan salah, apa yang boleh dan tidak boleh.

Di desa, anomie bisa dialami oleh berbagai kelompok:

- **Generasi tua**: Mereka merasa nilai-nilai yang mereka junjung tidak lagi dihormati. Mereka bingung menghadapi perilaku generasi muda yang bertentangan dengan tradisi.
- **Generasi muda**: Mereka hidup di persimpangan, antara nilai tradisional dan modern. Mereka bisa kehilangan arah jika tidak memiliki pegangan yang kuat.
- **Kelompok marginal**: Mereka yang tertinggal dalam perubahan bisa merasa terasing, tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang bergerak cepat.

Anomie dapat memicu berbagai masalah sosial: depresi, bunuh diri, kriminalitas, dan perilaku menyimpang lainnya.

D. ANALISIS DIALEKTIS: MENERIMA KEDUA SISI

Dampak positif dan negatif perubahan sosial tidak bisa dipisahkan secara kaku. Seringkali, satu fenomena membawa dua sisi sekaligus. Analisis dialektis membantu kita melihat kompleksitas ini.

Tesis, Antitesis, Sintesis

Mari kita ambil contoh digitalisasi:

- **Tesis (Dampak Positif)** : Digitalisasi membuka akses informasi, peluang ekonomi, dan kemudahan komunikasi. Ini adalah berkah.
- **Antitesis (Dampak Negatif)** : Digitalisasi juga menciptakan kesenjangan digital, memicu konsumerisme, melunturkan interaksi langsung, dan membuka pintu bagi hoaks dan penipuan. Ini adalah petaka.
- **Sintesis (Respon Adaptif)** : Masyarakat perlu merespons secara adaptif. Mereka perlu meningkatkan literasi digital, memanfaatkan teknologi secara selektif, dan tetap menjaga interaksi langsung. Mereka perlu membangun filter budaya untuk menyaring pengaruh negatif.

Contoh lain: modernisasi pertanian

- **Tesis**: Modernisasi pertanian (penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, traktor) meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
- **Antitesis**: Modernisasi pertanian juga merusak lingkungan (pencemaran tanah dan air), menciptakan ketergantungan pada input eksternal, dan menggeser tenaga kerja pertanian.
- **Sintesis**: Petani perlu mengadopsi teknologi secara selektif, mengembangkan pertanian berkelanjutan (agroforestri, pertanian organik), dan mencari solusi yang memadukan produktivitas dan kelestarian.

Contoh lain: pariwisata desa

- **Tesis**: Pariwisata membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mempromosikan budaya lokal.
- **Antitesis**: Pariwisata juga dapat mengkomersialkan budaya, merusak lingkungan, dan menciptakan kesenjangan antara yang terlibat dan tidak.
- **Sintesis**: Desa perlu mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, yang melibatkan seluruh warga dan menjaga kelestarian alam dan budaya.

Analisis dialektis mengajarkan kita untuk tidak jatuh pada dua ekstrem: nostalgia buta pada masa lalu atau optimisme naif pada masa depan. Yang diperlukan adalah sikap kritis dan adaptif.

E. ADAPTASI DAN RESILIENSI: KUNCI MENGHADAPI PERUBAHAN

Menghadapi dampak negatif perubahan sosial, masyarakat desa tidak boleh pasif. Mereka perlu membangun adaptasi dan resiliensi.

1. Pengertian Adaptasi dan Resiliensi

Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Masyarakat yang adaptif mampu membaca perubahan, menilai dampaknya, dan mengubah perilaku serta strategi hidup mereka agar tetap dapat bertahan dan berkembang.

Resiliensi (ketahanan) adalah kemampuan untuk pulih dari guncangan atau tekanan. Masyarakat yang resilien tidak mudah hancur ketika menghadapi krisis. Mereka memiliki cadangan sumber daya, jaringan sosial yang kuat, dan kemampuan untuk bangkit kembali.

2. Membangun Adaptasi dan Resiliensi di Desa

a. Memperkuat Modal Sosial

Modal sosial—kepercayaan, jaringan, norma resiprositas—adalah fondasi resiliensi. Ketika masyarakat saling percaya, memiliki jaringan yang kuat, dan terbiasa saling membantu, mereka akan lebih mampu menghadapi krisis bersama-sama. Gotong royong, arisan, dan kegiatan kolektif lainnya perlu terus dihidupkan.

b. Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kelompok

Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kapasitas individu untuk beradaptasi. Orang yang terdidik dan terampil lebih mudah menemukan peluang baru di tengah perubahan. Kelompok-kelompok usaha, koperasi, dan organisasi masyarakat perlu diperkuat agar mampu bertindak kolektif.

c. Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan pada satu sektor ekonomi sangat berisiko. Jika sektor itu collapse, masyarakat akan kesulitan. Diversifikasi ekonomi—mengembangkan berbagai sektor (pertanian, industri kecil, jasa, pariwisata)—meningkatkan resiliensi. Ketika satu sektor melemah, sektor lain bisa menjadi penopang.

d. Memperkuat Kelembagaan Lokal

Lembaga-lembaga lokal—pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, lembaga adat—harus diperkuat. Mereka menjadi wadah untuk aksi kolektif, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Lembaga yang kuat akan mampu merespons perubahan dengan lebih baik.

e. Membangun Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Darurat

Desa perlu memiliki sistem untuk mendeteksi dini potensi krisis—bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial—dan mekanisme untuk meresponsnya secara cepat dan terkoordinasi. Ini melibatkan pelatihan, peralatan, dan prosedur yang jelas.

f. Melestarikan Pengetahuan dan Keterampilan Tradisional

Pengetahuan dan keterampilan tradisional—tentang pengobatan, pertanian, pengawetan makanan, navigasi, dan lain-lain—adalah aset berharga untuk resiliensi. Dalam krisis, pengetahuan ini bisa menjadi penyelamat. Pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional perlu dilakukan.

g. Mengembangkan Jaring Pengaman Sosial

Jaring pengaman sosial—baik formal (program bantuan pemerintah) maupun informal (bantuan keluarga dan tetangga)—perlu diperkuat. Ini akan melindungi kelompok rentan dari dampak terburuk perubahan.

h. Membangun Filter Budaya

Masyarakat perlu memiliki filter budaya untuk menyaring pengaruh negatif perubahan. Nilai-nilai luhur, agama, dan adat istiadat dapat menjadi filter. Generasi muda perlu dibekali dengan nilai-nilai yang kuat agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif.

i. Meningkatkan Literasi Digital

Di era digital, literasi digital menjadi keterampilan hidup yang penting. Masyarakat perlu diedukasi tentang cara menggunakan teknologi secara bijak, cara memverifikasi informasi, cara melindungi diri dari penipuan online, dan cara memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif.

F. STUDI KASUS: ADAPTASI DAN RESILIENSI DI DESA

1. Desa Bayan, Lombok: Resiliensi melalui Tradisi

Desa Bayan di Lombok Utara adalah contoh desa yang resilien berkat tradisi yang kuat. Ketika gempa bumi dahsyat melanda Lombok pada tahun 2018, banyak desa hancur dan warganya trauma. Namun, Desa Bayan yang tetap memegang teguh tradisi justru lebih cepat pulih.

Faktor resiliensi:

- **Gotong royong yang kuat**: Warga bahu-membahu membersihkan puing, membangun kembali rumah, dan membantu korban.
- **Kepemimpinan adat**: Tokoh adat memimpin proses pemulihan dengan kearifan lokal.
- **Nilai-nilai spiritual**: Ritual adat dan keagamaan membantu warga mengatasi trauma.
- **Pengetahuan lokal**: Pengetahuan tentang konstruksi rumah tahan gempa secara tradisional membantu proses rekonstruksi.

2. Desa Ponggok, Klaten: Adaptasi melalui Inovasi

Desa Ponggok adalah contoh desa yang adaptif terhadap perubahan. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga maju pesat dengan memanfaatkan peluang.

Faktor adaptasi:

- **Inovasi**: Mengembangkan potensi wisata air Umbul Ponggok yang tadinya tidak terurus.
- **Pemanfaatan teknologi**: Menggunakan digital marketing untuk promosi, aplikasi untuk reservasi, dan media sosial untuk membangun brand.
- **Kelembagaan kuat**: BUMDes Tirta Mandiri dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang baik.
- **Partisipasi masyarakat**: Seluruh warga dilibatkan, baik sebagai pengelola homestay, pelaku UMKM, atau pekerja di sektor wisata.

3. Desa Pentingsari, Yogyakarta: Adaptasi dengan Tetap Memegang Tradisi

Desa Pentingsari adalah contoh desa yang berhasil mengadaptasi perubahan tanpa kehilangan jati diri. Mereka mengembangkan desa wisata dengan tetap memegang teguh nilai-nilai lokal.

Faktor adaptasi:

- **Mempertahankan gotong royong**: Pengelolaan wisata dilakukan secara kolektif, dengan semangat gotong royong.
- **Melestarikan budaya**: Kesenian tradisional tetap dipertahankan dan menjadi daya tarik wisata.
- **Kepemimpinan visioner**: Tokoh masyarakat seperti Pak Wiyono menjadi motor penggerak.
- **Keterlibatan pemuda**: Pemuda dilibatkan aktif sebagai pemandu wisata, pelaku seni, dan pengelola media sosial.

4. Desa di Kecamatan Plakat Tinggi: Adaptasi melalui Pemberdayaan

Di Desa Plakat Tinggi, program pemberdayaan masyarakat membantu warga beradaptasi dengan perubahan. Mereka dilatih keterampilan baru, diedukasi tentang teknologi ramah lingkungan, dan didampingi dalam mengembangkan usaha.

Faktor adaptasi:

- **Pendidikan dan pelatihan**: Meningkatkan kapasitas warga untuk menghadapi perubahan.
- **Teknologi tepat guna**: Memperkenalkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lokal.
- **Pendampingan**: Pendampingan berkelanjutan membantu warga mengimplementasikan pengetahuan baru.
- **Penguatan kelembagaan**: Kelompok-kelompok usaha dan organisasi masyarakat diperkuat.

G. RANGKUMAN

Perubahan sosial membawa dampak ganda: positif dan negatif. Analisis yang seimbang diperlukan agar kita tidak jatuh pada nostalgia buta atau optimisme naif.

Dampak positif perubahan sosial meliputi:

1. **Kemajuan teknologi dan kemudahan hidup**: akses informasi, kemudahan komunikasi, kemudahan transaksi.
2. **Terbukanya peluang ekonomi baru**: diversifikasi mata pencaharian, peningkatan nilai tambah produk lokal, akses ke pasar yang lebih luas.
3. **Peningkatan kualitas layanan publik**: akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik.
4. **Peningkatan kesadaran dan partisipasi**: kesadaran akan hak, partisipasi dalam pembangunan, kesadaran akan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Dampak negatif perubahan sosial meliputi:

1. **Lunturnya nilai-nilai tradisional**: memudarnya gotong royong, melemahnya solidaritas mekanik, krisis identitas pada generasi muda.
2. **Meningkatnya kesenjangan sosial**: kesenjangan ekonomi, kesenjangan digital, kesenjangan antargenerasi.
3. **Masalah sosial baru**: kenakalan remaja, kriminalitas, konsumerisme dan jeratan utang, masalah kesehatan mental.
4. **Degradasi lingkungan**: alih fungsi lahan, pencemaran, eksploitasi sumber daya.
5. **Konflik sosial**: konflik antar kelompok, antar generasi, dalam keluarga.
6. **Anomie**: keterasingan di tengah perubahan.

Analisis dialektis membantu kita melihat bahwa setiap fenomena perubahan memiliki dua sisi. Digitalisasi membawa berkah informasi dan peluang, tetapi juga petaka kesenjangan dan hoaks. Modernisasi pertanian meningkatkan produktivitas, tetapi juga merusak lingkungan. Pariwisata desa membuka lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mengkomersialkan budaya.

Menghadapi dampak negatif, masyarakat desa perlu membangun **adaptasi dan resiliensi**:

1. **Memperkuat modal sosial**: kepercayaan, jaringan, norma resiprositas.
2. **Meningkatkan kapasitas individu dan kelompok**: pendidikan, pelatihan, penguatan organisasi.
3. **Diversifikasi ekonomi**: mengurangi ketergantungan pada satu sektor.
4. **Memperkuat kelembagaan lokal**: pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, lembaga adat.
5. **Membangun sistem peringatan dini dan tanggap darurat**.
6. **Melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional**.
7. **Mengembangkan jaring pengaman sosial**.
8. **Membangun filter budaya**.
9. **Meningkatkan literasi digital**.

Studi kasus dari Bayan, Ponggok, Pentingsari, dan Plakat Tinggi menunjukkan bahwa adaptasi dan resiliensi dapat dibangun. Bayan resilien berkat tradisi yang kuat. Ponggok adaptif berkat inovasi dan teknologi. Pentingsari berhasil memadukan adaptasi dan tradisi. Plakat Tinggi membangun adaptasi melalui pemberdayaan.

Pada akhirnya, perubahan adalah keniscayaan. Yang membedakan desa yang maju dari yang tertinggal bukanlah ada tidaknya perubahan, tetapi bagaimana masyarakatnya merespons perubahan. Desa yang mampu beradaptasi secara cerdas, membangun resiliensi, dan memilah mana yang baik untuk diadopsi dan mana yang harus ditolak, akan tetap bertahan dan bahkan maju di tengah arus perubahan. Desa yang pasif dan tidak mampu beradaptasi akan tergerus dan tertinggal.

H. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Anda, apa dampak positif terbesar dari perubahan sosial yang Anda rasakan di desa Anda? Apa dampak negatif terbesarnya?

2. Bagaimana perubahan sosial mempengaruhi nilai-nilai tradisional seperti gotong royong di desa Anda? Apakah masih kuat atau mulai luntur?
3. Apakah Anda merasakan adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar di desa Anda? Kelompok mana yang paling diuntungkan dan paling dirugikan oleh perubahan?
4. Bagaimana pengaruh media sosial dan internet terhadap generasi muda di desa Anda? Apakah lebih banyak dampak positif atau negatif?
5. Apakah ada konflik yang dipicu oleh perubahan sosial di desa Anda? Bagaimana cara mengatasinya?
6. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan desa Anda untuk membangun adaptasi dan resiliensi menghadapi perubahan?
7. Bagaimana peran generasi muda dalam membantu desa beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur?
8. Apakah ada contoh konkret di desa Anda tentang adaptasi yang berhasil terhadap perubahan? Apa yang bisa dipelajari dari contoh tersebut?

BAB XXVI

TANTANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI DESA

A. PENGANTAR: MENEROPONG KERUMITAN DI BALIK CITA-CITA

Pembangunan desa adalah cita-cita mulia. Ia adalah upaya sadar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Namun, perjalanan menuju cita-cita itu tidak pernah mudah. Di balik gemerlap program dan kebijakan, tersimpan berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi—struktural, kultural, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam adalah prasyarat mutlak untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif.

Bab ini akan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai tantangan pembangunan sosial di desa. Kita akan memulai dengan tantangan paling fundamental: urbanisasi yang terus menguras sumber daya manusia desa. Selanjutnya, kita akan membahas ketimpangan ekonomi dalam berbagai dimensinya—desa-kota, intra-desa, dan akses terhadap sumber daya. Kita juga akan menganalisis tantangan kultural: perubahan budaya yang cepat dan ancaman terhadap nilai-nilai lokal. Tidak kalah penting adalah tantangan lingkungan: degradasi sumber daya alam yang mengancam keberlanjutan hidup. Akhirnya, kita akan membahas tantangan kelembagaan: lemahnya kapasitas institusi desa dalam merespons berbagai persoalan.

B. URBANISASI: KETIKA DESA KEHILANGAN ENERGI MUDA

Urbanisasi—perpindahan penduduk dari desa ke kota—adalah fenomena massif yang telah berlangsung puluhan tahun dan terus berlanjut hingga kini. Ia adalah salah satu tantangan terbesar pembangunan desa.

1. Skala dan Dinamika Urbanisasi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi penduduk perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, lebih dari 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat. Di balik angka ini, ada jutaan penduduk desa, terutama generasi muda, yang berbondong-bondong meninggalkan desa menuju kota.

Mereka pergi dengan berbagai alasan: melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, mengikuti keluarga, atau sekadar mencari pengalaman hidup baru. Kota menawarkan apa yang tidak dapat diberikan desa: pendidikan tinggi, lapangan kerja beragam, fasilitas modern, dan gaya hidup yang dianggap lebih "keren".

2. Dampak Urbanisasi terhadap Desa

a. Kehilangan Generasi Muda Produktif

Dampak paling nyata adalah desa kehilangan penduduk usia produktif, kreatif, dan energik. Mereka yang pergi adalah yang berusia 15-35 tahun—usia di mana manusia paling produktif, paling kreatif, dan paling berani mengambil risiko. Mereka adalah calon pemimpin, calon inovator, calon penggerak perubahan.

Akibatnya, desa mengalami "penuaan penduduk" (aging population). Yang tersisa adalah orang tua, lansia, dan anak-anak yang dititipkan kepada kakek-nenek. Desa kehilangan dinamismenya. Inovasi mandek. Partisipasi dalam kegiatan sosial merosot. Gotong royong sepi. Ronda malam hanya diikuti beberapa orang tua.

b. Putusnya Mata Rantai Transfer Pengetahuan

Pengetahuan dan keterampilan tradisional biasanya diwariskan secara alami dari generasi tua ke generasi muda. Anak-anak belajar bertani dari orang tuanya dengan membantu di sawah. Remaja belajar membuat kerajinan dari kakek-neneknya. Perempuan muda belajar memasak dan mengurus rumah tangga dari ibu dan neneknya.

Ketika generasi muda pergi ke kota, mata rantai transfer pengetahuan ini terputus. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk belajar dari generasi tua. Ketika mereka kembali ke desa—jika mereka kembali—mereka mungkin sudah kehilangan minat atau keterampilan untuk melanjutkan tradisi. Akibatnya, pengetahuan dan keterampilan tradisional perlahan punah.

c. Hilangnya Agen Perubahan

Generasi muda yang terdidik, yang terpapar ide-ide baru, yang memiliki wawasan luas, seharusnya menjadi agen perubahan di desa. Mereka adalah yang paling mungkin memperkenalkan inovasi, mendorong modernisasi, dan menggerakkan pembangunan. Namun, mereka justru pergi ke kota. Desa kehilangan aset paling berharganya.

Di banyak desa, Karang Taruna (organisasi kepemudaan) mati suri karena tidak ada anggota. Tidak ada yang mengorganisir kegiatan pemuda. Tidak ada yang menyuarakan aspirasi generasi muda. Tidak ada yang menjadi kader pemimpin masa depan.

d. Perubahan Struktur Keluarga

Urbanisasi mengubah struktur keluarga. Keluarga yang tadinya tinggal bersama dalam satu rumah atau satu kampung, kini terpisah oleh jarak ratusan kilometer. Orang tua tinggal di desa, anak-anak merantau di

kota. Ikatan keluarga melemah, meskipun tetap terpelihara melalui komunikasi jarak jauh dan kunjungan tahunan saat lebaran.

Perubahan ini juga berdampak pada pola pengasuhan anak. Banyak anak yang dititipkan kepada kakek-nenek sementara orang tua bekerja di kota. Pengasuhan oleh kakek-nenek bisa jadi kurang optimal dibanding pengasuhan oleh orang tua sendiri. Anak-anak bisa mengalami masalah psikologis atau perilaku.

e. Ketergantungan pada Remitansi

Di satu sisi, remitansi (uang kiriman) dari perantau menjadi sumber ekonomi penting bagi banyak desa. Uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, modal usaha, atau pembangunan rumah. Di beberapa desa, remitansi bahkan melebihi pendapatan dari sektor pertanian.

Namun, ketergantungan pada remitansi juga berisiko. Jika perantau kehilangan pekerjaan atau terjadi krisis ekonomi di kota, aliran remitansi bisa terhenti. Desa yang terlalu bergantung pada remitansi akan rentan secara ekonomi.

3. Mengapa Urbanisasi Sulit Dihentikan?

Urbanisasi bukan fenomena yang bisa dihentikan dengan kebijakan sederhana. Ada faktor-faktor struktural yang mendorongnya:

- **Kesenjangan desa-kota**: Kota menawarkan lebih banyak lapangan kerja, pendidikan lebih tinggi, fasilitas kesehatan lebih baik, dan hiburan lebih beragam.
- **Terbatasnya lapangan kerja di desa**: Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa seringkali tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja, apalagi memberikan pendapatan yang layak.
- **Pendidikan**: Pendidikan tinggi hanya tersedia di kota-kota besar. Untuk melanjutkan studi, pemuda desa harus pergi.
- **Prestise sosial**: Bekerja di kota, menjadi pegawai, atau berwirausaha di kota sering dianggap lebih bergengsi daripada menjadi petani di desa.

4. Strategi Menghadapi Urbanisasi

Menghadapi urbanisasi, strategi yang diperlukan bukanlah melarang orang pergi, tetapi menciptakan kondisi yang membuat desa menarik untuk ditinggali dan dikembangkan.

a. Membangun Ekonomi Desa yang Menarik

Desa harus mampu menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha yang menarik, terutama bagi generasi muda. Pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial—pertanian modern, agroindustri, pariwisata, ekonomi kreatif—harus menjadi prioritas. BUMDes harus dikembangkan menjadi motor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

b. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, infrastruktur, dan hiburan harus ditingkatkan. Jika desa bisa menyediakan apa yang dicari di kota, orang tidak perlu pergi.

c. Membangun Konektivitas

Konektivitas yang baik—jalan, transportasi, internet—memungkinkan orang untuk mengakses peluang di kota tanpa harus pindah ke kota. Mereka bisa bekerja di kota tetapi tetap tinggal di desa (commuting). Mereka bisa menjual produk ke kota melalui e-commerce.

d. Memberdayakan Perantau

Perantau bukan musuh, tetapi aset. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, jaringan, dan modal. Pemerintah desa perlu membangun komunikasi yang baik dengan perantau, melibatkan mereka dalam pembangunan desa, dan memfasilitasi investasi mereka di kampung halaman.

C. KETIMPANGAN EKONOMI: JURANG YANG MELEBAR

Ketimpangan ekonomi adalah tantangan struktural yang sulit dipecahkan. Ia terjadi dalam berbagai dimensi.

1. Ketimpangan Desa-Kota

Kesenjangan antara desa dan kota adalah fakta yang tak terbantahkan. Indikator-indikator pembangunan manusia—pendidikan, kesehatan, pendapatan—di desa secara konsisten lebih rendah daripada di kota. Infrastruktur di desa tertinggal. Akses terhadap layanan publik terbatas. Peluang ekonomi lebih sempit.

Kesenjangan ini adalah akar dari urbanisasi. Orang pergi ke kota karena di sanalah peluang berada. Selama kesenjangan desa-kota masih lebar, arus urbanisasi akan terus mengalir.

2. Ketimpangan Intra-Desa

Di dalam desa sendiri, ketimpangan juga terjadi. Ada keluarga yang kaya raya, memiliki tanah luas, rumah megah, mobil mewah. Ada keluarga yang hidup pas-pasan, rumah reot, bahkan tidak punya tanah. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin di desa bisa sangat tajam.

a. Ketimpangan Kepemilikan Tanah

Di desa agraris, tanah adalah sumber kekayaan utama. Mereka yang memiliki tanah luas (tuan tanah) berada di puncak hierarki ekonomi. Mereka yang tidak punya tanah (buruh tani) berada di dasar. Kesenjangan kepemilikan tanah ini diwariskan secara turun-temurun dan sulit diubah.

b. Ketimpangan Akses terhadap Modal

Kelompok kaya memiliki akses lebih mudah terhadap modal. Mereka punya agunan untuk meminjam ke bank. Mereka punya tabungan untuk investasi. Mereka punya jaringan untuk mendapatkan informasi peluang usaha. Kelompok miskin tidak memiliki semua itu. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan: miskin karena tidak punya modal, tidak bisa mengakses modal karena miskin.

c. Ketimpangan Akses terhadap Teknologi dan Informasi

Kelompok kaya lebih cepat mengadopsi teknologi baru. Mereka mampu membeli traktor, pompa air, atau teknologi pertanian modern. Mereka punya ponsel pintar dan akses internet. Kelompok miskin tertinggal. Mereka masih menggunakan teknologi tradisional yang kurang efisien.

d. Ketimpangan Pendidikan

Anak-anak dari keluarga kaya dapat bersekolah setinggi mungkin, bahkan ke luar negeri. Anak-anak dari keluarga miskin sering putus sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga. Kesenjangan pendidikan ini diwariskan ke generasi berikutnya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan

a. Warisan Sejarah

Ketimpangan kepemilikan tanah sering merupakan warisan sejarah. Pada masa kolonial, tanah-tanah terbaik dikuasai oleh tuan tanah yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, redistribusi tanah tidak berjalan efektif. Akibatnya, struktur kepemilikan tanah yang timpang masih bertahan.

b. Kebijakan yang Tidak Pihak pada Miskin

Kebijakan pembangunan seringkali lebih menguntungkan kelompok kaya. Subsidi pupuk dan benih lebih banyak dinikmati petani kaya yang punya lahan luas. Kredit usaha lebih mudah diakses oleh mereka yang punya agunan. Program-program pengentasan kemiskinan sering tidak tepat sasaran.

c. Mekanisme Pasar

Pasar cenderung memperkuat ketimpangan, bukan menguranginya. Yang punya modal bisa mengakses teknologi dan pasar yang lebih baik, sehingga semakin kaya. Yang miskin, dengan sumber daya terbatas, sulit bersaing.

d. Jaringan dan Koneksi

Jaringan sosial dan koneksi politik juga mempengaruhi ketimpangan. Kelompok yang memiliki koneksi dengan penguasa, pejabat, atau pengusaha besar lebih mudah mengakses proyek, izin, atau bantuan. Kelompok miskin tidak memiliki akses itu.

4. Dampak Ketimpangan

a. Kemiskinan yang Persisten

Ketimpangan membuat kemiskinan sulit diatasi. Kelompok miskin tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan.

b. Kecemburuan Sosial dan Konflik

Ketimpangan yang tajam dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik. Yang miskin bisa merasa iri dan marah pada yang kaya. Konflik horizontal antara kelompok kaya dan miskin bisa terjadi, terutama jika ada isu-isu yang memicu.

c. Disintegrasi Sosial

Ketimpangan yang ekstrem dapat merusak kohesi sosial. Ikatan gotong royong dan solidaritas yang tadinya kuat bisa luntur karena orang lebih mementingkan status dan kepentingan kelompoknya.

d. Stagnasi Ekonomi

Ketimpangan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat terbatas, sehingga permintaan agregat rendah. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan juga rendah, sehingga kualitas SDM buruk.

5. Strategi Mengatasi Ketimpangan

a. Reforma Agraria

Redistribusi tanah adalah langkah fundamental untuk mengatasi ketimpangan di desa agraris. Pemerintah perlu menegakkan UU Pokok Agraria dan melakukan reforma agraria secara konsisten. Tanah-tanah yang dikuasai negara dan tanah-tanah yang melebihi batas maksimum perlu didistribusikan kepada petani tidak bertanah.

b. Akses terhadap Modal dan Teknologi

Program-program kredit mikro, koperasi, dan BUMDes perlu diperkuat agar kelompok miskin dapat mengakses modal dengan bunga ringan. Penyuluhan dan pelatihan perlu diberikan agar mereka dapat mengadopsi teknologi baru.

c. Pendidikan dan Keterampilan

Investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama untuk kelompok miskin, adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Beasiswa, sekolah gratis, dan program peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas.

d. Jaring Pengaman Sosial

Program-program bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT) perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk melindungi kelompok miskin dari dampak terburuk krisis dan perubahan ekonomi.

e. Kebijakan yang Berpihak pada Miskin

Semua kebijakan harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan. Subsidi, kredit, bantuan, dan program-program lainnya harus dirancang agar lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin.

D. PERUBAHAN BUDAYA YANG CEPAT: ANCAMAN TERHADAP IDENTITAS

Perubahan budaya yang cepat, sebagai konsekuensi dari globalisasi dan modernisasi, membawa tantangan serius bagi desa.

1. Erosi Nilai-Nilai Tradisional

Nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi fondasi kehidupan desa—gotong royong, hormat kepada orang tua, kesederhanaan, religiusitas—mulai tergerus oleh nilai-nilai baru yang dibawa modernisasi.

a. Individualisme

Nilai individualisme yang menekankan kebebasan pribadi dan pencapaian personal mulai menggantikan nilai kolektivisme dan gotong royong. Orang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga inti daripada kepentingan komunitas. Akibatnya, kegiatan-kegiatan kolektif seperti kerja bakti, ronda malam, dan gotong royong mulai ditinggalkan.

b. Materialisme dan Konsumerisme

Nilai materialisme yang mengukur kesuksesan dari kepemilikan materi mulai menggeser nilai-nilai spiritual dan kesederhanaan. Orang berlomba-lomba memiliki barang-barang mewah—ponsel terbaru, motor keren, pakaian branded—seringkali dengan berutang. Gengsi menjadi ukuran status.

c. Hedonisme

Gaya hidup hedonis yang mengejar kesenangan sesaat—hiburan, pesta, nongkrong di kafe—mulai marak di kalangan generasi muda. Nilai-nilai kerja keras, disiplin, dan pengorbanan mulai ditinggalkan.

2. Krisis Identitas Generasi Muda

Generasi muda desa hidup dalam tarik-menarik antara dua dunia. Di satu sisi, mereka mewarisi nilai-nilai tradisional dari orang tua dan lingkungan. Di sisi lain, mereka terpapar nilai-nilai modern dari media sosial dan pergaulan.

a. Alienasi dari Budaya Sendiri

Banyak generasi muda yang merasa asing dengan budayanya sendiri. Mereka tidak lagi fasih berbahasa daerah. Mereka tidak mengenal kesenian tradisional. Mereka menganggap upacara adat sebagai sesuatu yang kuno dan membosankan. Mereka lebih akrab dengan budaya populer global—K-pop, film Hollywood, musik pop—daripada budaya lokal.

b. Kehilangan Pegangan Moral

Ketika nilai-nilai tradisional luntur sementara nilai-nilai baru belum sepenuhnya terinternalisasi, generasi muda bisa kehilangan pegangan moral. Mereka tidak tahu mana yang benar dan salah, mana yang boleh dan tidak boleh. Akibatnya, mereka rentan terhadap perilaku menyimpang.

c. Konflik dengan Generasi Tua

Perbedaan nilai dan pandangan antara generasi tua dan muda bisa memicu konflik. Generasi tua merasa tidak dihormati, merasa nilai-nilai yang mereka junjung diabaikan. Generasi muda merasa terkekang, merasa tradisi hanya membatasi kebebasan mereka.

3. Dampak pada Kohesi Sosial

Perubahan budaya yang cepat dapat mengancam kohesi sosial. Ikatan yang tadinya kuat bisa longgar. Rasa saling percaya bisa berkurang. Masyarakat bisa terpecah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda orientasi nilai.

4. Strategi Menghadapi Perubahan Budaya

a. Revitalisasi Tradisi

Tradisi-tradisi yang mulai ditinggalkan perlu direvitalisasi, tetapi dengan kemasan yang menarik bagi generasi muda. Upacara adat bisa dikemas sebagai atraksi wisata. Kesenian tradisional bisa dikolaborasikan dengan musik modern. Bahasa daerah bisa diajarkan dengan metode yang menyenangkan.

b. Pendidikan Nilai

Nilai-nilai luhur perlu ditanamkan sejak dini, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan nilai harus dilakukan secara konsisten dan dengan keteladanan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran penting di sini.

c. Dialog Antargenerasi

Perlu ada dialog intensif antara generasi tua dan muda. Generasi tua perlu memahami dunia generasi muda, tantangan yang mereka hadapi, dan aspirasi mereka. Generasi muda perlu menghargai kearifan yang dimiliki generasi tua.

d. Filter Budaya

Masyarakat perlu memiliki filter budaya untuk menyaring pengaruh negatif dari luar. Nilai-nilai agama, adat, dan kearifan lokal dapat menjadi filter. Media massa dan media sosial juga perlu diedukasi untuk menyebarkan konten-konten positif.

E. DEGRADASI LINGKUNGAN: ANCAMAN TERHADAP KEBERLANJUTAN

Desa dan alam adalah dua entitas yang tak terpisahkan. Sebagian besar desa bergantung pada sumber daya alam untuk penghidupannya—pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata. Kerusakan lingkungan adalah ancaman langsung terhadap keberlanjutan hidup desa.

1. Alih Fungsi Lahan

Lahan pertanian yang subur semakin berkurang karena dialihfungsikan menjadi perumahan, kawasan industri, infrastruktur, atau perkebunan monokultur. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun, ketahanan pangan terancam, dan petani kehilangan mata pencaharian.

Penyebab alih fungsi lahan:

- Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan.
- Industrialisasi dan pembangunan infrastruktur.
- Ekspansi perkebunan besar (sawit, karet, tebu).
- Spekulasi tanah.

2. Degradasi Hutan

Hutan di sekitar desa banyak yang rusak akibat penebangan liar, perambahan untuk lahan pertanian, atau konversi menjadi perkebunan. Akibatnya, fungsi hutan sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, dan habitat keanekaragaman hayati terganggu. Bencana seperti banjir dan longsor semakin sering terjadi.

Penyebab degradasi hutan:

- Penebangan liar.
- Perambahan hutan untuk pertanian.
- Kebakaran hutan (disengaja maupun tidak).
- Konversi hutan untuk perkebunan dan tambang.

3. Pencemaran Lingkungan

a. Pencemaran Air

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan mencemari sungai dan danau. Limbah industri dan rumah tangga dibuang ke sungai tanpa pengolahan. Akibatnya, kualitas air menurun, biota air mati, dan warga kesulitan mendapatkan air bersih.

b. Pencemaran Tanah

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara terus-menerus merusak struktur dan kesuburan tanah. Limbah plastik yang tidak terurai mencemari tanah. Akibatnya, lahan pertanian menjadi tidak produktif.

c. Pencemaran Udara

Polusi udara dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah mulai dirasakan di desa-desa yang dilalui jalan raya atau dekat kawasan industri. Ini berdampak pada kesehatan warga.

4. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, baik oleh pihak luar maupun masyarakat sendiri, mengancam kelestarian lingkungan. Penambangan liar, penangkapan ikan dengan bahan peledak, pengambilan pasir secara berlebihan—semua ini merusak ekosistem dan mengancam mata pencaharian jangka panjang.

5. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global berdampak nyata di tingkat desa. Musim tanam yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, banjir bandang, dan serangan hama baru mengancam produksi pertanian. Petani dan nelayan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

6. Dampak Degradasi Lingkungan

- **Penurunan produktivitas pertanian** dan ketahanan pangan.
- **Bencana alam** yang lebih sering dan lebih dahsyat.
- **Krisis air bersih**.
- **Gangguan kesehatan** akibat pencemaran.
- **Konflik** akibat perebutan sumber daya yang semakin langka.
- **Migrasi** penduduk karena lingkungan tidak lagi mendukung kehidupan.

7. Strategi Menghadapi Degradasi Lingkungan

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan: pemanfaatan tidak melebihi daya dukung, konservasi, dan pemulihan. Mendorong praktik-praktik ramah lingkungan seperti pertanian organik, agroforestri, dan perikanan berkelanjutan.

b. Penguatan Hak Masyarakat atas Sumber Daya Alam

Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal atas sumber daya alam. Skema perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat) perlu diperluas.

c. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, baik korporasi maupun individu. Sanksi yang berat dan efek jera diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

d. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pendidikan formal, kampanye publik, dan kegiatan-kegiatan lingkungan.

e. Adaptasi Perubahan Iklim

Mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim di tingkat desa: diversifikasi tanaman, pengembangan varietas tahan kering/banjir, sistem peringatan dini, dan pembangunan infrastruktur tahan iklim.

F. KELEMAHAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA

Tantangan-tantangan di atas tidak akan dapat diatasi tanpa kelembagaan desa yang kuat dan kapabel. Sayangnya, kapasitas kelembagaan desa masih menjadi titik lemah.

1. Kapasitas Aparatur Desa

Aparatur desa—kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun—adalah garda terdepan pembangunan desa. Namun, kapasitas mereka seringkali terbatas.

a. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan

Banyak aparatur desa yang berpendidikan rendah (SMA ke bawah) dan tidak memiliki latar belakang manajemen pemerintahan. Mereka belajar sambil jalan, seringkali dengan trial and error. Akibatnya, banyak terjadi kesalahan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan.

b. Kurangnya Pelatihan

Pelatihan untuk aparatur desa masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pelatihan yang ada sering bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

c. Rendahnya Integritas

Tidak bisa dipungkiri, masih ada aparatur desa yang korup. Mereka menyalahgunakan wewenang dan dana desa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Ini menghancurkan kepercayaan masyarakat dan merusak pembangunan.

2. Kapasitas BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung aspirasi, membahas peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. Namun, kapasitas BPD juga sering terbatas.

a. Anggota BPD Kurang Memahami Tugas dan Fungsinya

Banyak anggota BPD yang tidak memahami secara mendalam tugas dan fungsinya. Mereka lebih banyak menjadi "stempel" daripada mitra kritis pemerintah desa.

b. Kurangnya Keberanian untuk Bersuara

Anggota BPD seringkali segan atau takut untuk bersuara kritis terhadap kepala desa, terutama jika kepala desa adalah figur yang kuat atau memiliki hubungan kekerabatan. Akibatnya, fungsi pengawasan menjadi lemah.

c. Keterbatasan Sumber Daya

BPD juga sering kekurangan sumber daya—dana operasional, sekretariat, tenaga pendukung—untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

3. Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa

Kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan koperasi juga sering lemah.

a. BUMDes yang Gagal

Banyak BUMDes yang gagal berkembang, bahkan mati. Penyebabnya beragam: pengelola tidak profesional, campur tangan politik, pemilihan bidang usaha yang tidak tepat, kurangnya modal, dan tata kelola yang buruk.

b. Koperasi yang Tidak Aktif

Banyak koperasi di desa yang tidak aktif atau hanya aktif di atas kertas. Pengurus tidak aktif, anggota tidak mendapat manfaat, dan usaha tidak berjalan.

4. Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan seperti PKK, karang taruna, dan kelompok tani juga sering menghadapi masalah serupa: pengurus pasif, anggota tidak aktif, program tidak jalan, dan regenerasi macet.

5. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan yang intensif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan harus diberikan kepada aparatur desa. Materi pelatihan mencakup manajemen pemerintahan, perencanaan, pengelolaan keuangan, etika, dan kepemimpinan.

b. Penguatan Fungsi BPD

BPD perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan fungsinya, serta keberanian untuk menjalankannya. Dukungan sumber daya (dana, sekretariat, tenaga ahli) juga perlu ditingkatkan.

c. Penguatan BUMDes dan Koperasi

BUMDes dan koperasi perlu didampingi secara profesional, bukan hanya dibentuk lalu ditinggalkan. Pendampingan dalam manajemen, keuangan, dan pengembangan usaha sangat penting.

d. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan perlu didorong untuk aktif kembali. Regenerasi kepengurusan perlu dilakukan secara teratur. Dukungan dari pemerintah desa (moral, fasilitas, dana) sangat penting.

e. Penegakan Hukum dan Sanksi

Aparatur desa yang korup harus ditindak tegas. Sanksi yang berat dan efek jera diperlukan untuk membersihkan pemerintahan desa dari praktik-praktik buruk.

f. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Transparansi informasi dan mekanisme pengaduan yang efektif perlu dibangun.

G. RANGKUMAN

Pembangunan sosial di desa menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi. Tantangan-tantangan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Urbanisasi adalah tantangan fundamental. Desa kehilangan generasi muda produktif, putusnya mata rantai transfer pengetahuan, dan hilangnya agen-agen perubahan. Strategi menghadapinya bukan dengan melarang orang pergi, tetapi dengan menciptakan desa yang menarik untuk ditinggali: membangun ekonomi desa, meningkatkan layanan publik, membangun konektivitas, dan memberdayakan perantau.

Ketimpangan ekonomi terjadi dalam berbagai dimensi: desa-kota, intra-desa, akses terhadap tanah, modal, teknologi, dan pendidikan. Ketimpangan disebabkan oleh warisan sejarah, kebijakan yang tidak berpihak, mekanisme pasar, dan jaringan sosial. Dampaknya adalah kemiskinan yang persisten, kecemburuan sosial, konflik, dan stagnasi ekonomi. Strategi mengatasinya meliputi reforma agraria, akses terhadap modal dan teknologi, pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kebijakan yang berpihak pada miskin.

Perubahan budaya yang cepat mengancam nilai-nilai tradisional dan identitas desa. Erosi nilai-nilai gotong royong, individualisme, materialisme, dan hedonisme menggerus kohesi sosial. Generasi muda mengalami krisis identitas dan konflik dengan generasi tua. Strategi menghadapinya meliputi revitalisasi tradisi, pendidikan nilai, dialog antargenerasi, dan filter budaya.

Degradasi lingkungan mengancam keberlanjutan hidup desa. Alih fungsi lahan, degradasi hutan, pencemaran, eksploitasi sumber daya, dan perubahan iklim merusak basis penghidupan desa. Strategi menghadapinya meliputi pengelolaan berkelanjutan, penguatan hak masyarakat, penegakan hukum lingkungan, pendidikan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim.

Kelemahan kapasitas kelembagaan desa menjadi penghambat dalam mengatasi semua tantangan di atas. Aparatur desa, BPD, BUMDes, koperasi, dan lembaga kemasyarakatan seringkali lemah dalam kapasitas, integritas, dan sumber daya. Strategi penguatan kelembagaan meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan fungsi BPD, pendampingan BUMDes dan koperasi, penguatan lembaga kemasyarakatan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam adalah langkah pertama untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif. Tidak ada solusi instan. Dibutuhkan pendekatan holistik, jangka panjang, dan partisipatif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan—pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan masyarakat luas. Hanya dengan kerja sama semua pihak, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan pembangunan desa yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

H. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Bagaimana dampak urbanisasi terhadap desa Anda? Apakah banyak pemuda yang merantau? Bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan sosial dan ekonomi desa?
2. Apakah di desa Anda terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam? Kelompok mana yang paling kaya dan paling miskin? Apa faktor penyebabnya?
3. Bagaimana perubahan budaya mempengaruhi generasi muda di desa Anda? Apakah mereka masih peduli pada tradisi lokal, atau lebih tertarik pada budaya populer global?
4. Apakah ada masalah lingkungan yang serius di desa Anda? Misalnya alih fungsi lahan, pencemaran, atau kerusakan hutan? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan warga?
5. Menurut Anda, seberapa kapabel aparatur desa di tempat Anda dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan? Apakah ada masalah kapasitas atau integritas?
6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi desa Anda menurut Anda? Mengapa?

7. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi tantangan urbanisasi? Apakah dengan menciptakan lapangan kerja di desa, atau dengan memperkuat hubungan dengan perantau?
8. Menurut Anda, apa peran generasi muda dalam mengatasi tantangan-tantangan pembangunan desa?

BAB XXVII

STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DESA

A. PENGANTAR: MEMBANGUN DESA YANG TANGGUH MENGHADAPI BADAI

Desa, seperti halnya masyarakat pada umumnya, tidak pernah benar-benar aman dari berbagai guncangan dan tekanan. Guncangan bisa datang tiba-tiba seperti bencana alam, wabah penyakit, atau konflik sosial. Tekanan bisa bersifat kronis seperti kemiskinan, ketimpangan, degradasi lingkungan, atau erosi nilai-nilai budaya. Desa yang tidak memiliki ketahanan akan mudah hancur ketika badai datang. Warganya akan menderita, ekonominya akan lumpuh, dan tatanan sosialnya akan kacau.

Ketahanan sosial (social resilience) adalah kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan dan tekanan. Ini bukan sekadar kemampuan untuk "kembali seperti semula", tetapi juga kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berubah, dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Desa yang tangguh adalah desa yang mampu menghadapi badai tanpa hancur, yang mampu bangkit kembali ketika jatuh, dan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Bab ini akan membahas secara mendalam strategi-strategi untuk memperkuat ketahanan sosial desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep ketahanan sosial dan tiga pilar utamanya: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan budaya. Selanjutnya, kita akan membahas strategi konkret untuk memperkuat masing-masing pilar, mulai dari diversifikasi mata pencaharian dan penguatan BUMDes, hingga revitalisasi modal sosial dan kearifan lokal. Pada bagian akhir, kita akan membahas pentingnya sistem peringatan dini dan mekanisme penanganan krisis yang partisipatif.

B. MEMAHAMI KETAHANAN SOSIAL DESA

1. Pengertian Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial adalah konsep yang relatif baru dalam wacana pembangunan, namun sangat relevan dengan realitas yang dihadapi desa. Beberapa definisi dari para ahli:

Adger (2000) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kemampuan kelompok atau komunitas untuk bertahan terhadap guncangan eksternal dan tekanan terhadap mata pencaharian dan infrastruktur sosial mereka.

Keck dan Sakdapolrak (2013) membedakan tiga dimensi ketahanan: (1) kapasitas mengatasi (coping capacity) — kemampuan untuk bertahan dalam krisis; (2) kapasitas adaptif (adaptive capacity) —

kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri; dan (3) kapasitas transformatif (transformative capacity) — kemampuan untuk menciptakan sistem baru yang lebih baik.

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) mendefinisikan ketahanan sebagai kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk menahan, menyerap, mengakomodasi, dan memulihkan diri dari dampak bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dan fungsi dasar esensialnya.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ketahanan sosial bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan bertransformasi.

2. Mengapa Ketahanan Sosial Penting bagi Desa?

a. Desa Rentan terhadap Berbagai Guncangan

Desa memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai guncangan:

- **Bencana alam**: Banjir, longsor, gempa bumi, kekeringan, dan letusan gunung berapi sering melanda desa-desa.
- **Guncangan ekonomi**: Fluktuasi harga komoditas, krisis ekonomi, atau kebangkrutan BUMDes dapat menghancurkan ekonomi desa.
- **Konflik sosial**: Konflik antar kelompok, antar dusun, atau antar pendukung politik dapat merusak tatanan sosial.
- **Wabah penyakit**: Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa rentannya desa terhadap wabah.
- **Perubahan iklim**: Perubahan iklim mengancam mata pencaharian yang bergantung pada alam (pertanian, perikanan).

b. Desa Memiliki Sumber Daya untuk Membangun Ketahanan

Di sisi lain, desa memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membangun ketahanan:

- **Modal sosial yang kuat**: Kepercayaan, jaringan, dan norma resiprositas yang masih hidup.
- **Kearifan lokal**: Pengetahuan dan praktik tradisional yang teruji oleh waktu.
- **Solidaritas komunal**: Gotong royong dan kebersamaan yang masih kuat di banyak desa.
- **Kelembagaan lokal**: Pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, lembaga adat.

c. Ketahanan adalah Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan tidak akan berarti jika desa mudah hancur oleh guncangan. Investasi dalam infrastruktur akan sia-sia jika hancur diterjang banjir. Program pemberdayaan akan gagal jika masyarakat terpecah konflik. Peningkatan kesejahteraan akan mundur jika krisis ekonomi melanda. Karena itu, ketahanan adalah prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.

3. Tiga Pilar Ketahanan Sosial Desa

Ketahanan sosial desa dapat dibangun di atas tiga pilar utama:

a. Ketahanan Ekonomi

Kemampuan masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan dasar dalam situasi krisis. Ini mencakup diversifikasi sumber pendapatan, akses terhadap modal, dan keberlanjutan usaha ekonomi.

b. Ketahanan Sosial

Kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kohesi sosial, mengelola konflik, dan saling mendukung dalam situasi sulit. Ini mencakup kekuatan modal sosial, efektivitas kelembagaan lokal, dan keberfungsian mekanisme dukungan sosial.

c. Ketahanan Budaya

Kemampuan masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal di tengah arus perubahan. Ini mencakup revitalisasi tradisi, transmisi nilai antargenerasi, dan kemampuan menyaring pengaruh luar.

Ketiga pilar ini saling terkait dan saling memperkuat. Ekonomi yang kuat akan mendukung stabilitas sosial. Sosial yang kokoh akan menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi. Budaya yang resilien akan memberikan identitas dan pegangan moral di tengah perubahan.

C. STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI

Ketahanan ekonomi adalah fondasi material bagi ketahanan desa. Tanpa ekonomi yang cukup kuat, masyarakat akan sulit bertahan ketika krisis melanda.

1. Diversifikasi Mata Pencaharian

Salah satu strategi paling fundamental adalah diversifikasi mata pencaharian. Ketergantungan pada satu sektor ekonomi sangat berisiko. Jika sektor itu collapse—misalnya karena gagal panen, turunnya harga komoditas, atau bencana alam—masyarakat akan kehilangan sumber penghidupan.

a. Mengapa Diversifikasi Penting?

- **Mengurangi risiko**: Jika satu sumber pendapatan terganggu, masih ada sumber lain yang bisa diandalkan.
- **Memanfaatkan peluang**: Diversifikasi membuka peluang untuk memanfaatkan berbagai potensi desa.
- **Meningkatkan pendapatan**: Sumber pendapatan yang beragam dapat meningkatkan total pendapatan keluarga.
- **Menyerap tenaga kerja**: Sektor-sektor baru dapat menyerap tenaga kerja yang tidak terserap di sektor utama.

b. Bagaimana Melakukan Diversifikasi?

- **Identifikasi potensi desa**: Apa saja potensi ekonomi desa selain sektor utama? Mungkin ada potensi pariwisata, kerajinan, kuliner, atau jasa.
- **Pengembangan UMKM**: Mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai sektor.

- **Pelatihan keterampilan**: Memberikan pelatihan keterampilan yang beragam sehingga warga memiliki alternatif mata pencaharian.
- **Pengembangan agroindustri**: Mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, bukan hanya menjual mentah.
- **Pemanfaatan teknologi digital**: Membuka peluang usaha berbasis digital seperti content creator, digital marketing, atau jasa online.

c. Contoh Diversifikasi

Di Desa Pentingsari, Yogyakarta, petani tidak hanya bertani, tetapi juga mengelola homestay, menjadi pemandu wisata, pelaku seni pertunjukan, dan pelaku UMKM. Ketika pariwisata lesu karena pandemi, mereka masih bisa bertani. Ketika hasil pertanian kurang, pariwisata bisa menjadi penopang.

2. Penguatan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen kunci untuk memperkuat ekonomi desa. BUMDes yang kuat dan profesional dapat menjadi motor penggerak ekonomi, sumber pendapatan asli desa, dan penyedia lapangan kerja.

a. Strategi Penguatan BUMDes

- **Pengelolaan profesional**: BUMDes harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan atau balas budi politik.
- **Pemilihan bidang usaha yang tepat**: BUMDes harus memilih bidang usaha yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan pasar. Riset pasar dan analisis kelayakan usaha sangat penting.
- **Tata kelola yang baik**: Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus diterapkan. Laporan keuangan harus dibuat secara teratur dan dipublikasikan.
- **Diversifikasi usaha**: BUMDes tidak boleh hanya mengandalkan satu jenis usaha. Diversifikasi mengurangi risiko dan membuka lebih banyak peluang.
- **Kemitraan**: BUMDes perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak—pemerintah daerah, perusahaan swasta, perbankan, LSM, dan BUMDes lain.
- **Pendampingan berkelanjutan**: BUMDes perlu didampingi oleh tenaga ahli, terutama pada tahap awal, untuk memastikan pengelolaan yang profesional.

b. Contoh BUMDes Tangguh

BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, adalah contoh BUMDes yang tangguh. Mereka tidak hanya mengelola satu usaha, tetapi beberapa: wisata air Umbul Ponggok, homestay, restoran, toko oleh-oleh, dan unit simpan pinjam. Ketika salah satu usaha terganggu, usaha lain masih bisa berjalan. Mereka juga dikelola secara profesional dengan tata kelola yang baik.

3. Penguatan UMKM

UMKM adalah tulang punggung ekonomi desa. Mereka menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga.

a. Strategi Penguatan UMKM

- **Fasilitasi akses modal**: Kredit mikro, koperasi simpan pinjam, atau skema pembiayaan lainnya perlu dikembangkan agar UMKM dapat mengakses modal dengan bunga ringan.
- **Peningkatan kapasitas**: Pelatihan manajemen, keuangan, pemasaran, dan produksi perlu diberikan secara berkelanjutan.
- **Fasilitasi akses pasar**: Bantuan pemasaran, pameran, promosi online, dan kemitraan dengan korporasi perlu difasilitasi.
- **Pendampingan usaha**: Pendampingan berkelanjutan oleh tenaga ahli atau fasilitator desa.
- **Pengembangan produk**: Bantuan dalam pengembangan desain, kemasan, dan branding.
- **Sertifikasi**: Membantu UMKM mendapatkan sertifikasi PIRT, halal, SNI, dan lainnya.

b. Contoh UMKM Tangguh

Di Desa Bayan, Lombok, UMKM kopi dan tenun tangguh menghadapi krisis. Mereka tidak hanya menjual produk mentah, tetapi juga mengolah dan mengemas dengan menarik. Mereka memanfaatkan platform online untuk pemasaran. Ketika pariwisata lesu (yang biasanya menjadi pembeli utama), mereka masih bisa menjual secara online.

4. Pengembangan Koperasi

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan desa. Koperasi yang kuat dapat menjadi wadah untuk pengadaan bersama, pemasaran bersama, dan akses modal bersama.

Strategi penguatan koperasi:

- Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota.
- Pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- Membangun jaringan dengan koperasi lain dan lembaga keuangan.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Bagi desa yang bergantung pada sumber daya alam (pertanian, perikanan, kehutanan), pengelolaan berkelanjutan adalah kunci ketahanan ekonomi jangka panjang.

Strategi:

- Menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan: pertanian organik, agroforestri, perikanan berkelanjutan.
- Konservasi sumber daya: hutan, air, lahan.
- Diversifikasi produk dan pasar.
- Penguatan hak masyarakat atas sumber daya alam (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat).

D. STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL

Ketahanan sosial adalah fondasi non-material yang memungkinkan masyarakat untuk bertindak kolektif, saling mendukung, dan mengelola konflik.

1. Penguatan Modal Sosial

Modal sosial—kepercayaan, jaringan, dan norma resiprositas—adalah aset paling berharga desa. Ia perlu dipelihara dan diperkuat.

a. Strategi Penguatan Modal Sosial

- **Menghidupkan kembali kegiatan kolektif**: Kerja bakti, gotong royong, ronda malam, arisan, dan kegiatan bersama lainnya perlu terus dihidupkan. Kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial.
- **Memfasilitasi pertemuan rutin**: Pertemuan RT/RW, PKK, karang taruna, kelompok tani, dan pengajian perlu difasilitasi dan didukung. Pertemuan ini menjadi wadah interaksi dan koordinasi.
- **Membangun kepercayaan**: Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan akan membangun kepercayaan masyarakat. Pemimpin yang jujur dan melayani akan dipercaya.
- **Memperkuat jaringan**: Jangan hanya jaringan internal, tetapi juga jaringan dengan pihak luar—pemerintah, LSM, perguruan tinggi, swasta, dan desa lain. Jaringan ini menjadi sumber informasi, dukungan, dan peluang.
- **Menjalin hubungan dengan perantau**: Perantau adalah aset. Mereka perlu diajak berkomunikasi, dilibatkan dalam pembangunan, dan difasilitasi untuk berinvestasi di kampung halaman.

b. Contoh Penguatan Modal Sosial

Di Desa Sidamukti, Cilacap, pemerintah desa secara aktif memfasilitasi berbagai kegiatan kolektif. Mereka membentuk kelompok kerja masyarakat yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pembangunan. Hasilnya, partisipasi masyarakat tinggi dan kepercayaan pada pemerintah desa kuat.

2. Penguatan Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal—pemerintah desa, BPD, PKK, karang taruna, kelompok tani, majelis taklim, lembaga adat—adalah pilar-pilar ketahanan sosial. Mereka perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsinya.

a. Strategi Penguatan Kelembagaan Lokal

- **Peningkatan kapasitas pengurus**: Pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, advokasi, dan teknis sesuai bidangnya.
- **Dukungan sumber daya**: Pemerintah desa perlu mengalokasikan dana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan kelembagaan.
- **Regenerasi**: Kaderisasi perlu dilakukan secara teratur agar kelembagaan tidak mati ketika pengurus lama pensiun.
- **Jejaring antar lembaga**: Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat sinergi.

- **Pengakuan dan penghargaan**: Memberikan apresiasi kepada pengurus dan anggota yang aktif dan berprestasi.

b. Contoh Penguatan Kelembagaan

Di Desa Karangbawang, Purbalingga, Musyawarah Dusun (Musdus) dilaksanakan dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Ini adalah contoh penguatan kelembagaan perencanaan. Hasilnya, perencanaan pembangunan lebih berkualitas dan aspirasi warga lebih terakomodasi.

3. Revitalisasi Lembaga Adat

Di banyak desa, lembaga adat masih memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai, menyelesaikan konflik, dan memelihara solidaritas. Lembaga adat perlu direvitalisasi dan diperkuat.

Strategi:

- Pengakuan formal terhadap lembaga adat dan hukum adat.
- Kemitraan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam berbagai program.
- Fasilitasi pertemuan dan kegiatan adat.
- Pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat untuk regenerasi.

4. Penguatan Sistem Dukungan Sosial

Dalam situasi krisis, sistem dukungan sosial informal (keluarga, tetangga, komunitas) sangat penting. Mereka adalah jaring pengaman pertama sebelum bantuan formal datang.

Strategi:

- Menghidupkan kembali tradisi saling membantu: menjenguk orang sakit, membantu tetangga kesusahan, memberi sumbangan saat ada musibah.
- Memperkuat arisan dan kelompok simpan pinjam yang dapat menjadi sumber dana darurat.
- Membangun mekanisme penggalangan dana dan bantuan bersama yang terorganisir.

E. STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN BUDAYA

Ketahanan budaya adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan identitas, nilai-nilai, dan kearifan lokal di tengah arus perubahan. Budaya yang kuat akan menjadi fondasi moral dan spiritual bagi ketahanan sosial dan ekonomi.

1. Revitalisasi Tradisi dan Kearifan Lokal

Tradisi dan kearifan lokal yang mulai ditinggalkan perlu direvitalisasi. Ini bukan sekadar nostalgia, tetapi upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan praktik-praktik yang terbukti bermanfaat.

a. Strategi Revitalisasi

- **Dokumentasi**: Mendokumentasikan tradisi, upacara adat, kesenian, bahasa daerah, dan pengetahuan tradisional dalam bentuk tulisan, audio, video, atau digital.
- **Festival dan even budaya**: Menyelenggarakan festival budaya, lomba kesenian tradisional, dan even-even yang melibatkan generasi muda.
- **Integrasi dengan pariwisata**: Mengemas tradisi sebagai daya tarik wisata, tetapi harus hati-hati agar tidak kehilangan makna spiritualnya.
- **Pendidikan**: Memasukkan muatan lokal tentang budaya daerah ke dalam kurikulum sekolah. Mengajarkan keterampilan tradisional (membatik, menenun, membuat kerajinan) kepada generasi muda.
- **Ruang ekspresi**: Menyediakan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi melalui seni dan budaya, termasuk kolaborasi antara seni tradisional dan modern.

b. Contoh Revitalisasi

Di Desa Bayan, Lombok, tradisi adat tetap dijalankan. Upacara adat tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga dikemas sebagai atraksi wisata yang menarik. Generasi muda dilibatkan sebagai pelaku, bukan hanya penonton. Hasilnya, tradisi tetap hidup, bahkan menjadi kebanggaan.

2. Transmisi Nilai Antargenerasi

Agar nilai-nilai luhur tidak punah, ia harus diwariskan dari generasi tua ke generasi muda.

Strategi:

- **Dialog antargenerasi**: Memfasilitasi pertemuan dan dialog antara generasi tua dan muda untuk saling berbagi pengalaman dan nilai.
- **Pendidikan informal di keluarga**: Orang tua dan kakek-nenek perlu aktif menanamkan nilai-nilai kepada anak dan cucu, baik melalui nasihat, cerita, maupun teladan.
- **Keteladanan tokoh masyarakat**: Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai luhur.
- **Kegiatan bersama**: Mengadakan kegiatan yang melibatkan semua generasi, seperti kerja bakti, perayaan hari besar, atau pentas seni.

3. Filter Budaya (Cultural Filter)

Di tengah arus globalisasi yang deras, masyarakat perlu memiliki filter untuk menyaring pengaruh negatif. Nilai-nilai agama, adat, dan kearifan lokal dapat menjadi filter.

Strategi:

- **Pendidikan karakter**: Menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini di keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- **Penguatan literasi digital**: Masyarakat perlu diedukasi untuk menggunakan media sosial secara bijak, memverifikasi informasi, dan tidak mudah terprovokasi.
- **Peran tokoh agama dan adat**: Tokoh agama dan adat perlu aktif memberikan bimbingan moral dan mengingatkan masyarakat tentang nilai-nilai yang harus dijaga.
- **Pengawasan konten**: Orang tua perlu mengawasi konten yang dikonsumsi anak-anak di media sosial dan internet.

F. MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI DAN MEKANISME PENANGANAN KRISIS

Tidak ada desa yang benar-benar aman dari guncangan. Yang penting adalah bagaimana desa siap menghadapinya. Sistem peringatan dini dan mekanisme penanganan krisis yang partisipatif adalah bagian penting dari ketahanan desa.

1. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Sistem peringatan dini adalah serangkaian kemampuan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi peringatan yang tepat waktu dan bermakna, untuk memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi yang terancam bahaya untuk mempersiapkan diri dan bertindak secara tepat.

a. Komponen Sistem Peringatan Dini

- **Pengetahuan risiko**: Memahami risiko apa yang dihadapi desa—bencana alam, wabah, konflik, krisis ekonomi.
- **Pemantauan dan peringatan**: Memantau tanda-tanda awal ancaman dan memberikan peringatan.
- **Diseminasi dan komunikasi**: Menyebarkan informasi peringatan kepada semua pihak yang berisiko.
- **Kemampuan respons**: Kemampuan masyarakat untuk merespons peringatan.

b. Strategi Membangun Sistem Peringatan Dini di Desa

- **Pemetaan risiko desa**: Mengidentifikasi jenis-jenis ancaman yang mungkin terjadi, daerah rawan, dan kelompok rentan.
- **Pembentukan tim siaga**: Membentuk tim siaga bencana desa yang terdiri dari relawan terlatih.
- **Pemasangan alat peringatan**: Memasang alat-alat peringatan sederhana seperti sirine, kentongan, atau papan informasi.
- **Pengembangan protokol**: Membuat prosedur tetap tentang apa yang harus dilakukan ketika peringatan diberikan.
- **Simulasi dan pelatihan**: Melakukan simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat secara berkala.
- **Pemanfaatan teknologi**: Memanfaatkan grup WhatsApp, SMS, atau aplikasi peringatan dini untuk menyebarkan informasi.

2. Mekanisme Penanganan Krisis

Ketika krisis terjadi, diperlukan mekanisme yang cepat dan terkoordinasi untuk menanganinya.

a. Komponen Mekanisme Penanganan Krisis

- **Komando dan koordinasi**: Siapa yang memimpin, bagaimana koordinasi antar lembaga.
- **Evakuasi dan penyelamatan**: Bagaimana mengevakuasi warga ke tempat aman.
- **Pemenuhan kebutuhan dasar**: Makanan, air bersih, obat-obatan, tempat tinggal sementara.
- **Layanan kesehatan**: Penanganan korban luka, pencegahan wabah.
- **Perlindungan kelompok rentan**: Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil.

- **Pemulihan dini**: Memulihkan fungsi-fungsi dasar masyarakat secepat mungkin.

b. Strategi Membangun Mekanisme Penanganan Krisis di Desa

- **Pembentukan tim siaga**: Tim siaga bencana desa yang terlatih dan memiliki perlengkapan dasar.
- **Penyusunan rencana kontinjensi**: Rencana darurat untuk berbagai skenario krisis.
- **Penyediaan logistik cadangan**: Persediaan makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan darurat di tempat-tempat strategis.
- **Identifikasi lokasi evakuasi**: Menentukan tempat-tempat aman yang bisa digunakan sebagai lokasi evakuasi.
- **Pelatihan dan simulasi**: Melatih warga tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
- **Koordinasi dengan pihak luar**: Membangun koordinasi dengan BPBD, PMI, dinas kesehatan, TNI/Polri, dan lembaga lain.

3. Pemulihan Pasca-Krisis

Ketahanan tidak hanya tentang bertahan dalam krisis, tetapi juga tentang bangkit kembali setelahnya.

Strategi pemulihan:

- **Asesmen dampak**: Menilai kerusakan dan kebutuhan pasca-krisis.
- **Bantuan pemulihan**: Bantuan untuk memperbaiki rumah, memulihkan mata pencaharian, dan memulihkan trauma.
- **Pembangunan kembali**: Membangun kembali infrastruktur yang rusak dengan prinsip "build back better" — membangun kembali dengan lebih baik.
- **Pembelajaran**: Mengevaluasi respons krisis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan memperbaiki sistem untuk masa depan.

G. STUDI KASUS: DESA-DESA TANGGUH

1. Desa Bayan, Lombok: Tangguh Bencana dan Tangguh Budaya

Desa Bayan di Lombok Utara adalah contoh desa yang tangguh. Ketika gempa bumi dahsyat melanda Lombok pada tahun 2018, Desa Bayan yang kuat memegang tradisi justru lebih cepat pulih daripada desa-desa lain.

Faktor ketahanan:

- **Gotong royong yang kuat**: Warga bahu-membahu membersihkan puing, membangun kembali rumah, dan membantu korban. Tidak ada yang menunggu bantuan dari luar; mereka bergerak sendiri.
- **Kepemimpinan adat**: Tokoh adat memimpin proses pemulihan dengan kearifan lokal. Mereka mengorganisir warga, mengatur distribusi bantuan, dan memimpin ritual untuk mengatasi trauma.
- **Nilai-nilai spiritual**: Ritual adat dan keagamaan membantu warga mengatasi trauma dan menemukan makna di tengah bencana.

- **Pengetahuan lokal**: Pengetahuan tentang konstruksi rumah tahan gempa secara tradisional membantu proses rekonstruksi.

2. Desa Ponggok, Klaten: Tangguh Ekonomi

Desa Ponggok adalah contoh desa yang tangguh secara ekonomi. BUMDes Tirta Mandiri yang mereka kelola mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah berbagai tantangan.

Faktor ketahanan:

- **Diversifikasi usaha**: BUMDes tidak hanya mengelola satu usaha, tetapi beberapa: wisata air, homestay, restoran, toko oleh-oleh, dan unit simpan pinjam. Ketika satu usaha terganggu, yang lain bisa menopang.
- **Pengelolaan profesional**: BUMDes dikelola oleh orang-orang kompeten, dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
- **Inovasi terus-menerus**: Mereka terus berinovasi, mengembangkan produk baru, dan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.
- **Partisipasi masyarakat**: Seluruh warga dilibatkan, baik sebagai pekerja, pemilik homestay, atau pelaku UMKM. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

3. Desa Pandansari, Malang: Tangguh Lingkungan

Desa Pandansari di Malang sedang membangun ketahanan lingkungan melalui program pertanian berkelanjutan.

Faktor ketahanan:

- **Pemulihan agroforestri**: Petani dilatih untuk memulihkan sistem agroforestri kopi yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
- **Pertanian organik**: Penggunaan pupuk kimia dikurangi, diganti dengan pupuk kompos dari limbah organik. Ini mengurangi ketergantungan pada input eksternal dan memperbaiki kesehatan tanah.
- **Diversifikasi tanaman**: Petani tidak hanya menanam kopi, tetapi juga tanaman lain untuk mengurangi risiko gagal panen.
- **Kesadaran lingkungan**: Petani memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem desa penyangga taman nasional.

4. Desa di Kecamatan Plakat Tinggi: Tangguh melalui Pemberdayaan

Desa di Kecamatan Plakat Tinggi membangun ketahanan melalui program pemberdayaan yang komprehensif.

Faktor ketahanan:

- **Diversifikasi mata pencaharian**: Masyarakat dilatih berbagai keterampilan agar memiliki alternatif mata pencaharian.
- **Teknologi tepat guna**: Pengenalan teknologi ramah lingkungan (biogas, panel surya) mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- **Pendampingan berkelanjutan**: Masyarakat tidak hanya dilatih, tetapi juga didampingi dalam mengimplementasikan pengetahuan baru.

- **Penguatan kelembagaan**: Kelompok-kelompok usaha dan organisasi masyarakat diperkuat.

H. RANGKUMAN

Ketahanan sosial desa adalah kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan dan tekanan. Ia dibangun di atas tiga pilar utama: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan budaya.

Strategi penguatan ketahanan ekonomi meliputi:

1. **Diversifikasi mata pencaharian** agar masyarakat tidak bergantung pada satu sektor.
2. **Penguatan BUMDes** melalui pengelolaan profesional, tata kelola baik, dan diversifikasi usaha.
3. **Penguatan UMKM** melalui fasilitasi akses modal, peningkatan kapasitas, fasilitasi akses pasar, dan pendampingan.
4. **Pengembangan koperasi** sebagai wadah ekonomi kolektif.
5. **Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan** untuk ketahanan jangka panjang.

Strategi penguatan ketahanan sosial meliputi:

1. **Penguatan modal sosial** melalui kegiatan kolektif, pertemuan rutin, membangun kepercayaan, dan memperkuat jaringan.
2. **Penguatan kelembagaan lokal** melalui peningkatan kapasitas, dukungan sumber daya, regenerasi, dan jejaring.
3. **Revitalisasi lembaga adat** melalui pengakuan, kemitraan, dan pelibatan generasi muda.
4. **Penguatan sistem dukungan sosial** melalui tradisi saling membantu dan mekanisme bantuan bersama.

Strategi penguatan ketahanan budaya meliputi:

1. **Revitalisasi tradisi dan kearifan lokal** melalui dokumentasi, festival, integrasi pariwisata, pendidikan, dan ruang ekspresi.
2. **Transmisi nilai antargenerasi** melalui dialog, pendidikan informal, keteladanan, dan kegiatan bersama.
3. **Filter budaya** melalui pendidikan karakter, literasi digital, peran tokoh agama/adat, dan pengawasan konten.

Membangun sistem peringatan dini dan mekanisme penanganan krisis meliputi:

1. **Pemetaan risiko desa** dan pemantauan ancaman.
2. **Pembentukan tim siaga** dan pengembangan protokol.
3. **Simulasi dan pelatihan** secara berkala.
4. **Penyediaan logistik cadangan** dan identifikasi lokasi evakuasi.
5. **Koordinasi dengan pihak luar** (BPBD, PMI, dinas kesehatan, TNI/Polri).
6. **Pemulihan pasca-krisis** dengan prinsip "build back better" dan pembelajaran untuk masa depan.

Studi kasus dari Bayan (tangguh bencana dan budaya), Ponggok (tangguh ekonomi), Pandansari (tangguh lingkungan), dan Plakat Tinggi (tangguh melalui pemberdayaan) menunjukkan bahwa ketahanan dapat dibangun dengan berbagai cara, sesuai dengan potensi dan tantangan masing-masing desa.

Pada akhirnya, ketahanan sosial desa bukanlah proyek jangka pendek, tetapi proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen, kerja keras, dan partisipasi semua pihak. Ia adalah investasi untuk masa depan—investasi agar desa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah badai perubahan.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Anda, apa ancaman terbesar bagi ketahanan desa Anda saat ini? Apakah bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, atau erosi budaya?
2. Bagaimana kondisi diversifikasi ekonomi di desa Anda? Apakah masyarakat masih bergantung pada satu sektor, atau sudah ada alternatif?
3. Seberapa kuat BUMDes di desa Anda? Apakah sudah menjadi motor ekonomi desa, atau masih lemah?
4. Bagaimana kekuatan modal sosial di desa Anda? Apakah gotong royong, arisan, dan kegiatan kolektif lainnya masih hidup?
5. Apakah ada lembaga adat yang masih aktif di desa Anda? Bagaimana perannya dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya?
6. Apakah desa Anda memiliki sistem peringatan dini dan rencana penanganan krisis? Seberapa siap masyarakat menghadapi bencana?
7. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan desa Anda untuk memperkuat ketahanannya?
8. Bagaimana peran generasi muda dalam membangun ketahanan desa?

BAB XXVIII
SINERGI STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. PENGANTAR: MEMBANGUN BERSAMA, BUKAN SENDIRIAN

Pembangunan desa seringkali dipahami sebagai urusan pemerintah desa semata. Kepala desa dan perangkatnya dianggap sebagai aktor tunggal yang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Pandangan ini keliru. Pembangunan desa adalah urusan bersama. Ia melibatkan banyak pihak dengan peran, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Tidak ada satu pihak pun yang mampu membangun desa sendirian. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan sumber daya, tetapi terbatas. Masyarakat memiliki partisipasi dan modal sosial, tetapi perlu difasilitasi. Swasta memiliki modal dan jaringan, tetapi perlu diarahkan agar tidak eksploitatif. LSM memiliki pengalaman dan keahlian, tetapi perlu bermitra. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan inovasi, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam praktik.

Sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) adalah keniscayaan. Ia bukan sekadar kerja sama biasa, tetapi kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai

kapasitasnya dan bersama-sama mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai sendirian. Sinergi menciptakan nilai tambah: 1+1 bisa menjadi 3, bukan hanya 2.

Bab ini akan mengupas secara mendalam tentang sinergi stakeholder dalam pembangunan desa. Kita akan memulai dengan memahami konsep stakeholder dan sinergi, kemudian mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan dalam pembangunan desa dan apa peran masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk sinergi yang ideal, mulai dari forum multipihak hingga kemitraan strategis. Pada bagian akhir, kita akan menganalisis tantangan dalam membangun sinergi dan strategi untuk mengatasinya.

B. MEMAHAMI KONSEP STAKEHOLDER DAN SINERGI

1. Pengertian Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan (interest) dan/atau pengaruh (influence) terhadap suatu isu atau program. Mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil.

Dalam konteks pembangunan desa, stakeholder adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan desa dan dapat berkontribusi—atau sebaliknya, menghambat—pencapaian tujuan pembangunan.

Stakeholder dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria:

a. Berdasarkan Posisi

- **Stakeholder internal**: pihak-pihak yang berada di dalam sistem desa: pemerintah desa, BPD, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat.
- **Stakeholder eksternal**: pihak-pihak di luar desa yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pembangunan desa: pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat; perusahaan; LSM; perguruan tinggi; donor.

b. Berdasarkan Peran

- **Stakeholder kunci**: pihak yang memiliki kewenangan legal untuk mengambil keputusan (pemerintah desa, BPD).
- **Stakeholder primer**: pihak yang menjadi sasaran utama pembangunan dan akan merasakan langsung manfaatnya (masyarakat, kelompok miskin, perempuan, pemuda).
- **Stakeholder sekunder**: pihak yang berperan sebagai perantara atau pendukung (LSM, perguruan tinggi, media).
- **Stakeholder eksternal**: pihak di luar yang dipengaruhi oleh hasil pembangunan (pemerintah di atasnya, perusahaan, masyarakat luas).

c. Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh

- **Pengaruh tinggi, kepentingan tinggi**: mitra kunci, harus dilibatkan penuh.
- **Pengaruh tinggi, kepentingan rendah**: perlu dipantau dan dikelola agar tidak mengganggu.
- **Pengaruh rendah, kepentingan tinggi**: perlu diberdayakan dan dilibatkan.
- **Pengaruh rendah, kepentingan rendah**: cukup dipantau minimal.

2. Pengertian Sinergi

Sinergi berasal dari bahasa Yunani "synergos" yang berarti bekerja bersama. Dalam manajemen, sinergi diartikan sebagai interaksi dua atau lebih pihak yang menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek individualnya (1+1 > 2).

Sinergi berbeda dengan koordinasi biasa. Koordinasi hanya memastikan bahwa pihak-pihak yang berbeda bekerja tidak saling tumpang tindih. Sinergi menciptakan nilai tambah melalui kolaborasi yang menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai sendiri.

Dalam konteks pembangunan desa, sinergi adalah:

- **Komunikasi yang intensif**: semua pihak saling berbagi informasi, berdiskusi, dan mendengarkan.
- **Koordinasi yang efektif**: peran dan tanggung jawab masing-masing pihak jelas, tidak tumpang tindih, dan saling melengkapi.
- **Kolaborasi yang setara**: semua pihak duduk bersama, menyumbangkan sumber daya dan keahlian, dan bersama-sama mengambil keputusan.
- **Saling menguntungkan**: semua pihak merasakan manfaat dari kolaborasi, tidak ada yang dieksploitasi.
- **Berorientasi pada tujuan bersama**: ada visi bersama yang disepakati dan menjadi penggerak kolaborasi.

C. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DESA

Siapa saja pemangku kepentingan dalam pembangunan desa? Mari kita identifikasi satu per satu.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah stakeholder kunci. Mereka memiliki kewenangan legal, legitimasi politik, dan sumber daya (terutama Dana Desa) untuk menjalankan pembangunan.

Peran pemerintah desa:

- **Fasilitator**: Memfasilitasi partisipasi masyarakat, musyawarah, dan koordinasi antar pihak.
- **Regulator**: Menerbitkan peraturan desa (Perdes) yang mengatur berbagai aspek pembangunan.
- **Perencana**: Menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara partisipatif.
- **Pelaksana**: Melaksanakan program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.
- **Pengelola**: Mengelola keuangan dan aset desa secara transparan dan akuntabel.
- **Pemberdaya**: Memberdayakan masyarakat melalui berbagai program.
- **Koordinasi**: Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak di luar desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah mitra pemerintah desa yang menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan.

Peran BPD:

- **Legislasi**: Membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama kepala desa.
- **Aspirasi**: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- **Pengawasan**: Mengawasi kinerja kepala desa dan pelaksanaan peraturan desa.
- **Mediasi**: Menjadi penengah jika terjadi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Mereka adalah pemilik sah desa, yang seharusnya menentukan arah pembangunan.

Peran masyarakat:

- **Partisipan**: Berpartisipasi dalam musyawarah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
- **Pelaku usaha**: Menjalankan UMKM, bertani, berdagang, dan kegiatan ekonomi lainnya.
- **Kader pembangunan**: Menjadi kader posyandu, kader PKK, relawan, dan penggerak masyarakat.
- **Pengawas sosial**: Mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, mencegah korupsi dan penyimpangan.
- **Penerima manfaat**: Menerima hasil pembangunan dan merasakan peningkatan kesejahteraan.

Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus:

- **Perempuan**: Memiliki peran vital dalam pembangunan manusia, tetapi sering terpinggirkan.
- **Pemuda**: Agen perubahan dan masa depan desa, perlu ruang dan dukungan.
- **Kelompok miskin**: Paling rentan dan paling membutuhkan intervensi.
- **Penyandang disabilitas**: Sering terabaikan, perlu afirmasi dan aksesibilitas.
- **Masyarakat adat**: Memiliki hak ulayat dan kearifan lokal yang perlu dihormati.

4. Pemerintah Kecamatan

Kecamatan adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

Peran pemerintah kecamatan:

- **Pembinaan**: Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- **Pengawasan**: Mengawasi jalannya pemerintahan desa, terutama pengelolaan keuangan desa.
- **Koordinasi**: Menjadi penghubung antara desa dan kabupaten.
- **Fasilitasi**: Memfasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian konflik antar desa.
- **Evaluasi**: Mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas, termasuk terhadap desa-desa di wilayahnya.

Peran pemerintah kabupaten/kota:

- **Regulasi**: Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur desa.
- **Alokasi sumber daya**: Mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana lainnya.
- **Pembinaan dan pengawasan**: Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- **Pendampingan**: Menyediakan tenaga pendamping desa.
- **Koordinasi lintas sektor**: Mengoordinasikan program-program sektoral di desa.
- **Fasilitasi kemitraan**: Memfasilitasi kemitraan antara desa dengan pihak swasta dan lembaga lainnya.

6. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi memiliki peran dalam koordinasi dan pembinaan desa di tingkat provinsi.

Peran pemerintah provinsi:

- **Koordinasi**: Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa antar kabupaten/kota.
- **Pembinaan**: Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur desa dan pendamping desa.
- **Pengawasan**: Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang desa.
- **Fasilitasi**: Memfasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota.

7. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan kementerian lainnya, memiliki peran dalam kebijakan nasional dan alokasi sumber daya.

Peran pemerintah pusat:

- **Regulasi**: Menetapkan kebijakan nasional tentang desa (UU Desa, PP, Permen).
- **Alokasi sumber daya**: Mengalokasikan Dana Desa dan dana lainnya.
- **Pembinaan dan pengawasan**: Membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa secara nasional.
- **Pendampingan**: Menyediakan pendamping desa dan tenaga ahli.
- **Fasilitasi**: Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kemitraan dengan pihak luar negeri.

8. Sektor Swasta (Perusahaan)

Perusahaan yang beroperasi di wilayah desa atau memiliki kepentingan dengan desa memiliki tanggung jawab sosial (CSR) dan dapat menjadi mitra pembangunan.

Peran swasta:

- **CSR (Corporate Social Responsibility)** : Menyalurkan program CSR yang terintegrasi dengan rencana pembangunan desa, bukan sekadar amal.
- **Kemitraan usaha**: Bekerjasama dengan BUMDes, koperasi, atau kelompok tani dalam pengembangan usaha (offtaker, penyedia input, pendampingan).
- **Penciptaan lapangan kerja**: Membuka lapangan kerja bagi warga desa.
- **Transfer teknologi**: Memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas.
- **Pendampingan**: Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

Prinsip kemitraan dengan swasta:

- **Saling menguntungkan**, tidak eksploitatif.
- **Transparan** dalam perjanjian dan pelaksanaan.
- **Berbasis kebutuhan desa**, bukan keinginan perusahaan.
- **Berkelanjutan**, tidak hanya proyek sesaat.
- **Menghormati hak-hak masyarakat**, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam.

9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM memiliki pengalaman, keahlian, dan jaringan yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan.

Peran LSM:

- **Pendampingan masyarakat**: Mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan, perencanaan partisipatif, dan pengorganisasian.
- **Advokasi kebijakan**: Mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dan marginal.
- **Penelitian dan pengembangan**: Melakukan riset partisipatif dan mengembangkan model-model pembangunan alternatif.
- **Pendidikan dan pelatihan**: Memberikan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur desa.
- **Pengawasan**: Menjadi mitra kritis yang mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- **Jaringan**: Menghubungkan desa dengan jaringan yang lebih luas.

10. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

Peran perguruan tinggi:

- **Penelitian**: Melakukan riset tentang potensi, masalah, dan solusi pembangunan desa.
- **Pengabdian kepada masyarakat**: Melaksanakan program-program pengabdian yang memberdayakan masyarakat (KKN tematik, pendampingan, pelatihan).
- **Transfer teknologi**: Memperkenalkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan desa.
- **Pendidikan**: Memberikan beasiswa, pelatihan, dan pendidikan bagi warga desa.
- **Pendampingan**: Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
- **Inkubasi usaha**: Membantu pengembangan UMKM dan BUMDes melalui inkubasi bisnis.

Contoh peran perguruan tinggi: Universitas Brawijaya di Desa Pandansari, Malang, dengan program Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan dan pelatihan pertanian organik. IPB University dan YKAN di Bulungan dengan program pembangunan hijau di 10 desa percontohan.

11. Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya memiliki basis massa yang luas dan pengaruh moral yang kuat di desa.

Peran organisasi keagamaan:

- **Pembinaan moral dan spiritual**: Membina akhlak dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.
- **Pendidikan**: Mengelola sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.
- **Sosial dan kemanusiaan**: Mengelola kegiatan sosial seperti santunan, bakti sosial, dan bantuan bencana.
- **Ekonomi**: Mengembangkan koperasi dan usaha ekonomi produktif.
- **Mediasi**: Menjadi penengah dalam konflik sosial.

12. Media Massa dan Media Sosial

Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mengawasi jalannya pembangunan.

Peran media:

- **Informasi**: Menyebarkan informasi tentang program pembangunan, peluang, dan hak-hak masyarakat.
- **Edukasi**: Mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu.
- **Promosi**: Mempromosikan potensi desa (wisata, produk unggulan).
- **Kontrol sosial**: Mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, mengungkap penyimpangan.
- **Aspirasi**: Menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.

13. Perantau

Warga desa yang merantau ke kota atau luar negeri adalah aset yang sering terabaikan.

Peran perantau:

- **Remitansi**: Mengirim uang ke keluarga, yang menjadi sumber ekonomi penting.
- **Investasi**: Berinvestasi di kampung halaman (usaha, properti).
- **Informasi dan jaringan**: Membawa informasi dan jaringan dari luar.
- **Advokasi**: Menjadi advokat bagi kepentingan desa di perantauan.
- **Dukungan sosial dan politik**: Mendukung kegiatan sosial dan pembangunan desa.

14. Lembaga Donor Internasional

Lembaga donor internasional seperti World Bank, UNDP, USAID, DFAT, dan lainnya dapat memberikan bantuan dana, teknis, dan advokasi untuk pembangunan desa.

Peran lembaga donor:

- **Pendanaan**: Memberikan hibah atau pinjaman untuk program-program tertentu.
- **Bantuan teknis**: Menyediakan tenaga ahli dan pendampingan.
- **Advokasi kebijakan**: Mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.
- **Pengembangan kapasitas**: Melatih aparatur desa, pendamping, dan LSM.
- **Penelitian dan pengembangan**: Mendanai riset dan pengembangan model pembangunan.

D. BENTUK-BENTUK SINERGI STAKEHOLDER

Sinergi stakeholder dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

1. Forum Multipihak di Tingkat Desa

Bentuk sinergi yang ideal adalah forum multipihak di tingkat desa, di mana semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk merumuskan visi bersama, berbagi peran dan sumber daya, serta saling mengawasi.

Apa itu forum multipihak?
Forum multipihak adalah wadah pertemuan yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan—pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda, kelompok tani, LSM, perantau, dan pihak lain yang relevan—untuk membahas isu-isu pembangunan desa dan mengambil keputusan bersama.

Fungsi forum multipihak:

- **Membangun visi bersama**: Merumuskan visi pembangunan desa yang disepakati bersama.
- **Perencanaan bersama**: Menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif.
- **Koordinasi**: Mengoordinasikan program dan kegiatan dari berbagai pihak agar tidak tumpang tindih.
- **Mobilisasi sumber daya**: Menggalang sumber daya (dana, tenaga, pemikiran) dari berbagai pihak.
- **Pemantauan dan evaluasi**: Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.
- **Penyelesaian konflik**: Menjadi forum untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah.

Prinsip forum multipihak:

- **Inklusif**: Semua kelompok kepentingan terwakili, terutama kelompok marginal.
- **Setara**: Semua peserta memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan mengambil keputusan.
- **Transparan**: Semua informasi terbuka untuk peserta.
- **Akuntabel**: Keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- **Berkelanjutan**: Forum diadakan secara rutin, bukan hanya sekali.

2. Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis adalah kerjasama jangka panjang antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.

Contoh kemitraan strategis:

- **Kemitraan BUMDes dengan perusahaan**: BUMDes menjadi pemasok produk (misalnya hasil pertanian) untuk perusahaan. Perusahaan memberikan jaminan pasar, harga yang stabil, dan pendampingan teknis.
- **Kemitraan kelompok tani dengan koperasi**: Koperasi menyediakan saprodi (bibit, pupuk) dengan harga terjangkau, menampung hasil panen, dan memberikan kredit. Kelompok tani menjamin kualitas dan kuantitas pasokan.
- **Kemitraan desa dengan perguruan tinggi**: Perguruan tinggi melakukan riset, pendampingan, dan transfer teknologi. Desa menjadi laboratorium hidup dan mitra pengabdian.

- **Kemitraan desa dengan LSM**: LSM memberikan pendampingan pemberdayaan. Desa menjadi mitra implementasi program.

3. Kerjasama Antar Desa (KSAD)

Kerjasama antar desa adalah sinergi antara dua desa atau lebih untuk mengembangkan potensi bersama atau mengatasi masalah bersama.

Bentuk kerjasama antar desa:

- **BUMDes Bersama**: Pendirian BUMDes yang dikelola bersama oleh beberapa desa untuk mengelola potensi yang membutuhkan skala ekonomi lebih besar, misalnya pengelolaan wisata kawasan, pengolahan hasil pertanian bersama, atau pengadaan alat berat bersama.
- **Pembangunan infrastruktur bersama**: Pembangunan jalan antar desa, irigasi yang melintasi beberapa desa, atau pasar bersama.
- **Pengelolaan sumber daya alam bersama**: Pengelolaan hutan, daerah aliran sungai, atau kawasan wisata yang melibatkan beberapa desa.
- **Penanganan bencana bersama**: Kerjasama dalam sistem peringatan dini, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana.
- **Pertukaran informasi dan pengalaman**: Studi banding antar desa, pelatihan bersama, dan berbagi praktik baik.

4. Jejaring (Networking)

Jejaring adalah hubungan antar individu, kelompok, atau lembaga yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, dukungan, dan kerjasama.

Jenis jejaring:

- **Jejaring antar desa**: Forum komunikasi antar kepala desa, antar BPD, antar karang taruna, antar PKK.
- **Jejaring dengan perantau**: Paguyuban perantau yang tetap terhubung dengan kampung halaman.
- **Jejaring dengan LSM dan perguruan tinggi**: Untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan dukungan.
- **Jejaring dengan dinas dan instansi**: Untuk mengakses program dan bantuan pemerintah.
- **Jejaring dengan media**: Untuk mempromosikan potensi desa dan mengawal kebijakan.

5. Program CSR Terintegrasi

CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan seringkali berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan rencana pembangunan desa. Sinergi dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana pembangunan desa.

Langkah-langkah:

- Pemetaan potensi dan kebutuhan desa.
- Identifikasi perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.
- Dialog antara pemerintah desa dan perusahaan untuk menyelaraskan program CSR dengan prioritas desa.
- Perumusan program CSR bersama yang terintegrasi dengan rencana desa.

- Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi bersama.
- Pelaporan dan publikasi hasil.

Contoh: Perusahaan perkebunan di sekitar desa dapat bermitra dengan BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil perkebunan. Perusahaan tambang dapat berkontribusi dalam program konservasi lingkungan dan pengembangan ekonomi alternatif.

E. STUDI KASUS: SINERGI STAKEHOLDER DI DESA

1. Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara: Kolaborasi Multipihak untuk Pembangunan Hijau

Kabupaten Bulungan menjadi contoh kolaborasi multipihak yang sukses. Pemerintah kabupaten menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan IPB University untuk mempercepat pembangunan hijau. Program percontohan di 10 desa di Kecamatan Peso menjadi pusat pelatihan dan pendampingan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Stakeholder yang terlibat:

- **Pemerintah Kabupaten Bulungan**: Sebagai inisiator dan penyedia anggaran (program Bulungan Hijau dengan alokasi Rp7-8 miliar).
- **YKAN**: Sebagai mitra teknis, menyediakan keahlian konservasi dan pendampingan.
- **IPB University**: Sebagai mitra akademik, melakukan riset dan pengembangan kapasitas.
- **Pemerintah desa dan masyarakat**: Sebagai pelaksana utama di tingkat desa.
- **Kelompok tani dan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)** : Sebagai pelaku usaha.

Hasil sinergi:

- Terbentuknya IAD (Integrated Area Development) Lanskap Kayan, kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial.
- Alokasi 10% Dana Desa untuk mendukung program pembangunan hijau.
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- Pengembangan komoditas ramah lingkungan yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Desa Ponggok, Klaten: Sinergi Pemerintah Desa, BUMDes, dan Masyarakat

Desa Ponggok adalah contoh sinergi yang sukses antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat.

Stakeholder yang terlibat:

- **Pemerintah Desa Ponggok**: Memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi.
- **BUMDes Tirta Mandiri**: Mengelola wisata air Umbul Ponggok, homestay, restoran, toko oleh-oleh, dan unit simpan pinjam secara profesional.
- **Masyarakat**: Sebagai pemilik homestay, pekerja, pelaku UMKM, dan penerima manfaat (dividen BUMDes).
- **Pemerintah Kabupaten Klaten**: Memberikan dukungan promosi dan fasilitasi.

- **Media dan platform digital**: Membantu promosi dan pemasaran.

Hasil sinergi:

- Peningkatan pendapatan asli desa (PADes) yang signifikan.
- Lapangan kerja terbuka bagi warga.
- Dividen BUMDes dibagikan kepada warga setiap tahun.
- Desa Ponggok menjadi destinasi wisata terkenal dan contoh desa sukses.

3. Desa Pandansari, Malang: Sinergi Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan Pemerintah Desa

Desa Pandansari di Malang menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah desa.

Stakeholder yang terlibat:

- **Universitas Brawijaya (UB)** : Melalui program pengabdian masyarakat, memberikan pelatihan pertanian organik, pendampingan agroforestri, dan pendirian Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan.
- **Kelompok Tani Baran Sukosari**: Sebagai mitra utama, menerima pelatihan dan menerapkan di lahan.
- **Ibu-ibu PKK**: Dilatih pertanian organik di pekarangan.
- **Pemerintah Desa Pandansari**: Memfasilitasi program dan mendukung keberlanjutannya.

Hasil sinergi:

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani (nilai post-test 96,33 dari sebelumnya 73,33).
- Lahan pertanian mulai pulih, ketergantungan pada pupuk kimia berkurang.
- Ketahanan pangan keluarga meningkat.
- Terbangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga ekosistem.

4. Desa Bayan, Lombok: Sinergi Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Sektor Pariwisata

Desa Bayan adalah contoh sinergi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan sektor pariwisata.

Stakeholder yang terlibat:

- **Lembaga adat Bayan**: Sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai lokal, pemimpin upacara adat, dan mediator.
- **Pemerintah Desa Bayan**: Memfasilitasi kegiatan adat dan mengintegrasikannya dengan pembangunan.
- **Masyarakat**: Sebagai pelaku usaha (kopi, tenun, homestay) dan pelaku seni budaya.
- **Pelaku pariwisata**: Biro perjalanan, pemandu wisata, pengelola homestay.
- **Pemerintah Kabupaten Lombok Utara**: Mendukung promosi wisata budaya.

Hasil sinergi:

- Tradisi adat tetap lestari, bahkan menjadi daya tarik wisata.
- Produk lokal (kopi, tenun) dikenal luas dan menjadi sumber pendapatan.
- Masyarakat memiliki identitas budaya yang kuat dan bangga akan tradisinya.

F. TANTANGAN DALAM MEMBANGUN SINERGI

Membangun sinergi stakeholder bukanlah perkara mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

1. Perbedaan Kepentingan

Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang mungkin berbeda, bahkan bertentangan. Perusahaan ingin untung, LSM ingin advokasi, pemerintah ingin stabilitas, masyarakat ingin kesejahteraan. Menemukan titik temu di antara kepentingan yang berbeda adalah tantangan tersendiri.

2. Ketidaksetaraan Kekuasaan

Tidak semua stakeholder memiliki kekuasaan yang setara. Pemerintah desa mungkin merasa paling berkuasa. Perusahaan besar memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Masyarakat biasa mungkin merasa tidak berdaya. Ketidaksetaraan ini bisa menghambat dialog yang setara.

3. Kurangnya Kepercayaan

Sejarah hubungan yang buruk—misalnya antara masyarakat dan perusahaan tambang, atau antara LSM dan pemerintah—dapat menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Membangun kepercayaan dari awal adalah proses panjang.

4. Koordinasi yang Rumit

Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin rumit koordinasinya. Perbedaan jadwal, prioritas, dan cara kerja dapat menghambat efektivitas sinergi.

5. Kapasitas yang Terbatas

Tidak semua stakeholder memiliki kapasitas yang sama untuk berpartisipasi secara efektif. Masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk duduk setara dengan akademisi atau pebisnis. LSM mungkin kekurangan sumber daya. Pemerintah desa mungkin kekurangan staf.

6. Komitmen Jangka Pendek

Banyak stakeholder, terutama dari sektor swasta dan donor, memiliki orientasi jangka pendek. Mereka ingin hasil cepat, sementara pembangunan desa membutuhkan proses jangka panjang. Ketika pendanaan berakhir, komitmen pun berakhir.

7. Politisasi

Sinergi bisa terganggu oleh kepentingan politik jangka pendek. Menjelang pemilihan kepala desa atau pemilu, semua pihak bisa disibukkan oleh kontestasi politik, bukan oleh pembangunan.

8. Ego Sektoral

Masing-masing pihak seringkali memiliki ego sektoral. Pemerintah desa ingin programnya yang diutamakan. LSM ingin pendekatannya yang dipakai. Perusahaan ingin model bisnisnya yang diikuti. Ego ini bisa menghambat kolaborasi.

G. STRATEGI MEMBANGUN SINERGI YANG EFEKTIF

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi untuk membangun sinergi yang efektif.

1. Pemetaan Stakeholder

Langkah pertama adalah memetakan siapa saja stakeholder yang relevan, apa kepentingan dan pengaruh mereka, serta bagaimana hubungan antar mereka. Pemetaan ini menjadi dasar untuk merancang strategi keterlibatan.

2. Membangun Visi Bersama

Semua stakeholder perlu duduk bersama untuk merumuskan visi pembangunan desa yang disepakati bersama. Visi ini menjadi "bintang penuntun" yang mengarahkan semua tindakan dan mengatasi perbedaan kepentingan jangka pendek.

3. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan adalah fondasi sinergi. Untuk membangun kepercayaan:

- **Transparansi**: Semua informasi harus terbuka. Tidak boleh ada yang disembunyikan.
- **Komunikasi intensif**: Sering bertemu, berdialog, dan saling mendengarkan.
- **Konsistensi**: Menepati janji, tidak ingkar.
- **Keadilan**: Memperlakukan semua pihak secara adil, tidak pilih kasih.
- **Keberhasilan bersama**: Mulai dengan proyek-proyek kecil yang mudah berhasil, untuk membangun kepercayaan dan momentum.

4. Membangun Struktur dan Mekanisme yang Jelas

Sinergi membutuhkan struktur dan mekanisme yang jelas:

- **Forum multipihak**: Wadah pertemuan rutin yang terstruktur.
- **Pembagian peran yang jelas**: Siapa melakukan apa, dengan sumber daya apa, dan bertanggung jawab kepada siapa.
- **Aturan main yang disepakati bersama**: Bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana penyelesaian konflik, bagaimana monitoring dan evaluasi.
- **Sekretariat bersama**: Untuk mendukung koordinasi dan administrasi.

5. Membangun Kapasitas

Semua pihak, terutama yang kurang berdaya (masyarakat, kelompok miskin, perempuan), perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat berpartisipasi secara setara. Pelatihan, pendampingan, dan pendidikan diperlukan.

6. Memulai dari Hal Kecil

Tidak perlu langsung membuat forum besar yang rumit. Mulailah dari proyek-proyek kecil yang melibatkan beberapa pihak, dengan tujuan yang jelas dan terukur. Keberhasilan proyek kecil akan membangun kepercayaan dan momentum untuk kerjasama yang lebih besar.

7. Mengelola Konflik secara Konstruktif

Konflik pasti akan muncul. Yang penting adalah bagaimana mengelolanya secara konstruktif. Mediasi, dialog, dan musyawarah harus menjadi mekanisme utama. Jangan biarkan konflik dibiarkan berlarut.

8. Merayakan Keberhasilan

Ketika berhasil mencapai suatu tujuan, rayakan bersama. Apresiasi publik terhadap kontribusi semua pihak akan memperkuat komitmen dan membangun kebanggaan bersama.

9. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan bersama, tidak hanya oleh satu pihak. Semua stakeholder terlibat dalam menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan perbaikan.

10. Keberlanjutan

Sinergi harus dirancang untuk berkelanjutan. Jangan tergantung pada satu orang atau satu sumber pendanaan. Bangun sistem, lembagakan forum, dan kaderisasi kepemimpinan.

H. RANGKUMAN

Pembangunan desa bukanlah tugas eksklusif pemerintah desa. Ia membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergi adalah interaksi yang menghasilkan efek gabungan lebih besar daripada jumlah efek individual (1+1 > 2).

Stakeholder dalam pembangunan desa sangat beragam, masing-masing dengan peran dan kontribusinya:

1. **Pemerintah desa**: fasilitator, regulator, perencana, pelaksana, pengelola, pemberdaya, koordinator.
2. **BPD**: legislasi, aspirasi, pengawasan, mediasi.
3. **Masyarakat**: partisipan, pelaku usaha, kader, pengawas, penerima manfaat.
4. **Pemerintah kecamatan**: pembinaan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi.
5. **Pemerintah kabupaten**: regulasi, alokasi sumber daya, pembinaan, pengawasan, pendampingan, koordinasi lintas sektor, fasilitasi kemitraan.
6. **Pemerintah provinsi**: koordinasi antar kabupaten, pembinaan, pengawasan, fasilitasi kerjasama antar desa.
7. **Pemerintah pusat**: regulasi nasional, alokasi Dana Desa, pembinaan, pengawasan, pendampingan, fasilitasi.
8. **Sektor swasta**: CSR, kemitraan usaha, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, pendampingan.

9. **LSM**: pendampingan masyarakat, advokasi kebijakan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, jaringan.
10. **Perguruan tinggi**: penelitian, pengabdian masyarakat, transfer teknologi, pendidikan, pendampingan, inkubasi usaha.
11. **Organisasi keagamaan**: pembinaan moral dan spiritual, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, ekonomi, mediasi.
12. **Media massa dan media sosial**: informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial, aspirasi.
13. **Perantau**: remitansi, investasi, informasi dan jaringan, advokasi, dukungan sosial dan politik.
14. **Lembaga donor internasional**: pendanaan, bantuan teknis, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas, penelitian.

Bentuk-bentuk sinergi yang ideal:

1. **Forum multipihak di tingkat desa**: wadah pertemuan semua stakeholder untuk merumuskan visi bersama, berbagi peran, dan saling mengawasi.
2. **Kemitraan strategis**: kerjasama jangka panjang antara dua pihak atau lebih untuk tujuan bersama.
3. **Kerjasama antar desa (KSAD)** : sinergi antar desa untuk mengembangkan potensi bersama atau mengatasi masalah bersama.
4. **Jejaring (networking)** : hubungan antar individu, kelompok, atau lembaga untuk pertukaran informasi dan dukungan.
5. **Program CSR terintegrasi**: program CSR perusahaan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan desa.

Tantangan dalam membangun sinergi meliputi: perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan kekuasaan, kurangnya kepercayaan, koordinasi yang rumit, kapasitas terbatas, komitmen jangka pendek, politisasi, dan ego sektoral.

Strategi membangun sinergi yang efektif:

1. Pemetaan stakeholder.
2. Membangun visi bersama.
3. Membangun kepercayaan (transparansi, komunikasi, konsistensi, keadilan).
4. Membangun struktur dan mekanisme yang jelas (forum multipihak, pembagian peran, aturan main).
5. Membangun kapasitas semua pihak, terutama yang kurang berdaya.
6. Memulai dari hal kecil.
7. Mengelola konflik secara konstruktif.
8. Merayakan keberhasilan.
9. Monitoring dan evaluasi partisipatif.
10. Memastikan keberlanjutan.

Studi kasus dari Bulungan, Ponggok, Pandansari, dan Bayan menunjukkan bahwa sinergi stakeholder yang efektif dapat menghasilkan dampak yang luar biasa: percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya.

Pada akhirnya, sinergi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Desa tidak bisa dibangun sendirian. Ia membutuhkan tangan-tangan yang saling terulur, hati yang saling terbuka, dan pikiran yang saling

bersinergi. Dalam sinergi, perbedaan bukanlah penghalang, tetapi kekayaan. Dalam sinergi, konflik bukanlah ancaman, tetapi peluang untuk belajar. Dalam sinergi, kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari satu tujuan besar: desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pembangunan di desa Anda? Sejauh mana sinergi di antara mereka berjalan?
2. Apakah di desa Anda sudah ada forum multipihak yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pihak luar? Jika ya, seberapa efektif? Jika belum, bagaimana cara membentuknya?
3. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar desa? Apakah ada program CSR yang terintegrasi dengan rencana desa?
4. Apakah ada perguruan tinggi atau LSM yang aktif melakukan program di desa Anda? Bagaimana dampaknya?
5. Bagaimana peran perantau dalam pembangunan desa Anda? Apakah mereka dilibatkan secara aktif?
6. Apa tantangan terbesar dalam membangun sinergi stakeholder di desa Anda? Bagaimana mengatasinya?
7. Menurut Anda, apa contoh sinergi yang paling berhasil di desa Anda? Apa yang bisa dipelajari dari keberhasilan itu?
8. Bagaimana peran generasi muda dalam mendorong sinergi stakeholder di desa?

BAB XXIX

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERKELANJUTAN

A. PENGANTAR: MEMBANGUN KEMANDIRIAN, BUKAN KETERGANTUNGAN

Sepanjang sejarah pembangunan di Indonesia, kita telah menyaksikan begitu banyak program pemberdayaan yang digulirkan oleh pemerintah, LSM, maupun lembaga donor. Ada yang berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang gagal. Salah satu penyebab kegagalan yang paling umum adalah ketidakberlanjutan. Program berjalan dengan baik selama pendanaan masih mengalir dan pendamping masih hadir. Namun, begitu proyek berakhir dan pihak luar pergi, kegiatan pun berhenti. Masyarakat kembali ke titik awal. Tidak ada perubahan yang berarti.

Pemberdayaan yang sejati adalah pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia tidak hanya memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri di masa depan. Ia menciptakan sistem, kelembagaan, dan budaya yang memungkinkan masyarakat untuk terus belajar, berinovasi, dan mengatasi masalah mereka sendiri, bahkan setelah intervensi dari luar berakhir.

Bab ini akan menyajikan secara mendalam berbagai model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan. Kita akan memulai dengan memahami konsep pemberdayaan berkelanjutan dan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi berbagai model yang telah terbukti berhasil, seperti model pembangunan berbasis aset (Asset-Based Community Development/ABCD), model sekolah lapang, model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan model pengembangan usaha melalui inkubasi bisnis. Kita akan menganalisis faktor-faktor kunci keberhasilan dari setiap model, terutama pendampingan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan lokal. Pada bagian akhir, kita akan merumuskan sintesis tentang bagaimana merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan.

B. MEMAHAMI PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN

1. Pengertian Pemberdayaan Berkelanjutan

Pemberdayaan berkelanjutan (sustainable empowerment) adalah proses pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan hasil tersebut secara mandiri dalam jangka panjang. Ia menekankan pada keberlanjutan hasil setelah program intervensi dari pihak luar berakhir.

Beberapa karakteristik pemberdayaan berkelanjutan:

a. Berorientasi pada Kemandirian

Tujuan akhir pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan luar. Mereka mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, menggalang sumber daya, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil secara mandiri.

b. Membangun Kapasitas Lokal

Investasi utama pemberdayaan adalah pada manusia dan kelembagaan lokal. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sistem yang dibangun akan tetap ada meskipun pihak luar pergi.

c. Berbasis Potensi Lokal

Pemberdayaan berkelanjutan menggunakan potensi lokal sebagai modal dasar. Ia tidak memaksakan model dari luar yang mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal. Dengan berbasis pada potensi lokal, masyarakat lebih mudah mempertahankan dan mengembangkannya.

d. Partisipatif

Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Partisipasi menciptakan rasa memiliki, yang merupakan prasyarat bagi keberlanjutan.

e. Adaptif dan Fleksibel

Model pemberdayaan harus adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan. Ia harus memiliki mekanisme untuk belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri.

f. Berkelanjutan secara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Hasil pemberdayaan harus berkelanjutan secara ekonomi (menguntungkan dan dapat diandalkan), sosial (dapat diterima dan memperkuat kohesi sosial), dan lingkungan (tidak merusak ekosistem).

2. Mengapa Keberlanjutan Sering Gagal?

Banyak program pemberdayaan gagal mencapai keberlanjutan karena beberapa sebab:

a. Pendekatan Proyek, Bukan Proses

Program dirancang sebagai "proyek" dengan jangka waktu terbatas (biasanya 1-3 tahun). Ketika proyek berakhir, pendanaan berhenti, dan kegiatan pun berhenti. Padahal, pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat.

b. Top-Down dan Tidak Partisipatif

Program dirancang oleh pihak luar tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat merasa program itu bukan "milik mereka". Ketika pihak luar pergi, mereka tidak punya rasa tanggung jawab untuk melanjutkan.

c. Fokus pada Input dan Output Fisik, Bukan Proses

Program terlalu fokus pada berapa banyak dana terserap, berapa banyak orang dilatih, atau berapa unit infrastruktur dibangun. Proses pemberdayaan—membangun kesadaran, kapasitas, dan kelembagaan—diabaikan.

d. Ketergantungan pada Fasilitator atau Donor

Masyarakat menjadi terlalu bergantung pada fasilitator atau donor. Mereka tidak belajar untuk mandiri. Ketika fasilitator pergi, mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.

e. Lemahnya Kelembagaan Lokal

Program tidak membangun atau memperkuat kelembagaan lokal. Setelah program berakhir, tidak ada wadah yang bisa melanjutkan kegiatan.

f. Tidak Ada Strategi Keluar (Exit Strategy)

Fasilitator atau lembaga pendamping tidak memiliki strategi keluar yang jelas. Mereka tidak merencanakan pengurangan keterlibatan secara bertahap dan mempersiapkan masyarakat untuk mandiri.

C. MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN

Berbagai model pemberdayaan telah dikembangkan dan terbukti berhasil dalam membangun keberlanjutan. Mari kita telaah beberapa di antaranya.

1. Model Asset-Based Community Development (ABCD)

ABCD adalah pendekatan pemberdayaan yang berfokus pada aset, potensi, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, bukan pada kelemahan, kekurangan, dan masalahnya. Pendekatan ini dikembangkan oleh John Kretzmann dan John McKnight dari Northwestern University, Amerika Serikat.

Prinsip-prinsip ABCD:

- **Berbasis aset**: Setiap komunitas memiliki aset—individu dengan pengetahuan dan keterampilan, asosiasi/kelompok, institusi lokal, sumber daya alam, dan jaringan. Pemberdayaan harus mengidentifikasi, menghubungkan, dan mengoptimalkan aset-aset ini.
- **Berorientasi pada kekuatan**: Fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan pada apa yang tidak bisa.
- **Partisipatif**: Masyarakat adalah subjek yang aktif mengidentifikasi dan memobilisasi asetnya sendiri.
- **Membangun dari dalam**: Perubahan harus digerakkan dari dalam komunitas, bukan dipaksakan dari luar.
- **Hubungan dan jaringan**: Membangun hubungan dan jaringan antar aset adalah kunci.

Langkah-langkah ABCD:

1. **Pemetaan aset**: Mengidentifikasi semua aset yang dimiliki komunitas—individu (pengetahuan, keterampilan, bakat), asosiasi (kelompok tani, PKK, karang taruna, pengajian), institusi (pemerintah desa, sekolah, masjid), sumber daya alam, dan jaringan.
2. **Membangun hubungan**: Menghubungkan aset-aset yang ada. Membangun jejaring dan kerjasama antar individu, kelompok, dan institusi.
3. **Mobilisasi aset untuk aksi**: Menggerakkan aset yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, kelompok tani menggunakan pengetahuan dan keterampilan anggotanya untuk mengembangkan usaha bersama, dengan dukungan dari pemerintah desa dan jaringan pemasaran.
4. **Mempertahankan dan mengembangkan**: Menjaga agar aset terus berkembang dan jaringan terus berfungsi.

Keunggulan ABCD untuk keberlanjutan:

- Karena berbasis pada aset lokal, masyarakat lebih mudah mempertahankan dan mengembangkannya. Aset itu sudah ada, tidak perlu didatangkan dari luar.
- Prosesnya partisipatif, menciptakan rasa memiliki.
- Membangun dari dalam, mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
- Fokus pada hubungan dan jaringan, yang merupakan modal sosial penting untuk keberlanjutan.

Contoh penerapan ABCD:
Di Desa Pandansari, Malang, pendekatan ABCD digunakan oleh Universitas Brawijaya. Mereka tidak datang dengan program jadi, tetapi pertama-tama memetakan aset desa: pengetahuan petani tentang kopi, lahan pertanian, kelompok tani yang ada, semangat gotong royong, dan akses ke taman nasional. Dari pemetaan ini, mereka merancang program Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan yang justru memperkuat aset yang sudah ada, bukan menggantinya.

2. Model Sekolah Lapang (Farmer Field School)

Sekolah Lapang (SL) adalah model pendidikan non-formal bagi petani (atau nelayan) yang menekankan pada pembelajaran melalui praktik langsung di lapangan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh FAO

(Food and Agriculture Organization) untuk pengendalian hama terpadu, kemudian diadaptasi untuk berbagai bidang.

Prinsip-prinsip Sekolah Lapang:

- **Belajar dari pengalaman**: Petani belajar langsung di lahan mereka sendiri, dengan melakukan pengamatan, percobaan, dan diskusi. Mereka adalah subjek, bukan objek.
- **Berbasis ekosistem**: Petani belajar memahami ekosistem lahan mereka—hubungan antara tanaman, hama, musuh alami, tanah, air, dan iklim.
- **Partisipatif dan interaktif**: Fasilitator bukan guru yang menggurui, tetapi pendamping yang memfasilitasi proses belajar. Petani aktif bertanya, berdiskusi, dan mengambil keputusan.
- **Berorientasi pada pengambilan keputusan**: Tujuan akhirnya adalah petani mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan analisis situasi, bukan mengikuti resep baku.
- **Berkelompok**: Petani belajar dalam kelompok, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Langkah-langkah Sekolah Lapang:

1. **Pembentukan kelompok**: Petani yang berminat membentuk kelompok belajar.
2. **Pemilihan lokasi**: Menentukan lahan demplot (demonstration plot) untuk praktik bersama.
3. **Pertemuan rutin**: Kelompok bertemu secara rutin (misalnya seminggu sekali) selama satu musim tanam.
4. **Pengamatan lapangan**: Petani mengamati kondisi lahan, tanaman, hama, dan musuh alami.
5. **Analisis agro-ekosistem**: Petani menganalisis data pengamatan dan mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu dilakukan.
6. **Percobaan**: Petani melakukan percobaan sederhana untuk menguji berbagai pilihan tindakan.
7. **Diskusi kelompok**: Petani mendiskusikan hasil pengamatan dan percobaan, bertukar pengalaman, dan menarik kesimpulan.
8. **Evaluasi**: Pada akhir musim, kelompok mengevaluasi hasil belajar dan merencanakan tindak lanjut.

Keunggulan Sekolah Lapang untuk keberlanjutan:

- Membangun kapasitas petani untuk terus belajar. Mereka tidak hanya diberi resep, tetapi juga dibekali kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang akan terus mereka gunakan.
- Prosesnya partisipatif dan berbasis pengalaman, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih mendalam dan melekat.
- Kelompok tani yang terbentuk menjadi wadah untuk belajar bersama dan saling mendukung, bahkan setelah program berakhir.
- Tidak tergantung pada fasilitator dari luar. Petani bisa menjadi fasilitator bagi petani lain (training of trainers).

Contoh penerapan Sekolah Lapang:

Di Desa Pandansari, Malang, Universitas Brawijaya mendirikan Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan. Petani belajar tentang pertanian organik, pembuatan pupuk kompos, dan pemulihan agroforestri kopi melalui praktik langsung di lahan demplot. Hasilnya, pengetahuan petani meningkat drastis, dan mereka mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara mandiri .

3. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

KRPL adalah program yang mendorong keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara intensif untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Program ini digagas oleh Kementerian Pertanian dan telah diimplementasikan di banyak desa.

Prinsip-prinsip KRPL:

- **Pemanfaatan pekarangan**: Pekarangan yang selama ini tidak terurus diubah menjadi sumber pangan bergizi.
- **Diversifikasi tanaman**: Tidak hanya satu jenis, tetapi berbagai tanaman ditanam untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
- **Ramah lingkungan**: Menggunakan pupuk organik, pestisida nabati, dan teknik budidaya ramah lingkungan.
- **Berbasis keluarga**: Ibu rumah tangga menjadi aktor utama.
- **Penguatan kelembagaan**: Membentuk kelompok wanita tani (KWT) untuk belajar bersama dan memasarkan hasil.

Langkah-langkah KRPL:

1. **Sosialisasi dan penyadaran**: Mengedukasi keluarga tentang pentingnya memanfaatkan pekarangan.
2. **Pembentukan kelompok**: Membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di tingkat desa.
3. **Pelatihan**: Melatih anggota KWT tentang teknik budidaya, pembuatan pupuk organik, dan pengolahan hasil.
4. **Pendampingan**: Pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian.
5. **Pengembangan usaha**: Jika hasil melebihi kebutuhan keluarga, kelebihannya dijual, baik dalam bentuk segar maupun olahan.
6. **Penguatan jejaring**: Menghubungkan KWT dengan pasar, koperasi, atau BUMDes.

Keunggulan KRPL untuk keberlanjutan:

- Berbasis keluarga, sehingga mudah dilanjutkan karena tidak tergantung pada program formal.
- Memanfaatkan sumber daya lokal (pekarangan) yang sudah dimiliki keluarga.
- Meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara langsung.
- Jika dikembangkan menjadi usaha, dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
- Kelompok wanita tani menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung.

Contoh penerapan KRPL:

Di berbagai desa, program KRPL telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan memberdayakan perempuan. Ibu-ibu rumah tangga tidak hanya menanam sayur untuk konsumsi sendiri, tetapi juga menjual kelebihannya di pasar atau ke tetangga. Kelompok-kelompok usaha pengolahan pangan juga tumbuh, mengolah hasil pekarangan menjadi produk bernilai tambah seperti keripik, manisan, atau sirup.

4. Model Inkubasi Bisnis untuk UMKM dan BUMDes

Model ini berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pendampingan intensif dalam jangka waktu tertentu. Inkubasi bisnis tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pelatihan, pendampingan manajemen, akses pasar, dan jaringan.

Prinsip-prinsip inkubasi bisnis:

- **Selektif**: Tidak semua usaha diinkubasi. Dipilih usaha yang memiliki potensi dan komitmen untuk berkembang.
- **Pendampingan intensif**: Pendampingan tidak hanya teknis, tetapi juga manajemen, keuangan, dan pemasaran.
- **Jangka waktu tertentu**: Inkubasi berlangsung dalam periode tertentu (misalnya 1-2 tahun), setelah itu peserta diharapkan sudah mandiri.
- **Berorientasi pasar**: Fokus pada pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- **Membangun jejaring**: Menghubungkan peserta dengan mitra potensial—pemasok, pembeli, investor, lembaga keuangan.

Langkah-langkah inkubasi bisnis:

1. **Rekrutmen dan seleksi**: Menjaring calon peserta (UMKM, BUMDes) yang memiliki potensi.
2. **Asesmen kebutuhan**: Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan masing-masing peserta.
3. **Penyusunan rencana pengembangan**: Membantu peserta menyusun rencana bisnis dan rencana pengembangan.
4. **Pelatihan dan pendampingan**: Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan (produksi, manajemen, keuangan, pemasaran digital) dan pendampingan intensif.
5. **Akses permodalan**: Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan atau investor.
6. **Akses pasar**: Memfasilitasi akses ke pasar, baik offline (pameran, kemitraan) maupun online (e-commerce).
7. **Monitoring dan evaluasi**: Memantau perkembangan peserta dan memberikan umpan balik.
8. **Graduasi**: Setelah periode inkubasi, peserta dinyatakan lulus (graduasi) dan diharapkan sudah mandiri.

Keunggulan model inkubasi untuk keberlanjutan:

- Membangun kapasitas usaha secara menyeluruh, tidak hanya aspek teknis.
- Pendampingan intensif memastikan bahwa peserta benar-benar menguasai keterampilan yang diperlukan.
- Fokus pada kemandirian: tujuan akhirnya adalah peserta dapat berjalan sendiri tanpa pendampingan.
- Membangun jejaring yang akan terus berguna setelah masa inkubasi berakhir.

Contoh penerapan inkubasi bisnis:

Beberapa program inkubasi telah berhasil mengembangkan UMKM dan BUMDes di berbagai daerah. Misalnya, program inkubasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, atau program inkubasi oleh perguruan tinggi dan LSM. Di tingkat desa, BUMDes yang sukses seperti BUMDes Tirta Mandiri di Ponggok dapat dianggap sebagai hasil dari proses inkubasi informal—pendampingan intensif dari pemerintah daerah dan berbagai pihak.

5. Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

Model ini memberikan hak kelola kepada masyarakat atas sumber daya alam di sekitarnya (hutan, laut, air) dengan kewajiban menjaga kelestariannya. Contohnya adalah skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat) dan pengelolaan sumber daya air partisipatif.

Prinsip-prinsipnya:

- **Pengakuan hak**: Masyarakat diberikan hak legal untuk mengelola sumber daya.
- **Kewajiban konservasi**: Hak disertai kewajiban untuk menjaga kelestarian.
- **Kelembagaan lokal**: Masyarakat membentuk kelembagaan (LPHD, kelompok tani, koperasi) untuk mengelola.
- **Pendampingan teknis**: Masyarakat didampingi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha.
- **Berbasis pengetahuan lokal**: Menggabungkan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern.

Keunggulan model ini untuk keberlanjutan:

- Masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab karena diberikan hak legal.
- Kelembagaan lokal menjadi wadah keberlanjutan pengelolaan.
- Pendampingan membangun kapasitas masyarakat.
- Jangka panjang karena hak kelola diberikan untuk waktu yang lama (35 tahun, dapat diperpanjang).

Contoh penerapan:
Di Desa Bale Redelong, Aceh, masyarakat melalui LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) diberikan hak kelola atas 828 hektare hutan lindung. Mereka mengelola hutan secara lestari, mengembangkan agroforestri kopi dan budidaya madu. Tutupan hutan tetap terjaga, dan ekonomi masyarakat meningkat .

D. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN

Dari berbagai model di atas, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan pemberdayaan berkelanjutan.

1. Partisipasi Bermakna Sejak Awal

Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap paling awal—identifikasi masalah, perencanaan, hingga pengambilan keputusan. Partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi sungguh-sungguh bermakna. Masyarakat merasa bahwa program itu adalah "milik mereka", bukan "milik donor" atau "milik pemerintah". Rasa memiliki ini adalah fondasi keberlanjutan.

Ciri partisipasi bermakna:

- Masyarakat dilibatkan dalam analisis masalah dan potensi.
- Masyarakat ikut menentukan prioritas dan merancang program.
- Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan.
- Masyarakat ikut memantau dan mengevaluasi.

- Ada ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi dan mengoreksi.

2. Berbasis Aset dan Potensi Lokal

Pemberdayaan yang berkelanjutan harus menggunakan aset dan potensi lokal sebagai modal dasar. Aset ini bisa berupa sumber daya alam, pengetahuan tradisional, keterampilan warga, kelembagaan lokal, atau modal sosial. Dengan berbasis pada aset lokal, masyarakat lebih mudah mempertahankan dan mengembangkannya karena aset itu sudah ada dan mereka kenal.

Langkah-langkah identifikasi aset:

- Pemetaan aset individu (pengetahuan, keterampilan, bakat).
- Pemetaan aset kelompok (organisasi, asosiasi, jaringan).
- Pemetaan aset institusi (pemerintah desa, sekolah, tempat ibadah).
- Pemetaan aset fisik dan alam (lahan, bangunan, sumber daya alam).
- Pemetaan aset finansial (tabungan, akses kredit, remitansi).

3. Pendampingan Berkelanjutan

Pendampingan adalah kunci. Masyarakat tidak bisa dilepas begitu saja setelah pelatihan singkat. Mereka membutuhkan pendampingan dalam jangka waktu yang cukup lama—bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun—sampai mereka benar-benar mandiri.

Ciri pendampingan yang efektif:

- **Konsisten**: Pendamping hadir secara rutin, bukan sekali-sekali.
- **Adaptif**: Pendamping menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- **Memberdayakan**: Pendamping tidak membuat masyarakat tergantung, tetapi justru mendorong kemandirian.
- **Membangun hubungan**: Ada hubungan saling percaya antara pendamping dan masyarakat.

4. Penguatan Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal adalah wadah keberlanjutan. Setelah program berakhir, kelembagaan inilah yang akan melanjutkan kegiatan. Karena itu, penguatan kelembagaan harus menjadi fokus utama.

Aspek penguatan kelembagaan:

- **Organisasi**: Struktur organisasi yang jelas, pembagian peran, regenerasi kepemimpinan.
- **Aturan main**: AD/ART, aturan internal, mekanisme pengambilan keputusan.
- **Kapasitas pengurus**: Pelatihan manajemen, keuangan, advokasi.
- **Sumber daya**: Akses terhadap dana, fasilitas, jaringan.
- **Jejaring**: Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung.

5. Membangun Jejaring Kemitraan

Tidak ada lembaga yang bisa hidup sendiri. Jejaring kemitraan dengan berbagai pihak—pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, koperasi, pasar—sangat penting untuk keberlanjutan. Jejaring ini menyediakan akses ke informasi, modal, teknologi, pasar, dan dukungan lainnya.

Jenis jejaring yang perlu dibangun:

- Jejaring dengan pemerintah daerah untuk akses program dan kebijakan.
- Jejaring dengan lembaga keuangan untuk akses modal.
- Jejaring dengan pasar (tengkulak, supermarket, hotel, e-commerce) untuk akses penjualan.
- Jejaring dengan LSM dan perguruan tinggi untuk pendampingan dan inovasi.
- Jejaring dengan sesama kelompok (antar kelompok tani, antar BUMDes) untuk berbagi pengalaman.

6. Strategi Keluar (Exit Strategy) yang Jelas

Lembaga pendamping harus memiliki strategi keluar yang jelas. Mereka tidak boleh tiba-tiba pergi, tetapi harus secara bertahap mengurangi keterlibatan, sambil memastikan bahwa masyarakat sudah siap mandiri.

Elemen strategi keluar:

- **Perencanaan sejak awal**: Strategi keluar sudah direncanakan sejak program dimulai.
- **Pengurangan bertahap**: Secara bertahap mengurangi intensitas pendampingan, memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil alih.
- **Penguatan kapasitas**: Memastikan masyarakat memiliki kapasitas yang cukup sebelum ditinggal.
- **Pelepasan**: Setelah masyarakat dinilai siap, lembaga pendamping benar-benar melepas dan keluar.
- **Monitoring pasca-keluar**: Tetap melakukan monitoring jarak jauh untuk memastikan keberlanjutan.

7. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan bersama masyarakat, bukan hanya oleh pihak luar. Ini penting untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Ciri monitoring dan evaluasi partisipatif:

- Masyarakat terlibat dalam merumuskan indikator keberhasilan.
- Masyarakat mengumpulkan data dan informasi.
- Masyarakat menganalisis temuan.
- Masyarakat menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.
- Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program.

8. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Tidak ada model yang bisa diterapkan secara kaku di semua tempat. Program harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal, perubahan situasi, dan pembelajaran yang muncul.

Ciri program yang adaptif:

- Ada ruang untuk penyesuaian berdasarkan masukan masyarakat.
- Ada mekanisme untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan.
- Tidak terpaku pada rencana awal yang kaku.
- Mampu merespons perubahan situasi (misalnya bencana, krisis ekonomi).

E. STUDI KASUS: PENERAPAN MODEL PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN

1. Desa Pandansari, Malang: Perpaduan ABCD dan Sekolah Lapang

Desa Pandansari menjadi contoh sukses perpaduan pendekatan ABCD dan Sekolah Lapang. Universitas Brawijaya tidak datang dengan program jadi, tetapi melakukan pemetaan aset terlebih dahulu. Mereka menemukan bahwa desa memiliki potensi kopi, lahan pekarangan, kelompok tani yang ada, dan semangat gotong royong.

Dari pemetaan ini, mereka merancang Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan. Petani belajar tentang pertanian organik, pembuatan pupuk kompos, dan pemulihan agroforestri kopi melalui praktik langsung di lahan demplot. Ibu-ibu PKK dilatih pertanian organik di pekarangan.

Faktor keberlanjutan:

- **Berbasis aset**: Program memanfaatkan dan memperkuat aset yang sudah ada.
- **Partisipatif**: Petani dan ibu-ibu terlibat aktif dalam proses belajar.
- **Pendampingan berkelanjutan**: Tim UB hadir secara rutin, tidak hanya sekali.
- **Penguatan kelembagaan**: Kelompok tani dan PKK diperkuat.
- **Membangun kapasitas**: Petani tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi juga keterampilan analisis dan pengambilan keputusan.

Hasil: Pemahaman petani meningkat drastis, lahan mulai pulih, ketahanan pangan keluarga meningkat, dan petani memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem .

2. Desa Bale Redelong, Aceh: Model Perhutanan Sosial

Desa Bale Redelong menerapkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Desa. Masyarakat membentuk LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) dan mendapatkan hak kelola atas 828 hektare hutan lindung.

Faktor keberlanjutan:

- **Pengakuan hak legal**: Masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola hutan selama 35 tahun (dapat diperpanjang).
- **Kelembagaan lokal yang kuat**: LPHD menjadi wadah pengelolaan dan pengambilan keputusan.
- **Pendampingan teknis**: Didampingi oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan WRI Indonesia.
- **Pengembangan usaha**: Masyarakat mengembangkan agroforestri kopi dan budidaya madu yang memberikan nilai ekonomi.
- **Jejaring**: Terhubung dengan pasar dan program-program pendukung.

Hasil: Tutupan hutan tetap terjaga tanpa deforestasi selama tiga tahun, produksi kopi dan madu meningkat, dan pendapatan masyarakat naik .

3. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Berbagai Daerah

Program KRPL telah diimplementasikan di berbagai desa dengan hasil yang menggembirakan. Ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat.

Faktor keberlanjutan:

- **Berbasis keluarga**: Kegiatan dilakukan di pekarangan sendiri, mudah dilanjutkan.
- **Pembentukan kelompok**: Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi wadah belajar dan berbagi.
- **Pelatihan dan pendampingan**: Penyuluh pertanian memberikan pelatihan dan pendampingan.
- **Pengembangan usaha**: Kelebihan hasil dijual, baik segar maupun olahan, menambah pendapatan keluarga.
- **Jejaring**: KWT terhubung dengan pasar, koperasi, atau BUMDes.

Hasil: Ketahanan pangan keluarga meningkat, gizi keluarga lebih baik, dan ibu-ibu memiliki kegiatan produktif yang juga menambah pendapatan.

F. MERANCANG PROGRAM PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah langkah-langkah merancang program pemberdayaan berkelanjutan:

1. Tahap Persiapan dan Pemetaan

- Lakukan pemetaan aset (ABCD) untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki masyarakat.
- Lakukan juga analisis masalah, tetapi dengan perspektif bahwa masalah adalah tantangan yang bisa diatasi dengan aset yang ada.
- Identifikasi stakeholder lokal yang potensial untuk dilibatkan.
- Bangun hubungan dengan masyarakat, jangan langsung memaksakan program.

2. Tahap Perencanaan Partisipatif

- Libatkan masyarakat dalam merumuskan visi, tujuan, dan program.
- Gunakan metode partisipatif seperti PRA (Participatory Rural Appraisal) atau FGD (Focus Group Discussion).
- Pastikan semua kelompok terwakili, terutama yang marginal.
- Rumuskan program yang berbasis pada aset dan potensi yang telah diidentifikasi.
- Tetapkan indikator keberhasilan bersama.

3. Tahap Pelaksanaan dengan Pendampingan

- Laksanakan program secara partisipatif, masyarakat sebagai pelaku utama.
- Sediakan pendampingan teknis dan manajemen secara konsisten.
- Fasilitasi pembentukan atau penguatan kelembagaan lokal.
- Bangun jejaring dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
- Lakukan monitoring secara partisipatif dan adaptif.

4. Tahap Penguatan dan Pelembagaan

- Perkuat kapasitas kelembagaan lokal agar mampu melanjutkan program.
- Fasilitasi akses ke sumber daya (modal, pasar, teknologi) secara mandiri.
- Kembangkan mekanisme pembelajaran dan regenerasi.
- Secara bertahap kurangi intensitas pendampingan (exit strategy).

5. Tahap Keberlanjutan dan Pengembangan

- Setelah program berakhir, lakukan monitoring jarak jauh.
- Fasilitasi pertemuan alumni atau forum jejaring untuk saling berbagi.
- Beri ruang bagi inovasi dan pengembangan lebih lanjut oleh masyarakat sendiri.
- Rayakan keberhasilan sebagai pengakuan atas kemandirian masyarakat.

G. RANGKUMAN

Pemberdayaan berkelanjutan adalah pemberdayaan yang tidak hanya memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri di masa depan. Ia menekankan pada kemandirian, kapasitas lokal, potensi lokal, partisipasi, dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berbagai model pemberdayaan berkelanjutan telah terbukti berhasil:

1. **Asset-Based Community Development (ABCD)** : fokus pada aset dan potensi lokal, bukan kelemahan. Langkah-langkahnya: pemetaan aset, membangun hubungan, mobilisasi aset, mempertahankan dan mengembangkan.
2. **Sekolah Lapang (Farmer Field School)** : pembelajaran melalui praktik langsung di lapangan. Prinsipnya: belajar dari pengalaman, berbasis ekosistem, partisipatif, berorientasi pengambilan keputusan, berkelompok.
3. **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)** : pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Melibatkan ibu rumah tangga, membentuk Kelompok Wanita Tani, dan mengembangkan usaha.
4. **Inkubasi bisnis untuk UMKM dan BUMDes**: pendampingan intensif dalam jangka waktu tertentu untuk mengembangkan usaha. Fokus pada seleksi, pendampingan, akses permodalan dan pasar, serta graduasi.
5. **Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat**: memberikan hak kelola kepada masyarakat dengan kewajiban menjaga kelestarian. Contoh: Perhutanan Sosial.

Faktor kunci keberhasilan pemberdayaan berkelanjutan:

1. **Partisipasi bermakna sejak awal**, menciptakan rasa memiliki.
2. **Berbasis aset dan potensi lokal**, memudahkan keberlanjutan.
3. **Pendampingan berkelanjutan** hingga masyarakat mandiri.
4. **Penguatan kelembagaan lokal** sebagai wadah keberlanjutan.
5. **Membangun jejaring kemitraan** untuk akses pasar, modal, teknologi.
6. **Strategi keluar (exit strategy) yang jelas**, pengurangan keterlibatan secara bertahap.

7. **Monitoring dan evaluasi partisipatif** untuk pembelajaran.
8. **Fleksibilitas dan adaptabilitas** terhadap kondisi lokal.

Studi kasus dari Pandansari (ABCD dan Sekolah Lapang), Bale Redelong (Perhutanan Sosial), dan implementasi KRPL di berbagai daerah menunjukkan bahwa model-model ini dapat berhasil jika diterapkan dengan prinsip yang benar.

Merancang program pemberdayaan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang sistematis: persiapan dan pemetaan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan dengan pendampingan, penguatan dan pelembagaan, serta keberlanjutan dan pengembangan.

Pada akhirnya, pemberdayaan berkelanjutan adalah tentang membangun kemandirian, bukan ketergantungan. Ia adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Ia adalah upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketidakberdayaan, dan membangun desa yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

H. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Anda, apa perbedaan utama antara program pemberdayaan yang berkelanjutan dan yang tidak berkelanjutan?
2. Apakah di desa Anda ada program pemberdayaan yang pernah berjalan? Apakah program itu berkelanjutan? Mengapa atau mengapa tidak?
3. Aset apa saja yang dimiliki desa Anda yang dapat menjadi modal untuk pemberdayaan berkelanjutan?
4. Apakah ada kelompok tani, kelompok wanita, atau kelembagaan lokal lain yang aktif di desa Anda? Seberapa kuat mereka?
5. Bagaimana pengalaman Anda dengan pendampingan? Apakah ada pendamping yang benar-benar membantu, atau justru membuat masyarakat tergantung?
6. Model pemberdayaan mana yang paling cocok untuk desa Anda? Mengapa?
7. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam membangun pemberdayaan berkelanjutan di desa Anda?
8. Bagaimana peran generasi muda dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan?

BAB XXX

MASA DEPAN DINAMIKA SOSIAL DESA

A. PENGANTAR: DESA BUKAN MASA LALU, TAPI MASA DEPAN

Selama ini, desa sering dipandang sebagai representasi masa lalu—sesuatu yang tradisional, statis, dan tertinggal. Kota dianggap sebagai simbol kemajuan, modernitas, dan masa depan. Pandangan ini keliru. Desa bukanlah masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan bagian integral dari masa depan Indonesia yang dinamis. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang deras, desa justru memiliki peluang untuk melompat (leapfrog) menuju kemajuan tanpa harus mengulangi kesalahan pembangunan model kota yang tidak ramah lingkungan, individualistis, dan menciptakan ketimpangan.

Masa depan desa tidak ditentukan oleh nasib, tetapi oleh pilihan-pilihan kolektif yang dibuat hari ini. Pilihan tentang bagaimana mengelola sumber daya alam, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana merespons perubahan teknologi, dan bagaimana mempertahankan jati diri di tengah arus globalisasi. Pilihan-pilihan ini akan menentukan apakah desa akan menjadi sekadar "kota kecil" yang kehilangan identitas, atau menjadi entitas unik yang memadukan kearifan lokal dengan kemajuan modern.

Bab penutup ini akan menjadi refleksi sekaligus proyeksi tentang arah pembangunan desa di masa depan. Kita akan membayangkan desa ideal di masa depan—desa mandiri yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, berdaulat secara politik, ekonomi, dan budaya, serta menjadi lumbung pangan, penyangga ekologi, dan pusat pelestarian budaya bagi bangsa. Kita juga akan membahas konsep "desa cerdas" (smart village) yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Pada akhirnya, bab ini akan mengajak pembaca untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut serta mewujudkan masa depan desa yang lebih baik.

B. TIGA SKENARIO MASA DEPAN DESA

Sebelum membayangkan desa ideal, mari kita renungkan tiga skenario masa depan desa yang mungkin terjadi, tergantung pada pilihan-pilihan yang kita buat hari ini.

Skenario 1: Desa yang Tergilas

Dalam skenario pesimistis ini, desa terus kehilangan penduduk usia produktif karena urbanisasi tak terbendung. Generasi muda berbondong-bondong ke kota, meninggalkan desa yang semakin "tua". Lahan pertanian terbengkalai atau beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Ekonomi desa stagnan, bergantung pada remitansi dari perantau. Nilai-nilai lokal luntur, digantikan budaya populer global yang tidak berakar. Desa kehilangan identitasnya, menjadi sekadar "kota kecil" yang kumuh dan tidak terawat. Ketimpangan semakin tajam, konflik sosial semakin sering. Desa menjadi tempat yang tidak menarik untuk ditinggali, hanya persinggahan sementara sebelum akhirnya pergi ke kota.

Skenario 2: Desa yang Terjebak

Dalam skenario ini, desa mencoba mengikuti model pembangunan kota. Industrialisasi besar-besaran dilakukan. Lahan pertanian dikonversi menjadi pabrik. Pencakar langit mulai menjulang. Gaya hidup urban diadopsi sepenuhnya. Desa berhasil meniru kota, tetapi juga mewarisi semua masalahnya: polusi, kemacetan, kesenjangan, individualisme, stres, dan hilangnya rasa komunitas. Desa kehilangan keunggulan komparatifnya—udara bersih, ruang terbuka hijau, gotong royong, dan kearifan lokal. Ia menjadi "kota" dalam skala kecil, dengan semua masalah yang sama.

Skenario 3: Desa Mandiri dan Berkelanjutan

Dalam skenario optimistis ini, desa menemukan jalannya sendiri. Ia tidak menolak modernitas, tetapi juga tidak kehilangan jati diri. Teknologi diadopsi secara selektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas, tetapi nilai-nilai lokal tetap dijunjung. Ekonomi desa berkembang dengan memanfaatkan

potensi lokal—pertanian modern, agroindustri, pariwisata berbasis komunitas, ekonomi kreatif. Generasi muda memiliki ruang untuk berkarya di desa, sehingga urbanisasi berkurang. Lingkungan hidup terjaga karena pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kelembagaan desa kuat, partisipasi masyarakat tinggi, dan konflik dapat dikelola dengan baik. Desa menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan kualitas hidup yang tinggi. Ia menjadi lumbung pangan, penyangga ekologi, dan pusat pelestarian budaya bagi bangsa.

Skenario ketiga inilah yang menjadi cita-cita bersama. Bab ini akan membahas bagaimana mewujudkannya.

C. VISI DESA MASA DEPAN: MANDIRI, BERKELANJUTAN, DAN BERKARAKTER

Desa masa depan yang kita cita-citakan memiliki tiga pilar utama: kemandirian, keberlanjutan, dan karakter.

1. Kemandirian

Kemandirian berarti desa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, tidak tergantung pada pihak luar. Kemandirian mencakup beberapa aspek:

a. Kemandirian Ekonomi

Desa memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, tidak bergantung pada satu sektor. Pendapatan Asli Desa (PADes) cukup signifikan untuk membiayai sebagian besar pembangunan dan operasional pemerintahan desa. BUMDes tumbuh menjadi "perusahaan desa" yang profesional, mengelola berbagai usaha berbasis potensi lokal. UMKM berkembang pesat, menyerap tenaga kerja lokal dan menghasilkan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar regional, nasional, bahkan internasional. Desa menjadi lumbung pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

b. Kemandirian Energi

Desa mengembangkan sumber energi alternatif—biogas dari kotoran ternak, panel surya di atap rumah, mikrohidro dari aliran sungai, atau pembangkit listrik tenaga angin di pesisir. Ketergantungan pada energi fosil berkurang, bahkan mungkin mencapai kemandirian energi. Ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga ramah lingkungan.

c. Kemandirian Pangan

Setiap keluarga memiliki pekarangan yang dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Lumbung desa menyimpan cadangan pangan untuk menghadapi masa paceklik. Desa tidak perlu mengimpor bahan pangan dari luar. Ini adalah ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan desa.

d. Kemandirian Air

Desa mengelola sumber daya airnya sendiri secara berkelanjutan. Mata air dilindungi, sungai dijaga kebersihannya, dan sistem irigasi dirawat dengan baik. Setiap rumah memiliki akses terhadap air bersih. Desa tidak bergantung pada pasokan air dari luar.

e. Kemandirian Pengelolaan Sampah

Desa memiliki sistem pengelolaan sampah yang mandiri. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk pertanian. Sampah anorganik didaur ulang atau dikelola dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Tidak ada sampah yang dibuang sembarangan atau dibakar. Desa bersih, asri, dan sehat.

2. Keberlanjutan

Keberlanjutan berarti pembangunan desa tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ia menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

a. Keberlanjutan Ekologis

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, tidak melebihi daya dukung lingkungan. Pertanian organik dan agroforestri menggantikan praktik monokultur dengan pupuk kimia berlebihan. Hutan dijaga kelestariannya. Laut tidak dieksploitasi secara berlebihan. Keanekaragaman hayati dipertahankan. Desa menjadi penyangga ekologi yang penting bagi wilayah sekitarnya.

b. Keberlanjutan Sosial

Kohesi sosial tetap kuat di tengah perubahan. Gotong royong, solidaritas, dan rasa saling percaya tidak luntur. Konflik dapat dikelola dengan baik. Kelompok marginal (miskin, difabel, minoritas) terlindungi dan diberdayakan. Generasi muda memiliki ruang untuk berpartisipasi dan mengembangkan diri. Nilai-nilai luhur diwariskan dari generasi ke generasi.

c. Keberlanjutan Ekonomi

Ekonomi desa tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil. Usaha yang dikembangkan tidak merusak lingkungan. Sumber pendapatan beragam, sehingga desa tidak rentan terhadap fluktuasi satu sektor.

3. Karakter

Karakter berarti desa tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus globalisasi. Ia tetap berpegang pada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupannya.

a. Identitas Budaya yang Kuat

Bahasa daerah masih digunakan sehari-hari. Kesenian tradisional tetap hidup dan dihargai. Upacara adat dilaksanakan secara rutin, tidak hanya sebagai atraksi wisata tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai spiritual dan sosial. Generasi muda bangga dengan budayanya, tidak merasa rendah diri di hadapan budaya asing.

b. Nilai-Nilai Luhur yang Terjaga

Gotong royong, hormat kepada orang tua, musyawarah, dan nilai-nilai luhur lainnya tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi filter budaya yang menyaring pengaruh negatif globalisasi.

c. Religiusitas yang Mendalam

Masyarakat desa tetap religius, tetapi dalam bentuk yang lebih inklusif dan toleran. Agama tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga sumber etika sosial dan inspirasi untuk berbuat baik. Tempat ibadah menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan, bukan hanya tempat ritual.

d. Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan

Pengetahuan dan keterampilan tradisional—tentang pertanian, pengobatan, konservasi alam, dan lainnya—tidak dilupakan, tetapi diintegrasikan dengan pengetahuan modern. Kearifan lokal menjadi sumber solusi untuk berbagai tantangan kontemporer, seperti perubahan iklim dan krisis pangan.

D. SMART VILLAGE: DESA CERDAS BERBASIS TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL

Salah satu konsep yang menjanjikan untuk mewujudkan visi desa masa depan adalah "smart village" atau desa cerdas. Konsep ini mengadaptasi gagasan "smart city" (kota cerdas) ke dalam konteks desa, dengan penekanan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.

1. Apa Itu Smart Village?

Smart village adalah desa yang secara sadar dan terencana memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, memberdayakan ekonomi lokal, memperkuat tata kelola, dan melestarikan lingkungan serta budaya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasinya.

Berbeda dengan smart city yang seringkali berfokus pada infrastruktur canggih dan solusi teknologi mahal, smart village lebih menekankan pada solusi sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas desa. Teknologi adalah alat, bukan tujuan.

2. Dimensi Smart Village

a. Smart Governance (Tata Kelola Cerdas)

Pemerintahan desa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola. Sistem Informasi Desa (SID) terintegrasi memungkinkan warga mengakses informasi, mengurus administrasi secara online, dan memantau pengelolaan keuangan desa. Musyawarah desa dapat disiarkan secara langsung melalui media sosial untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui aplikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat.

b. Smart Economy (Ekonomi Cerdas)

Teknologi digital dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi desa. UMKM memasarkan produknya melalui e-commerce dan media sosial. BUMDes mengelola usahanya dengan sistem informasi manajemen yang modern. Petani dan nelayan mengakses informasi harga, cuaca, dan teknologi melalui aplikasi di ponsel mereka. Desa wisata mempromosikan potensinya melalui website dan media sosial, serta menerima reservasi secara online.

c. Smart Environment (Lingkungan Cerdas)

Teknologi digunakan untuk memantau dan menjaga lingkungan. Sensor dipasang untuk memantau kualitas air dan udara. Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi dikembangkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem yang terintegrasi. Pertanian presisi (precision agriculture) menggunakan data untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk.

d. Smart Social (Sosial Cerdas)

Teknologi memperkuat modal sosial, bukan melemahkannya. Grup WhatsApp dan media sosial digunakan untuk koordinasi kegiatan sosial, berbagi informasi, dan memperkuat solidaritas. Platform digital untuk arisan, jimpitan, atau gotong royong online dikembangkan. Layanan telemedicine memungkinkan warga berkonsultasi dengan dokter tanpa harus ke kota. Pendidikan jarak jauh membuka akses ke materi pembelajaran berkualitas.

e. Smart Culture (Budaya Cerdas)

Teknologi digunakan untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan mempromosikan budaya lokal. Upacara adat, kesenian tradisional, dan bahasa daerah direkam dan disebarluaskan melalui media digital. Museum virtual desa dibangun. Konten-konten kreatif berbasis budaya lokal diproduksi dan dipasarkan melalui platform digital.

3. Contoh Penerapan Smart Village

Desa Ponggok, Klaten telah menerapkan beberapa elemen smart village. Mereka memiliki Sistem Informasi Desa (SID) yang memudahkan warga mengakses informasi dan layanan. BUMDes Tirta Mandiri mengelola wisata air Umbul Ponggok dengan sistem reservasi online dan promosi digital yang agresif. Desa ini juga memanfaatkan media sosial untuk membangun brand dan berinteraksi dengan wisatawan.

Desa Panggungharjo, Bantul juga menjadi contoh desa cerdas dengan berbagai inovasi digital. Mereka mengembangkan aplikasi untuk layanan administrasi, pengelolaan sampah, dan pemasaran produk UMKM. BUMDes mereka, Panggung Lestari, menjadi salah satu BUMDes tersukses di Indonesia dengan berbagai unit usaha yang dikelola secara profesional.

4. Prinsip Pengembangan Smart Village

a. Berbasis Kebutuhan, Bukan Teknologi

Teknologi harus dipilih berdasarkan kebutuhan riil desa, bukan karena tren atau paksaan dari luar. Jangan memaksakan solusi canggih jika masalahnya sederhana. Prioritaskan yang paling mendesak dan paling bermanfaat.

b. Partisipatif

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi smart village. Jangan biarkan teknologi menjadi "proyek elite" yang tidak dipahami dan tidak dirasakan manfaatnya oleh warga biasa.

c. Bertahap dan Berkelanjutan

Smart village tidak bisa dibangun dalam semalam. Mulailah dari hal-hal kecil yang mudah berhasil, lalu kembangkan secara bertahap. Pastikan ada keberlanjutan, tidak hanya proyek sesaat.

d. Memperkuat Kearifan Lokal

Teknologi harus digunakan untuk memperkuat, bukan menggantikan, kearifan lokal. Jangan sampai digitalisasi justru mengikis nilai-nilai gotong royong dan solidaritas. Teknologi adalah alat untuk melestarikan budaya, bukan menghancurkannya.

e. Inklusif

Pastikan semua kelompok masyarakat—laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya dan miskin, difabel—dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi. Jangan ciptakan kesenjangan digital baru.

f. Kolaboratif

Bangun kemitraan dengan berbagai pihak—pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, perusahaan teknologi—untuk mengembangkan smart village. Jangan bekerja sendirian.

E. PERAN GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKAN DESA MASA DEPAN

Generasi muda adalah kunci masa depan desa. Merekalah yang akan mewarisi dan melanjutkan pembangunan desa. Peran mereka sangat strategis.

1. Agen Digitalisasi

Generasi muda adalah digital natives. Mereka akrab dengan teknologi sejak lahir. Mereka bisa menjadi motor digitalisasi desa—mengelola media sosial desa, mengembangkan konten promosi, membantu UMKM berjualan online, mengembangkan aplikasi sederhana, dan mengedukasi warga lain tentang teknologi.

2. Inovator dan Wirausaha

Dengan kreativitas dan keberanian mengambil risiko, generasi muda dapat menjadi inovator dan wirausaha. Mereka dapat mengembangkan produk-produk baru, menciptakan model bisnis kreatif, dan membuka lapangan kerja di desa. Mereka tidak harus merantau ke kota; di desa mereka bisa berkarya.

3. Pelestari Budaya

Generasi muda dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Mereka dapat mempelajari budaya lokal, lalu mengemasnya dalam bentuk yang menarik bagi generasi mereka—misalnya melalui konten digital, kolaborasi musik, atau desain produk kekinian. Mereka membuktikan bahwa tradisi tidak kuno, tetapi bisa menjadi sumber kreativitas dan kebanggaan.

4. Penggerak Partisipasi

Generasi muda dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat. Mereka dapat mengorganisir kegiatan sosial, menjadi relawan dalam program-program desa, dan menyuarakan aspirasi generasi muda dalam forum-forum pengambilan keputusan.

5. Pemimpin Masa Depan

Generasi muda adalah calon pemimpin desa di masa depan. Mereka perlu dipersiapkan sejak dini—diberi pendidikan, pelatihan, dan kesempatan untuk memimpin. Regenerasi kepemimpinan harus direncanakan dengan baik.

F. PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN DESA MASA DEPAN

Pemerintah, di semua tingkatan, memiliki peran krusial dalam mewujudkan desa masa depan.

1. Pemerintah Pusat

- **Kebijakan**: Menetapkan kebijakan nasional yang berpihak pada desa, seperti UU Desa dan turunannya.
- **Pendanaan**: Mengalokasikan Dana Desa yang cukup dan berkelanjutan.
- **Pengawasan**: Mengawasi pelaksanaan kebijakan desa, mencegah korupsi dan penyimpangan.
- **Pendampingan**: Menyediakan tenaga pendamping desa yang profesional.
- **Fasilitasi**: Memfasilitasi kemitraan desa dengan pihak-pihak luar, termasuk lembaga internasional.

2. Pemerintah Provinsi

- **Koordinasi**: Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa antar kabupaten/kota.
- **Pembinaan**: Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur desa dan pendamping.
- **Fasilitasi**: Memfasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

- **Regulasi**: Menerbitkan peraturan daerah yang mendukung pembangunan desa.
- **Pendampingan**: Menyediakan pendamping desa dan tenaga ahli.
- **Koordinasi lintas sektor**: Mengoordinasikan program-program sektoral di desa.

- **Fasilitasi kemitraan**: Memfasilitasi kemitraan antara desa dengan pihak swasta dan lembaga lainnya.
- **Pengawasan**: Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Pemerintah Desa

- **Perencanaan**: Menyusun rencana pembangunan desa yang partisipatif dan visioner.
- **Pelaksanaan**: Melaksanakan program pembangunan secara transparan dan akuntabel.
- **Pemberdayaan**: Memberdayakan masyarakat melalui berbagai program.
- **Pelayanan**: Memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Inovasi**: Mengembangkan inovasi-inovasi untuk memajukan desa.
- **Kolaborasi**: Membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

G. PERAN KITA SEMUA: MEMBANGUN DESA, MEMBANGUN INDONESIA

Masa depan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia adalah tanggung jawab kita semua. Setiap orang memiliki peran, sekecil apa pun.

1. Sebagai Warga Desa

Jika Anda adalah warga desa, Anda adalah subjek utama pembangunan. Peran Anda:

- **Berpartisipasilah** secara aktif dalam musyawarah desa, kegiatan sosial, dan pembangunan.
- **Jaga nilai-nilai luhur** dan kearifan lokal. Ajarkan kepada generasi muda.
- **Kembangkan potensi** Anda. Ikuti pelatihan, tingkatkan keterampilan.
- **Jaga lingkungan** sekitar. Kelola sampah, tanam pohon, lindungi sumber air.
- **Gunakan teknologi** secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal positif.
- **Bersinergi** dengan sesama warga. Gotong royong, saling membantu.

2. Sebagai Perantau

Jika Anda adalah perantau, Anda tetap menjadi bagian dari desa. Peran Anda:

- **Jalin komunikasi** dengan kampung halaman. Jangan putus hubungan.
- **Kirim remitansi** untuk keluarga, tetapi juga untuk pembangunan desa.
- **Berinvestasi** di kampung halaman. Buka usaha, bangun rumah, beli tanah.
- **Bagikan pengetahuan** dan pengalaman yang Anda peroleh di perantauan.
- **Jadi advokat** bagi kepentingan desa di perantauan.

3. Sebagai Akademisi/Peneliti

Jika Anda akademisi atau peneliti, Anda memiliki pengetahuan dan keahlian. Peran Anda:

- **Lakukan riset** tentang desa. Hasilkan pengetahuan yang bermanfaat.
- **Kembangkan teknologi tepat guna** untuk desa.

- **Lakukan pengabdian masyarakat**. Bantu desa mengatasi masalahnya.
- **Publikasikan hasil riset** agar dapat diakses publik.
- **Advokasi kebijakan** berdasarkan temuan riset.

4. Sebagai Aktivis/LSM

Jika Anda aktivis atau pegiat LSM, Anda memiliki pengalaman dan jaringan. Peran Anda:

- **Dampingi masyarakat** dalam proses pemberdayaan.
- **Advokasi kebijakan** yang berpihak pada masyarakat miskin dan marginal.
- **Edukasi masyarakat** tentang hak-hak mereka.
- **Bangun jejaring** dengan berbagai pihak untuk mendukung desa.
- **Kritisi kebijakan** yang tidak adil.

5. Sebagai Pegawai Negeri/Pembuat Kebijakan

Jika Anda pegawai negeri atau pembuat kebijakan, Anda memiliki kekuasaan dan sumber daya. Peran Anda:

- **Buat kebijakan** yang berpihak pada desa.
- **Alokasikan sumber daya** yang memadai.
- **Berikan pelayanan publik** yang prima.
- **Dampingi dan awasi** desa dengan bijak.
- **Dengar aspirasi** masyarakat.

6. Sebagai Wirausaha/Swasta

Jika Anda pelaku usaha, Anda memiliki modal dan jaringan. Peran Anda:

- **Jalin kemitraan** dengan desa. Bina UMKM, jadilah offtaker.
- **Salurkan CSR** yang terintegrasi dengan rencana desa.
- **Ciptakan lapangan kerja** bagi warga desa.
- **Transfer teknologi** dan pengetahuan.
- **Hormati hak-hak** masyarakat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam.

7. Sebagai Jurnalis/Media

Jika Anda bekerja di media, Anda memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Peran Anda:

- **Liput desa-desa** dengan perspektif yang adil dan berimbang.
- **Promosikan desa-desa** yang memiliki potensi.
- **Angkat isu-isu** yang dihadapi desa.
- **Edukasi publik** tentang pentingnya desa.
- **Kawal kebijakan** yang berkaitan dengan desa.

8. Sebagai Konsumen

Setiap hari kita membuat pilihan sebagai konsumen. Pilihan ini bisa berdampak pada desa. Peran Anda:

- **Beli produk lokal**. Dukung UMKM desa.
- **Kunjungi desa wisata**. Nikmati keindahan alam dan budaya desa.
- **Gunakan jasa lokal**. Pilih homestay, pemandu wisata, dan jasa lainnya dari desa.
- **Sebarkan informasi** tentang produk dan potensi desa.

H. REFLEKSI AKHIR: PERJALANAN YANG BELUM SELESAI

Buku ini telah mengajak pembaca untuk menyelami kompleksitas dinamika sosial desa. Kita telah menjelajahi berbagai konsep, teori, dan praktik. Kita telah membahas struktur sosial, nilai dan norma, interaksi, kelembagaan, kepemimpinan, peran berbagai aktor, faktor perubahan, tantangan, dan strategi pemberdayaan. Kita telah melihat contoh-contoh desa yang berhasil dan desa yang masih berjuang. Kita telah membayangkan masa depan desa yang ideal.

Namun, perjalanan ini belum selesai. Buku ini hanyalah sebuah pengantar, sebuah peta untuk memulai perjalanan. Perjalanan sesungguhnya ada di lapangan, di desa-desa, dalam kehidupan sehari-hari. Teori dan konsep hanya berarti jika diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Rencana hanya bermakna jika diimplementasikan. Cita-cita hanya terwujud jika diperjuangkan.

Masa depan desa tidak ditentukan oleh buku ini, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Pilihan untuk peduli atau acuh. Pilihan untuk berpartisipasi atau diam. Pilihan untuk berbagi atau menimbun. Pilihan untuk menjaga atau merusak. Pilihan untuk berubah atau stagnan.

Desa adalah cermin bangsa. Jika desa maju, mandiri, dan sejahtera, maka Indonesia akan maju, mandiri, dan sejahtera. Jika desa tertinggal, terbelakang, dan konfliktual, maka Indonesia pun akan demikian. Membangun desa berarti membangun Indonesia. Memberdayakan desa berarti memberdayakan bangsa. Menjaga desa berarti menjaga masa depan.

Mari kita jadikan desa sebagai rumah bersama yang kita banggakan. Mari kita rawat nilai-nilai luhur yang menjadi warisan leluhur. Mari kita sambut kemajuan dengan bijak, tanpa kehilangan jati diri. Mari kita bergandeng tangan, bersinergi, dan bergerak bersama menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Perjalanan masih panjang. Tantangan masih besar. Namun, dengan semangat gotong royong, dengan keyakinan bahwa perubahan mungkin dilakukan, dengan komitmen untuk terus belajar dan berbagi, kita yakin bahwa masa depan desa yang lebih cerah akan terwujud.

Selamat melanjutkan perjalanan. Desa menanti tangan-tangan yang mau bekerja, hati yang mau peduli, dan pikiran yang mau berinovasi. Mari kita buktikan bahwa desa bukan masa lalu, tetapi masa depan. Masa depan Indonesia yang dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

I. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI DAN REFLEKSI

1. Menurut Anda, skenario mana yang paling mungkin terjadi di desa Anda? Skenario 1 (tergilas), skenario 2 (terjebak), atau skenario 3 (mandiri)? Mengapa?
2. Apa visi Anda untuk desa Anda 20 tahun ke depan? Gambarkan desa ideal versi Anda!
3. Apa potensi terbesar desa Anda yang dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian?
4. Tantangan terbesar apa yang harus diatasi untuk mewujudkan visi tersebut?
5. Bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan masa depan desa?
6. Apakah konsep "smart village" relevan untuk desa Anda? Dimensi mana yang paling mendesak untuk dikembangkan?
7. Apa komitmen pribadi Anda untuk berkontribusi pada masa depan desa, baik desa asal Anda maupun desa pada umumnya?
8. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca lain setelah membaca buku ini?

PENUTUP

MERAJUT ASA, MEMBANGUN DESA, MEMBANGUN INDONESIA

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku *"Dinamika Sosial Tingkat Desa: Memahami Perubahan, Pemberdayaan, dan Pembangunan Masyarakat Desa"* ini akhirnya dapat diselesaikan. Perjalanan panjang melalui tiga puluh bab dalam buku ini telah membawa kita menyelami kedalaman dan kompleksitas denyut nadi kehidupan desa. Kita telah menjelajahi berbagai konsep, teori, dan praktik; membedah struktur sosial, nilai dan norma, interaksi, kelembagaan, kepemimpinan, serta peran berbagai aktor—pemuda, perempuan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Kita juga telah menganalisis faktor-faktor perubahan, tantangan modernisasi, strategi pemberdayaan, hingga memproyeksikan masa depan desa yang ideal.

Buku ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap masih terbatasnya literatur yang membahas secara komprehensif tentang dinamika sosial desa, sekaligus dari harapan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang desa akan melahirkan intervensi pembangunan yang lebih tepat, lebih partisipatif, dan lebih berkelanjutan. Dinamika sosial, dengan segala kompleksitas dan keindahannya, bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah energi yang jika dikelola dengan bijaksana akan menjadi motor penggerak kemajuan. Memahami dinamika sosial desa berarti memahami bagaimana nilai-nilai bertarung, bagaimana kepentingan bernegosiasi, dan bagaimana masa depan dibangun dari interaksi sehari-hari warganya.

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan hakiki:

Pertama, desa adalah entitas hidup dengan denyut nadinya sendiri, di mana perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ia bukanlah objek pembangunan yang pasif, melainkan subjek yang memiliki potensi, dinamika, dan arah perubahan sendiri. Memahami dinamika sosial desa bukanlah sekadar tuntutan akademis, melainkan sebuah keharusan bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam pembangunan desa.

Kedua, masyarakat desa adalah subjek utama, bukan objek, dari pembangunan. Partisipasi aktif mereka, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya perubahan yang bermakna dan berkelanjutan. Masyarakat bukanlah objek yang pasif menerima program, melainkan subjek yang menentukan arah perubahan di wilayahnya. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda,

perempuan, dan seluruh elemen masyarakat adalah aktor-aktor kunci yang bersama-sama menentukan arah perubahan.

Ketiga, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan—pemerintah desa, masyarakat, swasta, LSM, perguruan tinggi, dan pihak lainnya—adalah fondasi utama dari pembangunan yang berhasil. Tidak ada satu pihak pun yang mampu membangun desa sendirian. Kolaborasi yang setara, saling menguntungkan, dan berorientasi pada tujuan bersama adalah kunci keberhasilan.

Keempat, pembangunan desa harus berpijak pada nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional, sambil tetap terbuka terhadap kemajuan. Desa yang maju adalah desa yang mampu memadukan tradisi dan modernitas, yang tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas harus tetap dijaga dan diperkuat, bahkan di tengah perubahan yang cepat.

Kelima, kemandirian desa adalah tujuan akhir dari pembangunan. Kemandirian bukan berarti isolasi, tetapi kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, mengelola potensi yang dimiliki, dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, berdaulat secara politik, ekonomi, dan budaya, serta menjadi lumbung pangan, penyangga ekologi, dan pusat pelestarian budaya bagi bangsa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak aspek yang belum terbahas, masih banyak contoh yang belum terangkum, dan masih banyak perspektif yang belum terakomodasi. Dinamika sosial desa begitu kaya dan kompleks, tidak mungkin ditangkap sepenuhnya dalam satu buku. Namun, penulis berharap buku ini dapat menjadi sumbangan kecil bagi khazanah pengetahuan tentang desa, serta menjadi pemantik diskusi, refleksi, dan aksi nyata bagi para pembaca.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para akademisi yang karya-karyanya menjadi referensi utama dan fondasi teoretis bagi buku ini. Terima kasih kepada para praktisi dan pegiat desa yang pengalaman lapangannya sangat berharga dalam memperkaya contoh-contoh konkret. Terima kasih kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan seluruh warga desa yang telah menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Terima kasih kepada keluarga dan rekan sejawat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kritik membangun.

Harapan penulis, buku ini tidak hanya berhenti sebagai bacaan, tetapi menjadi pemantik diskusi, refleksi, dan aksi nyata. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial desa, kita semua dapat berkontribusi, sekecil apa pun, dalam mewujudkan masa depan desa yang lebih cerah—desa yang maju tanpa kehilangan jati diri, mandiri dalam ekonomi, kokoh dalam sosial, dan lestari dalam budaya. Karena desa adalah rumah kita bersama, dan masa depan desa adalah masa depan kita semua. Masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera sangat bergantung pada kemajuan desa-desanya.

Akhir kata, selamat membaca, selamat merenung, dan selamat berkarya untuk desa Indonesia. Mari kita bergandengan tangan, merawat dinamika, dan membangun desa, membangun Indonesia. Perjalanan masih panjang, tantangan masih besar, tetapi dengan semangat gotong royong, dengan keyakinan bahwa perubahan mungkin dilakukan, dan dengan komitmen untuk terus belajar dan berbagi, kita yakin bahwa masa depan desa yang lebih baik akan terwujud.

Salam dari penulis,

Slamet Riyadi

"Desa bukanlah masa lalu yang statis, tetapi masa depan yang dinamis. Di sanalah akar budaya kita tumbuh, di sanalah masa depan bangsa kita dibangun."

[DAFTAR PUSTAKA]

Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan kemandirian desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu kajian dalam perspektif sosiologi. *Journal Sosio Informa*, 1(2), 181-196.

Chambers, R. (2005). *Ideas for development*. Earthscan.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sajogyo. (1992). *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suharto, E. (2005). *Pembangunan, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Tohari, A. (2025). *Sosiologi Pembangunan Desa (Teori, Dinamika Sosial, dan Transformasi Pedesaan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zid, M., & Alkhudri, A. T. (2016). *Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal-jurnal terkait dari IPB University seperti Sodality, Jurnal Komunikasi Pembangunan, dan Jurnal Penyuluhan.

Penelitian dan artikel dari berbagai sumber kredibel lainnya yang relevan.

Artikel dan publikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.